



LAPORAN KINERJA

Pemerintah Provinsi Jambi

TAHUN 2023



JAMBI MANTAP

2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamualaikum wr. wb.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2023 dalam rangka perwujudan visi Provinsi Jambi yaitu 'Jambi MANTAP, Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT. LKjIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan *progress* pembangunan Provinsi Jambi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.



LKjIP Tahun 2023 ini, menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja berikut efisiensi penggunaan anggaran. Alhamdulillah, secara umum, rata-rata target kinerja mencapai **100,30%**. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi yang ingin dicapai melalui penetapan sasaran strategis secara umum dapat terpenuhi sesuai harapan.

Semoga penyusunan LKjIP Tahun 2023 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja pembangunan Provinsi Jambi di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain.

Terima kasih.

Wassamulaikum wr. wb.

Jambi, Maret 2024

GUBERNUR JAMBI,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen. M.T. Haryono No. 02 Telanaipura Jambi - 36122
Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Jambi. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jambi, 4 Maret 2024

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. AGUS HERIANTO, SH, QGIA, CGCAE, QRMF
Pembina Utama Madya
NIP. 19690818 199703 1 004

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Diagram	v
Daftar Tabel	vi
BAB I Pendahuluan	1
I Latar Belakang	1
II Maksud dan Tujuan	2
III Gambaran Umum Organisasi	3
3.1. Kondisi Geografis Daerah	3
3.1.1. Letak Wilayah dan Topografi	3
3.1.2. Potensi Wilayah	4
3.2. Luas dan Batas Wilayah	5
3.2.1. Aspek Demografi	6
3.3. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi	6
3.4. Data Kepegawaian	7
IV Permasalahan dan Isu Strategis	8
4.1. Permasalahan Pembangunan	8
BAB II Perencanaan Kinerja	14
BAB III Akuntabilitas Kinerja	19
BAB IV Penutup	108
Lampiran	vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Provinsi Jambi	3
Gambar 1.2. Obyek Wisata Gunung Kerinci dan Taman Nasional Berbak	4
Gambar 1.3. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi tahun 1990 – 2018 (GGP, 2019)	11
Gambar 2.1. Logika Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jambi	15
Gambar 3.1. Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	22
Gambar 3.2. Capaian RB General dan RB Tematik	23
Gambar 3.3. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)	43
Gambar 3.4. IPM Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2023	100

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2021-2023	28
Grafik 3.2.	Trend Perkembangan Indesk Kearsipan Tahun 2000-2023	30
Grafik 3.3.	Perkembangan Capaian Akses Terhadap Air Minum Layak Provinsi Jambi	57
Grafik 3.4.	Trend Peningkatan Internet Desa	60
Grafik 3.5.	Trend Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	71
Grafik 3.6.	Peningkatan Luasan Pemulihan dan Perlindungan SDA	71
Grafik 3.7.	Luas Izin Perhutanan Sosial yang Dikelola Masyarakat	72
Grafik 3.8.	Persentase Luas Tanam Lahan Kritis 207-2023	72
Grafik 3.9.	Trend Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2023	79
Grafik 3.10.	Ketersediaan Protein (Ketahanan Pangan)	83
Grafik 3.11.	Umur Harapan Hidup Saat Lahir 2020-2023	99
Grafik 3.12.	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	99
Grafik 3.13.	Pengeluaran Riil PerKapita yang Disesuaikan	99
Grafik 3.14.	Perkembangan IDG	109
Grafik 3.15.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (IPG)	110

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1. Capaian Nilai Variabel Kematangan Perangkat Daerah	25
Diagram 3.2. Capaian Nilai SAKIP per Komponen	28
Diagram 3.3. Nilai Rata-Rata IKM	36
Diagram 3.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2023	48
Diagram 3.5. Capaian Kinerja IKLH	61
Diagram 3.6. Indeks Kualitas Udara	63
Diagram 3.7. IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD 2023	66
Diagram 3.8. Perbandingan Target IKAL dengan RPJMD	67
Diagram 3.9. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan	77
Diagram 3.10. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	78
Diagram 3.11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2023	79
Diagram 3.12. Skor PPH Tahun 2023	83
Diagram 3.13. Ketersediaan Energi 2023 KKal/Kap/Hr	83
Diagram 3.14. IPM 2020-2023	98
Diagram 3.15. IPM Menurut Kabupaten/Kota	101
Diagram 3.16. Capaian dan Pertumbuhan UHH Kabupaten/Kota	103
Diagram 3.17. Capaian dan Pertumbuhan Rata-Rata RLS 2023	104
Diagram 3.18. Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran PerKapita 2023	105
Diagram 3.19. Trend Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Jambi	109
Diagram 3.20. Persentase Penduduk 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah	112
Diagram 3.21. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keAtas Memperoleh Pendidikan	112
Diagram 3.22. Persentase Penduduk yang Mengakses Komputer Menurut Jenis Kelamin	113
Diagram 3.23. Persentase Penduduk yang Mengakses Internet	113
Diagram 3.24. Persentase Penduduk 15 Tahun keAtas yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	114
Diagram 3.25. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin	114
Diagram 3.26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur	115
Diagram 3.27. Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin	116
Diagram 3.28. Rasio Penduduk 15 Tahun keAtas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk ...	116
Diagram 3.29. Rasio Penduduk 15 Tahun keAtas yang Bekerja Terhadap Penduduk Berusia 15 Tahun keAtas	117
Diagram 3.30. Persentase Pekerja Berstatus Kawin	118
Diagram 3.31. Persentase Pekerja Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Sebagai Kepala Rumah Tangga	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Provinsi Jambi	5
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023	17
Tabel 2.2. Rencana Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023	18
Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja	20
Tabel 3.2. Data Capaian Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 3.3.	
Tabel 3.3. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2023	35
Tabel 3.4. PDRB Atas Harga Berlaku dan Harga Konstan	45
Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB	45
Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi d Sumatera ...	46
Tabel 3.7. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera	49
Tabel 3.8. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan	49
Tabel 3.9. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan Beserta Kontribusinya	50
Tabel 3.10. Garis Kemiskinan PerKapita Rumah Tangga Miskin	50
Tabel 3.11. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Pelarahan Kemiskinan (P2)	50
Tabel 3.12. Persentase Rumah Tangga Menurut Kab/Kota, Sumber Air Bersih, Akses Air Bersih ...	57
Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak	58
Tabel 3.14. Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Batang Hari	65
Tabel 3.15. Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Pangabuan	65
Tabel 3.16. Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Lintas	65
Tabel 3.17. Capaian Kinerja IKEG 2021-2023	68
Tabel 3.18. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja	76
Tabel 3.19. Karakteristik Pengangguran 2023	78
Tabel 3.20. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kab/Kota	80
Tabel 3.21. Cadangan Beras Provinsi Jambi Tahun 2023	83
Tabel 3.22. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Dimensi	98
Tabel 3.23. IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota 2020-2023	101
Tabel 3.24. Tingkat Efisiensi Anggaran Per Sasaran	122

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi Pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai gambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggung-jawaban Pemerintah Provinsi Jambi kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023. Adapun tujuan dari penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2023, menggambarkan upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.



III. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

3.1. Kondisi Geografis Daerah

3.1.1. Letak Wilayah dan Topografi

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0°45' sampai 2°45' lintang selatan dan antara 101°10' sampai 104°55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.

Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle).

Gambar 1.1. Peta Provinsi Jambi



Luas Wilayah Provinsi Jambi sebesar 53.435 Km² dengan luas daratan 50.160,05 KM² dan luas perairan sebesar 3.274,95 KM² terdiri dari :

1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 KM² (6,69%)
2. Kabupaten Merangin 7.679 KM² (15,31%)
3. Kabupaten Sarolangun 6.184 KM² (12,33%)
4. Kabupaten Batanghari 5.804 KM² (11,57%)
5. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 KM² (10,62%)
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.445 KM² (10,86%)
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4.649,85 KM² (9,27%)
8. Kabupaten Tebo 6.461 KM² (12,88%)
9. Kabupaten Bungo 4.659 KM² (9,29%)

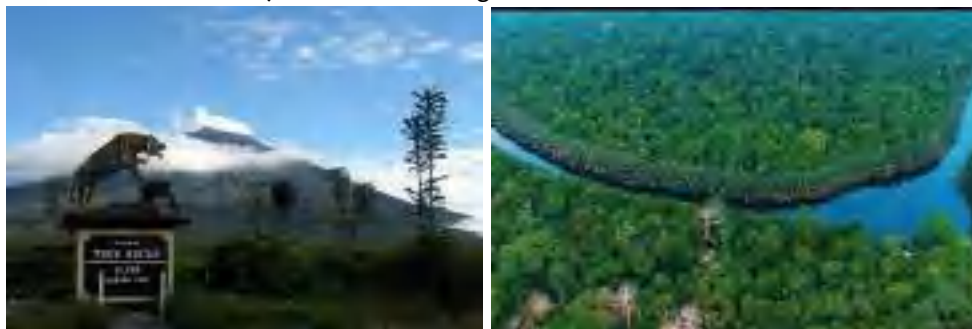
10. Kota Jambi 205,43 KM² (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 KM² (0,78%)

3.1.2. Potensi Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- a. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan)
- b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Gambar 1.2. Obyek Wisata Gunung Kerinci dan Taman Nasional Berbak



Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang merupakan wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi. Adapun kawasan-kawasan strategis yang berada di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
2. Kawasan strategis Metropolitan Jambi dan sekitarnya.
3. Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.
4. Kawasan strategis Bungo - Tebo
5. Kawasan strategis Merangin - Sarolangun
6. Kawasan strategis Sungai Penuh dan sekitarnya

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci. Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Lindung

112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berpotensi terhadap bencana Geologi yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasen, longsor, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan dengan wilayah terjadinya kebakaran yang berada pada Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

3.2. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435,92 km yang terdiri dari daratan seluas 48.989,98 km² dan lautan 4.445,94 km² dengan panjang garis pantai 223,025 km. Wilayah daratan terluas di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin seluas 7.508 km² atau 15,31 % dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing seluas 6.205 km² dan 5.948 km², sedangkan rincian luas perkabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kerinci	3.334,09	18	287
2	Merangin	7.508,23	24	315
3	Sarolangun	5.948,79	10	158
4	Bungo	4.673,16	17	153
5	Tebo	6.205,81	12	112
6	Batanghari	6.536,86	8	124
7	Musaji Jambi	5.321,67	11	155
8	Tanjung Jabung Barat	Darat 4.990,95	13	134
		Laut 384,21		
9	Tanjung Jabung Timur	Darat 4.445,98	11	93
		Laut 4.061,73		
10	Kota Sungai Penuh	353,75	8	69
11	Kota Jambi	172,26	11	62
Luas Daratan		48.989,98		
Luas Lautan		4.445,94		
Total		53.435,92	143	1.562

Sumber : Jambi Dalam Angka 2023, 2023

Jumlah kecamatan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 143 kecamatan, dengan kabupaten dengan jumlah kecamatan terbesar adalah kabupaten Merangin yaitu sebanyak 24 kecamatan, diikuti oleh Kabupaten Kerinci pada urutan kedua dengan jumlah kecamatan sebanyak 18 kecamatan. Sementara jumlah desa kelurahan adalah sebanyak 1.562 desa/kelurahan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci sebanyak 287 desa/kelurahan.

3.2.1. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Semester I Tahun 2022 yang dirilis oleh BPS adalah sebanyak 3.642.763 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 66,5 jiwa/km dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 2.961 jiwa/km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 257 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2010-2022 adalah sebesar 1,38 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 1,86 persen dan terendah di Kabupaten Merangin sebesar 0,54 persen.

3.3. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

Struktur organisasi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan merupakan struktur yang telah dikondisikan sesuai amanat Presiden tentang penyederhanaan birokrasi. Secara total, jumlah perangkat daerah terdiri dari 22 Dinas Daerah, 8 Badan Teknis, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Inspektorat Provinsi.

Nomenklatur Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri atas ;
 1. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi
 2. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
 3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi
 4. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi
 5. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi
 6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi
 7. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
 8. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi
 9. Biro Umum Setda Provinsi Jambi
- b. Sekretariat DPRD Provinsi
- c. Inspektorat Daerah Provinsi
- d. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
 2. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
 3. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
 4. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jambi
 5. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi
 6. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jambi
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
 8. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi

9. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi
 10. Dinas Sosial, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
 11. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
 12. Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi
 13. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jambi
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jambi
 15. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
 16. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi
 17. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
 18. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi
 19. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
 20. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
 21. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi
 22. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi
- e. Badan Daerah Provinsi, terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
 2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
 4. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
 6. Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
 7. Badan Kesbangpol Provinsi Jambi
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

3.4. Data Kepegawaian

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi per Desember 2023 pegawai Pemerintah Provinsi Jambi berjumlah 9.979 orang. Secara komposisi, jumlah tersebut didominasi oleh generasi X dengan rentang usia 41-55 tahun yaitu sebanyak 63,04% sementara generasi Z merupakan komposisi paling minor yaitu sebanyak 0,85%. Kondisi ini bermakna bahwa Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan perubahan mindset dan cultural set organisasi untuk mendukung pemberian pelayanan publik secara lebih adaptif. Terutama mengingat mayoritas penerima layanan yang merupakan generasi milenial dan generasi Z yang secara karakteristik cenderung lebih terbuka dan berorientasi teknologi informasi. Perubahan pun penting dalam mendukung perwujudan Pemerintah Provinsi Jambi yang agile untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir ini, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

4.1.1. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

Merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan permasalahan pembangunan yang mengemuka maka saat ini masih terdapat masalah yang dihadapi oleh Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bagian berikut memaparkan beberapa indikasi permasalahan ini, yaitu :

1. Belum diterapkannya prinsip aturan hukum dengan baik. Pemerintah belum menjamin kepastian tegaknya hukum terhadap beberapa hal yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hingga kini masih berlangsung aktivitas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti perambahan kawasan hutan, pembakaran hutan dan lahan untuk kepentingan budidaya pertanian dan aktivitas penambangan ilegal.
2. Prinsip daya tanggap yang baik terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi. Daya tanggap yang dibutuhkan adalah terkait dengan :
 - a. Tata guna lahan (*land use planning*), yaitu struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah dan pemeliharannya (UUPA No.5 tahun 1960). Pemerintah Provinsi Jambi perlu menanggapi dengan cepat masalah ini dikarenakan basis

perekonomian wilayahnya terletak pada sektor-sektor yang memanfaatkan sumber daya lahan (pertanian, kehutanan dan pertambangan) serta masih tingginya konflik lahan. Dikhawatirkan jika tidak ditangani dengan segera akan mengakibatkan situasi yang kontra produktif bagi para pelaku usaha serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat pada umumnya.

- b. Kapasitas fiskal dan pendanaan pembangunan, yaitu separuh anggaran Pendapatan Daerah masih bersumber dari dana perimbangan. Hal ini berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan dasar. Penggalan sumber pendanaan diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dapat mendanai pembangunan wilayah sesuai tujuan dan sasaran yang saat ini kontribusinya relatif rendah merupakan masalah dalam terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

3. Belum diterapkannya prinsip visi strategis dengan baik, terlihat dari belum dilakukannya penataan lahan dengan cepat sebagaimana yang telah dijelaskan serta masih minimnya upaya membangun iklim investasi yang mendukung penguatan infrastruktur perekonomian, khususnya investasi sektor industri pengolahan berbasis komoditas lokal dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode manakala Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi tahun 2005-2025 ditetapkan.

4.1.2. Terbatasnya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Perekonomian

Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Provinsi Jambi pada tahun 2020, juga dialami oleh Provinsi lainnya di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di Provinsi Jambi ini juga masih lebih baik dari nasional, demikian pula indeks ketimpangan pendapatan (indeks gini) masih tetap memperlihatkan tren membaik. Namun demikian

jika melihat tren lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi masih berada di bawah nasional, sehingga perlambatan ini juga perlu diintervensi dengan baik.

Permasalahan infrastruktur dasar lainnya yang masih terbatas adalah penataan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan hidup dan penegakan aturan pemanfaatan ruang. Khusus terkait pelayanan dasar, dibutuhkan tata ruang kawasan permukiman penduduk dalam rangka mitigasi bencana, khususnya bencana banjir dan longsor terkait karakter topografi dan hidrologi Provinsi Jambi. Ketersediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebagai pendorong bergerakinya sektor pertanian pangan dan pengendalian banjir juga masih terbatas, disamping peningkatan konektivitas antar daerah sebagai pembangkit aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat.

Penatagunaan lahan untuk kepastian hak pemilikan dan/atau pengelolaan lahan masih menjadi faktor yang mendorong terjadinya masalah ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Konflik perebutan hak atas pengelolaan sumber daya lahan, yang merupakan basis perekonomian wilayah, menjadi sumber konflik paling tinggi di wilayah Provinsi Jambi hingga kini.

Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan, juga masih merupakan masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi juga menjadi

masalah terkait dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fungsi infrastruktur.

Infrastruktur pembiayaan usaha, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha skala mikro dan kecil juga masih menjadi permasalahan didalam memacu laju pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini terkait dengan masalah keterbatasan infrastruktur ekonomi yang berbasis sistem sosial masyarakat, dalam bentuk kelembagaan koperasi, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan dan cakupan pelayanannya.

4.1.3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat selama periode pembangunan lima tahun terakhir, namun capaian tersebut masih dibawah nasional dan Provinsi Jambi masih menghadapi masalah rendahnya kualitas SDM. Selain itu capaian IPM juga belum merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Jambi sehingga kesenjangan masih cukup tinggi.

Pada aspek pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. RLS hingga tahun 2020 di Provinsi Jambi adalah 8,55 tahun, ini berarti rata-rata penduduk Provinsi Jambi hanya mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau kelas 2 SMP. Walaupun pada dasarnya angka ini lebih baik dari nasional, namun capaian tersebut tergolong rendah dalam mendorong daya saing sumber daya manusia. Kondisi ini berimbas pada aspek ketenagakerjaan, yaitu menyebabkan rendahnya akses masyarakat Provinsi Jambi ke lapangan usaha formal yang memiliki tingkat

pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan lapangan usaha informal.

Hingga kini, masyarakat Provinsi Jambi masih dominan bekerja sebagai pekerja informal di sektor pertanian dan jasa, dan bahkan terjadi pengangguran semu (*false unemployment*) karena berstatus sebagai tenaga kerja tidak dibayar (*unpaid labor*) pada usaha yang dimiliki oleh keluarga atau kerabat di lapangan usaha pertanian dan jasa skala mikro-kecil. Hal ini juga berhubungan dengan isu revitalisasi SMK, dimana Provinsi Jambi masih kekurangan guru produktif dan keterbatasan peralatan praktek serta guru yang memahami penggunaan peralatan praktek. Selain itu jurusan dan peluang kerja yang belum link match serta pembelajaran yang lebih banyak teori dibandingkan praktek menambah permasalahan keterampilan pada lulusannya, sehingga kurang terserap di dunia kerja.

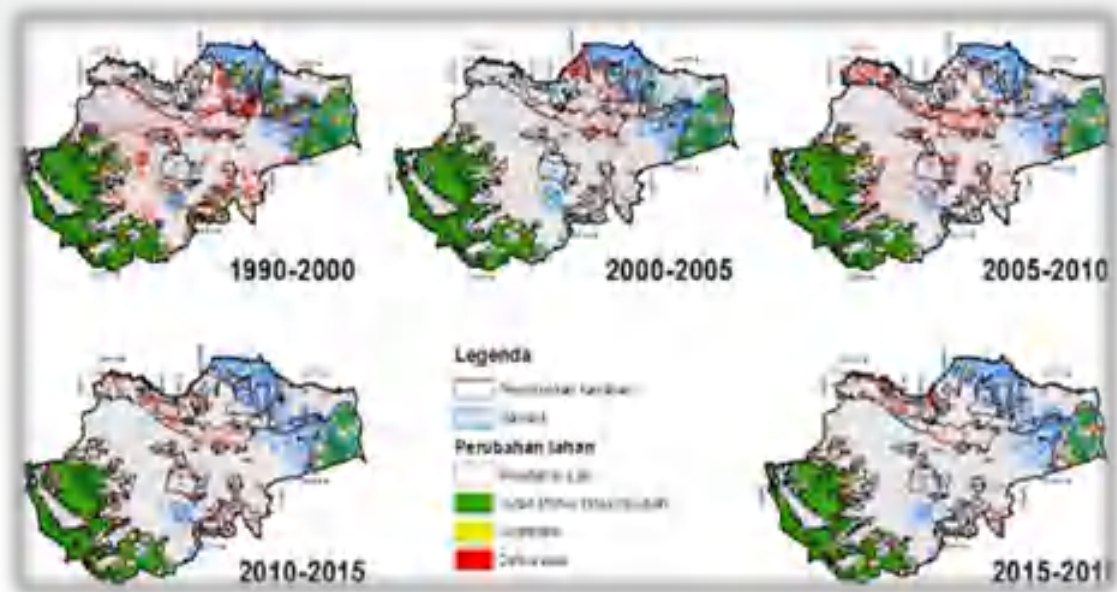
Rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat pada rendahnya akses ke lapangan usaha formal dan berpendapatan relatif tinggi, pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya keberdayaan masyarakat untuk mengakses aspek pendukung kesejahteraan lainnya dan semakin menurunkan tingkat kualitas SDM masyarakat Provinsi Jambi itu sendiri, salah satunya adalah akses kepada kesehatan. Pada usia harapan hidup, dalam 5 tahun terakhir, capaian Provinsi Jambi terlihat meningkat, namun masih dibawah nasional. Usia harapan hidup penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2016-2020 terus menunjukkan peningkatan dimana usia harapan hidup dari 70,71 tahun pada 2016 meningkat menjadi 71,16 tahun pada 2020.

4.1.4. Degradasi Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi juga masih menghadapi permasalahan di bidang lingkungan hidup. Kondisi ini nampak dari indeks kualitas lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi saat ini yang menunjukkan indeks kualitas air masih relatif rendah. Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (*water catchment area*) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan.

Masih terbatasnya infrastruktur perekonomian yaitu jalan pengangkutan/ kargo komoditas serta pelabuhan untuk distribusi hasil produksi dari wilayah Provinsi Jambi juga berakibat pada terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan bahan bakar fosil, baik langsung maupun tidak langsung, disamping menyebabkan rendahnya daya saing Provinsi Jambi dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan KLHS sektor energi Provinsi Jambi, kontributor emisi selama 2011-2017 dari pemanfaatan energi didominasi oleh kegiatan-kegiatan pada bidang industri (33%), bidang transportasi (26%) dan bidang energi (penyediaan energi dan pemanfaatan energi) sebesar 13%. Sementara emisi gas rumah kaca pada sektor limbah tahun 2020 sebesar 8.066,94 ton CO_e, (1,41%). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2018 sebesar 10.000 ton CO₂e (1,75%).

Gambar 1.3. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi tahun 1990 – 2018 (GGP, 2019)



Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Persentase penurunan emisi GRK tahun 2020 hanya 80,57% dibandingkan tahun 2019. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat emisi gas rumah kaca ini antara lain timbunan sampah domestik/industri, serta masih minimnya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan. Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kerapatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Masih adaya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang masih belum seimbang. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas jasa lingkungan yang dapat diberikan, sementara pada area kawasan budidaya masih banyak sekali area yang belum dioptimalkan fungsinya untuk berbagai penggunaan.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jambi pada periode tahun 2021-2026 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) belum optimal

Reformasi Birokrasi diperlukan untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Dengan demikian maka akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Terkait dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi, serta memperhatikan pilar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2019-2024, maka upaya reformasi birokrasi di Provinsi Jambi difokuskan untuk pencapaian beberapa hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan pendidikan
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan
 - c. Penanganan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan pemukiman tangguh bencana,
 - d. Penataan ruang yang berdasarkan potensi lokal dan daya dukung lingkungan hidup
 - e. Penatagunaan lahan dan penertiban kawasan dan lahan terlantar
 - f. Penguatan iklim investasi infrastruktur yang mendukung penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi hijau
 - g. Penertiban aktivitas yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - h. Peningkatan kemandirian keuangan daerah.
 - i. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara
 - j. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- ### 2. Daya Saing Ekonomi masih rendah sementara daya dukung lingkungan semakin menurun
- Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 diharapkan bahwa pada akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026, yang merupakan tahap keempat atau terakhir dari RPJPD Provinsi Jambi periode ini telah dicapai kondisi sebagai berikut :
- a. Terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah;
 - b. Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah
 - c. Penguatan sektor industri
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi periode tahun 2021-2026 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jambi tahun 2013-2033 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengarahkan rencana pengembangan struktur ruang agar terjadi konektivitas antar pusat-pusat kegiatan, mulai dari bagian barat, tengah hingga bagian timur dan berporos pada ibukota provinsi (Kota Jambi).
- Selain itu diarahkan pembangunan sarana-prasarananya sesuai dengan skala kegiatannya. Dalam peraturan tersebut juga dilakukan arahan

pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pada kawasan lindung, diarahkan berbagai program yang bertujuan memantapkan fungsi kawasan, diantaranya : rehabilitasi dan konservasi lahan, pengendalian pemanfaatan lahan pada kawasan lindung, pemeliharaan fungsi hidrologis pada kawasan yang memberikan fungsi perlindungan pada kawasan bawahannya hingga perwujudan kawasan konservasi baru dan kawasan rawan bencana. Pada kawasan budidaya, diarahkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perekonomian Provinsi Jambi hingga kini masih ditopang oleh sektor pertanian dan ada kecenderungan mulai bergeser pada sektor non pertanian, khususnya sektor perdagangan dan jasa. Situasi ini dapat mengindikasikan bahwa sektor pertanian semakin tidak mendukung keberlanjutan penghidupan masyarakat, di sisi lain akses kepada pekerjaan formal di sektor-sektor non-pertanian juga terbatas terkait dengan rendahnya kualitas pendidikan SDM sebagian besar masyarakat. Untuk itu, daya saing ekonomi dan lingkungan hidup merupakan isu strategis pembangunan Provinsi Jambi dengan fokus pada :

- a. Peningkatan produktivitas lahan pertanian yang berkelanjutan.
- b. Penguatan sistem ekonomi kerakyatan juga perlu difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi dengan anggotanya.
- c. Pembangunan infrastruktur pengangkutan komoditas hasil produksi rakyat maupun sektor lainnya (pertambangan).
- d. Pembangunan dan peningkatan status Pelabuhan Ujung Jabung.
- e. Pembangunan kawasan strategis ekonomi industri pengolahan berbasis komoditas sektor pertanian.
- f. Penguatan infrastruktur ekonomi digital.
- g. Penataan ruang dan tata guna tanah.
- h. Kebutuhan kejelasan alokasi lahan produktif untuk komoditas strategi yang lebih baik

3. Kualitas Sumber Daya Manusia belum baik dan merata

Rendahnya kualitas SDM hingga kini menjadi penyebab pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan sebagian penduduk di wilayah Provinsi Jambi. Pada bidang pendidikan, angka rata-rata lama sekolah yang rendah mengindikasikan tidak mampunya sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan, dan pada akhirnya memilih untuk menjadi tenaga kerja pada sektor informal dan/atau usaha-usaha yang dimiliki keluarga atau kerabat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk memperbanyak dan memperkuat institusi - institusi pendidikan menengah kejuruan yang menciptakan manusia berdaya saing untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yang saat ini mulai bergeser dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian seperti sektor perdagangan dan jasa.

Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud difokuskan melalui inovasi kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, sehingga terjadi pembangunan yang inklusif di bidang pendidikan, yaitu berupa peningkatan kerjasama dengan para pelaku usaha maupun stakeholder lainnya, sehingga lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat bekerja pada sektor-sektor formal yang mendukung terwujudnya industri hilir berbasis penguatan ekonomi kerakyatan.

Dari sisi peningkatan pelayanan kesehatan terutama difokuskan pada program-program yang dapat menekan angka kematian ibu, *stunting*, kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk merokok bagi kesehatan dan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Fasilitas-fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan puskesmas pembantu beserta tenaga medisnya difokuskan pada hal-hal tersebut.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

I. Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan merupakan tahun pertama periode Jambi MANTAP yang bermakna perkembangan pembangunan berada di awal visi misi RPJMD baru menuju pencapaian target di akhir tahun RPJMD 2026. Berbagai macam strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran terutama pada pelaksanaan program/kegiatan benar-benar selektif dilakukan.

Mengusung visi Provinsi Jambi yang tetap konsisten dalam mewujudkan 'Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT'. Inovasi dan kolaborasi menjadi metode yang esensial dalam penyelenggaraan pembangunan di tengah keterbatasan yang dihadapi terutama berkaitan dengan persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Secara konsep, Jambi MANTAP memiliki makna :

Jambi Maju	: Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
Jambi Aman	: tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.
Jambi Nyaman	: Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
Jambi Tertib	: Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
Jambi Amanah	: Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.
Jambi Profesional	: Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Secara umum, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki tiga misi. Lebih rinci berdasarkan urusan sebagai berikut :

Misi 1 memuat kondisi : **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.

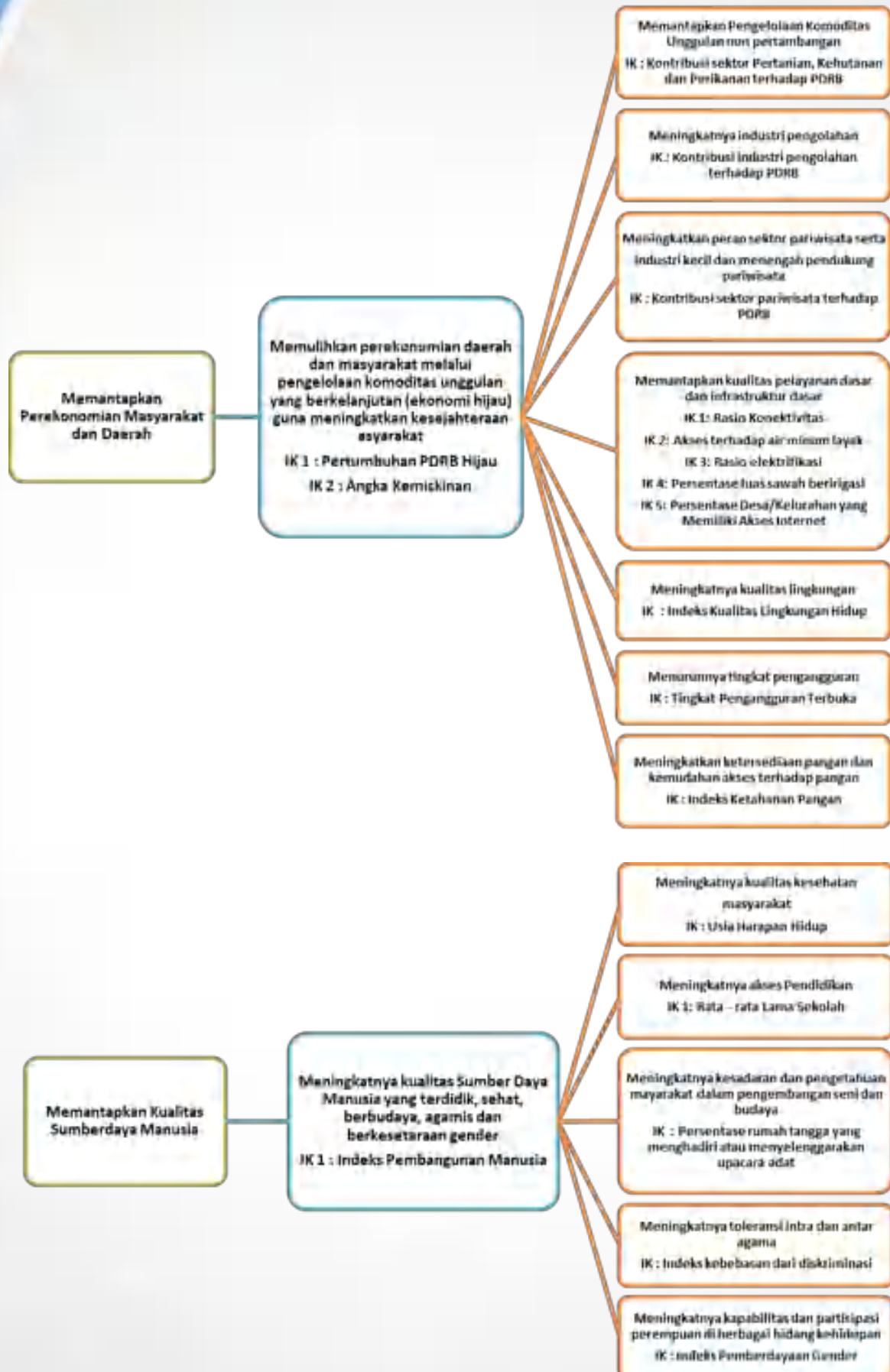
Misi 2 memuat kondisi **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

Misi 3 berkaitan dengan kondisi **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender. Selanjutnya, ketiga misi tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) tujuan dengan 4 (empat) indikator, 12 (dua belas) sasaran strategis, dan 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan digambarkan pada logic kinerja utama sebagai kinerja berikut :

Gambar 2.1. Logika Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi





Dari beberapa indikator tujuan maupun sasaran maka telah ditetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sekaligus ditetapkan menjadi perjanjian kinerja Tahun 2023 sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

II. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Kinerja Utama yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	4,75%
		Tingkat Kemiskinan	7,60%
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	54
		Akses terhadap Air Minum Layak	83,92%
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,43
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO ₂ eq)	3,348 juta ton CO ₂ eq
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50%
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	72%
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	72,62
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	69,02

III. Rencana Anggaran Tahun 2023

Sesuai perubahan yang terjadi dalam RKPD Provinsi Jambi, perubahan dilakukan pula terhadap rencana pendapatan dan anggaran belanja daerah Provinsi Jambi Tahun 2023. Dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 14 November 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Jambi menunjukkan belanja daerah sebesar Rp. 4.681.703.850.610,- bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel 2.2. Rencana Belanja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023

Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
4.681.703.850.610,-	4.605.217.044.542,11	98,37%
Bertambah/Berkurang	76.486.806.068,56	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2023, 2024

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam mereview kinerja organisasi pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran diukur berdasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian realisasi Kinerja	Kode Warna
1.	91 ≥100	Sangat tinggi	
2.	76 s.d. 90,99	Tinggi	
3.	66 s.d. 75,99	Sedang	
4.	51 s.d. 65,99	Rendah	
5.	s.d. 50,99	Sangat rendah	

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, diolah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2023.

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023 tercermin dari capaian 8 Tujuan/Sasaran strategis RPJMD dan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2023 memperoleh persentase capaian “sangat tinggi” sebesar 100%. Artinya, seluruh indikator kinerja memperoleh capaian kinerja diatas 91% dengan kategori sangat tinggi. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Data Capaian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	4,75	4,75	100
		Tingkat Kemiskinan	7,60	7,58 (Maret)	100,26
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	54	54,05	100,09
		Akses terhadap Air Minum Layak	83,92	80,02	95,35
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	100	94,88	94,88
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,43	68,15	94,09
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO ₂ eq)	3,348 juta ton CO ₂ eq	4 juta ton CO ₂ eq	119,47
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50%	4,53	99,34
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	72%	72,17	100,24
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	72,62	73,73	101,53
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	69,02	67,86	98,32

Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2023 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang yang tentunya akan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1. Persentase Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023



Dari 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 7 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi indikator kinerja sebagaimana tabel di atas, maka seluruh indikator atau sebesar 100% masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi dengan rata-rata capaian secara keseluruhan sebesar 100,33.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS 1 :

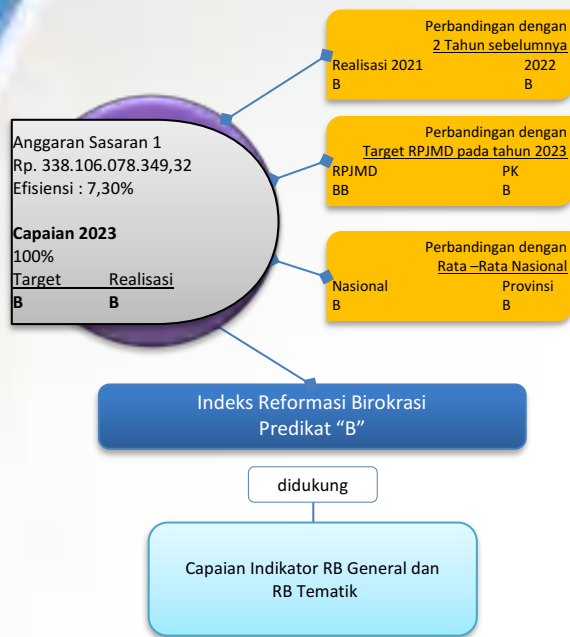
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas

IK ; INDEKS REFORMASI BIROKRASI



Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

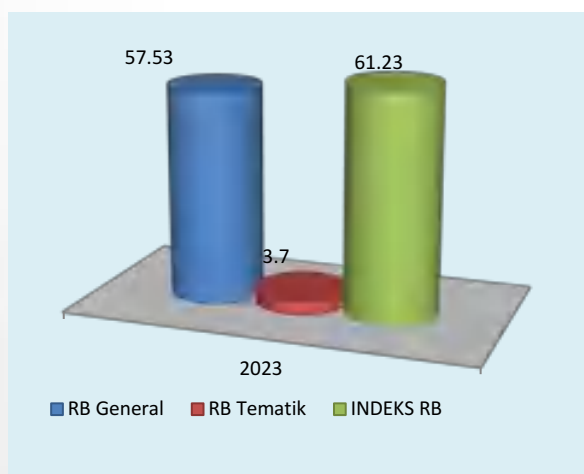
Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tidak terlepas dari berbagai komponen pendukung yang turut memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian secara umum.

Sebagaimana hasil evaluasi terhadap implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023 terdapat berbagai variabel pendukung diantaranya dilihat dari capaian RB General dan RB Tematik.

Gambar 3.2. Capaian RB General dan RB Tematik



Sumber: Kemenpan RB Data hasil Indeks RB 2023

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama yang harus diwujudkan dan menggambarkan keberhasilan misi 1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023 adalah sebesar **61,23** dengan kategori B. Evaluasi ini dilakukan guna menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi RB secara nasional mengalami perubahan kebijakan dengan mempedomani Peraturan Menteri PAN RB Nomor : 9 tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi. Evaluasi RB tahun 2023 menitikberatkan pada RB General dan RB Tematik yang diukur berdasarkan capaian Komponen dan Sub Komponen pada 41 Indikator penilaian. Capaian indikator RB General dan RB Tematik Pemerintah Provinsi Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut :

RB General

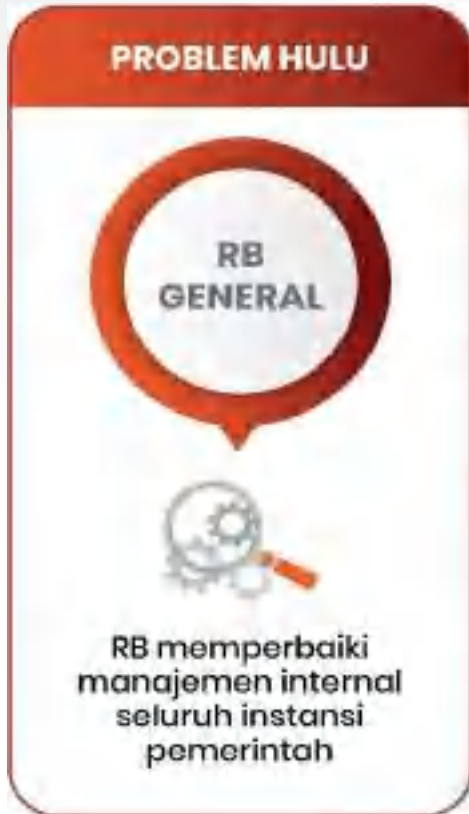
Strategi Pelaksanaan RB General :

Rencana Aksi Pembangunan RB General : Indeks 1.96

Dalam implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General ditemukan beberapa catatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi, diantaranya :

1. Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya didasarkan pada target Reformasi Birokrasi Nasional (Kepmenpanrb Nomor 739 Tahun 2023).
2. Indikator Output atas Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan.

3. Penetapan target atas Output belum sepenuhnya didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.
4. Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai.



Atas catatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi berupaya menindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Telah dilakukan rewiu dan memastikan target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi nasional (Kepmenpanrb nomor 739 Tahun 2023).
- b. Telah dilakukan rewiu serta memastikan Indikator Output atas Rencana Aksi relevan dan cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan.
- c. Telah dilakukan rewiu dan memastikan target atas Output berdasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.
- d. Telah dilakukan rewiu pada Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi.

Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General : Indeks "0"

Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi : Indeks 2

Pemerintah Provinsi Jambi cukup mendapatkan feedback yang sangat baik Pada capaian indikator persentase penyederhanaan struktur organisasi. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Jambi segera meninkdalanjuti dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang SOTK pasca penyederhanaan struktur organisasi serta nantinya akan ditindaklanjuti ke tahap penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.

Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi : Indeks 0,8



Guna mendorong peningkatan capaian sistem kerja, maka pada Tahun 2024 akan segera ditetapkan dalam Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur Jambi dan segera diimplementasikan lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Penyederhanaan struktur organisasi turut disupport oleh tingkat kematangan perangkat daerah. Dalam rangka peningkatan penataan organisasi / kelembagaan dilakukan penataan struktur organisasi dan tata laksana yang terus disempurnakan setiap tahun guna mencapai struktur ideal yang diinginkan, pada tahun 2023 tingkat kematangan perangkat daerah mencapai indeks 37,3 dan masuk dalam kategori **Tinggi**.

Rata-rata nilai variabel pendukung pencapaian indeks kematangan perangkat daerah dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini :

Diagram 3.1. Capaian Nilai Variabel
Kematangan Perangkat Daerah



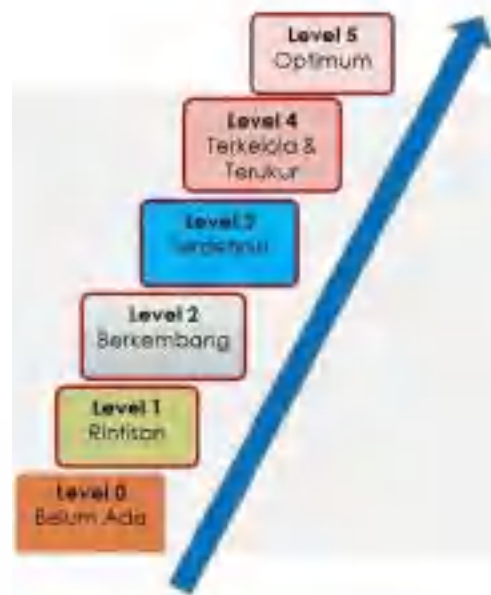
Sumber : Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2023, 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa skor tertinggi berada pada variabel Perencanaan Pembangunan Daerah, dan disusul pada variabel Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Sarpras. Capaian pada variabel ini merupakan bentuk komitmen yang kuat dari seluruh pihak terutama dengan penyempurnaan perencanaan berbasis kinerja serta didukung oleh peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik.

Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) : Indeks 2,46

Dalam upaya peningkatan sistem pengendalian intern, Pemerintah Provinsi Jambi senantiasa mengupayakan berbagai langkah-langkah strategis. Namun dalam implementasinya terdapat catatan yang perlu segera ditindaklanjuti diantaranya :

1. Masih terdapat indikator kinerja baik pada tingkat Pemda/OPD, maupun program/kegiatan/sub kegiatan yang belum cukup (tidak dapat menggambarkan sasaran).
2. Masih terdapat indikator kinerja baik pada tingkat Pemda/OPD, maupun program/kegiatan/sub kegiatan yang belum relevan dan spesifik mendukung pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan.
3. Masih terdapat target kinerja yang belum selaras dengan target di atasnya.
4. Memanfaatkan pengelolaan risiko sebagai dasar penilaian kinerja/ indikator pada Renstra/Renja Bappeda & Litbang serta Inspektorat
5. Belum terdapat pencantuman MR sebagai indikator kinerja di tingkat OPD maupun Pemda.
6. Pemerintah Daerah belum memiliki kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur.



Oleh sebab itu pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat pilar utama pada OPD guna memastikan proses perencanaan, pengukuran, serta monitoring dan evaluasi kinerja berjalan dengan baik. Kedepan, akan dilakukan :

- a. Perbaikan pada indikator kinerja.
- b. Perbaikan pada target kinerja.

- c. Mencantumkan Manajemen Resiko sebagai indikator kinerja dan menganggarkan SDM maupun dana untuk pengelolaan risiko di tingkat Pemda dan OPD.
- d. Menyusun kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur.

Demikian pula dalam hal pembangunan zona integritas, terdapat upaya peningkatan jumlah unit yang siap diajukan oleh Provinsi Jambi tahun 2024 serta tingkat Maturitas SPIP berada pada level 3.

Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas : Indeks 0,43

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jambi belum mengajukan unit pembangunan zona integritas karena keterbatasan waktu dan minimnya kesiapan perangkat daerah untuk diusulkan dalam zona integritas.

Berdasarkan hasil evaluasi terkait zona integritas bahwa Tingkat keberhasilan pembangunan ZI sebesar 0% (kategori Cukup) dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2021 Jumlah unit yang diusulkan: 2 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja Tahun 2022 Jumlah unit yang diusulkan: 2 unit kerja Jumlah unit

yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM : 0 unit kerja Tahun 2023 Jumlah unit yang diusulkan: 0 unit kerja Jumlah unit yang menerima predikat ZI menuju WBK/WBBM: 0 unit kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi telah mempersiapkan pengusulan hasil pembangunan unit kerja Zona Integritas kepada TPN.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) : Indeks 2,69



Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP
bagi Pemerintah Daerah
Oleh Wakil Presiden Republik Indonesia

Dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, capaian Pemerintah Provinsi Jambi cukup baik dengan peningkatan nilai sebesar 0,83. Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting dalam rangka perbaikan SAKIP kedepan diantaranya :

1. Penjenjangan kinerja yang telah disusun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam penetapan kinerja pada dokumen perencanaan.
2. Aplikasi E-SAKIP Provinsi Jambi lebih berorientasi pada pengumpulan data perencanaan kinerja. Sedangkan pengukuran kinerja masih lebih berorientasi pada penyerapan anggaran.
3. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja lebih rendah

dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup.

4. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja output dan outcome pada setiap Perangkat Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 2024 akan dilakukan upaya strategis diantaranya ;

- a. Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan dokumen perencanaan dan penetapan kinerja tiap level jabatan
- b. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan monitoring dan

evaluasi kinerja level pimpinan sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan)

- c. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja. Serta menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang.
- d. Menyusun kebijakan reward dan punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

Sejak tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SAKIP di Jakarta yang dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Jambi dan Bapak Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan RBKunwas Wilayah 1 dalam menyempurnakan komponen SAKIP.

Bimbingan teknis ini dilakukan sebagai upaya untuk kembali memperkuat komitmen

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SAKIP lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan RBKunwas Wil I Bapak Ahmad Hasmy bertempat di Hotel Grand Kemang Jakarta

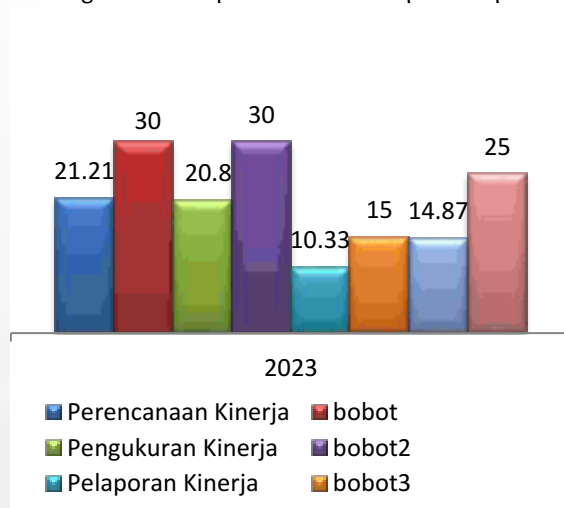


pimpinan perangkat daerah agar senantiasa meningkatkan kualitas implementasi SAKIP yang diantaranya bersama-sama mereviu dan melakukan penyusunan Pohon Kinerja (Logical Framework) beserta Cascading Kinerjanya. Selanjutnya melakukan penjabaran melalui Cascading Kinerja Perangkat Daerah, menyempurnakan indikator kinerja disetiap level jabatan sampai dengan staf, serta memanfaatkan media teknologi informasi untuk mengukur kinerja dengan penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online berbasis kinerja, dan e-SAKIP Provinsi Jambi.

Dari sisi perbaikan komponen akuntabilitas kinerja memberikan sumbangsih terhadap capaian kinerja yang baik, sehingga Provinsi Jambi berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2021 mendapatkan nilai 64,08, tahun 2022 mendapatkan nilai 66,38, dan pada tahun 2023 mendapat nilai 67,21. Bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tepatnya pada tahun 2026 adalah A, maka persentase realisasi capaian kinerja pada indikator ini mencapai **96%** atau masuk dalam kategori **tinggi**.

Peningkatan nilai terjadi hampir pada seluruh komponen penilaian sebagaimana grafik berikut :

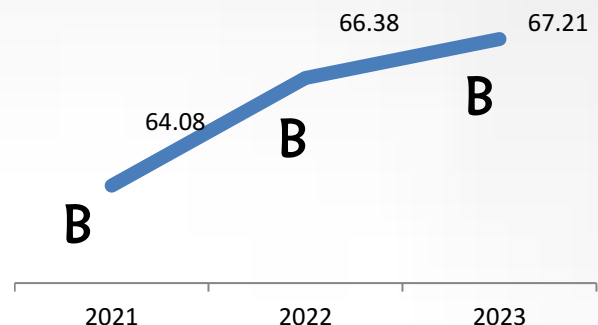
Diagram 3.2. Capaian Nilai SAKIP per komponen



Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP 2023 (2024)

Perkembangan capaian nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1. Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2021-2023



Indeks Perencanaan Pembangunan : Indeks 2,02

Upaya peningkatan indeks perencanaan pembangunan cukup baik, Catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi diantaranya :

- Untuk Pemerintah Provinsi Jambi masih terdapat beberapa aspek penilaian yang perlu ditingkatkan , yaitu :
 - 1.a.1.a tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RPJMD dengan sasaran PN RPJMN, memiliki nilai rata-rata keselarasan terbobot sejumlah 0,32 dari bobot maksimal 0,50.
- Rendahnya hasil penilaian dokumen Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah pada sub-indikator 2.a.1 bernilai masih Kurang dengan nilai 12,67 dari total nilai 18,00 3.
- Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada sub-indikator 1.b.1 bernilai masih Kurang dengan Bobot nilai 1,53 dari Bobot Maksimum 2,50
- Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada sub-indikator 1.b.2 bernilai masih Sangat Kurang dengan Bobot Nilai 0,75 dari Bobot Maksimum 1,50
- Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada subindikator 1.b.3 bernilai masih Sangat Kurang dengan Bobot nilai 0,63 dari Bobot Maksimum 1,50
- Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada sub-

indikator 1.b.4 bernilai masih Sangat Kurang dengan Bobot nilai 0,87 dari Bobot Maksimum 1,50

7. Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada subindikator 1.b.5 bernilai masih Sangat Kurang dengan Bobot nilai 0,63 dari Bobot Maksimum 1,50
8. Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada sub-indikator 1.b.6 bernilai masih Kurang dengan Bobot nilai 1,00 dari Bobot Maksimum 1,50
9. Rendahnya hasil penilaian Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP pada sub-indikator 1.b.7 bernilai masih Sangat Kurang dengan Bobot nilai 0,87 dari Bobot Maksimum 1,50
10. Rendahnya hasil penilaian dokumen Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah pada sub-indikator 2.a.1 bernilai masih Kurang dengan nilai 11,98 dari total nilai 18,00
11. Rendahnya hasil penilaian Kualitas Perencanaan dokumen Inovasi Perencanaan Pembangunan 2.b.1 bernilai masih Kurang dengan Bobot nilai 2,88 dari Bobot Maksimum 4,50
12. Rendahnya hasil penilaian Kualitas Perencanaan dokumen Keterkaitan Output dengan Outcome Inovasi 2.b.2 bernilai masih Sangat Kurang dengan nilai 2,68 dari total nilai 4,50

Oleh sebab itu, pada tahun 2024 akan dilakukan upaya perbaikan yakni :

- a. Meningkatkan dan menyesuaikan target indikator sasaran pembangunan daerah pada RPJMD.
- b. Menyesuaikan Isu Strategis dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan Hasil evaluasi pembangunan yang dirumuskan menjadi permasalahan daerah seharusnya menjadi dasar dalam menentukan Prioritas Pembangunan, sehingga Prioritas Pembangunan daerah

yang dirumuskan bisa menyelesaikan permasalahan daerah.

- c. Meningkatkan Indikator Kesesuaian antara Isu Strategis–Target– Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD atau RKPD (2.a) terutama pada sub-indikator Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah (2.a.1)

Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) : Indeks 0,4

Pada capaian tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE cukup baik, Pemerintah Provinsi Jambi sudah menyusun Arsitektur SPBE as-is dalam SIA, dan kedepan pada tahun 2024 akan disiapkan menyusun Arsitektur SPBE to-be dalam SIA.

Tingkat Digitalisasi Arsip : Nilai Indeks 2,28

Implementasi Digitalisasi Arsip telah terimplementasi dengan baik, namun perlu upaya teknis sebagaimana catatan hasil evaluasi yang diberikan yakni : Seluruh kebijakan kearsipan telah ditetapkan dan disosialisasikan namun sebagian belum memenuhi kriteria diantaranya kebijakan klasifikasi, SKKAD, JRA, Arsip Vital, Alih Media, dan pengorganisasian kearsipan (Untuk kebijakan terkait alih media belum memenuhi kriteria yakni belum menjelaskan Metode, sarana prasarana, pelaksanaan, dan prosedur alih media arsip).

Untuk itu, selama tahun 2023 lalu Pemerintah Provinsi Jambi terus konsisten dalam melakukan berbagai hal guna peningkatan digitalisasi arsip diantaranya :

1. Telah melakukan alih media arsip namun belum memenuhi target yang sudah ditetapkan.
2. Telah menggunakan SRIKANDI versi Live dengan lebih dari 5 perangkat daerah di lingkungannya dan melaksanakan proses bisnis secara menyeluruh meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan (pemberkasan) termasuk penerapan tanda tangan elektronik yang bersertifikat BSSN.
3. Telah tersedia sumber daya pendukung dalam pengelolaan arsip elektronik, namun

Sumber Daya Manusia baru mengikuti Bimtek Srikandi dan Sertifikasi proyek arsitektur informasi, belum diikutsertakan pada Diklat Pengelolaan Arsip Elektronik.

4. Telah menjadi simpul JIKN dan melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai simpul pada JIKN



Penyerahan Hasil Evaluasi Kearsipan Bagi OPD Oleh Wakil Gubernur Jambi

Oleh sebab itu, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi akan :

- a. Menetapkan kebijakan kearsipan yang masih dalam bentuk rancangan dan menyosialisasikan
- b. Melaksanakan alih media arsip sesuai yang telah ditetapkan.
- c. Menerapkan aplikasi SRIKANDI pada seluruh perangkat daerah dan melaksanakan seluruh proses bisnis aplikasi SRIKANDI termasuk pemberkasan arsip
- d. Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan arsip elektronik melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan/atau sertifikasi kompetensi.

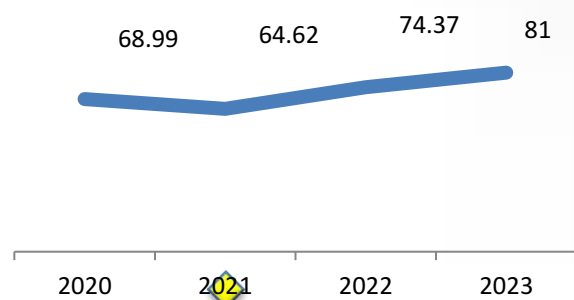
Dalam tata kelola kearsipan terdapat peningkatan hasil evaluasi atas pengawasan kearsipan oleh ANRI, dimana Provinsi Jambi memperoleh penilaian kategori baik dengan nilai 91,65.

Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pun memberikan nilai A (memuaskan) di peringkat ke-9 bagi pemerintah provinsi Jambi. Kepastian itu disampaikan ANRI

pada penyerahan Sertifikat Akreditasi Kearsipan dan pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023.

Pengawasan kearsipan telah dilakukan terhadap 86 Kementerian/Lembaga, sepuluh Perguruan Tinggi Negeri, 34 Pemerintah Daerah Provinsi, dan verifikasi terhadap 508 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peringkat terbaik diraih D.I Yogyakarta. Berturut kedua dan ketiga diraih Jawa tengah dan Jawa Barat.

Grafik 3.2. Trend Perkembangan Indeks Kearsipan Provinsi Jambi Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, 2023, 2024

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan : Nilai Indeks 1.

Adanya aplikasi LAPOR! menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 25/2020 tentang Pelayanan Publik, masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada implementasi SPAN LAPOR Provinsi Jambi tahun 2023 belum optimal, atas hasil catatan yang disampaikan dalam implementasi RB Pemerintah dijabarkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi yakni belum menyampaikan renaksi dan waktu tindak lanjut masih lama. Atas catata tersebut, pada tahun 2024 akan dilakukan penyusunan rencana aksi dan sosialisasi guna percepatan tindak lanjut SPAN LAPOR.

Indeks Kualitas Kebijakan : Nilai Indeks 0

Implementasi kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi masih perlu mendapatkan perhatian lebih baik lagi,

Indeks Reformasi Hukum : Nilai Indeks 1,11

Dari sisi pelaksanaan reformasi hukum mendapat apresiasi kategori cukup, kendati demikian perlu adanya upaya yang lebih serius dalam konteks penerapannya pada tahun 2024.

Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral : Nilai Indeks 0,38

Penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Provinsi Jambi masih berada pada predikat Cukup. Oleh sebab itu kedepan perlu peningkatan kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik yang terdiri dari Pembina Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah, Walidata dan Produsen Data telah tertuang dalam Peraturan SDI Pemerintah Provinsi Jambi.

Selanjutnya pada tahun 2024 akan ditetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur yang mengatur penerapan SDI oleh seluruh produsen data di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Peraturan terkait SDI yang terbit pada akhir tahun 2022 harus dibuat aturan turunannya berupa petunjuk teknis penerapan Prinsip SDI yang harus dipedomani oleh seluruh Produsen Data di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Indeks Tata Kelola Pengadaan : Nilai Indeks 1,15

Dalam kategori Tata Kelola Pengadaan memperoleh nilai yang cukup baik, dan pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi akan meningkatkan pencapaian dengan memastikan keterisian Formasi Jabatan Fungsional Pengelola PBJ.

Indeks Sistem Merit : Nilai Indeks 1,71

Dalam implementasi Sistem Merit Pemerintah Provinsi Jambi perlu dilakukan upaya penyempurnaan, oleh sebab itu kedepan Pemerintah Provinsi Jambi telah menyiapkan langkah-langkah antara lain :

- Menyusun SKJ secara lengkap (manajerial, sosiokultural, teknis) untuk seluruh jabatan;
- Melakukan pemetaan kompetensi bagi seluruh pegawai;
- Melakukan pemetaan talenta berdasarkan Permenpan 3/2020;

- Menyusun strategi pengembangan kompetensi dan kinerja jangka panjang (5 tahun);
- Melakukan pengisian Administrator dan Pengawas dengan menggunakan metode assessment;
- Menyusun analisis permasalahan kinerja secara terstruktur dan menentukan strategi yang tepat untuk mengatasinya.

Indeks Pelayanan Publik : Nilai Indeks 0,98**Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik : Nilai Indeks 1,33**

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga telah dikembangkan guna peningkatan kualitas pelayanan, baik layanan pada masyarakat maupun layanan internal. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan mendapatkan nilai dengan tingkat kepatuhan **tertinggi Zona Hijau** dengan raihan nilai 88,41 sebagaimana yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jambi kembali meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia di tahun ini. Dari 34 provinsi yang dinilai Pelayanan Publiknya di tahun 2023, Pemprov Jambi masih bertahan pada peringkat 10 terbaik. Atas prestasi tersebut, Gubernur Jambi diundang sebagai Penerima Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Jakarta.

Adapun nilai yang diraih Pemerintah Provinsi Jambi mencapai 88,41. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, Pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi mengalami penurunan nilai dan peringkat. Tahun lalu, Provinsi Jambi mendapatkan nilai 89,62 dan meraih peringkat 7 secara nasional.



Penerimaan Penghargaan atas
Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
Provinsi Jambi
Dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia
kepada Gubernur Jambi

Pada tahun 2023 ini penilaian Ombudsman terhadap pelayanan publik menjadi semakin ketat. Oleh sebab itu banyak Pemerintah Daerah, khususnya di Provinsi Jambi, yang kesulitan mendapatkan nilai sempurna.

Pemerintah Provinsi Jambi sendiri juga mengalami penurunan nilai. Namun dibandingkan dengan provinsi lain, Jambi masih bertengger di posisi 10 besar secara nasional.

Indeks SPBE : Nilai Indeks 5,96

Capaian IKU Makro : Nilai Indeks 2

Capaian IKU Non Makro : Nilai Indeks 3,14

Opini BPK : Nilai Indeks 5

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga pilar tersebut menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-

urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah lainnya.

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, hingga kembali menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk kesepuluh kalinya Provinsi Jambi dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Atas pencapaian opini BPK ini maka kinerja indikator pendukung indikator Kinerja Utama Indeks RB ini menjadi **sangat tinggi** atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 100% atau sangat tinggi.

Pada komponen kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya.



Penerimaan Opini WTP dari BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Jambi

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK : Nilai Indeks 2,74

Indeks BerAkhlak : Nilai Indeks 2.28

Survei Penilaian Integritas : Nilai Indeks 7,15

Penilaian atas Survei Integritas Provinsi Jambi sudah cukup baik dengan memperoleh indeks RB 7,15. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan, pengawasan, serta monev penyelenggaraan pemerintahan sudah cukup baik. Namun demikian, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi perlu memperkuat dan melakukan pembenahan-pembenahan berupa :

- a. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/ gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.
- b. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan suap/gratifikasi dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/

pengelolaan gratifikasi di instansi. (2) Menegakkan sanksi/hukuman penerimaan suap/ gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten. (3) Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/ gratifikasi. (4) Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.

- c. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap pengawasan internal agar lebih proaktif, seperti audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
- d. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan dan memastikan hal-hal berikut: (1) Menyusun proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai

- peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Memperkuat peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Membangun mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. (4) Memastikan dan memperkuat vendor management system. (5) Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan. (6) Implementasi proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Perbaiki mendasar dan menyeluruh dalam proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.
- f. Perbaiki mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Memasukkan larangan dan sanksi terkait pelaksanaan tugas dalam kode etik di instansi dan/atau regulasi internal lainnya. (2) Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan di instansi untuk menciptakan perilaku baru dalam melaksanakan tugas. (3) Menyusun kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi. (4) Menyusun program/kegiatan bagi calon pimpinan/pejabat di instansi untuk meningkatkan integritas dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat. (5) Membangun mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi intervensi dan benturan kepentingan sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.
- g. Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN, meskipun sebagian besar responden menganggap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tinggi.
- h. Optimalisasi/peningkatan upaya penyediaan informasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas yang mencakup setidaknya lima informasi, yaitu jenis tugas/layanan, alur tugas/layanan, besaran tarif (jika ada), waktu pelaksanaan, hingga waktu penyelesaian tugas/layanan.
- i. Perbaiki mendasar terhadap upaya peningkatan prosedur layanan yang sudah dilakukan dengan memastikan berbagai hal berikut : (1) Proses bisnis yang sederhana dan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan. (2) Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan. (3) Evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.

Survei Kepuasan Masyarakat : Nilai Indeks RB
6.56

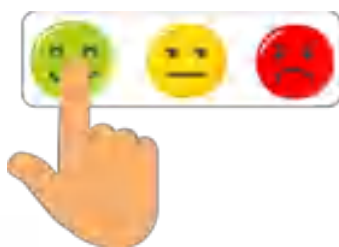


Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkan. Keluhan masyarakat yang tidak direspon oleh pemerintah akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah yang responsif dalam arti positif merupakan dambaan seluruh masyarakat.

Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan

publik bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disamping telah menerbitkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebagai upaya untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.

Pada komponen kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya.



Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini, kesembilan unsur yang ada dalam survei dijadikan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Pada tahun 2023, perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil

survey pada 43 Perangkat Daerah guna mendapatkan gambaran secara utuh hasil pelaksanaan upaya perbaikan kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil perhitungan dan konversi Indeks menjadi mutu pelayanan dan kinerja dapat dilihat pada tabel bawah. Berdasarkan tabel di bawah, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2023 masuk dalam kategori “Baik” atau “B” dengan nilai rata-rata **83,809**.

Tabel 3.3. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2023

Unsur Pelayanan	2022	2023
U1: Persyaratan pelayanan	83,926	83,684
U2: Prosedur pelayanan	83,460	83,164
U3: Waktu pelayanan	81,738	80,659
U4: Biaya/tarif pelayanan	89,653	90,108
U5: Produk/hasil pelayanan	83,654	82,362
U6: Kemampuan petugas pelayanan	83,548	82,605
U7: Perilaku petugas pelayanan	83,707	84,120
U8: Maklumat pelayanan	70,716	80,855
U9: Mekanisme pengaduan pelayanan	88,546	86,720
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,333	83,809

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi 2023, 2024

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi masuk dalam kategori baik namun cenderung menurun secara akumulasi. Unsur dengan nilai tertinggi adalah biaya/tariff pelayanan dengan perolehan nilai 90,108 dan nilai terendah adalah pada unsur waktu pelayanan dengan perolehan 80,659. Berdasarkan hasil survey ini, kedepan harus dilakukan perbaikan atas waktu pelayanan sehingga akan berdampak pada komitmen dalam memberikan layanan. Selanjutnya, perlu juga upaya penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan menerapkan SOP yang lebih baik dan tetap melaksanakan perbaikan-perbaikan pada unsur lainnya.

Diagram 3.3. Nilai Rata-Rata IKM
Perangkat Daerah Tahun 2023



Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
(Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 2023) 2024

RB Tematik



Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi) : Nilai Indeks RB 0,2

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik merupakan agenda penting yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Jambi telah menjalankan RB Tematik dalam Pengentasan Kemiskinan, pada penerapannya terdapat beberapa catatan kiranya perlu mendapat perhatian, yakni :

1. Sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada
2. Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan
3. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi

4. Rencana aksi tematik yang disusun belum menjabarkan "how to" atau bagaimana langkah-langkah mencapai sasaran
5. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan

Oleh sebab itu, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi telah menyusun langkah- langkah strategis diantaranya :

- a. Memastikan penetapan sasaran menjawab permasalahan utama pada tema terkait.
- b. Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan/atau mandat RB Tematiknya
- c. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
- d. Memastikan Rencana aksi tematik yang disusun telah menjabarkan "how to" atau bagaimana langkah-langkah mencapai sasaran
- e. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain



Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melakukan beberapa hal antara lain :

1. Secara berkala melaksanakan internalisasi arah perubahan yang ditetapkan kepada

seluruh pegawai dan melakukan survei kepada seluruh pegawai terkait internalisasi nilai-nilai organisasi, budaya kerja, dan pemahaman reformasi birokrasi;

2. Meningkatkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis. Selain itu, melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ingin diwujudkan oleh agen perubahan dengan karakter layanan utama pada masing-masing unit kerja;
3. Mendorong agen perubahan untuk meningkatkan kualitas rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, core values ASN BerAKHLAK, area perubahan dalam reformasi birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana RB Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah sehingga dapat dilakukan strategi perbaikan dalam internalisasi RB;
5. Memastikan proses deregulasi kebijakan berjalan secara menyeluruh dengan melakukan identifikasi secara keseluruhan peraturan yang ada dan memastikan bahwa tidak ada yang tumpang tindih dan menghambat kinerja maupun pelayanan;
6. Membangun sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan/kebijakan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sehingga memudahkan dalam menganalisis peraturan/kebijakan yang mungkin saja tidak harmonis/sinkron dengan kebijakan lainnya;
7. Melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi mengusulkan kembali pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional. Selain itu juga menyelesaikan mekanisme hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional dengan adanya penyederhanaan organisasi;
8. Mereviu proses bisnis dan SOP untuk menyesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi dan memastikan keduanya

mendukung proses kerja di Provinsi Jambi menjadi lebih efektif dan efisien;

9. Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebermanfaatan dari SPBE yang telah dibangun dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi serta pengguna layanan. Selanjutnya melakukan tindak lanjut perbaikan untuk menjawab temuan yang ada;
10. Melakukan reviu dan menyempurnakan identifikasi resiko khususnya pada hal yang bersifat strategis sampai ke tingkat Perangkat Daerah;
11. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada seluruh Perangkat Daerah dan memastikan tindak lanjut dari SKM kepada seluruh layanan melakukan strategi teknis guna memberikan layanan sesuai harapan masyarakat;
12. Mengintegrasikan seluruh website Perangkat Daerah dalam website Pemerintah Provinsi Jambi guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru terkait layanan;
13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan memastikan pemanfaatan aplikasi e-SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah guna mewujudkan manajemen kinerja yang baik dan konsisten;

Permasalahan :

- a. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah telah dilakukan, namun belum sepenuhnya terimplementasi dikarenakan sebagian Perangkat Daerah masih mengacu pada dokumen perencanaan induk (RPJMD) sehingga perbaikan-perbaikan yang dilakukan terkendala pada kecenderungan atas ketidakonsistenan dokumen perencanaan jika Renstra OPD diperbaiki.
- b. Unsur-unsur pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama berkaitan dengan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Solusi :

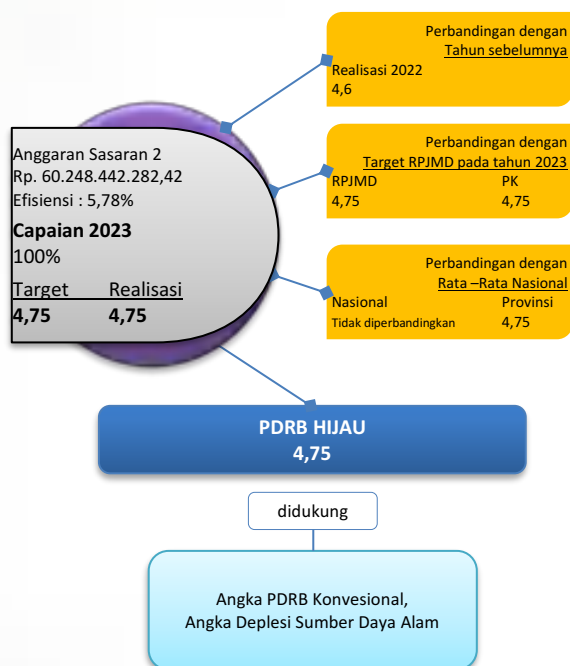
- a. Penyempurnaan perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja sehingga sasaran strategis berorientasi pada hasil atau bermanfaat bagi masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja yang SMART dan terjalin keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*)
- b. Penetapan standar operasi pelayanan (SOP) pelayanan yang diterapkan secara terbuka kepada pihak pemakai jasa atau masyarakat, yang disertai tenggat waktu yang jelas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu Perangkat Daerah dan masyarakat karena seluruh petugas pada unit pelayanan akan bekerja secara maksimal berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan pada sisi lain, masyarakat merasa yakin akan mendapatkan produk/ jasa pelayanan yang cepat, murah dan maksimal.
- c. Pemberian reward atau prestasi kerja penyelenggara pelayanan publik dan punishment terhadap hasil kerja yang tidak baik.
- d. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan maka perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan petugas pemberi pelayanan pada setiap unit di masing-masing Perangkat Daerah Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan yang didukung oleh sistem IT pada setiap unit pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Program-program yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Penataan Desa
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Pengelolaan Arsip
6. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
11. Program Penyelenggaraan Pengawasan
12. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
13. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
14. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
15. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
16. Program Kesejahteraan Rakyat
17. Program Perekonomian Dan pembangunan
18. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
19. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
20. Program Penataan Organisasi
21. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
22. Program Pencatatan Sipil
23. Program Pendaftaran Penduduk
24. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
26. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat hukum Adat
27. Program Peningkatkerjasama Desa
28. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
29. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
30. Program Kepegawaian Daerah
31. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia
32. Program Pelayanan Penanaman Modal
33. Program Pelayanan Penghubung
34. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
35. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

SASARAN STRATEGIS 2 :

Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
IK : 1. PDRB HIJAU,
2. TINGKAT KEMISKINAN

**INDIKATOR KINERJA :
PDRB HIJAU**

Indikator makro terkait dengan keadaan sosial dan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam membangun suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, indikator ini merupakan data strategis karena digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah.

Perekonomian Provinsi Jambi 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp293,73 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp79,8 juta atau US\$5.239,4.

Ekonomi Jambi tahun 2023 tumbuh sebesar 4,66 persen, melambat dari tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,12 persen. Dari sisi

produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 16,84 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 10,31 persen.

Ekonomi Jambi triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,03 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,15 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,10 persen.

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,00 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,10 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 73,00 persen.

Struktur ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2023 didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 31,83 persen. Sementara pada sisi pengeluaran, PDRB banyak digunakan oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 64,11 persen.

**PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2023 (C-
TO-C)**

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023 tumbuh sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Perusahaan sebesar 16,84 persen. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,15 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 8,87 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

sebesar 8,76 persen; kategori Jasa lainnya tumbuh 8,54 persen; Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 8,29 persen; dan Konstruksi tumbuh 7,98 persen. Sedangkan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 5,61 persen; Industri Pengolahan sebesar 4,16 persen; dan Pertambangan dan Penggalian tumbuh 0,07 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,83 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,31 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,30 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 9,98 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi mencapai 70 persen.



PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2023 TERHADAP TRIWULAN IV-2022 (Y-ON-Y)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,03 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 21,15 persen; diikuti Konstruksi sebesar 16,30 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 14,31 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,18 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 9,97 persen. Sementara itu terdapat beberapa lapangan usaha pertumbuhannya terkontraksi pada periode ini.

Kontraksi terdalam terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar -6,99 persen. Kategori lain yang mengalami kontraksi pertumbuhan secara y-on-y adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (-1,86 persen) dan Jasa Keuangan dan Asuransi (-0,29 persen).

PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2023 TERHADAP TRIWULAN III-2023 (Q-TO-Q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2023 dibanding triwulan III-2023 (q-to-q) terkontraksi sebesar 1,00 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,14 persen. Selain itu, lapangan usaha lainnya yang terkontraksi adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,40 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 3,70 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,04 persen; dan Industri Pengolahan yang terkontraksi 0,86 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan, diantaranya Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh signifikan sebesar 26,10 persen; Jasa Pendidikan sebesar 11,33 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,70 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 6,08 persen; kategori Konstruksi sebesar 4,11 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 3,68 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 3,28 persen.



PDRB MENURUT PENGELUARAN

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2023 (C-TO-C)

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2023 tumbuh sebesar 4,66 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PKLNPR) sebesar 10,31 persen; diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 9,88 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,19 persen; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 1,97 persen. Sedangkan komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi sebesar 1,69 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami terkontraksi sebesar 3,79 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 64,11 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah Komponen PK-RT di Provinsi Jambi yaitu sebesar 42,17 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 21,95 persen. Komponen PK-P memiliki andil sebesar 6,75 persen. Sedangkan peranan Komponen PK-LNPRT dan Perubahan Inventori relatif kecil, yaitu masing-masing sebesar 0,58 persen dan 0,82 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 36,37 persen.

PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN
y-on-y Provinsi Jambi Triwulan 4-2023 (%)

**PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN IV-2023 TERHADAP TRIWULAN IV-2022 (Y-ON-Y)**

Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,03 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 21,10 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 9,34 persen; PK-P tumbuh 3,58 persen; dan PK-RT sebesar 2,79 persen. Sementara itu, komponen lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan, yaitu Komponen Ekspor Barang dan Jasa 5,47 persen, serta Impor Barang dan Jasa sebesar 8,71 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2023 Terhadap Triwulan III-2023 (q-to-q)

Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2023 dibanding triwulan III-2023 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,00 persen (q-to-q). Komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Komponen PK-P yang tumbuh sebesar 73,00 persen; berikutnya adalah Komponen PK-LNPRT sebesar 11,49 persen; Komponen PK-RT sebesar 2,43 persen; dan PMTB tumbuh 1,62 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa (merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) mengalami pertumbuhan 13,78 persen, dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi sebesar 2,02 persen. Ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi (q-to-q) secara umum mengalami kontraksi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian provinsi-provinsi di Sumatera menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di semua provinsi tercatat kondusif, dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Secara kumulatif pertumbuhan tertinggi (c-to-c) tercatat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,20 persen, diikuti Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,08 persen, serta Provinsi Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,01 persen. Sementara itu, provinsi lainnya berada pada pertumbuhan di bawah 5 persen. Provinsi Jambi berada pada peringkat empat dengan pertumbuhan sebesar 4,66 persen.

Gambar 3.3. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2024

Secara spasial, struktur perekonomian Sumatera pada tahun 2023 masih didominasi oleh provinsi lumbung energi. Tiga Provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,25 persen, Provinsi Riau dengan kontribusi sebesar 22,71 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 13,92 persen. Provinsi Jambi bila dilihat dari distribusinya terhadap PDRB Sumatera berada pada peringkat tujuh dengan share sebesar 6,50 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator keberhasilan ekonomi suatu Provinsi/Kabupaten. Perhitungan PDRB Konvensional tersebut dapat disimpulkan bahwa perhitungan tersebut hanya mengukur hasil kegiatan ekonomi tidak memasukkan dimensi lingkungan di dalamnya. Sehingga PDRB Konvensional tersebut memiliki beberapa kelemahan. Sektor kehutanan yang memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan dengan jasa lingkungannya yang tak ternilai mengharuskan perhitungan PDRB yang ramah lingkungan dengan memperhitungkan penyusutan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga

diperoleh nilai ekonomi sumber daya hutan secara menyeluruh, disebut PDRB Hijau. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat lebih terarah dan akurat sesuai kinerja perekonomian yang sebenarnya.

Pada laporan kinerja ini menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau sektor kehutanan Provinsi Jambi dengan pendekatan jasa lingkungan dengan menggunakan data regional Provinsi Jambi. Data yang dikumpulkan pada laporan ini yaitu berupa data sekunder yang meliputi data Statistik Kehutanan dan tutupan lahan hutan Provinsi Jambi dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan data PDRB Provinsi Jambi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

Analisis data yang dipergunakan adalah estimasi nilai PDRB Hijau kehutanan dengan mengurangi nilai deplesi dan degradasi sumberdaya hutan dan menambahkan nilai jasa lingkungan dengan pendekatan benefit transfer. Perhitungan PDRB Hijau sektor kehutanan dengan pendekatan jasa lingkungan diperoleh nilai PDRB Hijau kehutanan jadi lebih tinggi dengan mengintegrasikan nilai jasa lingkungan ke dalam perhitungan.

Dalam konsep penghitungan PDRB Hijau dilakukan melalui tahapan antara lain :

1. Menghitung nilai tambah sektor kehutanan.
2. Mengidentifikasi jenis dan volume sumberdaya hutan yang diambil.
3. Memberikan nilai ekonomi terhadap sumberdaya hutan yang diambil.
4. Mengurangi nilai tambah PDRB sektor kehutanan dengan nilai deplesi sumberdaya

hutan diperoleh nilai kontribusi semi hijau sektor kehutanan.

5. Melakukan identifikasi kerusakan atau degradasi tanah/lahan, air dan udara akibat kegiatan kehutanan.
6. Menghitung besar volume kerusakan atau degradasi sumberdaya alam akibat kegiatan kehutanan.
7. Menentukan nilai ekonomi (valuasi) degradasi lingkungan,
8. Nilai degradasi dikurangkan dari nilai kontribusi semi hijau sektor kehutanan dan diperoleh nilai kontribusi hijau dari sektor kehutanan



(DR), sebagai pungutan yang dikenakan untuk pengganti nilai intrinsik terhadap hasil hutan yang dipungut dari hutan negara. Sementara estimasi Nilai Degradasi sumber daya hutan didekati dari data luas deforestasi berdasarkan perubahan tutupan lahan hutan Sumatera Utara dan Nilai jasa lingkungan hutan dihitung dengan menggunakan pendekatan Benefit Transfer.



Dari pengumpulan data di atas, maka model estimasi nilai PDRB Hijau Kehutanan dapat dilihat pada model estimasi nilai PDRB Hijau PDRB Konvensional Kehutanan (-) Depleksi Sumberdaya Hutan, PDRB Semi Hijau Hutan (-) Degradasi Sumberdaya Hutan, PDRB Hijau Kehutanan Tanpa Jasa Lingkungan, PDRB Hijau Kehutanan + Jasa Lingkungan.

Adapun estimasi Nilai Depleksi sumberdaya hutan yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan besarnya nilai pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi

Perhitungan PDRB menggunakan pendekatan nilai tambah dengan membagi sektor perekonomian Provinsi Jambi menjadi 17 sektor.

Tabel 3.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	73.222,4	82.574,9	92.492,2	41.209,1	43.262,9	45.697,2
B. Pertambangan dan Penggalian	22.981,3	53.248,2	44.971,8	25.298,2	38.501,0	38.529,0
C. Industri Pengolahan	75.805,8	27.051,4	29.222,2	45.727,4	16.218,8	16.292,9
D. Perdagangan Eceran dan Jasa	125,6	121,1	120,7	86,9	97,0	106,8
E. Pengadaan Air, Pengkondisian Sempit, Listrik dan Gas Ulang	221,1	351,8	381,8	213,1	219,4	220,2
F. Konstruksi	18.470,8	19.206,8	21.647,6	12.825,0	11.918,0	12.870,5
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29.050,3	33.593,9	39.071,9	15.849,6	15.857,0	17.264,4
H. Transportasi dan Pergudangan	4.083,0	7.914,2	8.416,0	4.477,5	6.140,2	6.620,2
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.566,4	2.501,8	2.589,7	1.461,4	1.826,4	2.097,3
J. Informasi dan Komunikasi	9.511,0	10.176,7	10.910,0	6.325,0	6.784,2	7.364,0
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.576,4	6.425,2	6.670,0	3.674,3	3.647,6	3.692,4
L. Real Estate	8.752,9	4.181,4	4.367,8	2.081,9	2.378,2	2.456,6
M4. Jasa Persewaan	2.765,9	3.589,0	4.265,9	1.548,2	1.773,4	2.071,9
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.898,4	9.222,3	10.553,8	4.929,2	4.897,5	5.042,2
P. Jasa Pendidikan	8.021,5	8.585,0	9.086,8	5.216,5	5.321,8	5.457,1
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.215,4	3.294,7	3.540,3	2.211,8	2.158,8	2.222,5
R5, T3, U. Jasa Lainnya	2.184,1	2.383,8	2.784,7	1.521,7	1.641,1	1.780,2
Produk Domestik Regional Bruto (PDPRB)	232.294,2	276.719,4	293.722,3	155.801,6	161.733,0	169.268,8

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023 (2024)

Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

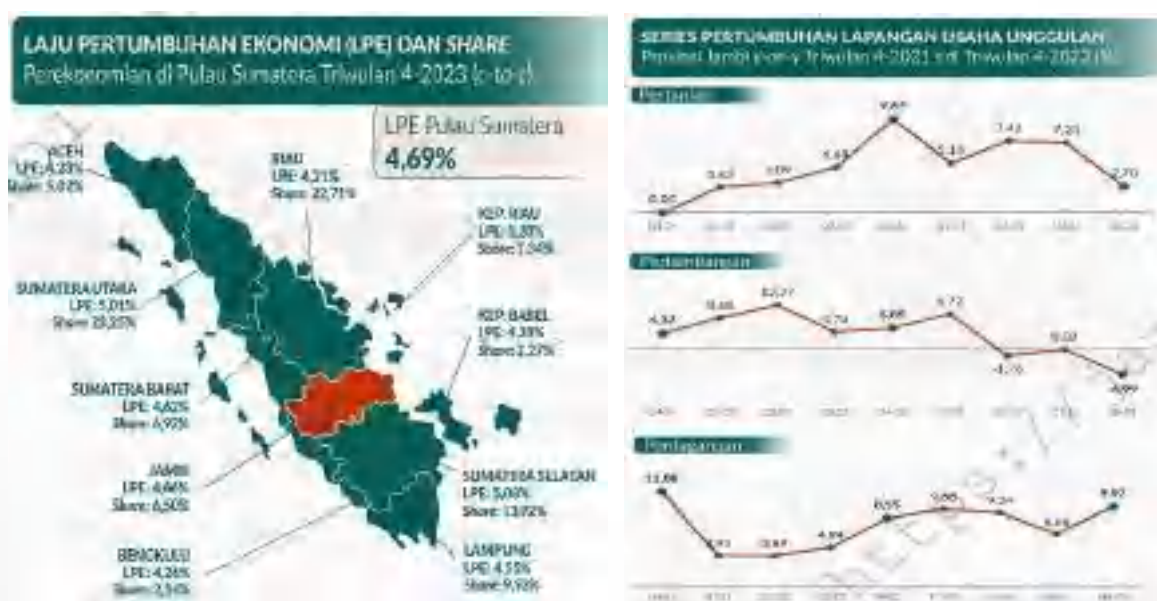
Lapangan Usaha	THW III- 2023 Terhadap THW III- 2022 (% p.a.)	THW IV- 2023 Terhadap THW III- 2023 (% p.a.)	THW III- 2023 Terhadap THW III- 2022 (% p.a.)	THW IV- 2023 Terhadap THW IV- 2022 (% p.a.)	Laju Pertumbuhan 2023	Sumber Pertumbuhan 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,60	-3,70	7,23	2,70	5,61	1,50
B. Pertambangan dan Penggalian	15,66	-10,14	0,02	-6,99	0,07	0,02
C. Industri Pengolahan	6,44	-0,86	5,02	0,02	4,16	0,42
D. Perdagangan Eceran dan Jasa	2,72	1,02	12,92	14,31	12,15	0,01
E. Pengadaan Air, Pengkondisian Sempit, Listrik dan Gas Ulang	1,11	-4,40	-0,11	-1,86	0,23	0,00
F. Konstruksi	7,31	4,11	12,63	16,30	7,39	0,59
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,43	6,98	6,66	9,42	8,87	0,87
H. Transportasi dan Pergudangan	5,57	7,70	9,21	7,07	6,29	0,27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,26	3,28	9,04	7,74	6,76	0,10
J. Informasi dan Komunikasi	0,10	3,68	-4,61	8,21	1,60	0,39
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,93	-3,08	-1,07	-0,39	1,29	0,00
L. Real Estate	1,06	1,72	3,09	3,22	3,50	0,00
M4. Jasa Persewaan	-0,55	1,79	19,08	-11,15	-16,84	0,10
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-22,58	-26,10	-9,40	14,18	-2,92	0,00
P. Jasa Pendidikan	-7,92	11,83	-0,09	7,80	-2,14	0,00
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,31	2,94	8,20	7,46	4,28	0,00
R5, T3, U. Jasa Lainnya	-8,09	5,04	9,37	7,06	6,64	0,00
Produk Domestik Regional Bruto (PDPRB)	2,54	1,00	4,88	4,03	4,66	4,66

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023 (2024)

Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)

Provinsi	Triw III-2023 Terhadap Triw II-2023 (q-to-q)	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023 (q-to-q)	Triw III-2023 Terhadap Triw III-2022 (y-on-y)	Triw IV-2023 Terhadap Triw IV-2022 (y-on-y)	Laju Pertumbuhan 2023	Sumber Pertumbuhan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	1,44	7,16	3,78	4,15	4,23	0,24
2. Sumatra Utara	2,00	0,53	4,94	5,02	5,01	1,15
3. Sumatra Barat	0,82	2,31	4,28	4,30	4,62	0,34
4. Riau	3,40	0,10	4,01	4,02	4,21	0,90
5. Jambi	2,50	-1,00	4,84	4,03	4,66	0,30
6. Sumatra Selatan	2,39	-1,90	5,08	4,94	5,08	0,70
7. Bengkulu	-2,45	3,04	3,97	4,76	4,26	0,09
8. Lampung	0,74	-3,99	3,93	5,40	4,55	0,47
9. Kep. Bangka Belitung	0,03	2,65	4,01	4,00	4,38	0,10
10. Kepulauan Riau	0,42	6,80	4,88	4,45	5,20	0,60

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023 (2024)



Program yang dilakukan guna pencapaian kinerja ini antara lain :

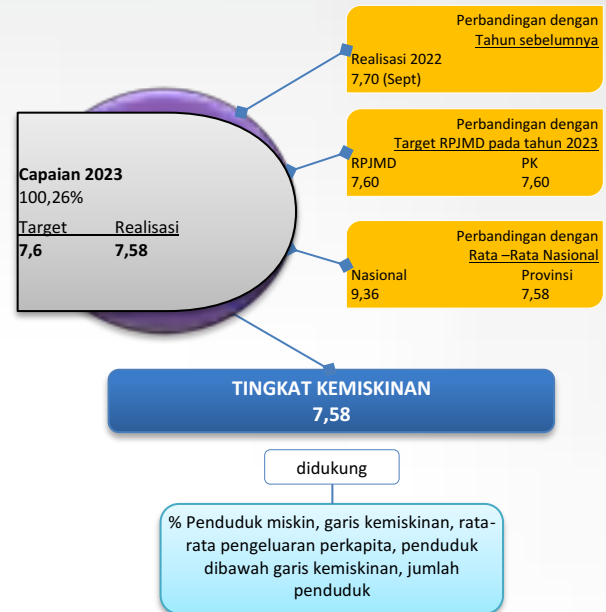
1. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Penyuluhan pertanian
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau kecil
7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
9. Program Pengawasan sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

10. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
11. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
12. Program Pengembangan Ekspor
13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
14. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
15. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
16. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman modal
17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
18. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
19. Program Promosi Penanaman Modal
20. Program Pemasaran Pariwisata
21. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual
22. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
23. Program Peningkatandaya Tarik Destinasi Pariwisata
24. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
25. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
26. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
27. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
28. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
29. Program Pengembangan UMKM

INDIKATOR KINERJA : TINGKAT KEMISKINAN



Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 7,58 persen, menurun 0,12 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,04 persen poin terhadap Maret 2022.



Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 280,68 ribu orang, menurun 3,1 ribu orang terhadap September 2022 dan 1,31 ribu orang terhadap Maret 2022.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 10,48 persen, turun menjadi 10,19 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 6,32 persen juga turun menjadi 6,28 persen pada Maret 2023.

Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan turun sebanyak 2,5 ribu orang (dari 127,80 ribu orang pada September 2022 menjadi 125,30 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 600 orang (dari 156,03 orang pada September 2022 menjadi 155,39 ribu orang pada Maret 2023).

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp599.688,-/ kapita / bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp452.478,- (75,45 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp147.210,- (24,55 persen).

Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Jambi memiliki 4,93 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara

rata-rata adalah sebesar Rp2.956.462,-/rumah tangga miskin/bulan.

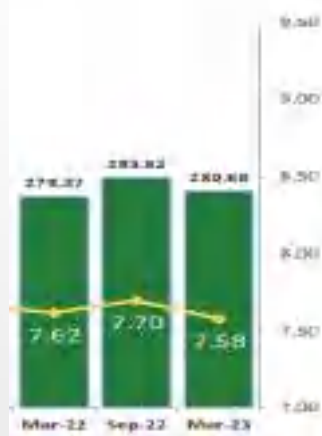
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi, September 2012–Maret 2023

Secara umum, pada periode September 2012–Maret 2023, tingkat kemiskinan di Jambi mengalami kenaikan dari sisi jumlah penduduk miskin, sedangkan persentase penduduk miskin mengalami penurunan. Pada Maret-September 2015 mengalami kenaikan signifikan baik jumlah maupun persentase, dan seterusnya mengalami penurunan. Pada September 2020 dan Maret 2021 kembali mengalami kenaikan setelah cukup lama melandai.

Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret-September 2015 dipicu oleh dampak kebakaran hutan. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2020 dan Maret 2021 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Pada Maret 2023 kembali turun sebagai dampak membaiknya kondisi perekonomian.

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp397.125,00 (74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422,00 (25,85 persen). Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2022 sampai dengan Maret 2023 disajikan pada Gambar berikut ini :

Diagram 3.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2022 - Maret 2023



BPS Provinsi Jambi, 2023

Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Maret 2022–Maret 2023

Jumlah penduduk miskin di Jambi pada Maret 2023 mencapai 280,68 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 3,1 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,31 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 7,58 persen, menurun 0,12 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,04 persen poin terhadap Maret 2022.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2022–Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 2,5 ribu orang, dan di perdesaan juga turun sebesar 600 orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 10,48 persen menjadi 10,19 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 6,32 persen menjadi 6,28 persen.

Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera Maret 2023

Persentase dan jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera pada Maret 2023. Persentase penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung yaitu masing-masing sebesar 14,45 persen, 14,04 persen, 11,78 persen, dan 11,11 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi Bangka Belitung, yaitu sebesar 4,52 persen.

Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Bangka Belitung. Berikut disajikan Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera, Maret 2023.

Tabel 3.7. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sumatera, Maret 2023.

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,39	16,92	14,45
Sumatera Utara	8,23	8,03	8,12
Sumatera Barat	4,67	7,23	3,95
Riau	6,73	6,65	6,68
Jambi	10,19	6,28	7,38
Sumatera Selatan	11,07	12,21	11,78
Bengkulu	14,21	13,96	14,04
Lampung	8,02	12,65	11,11
Bangka Belitung	3,34	5,85	4,52
Kepulauan Riau	5,05	10,69	5,69
INDONESIA	7,29	12,22	9,36

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Perkembangan Garis Kemiskinan, Maret 2022–Maret 2023

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Berikut disajikan perkembangan garis kemiskinan pada Maret 2022 sampai dengan Maret 2023.

Tabel 3.8. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2022-Maret 2023

Daftar Komoditi	Sumbangan Rp/Kapita/Bulan		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
Perkotaan			
Maret 2022	40.248	37.146	40.798
September 2022	37.729	36.416	38.555
Maret 2023	42.566	37.142	40.125
Perubahan Mar22-Mar2023	1.823	6,93	6,93
Perubahan Sep22-Mar2023	4,79	7,18	2,15
Perdesaan			
Maret 2022	39.900	32.345	39.911
September 2022	39.442	30.812	34.147
Maret 2023	37.069	31.140	34.278
Perubahan Mar22-Mar2023	4,44	6,93	5,71
Perubahan Sep22-Mar2023	3,79	3,30	3,10
Total			
Maret 2022	41.444	34.411	41.448
September 2022	40.293	34.188	40.598
Maret 2023	42.278	34.210	40.446
Perubahan Mar22-Mar2023	4,44	4,44	4,44
Perubahan Sep22-Mar2023	3,79	3,30	3,10

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 adalah sebesar Rp599.688,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,34 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2022, terjadi kenaikan sebesar 9,86 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK Maret 2023 sebesar 75,45 persen.

Pada Maret 2023, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar di perdesaan yakni sebesar 20,06 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 16,61 persen. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar di perdesaan yaitu sebesar 17,61 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 15,10 persen.

Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (5,39 persen di perkotaan dan 3,77 persen di perdesaan), telur ayam ras (4,00 persen di perkotaan dan 3,20 persen di perdesaan), cabe merah (3,93 persen di perkotaan dan 4,00 persen di perdesaan), mie instan (2,86 persen di perkotaan dan 2,19 persen di perdesaan), bawang merah (2,37 persen di perkotaan dan 2,27 persen di perdesaan), gula pasir (2,19 persen di perkotaan dan 2,38 persen di perdesaan), dan seterusnya.

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, dan pakaian jadi perempuan dewasa.

Tabel 3.9. Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2023

Kategori Komoditi	Perkotaan	Kategori Komoditi	Perkotaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Nilai	71,41	Nilai	73,25
Jagung	1,89	Jagung	3,08
Beras berketan putih	12,30	Beras berketan putih	17,61
Jagung manis	0,28	Cabe merah	4,00
Telur ayam ras	1,18	Jagung manis	1,77
Cabe merah	0,81	Telur ayam ras	4,28
Mis terasi	0,46	Cabe putih	0,34
Kentang varietas	2,27	Kentang varietas	2,27
Susu pasteurisasi	2,29	Jeli ikan	2,19
Tenggol ikan kembung	2,40	Cabe merah	2,02
Kacang tanah	0,81	Tenggol ikan kembung	1,68
Lentur	1,11	Lentur	0,15
Selaku Makanan	24,58	Selaku Makanan	28,45
Perikanan	4,21	Perikanan	7,00
Pisang	0,40	Pisang	0,34
Lada	1,10	Lada	0,46
Pendulutan	0,44	Pendulutan	0,15
Petengkep telur	0,49	Petengkep telur	0,46
Jahe	0,76	Jahe/jadi pengapal domain	0,81
Pakuas/jadi pengapal domain	0,72	Pakuas/jadi pengapal domain	0,81
Lentur	0,62	Lentur	0,78

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Garis Kemiskinan per Rumah Tangga, Maret 2023

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2023 adalah sebesar Rp2.956.462,-/bulan naik sebesar 6,00 persen dibanding kondisi Maret 2022 yang sebesar Rp2.789.122,-/bulan.

Tabel 3.10. Garis Kemiskinan per Kapita Rumah Tangga Miskin, September 2022–Maret 2023

Tahun	Garis Kemiskinan per Kapita (Rp/ kapita/bulan)	Rata-rata Anggaran Rumah Tangga Miskin	Garis Kemiskinan Rumah Tangga Miskin (Rp/ rumah tangga/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
September 2022	889.946	4,78	2.193.111
Maret 2023	1.960.887	4,91	2.956.462
Perubahan September 2022–Maret 2023 (%)	22,04	0,26	6,00

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan

memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode September 2022– Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan, sama halnya dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 1,195, naik dibandingkan September 2022 yang sebesar 1,193. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami kenaikan dari 0,237 menjadi 0,287.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Pada Maret 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,616, sedangkan di perdesaan jauh lebih rendah, yaitu mencapai 0,985. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,368, sedangkan di perdesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,246.

Tabel 3.11. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2022–Maret 2023

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2022	1,167	0,929	1,174
September 2022	1,178	0,921	1,199
Maret 2023	1,616	0,985	1,195
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)			
Maret 2022	0,285	0,238	0,264
September 2022	0,280	0,245	0,257
Maret 2023	0,368	0,246	0,287

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Berbagai Program yang dilakukan secara crosscutting antar peangkat daerah turut mempengaruhi pencapaian penurunan angka kemiskinan. Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

3. Program Peningkatandaya Tarik Destinasi Pariwisata
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Pemberdayaan Sosial
8. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
9. Program Rehabilitasi Sosial
10. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

SASARAN STRATEGIS 3 :

Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar

Indikator Kinerja :

1. RASIO KONEKTIVITAS
2. AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK
3. PERSENTASE DESA/ KELURAHAN YANG MEMILIKI AKSES INTERNET

INDIKATOR KINERJA : RASIO KONEKTIVITAS

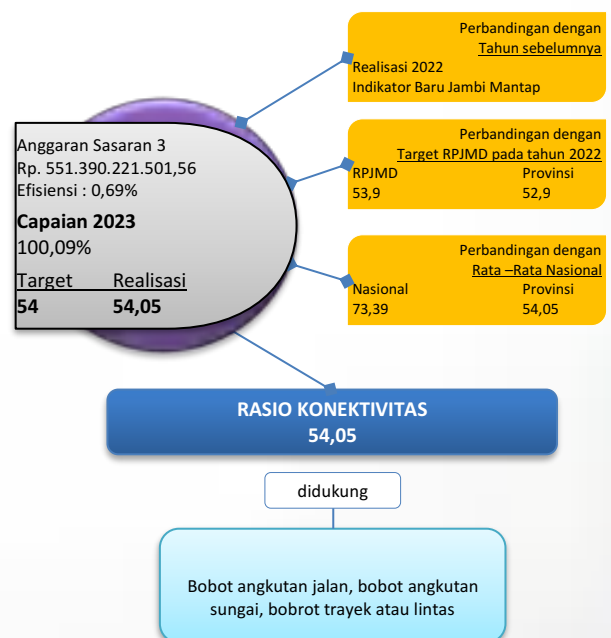
Konektivitas transportasi yang memadai menjadi prasyarat bagi kemajuan dan kualitas bangsa dan negara untuk bisa bersaing dengan negara dan bangsa lain. Sistem dan konektivitas transportasi yang memadai juga dapat meningkatkan devisa dan pendapatan negara, mempermudah alur distribusi barang dan jasa sehingga mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dapat mendistribusikan barang dan jasa lebih efektif dan efisien.

Upaya mengintegrasikan sektor transportasi yang efektif dan efisien terus dilakukan, demikian juga konektivitas transportasi dari satu titik ke

titik yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain.

Di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki provinsi dan luasnya jangkauan wilayah, strategi desain konektivitas transportasi diarahkan pada prioritas konektivitas transportasi yang mendukung pengembangan potensi ekonomi wilayah dan kelancaran logistik.

Dalam sistem transportasi, konektivitas memainkan peran penting dalam sebuah penyelenggaraan transportasi. Konektivitas merupakan satu kesatuan dalam jaringan transportasi yang mengacu pada kerapatan sambungan di jalan atau jaringan jalan dan kelangsungan dalam jaringan tersebut. Apabila konektivitas meningkat, jarak perjalanan menurun dan pilihan rute meningkat atau semakin banyak, sehingga perjalanan lebih mudah dan dapat langsung berpindah cepat antar tujuan dengan sistem yang sudah terbangun.



Rasio Konektivitas Provinsi Jambi mencapai angka 54,05%. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 54% maka capaian

kinerja pada indikator ini sebesar 100,09% masuk dalam kategori tinggi.

Terwujudnya konektivitas nasional, regional, dan lokal merupakan dambaan seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Rasio konektivitas diukur dengan rumusan sebagai berikut :

Rasio konektivitas pelayanan angkutan = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot ASDP})$

$$\begin{aligned} IK1 (\text{angkutan jalan}) &= \frac{(\text{Jumlah trayek yang dilewati} \times \text{bobot trayek})}{\text{Jumlah kebutuhan trayek}} \\ &= \frac{(32 \times 0,8)}{47} \\ &= 0,545 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} IK1 (\text{ASDP}) &= \frac{(\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi} \times \text{bobot lintas})}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan}} \\ &= \frac{(2 \times 0,8)}{3} \\ &= 0,53 \end{aligned}$$

Maka :

$$\begin{aligned} \text{Rasio konektivitas pelayanan angkutan} &= (0,545 \times 70) + (0,53 \times 30) \\ &= 38,15 + 15,9 \\ &= 54,05 \end{aligned}$$

Bobot angkutan jalan atau ASDP : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot ASDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)

Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{54,05}{54} \times 100\% \\ &= 100,09\% \end{aligned}$$

Sasaran dengan indikator kinerja Rasio Konektivitas Pelayanan Angkutan ini dicapai melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayanan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
2. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
3. Penerbitan izin usaha untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.

Rasio konektivitas turut didukung oleh pentingnya kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengukuran atas indikator kinerja Kinerja lalu lintas dilakukan dengan cara membandingkan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Adapun hasil pengukuran kinerja lalu lintas angkutan jalan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{VC Rasio di Jalan Provinsi} &= \frac{(\text{VC rasio perkotaan} + \text{VC rasio luar kota})}{2} \\ &= \frac{0,66 + 0,45}{2} \\ &= 0,55 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Capaian kinerja} &= \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% \\ &= \frac{0,55}{0,55} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sasaran dengan indikator Kinerja Lalu Lintas dicapai melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Provinsi
2. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
3. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi

Pengecekan Kondisi Jalan Nasional Oleh Gubernur Jambi
bersama Bapak Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri PU-PR Republik Indonesia



4. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
7. Peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal type B

Adapun faktor - faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, penertiban dan pengawasan operasional sektor perhubungan baik LLAJ, Sungai, Laut maupun Udara yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sarana prasarana dan sumber daya yang ada; keterbatasan kewenangan Provinsi di sektor perhubungan khususnya perhubungan laut dan udara.
2. Belum tuntasnya proses perencanaan yang berkelanjutan khususnya perencanaan pembangunan jalan kereta api trans sumatera di Provinsi Jambi dan tindak lanjut Penyusunan Master Plan Angkutan Sungai Provinsi Jambi, karena tidak tersedianya alokasi dana.

3. Tingginya tingkat kerusakan jalan akibat overloading karena belum didukung oleh prasarana dan fasilitas pendukung pengawasan angkutan yang sesuai kebutuhan operasional dan standar yang ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja indikator konektivitas tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. Manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, peng mawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis
- b. Kesesuaian penyusunan APBD Provinsi Jambi dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
- c. Kondisi sosial masyarakat Provinsi Jambi yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan tata tertib lalu lintas

Tingkat pencapaian konektivitas yang lebih baik tidak terlepas dari peningkatan kualitas jalan yang semakin baik pula. Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral, karena jika tidak mampu dilaksanakan akan berakibat terhambatnya aktifitas perpindahan barang dan orang. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi

Jambi berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi sampai dengan Tahun 2015 adalah 1129,906 km. Beberapa ruas Jalan provinsi yang telah ditetapkan tersebut merupakan jalan menuju sentra perekonomian dengan total sepanjang 855,589 km.

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas. Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534 / KPTS / M / 2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang.



Aktivitas Perbaikan Jalan Provinsi Jambi

Dalam rangka mewujudkan jalan dalam kondisi mantap, maka penanganan jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2023 difokuskan pada pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan drainase di jalan tersebut. Capaian indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2023 adalah sebesar 78,99%. Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 83,23%, maka persentase capaian ini mencapai 94,91% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.



Salah Satu Sudut Kondisi Jalan Provinsi Jambi

Guna mewujudkan capaian di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Program Pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan – kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan.

Terjadinya penurunan jalan provinsi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan infrastruktur. Di awal periode 2023 ini tidak hanya dari segi jalan mantap provinsi saja, tapi juga indikator pendukung lainnya seperti jalan menuju akses sentra produksi yang mendukung program - program prioritas terwujudnya Jambi Mantap 2026.

Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan jalan provinsi dalam kondisi mantap ini yaitu terdiri atas 3 faktor yakni : a) Kemampuan teknis, b) Pengawasan yang baik, c) Matangnya perencanaan.

Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kerusakan jalan yang terjadi tidak serta merta bisa langsung ditangani, namun harus menunggu perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga kondisi jalan yang rusak akan semakin parah.

Selain itu, peningkatan kondisi jalan sedikit mengurangi jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun.

Guna memastikan konektivitas selalu terjaga dengan baik, maka Pemerintah Provinsi Jambi konsisten dengan melakukan berbagai langkah strategis diantaranya :

Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan alat berat sebagai alat tanggap darurat untuk penanganan awal sehingga kerusakan tidak semakin parah menjelang perbaikan dilakukan pada tahun berikutnya.

- a. Meningkatkan kemampuan teknis jalan yang seiring dengan pengawasan yang baik dan perencanaan yang matang.
- b. Selain melakukan perbaikan secara fisik, juga dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan Perkeretaapian
3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
4. Program Pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan.

INDIKATOR KINERJA : AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK



Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal

air bersih. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan

Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *universal goals* serta target nasional dan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030.



Dalam rangka mendukung target nasional ini, Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran jangka menengah daerah. Sementara untuk mendukung fokus ketersediaan pangan, salah satu prasarana pendukungnya adalah ketersediaan dan akses terhadap air bersih. Adapun capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih ditunjukkan oleh Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, perkotaan dan perdesaan.

Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Ilustrasi Ketersediaan Air Minum Layak



Akses air minum layak adalah jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Termasuk juga ketika sumber air utama yang digunakan oleh rumah tangga berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang, namun sumber air utama untuk mandi/cuci/dll yang digunakan adalah leding, sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindungi, mata air terlindung, dan air hujan.

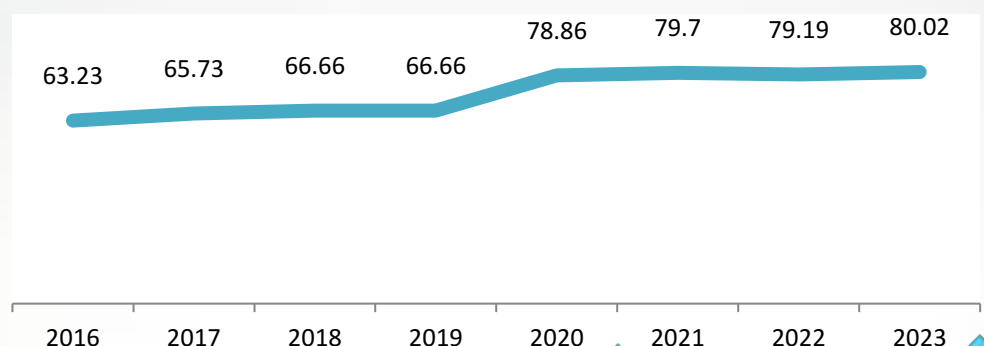
Capaian Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2023 sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :



Pada tahun 2023, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan terealisasi sebesar 80,02 persen. Capaian ini tergolong masih cukup jauh dalam mencapai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 83,92 persen serta terealisasi sebesar 95,35% dengan kriteria sangat tinggi.

Perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan Provinsi Jambi pada tahun 2023 adalah sebesar 80,02%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2022 yakni sebesar 83,92% maka dengan capaian sampai dengan tahun 2022 mencapai 95,35% dan termasuk dalam kategori tinggi.

Grafik 3.3. Perkembangan Capaian Akses Terhadap Air Minum Layak Provinsi Jambi Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi, Dinas PUPR Prov. Jambi 2023, 2024

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

Capaian terhadap akses air minum layak berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.12. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota, Sumber Air Minum Bersih, Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum 2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality		Sumber Air Minum Bersih Clean Drinking Water Source	Akses Air Minum Layak Access to Improved Drinking Water Source
(1)		(2)	(3)
01.	Kerinci	67,70	79,25
02.	Merangin	49,96	55,90
03.	Sarolangun	50,37	71,44
04.	Batang Hari	71,05	82,60
05.	Muaro Jambi	70,82	73,00
06.	Tanjung Jabung Timur	50,91	86,91
07.	Tanjung Jabung Barat	46,90	92,04
08.	Tebo	71,69	74,76
09.	Bungo	73,26	76,02
10.	Kota Jambi	90,66	98,41
11.	Kota Sungai Penuh	92,00	90,74
Provinsi Jambi		67,47	80,02

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Dinas PUPR Prov. Jambi 2023, 2024

Tabel 3.13. Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Regional, 2023

Provinsi	Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak (Persen)								
	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ACEH	94,34	95,36	95,05	86,03	86,77	86,78	88,79	89,7	89,74
SUMATERA UTARA	96,12	96,1	96,2	84,48	86,99	86,83	90,89	92,13	92,18
SUMATERA BARAT	82,4	83,07	83,75	74,73	77,53	77,41	83,4	85,23	85,58
RIAU	86,21	84,47	85,66	85,45	87,12	86,87	88,76	89,07	89,47
JAMBI	90,08	90,66	91,57	74,84	73,78	74,11	79,7	78,19	80,02
SUMATERA SELATAN	93,26	93,5	93,67	78,89	82,33	83,37	84,7	86,16	87,19
BENGKULU	81,85	83,75	79,23	60,35	67,9	69,14	67,39	72,07	73,06
LAMPUNG	87,5	88,39	91,81	77	78,48	78,29	80,2	81,6	82,78
KEP. BANGKA BELITUNG	77,44	85,82	86,07	66,12	74,82	75,07	73,4	80,96	81,64
KEP. RIAU	82,97	83,12	84,78	64,57	66,88	71,03	80,83	81,82	82,1
DKI JAKARTA	99,86	97,93	99,42	-	-	-	99,86	97,93	99,42
JAWA BARAT	96,1	94,95	96,18	83,94	86,32	85,62	92,24	93,04	93,86

Sumber : BPS Provinsi Jambi, Dinas PUPR Prov. Jambi 2023, 2024

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Peningkatan Prasarana,Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi



Permasalahan :

Upaya peningkatan proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menemukan kendala yang berhubungan dengan target cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

Solusi :

Terus melakukan perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten / kota dalam pemenuhan sarana prasarana air bersih sesuai dengan kewenangan masing-masing

INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE DESA / KELURAHAN YANG MEMILIKI AKSES INTERNET



Konektivitas internet saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Konektivitas internet sekarang menjadi hal yang inklusif dibandingkan satu dekade yang lalu.

Pasca pandemi Covid-19 mempercepat penetrasi internet di Indonesia ketika kegiatan perkantoran dan pendidikan banyak dilakukan di rumah, serta masyarakat mengurangi mobilitas di luar rumah. Internet menjadi sarana bagi masyarakat untuk bekerja, berkomunikasi, mendapatkan hiburan, akses pembelajaran, perbankan, kesehatan, bertransaksi dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi internet masih dan akan terus berkembang di luar yang kita bayangkan. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan populasi yang tinggi dan tersebar.

Program DUMISAKE Gubernur-Wakil Gubernur Jambi Al Haris - Abdullah Sani telah melaksanakan penyediaan akses internet gratis telah dapat dinikmati oleh masyarakat.

Melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tersebut dalam Jambi Cerdas dan Pintar sebagaimana melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi Melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika, Terus Berupaya Menghadirkan Ketersediaan Jaringan Internet Di Seluruh Daerah-daerah Blank Spot. Penyediaan Jaringan Internet Melalui Program Dumisake Untuk Alokasi Tahun 2023 Yang Dimulai Sejak Akhir Bulan Juni Lalu, telah selesai dilaksanakan.



Program Unggulan Jambi Cerdas Dan Pintar Dari Pemerintah ini pada tahun 2023 Berhasil Mengentaskan 80 Desa Di Provinsi Jambi Yang Tidak Memiliki Akses Internet. Penyedia Akses Internet Bagi Masyarakat Itu, Merupakan Lanjutan Penyelesaian Program Pengentasan Blank Spot Yang Tersebar Di 305 Desa Di Provinsi Jambi.

Capaian kinerja Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet dapat dilihat pada gambar berikut :



Dari total 1.562 Desa di Provinsi Jambi, terdapat 305 desa yang dikategorikan un-serve dan secara bertahap telah diberikan layanan internet desa sejak Tahun 2022 lalu sebanyak 125 desa, pada tahun 2023 sebanyak 80 desa, dan pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi akan menuntaskan target kinerja RPJMD dengan

menyambungkan dan memberi layanan pada 100 desa sebagai penutup program internet desa.

Pada Tahun 2022 Kominfo Mencatat, Sudah Berhasil Menyambungkan Jaringan Internet Untuk 125 Desa Blank Spot Yang Tersebar Di Sejumlah Daerah. Sementara Untuk Penyambungan 100 Desa Lainnya, Akan Dilanjutkan Pada Tahun 2024 Sesuai Target Penyelesaian Termasuk Tambahan Pembangunan Jaringan Repeater.

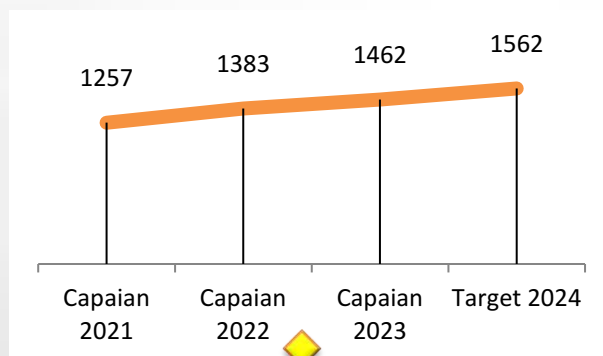
Upaya pengentasan blank spot di wilayah Provinsi Jambi, dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah, melalui kemudahan akses internet.

Awalnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan uji coba di 4 kabupaten dan Desa yang memang prioritas yang siap mendukung program ini dari Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan sebagian lagi dilaksanakan. Selama proses pengerjaan tidak terdapat persoalan yang menjadi kendala, melainkan hanya sedikit memakan waktu, karena jarak tempuh dan rute-rute menuju ke pelosok desa. Rute itu kadang harus nyeberang sungai, tetapi sejauh ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tersedianya akses internet sampai dengan ke pelosok Desa, ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Desa menjadi Desa Mandiri dan cepat mendapatkan informasi informasi terkini sehingga dapat mendorong perekonomian.

Azaz manfaat nya program ini sangat banyak, salah satu nya mendukung Desa itu supaya maju. Karena dengan berdirinya ini Desa akan mandiri tentu akan meningkatkan perekonomian bagi UMKM, nanti masyarakat di desa juga bisa membuat website.

Grafik 3.4. Trend Peningkatan Internet Desa



SASARAN STRATEGIS 4 :

Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar

Indikator Kinerja :

1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
2. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) BERBASIS LAHAN

INDIKATOR KINERJA :

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP



Kualitas lingkungan hidup Provinsi Jambi merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk.

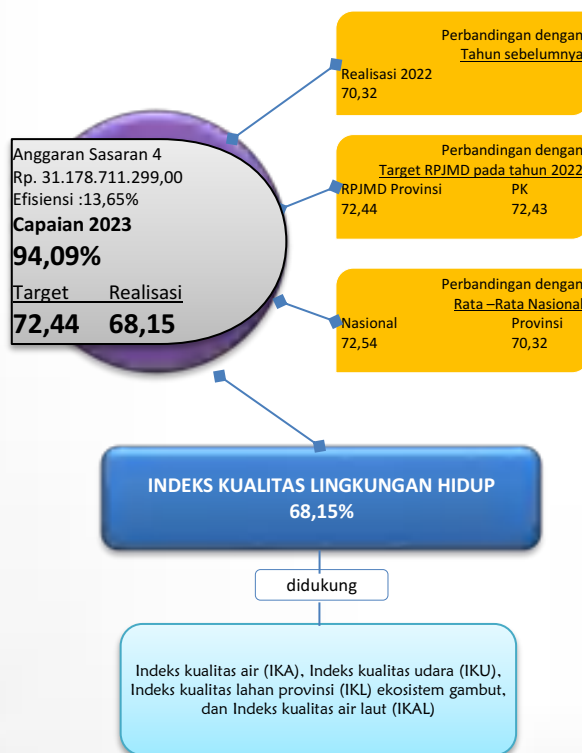
Tekanan ekonomi semakin kuat dan berlangsung terus menerus yang secara struktural melemahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan indikator bagi berlangsungnya proses tersebut.

Berbagai isu strategis lingkungan hidup di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Isu implementasi perencanaan TPB, dengan permasalahan belum tercapainya TPB bidang lingkungan hidup terkait dengan penurunan emisi GRK, jumlah target pengawasan pemegang izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jambi dan pengelolaan persampahan.

2. Isu kualitas lingkungan dan kerusakan SDA, dengan permasalahan :
 - a. menurunnya kualitas air permukaan (sungai dan danau) akibat peningkatan jumlah limbah domestik, dunia usaha dan adanya PETI
 - b. tingginya kerusakan sumber daya alam pada ekosistem sungai, pesisir laut, hutan dan lahan gambut.
3. Isu pengelolaan sampah dan LB3, dengan permasalahan :
 - a. Masih besarnya jumlah timbulan sampah
 - b. Meningkatnya limbah medis
 - c. Kesadaran Masyarakat untuk mengurangi dan menangani timbunan sampah belum optimal

Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :



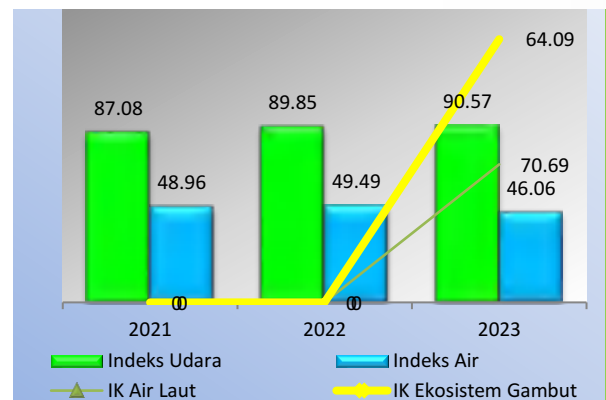
Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa indikator pendukung antara lain : Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), Indeks kualitas lahan provinsi (IKL)

ekosistem gambut, dan Indeks kualitas air laut (IKAL).



Gambaran capaian kinerja pendukung Indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Diagram 3.5. Capaian Kinerja Pendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



SUMBER : DINAS LINGKUNGAN HIDUP, 2022

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diintroduksi sejak tahun 2009. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Konsep ini merupakan penerapan konsep Environmental Performance Index (EPI), yang kriterianya meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk

menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL).

Sejak dua tahun terakhir, metode dan parameter yang digunakan untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Bobot masing-masing komponen ditentukan dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP), selain itu, terdapat penambahan komponen baru yaitu IKEG dan IKAL. Terdapat delapan parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu DO (Oksigen Terlarut), Fecal Coliform, COD, BOD, pH, Total Fosfat (T-P), Nitrat ($\text{NO}_3\text{-N}$), dan TSS. Untuk Komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), jumlah parameter yang digunakan sebanyak 3 parameter, yaitu NO_2 , SO_2 , dan $\text{PM}_{2.5}$. Sementara itu, komponen IKTL, jumlah parameter yang digunakan adalah tutupan lahan (TH), tutupan vegetasi non-hutan (TnH) termasuk semak belukar, ruang terbuka hijau, area rehabilitasi hutan dan lahan, sedangkan parameter pada komponen IKEG terdiri dari kanal dan luasan area terbakar. Kemudian komponen IKAL, yakni TSS, DO (oksigen terlarut), minyak dan lemak, amonia total, dan fosfat (sebagai orto fosfat).

INDEKS KUALITAS UDARA

Indeks Kualitas Udara (IKU) menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara adalah gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum, parameter tersebut yakni kadar Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2).

Indeks kualitas udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan. Udara merupakan campuran berbagai macam komponengas nitrogen 78% dan oksigen 21% serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Pada tahun 2023, IKU dihitung berdasarkan hasil pengukuran kualitas udara ambient dengan metode Passive Sampler yang dilakukan di 4 lokasi, yaitu area transportasi, industri dan 2 titik area komersial, yaitu dalam hal ini pemukiman



dan perkantoran. Metode ini dilaksanakan bekerja sama dengan KLHK. Dalam satu tahun umumnya dilakukan 2 (dua) kali periode pemantauan dengan durasi pemantauan masing-masing 2 minggu. Parameter yang diuji dengan metode ini terbatas pada parameter NO₂, SO₂ dan PM_{2.5}.

Metode pengukuran ini merupakan metode standar yang saat ini diberlakukan secara nasional untuk digunakan dalam menghitung IKU di Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Skala nilai IKU adalah 0-100, dimana semakin tinggi nilai IKU berarti kualitas udara, khususnya terkait parameter NO₂, SO₂ dan PM_{2.5} semakin baik.

Hasil pengolahan data dan perhitungan IKU Provinsi Jambi tahun 2023 adalah 90,57 sedangkan target tahun 2022 ditetapkan sebesar 84,52 sehingga capaian kinerjanya mencapai 107,15%. Berdasarkan kategori IKU, bahwa nilai IKU 90,57 mengandung arti kualitas udara Provinsi Jambi berada dalam kategori “sangat baik” ($90 \leq X < 100$). Tren IKU Provinsi mengalami peningkatan sejak tahun 2016-2023. Tahun 2023 nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi karena turunnya konsentrasi NO₂ dan SO₂ di kabupaten/kota. Nilai IKU ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu 89,85.

Tren IKU Provinsi mengalami peningkatan sejak tahun 2016 - 2023. Tahun 2023 nilai IKU mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi karena turunnya konsentrasi NO₂ dan SO₂ di kabupaten/kota.

Diagram 3.6. Indeks Kualitas Udara Provinsi Jambi



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi 2023, 2024

Hal ini merupakan dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri) dan penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan dan sebagainya.

Berdasarkan grafik terlihat nilai Indeks Kualitas Udara dari tahun 2016 hingga tahun 2023 lebih berfluktuatif. Provinsi Jambi telah melaksanakan amanat undang-undang maupun peraturan perundangan dibawahnya terkait pengendalian pencemaran udara dengan melakukan berbagai program kegiatan sebagai berikut :

1. Tindakan Persuasif melalui program pembinaan dan penilaian kinerja lingkungan Instansi Pemerintah, Swasta maupun masyarakat umum yang berdampak pada perbaikan mutu udara, diantaranya :
 - a. Pembinaan pengelolaan lingkungan bagi industri dan kegiatan usaha lainnya;
 - b. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan melalui PROPER;
 - c. Penghargaan Kalpataru bagi pelestari dan penyelamat lingkungan;
 - d. Program Adiwiyata dan Program Kampung Iklim
 - e. Pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan industri seperti PROPER oleh KLHK Kinerja pengelolaan lingkungan industri, termasuk Pengendalian Pencemaran Udara meningkat dari tahun ke tahun yang tentunya dapat berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas udara di Provinsi Jambi.
2. Tindakan Represif berupa pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
3. Pemantauan rutin kualitas udara ambien secara rutin pada lokasi pemukiman, lalu lintas padat dan sekitar industri.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengendalikan pencemaran udara antara lain :

- Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien di 11 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 4 titik yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi dan perkantoran;
- Melakukan pemantauan kegiatan terhadap industri yang memenuhi baku mutu emisi.

Pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metoda Passive Sampler dengan parameter yang diukur SO₂ dan NO₂. Pengukuran dilakukan dalam 2 tahap di 4 titik pemantauan pada 11 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga turut melakukan pemantauan kualitas udara, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri LHK Nomor SE.4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

Pemantauan udara dengan menggunakan AQMS, parameter yang dipantau adalah PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂, NO₂, O₃, HC, dan CO. Data yang diterima dari stasiun pemantau kualitas udara, diolah menjadi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di ruang kendali AQMS (main center), kemudian dikirim ke display indoor dan outdoor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai IKU ini antara lain :

- Dampak dari menurunnya aktivitas baik dari sumber bergerak (transportasi) maupun sumber tidak bergerak (industri) ;
- Dampak dari penerapan kebijakan pengendalian pencemaran udara seperti pengetatan baku mutu emisi maupun kebijakan lain di daerah seperti pembatasan kendaraan, pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan dan sebagainya;
- Faktor meteorologi seperti arah angin, kecepatan angin dan jumlah hari hujan di suatu daerah, serta waktu pengambilan sampel (musim penghujan atau musim kemarau) dan durasi serta frekuensi pengambilan sampel untuk tambahan data dari daerah.

Rekomendasi pengendalian pencemaran udara untuk mempertahankan atau meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU), antara lain :

- Penyediaan anggaran pengelolaan lingkungan yang bersumber dari APBD untuk menambah jumlah data dan lokasi pemantauan
- Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM untuk meningkatkan kemampuan teknis
- Membuat program kegiatan inovasi

INDEKS KUALITAS AIR

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu, sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.



Salah Satu Sudut Tampilan Kondisi Sungai Batang Hari

Sehubungan dengan peranan tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas air adalah gambaran kualitas air di suatu wilayah dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman tersebut menjelaskan penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index – PI).

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks

pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Hasil pemantauan kualitas air Provinsi Jambi Tahun 2023 dari data hasil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dengan sumber dana APBD diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14. Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Batanghari Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2023

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	0	38%	70	26,25
Ringan	14	38%	50	29,17
Sedang	1	4%	30	1,25
Berat	0	0%	10	0,00
Total	14			
Indeks Kualitas Air				56,67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Tabel 3.15. Indeks Kualitas Air (IKA) Sementara Sungai Pengabuan di Provinsi Jambi TA.2023

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	1	17%	70	11,67
Ringan	5	83%	50	41,67
Sedang	0	0%	30	0,00
Berat	0	0%	10	0,00
Total	6			
Indeks Kualitas Air				53,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Hasil perhitungan pemantauan air sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terhadap 12 titik sungai Batanghari memperoleh indeks kualitas air (IKA) sebesar 56,67, dan 3 titik Sungai Pengabuan memperoleh indeks kualitas air sebesar 53,33.

Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2023 sebesar 46,06, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 (49,49) sebesar 3,43 poin (6, 93%). Nilai IKA Provinsi Jambi tahun 2023 belum mencapai

target apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2023 sebesar 61,29.

Tabel 3.16. Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi TA.2023

MUTU AIR	JUMLAH TITIK SAMPEL YANG MEMENUHI MUTU AIR	PERSENTASE PEMENUHAN BAKU MUTU	BOBOT NILAI INDEKS	NILAI INDEKS PER MUTU AIR
1	2	3	4	5
Memenuhi	10	33%	70	23,33
Ringan	19	63%	50	31,67
Sedang	1	2%	30	1,00
Berat	0	0%	10	0,00
Total	30			
Indeks Kualitas Air				56,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Hasil perhitungan data indeks kualitas air tahun 2023 untuk 15 titik yang dilakukan sebesar 56,00. Namun, setelah digabung dengan data KLHK, maka indeks kualitas air Provinsi Jambi sebesar 46,06.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKA tahun 2023 belum mencapai target antara lain :

- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga (domestik)
- Deforestasi untuk pembukaan lahan menyebabkan erosi
- Tingkat kekeruhan air disebabkan berkurangnya tutupan lahan di sekitar badan sungai dan adanya aktivitas penambangan liar (PETI).



Aktivitas PETI Berdampak pada Kualitas Air Sungai Batang Hari



Kerusakan Daerah Aliran Sungai
Akibat PETI

Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia, dan biologi dalam air sungai sehingga melebihi batas baku mutu, seperti Fecal Coli, Total Coli, TSS, COD dan BOD. Pencemaran akibat limbah domestik ini menyebabkan menurunnya kualitas air sungai dan menurunkan kemampuan dalam mendegradasi bahan organik yang terkandung pada air limbah tersebut.

Tingkat pencemaran air sungai dapat mempengaruhi daya tampung sungai. Semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut.

Diagram 3.7. Posisi IKA Provinsi Jambi dibanding Target RPJMD Tahun 2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Kecenderungan penurunan kualitas air dari tahun 2019 perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas air dan mengendalikan pencemaran air.

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya, yaitu :

1. memantau kualitas air sungai di 15 titik pantau (APBD) dan 16 titik pantau (APBN)
2. memantau usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah.
3. menginisiasi Gerakan Sungai Batanghari Bersih yang ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kabupaten/Kota
4. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sesuai dengan kewenangan sebagai komitmen untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran terhadap Sungai Batanghari.
5. menyusun draft baku mutu kualitas air sebagai salah satu upaya kebijakan yang diambil untuk mengendalikan pencemaran air.

Rekomendasi pengendalian pencemaran air untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), antara lain :

1. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air
2. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik
5. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air, dan
6. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

INDEKS KUALITAS AIR LAUT

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah

membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah.

Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur menggunakan 5 (lima) parameter yaitu TSS, DO, N-NH3, Po4-P, Minyak dan Lemak. Perhitungan IKAL menggunakan data yang diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air laut yang mewakili lokasi pemantauan biota air, kawasan pelabuhan dan wisata bahari. Nilai IKAL dipengaruhi oleh sumber pencemar baik aktivitas manusia berupa limbah domestik, sektor industri, aktivitas pelabuhan maupun pembukaan lahan.

Diagram 3.8. Perbandingan Target IKAL dengan RPJMD



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2022

Capaian Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar 70,69 poin dan belum mencapai target tahun ini yakni 77,84 poin. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 10,99 poin dari 81,67 pada tahun 2022 menjadi 70,69 pada tahun 2023. Artinya, terjadi penurunan kualitas air laut di

Provinsi Jambi meskipun nilai ini sudah di atas target RPJMD 2021-2026.

Upaya pengendalian pencemaran air laut dilakukan melalui beberapa kegiatan yakni :

1. melakukan pemantauan sampah laut
2. melakukan pemantauan izin pembuangan air limbah ke laut

INDEKS KUALITAS EKOSISTEM GAMBUT

Indonesia adalah negara dengan lahan gambut terbesar ke-2 di dunia. Gambut memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah banyak. Gambut mampu menampung hingga 30 persen jumlah karbon dunia agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki fungsi untuk mencegah perubahan iklim, bencana alam, hingga menjadi penunjang perekonomian masyarakat sekitar.

Kriteria kerusakan ekosistem gambut dalam PP nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu :

1. Fungsi Lindung :
 - a. Terdapat drainase buatan
 - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
 - c. Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
2. Fungsi Budidaya :
 - a. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter dibawah permukaan gambut pada titik penaatan
 - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut
 - c. Terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
3. Fungsi Budidaya :
 - a. Muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut pada titik penaatan

- b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut

Tabel 3.17. Capaian Kinerja 2021-2023 (IKEG)

Tahun	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	
	Target	Realisasi
2021	73,39	71,10
2022	73,89	71,10
2023	74,39	64,09

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi



Monev Pemantauan Kebakaran Hutan/Lahan

Pembobotan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) , yaitu :

1. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (60%)
2. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (40%)

Cara Perhitungan Nilai IKEG yakni :

$$\text{IKEG} = (0,6 \times \text{IKEG di Fungsi Lindung Ekosistem Gambut}) + (0,4 \times \text{IKEG di Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut})$$

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang di dalamnya terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) yang mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan. Khusus untuk ekosistem gambut, dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

Penurunan kualitas ekosistem gambut terjadi antara lain terdapat penambahan kanal artifisial di luar areal dan luasan tutupan lahan. Perbaikan kualitas ekosistem gambut terjadi karena

penggunaan hasil inventarisasi skala 1:50.000 sehingga terdapat perubahan status dari Fungsi Lindung menjadi Fungsi Budidaya, dan penambahan Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) baru yang berkontribusi terhadap luasan perbaikan. Perhitungan IKEG belum memasukan komponen intervensi pemulihan yang telah dilakukan, baik melalui perbaikan tata kelola air dan rehabilitasi revegetasi, baik di lokasi konsesi maupun di APL, yang selanjutnya akan dievaluasi melalui Indeks Respons Kinerja Daerah (IRKD).

Upaya peningkatan nilai IKEG yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi meliputi :

1. Penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) sesuai dengan Permen LHK No. P.60 / MENLHK/ SETJEN / KUM.1 / 10 / 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, terdiri dari :
 - a. Rencana Pemanfaatan
 - b. Rencana Pengendalian (Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan)
 - c. Rencana Pemeliharaan (Pencadangan dan Pelestarian)
2. Desa Mandiri Peduli Gambut, proyek perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat tapak.

Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, pada tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,12 poin dibanding tahun sebelumnya.

Nilai IKLH Indonesia sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 terus meningkat. Berturut-turut nilainya 70,27; 71,45; 72,42 dan tahun ini sebesar 72,54 poin. Jika dilihat per media lingkungan, kenaikan nilai IKLH Indonesia pada tahun ini disebabkan kenaikan nilai Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air, meskipun Indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Kualitas Lahan Gambut berfluktuasi dengan tahun lalu, tidak terlalu berpengaruh terhadap agregat nilai IKLH.

Perhitungan nilai IKLH Indonesia Tahun 2023 diperoleh dari 7.331 lokasi pemantauan kualitas air, 3.076 lokasi pemantauan kualitas udara, dan 970 lokasi pemantauan kualitas air laut di seluruh Indonesia. Sementara itu, 514 data pemantauan kualitas tutupan lahan diperoleh dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam kerangka DPSIR (driving force (faktor pendorong), pressure (tekanan), state (keadaan), impact (dampaknya) dan response), variabel state sudah diukur melalui IKLH. Variabel lainnya yang tak kalah penting adalah respon yang menggambarkan kapasitas daerah untuk memitigasi faktor pendorong, tekanan, dan dampaknya.

Sejak tahun 2021 sudah dikembangkan Indeks Respon Kinerja Daerah yang memotret kapasitas daerah dalam menyusun kebijakan dan peraturan, struktur dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, alokasi anggaran, implementasi, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, penyebaran informasi, serta inovasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dicapai melalui program berikut ini :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan

INDIKATOR KINERJA : PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) BERBASIS LAHAN



Hutan adalah sumberdaya alam yang multifungsi. Dalam kaitannya dengan efek pemanasan global hutan mengurangi kadar CO₂ di udara dan memperangkapnya dalam bentuk biomassa hutan. Hutan klimaks ada dalam keseimbangan dinamik yang tidak lagi berfungsi mengurangi kadar CO₂. Jika dilakukan penebangan dengan cara yang benar, misalnya dengan tebang pilih yang mengikuti aturan, kerusakan yang terjadi adalah minimum. Pohon ditempat yang ditebang itu dipicu untuk tumbuh. Nisbah fotosintesis dan respirasi (P/R) naik sampai tercapai lagi keseimbangan. Oleh karena itu, jika penebangan dilakukan dengan baik akan menguntungkan dalam usaha penangkalan pemanasan global.

Reboisasi dan penghijauan dengan membuat hutan tanaman dengan jenis yang tumbuh cepat, penyerapan CO₂ akan berjalan cepat. Karbon yang tersimpan dalam biomassa hutan tanaman akan lebih besar daripada biomassa dalam hutan yang rusak. Apabila hutan yang rusak itu telah menjadi padang rumput. Dengan demikian hutan tanaman itu akan membantu dalam penurunan kadar CO₂ di udara. Akan tetapi pada umumnya biomassa hutan tanaman itu lebih rendah jumlah karbon yang tersimpan dalam hutan alam primer yang semula ada di tempat tersebut. Dengan demikian hutan tanaman sulit untuk dapat sepenuhnya mengembalikan kadar CO₂ udara pada tingkat seperti hutan klimaks, walaupun diproduksi bahan awet dari hutan tanaman. Apabila hutan tanaman dapat mengalihkan para peladang menjadi non-peladang, hutan yang

rusak yang semula dipakai untuk perladangan akan dapat pulih secara alamiah.

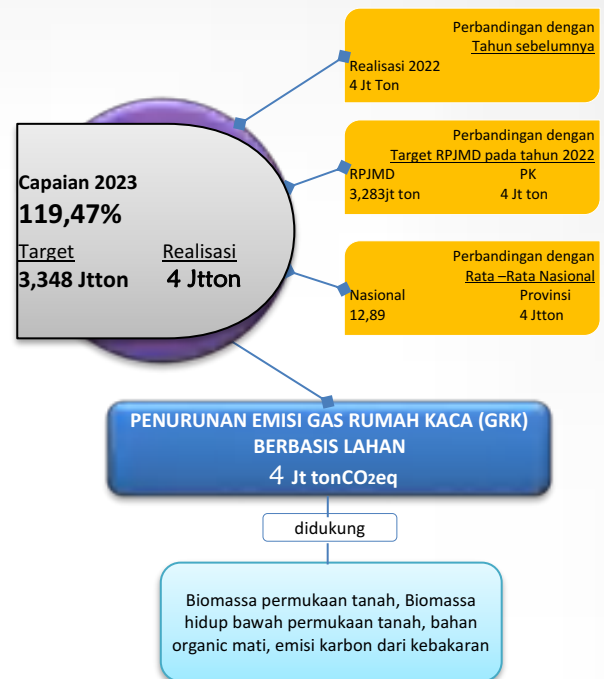
Berdasarkan perhitungan dan analisis Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) 2010 terhadap pertumbuhan emisi dan mitigasi bahwa dalam skenario bisnis seperti biasa/business As Usual, Provinsi Jambi akan menjadi kontributor emisi gas rumah kaca yang signifikan di Indonesia sampai tahun 2030. Selanjutnya diterangkan Emisi bersih GRK tahunan Jambi pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 57 MtCO₂e¹— setara dengan sekitar 3 persen dari total emisi Indonesia. Gambut dan Land Use and Land Use Change Forest (LULUCF) sejauh ini adalah kontributor emisi terbesar terhadap emisi Provinsi Jambi, mewakili 85 persen dari total emisi provinsi. Apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor beremisi tinggi, emisi netto Jambi diperkirakan akan meningkat hingga 30 persen antara tahun 2005 dan 2030 dari 57 Mt CO₂e menjadi 74 MtCO₂e.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Cq. Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim) bekerja sama dengan World Bank dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sedang mengembangkan kegiatan REDD+ dengan skema Result Based Payment melalui kegiatan *Bio Carbon Fund Integrated Sustainable Forest Landscape* (BioCF ISFL) – Jambi Sustainable Landscape Management Project (J-SLMP). Kegiatan ini didukung pendanaan multilateral, yang dikelola oleh World Bank sebagai *trustee*.

Program ini bertujuan mempromosikan pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor lahan, penurunan deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, pertanian berkelanjutan, serta perencanaan, kebijakan dan praktek penggunaan lahan yang lebih baik melalui kegiatan REDD+. Kegiatan BioCF ISFL terdiri dari tiga fase yaitu fase persiapan (tahun 2019 – 2021), *Fase pre investment* 2021 – 2025) dan *Fase Result Based Payment* (2021 - 2025).

Saat ini proyek dimaksud dalam masa pre Investment untuk mendukung dan memperkuat kelembagaan, menyusun kebijakan dan intervensi penerapan pengelolaan lahan berkelanjutan untuk menurunkan emisi termasuk prioritas manfaat non karbon, perlindungan keanekaragaman hayati dan kegiatan ekosistem lainnya, meningkatkan mata pencaharian masyarakat setempat, mengurangi

konflik tenurial dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pengembangan kerangka kerja penurunan emisi termasuk pembagian manfaat di Provinsi Jambi.



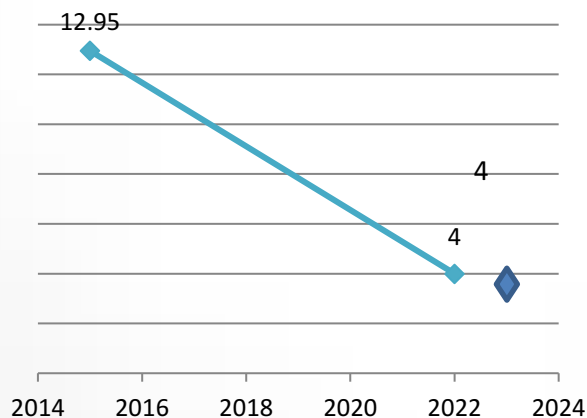
Salah satu dokumen menjadi syarat negosiasi *Emission Reduction Payment Agreement* (ERPA) adalah dokumen *Emission Reduction Program Document* (ERPD) yang saat ini sedang dalam tahap validasi oleh World Bank. Dalam rangka memenuhi kelengkapan ERPD diperlukan penyiapan dokumen dan merupakan syarat implementasi REDD+ yaitu pelaksanaan mekanisme perlindungan atau pengamanan (safeguard) untuk meminimalkan dampak negatif yang muncul dalam implementasi program.

Konsep perlindungan atau pengamanan ini mencakup berbagai isu diantaranya adalah transparansi struktur pengelolaan hutan nasional, partisipasi berbagai pihak, penghormatan terhadap pengetahuan dan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, konservasi keaneka- ragaman hayati dan hutan alam, perpindahan emisi dan resiko balik dari penurunan emisi. Oleh karenanya, di tahap ini BioCF-ISFL saat ini, salah satu kegiatan utama yang akan dilakukan adalah memfinalkan dokumen safeguards yang diperlukan untuk mengelola semua dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh implementasi proyek BioCF-ISFL di Provinsi Jambi. Safeguard documents

yang dimaksud terdiri dari Strategic Environmental and Social Assessment (SESA), Environmental and Social Management Framework (ESMF) termasuk dokumen Indigenous People Planning Framework (IPPF), Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM), dan Resettlement Planning Framework and Process Framework (RPF-PF) serta dokumen *Feedback and Grievance Redress Mechanism* (FGRM) dan Stakeholder Engagement Plan (SEP).

Dokumen ini dipergunakan untuk memastikan bahwa program yang dituangkan dalam dokumen dimaksud tidak memberikan resiko yang tinggi terhadap aspek sosial dan lingkungan. Sehubungan hal tersebut Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim bermaksud untuk mempublikasikan dokumen-dokumen Safeguard dimana dokumen dimaksud telah mendapatkan masukan dan input dari stakeholder melalui Konsultasi Publik di Provinsi Jambi pada 5 Desember 2019 dan berbagai konsultasi dengan para stakeholder di Provinsi Jambi selama kegiatan tahun 2019 – 2023.

Grafik 3.5. Trend Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2023

Dalam rangka penurunan emisi GRK, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan langkah-langkah strategis dengan memonitor dan optimalisasi capaian sasaran-sasaran jangka menengah pendukungnya antara lain:

Meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya dengan

indikator kinerjanya yakni persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya.

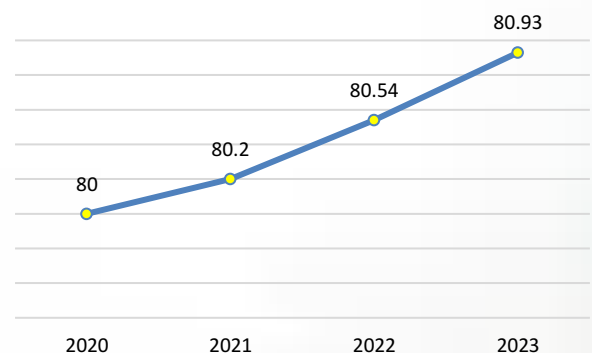
Sasaran ini dicapai melalui program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On Internasional Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi.80,



Grafik 3.6. Peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA Hayati dan Ekosistemnya



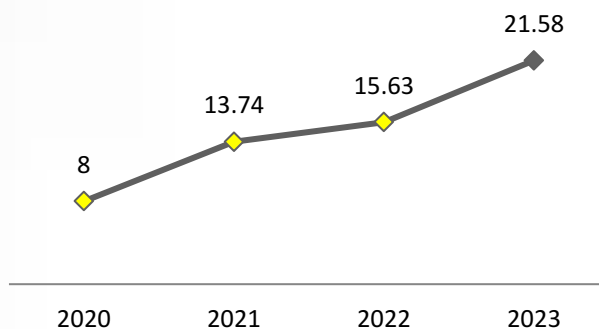
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2023, 2024

Selain pemulihan dan perlindungan SDA hayati beserta ekosistemnya, turut pula diintervensi upaya Peningkatan Pemanfaatan Akses Legal Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal. Sasaran ini dicapai

melalui program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Pada tahun 2023, peningkatan pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial dengan indikator persentase luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal mencapai angka 21,58%. Capaian luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola masyarakat secara optimal terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.7. Luas izin Perhutanan Sosial yang dikelola Masyarakat secara Optimal



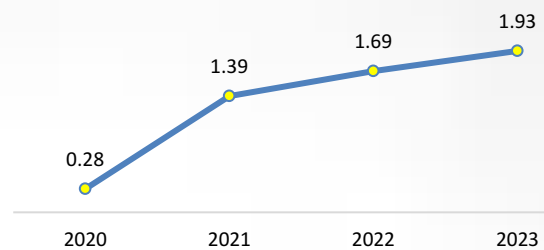
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2023

Upaya strategis turut pula dilakukan guna menekan angka emisi *carbon*. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan perluasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator Persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
- Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara UPTD KPHP Tanjab Barat Unit XV, XVI dan XVII

Capaian luasan tutupan lahan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.8. Persentase Luas Tanam Lahan kritis 2017 - 2023



Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2023

Tingginya capaian pada sasaran meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi dengan indikator persentase penurunan lahan kritis melalui rehabilitasi dikarenakan capaian penanaman pada tahun sebelumnya melebihi target yang didukung oleh kegiatan kompensasi pinjam pakai Kawasan yang pembinaan dan monitoringnya didanai dari APBD Provinsi.

Capaian penurunan lahan kritis terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 sebesar 1,93% dari target yang ditetapkan karena terjadi peningkatan luas penanaman lahan kritis dengan biaya yang ditanggung oleh pemegang IUPKH sebagai kompensasi pinjam pakai kawasan hutan.



Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- Minimnya anggaran yang disediakan
- Kurangnya Jumlah personil pengamanan (polhut) dan brigade kebakaran
- Kurangnya sarana dan prasarana

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan kerusakan kawasan hutan serta illegal pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan melibatkan instansi atau pihak lain diluar Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Kepolisian, Kejaksaan, Manggala Agni dan Instansi-Instansi vertikal lainnya).
2. Komitmen pemegang izin dalam memenuhi kewajibannya terhadap PNPB PSDH dan Dana Reboisasi.

Upaya peningkatan karbon terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi, pada tahun 2023 Gubernur Jambi ditunjuk menjadi pembicara pada kegiatan The Twenty Eight Conference of Parties The United Nation Framework Convention on Climate Change di Dubai, Uni Emirates Arab (COP28 UEA) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI)

Penunjukkan tersebut dalam rangka implementasi Surat Keputusan KLHK Nomor SK: 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Inonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU)

Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Dalam pemaparannya “Strengtening of Sub National Policies as the Real Action for Reducing Emission Greenhouse Gas in FOLU Sectors”, Gubernur Jambi menyampaikan strategi Pemerintah Provinsi Jambi yang terus fokus pada upaya dan intervensi penurunan emisi gas rumah kaca.

Jambi mempunyai ekosistem hutan dan lahan yang paling lengkap di Pulau Sumatera. Pemerintah Provinsi Jambi beserta Kabupaten/Kota mempunyai komitmen yang kuat dan mempunyai kelembagaan REDD+, serta konsistensi pada kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, konflik, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Kelembagaan.

Provinsi Jambi memiliki prioritas REDD+ yang mempunyai progres dalam penyiapan perangkat, inisiatif dan kolaborasi intervensi perencanaan lintas sektor, sehingga Jambi menjadi salah satu provinsi yang berkomitmen untuk mengurangi tingkat deforestasi tinggi, degradasi hutan dan lahan.

Provinsi Jambi memiliki 3 pilar strategi pertumbuhan ekonomi hijau. Pertama, penggunaan tata guna lahan berkelanjutan,



Gubernur Jambi menjadi Pembicara pada kegiatan The Twenty Eight Conference of Parties The United Nation Framework Convention on Climate Change di Dubai, Uni Emirates Arab (COP28 UEA) 2023

pemulihan dan peningkatan produktivitas. Kedua, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses modal pembangunan dan mata pencaharian serta pemanfaatan jasa lingkungan. Terakhir, konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan.

Sehingga, target yang ingin dicapai dari strategi tersebut yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan; pertumbuhan yang inklusif dan adil; ketahanan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; ekosistem yang sehat dan produktif sebagai penyedia jasa lingkungan; dan penurunan efek gas rumah kaca.

Selain itu masyarakat lebih sejahtera dengan lingkungan yang baik, pendapatan masyarakat lebih tinggi, pertanian yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta hutan yang lestari berdampak pada implementasi perhutanan sosial dan masyarakat hukum adat yang lebih baik dan sejahtera.

Kemudian dalam rangka mendukung pencapaian target Indonesia's FOLU Net Sink 2030 yaitu target penurunan emisi gas rumah kaca, Provinsi Jambi melalui Program/aksi Nyata Penurunan Emisi salah satunya Program J-SLMP BioCF-ISFL, telah disinergikan ke dalam Perencanaan Jangka Panjang (RPJP dan RTRW),

Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026).

Provinsi Jambi tetap konsisten dengan program dan kegiatan yang diimplementasikan melalui Perangkat daerah, Mitra Kerja Daerah, Private Sector dan Kelompok Masyarakat dalam upaya pemenuhan target Penurunan Emisi GRK Provinsi Jambi dan tujuan akhirnya berkontribusi pada penurunan emisi GRK Indonesia serta memberikan dampak kesejahteraan masyarakat," tambah Al Haris.

Untuk itu, diperlukan dukungan strategis pencapaian target optimal penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Jambi yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut : pertama meningkatkan supporting pembiayaan dalam mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Provinsi Jambi; kedua kolaborasi program dan kegiatan dalam mendukung perlindungan ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati melalui peran multi pihak.

Provinsi Jambi telah mempersiapkan Dokumen Grand Growth Planning (GGP) sebagai pedoman intervensi kegiatan dalam mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan



Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. bersama Ketua OJK dalam Seminar Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia

peningkatan perekonomian di tingkat tapak; mendorong program-program yang berkaitan dengan pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) di Provinsi Jambi; meningkatkan peran kelembagaan perubahan iklim lintas sektor yang didukung oleh Lembaga-Lembaga Donor Internasional; terakhir mendukung kebijakan Provinsi Jambi dalam membangun Kebijakan Satu Peta.

Provinsi Jambi secara geografis terdiri dari dataran tinggi, menengah dan rendah yang terbentang dari barat ke timur, secara ekologis memiliki empat taman nasional dengan luas kawasan hutan seluas lebih dari 2.098.535 hektar atau sekitar 45 persen. Dengan cukup luas dan kompleksnya kawasan hutan di Provinsi Jambi tersebut serta tingginya deforestasi yang terjadi, maka Provinsi Jambi berkomitmen dan fokus untuk melakukan intervensi perubahan iklim, salah satunya dengan adanya kelembagaan REDD+, dan melakukan kebijakan pencegahan upaya kebakaran hutan dan lahan, penanganan konflik serta Pola Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.

Dalam melakukan intervensi penurunan emisi daerah Gas Rumah Kaca (GRK), Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan penyusunan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang diintegrasikan dengan pembangunan rendah karbon yang merupakan salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga, Provinsi Jambi dengan dukungan lembaga non pemerintah telah menyusun Masterplan (Rencana Induk) Peta Jalan Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Jambi Tahun 2021-2045, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Plan) Provinsi Jambi.

Dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional, hal ini menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengimplementasikan Program BioCF-ISFL dan kontribusi para pihak dalam pembiayaan program penurunan emisi GRK, dimana Program BioCF ISFL Provinsi Jambi Tahun 2022-2025

merupakan dana hibah dari World Bank (Bank Dunia).

Saat ini, program BioCF-ISFL kita telah memasuki tahapan Pra-Investasi dengan menggunakan metode On Granting dalam menghasilkan manfaat Penurunan Emisi dengan manfaat yang diperoleh tidak hanya berkontribusi bagi lingkungan tetapi juga bagi masyarakat, sehingga nantinya target pertumbuhan ekonomi Hijau Provinsi Jambi dapat tercapai dan terwujud.

SASARAN STRATEGIS 5 :

Menurunnya Tingkat Pengangguran
Indikator Kinerja :
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

INDIKATOR KINERJA : TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.

Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran terbuka, capaian pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Jumlah angkatan kerja di Jambi Agustus 2023 sebanyak 1,89 juta orang, bertambah 3,6 ribu orang dibanding Agustus 2022 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 68,75 persen atau naik 0,9 poin.

Penduduk bekerja sebanyak 1,8 juta orang, meningkat sebanyak 4,4 ribu orang dari Agustus 2022. Jika dibandingkan dengan Agustus 2022, sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah pertanian (turun 2,77 persen poin), sedangkan sektor yang mengalami kenaikan terbesar adalah administrasi pemerintahan (naik 1,25 persen poin).

Sebanyak 1,08 juta orang (60 persen) penduduk bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal turun sebesar 0,25 persen poin dibanding Agustus 2022.

Dalam setahun terakhir persentase pekerja setengah pengangguran naik sebesar 1,8 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu naik 0,72 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,53 persen turun 0,06 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

PENDUDUK USIA KERJA DAN ANGKATAN KERJA

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 2,75 juta

orang, turun sebanyak 31,8 ribu jika dibanding Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1,89 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 858 ribu orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 1,8 juta orang penduduk yang bekerja dan 85,58 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 3,56 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 4,4 ribu sementara pengangguran turun sebanyak 0,88 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2022. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 68,75 persen, naik 0,9 persen poin dibanding Agustus 2022. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tabel 3.18. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021—Agustus 2023

Status Kadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023
	juta orang	juta orang	juta orang
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	2,74	2,78	2,75
Angkatan Kerja	1,84	1,88	1,89
– Bekerja	1,75	1,80	1,80
– Pengangguran	0,09	0,08	0,09
Bukan Angkatan Kerja	0,90	0,89	0,86
	(persen)	(persen)	(persen)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,17	67,84	68,75
– Laki-Laki	83,95	84,17	85,27
– Perempuan	49,89	48,97	51,68

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2023 TPAK laki-laki sebesar 85,27 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 51,68 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,9 persen poin, sedangkan TPAK perempuan naik sebesar 2,71 persen poin.

KARAKTERISTIK PENDUDUK YANG BEKERJA

Karakteristik Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu.

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Diagram 3.9. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2023



Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 45,19 persen, Perdagangan besar dan eceran sebesar 15,11 persen dan Penyediaan akomodasi makan minum sebesar 5,42 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini hampir sama dengan Agustus 2022.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan

struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 45,19 persen, Perdagangan besar dan eceran sebesar 15,11 persen dan Penyediaan akomodasi makan minum sebesar 5,42 persen. Pola lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini hampir sama dengan Agustus 2022.

Dibandingkan Agustus 2022, hampir semua lapangan pekerjaan mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada lapangan pekerjaan Administrasi pemerintahan (22,7 ribu orang), perdagangan besar (11,79 ribu orang), Penyediaan akomodasi dan makan minum (6,8 ribu orang). Sementara lapangan pekerjaan Pertanian turun sebesar 47,9 ribu orang, industri pengolahan turun dibandingkan Agustus 2022, hampir semua lapangan pekerjaan mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada lapangan pekerjaan Administrasi pemerintahan (22,7 ribu orang), Perdagangan besar (11,79 ribu orang), Penyediaan akomodasi dan makan minum (6,8 ribu orang). Sementara lapangan pekerjaan Pertanian turun sebesar 47,9 ribu orang, industri pengolahan turun sebesar 9,2 ribu orang dan konstruksi turun sebesar 3,7 ribu orang.

Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Pada Agustus 2023 penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/ karyawan/ pegawai yaitu sebesar 35,27 persen, sementara yang paling kecil adalah pekerja bebas di non pertanian sebesar 2,92 persen. Dibandingkan Agustus 2022, status berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai serta pekerja bebas non pertanian mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,74 persen poin, 0,29 persen poin dan 0,47 persen poin. Status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase yang terbesar adalah pekerja keluarga/tidak dibayar yaitu sebesar 1,06 persen poin.

Pada Agustus 2023, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,08 juta orang (60 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 725,79 ribu orang (40 persen). Dibandingkan Agustus 2022, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen poin.

Diagram 3.10. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2021–Agustus 2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

KARAKTERISTIK PENGANGGURAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 adalah sebesar 4,53 persen. Hal ini berarti dari 1000 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 45 orang penganggur. Pada Agustus 2023 ini, nilai TPT mengalami penurunan yaitu sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

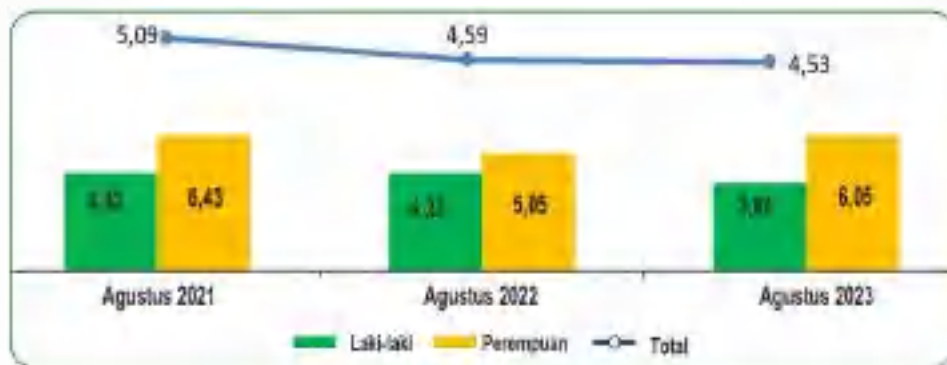
Tabel 3.19. Karakteristik Pengangguran, Agustus 2020–Agustus 2023

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Perubahan Ags 2021–Ags 2022 (persen poin)	Perubahan Ags 2022–Ags 2023 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,09	4,59	4,53	-0,50	-0,06
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	4,32	4,23	3,64	0,09	-0,69
- Perempuan	6,43	5,05	6,05	-1,38	1,00
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	7,32	7,21	6,59	-0,11	-0,68
- Perdesaan	4,04	3,35	3,47	-0,71	0,14

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Pada Agustus 2023, angka TPT laki-laki sebesar 3,64 persen lebih rendah dibandingkan TPT perempuan yang mencapai 6,05 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,69 persen poin, sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,0 persen poin. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,53 persen) jauh lebih tinggi dari TPT di daerah perdesaan (3,47 persen). TPT perkotaan menunjukkan penurunan 0,69 persen poin, sedangkan TPT perdesaan naik 0,14 persen poin jika dibandingkan Agustus 2022.

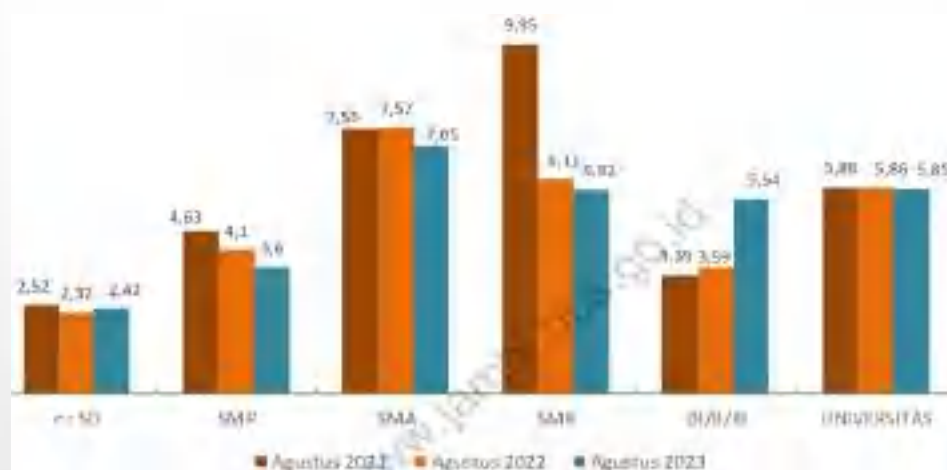
Grafik 3.9. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2021–Agustus 2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2023 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2021. Pada Agustus 2023 TPT dari tamatan sekolah menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,05 persen, sedangkan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 5,82 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 2,42 persen. Dibandingkan dengan Agustus 2022, angkut penurunan TPT terbesar ada pada kategori pendidikan SMA yaitu sebesar 0,52 persen poin.

Diagram 3.11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2021–Agustus 2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023, 2024

Tabel 3.20. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2021 - Agustus 2023

Kabupaten/Kota	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Perubahan Ags 2021-Ags 2022 (persen poin)	Perubahan Ags 2022-Ags 2023 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	2,32	2,63	2,48	0,31	-0,15
Merangin	4,83	4,69	4,35	-0,14	-0,34
Serdang	5,52	5,22	5,09	-0,30	-0,13
Batanghari	4,26	3,53	3,85	-0,74	0,32
Muaro Jambi	5,59	5,35	5,40	-0,23	0,05
Tanjung Tinjau	1,56	1,32	1,67	-0,24	0,35
Tanjung Barat	2,53	2,88	2,95	0,34	0,08
Tebes	2,83	1,38	1,71	-1,45	0,34
Bungo	5,86	5,50	5,23	-0,36	-0,27
Kota Jambi	10,66	8,95	8,27	-1,71	-0,68
Kota Sungai Penuh	3,00	2,49	3,80	-0,51	1,31
PROVINSI JAMBI	5,09	4,59	4,53	-0,51	-0,06

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023, 2024



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023, 2024

Capaian kinerja Tenaga Kerja terdaftar yang ditempatkan di Provinsi Jambi sebagaimana tabel tersebut diatas menunjukkan kinerja yang Sangat tinggi pada Tahun 2023. Capaian ini menyumbang sebanyak 30,50% dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada RPJMD 2023 sebesar 30,20 % dan Capaian pada 2022 sebesar 100,9%, kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2023 ini cukup baik, seiring berakhirnya covid -19, dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 1.930 orang dari tenaga Kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi sebanyak 6.327 orang, untuk tahun 2023 terjadinya peningkatan penempatan tenaga kerja dan tenaga kerja yang mendaftar.

Penempatan tenaga kerja seiring dengan peningkatan kualitas tenaga kerja di Provinsi Jambi. Capaian kinerja Tenaga Kerja yang dilatih dan bersertifikasi di Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang sangat tinggi pada Tahun 2023. Capaian ini menyumbang sebanyak 6,92% dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada RPJMD 2023 sebesar 5,20% dan Capaian pada 2023 sebesar 133%, dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikasi sebanyak 2.944 orang dari Jumlah Pengangguran Terbuka Tahun 2023 Provinsi Jambi dengan jumlah 42.500 orang. Untuk Capaian Kinerja Peningkatan Produktivitas sebesar 5,1% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 2,5%.

Selain itu, capaian kinerja diatas tidak terlepas dari kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan yang diimplementasikan. Capaian kinerja Kepatuhan terhadap norma-norma Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang sangat tinggi pada Tahun 2023. Capaian ini menyumbang sebanyak 126,8% dari target yang telah ditetapkan. Dengan target pada RPJMD 2023 sebesar 77% dan Capaian pada 2023 sebesar 126,8%, dengan jumlah Perusahaan yang telah menerapkan Norma Ketenagakerjaan sebanyak 15.158 Perusahaan di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dari Jumlah Perusahaan yang terdaftar dalam Wajib Laport Perusahaan sebanyak 15.522 Perusahaan. Capaian persentase Peningkatan Kelembagaan Ketenagakerjaan sebesar 15,13% , atau 155,9% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD 9,7 %, dengan jumlah perusahaan yang telah terbentuk bipartit sebanyak 154 perusahaan dari jumlah perusahaan yang memenuhi Kriteria sebanyak 1.018 Perusahaan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi dengan upaya mencapai pembangunan Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Meningkatkan kesempatan kerja sektor formal dan informal dalam dan luar negeri bagi pencari kerja dan angkatan kerja.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Meningkatkan Kualitas Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Masyarakat.
4. Meningkatkan Kualitas dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berbasis Kewirausahaan
5. Meningkatkan Pelatihan Produktivitas bagi tenaga kerja yang produktif
6. Meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja swasta
7. Menyelenggarakan Program Pemagangan bagi pencari kerja.
8. Melaksanakan akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Meningkatkan kualitas SDM dalam penyelenggaraan pelatihan kerja
10. Meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan pelatihan kerja.
11. Meningkatkan peran Lembaga Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
12. Meningkatkan ketenagakerjaan bekerja dan berusaha bagi tenaga kerja dan perusahaan.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
5. Program Penempatan Tenaga Kerja
6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

SASARAN STRATEGIS 6 :

Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan
Indikator Kinerja :

INDEKS KETAHANAN PANGAN

INDIKATOR KINERJA :
INDEKS KETAHANAN PANGAN

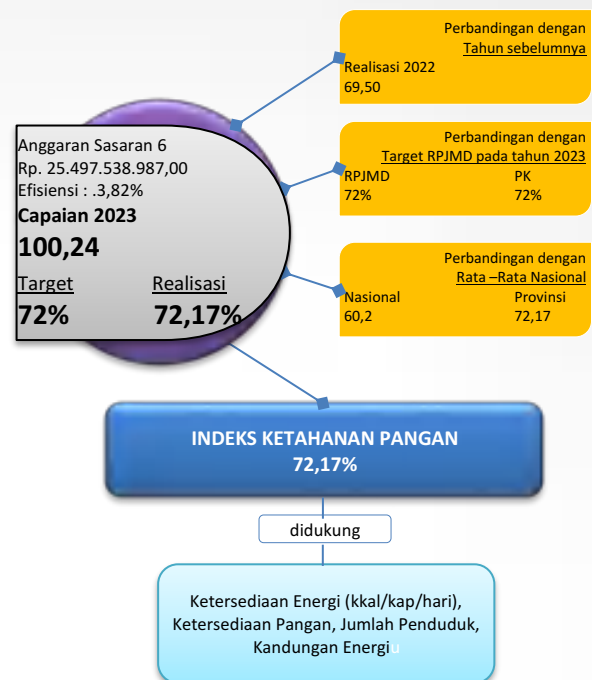
Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia mengingat pengaruhnya terhadap pembentukan iklim makroekonomi yang kondusif. Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Upaya pengendalian kerawanan pangan di Provinsi Jambi terus dilakukan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui kegiatan bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan berhasil meningkatkan indeks ketahanan pangan dari 69,50 di tahun 2022 menjadi 72,17 di tahun 2023 yang ditandai dengan penurunan jumlah kecamatan rentan rawan pangan dari awalnya 7 kecamatan menjadi 4 kecamatan.



Untuk Indonesia, ketahanan Pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam Undang-Undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah Indeks

Ketahanan, dengan capaian pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Indeks Ketahanan Pangan dihitung berdasarkan kondisi Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari), Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun), Jumlah Penduduk (jiwa), serta kandungan energi.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 12 Tahun 2013.

Kemandirian pangan dalam konteks daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan

memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Dampak dari upaya perwujudan kemandirian pangan ini dapat dilihat dari ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah dilaksanakan dari Tahun 2013 hingga Tahun 2023. Untuk total pengadaan beras selama tahun 2013 – 2023 adalah sebanyak 346.182 kg dan telah dikeluarkan / disalurkan sebanyak 121.577 kg untuk membantu masyarakat yang terkena bencana atau mengalami kerawanan pangan.

Adapun rincian Kondisi Cadangan Pangan Pokok Daerah (CPPD) dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023

Tahun	Stock Awal (Kg)	Pengadaan (Kg)	Total Penyaluran (Kg)	Sisa (Kg)
2013	0	70.000	0	70.000
2014	70.000	20.000	3.449	86.551
2015	86.551	0	9.348,50	77.202,50
2016	77.203	0	22.837,50	54.365
2017	54.365	7.000	6.102	55.263
2018	55.263	12.000	5.400	61.863
2019	61.863	3.805	24.396	41.272
2020	41.272	948	0	42.220
2021	42.220	103.600	37.560	108.160
2021	108.160	9.285	-	117.445
2022	117.445	4.423	11.746	110.122
2022	110.122	115.221	-	225.343
2023	225.343	0	738	224.605
Jumlah		346.182	121.577	224.605

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 2,870 Kkal/Kap/Hari, hal ini mencapai kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari. Ketersediaan Energi sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang. Tidak tercapainya ketersediaan energi sebagaimana yang telah

ditargetkan, dikarenakan terjadinya penurunan produksi gabah/ beras, dari produksi lokal.

Perkembangan ketersediaan energi (kkal/kap/hari) guna Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal dilihat berdasarkan skor PPH ketersediaan, Ketersediaan Energi kkal/kap/hr dan Ketersediaan Protein sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini :

Diagram 3.12. Skor PPH Tahun 2023

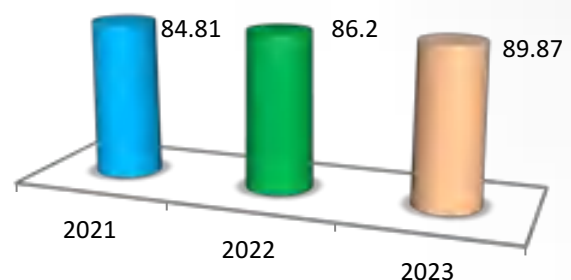
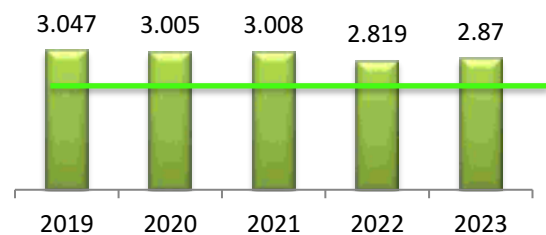
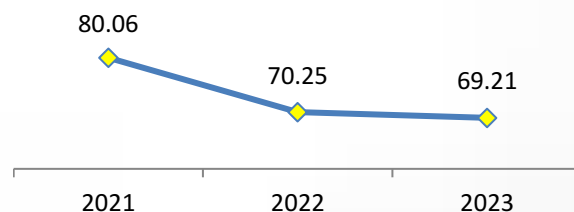


Diagram 3.13. Ketersediaan Energi Kkal/kap/hr



Grafik 3.10. Ketersediaan Protein



Dari gambar diatas bahwa pada upaya capaian kinerja memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian pangan, dengan target skor PPH ketersediaan sebesar 88,5 telah melebihi target, Ketersediaan Energi yakni sebesar 2,870 kkal/kap/hr dan Ketersediaan Protein sebesar 69,21 gr/kap/hr.

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum

terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan atau disingkat dengan PPH.

Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).



Provinsi Jambi yang memiliki keragaman geografis yang tinggi memiliki berbagai macam potensial disektor pertanian, perkebunan hingga perikanan. Jika kita melihat data PDRB selama beberapa 5 tahun terakhir, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selalu menjadi penopang dari sisi produksi dengan rata-rata kontribusi sebesar 29,34% dari PDRB. Melihat peran yang sangat penting tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi selalu berupaya membuat berbagai program agar sektor ini terus maju dan berkembang sehingga mampu memajukan perekonomian Provinsi Jambi secara umum.

IK : Konsumsi Beras (kg/kap/tahun)

Target penurunan tingkat konsumsi beras (1 kg/kap/tahun) Provinsi Jambi Tahun 2023 yakni 85 kg/kap/thn, sedangkan realisasi sebesar 87 kg/kap/thn, dengan capaian kinerja baik sebesar 97,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tentang perlunya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), upaya untuk penurunan konsumsi

beras pada Tahun 2023 belum tercapai dan untuk kecukupan konsumsi energi diganti dengan konsumsi pangan lokal non beras belum terpenuhi secara maksimal. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi sesuai data SUSENAS Tahun 2023, maka diperoleh jumlah konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi Tahun 2023 sebesar 87 kg/kap/tahun.

Hasil capaian ini telah melebihi target menurunkan konsumsi beras penduduk, dan pada tahun 2023 ditargetkan konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi sebesar 85 kg/kap/tahun terealisasinya sebesar 87 kg/kap/tahun. Ini berarti realisasi penurunan konsumsi beras telah mencapai 97,70%, masih kurang dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan adanya pergeseran pola konsumsi pangan penduduk kearah mengkonsumsi selain beras, seperti bergeser ke konsumsi gandum, tepung-tepungan selain beras.

IK : Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)

Target konsumsi energi penduduk Provinsi Jambi untuk tahun 2023 yakni sebesar 2.195 kkal/kap/hari. Berdasarkan data hasil kajian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan menggunakan data SUSENAS dari BPS diketahui bahwa realisasi konsumsi energi Tahun 2023 yakni sebesar 2.043 kkal/kap/hari, dengan capaian kinerja sebesar 93,08% dengan kriteria penilaian sangat baik, hal ini memenuhi target capaian yang diinginkan.

IK : Konsumsi Protein (gram/kap/hari)

Berdasarkan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Protein ideal yakni sebesar 61 gram/kap/hari. Terkait hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2023 telah merealisasikan angka Ketersediaan Protein Tahun 2023 sebesar 69,21 gram/kap/hari. Capaian ini telah melebihi dari pola pangan harapan ketersediaan protein yang ideal, namun masih jauh dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan,

Sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan tentunya tidak terlepas dari upaya pengentasan kerawanan pangan Provinsi Jambi.

Persentase Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan

Salah satu indikator bahwa suatu wilayah dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik adalah diukur dengan melihat seberapa banyak jumlah penduduk yang rawan pangan atau yang tahan pangan.

Kerawanan Pangan dapat diartikan apabila rumah tangga (anggota rumah tangga) mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak cukupnya ketersediaan pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup, dan apabila konsumsi makanannya berada dibawah kalori minimum yang dibutuhkan.

Kondisi kerawanan pangan yang akut akan menyebabkan kelaparan: yaitu kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi 70% kebutuhan pangan dan gizinya berturut-turut selama dua bulan, dan diikuti dengan penurunan berat badan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, diperoleh gambaran bahwa Jumlah Penduduk Berisiko Rawan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebesar 12,83% dari target 6,5 %. Artinya untuk indikator Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan selama Tahun 2023 tidak terjadi penurunan, melainkan sebaliknya terjadi kenaikan persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan sebesar 6,33% dari yang ditargetkan. Persentase Capaian Kinerja terkait % Penduduk Berisiko Rawan Pangan baru mencapai 50,66% dan termasuk kategori rendah.

Terjadinya kenaikan penduduk berisiko rawan pangan sebesar 6,33% diduga karena dampak dari kasus Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat di Provinsi Jambi. Disamping itu ada kemungkinan terjadinya pergeseran sebaran penduduk di masing-masing kabupaten/kota atau ada keterkaitannya dengan indikator FSVA yang mempengaruhi kondisi penduduk berisiko rawan pangan.

Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Indikator penurunan Persentase (%) Daerah Rentan Rawan Pangan, berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023, diperoleh gambaran bahwa jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan (Kecamatan Rentan

Pangan : Prioritas 1-3) terdapat 4 (empat) kecamatan yang masuk kedalam kategori prioritas 1-3 (Rawan Pangan) atau sebesar 2,80% dari sebanyak 143 kecamatan di Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan secara Daerah/Kecamatan telah terjadi penurunan jumlah Daerah/Kecamatan yang Rentan Rawan Pangan dibanding tahun sebelumnya (7 kecamatan prioritas 1-3). Bila kita melihat pada target penurunan Persentase (%) Daerah Rentan Rawan Pangan Tahun 2023, terlihat bahwa dari yang ditargetkan sebesar 6,5% diperoleh hasil bahwa Daerah Berisiko Rawan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebesar 2,80%.

Ini menunjukkan bahwa selama Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil menurunkan persentase Daerah Berisiko Rawan Pangan sebesar 3,7% (6,5% – 2,8%) dari yang ditargetkan. Sedangkan rasio capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 232,14%. Ini menunjukkan capaian kinerja dengan nilai Sangat Baik (diatas 100%). Sebagai gambaran capaian kinerja penurunan persentase daerah rentan rawan pangan tahun 2023 berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, sesuai dengan prioritas penanganan kerentanan dan ketahanan pangan secara komposit.

Desa Mandiri Pangan

Untuk mencegah atau menurunkan kerawanan pangan ini maka Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penyediaan Protein Hewani dan Kegiatan Pemberian Bantuan terhadap daerah-daerah yang mengalami bencana alam berupa bantuan bahan pangan pokok yang diambilkan dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Salah satu kegiatan nasional untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani, dan untuk bidang ketahanan pangan salah satunya yaitu kegiatan Pertanian Keluarga (*Family Farming*). Pertanian keluarga atau *family farming* merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga.

Kegiatan lain yang juga merupakan salah satu upaya pemantapan ketahanan pangan keluarga yaitu Peningkatan Produktivitas dan produksi tanaman pangan (padi dan jagung), Peningkatan Produktivitas dan produksi tanaman hortikultura, serta produksi tanaman pangan.

Upaya Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Indikator persentase peningkatan produksi padi dengan target 2% terealisasi sebesar -1,61 %, persentase peningkatan produksi jagung dengan target 1% terealisasi sebesar -32,2 %, persentase peningkatan produksi cabe merah dengan target 20% terealisasi sebesar 52,44 %, dan persentase peningkatan produksi bawang merah dengan target 10% terealisasi sebesar 18,74%.

Dari 4 indikator tersebut untuk indikator peningkatan produksi padi dan jagung tidak tercapai sedangkan untuk produksi cabe merah dan bawang merah telah melampaui target. Penyebab dari tidak tercapainya target pada komoditi padi dan jagung disebabkan karena dampak dari fenomena elnino yang terjadi dipertengahan tahun 2023 (Juli – Oktober) yang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah menyebabkan pertumbuhan padi kurang optimal. Selain itu, perbedaan metode pencatatan dan perhitungan menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area) yang di rilis BPS dirasa masih kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena masih ada selisih data yang lumayan besar apabila dihitung dengan menggunakan SIPDPS yang digunakan oleh Kementerian Pertanian yang berdampak pada penurunan angka luas panen di Provinsi Jambi. Metodologi KSA merupakan metode baru yang dipakai BPS sejak Tahun 2019 yang dipandang masih perlu penyempurnaan, utamanya dalam penentuan setiap segmen pengamatan di Kabupaten/Kota.

Sedangkan capaian Produksi jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai 20.754 ton, mengalami penurunan sebesar 9.856 ton atau sekitar 32,20% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 30.610 ton. Sementara untuk produktivitas jagung di Provinsi Jambi sepanjang Januari hingga Desember 2023 sekitar 66,08 kwintal ha-1 , atau mengalami peningkatan sekitar 3,12 kwintal ha -1 (4,96

persen) dibandingkan 2022 yang sebesar 62,96 kwintal ha-1. Penurunan angka produksi jagung terjadi karena petani banyak yang memanen muda tanaman jagungnya dengan alasan lebih menguntungkan. Selain itu juga, mayoritas petani di Provinsi Jambi masih sangat bergantung akan bantuan benih yang diberikan oleh pemerintah sedangkan dari pihak pemerintah sendiri tidak bisa memberikan jaminan untuk terus memberikan bantuan kepada petani mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.

Selain dari itu terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke penggunaan lain seperti peti dan perkebunan hal ini dapat di lihat dari menurunnya minat petani untuk bercocok tanam padi dan jagung. Sebagian petani lebih tertarik ke sektor perkebunan dan penambangan emas ilegal yang berdampak pada penurunan luas panen jagung dari 4.862 Ha menjadi 3.141 Ha, untuk luas panen padi terjadi kenaikan yang semula 60.540 Ha menjadi 61.135 Ha namun tetap tidak dapat menaikkan angka produksi dikarenakan perubahan iklim elnino yang mana fenomena tersebut berdampak pada produksi padi.

Produktivitas komoditas tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh profil budidaya yang dijalankan oleh petani, seperti jenis lahan, teknik penanaman, penggunaan sarana dan prasarana produksi, serta faktor lain, seperti program bantuan pemerintah, keanggotaan kelompok tani (institusi petani) dan dampak perubahan iklim. Hasil Survei Ubinan memungkinkan analisis untuk menelaah bagaimana faktor-faktor tersebut berdampak terhadap tingkat produktivitas. Sedangkan Penyebab penurunan produksi adalah karena hama atau penyakit, kekeringan, hingga banjir. Hal ini disebabkan juga karena pada tahun 2023 terjadi Refocusing anggaran pada anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.



Untuk komoditas cabe merah dan bawang merah mengalami kenaikan produksi jika dibandingkan dengan tahun lalu yang semula 981.585 kwintal menjadi 1.496.317 kwintal untuk komoditi cabe merah, dan untuk komoditi bawang merah yang semula 160.502 kwintal menjadi 190.576 kwintal. Ini dikarenakan adanya dukungan dari program penunjang urusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian untuk daerah, serta Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk pusat dalam bentuk bantuan benih/bibit dan sarana produksi. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi dampak dari inflasi yang mana dipengaruhi oleh tingginya harga cabe merah dan bawang merah, dikarenakan hal tersebut minat petani untuk membudidayakan komoditas hortikultura menjadi tinggi.

Dapat dilihat dari luas panen untuk komoditi cabe merah walaupun dengan luas panen 6.215 Ha (angka sementara) dapat menghasilkan produktivitas 240,77 kwintal ha-1 jika dibandingkan dengan tahun lalu luas panen 6.410 Ha hanya menghasilkan produktivitas 1533,14 kwintal/ha. Pada komoditi bawang merah terjadi peningkatan luas panen dari 2.125 Ha menghasilkan produktivitas 75,52 kwintal ha-1 menjadi 2.277 Ha menghasilkan 83,68 kwintal ha-1.

Sementara upaya strategis peningkatan Populasi Ternak terjadi penurunan capaian pada indikator persentase peningkatan populasi ternak sapi sebesar 1,4 % dari target 1,5 % dilihat dari populasi tahun 2022 sebesar 161.308 ekor dan tahun 2023 sebesar 163.495 ekor (angka sementara). Hal ini terdampak dari terjadinya penyebaran Penyakit Menular Hewan Strategis (PHMS) diantaranya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Penyakit SE dan Jembrana yang menyebabkan kematian ternak sapi. Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dan tradisional dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan dan masih terjadinya pemotongan sapi betina produktif.

Analisis atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Pendukung Kinerja

a. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumber Daya Alam

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sector perkebunan (sawit) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang illegal (Illegal Mining).

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau.

b. Terjadinya Perubahan Iklim

Pada tahun 2023, terjadinya kekeringan dan banjir yang cukup tinggi dan diperparah dengan dampak kebakaran hutan di Provinsi Jambi. Suhu yang terlalu panas dan berkurangnya ketersediaan air akan menghambat produktivitas pertanian.

Perubahan iklim juga akan menyebabkan perubahan masa tanam dan panen ataupun menyebabkan munculnya hama dan wabah penyakit pada tanaman yang sebelumnya tidak ada. Ancaman banjir yang semakin sering terjadi pada lahan sawah juga merupakan salah satu dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Hal ini menyebabkan berkurangnya luas areal panen dan produksi padi. Dampak pergeseran musim tanam mengakibatkan jadwal tanam akan terganggu yang mengakibatkan menurunnya angka produksi dan bahkan kegagalan panen.

c. Masih beragamnya produksi tanaman pangan yang dihasilkan petani

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran.

Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Terbatasnya modal petani untuk pembelian saprodi sehingga teknologi yang diaplikasikan pada pertanian petani belum maksimal.
2. Masih relatif rendahnya penggunaan teknologi sesuai rekomendasi. Hal ini karena petani masih ada yang belum meyakini teknologi yang dianjurkan.
3. Masih adanya petani yang mempergunakan benih kurang bermutu, yang telah mengalami degradasi. Biasanya ini terjadi karena penggunaan benih hasil panen sendiri yang terus menerus tanpa disertifikasi ulang. Disamping itu dalam memproduksi benih terkendala oleh :
 - Sarana dan prasarana prosesing pada penangkar belum memadai sehingga dalam musim penghujan kadar air benih hasil penangkaran tidak dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
 - Minat penangkar dalam memproduksi benih buah-buahan masih rendah.
 - Mitra kerja antara penangkar dengan pihak swasta belum optimal.
 - Peralatan Laboratorium ada yang rusak dan belum diperbaiki dan kelengkapan peralatan khususnya untuk uji kesehatan benih yang belum lengkap.
 - Pada pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar memiliki kendala dalam penyediaan benih dari pusat, sehingga jadwal pelaksanaan di lapangan mengalami penundaan.
 - Masih kurangnya pemahaman produsen / pedagang benih untuk menerapkan Undang-undang No. 12 Tahun 1992 dan PP No. 44 1995.
4. Masih terbatasnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi di bidang perlindungan tanaman untuk meningkatkan kualitas dan pengamanan produksi tanaman Pangan.
5. Masih Rendahnya kemampuan/daya beli petani khususnya tanaman pangan untuk membeli benih Unggul bermutu dan bersertifikat secara tunai.

d. Masih berfluktuatifnya Produktivitas dan produksi tanaman hortikultura yang dihasilkan

Tanaman hortikultura, khususnya buah - buahan produktivitas dan produksinya relatif tidak stabil setiap tahun. Begitu juga sayur- sayuran, pada saat-saat tertentu melimpah dipasaran dan diwaktu yang lain terjadi kekurangan, yang menyebabkan harga berfluktuatif pula. Disamping itu kualitas yang dihasilkan juga masih ada yang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya.

- ❖ Penerapan GAP dan SOP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani komoditas buah-buahan dan sayur – sayuran sehingga tidak dapat memenuhi standar ekspor.
- ❖ Produksi sayuran organik belum dapat berjalan secara efektif dan optimal yang mengakibatkan masih sulitnya pemasaran walaupun telah ditetapkan dengan kategori sayuran prima 3.
- ❖ Permintaan benih bermutu khususnya komoditi kentang terus meningkat, namun demikian belum dapat dipenuhi oleh industri perbenihan dan penangkar benih secara optimal.

e. Relatif masih terbatasnya Managerial Usaha Tani dan Kualitas Sumber daya yang relatif masih rendah.

Pengelolaan usaha tani petani saat ini masih dilakukan secara tradisional, dengan skala usaha kecil – kecil dan merupakan usaha konvensional, kegiatannya cenderung pada upaya produksi dan belum berdasarkan perhitungan untung rugi dan daya serap serta jangkauan pemasaran yang mengakibatkan efisiensi dan efektivitas produksi masih rendah. Kondisi demikian mengakibatkan insentif yang diterima petani belum optimal sesuai dengan yang diharapkan.



Relatif masih terbatasnya managerial Usaha tani dan Kualitas Sumberdaya yang relatif masih rendah, didukung oleh antara lain :

- Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan internasional.
- Selain itu, turut pula dengan kondisi masih relatif Kurangnya jumlah tenaga pengawas benih dibandingkan dengan cakupan luas penangkaran benih yang ada di Kabupaten / Kota.

f. Persaingan produk import

Daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura dari provinsi Jambi umumnya masih relatif rendah sehingga senantiasa dihadapkan persaingan dipasaran regional dan nasional serta internasional. Rendahnya daya saing tersebut antara lain disebabkan oleh :

1. Kualitas dan Mutu produksi tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan umumnya masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi memenuhi standar kualitas ekspor
2. Tingkat efesiensi usaha tani saat ini masih perlu diupayakan secara terus menerus agar harga satuan produk yang dihasilkan dapat dapat bersaing dipasaran.
3. Masih Rendahnya pemahaman petugas, petani dan pelaku agribisnis dalam kualitas dan standarisasi mutu pasar lokal dan internasional.
4. Produksi buah-buahan dan sayur – sayuran sering melimpah pada waktu panen raya sehingga sangat sulit untuk dipasarkan dengan harga yang wajar, baik pada pasar regional maupun ekspor.

f. Rendahnya Nilai tambah produk.

Petani di Jambi umumnya hanya melakukan kegiatan usahatani secara parsial dan terbatas hanya sampai panen dan masih relative jarang yang melakukan pengolahan lanjutan dari hasil usahatani tersebut, sehingga nilai tambah dari kegiatan usaha tani masih kecil. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi rumah tangga pertanian dalam mendukung berkembangnya sektor industri pengolahan di daerah belum berkembang dengan baik.

Beberapa hal lain yang menyebabkan rendahnya nilai tamabah produk tersebut adalah :

1. Masih kurangnya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pedesaan berbasis bahan olahan.
2. Keterbatasan informasi dan penerapan teknologi pasca panen.

g. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan belum Tepat Sasaran.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembanganteknologi yang sudah ada (innovation) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani. Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain : Penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdanei, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya sehingga mubajir dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (Good Handling Procedure) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi.

Disamping itu, masih ditemui keterlambatan penyaluran benih ke lapangan sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut karena petani telah terlanjur tanam menggunakan benih yang ada pada petani.



h. Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Usaha Permodalan.

Akses petani terhadap modal, informasi, dan lahan sangat penting dalam peningkatan kinerja usahatani. Usaha pertanian dihadapkan kepada keterbatasan akses terhadap layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan

masyarakat perdesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh : (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur yang berlaku dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal yang ada masih dinilai sulit oleh masyarakat perdesaan, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga seperti yang diterapkan pada usaha komersial lain (di luar agribisnis).

Kurangnya kemampuan modal yang dimiliki petani dan pelaku agribisnis, menyebabkan petani minim dalam penggunaan sarana produksi pendukung seperti pupuk dan pestisida, sehingga dampak peningkatannya produktivitasnya tidak signifikan.

i. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh :

1. Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyedia benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih, karena :
 - ✓ Saat ini Sumber air yang ada sangat terbatas, mengakibatkan kebutuhan air pada saat tanam tidak dapat dipenuhi secara optimal.
 - ✓ Peralatan kerja dari pengolahan sampai pasca panen dan peralatan penunjang lainnya sebagian besar sudah mengalami kerusakan.
 - ✓ Prasarana gudang, jalan usaha tani dan saluran irigasi kondisinya sudah kurang memadai
 - ✓ Produktivitas lahan mengalami penurunan sebagai akibat penggunaan lahan yang terus-menerus dan belum diimbangi dengan perbaikan lahan.
 - ✓ Masih sulitnya mendapatkan benih sumber BS dan BD.

2. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kriteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
3. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
4. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
5. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

j. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui pertambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT. Disamping itu kelembagaan UPJA maupun KUPJA belum berkembang sesuai yang diharapkan,

- 1) Semakin menurunnya tingkat keaktifan dan jumlah UPJA yang ada.
- 2) Umumnya penempatan alsin yang ada baik dari pengadaan pusat, provinsi, kabupaten ataupun dari instansi terkait tidak pada kelembagaan UPJA sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya hanya ditingkat kelompok tani dan menjadi milik kelompok. Dengan demikian bantuan alsin yang ada tidak efisien dan tidak berkembang.
- 3) Masih banyak petani/kelompok tani/UPJA yang keberatan dengan sistim Bantuan Uang Muka Alsın (BUMA) yang disediakan dari dana APBN karena sudah terbiasa dengan menerima bantuan alsin secara gratis.

k. Masih Kurangnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan

Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan agribisnis karena menyangkut kelanjutan usaha agribisnis tersebut. Beberapa metode usaha tani yang diterapkan ada yang belum memenuhi aspek kelestarian lingkungan antara lain :

- 1) Masih ditemui adanya residu pestisida pada produk tanaman Pangan dan Hortikultura, terutama pada tanaman sayuran sebagai dampak dari penggunaan pestisida yang berlebihan.
- 2) Penggunaan pestisida yang berlebihan (di atas ambang batas). Sehingga menyebabkan matinya musuh – musuh alami, disamping residu pestisida yang masih tinggi pada hasil produksi hortikultura.
- 3) Metode konservasi belum diterapkan terutama pada pertanaman hortikultura (kentang).
- 4) Pola – pola usaha tani secara terpadu antara pertanian pangan / hortikultura dan peternakan belum diterapkan secara baik.

l. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti : ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen.

Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi

pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.



Berdasarkan problematika tersebut di atas, maka upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, diantaranya :

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan

Indikator dari sasaran mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peningkatan produksi dan ketahanan pangan dapat dilihat dari produksi tanaman pangan, hortikultura pada tahun 2023. Untuk mencapai peningkatan produksi ini pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan berupa : Gerakan Pemberdayaan Petani mendukung UPSUS, perbanyak benih sumber, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, kegiatan pembinaan perlindungan OPT, program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN).

2. Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dan Menurunnya Ketergantungan pada Pangan Pokok Beras melalui Pengalihan Konsumsi Beras ke Non Beras.

Sasaran meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras melalui pengalihan konsumsi beras ke non beras. Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja.

Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumber pangan lokal, dan mengajak masyarakat agar mengubah pola pikir, bahwa beras/nasi bukan satu-satunya sumber karbohidrat, karena masih banyak sumber pangan lokal seperti umbian, sukun, jagung, sagu dan lainnya yang nilai gizinya setara dengan beras.

3. Berkembangnya Usaha Agribisnis

Sasaran berkembangnya usaha agribisnis dapat dilihat dari indikator kinerja berupa jumlah dan jenis petani yang bergerak dibidang usaha agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan di Provinsi Jambi pada tahun 2023.

Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan berupa pembinaan kualitas mutu dan gabah dalam rangka peningkatan rendemen beras di Provinsi Jambi, perbanyak bibit buah-buahan (duku, durian dan jeruk), ekspose hasil pertanian, pelestarian plasma nutfah, pengembangan varietas unggul nenas Tangkit, pembinaan dan pengembangan buah unggulan, pembinaan dan pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, pengembangan hortikultura pada daerah agrowisata, pengembangan KAHS, analisa usahatani tanaman pangan dan hortikultura, pemantauan usaha pengolahan dan pasca panen, pemantauan harga gabah, usaha perbaikan pasca panen tanaman pangan, penyediaan benih untuk rawa lebak melalui penumbuhan penangkaran benih.

4. Tersedianya Benih/Bibit yang Bermutu dari Varietas Unggul dengan Harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan



Indikator keberhasilan dari tersedianya benih yang bermutu dari varietas unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan adalah produksi benih yang dihasilkan oleh penangkar-penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura. Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa Pengembangan jaringan sistem perbenihan Padi dan Pengembangan Usaha dan kelembagaan Perbenihan Hortikultura serta perbanyakan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura serta pengadaan sarana dan prasarana balai benih kentang di Kabupaten Kerinci (BBH Kayu Aro).

5. Meningkatnya Penggunaan / Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator pelaksanaan forum perbenihan baik untuk komoditas pangan maupun untuk komoditas hortikultura. Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jambi berupaya meningkatkan penggunaan / penanaman benih bermutu varietas unggul dilaksanakan forum perbenihan tanaman pangan sebanyak 2 kali yang dihadiri oleh penangkar benih, pengusaha benih dan penangkar benih.

Sedangkan untuk forum perbenihan hortikultura dilaksanakan sebanyak 1 kali. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini juga

dilakukan kegiatan – kegiatan berupa penangkaran benih di tingkat petani, rapat koordinasi dalam rangka penyediaan/perbanyakan benih varietas unggul bermutu, rapat koordinasi dalam rangka pengembangan sistem produksi dan distribusi benih, perbanyakan benih sumber padi varietas unggul lokal.

6. Tumbuh kembangnya Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih

Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu. Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator jumlah dan jenis Balai Benih serta penangkar yang dapat menghasilkan benih dimana benih tersebut dapat dipergunakan oleh para petani dalam melaksanakan usaha lainnya.

Dalam pencapaian sasaran ini dilakukan kegiatan berupa Operasional BBI Hortikultura, Operasional BBI Palawija, Operasional BBI Padi, perbanyakan benih pokok dan benih sebar, perbanyakan benih palawija, Operasional Bbi Alai Ilir, Perbanyakan benih palawija BS – FS dan FS – SS, Perbanyakan benih palawija BS – FS dan FS – SS, jagung kedele dan kacang tanah, Perbanyakan benih palawija, Pengembangan taman anggrek ria loka, Operasional kegiatan taman anggrek dan Pengembangan kultur jaringan.

7. Mengembangkan dan Menerapkan Teknologi Maju Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sasaran diatas dapat terlaksana dengan adanya indikator demplot, pengujian dan demonstrasi yang dilaksanakan untuk memotivasi petani dalam melakukan usaha tani dengan teknologi maju untuk tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan berupa Bimbingan percontohan perbaikan usahatani Padi, Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan kering,

Percontohan peningkatan produktivitas padi di lahan bera/tidur, produktivitas padi dilahan

bera/tidur, Bimbingan percontohan perbaikan pola tanam padi di daerah rawa lebak.

8. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan secara selektif

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, perluasan areal pertanian dengan mencetak sawah yang didanai oleh Pemerintah maupun swadana petani, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, perbaikan jalan usahatani, rehabilitasi jaringan irigasi tingkat desa dan tingkat usaha tani, melalui partisipasi masyarakat tani. Pencegahan alih fungsi lahan di Jambi dilakukan dengan penerbitan PERGUB No 14 tahun 2009, sedangkan di tingkat nasional telah dilakukan pula melalui UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Daerah juga merevitalisasi fungsi lahan pasang surut yang selama ini sudah banyak ditinggalkan oleh petani tanaman pangan dengan kegiatan renovasi lahan sulfat masam dan memanfaatkan potensi Lahan Rawa lebak yang ada.

Peningkatan kesuburan Lahan terus dilakukan melalui pemanfaatan Pupuk jerami dan dijadikan Trichokompos. Khusus untuk lahan – lahan Balai Benih Induk disamping penggunaan trichokompos, juga diberikan Pupuk kandang dan Pengapuran.

Untuk mencukupi ketersediaan air, di kabupaten dilakukan rehab – rehab Jaringan Irigasi Teknis dan rehab Jaringan Irigasi Non Teknis yang dananya berasal dari APBN. Sedangkan untuk Balai benih Induk dibuatkan Pompa air.

9. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru (terutama penggunaan benih Unggul)

Produktivitas tanaman pangan saat ini dimasing masing lokasi berbeda – beda, sesuai dengan tingkat kesuburan tanah dan sumber air yang tersedia. cenderung stagnan. Hal ini karena selama ini produktivitas yang dihasilkan masih

rendah jika dibandingkan dengan potensi produktivitas benih yang dipergunakan.

Dari segi potensi Provinsi Jambi, Produktivitas masih berpeluang besar untuk ditingkatkan lagi. Potensi tersebut tercermin dari senjang rata – rata produktivitas riil dengan potensi hasil penelitian. Untuk mendorong peningkatan produktivitas telah dilakukan penggunaan benih unggul varietas baru, meskipun belum semua petani mempergunakannya. Untuk daerah-daerah yang tingkat produktivitasnya masih rendah akan didorong untuk mempercepat terjadinya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi spesifik lokasi, khususnya mempergunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat.

10. Mendorong Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Mutu melalui Inovasi Teknologi Baru.

Daya saing produk sangat ditentukan oleh kualitas dan mutu produk yang bersangkutan serta efisiensi untuk menghasilkan produk tersebut. Kualitas yang baik, mutu yang terjamin dan harga yang relatif murah dalam memproduksinya akan mudah dipasarkan dan akan muda bersaing dipasaran.

Peningkatan mutu produk ditujukan untuk peningkatan daya saing, nilai tambah dan pendapatan pelaku usaha. Mutu produk tergantung pada berbagai faktor, antara lain : penggunaan benih bermutu, penerapan teknologi budidaya, penanganan panen dan pasca panen serta penerapan teknik distribusi produk yang benar. Upaya yang ditempuh diantaranya :

- a) Meningkatkan Kualitas dan mutu produk, serta packing produk melalui inovasi teknologi baru.
- b) Meningkatkan efisiensi produksi dengan menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas dan mutu produk. Meningkatkan wawasan dan pemahaman petugas tentang standar mutu pasar suatu produk, baik di lokal maupun regional / internasional.

- c) Pengaturan produksi sayur-sayuran dan menerapkan teknologi "off season" untuk Komoditi bernilai tinggi.

11. Mendorong Peningkatan Nilai tambah Produk dan Diversifikasi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Nilai tambah suatu produk akan bernilai tinggi apabila kegiatan usaha tani dilanjutkan dengan pengembangan lanjutan terhadap produk yang dihasilkan. Kegiatan tersebut tidak hanya terbatas pada dihasilkannya sampai panen dan pasca panen, namun ditambah lagi dengan kegiatan olahan lanjutan. Disamping itu kegiatan lain adalah melalui diversifikasi produk, sehingga komoditas yang dihasilkan bisa beragam.

Potensi fisik dan peluang pasar komoditas tanaman pangan saat ini masih belum dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan mendorong pendapatan petani diperlukan upaya – upaya untuk mendorong diversifikasi produksi tanaman pangan sesuai kapasitas sumberdaya dan prospek pasar. Pengembangan komoditas hortikultura diprioritaskan melalui penumbuhan wilayah pengembangan sentra produksi di lahan baru yang memiliki kecocokan agro ekosistem dengan mempertimbangkan daya serap dan permintaan pasar, nilai ekonomi, penguasaan teknologi dan lainnya.

Untuk meningkatkan nilai tambah produk, beberapa upaya tindak lanjut yang dilaksanakan antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan penanganan pasca panen dan olahan lanjutan bagi ibu – ibu di pedesaan.
- b) Mensosialisasikan sistim pengemasan/ packing yang baik dan benar guna meningkatkan nilai jual produk.

12. Mempercepat Transfer Teknologi Dan Tepat Sasaran Mempercepat transfer teknologi pertanian ke petani melalui berbagai kegiatan, diantaranya :

- a) Bantuan benih varietas unggul baru yang diikuti dengan sistem Sekolah lapang , baik dalam pengelolaan pertanaman maupun dalam penanganan pasca panen. Sekolah lapang, artinya sekolah bagi petani yang dilaksanakan dilapangan dan materinya disesuaikan dengan umur pertanaman di lokasi laboratorium lapangan. Peserta adalah utusan kelompok yang mdah menerima teknologi dan mempunyai kemampuan untuk menularkan ke anggota kelompok taninya.

- b) Untuk varietas yang belum beradaptasi dilaksanakan uji varietas di beberapa lokasi, sehingga benih yang disebarkan kepetani adalah yang sudah mengalami uji adaptasi dan cocok dikembangkan di daerah Jambi.

- c) Pengelolaan pertanaman dilaksanakan oleh petani dengan bimbingan petugas, sehingga petani langsung menerapkan apa yang diperoleh dan mengatasi segala permasalahan yang muncul selama proses pertanaman berlangsung.

13. Mendorong Pola Partisipasi Aktif Seluruh Stakeholder

Kewenangan pemerintah Provinsi dibandingkan pemerintah Kabupaten semakin terbatas sebagaimana halnya kewenangan Pusat yang hanya meliputi perumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur. Oleh karena itu pembangunan pertanian perlu dirancang untuk lebih memfasilitasi berkembangnya inisiatif masyarakat dan seluruh stakeholder. Dengan adanya UU No.22 Tahun 1999 yang telah diperbaiki melalui UU No.32 Tahun 2004, dan diganti dengan UU No.23 tahun 2014 Provinsi dan Kabupaten perlu untuk meningkatkan kapasitas dan potensinya untuk membangun pertanian didaerahnya.

Petani yang telah pernah mendapat bantuan dan berhasil dalam usahatani didorong untuk mengembalikan modal yang diterimanya kelompok dan dijadikan sebagai modal kelompok. Khusus untuk penangkar benih difasilitasi menjalin kerjasama dengan

stakeholder (PT. SHS dan PT Pertani), sehingga benih yang dihasilkan dapat dipasarkan dan terjual dengan harga yang layak.

14. Meningkatkan Efisiensi Usahatani, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Kunci terpenting dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, baik segar maupun olahan hasil pertanian adalah mutu produk yang baik dan efisien dalam proses produksi maupun pada tahap pemasarannya. Mutu produk yang efisien akan berpengaruh langsung terhadap harga dari setiap produk. Namun demikian upaya untuk mengurangi kehilangan hasil yang cukup tinggi pada saat penanganan pasca panen tanaman pangan, melalui penggunaan Power Thresher pada saat perontokan dan penggunaan terpal plastik pada saat penjemuran (apabila lantai jemur belum tersedia) khususnya padi, jagung dan Kedelai. Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci.

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, Skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin pada 2022. Berdasarkan laporan Economist Impact, skor GFSI milik Indonesia mengalami peningkatan 1,7% dibandingkan pada 2021 yang sebesar 59,2 poin. Skor Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI) Indonesia tercatat sebesar 60,2 poin pada 2022 (2023).

Skor GFSI milik Indonesia mengalami peningkatan 1,7% dibandingkan pada 2021 (2022) yang sebesar 59,2 poin. Skor indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia pada 2022 (2023) dalam kategori moderat (skor 55-69,9 poin). Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 113 negara, diapit oleh Tunisia dan Kolombia yang masing-masing memiliki skor 60,3 poin dan 60,1 poin. Secara umum, keterjangkauan harga pangan Indonesia dinilai cukup baik dengan skor 81,5 poin. Namun, beberapa indikator lain, seperti ketersediaan pasokan, kualitas dan keamanan, serta keberlanjutan dan adaptasi pangan masih

lemah. Secara rinci, indikator ketersediaan pasokan Indonesia memiliki skor sebesar 50,9 poin. Skor indikator kualitas dan keamanan pangan Indonesia sebesar 56,2 poin. Lalu, indikator keberlanjutan dan adaptasi pangan sebesar 46,3 poin.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Penanganan Kerawanan Pangan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
8. Program Perizinan Usaha Pertanian
9. Program Penyuluhan Pertanian

SASARAN STRATEGIS 7 :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender

Indikator Kinerja :
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

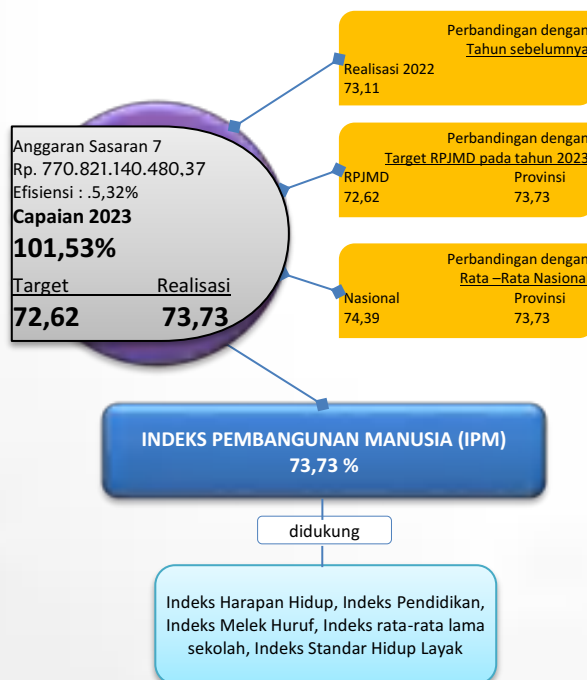
INDIKATOR KINERJA : INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM juga dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah/Negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena digunakan sebagai

ukuran kinerja pemerintah dan menjadi salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi 2023 menyajikan angka IPM Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta dilengkapi dengan penjelasan dari komponen pembentuk IPM tahun 2023, yaitu : umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun. Capaian pembangunan manusia di Jambi selama kurun waktu 2020 s.d. 2023 menunjukkan peningkatan dalam setiap tahun. Status IPM Jambi dari tahun 2020 s.d. 2023 meningkat dari status sedang menjadi status tinggi.

Peningkatan IPM Provinsi Jambi tahun 2023 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak lebih cepat dari tahun sebelumnya.



Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,84 tahun, meningkat 0,23 tahun (0,31 persen) dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF).

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,08 tahun (0,61 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,05 menjadi 13,13 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,13 tahun (1,50 persen), dari 8,68 tahun menjadi 8,81 tahun pada tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Susenas Maret.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi Tahun 2023 Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 289 ribu rupiah (2,66 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber data pengeluaran riil per kapita per tahun menggunakan hasil Susenas Maret.

1. Perkembangan IPM Provinsi Jambi Tahun 2020–2023

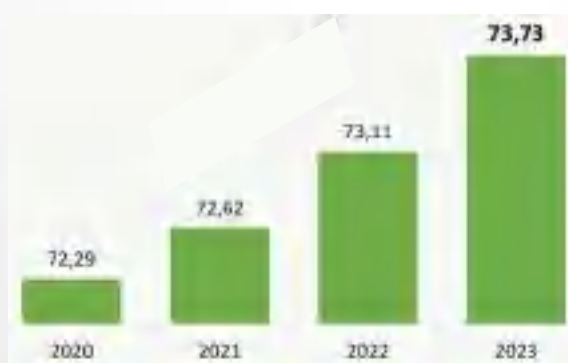
Pembangunan manusia di Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2018, status pembangunan manusia Provinsi Jambi sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Provinsi Jambi rata-rata meningkat sebesar 0,66 persen per tahun, dari 72,29 pada tahun 2020 menjadi 73,73 pada tahun 2023.

2. Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi Jambi Tahun 2013–2023



Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan pada 2023, yaitu HLS sebesar 0,61 persen dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 0,08 persen dan RLS sebesar 1,50 persen dibanding tahun 2022 yang hanya 0,93 persen. Sementara Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya dalam dua tahun terakhir sebesar 0,31 persen. Sebaliknya Pengeluaran Riil per Kapita pertumbuhannya sedikit melambat dari 2,67 persen pada 2022 menjadi 2,66 persen pada 2023. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2023 dapat dilihat pada Grafik berikut :

Diagram 3.14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi, 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Tabel 3.22. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2023

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,33	73,58	73,63	73,84
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,99	13,09	13,05	13,15
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,55	8,62	8,68	8,81
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan	Rp. Juta	10.292	10.588	10.471	11.568
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		72,29	72,62	73,11	73,73

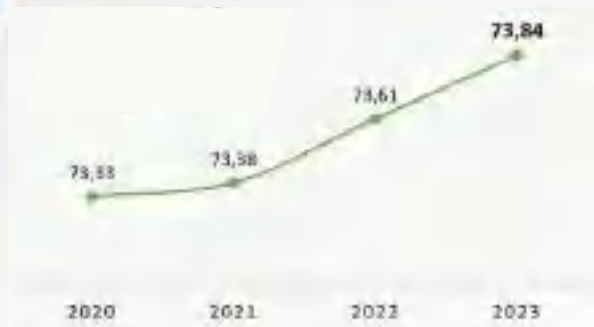
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

UHH saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,51 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Provinsi Jambi adalah 73,33 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 73,84 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,23 tahun (0,31 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,19 persen per tahun).



Grafik 3.11. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Provinsi Jambi (tahun), 2020–2023

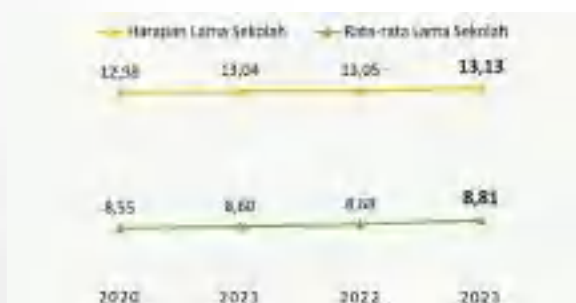


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu HLS penduduk usia 7 tahun ke atas dan RLS penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Provinsi Jambi rata-rata meningkat 0,38 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,00 persen per tahun. HLS tahun 2023 meningkat 0,08 tahun (0,61 persen) dibandingkan tahun 2022, sedangkan RLS meningkat 0,13 tahun (1,50 persen)

Grafik 3.12. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi (tahun) 2020–2023

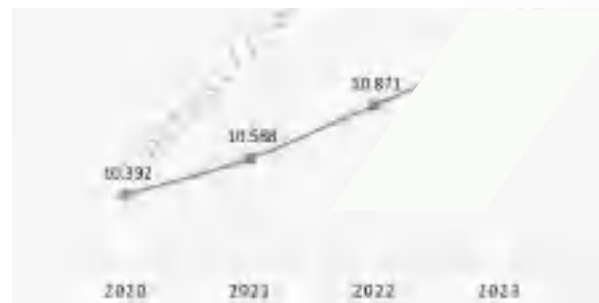


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Jambi mencapai Rp11,160 juta. Capaian ini meningkat 289 ribu rupiah (2,66 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2022 yang sebesar 2,28 persen per tahun.

Grafik 3.13. Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah), 2020–2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2022 (2023)

Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021, status pembangunan manusia di Tanjung Jabung Barat meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM 70,26. Sementara itu, sejak tahun 2022 Kota Jambi mengalami peningkatan status dari “tinggi” ke “sangat tinggi”. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$) menjadi sebanyak 1 kabupaten/kota, dengan status “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) sebanyak 9 kabupaten/kota, dan dengan status “sedang” ($60 \leq IPM < 70$) sebanyak 1 kabupaten/kota (Tanjung Jabung Timur).

Gambar 3.4. IPM Provinsi Jambi menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2023

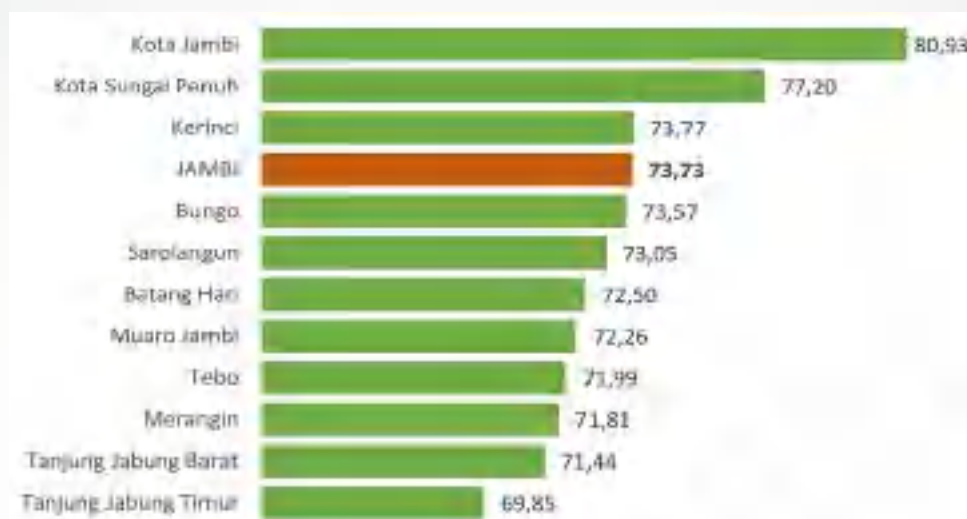


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Pada tahun 2023, IPM sembilan kabupaten/kota sudah berstatus “tinggi” sementara Tanjung Jabung Timur masih berstatus “sedang”. Besarnya angka IPM setiap kabupaten/kota berkisar antara 69,85 sampai dengan 80,93. IPM tertinggi dicapai oleh Kota Jambi dengan IPM sebesar 80,93 dan yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 69,85. Bila dibandingkan dengan angka IPM Provinsi Jambi yang mencapai 73,73, hanya wilayah Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci yang mempunyai IPM lebih tinggi dari IPM provinsi. Sementara nilai IPM dari delapan kabupaten yang lain masih lebih rendah dari IPM Provinsi Jambi.

Kedua wilayah kota di Provinsi Jambi adalah peraih IPM terbesar dari sebelas kabupaten/kota yang ada. Setelah Kota Jambi (dengan IPM 80,93), peraih IPM terbesar kedua adalah Kota Sungai Penuh dengan IPM sebesar 77,20 dan posisi ketiga dicapai oleh Kabupaten Kerinci dengan IPM 73,77. Urutan keempat dan kelima ditempati oleh Kabupaten Bungo dan Sarolangun, dengan IPM masing-masing sebesar 73,57 dan 73,05. Selanjutnya pada posisi keenam dan ketujuh adalah Kabupaten Batang Hari dengan IPM sebesar 72,50 dan Kabupaten Muaro Jambi dengan IPM sebesar 72,26. Rangking kedelapan adalah Kabupaten Tebo dengan IPM sebesar 71,99, sedangkan yang kesembilan adalah Kabupaten Merangin dengan IPM sebesar 71,81. Posisi kedua terakhir ditempati oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai IPM 71,44 dan Tanjung Jabung Timur dengan nilai IPM 69,85.

Diagram 3.15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Tabel 3.23. IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020-2023

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita		IPM	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Provinsi Jambi	73,33	73,38	12,98	13,04	8,55	8,60	10.392	10.588	72,29	72,62
Kerinci	72,64	72,70	13,87	13,88	8,55	8,56	9.995	10.184	72,47	72,72
Merangin	73,55	73,58	11,99	12,04	7,76	7,90	10.279	10.380	70,20	70,55
Sarolangun	73,00	73,04	12,27	12,28	7,87	8,04	11.616	11.792	71,63	72,02
Batang Hari	73,90	73,97	12,92	12,93	8,11	8,12	9.825	10.032	71,34	71,61
Muaro Jambi	74,06	74,11	12,83	12,84	8,57	8,58	8.556	8.825	70,41	70,79
Tanjung Jabung Timur	73,37	73,48	12,16	12,17	6,70	6,92	9.026	9.163	67,58	68,09
Tanjung Jabung Barat	72,71	72,76	12,62	12,63	7,71	8,00	9.480	9.689	69,62	70,26
Tebo	73,02	73,05	12,60	12,64	7,58	7,59	10.389	10.546	70,51	70,73
Bungo	73,13	73,22	12,62	12,63	8,27	8,28	11.471	11.670	72,46	72,70
Kota Jambi	74,32	74,37	15,10	15,37	10,92	11,20	12.056	12.240	79,19	79,94
Kota Sungai Penuh	73,37	73,46	14,79	14,80	10,32	10,33	10.248	10.454	76,02	76,30
Indonesia	73,17	73,46	12,98	13,08	8,48	8,54	11.013	11.156	72,81	73,16

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Lanjutan : Tabel IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2020-2023

Kabupaten/Kota	UHH		HLS		RLS		Pengeluaran Riil per Kapita		IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
Provinsi Jambi	73,61	73,84	13,05	13,13	8,68	8,81	10.871	11.160	73,11	73,73
Kerinci	72,94	73,18	13,89	13,91	8,57	8,59	10.570	10.965	73,24	73,77
Merangin	73,78	73,97	12,05	12,25	7,91	8,13	10.714	10.969	70,98	71,81
Sarolangun	73,26	73,46	12,47	12,48	8,12	8,14	12.069	12.392	72,66	73,05
Batang Hari	74,22	74,48	12,94	12,96	8,21	8,22	10.173	10.528	71,99	72,50
Muaro Jambi	74,53	74,55	12,99	13,15	8,59	8,69	9.118	9.525	71,41	72,26
Tanjung Jabung Timur	73,78	74,09	12,18	12,20	7,19	7,43	9.503	9.898	68,96	69,85
Tanjung Jabung Barat	72,99	73,21	12,64	12,67	8,18	8,31	9.968	10.229	70,83	71,44
Tebing	73,25	73,45	12,65	12,92	7,70	7,94	10.725	10.894	71,14	71,99
Bungo	73,49	73,76	12,64	12,66	8,29	8,39	11.956	12.224	73,08	73,57
Kota Jambi	74,61	74,85	15,38	15,54	11,21	11,32	12.597	12.783	80,38	80,93
Kota Sungai Penuh	73,73	74,01	14,81	14,83	10,34	10,36	10.745	11.027	76,75	77,20
Indonesia	73,70	73,98	13,10	13,15	8,69	8,77	11.479	11.869	73,77	74,39

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Keterangan :

UHH : Umur Harapan Hidup dari hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)

HLS : Harapan Lama Sekolah

RLS : Rata-rata Lama Sekolah

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Dimensi Kesehatan Kabupaten/Kota

Dari seluruh kabupaten/kota se-Jambi di tahun 2023, penduduk Kota Jambi memiliki umur harapan hidup tertinggi yaitu 74,85 tahun, disusul Kabupaten Muaro Jambi dengan UHH 74,55 tahun, dan pada urutan ketiga ditempati oleh Kabupaten Batang Hari yang mencatat UHH sebesar 74,48 tahun. Dari kedua kota di Provinsi Jambi, yang lebih tinggi pertumbuhan umur harapan hidupnya adalah Kota Sungai Penuh sebesar 0,38 persen, sedangkan Kota Jambi mencatat peningkatan sebesar 0,32 persen dari tahun 2022.

Apabila dibandingkan antara UHH di wilayah kota dengan umur harapan hidup di wilayah kabupaten, maka umur harapan hidup wilayah kota lebih tinggi dibandingkan dengan umur harapan hidup wilayah kabupaten. Hal ini antara lain karena fasilitas layanan kesehatan dan tenaga medis yang tersedia di wilayah kota lebih banyak dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakatnya. Keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pemulihan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit. Ketersediaan fasilitas juga dipengaruhi faktor lokasi apakah di pedesaan atau perkotaan.

Pada tahun 2023, Kabupaten Kerinci tercatat sebagai kabupaten dengan UHH terendah di Provinsi Jambi yaitu sebesar 73,18 tahun. Walaupun demikian Kabupaten Kerinci meraih laju pertumbuhan UHH di atas laju Provinsi Jambi. Pertumbuhan UHH tertinggi ditempati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

sebesar 0,42 persen. Pada tempat kedua dan ketiga ada Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo dengan pertumbuhan UHH dari tahun 2022 sebesar 0,38 dan 0,37 persen. Sedangkan untuk Kabupaten Tebo, Sarolangun, dan Merangin, pertumbuhan UHH penduduknya di bawah 0,30 persen.

Diagram 3.16. Capaian dan Pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Persen), 2023



Dimensi Pendidikan Kabupaten/Kota

Pada level kabupaten/kota kondisi dimensi pendidikan beragam, ada yang berada di atas Provinsi Jambi dan ada yang berada dibawahnya. Selama kurun waktu 2020-2023 seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan capaian rata-rata lama sekolah (RLS) dengan angka yang bervariasi antar kabupaten/kota. Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dapat diamati bahwa penduduk Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh merupakan kota dengan capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas tertinggi.

Pada tahun 2020 RLS Kota Jambi hanya mencapai 10,92 tahun, meningkat menjadi 11,20 pada tahun berikutnya hingga tahun 2023 mencapai 11,32 tahun. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Jambi mencapai 11,32 tahun atau setara dengan kelas XI (kelas II SMA). Sedangkan RLS Kota Sungai Penuh pada tahun 2020 masih berada pada angka 10,32 tahun. Setiap tahun RLS Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 10,36 tahun, artinya penduduk 25 tahun ke atas di Kota Sungai Penuh mampu bersekolah hingga 10,36 tahun atau setara dengan kelas X (kelas I SMA).

Sementara capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada wilayah kabupaten di Provinsi Jambi belum sampai pada angka 9 tahun (Lampiran 3). Dari Sembilan kabupaten yang ada, RLS tertinggi pada tahun 2023 dicapai Kabupaten Muaro Jambi dengan angka sebesar 8,69 tahun atau setara dengan kelas IX (kelas III SMP). Kemudian pada posisi berikutnya adalah Kabupaten Kerinci dengan capaian RLS sebesar 8,59 tahun, disusul Kabupaten Bungo sebesar 8,39 tahun. Posisi selanjutnya yaitu

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Batang Hari dengan RLS masing-masing sebesar 8,31 tahun dan 8,22 tahun.

Sedangkan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, capaian RLS sudah di atas 7 tahun, yaitu 7,43 tahun. Akses yang sulit dan sedikitnya pilihan sekolah di Tanjung Jabung Timur ditengarai menjadi penyebab rendahnya rata-rata lama sekolah disana. Dengan demikian dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas tertinggi dicapai oleh Kota Jambi dan yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pertumbuhan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas kabupaten/kota seluruh Provinsi Jambi juga terlihat beragam.

Diagram 3.17. Capaian dan Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Persen), 2023



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023 (2024)

Tahun 2023 pertumbuhan RLS tertinggi diraih oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 3,34 persen. Peningkatan RLS tertinggi kedua diraih oleh Kabupaten Tebo dengan pertumbuhan sebesar 3,12 persen dari tahun 2022. Pada posisi ketiga dan keempat ada Kabupaten Merangin dan Tanjung Jabung Barat yang RLS penduduknya meningkat sebesar 2,78 persen dan 1,59 persen. Kabupaten Bungo dan Muaro Jambi menempati posisi kelima dan keenam dengan pertumbuhan RLS sebesar 1,21 persen dan 1,16 persen. Sementara untuk kabupaten/kota yang lain, pertumbuhan RLS pada tahun 2023 berada di bawah 1 persen.

Dimensi Standar Hidup Layak

Dari sebelas kabupaten/kota se-Jambi, Kota Jambi tercatat sebagai kota dengan pengeluaran per kapita tertinggi sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kota Jambi tercatat sekitar 12,06 juta rupiah dan pada tahun 2023 bertambah sekitar 727 ribu rupiah menjadi 12,78 juta rupiah. Pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kota Jambi pada tahun 2020 sekitar 1,00 juta rupiah, meningkat menjadi 1,07 juta rupiah di tahun 2023.

Sementara itu, pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Muaro Jambi hanya sebesar 9,53 juta rupiah pada tahun 2023 atau sekitar 794 ribu rupiah per kapita per bulan.

Pengeluaran per kapita terbesar kedua pada tahun 2023 diraih Kabupaten Sarolangun dengan pengeluaran per kapita sebesar 12,39 juta rupiah per tahun atau sekitar 1,03 rupiah per bulan. Selanjutnya pada posisi ketiga ditempati Kabupaten Bungo dengan pengeluaran per kapita per tahun sebesar 12,22 juta rupiah atau sekitar 1,02 ribu rupiah per bulan. Untuk delapan kabupaten/kota yang lain, terlihat pengeluaran per kapita per tahun penduduknya berkisar antara 9,53 sampai dengan 11,03 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan pengeluaran per kapita per tahun penduduk Jambi secara umum, ada 3 kabupaten/kota yang pengeluaran per kapita per tahunnya lebih tinggi dari pengeluaran per kapita Provinsi Jambi pada Tahun 2023. Kabupaten/kota yang dimaksud adalah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Bungo.

Laju pertumbuhan pengeluaran per kapita per tahun penduduk kabupaten/kota tahun 2023 rata-rata mengalami pertumbuhan di atas 2 persen. Pertumbuhan terendah terdapat di Kabupaten Tebo dan Kota Jambi sebesar 1,58 dan 1,48 persen. Sementara yang paling tinggi pertumbuhannya adalah Kabupaten Muaro Jambi (4,46 persen). Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kerinci, dan Batang Hari juga tumbuh di atas 3 persen. Sedangkan laju pertumbuhan pengeluaran per kapita pada 5 kabupaten lainnya berkisar antara 2,24 sampai 2,68 persen.

Diagram 3.18. Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Persen), 2023



Gambar 3. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi Tahun 2023



Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
9. Program Pengelolaan Pendidikan
10. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
11. Program Pengembangan Kurikulum
12. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
13. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
14. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
15. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
16. Program Pembinaan Perpustakaan
17. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
18. Program Pembinaan Sejarah
19. Program Pengelolaan Permuseuman
20. Program Pengembangan Kebudayaan
21. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
22. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan
23. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
24. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan karakter Kebangsaan
25. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan konflik Sosial

26. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Sertabudaya Politik

27. Program Peningkatan Ketenteramandan Ketertiban Umum

Permasalahan :

1. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan indikator Indonesia Sehat telah memenuhi standar minimal namun belum tersebar merata sesuai kebutuhan pada masing-masing kabupaten/ kota se- Provinsi Jambi.
2. Pola pengasuhan (perawatan, pemberian makanan dan lain-lain) anak balita yang berkembang di masyarakat masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan turun- temurun yang kadangkala belum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan.
3. Kesenjangan kemampuan siswa yang cukup tinggi di seluruh Kabupaten/ kota se- Provinsi Jambi serta kepercayaan diri siswa untuk bersaing dengan siswa lainnya secara nasional masih harus terus didorong.
4. Kesenjangan kualitas sekolah menengah masih cukup tinggi.

Solusi :

1. Standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi
2. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
3. Pemberdayaan posyandu dan puskesmas serta tenaga kesehatan untuk terus mengintensifkan penyuluhan kepada para orang tua agar menerapkan cara hidup sehat khusus balita seperti pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala, menjaga kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, perawatan anak saat sakit, menjauhkan anak dari bahaya, menstimulasi perkembangan anak, imunisasi dan upaya pencegahan penyakit, pemberian vitamin A dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menangulangnya.

4. Bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan pada puskesmas dan jaringannya sehingga integrasi program gizi dan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan terlaporkan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kapasitas guru sekolah menengah, uji coba kompetisi tingkat nasional dan internasional serta pemberian motivasi kepada siswa-siswa SMA dan SMK harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
6. Pemberian beasiswa di seluruh jenjang pendidikan.

SASARAN STRATEGIS 8 :

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender

Indikator Kinerja :
INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER



INDIKATOR KINERJA : INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

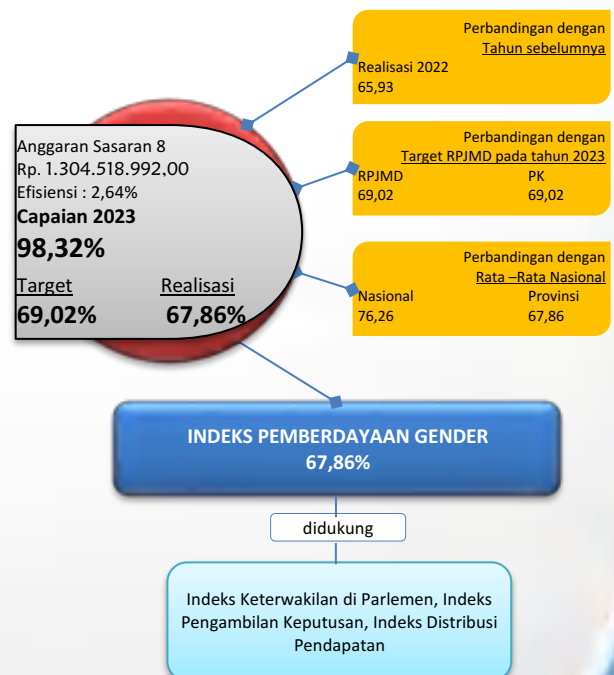
Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga, kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat

kemajuan perempuan yang juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera secara umum.

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Gender berbeda dengan jenis kelamin, jika jenis kelamin diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin secara biologis, maka gender diartikan sebagai konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Isu kesetaraan gender merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam salah satu tujuan SDGs mengungkapkan mengenai diskriminasi dan aspek pemberdayaan perempuan.

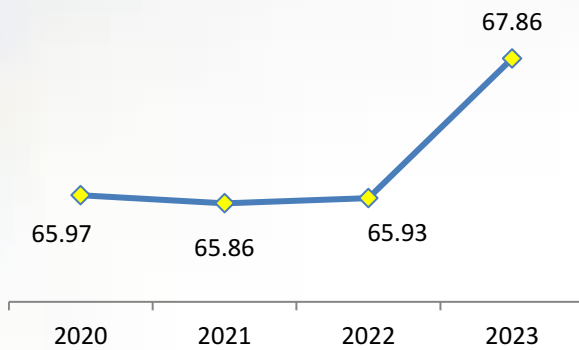
IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada tiga indikator penyusunnya yaitu persentase keterwakilan perempuan di parlemen, persentase keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional, administrasi dan teknis serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender yang dikeluarkan pada tahun 2023 merupakan angka IDG tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :



Perkembangan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.14. Perkembangan IDG



Sumber : DP3AP2 Provinsi Jambi

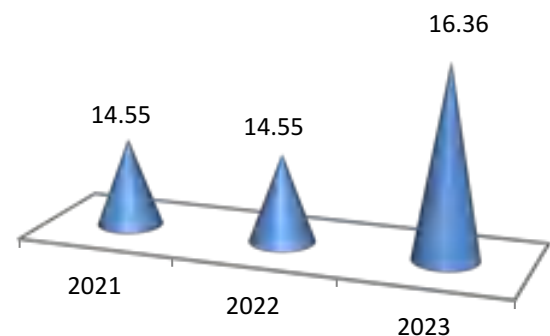
Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Potret keterlibatan perempuan dalam Politik di Indonesia merupakan wujud dari terciptanya sebuah negara demokrasi dimana partisipasi dan representasi yang seimbang menjadi sebuah persyaratan penting (Rahmatunnisa, Mudyati. 2018). Adapun Pemikiran mendasar dari demokrasi itu ialah mengenai konsep partisipasi politik yang juga mengacu pada aspek keterlibatan perempuan. Sehingga kegiatan-kegiatan politik yang melibatkan partisipasi masyarakat (pemilu, bergabung dalam partai politik, menjadi anggota legislatif, dan sebagainya) harus memperhatikan aspek keterwakilan perempuan.

Dewasa ini, pentingnya partisipasi perempuan dalam politik didasarkan atas beberapa pertimbangan yakni adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik, serta tuntutan terhadap adanya pembuatan kebijakan publik yang lebih feminis dalam lembaga legislatif. Pada pemilu legislatif tahun 2019, caleg perempuan yang terpilih dan mendapat kursi di Lembaga DPRD Provinsi Jambi mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 14,54% dari jumlah keseluruhan anggota dewan yang berjumlah 55 (lima puluh lima) orang.

Kegiatan pemilihan umum anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal selalu dihadapkan dengan permasalahan tentang partisipasi politik kaum perempuan dalam kegiatan pemilu legislatif dan minimnya jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai dampak lanjutnya. Permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan baik dalam kepengurusan partai politik maupun dalam penyelenggaraan pemilu legislatif. Pada pemilihan umum anggota legislatif yang diselenggarakan di Provinsi Jambi tahun 2019 didapati bahwa jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD 2019-2024 belum mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan, dan mengalami peningkatan sebesar 1,81% dari periode pemilu legislatif sebelumnya.

Diagram 3.19. Trend Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Jambi 2019-2024

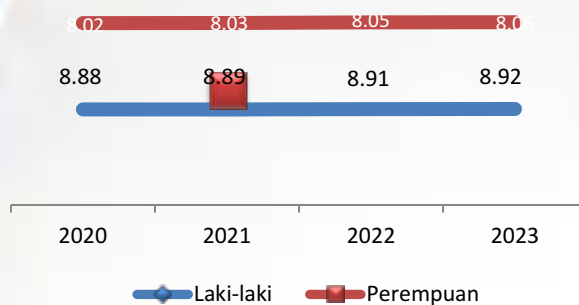


Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, 2023

Keterwakilan Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional berhubungan erat dengan akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan Jambi Dalam Angka tahun 2023, akses perempuan dalam hal pendidikan di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah perempuan yang terus meningkat, walaupun masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki.

Grafik 3.19. Perkembangan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan



Sumber : BPS Provinsi Jambi, data diolah 2023, 2024

Gender dan Partisipasi Perempuan Dalam Perekonomian

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Gender berbeda dengan jenis kelamin, jika jenis kelamin diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin secara biologis, maka gender diartikan sebagai konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Isu kesetaraan gender merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam salah satu tujuan SDGs mengungkapkan mengenai diskriminasi dan aspek pemberdayaan perempuan.

Terkait dengan ekonomi, analisis gender dapat dikaitkan kedalam berbagai aspek, antara lain pasar kerja, lapangan usaha, sampai kepada layanan keuangan. Dengan menganalisis partisipasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek ini, maka dapat dilihat juga seberapa jauh akses dan peran perempuan didalam perekonomian sebagai salah satu indikator pengukuran keberhasilan target SDGs.

Sejumlah studi memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan ketimpangan gender. Kesetaraan gender memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana hubungan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah pendidikan dan ketenagakerjaan. Keterkaitan antara ketimpangan gender dan pertumbuhan ekonomi salah satu prosesnya melalui aspek ketenagakerjaan. Untuk

aspek ketenagakerjaan ini salah satu analisisnya adalah dengan melihat aspek pasar tenaga kerja, status pekerjaan, juga upah pekerja perempuan dibandingkan dengan upah buruh laki-laki.

Di satu sisi pembangunan ekonomi dapat memperbaiki kondisi perempuan dan menurunkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Disisi lain, keterlibatan perempuan dalam ekonomi merupakan salah satu kunci dari pertumbuhan ekonomi. Ketika lebih banyak perempuan yang bekerja, ekonomi akan tumbuh. Kenaikan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja akan mengantar pada penurunan kesenjangan antara partisipasi perempuan dan laki-laki dalam angkatan kerja. Hal ini pada gilirannya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Selain itu, perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dapat melakukan kegiatan ekonomi yang bernilai lebih tinggi. Kesetaraan gender membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Membaiknya kesetaraan gender dapat membuat pasar tenaga kerja menjadi lebih kompetitif.

Ketimpangan gender dalam ekonomi memiliki banyak dimensi. Beberapa dimensi ketimpangan gender dalam ekonomi antara lain mencakup akses terhadap sumber daya ekonomi, akses terhadap pasar tenaga kerja, kondisi pasar tenaga kerja, dan rekonsiliasi antara mengurus keluarga dan bekerja. Kemajuan pencapaian kesetaraan gender dalam ekonomi diukur dengan kemajuan sejumlah indikator yang mencerminkan berbagai dimensi tersebut.

Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur akses terhadap sumber daya ekonomi antara lain : persentase penduduk yang mengakses komputer, persentase penduduk yang mengakses internet, persentase penduduk yang mendapatkan pelatihan kerja dan persentase penduduk yang mengakses kredit.

Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi

Akses terhadap pasar tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dalam analisis

ketimpangan gender dalam ekonomi. Indikator akses terhadap pasar tenaga kerja merefleksikan sejauh mana sebuah negara memberikan peluang pekerjaan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Termasuk dalam indikator akses terhadap pasar tenaga kerja, antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengukur peluang penduduk untuk mengakses pasar tenaga kerja yang ada. Indikator lain adalah persentase penduduk yang bekerja dan rasio penduduk bekerja terhadap total penduduk. Kedua indikator ini memberikan informasi tentang efisiensi ekonomi untuk menyediakan pekerjaan dan juga mengindikasikan berapa banyak penduduk suatu negara berkontribusi pada produksi barang dan jasa.

Selain itu, kedua indikator tersebut juga mengukur tenaga kerja potensial yang belum dimanfaatkan. Indikator persentase penduduk yang bekerja juga perlu disajikan berdasarkan aktivitas kegiatan ekonomi untuk melihat di sektor mana penduduk yang bekerja terkonsentrasi, serta berdasarkan kelompok umur dan pendidikan untuk melihat lebih jauh karakteristik penduduk yang bekerja. Hal ini penting karena dapat digunakan untuk melihat lebih dalam permasalahan ketimpangan gender dalam ekonomi.

Termasuk indikator akses terhadap pasar tenaga kerja adalah angka pengangguran dan tingkat setengah pengangguran. Tingkat pengangguran dapat menjadi indikator ketidakpaduan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu negara. Tingkat pengangguran paruh waktu (*part time employment rate*), di satu sisi memberikan fleksibilitas, tetapi di sisi lain hal ini mengindikasikan upah yang rendah, kurangnya keterjaminan pekerjaan dan keterbatasan akan kesempatan terhadap pelatihan profesional dan promosi karir dibandingkan pekerjaan penuh waktu (*fulltime employment*). Jika kedua indikator dan indikator lain terkait akses terhadap pasar tenaga kerja didisagregasi menurut jenis kelamin akan memberikan gambaran perbedaan yang sistematis terkait ketimpangan gender dalam ekonomi khususnya terkait dengan akses terhadap pasar tenaga kerja.

Selain akses terhadap pasar tenaga kerja, situasi pasar tenaga kerja juga merupakan dimensi penting karena dapat mengukur sejauh mana ketimpangan gender terjadi dalam dunia kerja khususnya terkait dengan masalah upah dan pekerjaan layak. Untuk menentukan status ekonomi laki-laki dan perempuan, tidak cukup hanya mempertimbangkan status bekerjanya seseorang, melainkan juga perlu melihat kondisi pekerjaan dan tingkat upah/pendapatannya. Selain lapangan usaha, kondisi pasar tenaga kerja akan lebih tergambar lagi pada tingkat upah pekerja karena bagi sebagian besar pekerja, upah merepresentasikan bagian utama dari pendapatan mereka. Dengan demikian rata-rata upah menurut jenis pekerjaan memberikan indikasi standar hidup dan kondisi kerja dari kelompok pekerja yang berbeda.

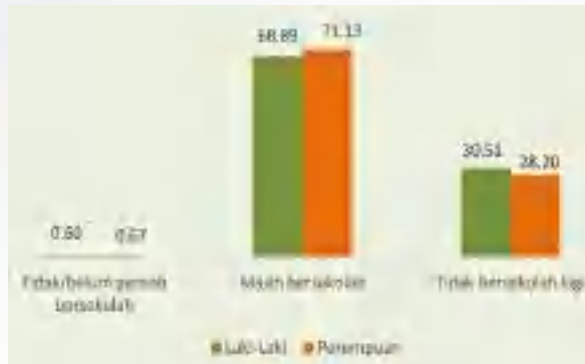
Peluang Meningkatkan Akses Terhadap Sumber Daya Melalui Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam pemberdayaan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pendidikan akan meningkatkan peluang dalam penguasaan teknologi, sehingga pada akhirnya mampu memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan. Seiring dengan meningkatnya kapabilitas melalui pendidikan, *human capital* juga meningkat dan pada gilirannya akan berperan besar dalam pembangunan. *Human capital* dapat diartikan kemampuan dan efisiensi manusia dalam mengubah bahan mentah dan modal menjadi barang dan jasa, secara konsensus kemampuan tersebut diperoleh melalui sebuah sistem pendidikan. Sistem pendidikan tersebut sudah seharusnya tidak diskriminatif dan menjamin kesetaraan kesempatan dan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap pendidikan.

Upaya pemerintah baik pusat maupun di Provinsi Jambi untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam sistem pendidikan; telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Sekalipun mungkin masih kita temui permasalahan dalam implementasinya akibat faktor sosial dan norma di dalam masyarakat tertentu. Kondisi ini dapat memicu munculnya berbagai bentuk ketidakadilan

dan kesenjangan baik akses maupun kesempatan antara laki-laki dan perempuan.

Diagram 3.20. Persentase Penduduk 7-24 Tahun Menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2022 (2023)



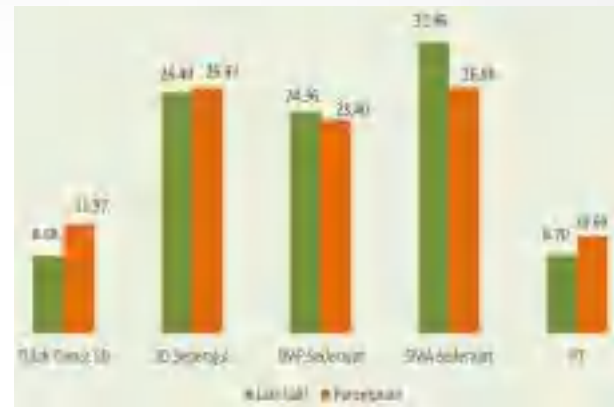
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023, 2024

Capaian bidang pendidikan pada tahun 2022 (2023) di Provinsi Jambi dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah, angka harapan sekolah, dan lain-lain. Capaian dasar terkait partisipasi sekolah penduduk usia 7-24 tahun antara anak/remaja laki-laki dan perempuan terlihat terjadi sedikit ketimpangan. Anak/remaja perempuan yang masih bersekolah hingga usia 24 tahun telah mencapai 71,13 persen; lebih tinggi dibanding anak/remaja laki-laki (68,89%). Namun ketimpangan tidak terlihat untuk kategori yang tidak/belum pernah sekolah; dimana nilainya sangat rendah berada sekitar 0,6 persen.

Partisipasi sekolah yang dapat dituntaskan oleh seseorang dapat dilihat dari pendidikan terakhir yang berhasil ditamatkan. Capaian indikator ini masih menunjukkan indikasi adanya ketimpangan gender, utamanya pada jenjang SMA sederajat. Persentase penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah terakhir SMA sederajat adalah 31,96 persen; lebih tinggi dibanding penduduk perempuan yang persentasenya sebesar 26,98 persen. Namun hal sebaliknya terjadi untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi; di mana justru capaian penduduk perempuan lebih tinggi (10,69% dibanding 8,7%). Hal ini dapat dikaitkan dengan partisipasi penduduk laki-laki yang lebih cepat dibanding perempuan dalam pasar tenaga kerja; sehingga

memaksa laki-laki untuk menyudahi partisipasi sekolahnya di tingkat SMA/ sederajat.

Diagram 3.21. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, Provinsi Jambi, 2022 (2023)

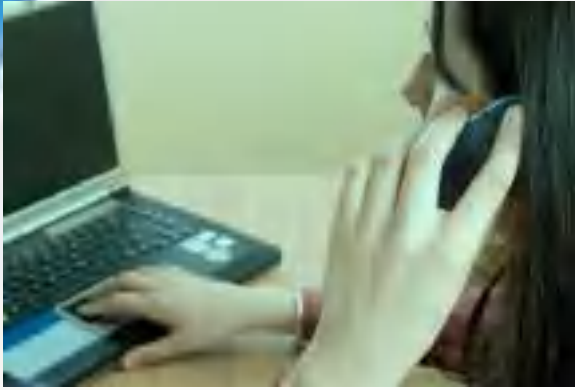


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023, 2024

Ulasan di atas menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih terjadi, walaupun sudah banyak perempuan di Provinsi Jambi yang berpikiran maju untuk meraih pendidikan tinggi namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak penduduk yang beranggapan pendidikan tinggi tidak untuk kaum perempuan. Hal ini terbukti dari capaian rata-rata lama sekolah perempuan yang sedikit lebih rendah dari laki-laki (8,39 dibanding 8,96). Namun peluang dan harapan untuk lebih lama bersekolah tetap ditunjukkan perempuan dengan capaian 13,27; lebih tinggi dari laki-laki (12,96). Sayangnya capaian pembangunan manusia untuk kelompok penduduk perempuan masih cukup nyata bedanya dengan laki-laki. Pada Tabel 2.1 terlihat IPG perempuan hanya 68,09; cukup jauh di bawah capaian laki-laki (76,55).

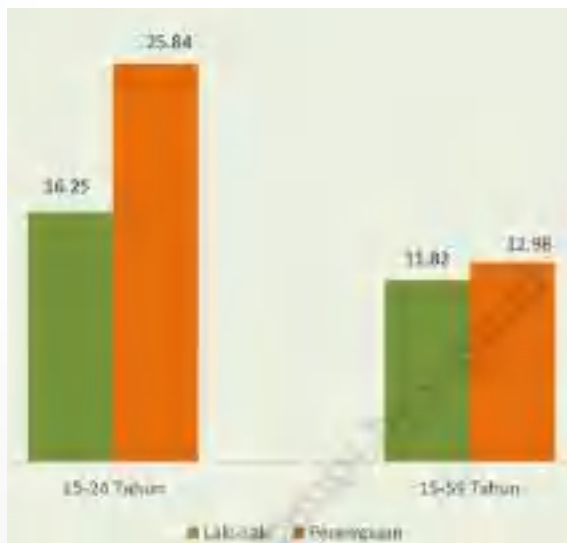
Ketimpangan Gender dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi sebagai salah satu sumber daya seharusnya dapat diakses dan dimanfaatkan oleh setiap masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam hal ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) begitu pesat dan telah masuk dalam setiap bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan TIK telah mengubah cara masyarakat untuk berkomunikasi dan melakukan pekerjaan.



Contoh lain misalnya banyak perempuan yang lebih memilih bekerja di rumah karena dengan bekerja di rumah selain memiliki fleksibilitas jam kerja, mereka juga masih dapat mengerjakan pekerjaan rumah dan tetap membantu menambah income keluarga.

Diagram 3.22. Persentase Penduduk yang Mengakses Komputer Menurut Jenis kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2022 (2023)



Sumber : BPS Provinsi Jambi Susenas 2023 (2024)

Akses terhadap TIK dalam analisis ini dilihat dari akses terhadap komputer dan internet. Gambar diatas menunjukkan perbedaan yang nyata terkait akses perempuan terhadap komputer untuk kelompok umur 15-24 tahun dan 15-59 tahun. Pada kelompok umur yang relatif muda dan usia sekolah (15-24 tahun), justru akses perempuan lebih banyak (25,84%). Namun sangat berbeda untuk kelompok umur menjelang lansia (15-59 tahun); persentasenya relatif sama antara laki-laki dan perempuan, sekitar 12-13

persen. Ini mungkin berkaitan dengan partisipasi perempuan di dunia pendidikan yang sudah relatif setara dengan laki-laki.

Untuk akses internet, capaiannya dapat dikatakan sangat luar biasa; apalagi untuk kelompok umur 15-24 tahun. Pemanfaatan internet bukan hanya sebagai media komunikasi tapi telah berkembang menjadi sarana untuk belajar, berwiraswasta, mencari kerja, dan berbagai manfaat lainnya. Lebih dari 90 persen penduduk laki-laki usia 15-24 tahun di Provinsi Jambi memanfaatkan internet dalam kehidupan sehari-harinya; lebih tinggi dari perempuan (93,09%). Hal yang sama terjadi pada kelompok umur 15-59 tahun; di mana perempuan pada usia produktif hingga lansia yang mengakses internet persentasenya lebih rendah dari laki-laki.

Diagram 3.23. Persentase Penduduk yang mengakses Internet Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2022 (2023)



Sumber : BPS Provinsi Jambi Susenas 2023 (2024)

Akses Perempuan Terhadap Pelatihan Kerja

Salah satu upaya pemberdayaan perempuan adalah dengan meningkatkan peranan dan keterlibatan perempuan khususnya di bidang ekonomi. Misalnya dengan mengadakan pelatihan kerja bagi perempuan dan memberikan kredit usaha bagi perempuan. Gambar dibawah menunjukkan persentase penduduk 15 tahun ke

atas yang mendapatkan pelatihan kerja tahun 2022.

Diagram 3.24. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Mendapatkan Pelatihan Kerja Provinsi Jambi, 2022 (2023)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Pada gambar diatas terlihat bahwa persentase perempuan dan laki-laki yang mendapatkan pelatihan kerja hampir sama, namun jumlah perempuan lebih sedikit dibandingkan jumlah laki-laki. Dengan bekal keterampilan yang didapatkan pada pelatihan kerja ini, akan dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan perempuan untuk memperluas pilihan dan peluang kerja serta dapat berpartisipasi secara setara dengan laki-laki di pasar tenaga kerja. Pada akhirnya, dengan semakin terbukanya pilihan dan peluang tersebut akan menaikkan taraf hidup perempuan menjadi lebih sejahtera.



Stagnasi Partisipasi Angkatan Kerja dalam Kesenjangan



Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Jambi tahun 2022 sebesar 67,84 yang berarti terdapat sekitar 67-68 orang di antara 100 penduduk usia kerja yang berpartisipasi aktif di pasar kerja. Ditinjau dari jenis kelamin, secara signifikan partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, dengan TPAK perempuan sebesar 48,97 sementara TPAK laki-laki sebesar 86,17.

Diagram 3.25. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2022 (2023)

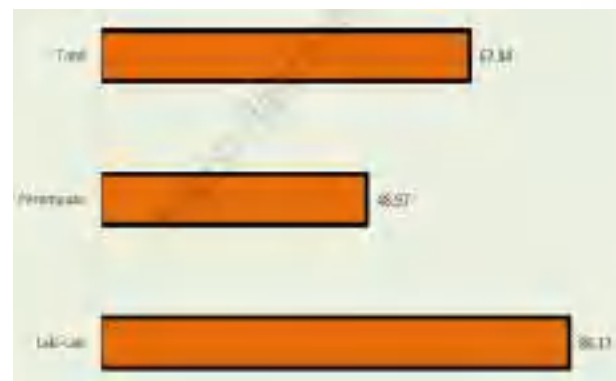


Diagram diatas menunjukkan, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki hampir dua kali lipat dibandingkan perempuan. Meskipun peningkatan taraf pendidikan saat ini hampir dapat diperoleh secara merata, pada kenyataannya belum dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya suatu program atau kebijakan sosial yang lebih aktif mendorong peran perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja dan terlibat dalam pekerjaan di luar rumah.

Partisipasi angkatan kerja perempuan yang tergolong rendah ini mengindikasikan bahwa masih banyak perempuan yang sepenuhnya terlibat dalam kegiatan mengurus rumah tangga. Dengan

demikian, beberapa penyebab rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja antara lain: 1) persepsi terkait peran domestik perempuan; 2) berkaitan dengan persepsi tersebut adalah perangkat pengukuran, penentuan, atau pendefinisian pekerjaan perempuan; 3) sifat musiman, paruh waktu, dan informal dari kebanyakan pekerjaan perempuan. Dari data Sakernas 2022, diperoleh informasi bahwa penggunaan waktu terbanyak bagi perempuan adalah untuk mengurus rumah tangga yang merupakan nomor dua terbanyak (40,14%) dari kegiatan yang dilakukan seminggu yang lalu.

Diagram 3.26. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Provinsi Jambi, 2022 (2023)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022 (2023)

Secara umum TPAK menurut kelompok umur, mengalami peningkatan signifikan pada

kelompok umur 15-19 tahun menuju 20-24 tahun. Pada kelompok umur 25-29 tahun masih terjadi peningkatan TPAK, sementara itu pada kelompok umur 30 -34 tahun hingga 50-54 tahun terlihat TPAK yang relatif tidak berubah signifikan. Penurunan TPAK terjadi pada kelompok umur 55-59 tahun dan signifikan pada usia lansia. Lebih dalam dapat kita lihat adanya sedikit perbedaan pola TPAK laki-laki dan perempuan. Pada penduduk laki-laki, TPAK terus meningkat dan cenderung stabil hingga kelompok umur 50-54 tahun. Pola ini dapat dimaklumi karena pandangan umum masyarakat dimana laki-laki sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk bekerja menghidupi keluarganya.

Namun untuk perempuan terdapat pola yang berbeda, yakni berawal dengan TPAK yang sangat rendah di kelompok umur 15-19 tahun (17,71%) dan terus meningkat sampai kelompok umur 20-24 tahun (50,75). Hal ini dikarenakan pada kelompok umur 15-19 tahun wanita masih banyak yang belum memasuki pasar kerja, kemudian pada umur 20 tahunan atau setelah lulus sekolah mereka mulai memasuki pasar kerja. Pada kelompok umur 25-29 tahun, banyak wanita yang mulai menikah dan memiliki anak di kelompok umur tersebut menyebabkan partisipasi kerja perempuan hanya sebesar 51,62 persen pada kelompok umur 25-29 tahun; berbeda jauh dari capaian laki-laki (97,20%).



Selanjutnya TPAK perempuan terus mengalami peningkatan, hingga tertinggi di kelompok umur 50-54 tahun yang mencapai 63,39 persen. TPAK yang cenderung masih rendah pada

rentang umur 25-34 tahun kemungkinan berkaitan dengan rumah tangga dan keharusan mengurus anak, sehingga menjadi pertimbangan beberapa perempuan untuk berhenti bekerja sementara waktu. Sedangkan setelah usia 34 tahun, beban mengurus anak sudah mulai berkurang dan kebutuhan untuk membantu menghidupi keluarga dapat menjadi alasan TPAK perempuan meningkat hingga kisaran 60-64 persen. Memasuki usia 60 tahun, perempuan masih berkontribusi dalam pasar kerja, sekalipun persentasenya hanya sekitar 35 persen. Ketenagakerjaan merupakan salah satu tantangan pembangunan gender, dimana pemerintah terus berupaya bagaimana meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.

Jumlah penduduk perempuan yang hampir sama dengan jumlah penduduk laki-laki seharusnya dapat memberikan kontribusi nyata dengan berpartisipasi aktif dalam perekonomian. Penduduk perempuan produktif yang tidak aktif secara ekonomi akan menjadi beban tanggungan bagi rumah tangganya, atau dengan kata lain meningkatkan angka beban ketergantungan (dependency ratio). Ketersediaan pasar tenaga kerja bagi perempuan menjadi faktor penting untuk memfasilitasi perempuan dalam pembangunan gender.

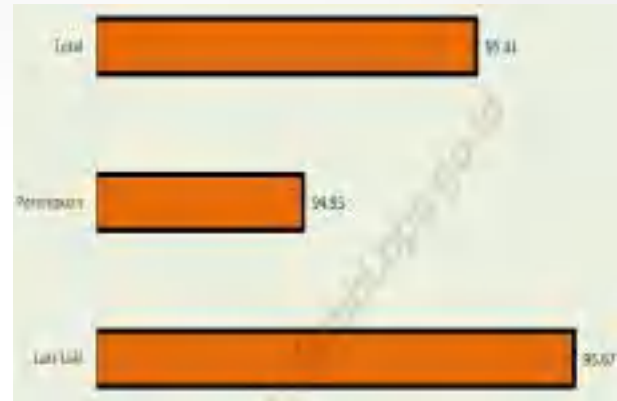
Kesenjangan Gender dalam Partisipasi Bekerja

Seiring jumlah penduduk yang semakin besar, kebutuhan akan kesempatan kerja juga semakin bertambah. Tingkat kesempatan kerja mengukur sejauh mana penduduk yang termasuk angkatan kerja memperoleh kesempatan untuk bekerja. Gambar berikut ini menunjukkan kesempatan kerja baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan tidak jauh berbeda. Pada tahun 2022, selisih kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang atau mengerucut yaitu tidak sampai 2 persen. Ini artinya, ketika perempuan telah memasuki pasar tenaga kerja, kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan relatif sama dengan laki-laki.

Namun kita juga harus melihat jenis dan bidang pekerjaannya, karena keberhasilan perempuan dalam pasar tenaga kerja tidak selalu mencerminkan kapasitas diri perempuan terkait

pendidikan dan keterampilannya. Hal ini akan diulas pada bab lain dari publikasi ini.

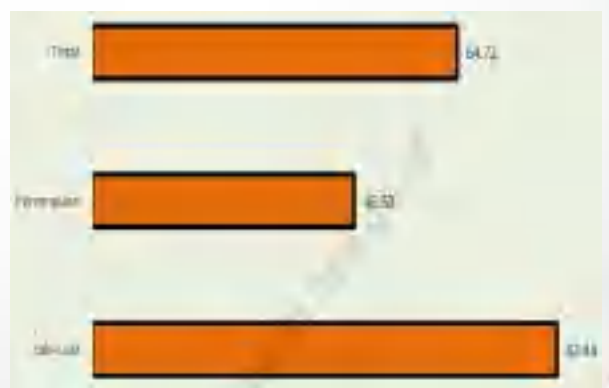
Diagram 3.27. Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2022 (2023)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Selain TKK, ada indikator lain yang tidak kalah penting yang dapat menjelaskan fenomena perempuan dalam pasar tenaga kerja. Employment to Population Ratio (EPR) mengukur rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Diagram diatas menunjukkan ketimpangan EPR yang masih cukup nyata antara laki-laki dan perempuan, di mana penduduk laki-laki yang bekerja jauh lebih tinggi (82,44%) dibandingkan penduduk perempuan (46,50%). Ketimpangan nilai TKK dan EPR antara laki-laki dan perempuan secara implisit mengungkap adanya hal-hal non ekonomi yang berkaitan dengan sulitnya perempuan masuk ke dalam pasar tenaga kerja atau sebagai kelompok penduduk angkatan kerja.

Diagram 3.28. Rasio Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas (EPR/Employment to Population Ratio) Menurut Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2022



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Pada Diagram tersebut TKK perempuan tidak jauh berbeda dengan TKK laki-laki, namun menunjukkan EPR perempuan jauh lebih rendah dibandingkan EPR laki-laki. Gambaran ini mencerminkan bahwa masih banyak perempuan usia kerja yang sebenarnya berpotensi secara ekonomi, namun belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Mereka tidak masuk menjadi angkatan kerja bisa disebabkan karena masih mengenyam bangku sekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lain.

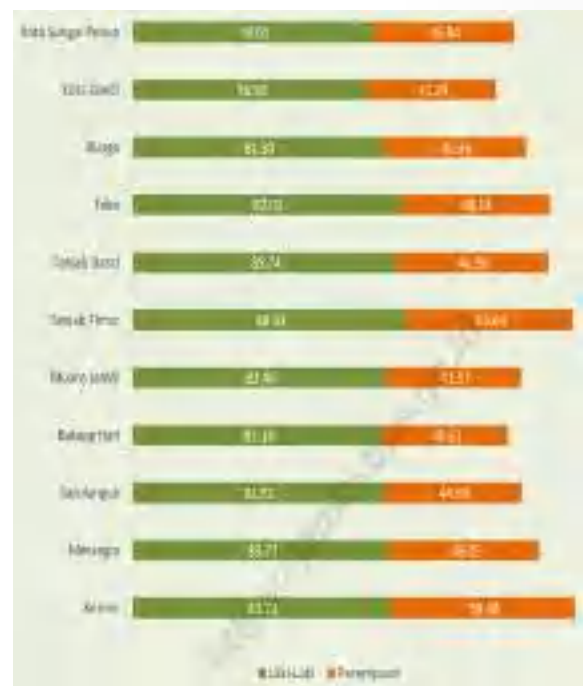
Stereotip budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat mengenai peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama tampaknya masih menjadi faktor dominan yang membatasi perempuan untuk bekerja. Kemajuan pendidikan perempuan seharusnya dapat membantu peningkatan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Perempuan diharapkan mampu berperan di semua sektor namun tetap tidak melupakan perannya dalam rumah tangga. Seorang pekerja perempuan atau wanita karir memiliki dua peran utama yang harus berjalan seimbang, yaitu bekerja dan mengurus rumah tangga. Tantangan ini seharusnya dapat dijawab tidak hanya oleh perempuan masa kini, tetapi juga oleh kaum laki-laki. Sehingga persepsi yang merendahkan posisi perempuan dapat terus tergerus.



Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Batang Hari merupakan kabupaten dengan persentase ketimpangan EPR laki-laki dan perempuan tertinggi (81,16% berbanding 40,61%) dibandingkan kabupaten/kota lainnya, sementara Kerinci menjadi wilayah

dengan ketimpangan EPR terendah (83,72% berbanding 59,68%). EPR laki-laki di setiap kabupaten/kota hampir merata berkisar antara 76 sampai 88 persen, sedangkan EPR perempuan persentasenya cenderung berbeda antar wilayah berkisar antara 40-59 persen. Hal ini menunjukkan akses pasar tenaga kerja terutama untuk penduduk perempuan belum tersebar secara merata di seluruh daerah di Provinsi Jambi.

Diagram 3.29. Rasio Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas (EPR) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2022 (2023)



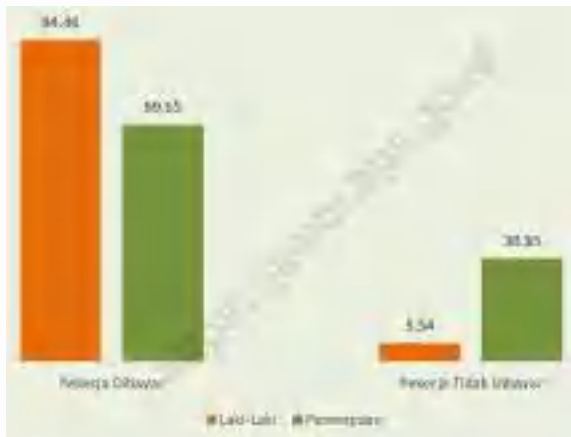
Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022 (2023)

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Batang Hari merupakan kabupaten dengan persentase ketimpangan EPR laki-laki dan perempuan tertinggi (81,16% berbanding 40,61%) dibandingkan kabupaten/kota lainnya, sementara Kerinci menjadi wilayah dengan ketimpangan EPR terendah (83,72% berbanding 59,68%). EPR laki-laki di setiap kabupaten/kota hampir merata berkisar antara 76 sampai 88 persen, sedangkan EPR perempuan persentasenya cenderung berbeda antar wilayah berkisar antara 40-59 persen. Hal ini menunjukkan akses pasar tenaga kerja terutama untuk penduduk perempuan belum tersebar secara merata di seluruh daerah di Provinsi Jambi.

Peran Perempuan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa peran ganda para perempuan pekerja adalah sebagai ibu rumah tangga (melahirkan, mengasuh anak, dan mengurus pekerjaan rumah tangga) sekaligus sebagai pekerja. Di satu sisi, wanita pekerja harus menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, tetapi di sisi lain, juga dituntut untuk terlibat bekerja untuk dapat membantu perekonomian keluarga. Oleh karena itu, peran perempuan sangat diperlukan sebagai salah satu kontributor dalam ekonomi rumah tangga.

Diagram 3.30. Persentase Pekerja Berstatus Kawin Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2022 (2023)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022 (2023)

Partisipasi perempuan yang bekerja salah satunya dilatarbelakangi karena sosial ekonomi yang rendah. Bagi perempuan yang berstatus kawin, tuntutan bekerja hanya sebatas membantu pendapatan suami yang belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Ada beberapa di antara mereka, tujuan bekerja bukan untuk mendapatkan upah/gaji/barang, melainkan hanya sekadar membantu suami atau orang lain dalam kegiatan usahanya, yang biasa disebut sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Menurut data Sakernas tahun 2022 (2023), masih cukup banyak (30,35%) perempuan berstatus kawin yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Hal ini mengindikasikan semakin banyak perempuan bersuami yang ingin berkontribusi secara finansial dalam perannya membantu

perekonomian keluarga, bukan hanya membantu secara fisik dan pikiran usaha pasangan tanpa balas jasa berupa uang atau barang. Sementara itu perempuan yang berstatus sebagai single parent atau single mother dalam memenuhi kebutuhan keluarga seluruhnya ditanggung sendiri tanpa mengandalkan bantuan dari suami. Keberadaan perempuan single mother sebagai kepala rumah tangga dikarenakan ketidakhadiran peran ayah sebagai kepala rumah tangga. Kondisi ini dapat terjadi akibat ditinggal cerai oleh suami (cerai hidup) atau ditinggal suami karena meninggal (cerai mati). Perempuan dengan status cerai mati memberikan dampak yang jauh lebih besar karena tidak adanya pasangan akibat kematian pasangan, sedangkan bagi perempuan yang cerai hidup akan merasakan efek traumatik dan tekanan emosional.

Diagram 3.31. Persentase Pekerja Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, Provinsi Jambi, 2022 (2023)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022 (2023)

Wanita berstatus single parent yang menjadi kepala rumah tangga akan lebih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga karena faktor ekonomi. Sebagai orang tua tunggal sekaligus kepala rumah tangga, mereka akan menanggung beban lebih berat. Di satu sisi harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga, di lain pihak harus memberi perhatian dan pendidikan bagi anaknya. Tugas-tugas yang dulu dikerjakan berdua dengan suaminya, sekarang harus dilakukan sendiri.

Pada diagram diatas terlihat bahwa perempuan pekerja yang juga berstatus sebagai kepala rumah tangga sebagian besar adalah yang berstatus cerai sebanyak 84,81 persen baik cerai

mati maupun cerai hidup. Sedangkan yang berstatus belum kawin dan kawin hanya sebagian kecil saja. Hal ini berarti mereka yang berstatus single parent, harus menanggung sendiri kebutuhan dirinya dan keluarganya karena berperan juga sebagai kepala rumah tangga. Pendapatan wanita single parent dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga terbatas akan umur. Umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang, khususnya dalam mengambil keputusan. Pada umumnya seseorang yang berada pada umur produktif dapat memperoleh pendapatan yang lebih jika dibandingkan dengan umur non produktif.



Dari beberapa aspek permasalahan yang dialami wanita single parent di atas, faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi permasalahan di dalam keluarga mereka. Permasalahan ekonomi tersebut adalah pekerjaan dan pendapatan yang dimiliki, sehingga single parent harus dapat bekerja dan memiliki penghasilan agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup keluarga beserta anak-anaknya. Tidak mudah bagi single parent untuk mendapatkan pekerjaan karena berbagai alasan, di antaranya karena sedikitnya lapangan kerja, persyaratan umur, waktu, dan persyaratan kerja lain seperti pendidikan tinggi dan fisik. Pilihan lain bagi single parent untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah berwirausaha. Peluang yang ada pun cukup besar jika ada keinginan dan motivasi yang kuat. Terlebih lagi jika single parent dapat menggunakan

kesempatan yang ia miliki dengan baik dan banyaknya relasi dengan laki-laki dalam bidang wirausaha agar tidak mengalami diskriminasi gender dalam berwirausaha.

Sebagai upaya untuk meningkatkan IDG ini maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender, Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan dan Pembinaan organisasi Perempuan. Program ini secara parsial didukung pula oleh beberapa program lain seperti program perwujudan demokrasi makin kokoh dan lain-lain.

Keadilan ekonomi bagi perempuan telah menjadi bagian program unggulan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menghilangkan ketimpangan gender. Perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dan berkontribusi di bidang ekonomi. Namun tidak mudah bagi perempuan untuk terjun dalam kegiatan ekonomi. Budaya dan pola pikir yang telah mengakar di kehidupan bermasyarakat terkait kedudukan perempuan membuat kaum perempuan harus menghadapi berbagai macam kendala untuk berkarya. Kendala terkait diskriminasi tersebut harus dihadapi perempuan setiap saat, mulai dari perannya dalam ekonomi keluarga hingga perannya dalam pasar tenaga kerja dan dunia usaha.

Dari sisi akses perempuan terhadap sumber daya, diskriminasi antar gender dapat terlihat dari akses pendidikan sebagai prasyarat dalam mengakses sumber daya ekonomi, akses teknologi informasi, dan akses terhadap pelatihan. Dalam akses pendidikan, kesetaraan sudah mulai terlihat; bahkan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi partisipasi perempuan sudah menyamai laki-laki. Sementara itu, dalam mengakses teknologi informasi persentase perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. Investasi modal

manusia juga dapat diperoleh dari pelatihan kerja, meskipun persentase perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki, namun perbedaan yang ada jumlahnya relatif kecil.



Hal ini menandakan perempuan di Provinsi Jambi sudah berupaya untuk terus mengejar ketinggalannya dalam berbagai akses yang ada, dan juga berarti Pemerintah Provinsi Jambi beserta institusi terkait lain sudah berupaya untuk meminimalkan kesenjangan gender yang dapat terjadi. Diskriminasi antar gender lebih terlihat jelas pada akses perempuan ke dalam pasar tenaga kerja.



Perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan cukup jauh. Keadaan tersebut menunjukkan banyaknya penghambat bagi kaum perempuan untuk masuk ke pasar kerja. Kesempatan kerja kaum perempuanpun tidak seluas kesempatan kerja kaum laki-laki. Banyak kualifikasi dan prasyarat tertentu seperti fisik dan

status berkeluarga yang tidak mudah untuk dipenuhi. Tidak hanya itu, jumlah pekerja perempuan yang banyak pada sektor pertanian dan perdagangan sangat rentan sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Perempuan masih dianggap dengan fisik yang lemah dan tanpa keahlian.



Meskipun adanya budaya patriaki yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan pemikiran stereotip bahwa perempuan sebagai sumber sekunder ekonomi keluarga, tidak serta merta menjadikan perempuan untuk tidak bisa mencurahkan dirinya dalam kegiatan ekonomi; walaupun masih dalam waktu yang terbatas. Perbedaan yang masih terlihat cukup nyata antara pekerja tidak penuh perempuan dibandingkan laki-laki, mengindikasikan bahwa jam kerja antara perempuan dan laki-laki relatif berbeda, yang juga menandakan bahwa peran perempuan belum seimbang dalam dunia kerja. Hal ini masih perlu dicermati secara detail mengenai status pekerjaan dan lapangan usahanya.

Kondisi perempuan dalam pasar tenaga kerja ternyata memperlihatkan bahwa pekerja perempuan lebih cenderung menjadi pekerja rentan. Padahal pekerja rentan ini identic dengan upah rendah dan tidak mendapatkan perlindungan sosial. Upah rendah yang diterima perempuan tersebut yang melahirkan kesenjangan upah antar gender. Selain itu, pekerja perempuan dianggap sebagai pekerja lajang, sehingga banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung tetapi tidak mendapatkan tunjangan untuk keluarganya. Antara berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan mengurus keluarga/rumah tangga merupakan suatu

dilema bagi kaum perempuan. Ketika perempuan bekerja dapat mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga, hal ini akan menguntungkan banyak pihak. Hal tersebut yang menyebabkan banyak perempuan berstatus kawin dan cerai hidup memutuskan untuk bekerja.

Disatu sisi mereka tetap harus mengurus keluarganya, sementara di sisi lain mereka tetap harus bekerja untuk memenuhi sehari-hari. Bagaimanapun, perawatan keluarga tersebut terlihat dari jumlah jam kerja pekerja perempuan yang cenderung lebih kecil dari jam kerja pekerja laki-laki. Keputusan perempuan untuk bekerja juga dipengaruhi oleh jumlah tanggungan mereka. Semakin banyak jumlah tanggungan mereka, kecenderungan mereka untuk bekerja semakin besar.



Meskipun telah banyak kebijakan dan peraturan, diskriminasi antar gender masih terjadi di pasar tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan implementasinya yang belum optimal. Penghapusan diskriminasi gender dalam ekonomi tidak hanya dengan peran pemerintah tetapi juga membutuhkan peran pihak terkait seperti pengusaha, lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Kebijakan mengenai diskriminasi antar gender dapat dimulai dari aturan tentang cuti bersalin, pengasuhan anak, pengaturan jam kerja, dan kebijakan lain perlu diperhatikan guna meningkatkan kualifikasi dan akses perempuan. Perempuan juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan, jabatan, promosi, dan pelatihan.

Untuk masalah kewirausahaan, akses pelatihan dan permodalan yang kurang bagi perempuan ini memerlukan peraturan atau kebijakan yang memberikan perhatian khusus bagi pengusaha perempuan. Sifat atau kodrat perempuan yang biasanya lebih bersifat pasif memerlukan perhatian lebih dari pemangku kebijakan dalam pengembangan usahanya. Dengan demikian, produktivitas dan kinerja pekerja atau pengusaha perempuan akan meningkat dan mencapai kesetaraan gender, yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan bagi kaum perempuan.

Program utama yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja ini antara lain :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
3. Program Pengarusutamaan Gender Dan pemberdayaan Perempuan
4. Program Perlindungan Khusus Anak
5. Program Perlindungan Perempuan

Permasalahan :

Capaian IDG Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional akibat :

1. Terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Jambi sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen.
2. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan.
3. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga uang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.
4. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian kinerja.

Solusi :

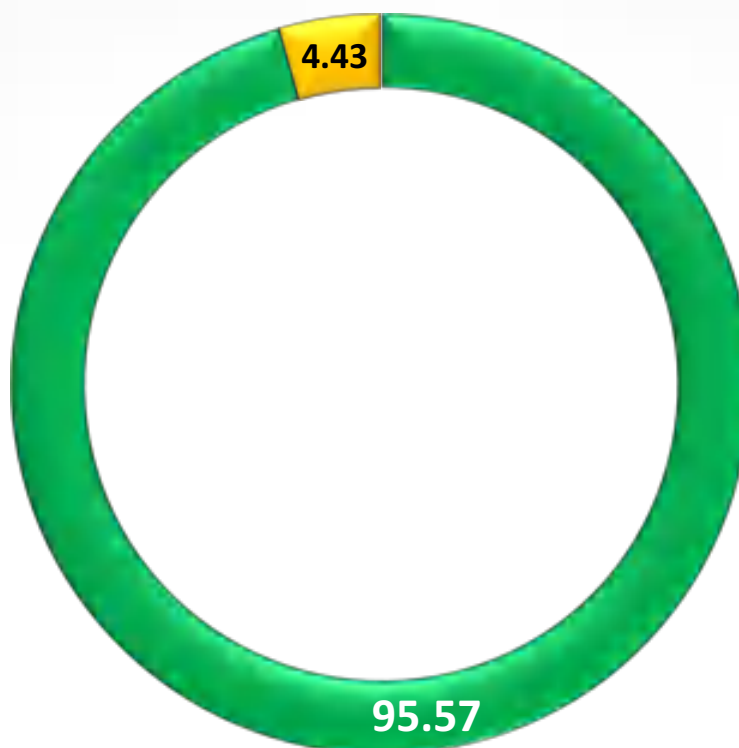
1. Perluasan akses pendidikan bagi perempuan
2. Perluasan akses bagi perempuan sebagaimana halnya laki-laki dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama antar keduanya.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.24. Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Efisiensi
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Rp. 338.106.078.349,32	92,70%	100%	7,30%
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 60.248.442.282,42	98,72%	100,13%	5,78%
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rp. 551.390.221.501,56	99,67%	96,78%	0,69%
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Rp. 31.178.711.299,00	86,45%	106,78%	13,65%
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Rp. 10.067.145.966,00	89,52%	99,34%	10,77%
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Rp.25.497.538.987,00	96,18%	100,24%	3,82%
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Rp. 770.821.140.480,37	94,71%	101,53%	5,32%
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Rp. 1.304.518.992,00	97,36	98,32%	2,64%
		Rp. 1.787.513.026.746,70	95,57%	100,30%	4,43%

REALISASI ANGGARAN



■ REALISASI ANGGARAN ■ EFISIENSI

Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi selama Tahun 2023 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp 1.787.513.026.746,70 Pada akhir Tahun 2023, anggaran ini terealisasi sebesar Rp. 1.713.292.990.086,17,- atau sebesar 95,85%. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 3, yaitu Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar sebesar 99,67%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 4, yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan sebesar 86,45%%.

ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 8 sasaran, terdapat 5 sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi capaian 100%. Berikut diinformasikan 8 capaian sasaran dan tingkat efisiensi dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas” tercapai melalui kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” dengan persentase sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 7,30%.
2. Sasaran “Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” tercapai melalui kinerja “Pertumbuhan PDRB Hijau” dan Indikator “Tingkat Kemiskinan” mencapai kinerja dengan persentase sebesar 100,13% dengan efisiensi anggaran sebesar 5,78%.
3. Sasaran “Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar” tercapai melalui kinerja “Rasio Konektivitas”, “Akses Terhadap Air Minum Layak”, dan “Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet” meraih tingkat capaian kinerja sebesar 96,78% dan efisiensi anggaran sebesar 0,69%.
4. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan” tercapai melalui kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” dan “Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,78% dan efisiensi anggaran sebesar 13,65%.
5. Sasaran “Menurunnya Angka Pengangguran” tercapai melalui kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” dengan tingkat capaian sebesar 99,34% dan efisiensi anggaran sebesar 10,77%.
6. Sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses terhadap Pangan” dengan kinerja “Indeks Ketahanan Pangan” memperoleh capaian sebesar 100,24% dan tingkat efisiensi anggaran sebesar 3,82%.
7. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, Berbudaya, Agamis dan Berkesetaraan Gender” tercapai melalui kinerja “Indeks Pembangunan Manusia” dengan tingkat capaian sebesar 101,53% dan memperoleh efisiensi sebesar 5,32%.
8. Sasaran “Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan” diukur melalui pencapaian kinerja “Indeks Pemberdayaan Gender” dengan perolehan capaian sebesar 98,32% dan tingkat efisiensi sebesar 2,64%.

BAB IV

PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Jambi Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi. Laporan Kinerja ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis RPJMD dan Perjanjian Kinerja Gubernur Jambi Tahun 2023.

Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2023 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD sebesar 100,30%. Dari 12 IKU, sebanyak 7 Indikator berhasil melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi.

Sebagian sasaran strategis RPJMD belum mencapai kinerja sesuai dengan harapan yang ditandai oleh 5 target IKU yang belum tercapai. Pertama adalah “Akses terhadap Air Minum Layak”, “Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet”, “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”, “Tingkat Pengangguran Terbuka, dan “Indeks Pemberdayaan Gender”.

Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.787.513.026.746,70,- terealisasi sebesar Rp. 1.708.304.990.086,17,- dengan efisiensi sebesar 4,33%.

Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif strategis. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi semakin meningkat sehingga bisa mencapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.



LAMPIRAN



PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	4,75	4,75	100
		Tingkat Kemiskinan	7,60	7,58 (Maret)	100,26
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	54	54,05	100,09
		Akses terhadap Air Minum Layak	83,92	80,02	95,35
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	100	94,88	94,88
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,43	68,15	94,09
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO ₂ eq)	3,348 juta ton CO ₂ eq	4 juta ton CO ₂ eq	119,47
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50%	4,53	99,34
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	72%	72,17	100,24
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	72,62	73,73	101,53
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	69,02	67,86	98,32

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAERAH
DENGAN CAPAIAN NASIONAL
TAHUN 2022 DENGAN REALISASI 2023**

NO	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022			REALISASI				OPD PENANGGUNG JAWAB
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	2022	2023	RPJMD	NASIONAL 2023	
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif Dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B	Kementerian PAN RB & Biro Organisasi
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau	4,55%	4,6	4,75%	4,75%	Tidak ada data pembandingan	BPS, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas TPHP, Dinas Perkebunan, Dinas ESDM, Dinas Perindag, Dinas PUPR, Dinas LH
		Tingkat Kemiskinan	7,9	7,70 (Sept)	7.58	7.84	9,36	BPS, Dinas Sosial
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	53,9	52,69	54.05	54.0	73,39	Dinas Perhubungan
		Akses terhadap Air Minum Layak	79,08	78,86	80.02	83.92	91,72	BPS, Dinas PUPR
		Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	99%	89,9	94.88	100%	Tidak ada data pembandingan	Dinas Kominfo
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,07	70,32	68.15	72.43	72,54	Kementerian LHK, Dinas LH, Dinas Kehutanan
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Lahan (Juta Ton CO ₂ eq)	3,283 Juta ton CO ₂ eq	4 Juta ton CO ₂ eq	4 Juta ton CO ₂ eq	3.348 Juta ton CO ₂ eq	12,89	Bappeda, Tim Teknis Bidang Monitoring dan Reporting (MAR) Provinsi Jambi
5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5	4,59	4.53	4.61	5,86	BPS
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	71	69,5	72.17	72	60,2	Dinas Ketahanan Pangan
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	72,14	72,14	73.73	72.62	74,39	BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan
8.	Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender	67,78	65,93	67.86	69.02	76,26	BPS, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jabatan : **GUBERNUR JAMBI**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, 20 Januari 2023

GUBERNUR JAMBI,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B
2.	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau	4,75%
		Tingkat Kemiskinan (September)	7,60%
3.	Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Rasio konektivitas	54,0
		Akses terhadap air minum layak	83,92%
		Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses internet	100%
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,43
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis lahan	3,348 juta ton CO ₂ eq
5.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka (Agustus)	4,50%
6.	Meningkatnya ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan	72,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,62
8.	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,02

Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	1.961.134.185.717
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	278.151.288.104
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp	967.450.000
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	48.396.966.215
5.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp	199.999.826
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	166.681.760.437
7.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	4.684.269.519
8.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	605.819.869
9.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	1.058.347.348
10.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	68.283.768.831
11.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	2.900.000.000
12.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	4.549.999.970
13.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	2.244.859.920
14.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	5.587.942.250
15.	Program Pengembangan Permukiman	Rp	24.299.199.150
16.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	206.340.000.100
17.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	25.150.000.000
18.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	520.850.357.583
19.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	3.999.997.701
20.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	3.041.454.000
21.	Program Kawasan Permukiman	Rp	14.395.357.648
22.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	1.970.141.979
23.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	4.749.479.467
24.	Program Penanggulangan Bencana	Rp	9.605.357.387

Program		Anggaran	
25.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	172.670.190
26.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	3.524.109.427
27.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp	244.999.126
28.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	17.740.395.292
29.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	2.874.315.901
30.	Program Penanganan Bencana	Rp	1.458.004.746
31.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	442.424.144
32.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	43.534.600
33.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	6.589.258.468
34.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	825.574.456
35.	Program Hubungan Industrial	Rp	432.647.904
36.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp	781.778.615
37.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	678.338.859
38.	Program Perlindungan Perempuan	Rp	419.644.352
39.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	165.585.056
40.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	438.345.828
41.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	7.272.197.000
42.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	4.346.927.917
43.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	4.003.540.250
44.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	320.030.227
45.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	999.400.000
46.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.239.229.050
47.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	1.105.009.745
48.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	Rp	769.323.647

Program		Anggaran	
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
49.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	Rp	2.022.000.000
50.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	370.000.000
51.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	125.000.000
52.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	693.223.188
53.	Program Pencatatan Sipil	Rp	570.569.786
54.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	571.449.171
55.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	48.467.778
56.	Program Penataan Desa	Rp	45.012.600
57.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	89.997.264
58.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	364.681.882
59.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.744.763.121
60.	Program Pengendalian Penduduk	Rp	142.816.762
61.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	53.276.524
62.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	89.252.024
63.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	9.449.329.281
64.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp	804.967.000
65.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	18.035.261.389
66.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	8.517.413.425
67.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	135.000.000
68.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	245.994.780
69.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	113.999.920
70.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	3.246.713.532

Program		Anggaran	
71.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	676.539.512
72.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	22.821.081.606
73.	Program Pengembangan UMKM	Rp	385.133.100
74.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	199.999.900
75.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	379.000.299
76.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	670.123.600
77.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	1.268.554.904
78.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	3.230.144.064
79.	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp	46.086.344.676
80.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	2.750.161.965
81.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	479.702.152
82.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	734.387.919
83.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	10.236.632.730
84.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	2.413.457.185
85.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	312.000.160
86.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	4.348.828.623
87.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	1.410.973.425
88.	Program Pengelolaan Arsip	Rp	762.772.658
89.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp	1.088.108.927
90.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	13.947.475.664
91.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	4.981.635.578
92.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp	374.082.400
93.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	1.613.318.265

Program		Anggaran	
94.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	3.808.733.372
95.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	2.634.832.281
96.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp	413.981.084
97.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	90.140.480
98.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	41.774.819.974
99.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	26.146.118.545
100.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	1.235.300.000
101.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	10.818.787.021
102.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	650.000.000
103.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	7.156.613.874
104.	Program Pengelolaan Hutan	Rp	12.893.868.741
105.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rp	1.213.327.949
106.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp	4.260.237.122
107.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp	90.730.800
108.	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp	170.191.800
109.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp	2.407.112.775
110.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp	8.166.928.623
111.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	60.894.400
112.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	913.287.650
113.	Program Pengembangan Ekspor	Rp	217.000.000
114.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	2.534.952.683
115.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	1.622.839.968

Program			Anggaran
116.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	3.231.908.059
117.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp	87.359.800
118.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	66.640.640
119.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp	68.397.152
120.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	46.989.690
121.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp	281.899.556
122.	Program Penataan Organisasi	Rp	945.619.800
123.	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp	2.401.560.711
124.	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp	111.182.041.262
125.	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Rp	1.810.253.940
126.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	1.459.603.550
127.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Rp	2.560.666.141
128.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp	1.437.506.742
129.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	63.311.208.909
130.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	6.259.608.154
131.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	4.717.782.841
132.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	1.517.360.337.821
133.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	3.525.310.737
134.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	15.392.284.011
135.	Program Kepegawaian Daerah	Rp	3.620.907.823
136.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	4.891.603.648
137.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	1.358.513.592
138.	Program Pelayanan Penghubung	Rp	1.329.556.142
139.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	15.376.491.595

Program			Anggaran	
140.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	2.988.019.680	
141.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	11.146.495.402	
142.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	5.638.291.340	
143.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	1.853.703.906	
144.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	519.558.140	
145.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	2.432.559.000	

Jambi, 20 Januari 2023

GUBERNUR JAMBI,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1
Telanaipura Jambi**

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN POSISI KEUANGAN	1
LAPORAN LABA RUGI	2
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3
LAPORAN ARUS KAS	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5 - 13
LAPORAN AUDITOR INDEPENDENT	



PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

SINERGI BUDAYA MELAKUKAN

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Mudasir, S.T
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Cisokan Raya No. 122 Rt.004/Rw.014 Kel. Abadijaya
Kec. Sukmajaya Kota Depok

Nama : Sauna Eka Tiondang, M.Pd
Jabatan : Manager Operasional
Alamat : Jl. Dr. Tazak No. 05 Perm Citra 4 Buluran Telanaiwipura

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Jambi Indoguna Internasional
2. Laporan Keuangan PT. Jambi Indoguna Internasional telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. Jambi Indoguna Internasional ditulis secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan PT. Jambi Indoguna Internasional tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT. Jambi Indoguna Internasional

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jambi, 07 Maret 2024



Mudasir, S.T Sauna Eka Tiondang, M.Pd
Direktur Manager Operasional



PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
BUMD PROVINSI JAMBI

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

Atas nama Manajemen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mudasir, ST
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **PT. JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL**.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.
3. Kami menjamin bahwa
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 - c. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian dalam perusahaan.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Atas Nama dan Mewakili Dewan Direksi

Jambi, 25 Februari 2024





KANTOR AKUNTAN PUBLIK BUDIANDRU DAN REKAN

LAPORAN KEUANGAN

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3	263.922.355	1.003.301.791
Piutang Usaha	4	28.853.373	129.513.745
Piutang Lain-Lain	5	11.486.245	9.586.245
Persediaan	6	59.871.468	59.871.468
Pajak Dibayar Dimuka	7	62.177.607	37.430.044
Jumlah Aset Lancar		426.311.048	1.239.703.293
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi Jangka Panjang	8	125.000.000	62.500.000
Nilai Buku Aset Tetap			
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2023 sebesar Rp.427.256.600,- dan tahun 2022 Rp.325.731.144,-)	9	-	101.525.456
Jumlah Aset Tidak Lancar		125.000.000	164.025.456
JUMLAH ASET		551.311.048	1.403.728.749
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Utang Pajak	10	132.811.600	49.876.630
Jumlah Kewajiban Lancar		132.811.600	49.876.630
EKUITAS			
Modal Saham	11	13.750.000.000	13.750.000.000
Saldo Laba		(13.331.500.552)	(12.396.147.881)
Jumlah Ekuitas		418.499.448	1.353.852.119
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		551.311.048	1.403.728.749

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan Usaha	12	1.174.327.475	1.297.064.161
BEBAN USAHA			
Beban Administrasi dan Umum	13	905.165.922	418.660.854
Beban Pemasaran dan Penjualan	14	1.208.879.727	1.410.539.487
Jumlah beban usaha		<u>2.114.045.649</u>	<u>1.829.200.341</u>
LABA USAHA		<u>(939.718.174)</u>	<u>(532.136.180)</u>
Pendapatan (beban) lain-lain	15	4.365.503	19.572.818
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		<u>(935.352.671)</u>	<u>(512.563.362)</u>
Pajak Penghasilan		-	-
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK		<u>(935.352.671)</u>	<u>(512.563.362)</u>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo 1 Januari 2022			
Modal Saham	13.750.000.000		13.750.000.000
Laba Tahun Lalu	-	(11.903.535.164)	(11.903.535.164)
Koreksi Laba Tahun Lalu	-	19.950.645	19.950.645
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	(512.563.362)	(512.563.362)
Saldo 31 Desember 2022	13.750.000.000	(12.396.147.881)	1.353.852.119
Modal Saham	13.750.000.000	-	13.750.000.000
Laba Tahun Lalu	-	(12.396.147.881)	(12.396.147.881)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	(935.352.671)	(935.352.671)
Saldo 31 Desember 2023	13.750.000.000	(13.331.500.552)	418.499.448

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Laba (rugi) tahun berjalan	(935.352.671)	(492.612.717)
Penyusutan	101.525.456	102.272.900
Arus kas sebelum perubahan modal kerja	(833.827.215)	(390.339.817)
(Kenaikan) Penurunan Aktiva Lancar :		
Piutang	100.660.372	482.078.275
Piutang Lain-Lain	(1.900.000)	(2.717.168)
Pajak Dibayar Dimuka	(24.747.563)	(19.950.645)
Kenaikan (Penurunan) Passiva Lancar :		
Utang Pajak	82.934.970	(54.147.231)
Jumlah	156.947.779	405.263.231
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional	(676.879.436)	14.923.414
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Investasi	(62.500.000)	-
Aktiva Tetap	-	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(62.500.000)	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Modal Saham	-	-
Arus kas dari aktivitas pendanaan	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(739.379.436)	14.923.414
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	1.003.301.791	988.378.377
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	263.922.355	1.003.301.791

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



KANTOR AKUNTAN PUBLIK BUDIANDRU DAN REKAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Jambi Indoguna Internasional Internasional merupakan PT Jambi Indoguna Internasional terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2001 Tanggal 16 Agustus 2001 yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Jambi dalam pembentukan PT Jambi Indoguna Internasional Terbatas (PT) Jambi Indoguna Internasional saat ini berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH. Nomor 8 Telanaipura Kota Jambi. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 9 Tanggal 20 Agustus 2001, oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jambi. PT. Jambi Indoguna Internasional telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Maret 2019, dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Mei 2019, berkenaan dengan pemberhentian dengan hormat direktur serta komisaris kemudian menunjuk dan menetapkan direktur dan komisaris

Legalitas-legalitas yang dimiliki perusahaan sebagai berikut:
NPWP : 02.061.817.9-331.000

b. Maksud dan Tujuan

Tujuan pendirian dan pengembangan PT. Jambi Indoguna Internasional, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah Jambi selaku Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jambi pada umumnya, Khususnya di bidang pertambangan, Pertanian, Industri, Perdagangan Umum, Pembangunan, Transportasi, Jasa Umum dan Usaha Lainnya. Selanjutnya disamping maksud dan tujuan tersebut di atas, secara komersial perusahaan bertujuan untuk menjadi perusahaan yang menguntungkan (*profitable*), makmur (*prosper*), dan berkelanjutan (*sustainable*) dalam berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.

c. Domisili Perusahaan

PT. Jambi Indoguna Internasional saat ini bertempat di Jalan. Prof Dr. Sri Soedewi MS. SH. No 8 Telanaipura, Jambi
36122 Kota Jambi.

d. Pengurus Perusahaan

Susunan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris : Johansyah, S.E., M.E.

Direktur

Direktur : Mudasir, S.T.

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi signifikan telah diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut :

a. Pernyataan kepatuhan

Perusahaan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku secara retrospektif. Terkait dengan hal tersebut, Perusahaan menyajikan laporan posisi keuangan awal periode komparatif dan melakukan reklasifikasi saldo dalam laporan keuangan periode komparasi untuk tujuan peningkatan daya banding informasi antar periode.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2023 dengan angka komparatif 2022 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratan.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), dan laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dengan Pihak- Pihak Berelasi

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut:

1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
2. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya;
3. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga terkait dengan entitas pelapor;
4. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (1);
5. Orang yang diidentifikasi dalam butir (1) (2) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(lanjutan)*

d. Kas dan setara kas

Kas terdiri dari kas dan bank. Setara kas adalah semua investasi yang bersifat jangka pendek dan sangat likuid yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dengan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi pencairannya.

e. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang disajikan sebesar nilai nominal dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang ragu-ragu ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun. Besarnya penyisihan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan manajemen dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

f. Investasi

Investasi dengan tingkat kepemilikan dibawah 20% dicatat dengan metode harga perolehan, Pernyataan saham dengan kepemilikan antara 20 % - 50 % langsung maupun tidak langsung dinyatakan sesuai dengan biaya perolehan, ditambah dengan bagian laba atau rugi perusahaan asosiasi sejak perolehan sebesar persentase kepemilikan dan dikurangi dengan deviden yang diterima (metode ekuitas).

g. Utang / Pinjaman

Utang / pinjaman diterima merupakan bagian dari kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang yang berasal dari operasional perusahaan, yang berupa utang kepada individu atau PT Jambi Indoguna Internasional atas barang dan jasa yang sudah diterima tetapi belum dibayar atau pembayaran secara kredit. Utang usaha ini dicatat

h. Imbalan kerja karyawan

Undang-undang No.13 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang "Ketenagakerjaan" ("UU No. 13 / 2003"). mengharuskan Perusahaan membayar imbalan kerja karyawan jika kondisi tertentu dalam UU No. 13 / 2003 tersebut terpenuhi. Beban jasa masa lalu diamortisasi berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Dalam SAK ETAP Bab 23, biaya untuk penyediaan imbalan kerja berdasarkan UU No. 13/2003 ditentukan dengan menggunakan metode penilaian aktuarial "*Projected Unit Credit*". Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laba rugi tahun berjalan. Perusahaan tidak (belum) menghitung beban dan mencadangkan kewajiban kepada karyawan seperti yang diwajibkan dalam undang-undang tersebut diatas.

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

i. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Pendapatan dari penjualan barang diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi :

- Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
- Perusahaan tidak lagi mengelola/melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal;
- Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada Perusahaan tersebut; dan
- Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan handal.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

j. Pajak penghasilan

Taksiran pajak penghasilan Perusahaan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Sesuai dengan SAK ETAP Bab 24 " Pajak Penghasilan", Perusahaan tidak mengakui penangguhan pajak (*deferred tax*) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antar laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak. Perusahaan mencatat kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar (*tax payable concept*). Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset.

Pajak penghasilan final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau pajak yang masih harus dibayar.

Pajak penghasilan tidak final

Menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, utang pajak penghasilan dihitung oleh wajib pajak sendiri (*self assessment system*) . Pajak penghasilan yang dibebankan pada laporan laba rugi ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING *(lanjutan)*

k. Penggunaan estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP Bab 18 mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Karena terdapat ketidakpastian yang melekat dalam pembuatan estimasi, hasil sebenarnya yang akan dilaporkan di masa mendatang akan didasarkan atas jumlah-jumlah yang berbeda dari estimasi tersebut.

l. Peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan

Peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan yang memberikan informasi tambahan atas laporan keuangan perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (*adjusting events*) akan mengakibatkan penyesuaian pada laporan keuangan. Peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memiliki dampak (*not an adjusting events*) apabila cukup material harus tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

Rincian akun terdiri dari :

	2023	2022
Kas		
Kas	7.485.634	2.049.631
SubJumlah Kas	7.485.634	2.049.631
Bank		
Bank Mandiri Ac.110-00-0412643-6	150.889.856	347.947.332
Bank Pembangunan Daerah Ac.0101-2312-23	104.482.361	652.240.324
Bank Tabungan Negara Ac.0000-1030-0008-12	1.064.504	1.064.504
SubJumlah Bank	256.436.721	1.001.252.160
Jumlah Kas dan Setara Kas	263.922.355	1.003.301.791

4. PIUTANG USAHA

Rincian akun terdiri dari :

	2023	2022
Piutang PT. Pertagas Niaga	28.853.373	129.513.745
Jumlah Piutang Usaha	28.853.373	129.513.745

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Rincian akun terdiri dari :

	2023	2022
Piutang Karyawan	11.486.245	9.586.245
Jumlah Piutang Lain-lain	11.486.245	9.586.245

6. PERSEDIAAN

Rincian akun terdiri dari :

	2023	2022
Persediaan Material	25.221.468	25.221.468
Persediaan Kavling	34.650.000	34.650.000
Jumlah Persediaan	59.871.468	59.871.468

7. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

Rincian akun terdiri dari :

	2023	2022
PPh Pasal 23	62.177.607	37.430.044
Jumlah Pajak Dibayar Dimuka	62.177.607	37.430.044

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. INVESTASI JANGKA PANJANG

Rincian akun terdiri dari :

	2023	2022
Investasi Saham PT Jambi Sinar Gas	125.000.000	62.500.000
Jumlah Investasi Jangka Panjang	125.000.000	62.500.000

9. ASET TETAP

Rincian akun terdiri dari :

31 Desember 2023				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Kendaraan	90.825.000	-	-	90.825.000
Alat Bengkel	292.588.500	-	-	292.588.500
Inventaris	43.843.100	-	-	43.843.100
Jumlah	427.256.600	-	-	427.256.600
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	36.330.000	54.495.000	-	90.825.000
Alat Bengkel	267.479.594	25.108.906	-	292.588.500
Inventaris	21.921.550	21.921.550	-	43.843.100
Jumlah	325.731.144	101.525.456	-	427.256.600
Nilai Buku	101.525.456			-

9. ASET TETAP

Rincian akun terdiri dari :

31 Desember 2022				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Kendaraan	90.825.000	-	-	90.825.000
Alat Bengkel	292.588.500	-	-	292.588.500
Inventaris	43.843.100	-	-	43.843.100
Jumlah	427.256.600	-	-	427.256.600
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	18.165.000	18.165.000	-	36.330.000
Alat Bengkel	194.332.469	73.147.125	-	267.479.594
Inventaris	10.960.775	10.960.775	-	21.921.550
Jumlah	223.458.244	102.272.900	-	325.731.144
Nilai Buku	203.798.356			101.525.456

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UTANG PAJAK		
Rincian akun terdiri dari :		
	2023	2022
PPN Keluaran	132.811.600	49.876.630
Jumlah Utang Pajak	132.811.600	49.876.630
11. MODAL SAHAM		
Rincian akun terdiri dari :		
	2023	2022
Modal Saham Pemprov Jambi	13.750.000.000	13.750.000.000
Jumlah Modal Saham	13.750.000.000	13.750.000.000
12. SALDO LABA		
Rincian akun terdiri dari :		
	2023	2022
Laba Tahun Berjalan	(935.352.671)	(512.563.362)
Laba Tahun Lalu	(12.396.147.881)	(11.903.535.164)
Koreksi Laba Tahun Lalu	-	19.950.645
Jumlah Saldo Laba	(13.331.500.552)	(12.396.147.881)
13. PENDAPATAN USAHA		
Rincian akun terdiri dari :		
	2023	2022
Pendapatan Usaha	1.174.327.475	1.297.064.161
Jumlah Pendapatan Usaha	1.174.327.475	1.297.064.161
14. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM		
Rincian akun terdiri dari :		
	2023	2022
Biaya Gaji Karyawan		
Biaya Pemeliharaan Kantor	6.291.000	13.197.000
Biaya FC dan ATK	18.279.050	20.813.325
Biaya Listrik	41.220.575	27.715.418
Biaya Telpon / Internet	8.414.405	9.922.747
Biaya PDAM	4.469.375	2.233.800
Biaya Kebutuhan Rumah Tangga	16.226.500	15.464.056
SubJumlah	94.900.905	89.346.346

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Rincian akun terdiri dari :

	2023	2022
Biaya Konsumsi	51.106.081	11.267.790
Biaya Perbaikan Kendaraan	10.145.000	1.800.200
Biaya Konsultan dan Audit	51.000.000	3.017.800
Biaya Tunjangan Kasir	-	-
Biaya Perizinan	20.000.000	45.000.000
Biaya Ekspedisi	681.000	516.450
Biaya Perjalanan Dinas	258.518.290	146.690.130
Biaya Penyusutan Alat Bengkal	25.108.906	73.147.125
Biaya Penyusutan Kendaraan	54.495.000	18.165.000
Biaya Penyusutan Inventaris	21.921.550	10.960.775
Biaya Administrasi Bank	-	1.310.000
Biaya Lain-Lain	317.289.190	17.439.238
Jumlah Beban Administrasi dan Umum	905.165.922	418.660.854

15. BEBAN PEMASARAN DAN PENJUALAN

Rincian akun terdiri dari :

	2023	2022
Biaya Gaji Karyawan	953.017.334	1.208.943.452
Biaya BPJS dan Jamsostek	81.003.993	76.082.355
Biaya Operasional Pemasangan	15.745.900	76.110.152
Biaya Transportasi	103.537.500	23.503.528
Biaya Operasional Umum	27.000.000	-
Biaya Lembur	25.600.000	25.900.000
Biaya Pesangon Karyawan	2.975.000	-
Jumlah Beban Pemasaran dan Penjualan	1.208.879.727	1.410.539.487

16. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian akun terdiri dari :

	2023	2022
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Jasa Giro	5.123.003	19.572.818
SubJumlah	5.123.003	19.572.818
Beban Lain-lain		
Biaya Adm Bank	757.500	
SubJumlah	757.500	-
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	4.365.503	19.572.818

PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. KEBERLANGSUNGAN USAHA

Kinerja rasio keuangan PT Jambi Indoguna tidak memungkinkan dikarenakan Modal saham senilai Rp.13.750.000.000 dengan defisit pada saldo laba sebesar Rp.13.331.500.552 dengan kerugian yang terjadi secara terus menerus, sehingga mengakibatkan keberlangsungan usahanya belum maksimal. Selanjutnya perusahaan harus melakukan evaluasi bisnis secara objektif.

18. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 25 Februari 2023.



KANTOR AKUNTAN PUBLIK BUDIANDRU DAN REKAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth,
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL

Opini Wajar dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL**, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali dampak dari hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian pada laporan kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian

Laporan keuangan **PT JAMBI INDOGUNA INTERNASIONAL** belum menerapkan kewajiban imbalan kerja tertentu dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 23 mengenai imbalan kerja dan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang perjanjian kerja, waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja sesuai catatan 2h pada catatan atas laporan keuangan.

Mereview pada catatan 17 atas laporan keuangan terlampir, kinerja rasio keuangan Perusahaan tidak memungkinkan dikarenakan modal saham senilai Rp.13.750.000.000 dengan defisit pada saldo laba sebesar Rp.13.331.500.552 dengan kerugian yang terjadi secara terus menerus, sehingga mengakibatkan keberlangsungan usahanya belum maksimal. Selanjutnya perusahaan harus melakukan evaluasi bisnis secara objektif.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini wajar dengan pengecualian kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak Yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

No. Laporan: 00211/2.1308/AU.205/1253-341/II/2024

Kantor Akuntan Publik **BUDIANDRU DAN REKAN** | Nomor Izin Usaha : **KMK-RI No. 514/KM.1/2020**
Member of **Global Integrated Assurance** | www.kapbudiandrudanrekan.com

Head Office in Jakarta:

Grand Kartika, Jl. Jambore No. 8A - 9A RT.005 RW.006, Kelurahan Cihubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur
DKI Jakarta 13720 - Indonesia | T: (021) 2287 0841 | 8773 0083



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Andif atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

No. Laporan: 0021/2.1308/ALJ.2405/1253-3/1/II/2024

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN | Nomor Izin Usaha : KMK-RI No. 514/KM.1/2020
Member of Global Integrated Assurance | www.kapbudiandrudanrekan.com

Head Office in Jakarta:

Grand Kartika, Jl. Jambore No. BA - 9A RT.005 RW.006, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur
DKI Jakarta 13720 - Indonesia | T: (021) 2287 0841 | 0773 0083



Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengkomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Kantor Akuntan Publik Budiandru dan Rekan

Dr. Budiandru, Ak., CA., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik: 1253

Jakarta, 25 Februari 2024



00211

No. Laporan: 00211/2.1308/AU.2/05/1253-3/1/11/2024

Kantor Akuntan Publik BUDIANDRU DAN REKAN j Nomor Izin Usaha : KMK-RT No. 514/KM.1/2020
Member off Global Integrated Assurance j www.kapbudiandrndanrekan.com

Head Office In Jakarta:

Grand Kartika, Jl. Jambore No. 8A - 9A RT.005 RW.006, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur
DKI Jakarta 13720 - Indonesia | T: (021) 2287 0841 | 8773 0083

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

**Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut
Beserta
Laporan Auditor Independen**

***Financial Statements
As of December 31, 2023
And For The Year
Then Ended
With
Independent Auditors' Report***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
BOARD OF DIRECTORS STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED AS OF DECEMBER 31, 2023**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini / We, the undersigned below :

1. Nama / Name	:	Khairul Suhairi
Alamat Kantor / Office Address	:	Jln. Jend. A. Yani No. 18, Jambi 36122
Alamat Domisili sesuai KTP / Domicile as states ID Card	:	Perumahan Villa Gading Mayang Blok I 24 Kel. Mayang Mangurai Alam Barajo Kota Jambi
Nomor Telepon Kantor / Phone Number Office	:	0741-60416, 60665
Jabatan / Position	:	Pil. Direktur Utama/ Acting President Director
2. Nama / Name	:	Pauli Hoesman Matsari
Alamat Kantor / Office Address	:	Jln. Jend. A. Yani No. 18, Jambi 36122
Alamat Domisili sesuai KTP / Domicile as states ID Card	:	Jln. Bukit Bulan RT/RW 021 Kel/Desa Rajawali Kecamatan Jambi Timur
Nomor Telepon Kantor / Phone Number Office	:	0741-60416, 60665
Jabatan / Position	:	Direktur Operasional/ Operational Director

Menyatakan bahwa :

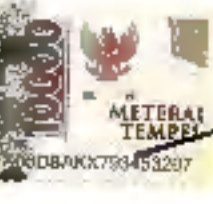
State that :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank);	1. We are responsible on the preparation and representation of the PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank);
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.	2. The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar. b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.	3. a. All information contained in Bank's financial statements has been fully and correctly disclosed b. The Bank's financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not eliminate material information and facts.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.	4. We are responsible on the Bank's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter has been made truthfully

Jambi,
30 Januari 2024 / January 30, 2024
Atas nama dan mewakili Direksi / For and behalf of the Board of Directors.

 Khairul Suhairi Pil. Direktur Utama / Acting President Director	 Pauli Hoesman Matsari Direktur Umum / General Director

Kantor Pusat

Jln. Jend. A. Yani No. 18, Jambi 36122

Telp. : (0741) 60416, 60665 Fax : (0741) 64882, 62623

email : bankjambi@bankjambi.co.id

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

Halaman/ Pages

1. SURAT PERNYATAAN DIREKSI		1. <i>DIRECTOR'S STATEMENTS LETTER</i>
2. DAFTAR ISI		2. <i>TABLE OF CONTENTS</i>
3. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		3. <i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>
4. LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri dari:		4. <i>FINANCIAL STATEMENT - For the year ended on December 31, 2023, are as follow:</i>
- Laporan Posisi Keuangan	i - iii	- <i>Statement of Financial Position</i>
- Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	iv	- <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
- Laporan Perubahan Ekuitas	v	- <i>Statement of Changes in Equity</i>
- Laporan Arus Kas	vi - vii	- <i>Statement of Cash Flows</i>
- Catatan atas Laporan Keuangan	1 - 156	- <i>Notes to Financial Statement</i>

Nomor/ Nomor : 00003/2.0936/AU.1/07/0396-2/1/1/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan
Direksi
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan telah wajar menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami percaya adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

*The Shareholders, Boards of Commissioners and
Directors
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi*

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (the Bank), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2023, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies.

In our opinion the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the financial statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas Informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melakukannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statement does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion there on.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, either due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Tanggung jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatement can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We Also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*
- *Evaluate appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI

[izin Usaha / License Firm No. 42/KM.1/2013]



Doli Diapary Siregar, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik /
Public Accountant Registration Number
AP.0396

Jakarta, 30 Januari 2024 / January 30, 2024



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2023

(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ASET				ASSETS
Kas	2.d, 2.e, 4	251.421.247.500	253.731.027.950	Cash
Giro Pada Bank Indonesia	2.d, 2.f, 5	1.353.749.139.258	969.131.251.945	Current Account With Bank Indonesia
Giro Pada Bank Lain	2.d, 2.f, 6	2.319.426.017	2.171.250.221	Current Account With Other Banks
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	2.d, 2.g, 7	99.999.999.964	-	Placements With Bank Indonesia and Other Banks
Efek-efek	2.d, 2.h, 8	2.646.380.426.379	2.314.001.023.785	Marketable Securities
Kredit Yang Diberikan	2.d, 2.k, 9			Loans
Pihak Ketiga		9.290.162.686.005	9.184.395.183.328	Third Parties
Pihak Berelasi	2.c, 35	9.967.258.892	11.671.528.243	Related Parties
Jumlah Kredit yang Diberikan		9.300.129.944.897	9.196.066.711.571	Total Loans
Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai		(214.673.627.494)	(208.505.756.787)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Kredit yang Diberikan - bersih		9.085.456.317.403	8.987.560.954.784	Total Loans - nett
Aset Tetap	2.l, 11	240.461.254.521	231.932.828.390	Fixed Assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(90.182.522.527)	(73.858.578.532)	Less: Accumulated depreciation
Jumlah		150.278.731.994	158.074.249.858	Total
Aset Hak Guna	2.p, 12	41.014.872.498	32.954.847.446	Right of Use Assets
Dikurangi: Akumulasi Penyusutan		(22.302.867.526)	(16.730.507.017)	Less: Accumulated amortization
Jumlah		18.712.004.972	16.224.340.429	Total
Aset Takberwujud	2.m, 13	5.192.388.116	5.346.388.116	Intangible Assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi		(4.960.378.949)	(4.984.876.449)	Less: Accumulated amortization
Jumlah		232.009.167	361.511.667	Total
Aset Pajak Tangguhan	2.z, 10.c	21.721.412.619	34.118.020.896	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	2.n, 2.o, 2.p, 14	106.576.728.959	91.550.793.561	Others Assets
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(3.053.166.763)	(3.053.166.763)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah		103.523.562.196	88.497.626.798	Total
JUMLAH ASET		13.733.794.277.469	12.823.871.258.333	TOTAL ASSETS

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes to Financial Statements which are an Integral part of these Financial Statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Continued)
AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Segera	2.q, 17	263.019.742.731	262.207.526.268	Liabilities Due Immediately
Simpanan Nasabah				Deposits From Customers
Pihak ketiga	2.d, 2.r, 2.s, 15	6.233.387.091.143	5.564.682.332.632	Third parties
Pihak berelasi	2.c, 35	2.863.771.705.361	3.293.437.651.342	Related parties
Jumlah simpanan nasabah		9.097.158.796.504	8.858.119.983.974	Total deposits from customers
Simpanan Dari Bank Lain	2.d, 2.t, 16	856.436.486.522	363.210.339.107	Deposits From Other Banks
Utang Pajak	2.z, 10.a	8.093.749.368	12.079.161.265	Taxes Payable
Pinjaman Yang Diterima	2.d, 2.v, 18	-	11.000.000.000	Borrowings
Imbalan Kerja Karyawan	2.y, 19			Employee Benefits
Bonus dan tantiem	2.y	65.624.875	662.721.488	Bonus and tantiem
Imbalan pasca kerja	2.y	25.212.494.736	24.692.346.673	Employee benefits
Jumlah		25.278.119.611	25.355.068.161	Total
Liabilitas Lain-lain	20	44.794.705.096	43.038.961.818	Others Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		10.294.781.599.832	9.575.011.040.593	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Pihak ketiga	15.c	946.618.756.785	1.088.936.009.187	Third parties
Pihak berelasi	15.c	11.304.510.553	26.275.728.914	Related parties
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		957.923.267.338	1.115.211.738.101	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes to Financial Statements which are an Integral part of these Financial Statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Continued)
AS OF DECEMBER 31, 2023

(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham				Share Capital
Modal dasar saham terdiri dari saham Seri A sebesar 2.700.000 saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham dan Saham Seri B sebesar 600.000 lembar, dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 per 31 Desember 2023 dan 2022				Authorized share capital consists of Series A shares amounting to 2,700,000 shares, with a nominal of Rp1,000,000 per share and Series B Shares of 600,000 shares, with a nominal value of Rp500,000 in December 31, 2023 and 2022
Modal ditempatkan dan disetor penuh saham Seri A masing-masing sebesar 847.321 dan 782.977 lembar saham dan Seri B masing-masing sebesar 77.771 dan 8.441 per 31 Desember 2023 dan 2022	2.ab, 21	886.206.500.000	787.197.500.000	The issued and paid-up capital of the Series A shares amounting to 847,321 dan 782,977 shares, respectively, and the Seri B shares amounting to 77,771 and 8,411 in December 31, 2023 and 2022
Tambahan modal disetor	2.ab, 22	14.640.242.736	32.818.559.736	Additonal Paid in Capital
Saldo Laba				Retained Earnings
Telah ditentukan penggunaannya	2.ad, 24.a	1.226.095.765.212	1.020.987.712.877	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	2.ad, 24.c	361.262.499.501	342.650.885.952	Unappropriated
Kenaikan (Penurunan) yang belum direalisasikan atas surat berharga tersedia untuk dijual	2.d, 2.h, 25	(4.353.889.884)	(45.926.051.603)	Unrealized increase (decrease) on available for sale Marketable Securities
Keuntungan (Kerugian) atas liabilitas Imbalan pasca kerja	2.d, 2.y, 25	(2.761.707.266)	(4.080.127.322)	Gain (Loss) on Employee benefit
JUMLAH EKUITAS		2.481.089.410.299	2.133.648.479.640	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		13.733.794.277.469	12.823.871.258.333	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes to Financial Statements which are an Integral part of these Financial Statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2023

(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
PENDAPATAN OPERASIONAL				REVENUE OPERATING
Pendapatan Bunga dan Syariah	2.w, 26	1.156.620.989.594	1.156.997.681.386	Interest Income And Sharia Margin Income
Pendapatan Operasional Lainnya	2.x, 27	92.645.934.148	110.735.895.850	Other Operating Income
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		1.249.266.923.742	1.267.733.577.236	TOTAL OPERATING INCOME
BEBAN OPERASIONAL				OPERATING EXPENSES
Beban Bunga dan Bagi hasil	2.w, 28	392.780.560.621	318.264.524.956	Interest Expense And Sharia Share Expenses
Beban Operasional Lainnya				Other Operating Expenses
Provisi dan komisi		3.563.683.318	13.216.469.916	Other fee and commission
Tenaga kerja	29	239.835.284.825	244.091.583.227	Employee's
Umum dan administrasi	30	139.683.891.297	160.614.402.073	General and administrative
Pembentukan/ (Pemulihan)				
cadangan kerugian penurunan nilai	31	6.279.412.829	76.093.538.350	Allowance for impairment losses
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		782.142.832.890	812.280.518.522	TOTAL OPERATING EXPENSES
LABA OPERASIONAL		467.124.090.852	455.453.058.714	OPERATING REVENUE
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL	32			NON OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan Bukan Operasional		10.768.416.098	3.524.676.429	Non Operating Income
Beban Bukan Operasional		(8.084.919.140)	(7.038.490.732)	Non Operating Expenses
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL		2.683.496.958	(3.513.814.303)	TOTAL NON OPERATING INCOME (EXPENSES)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		469.807.587.810	451.939.244.411	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK				TAX EXPENSES
Kini	2.z, 10.c	111.758.713.880	107.778.337.480	Current Income Tax
Beban (Manfaat) Tangguhan	2.z, 10.d	(3.213.625.571)	1.510.020.979	Deferred Tax
JUMLAH BEBAN PAJAK		108.545.088.309	109.288.358.459	TOTAL TAX EXPENSES
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		361.262.499.501	342.650.885.952	PROFIT FOR THE YEAR
PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSES)
Perubahan nilai wajar efek-efek				Net changes in fair value of available for sale
tersedia untuk dijual - bersih	2.d, 2.h, 25	41.572.161.719	(56.047.323.663)	marketable securities - net
Keuntungan (kerugian) Aktuaria - bersih	2.d, 2.y, 25	1.318.420.056	(1.585.620.648)	Actuarial gain (loss) - net
JUMLAH		42.890.581.776	(57.632.944.311)	TOTAL
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		404.153.081.277	285.017.941.641	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM	2.aa, 34	423.007	441.051	EARNING PER SHARES

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes to Financial Statements which are an Integral part of these Financial Statements

		Pendapatan Komprehensif Lainnya/ <i>Other Comprehensive Income</i>							
		Kenaikan (Penurunan) Yang Belum Direalisasikan Atas Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual/					Keuntungan (Kerugian) Atas Tambahan Dasar Karyawan/ Gain (loss) on Employee Benefit	Jumlah Ekuitas/ Total Shareholders' Equity	
Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued And Fully Paid-Up Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba / <i>Retained Earnings</i>		Unrealized Increase or Decrease on Available for Sale Marketable Securities				
			Telah Ditentukan Penggunaanya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaanya/ Unappropriated					
SALDO PER 31 DESEMBER 2021	770.816.500.000	590.574.736	841.920.121.799	314.153.668.557,40	10.121.272.060	(2.494.506.674)	1.935.107.630.478		BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2021
Setoran Modal	21	16.381.000.000	(16.381.000.000)	-	-	-	-	-	Paid in capital
Tambahan modal disetor	22	-	48.608.985.000	-	-	-	-	48.608.985.000	Additional Paid in capital
Pengampunan Pajak	23	-	-	-	-	-	-	-	Tax Amnesty
Komprehensif Lainnya	25	-	-	-	-	-	-	-	Other Comprehensive
Efek-efek Tersedia Untuk Dijual		-	-	-	(56.047.323.663)	-	(56.047.323.663)	(56.047.323.663)	Available for sale securities
Laba (rugi) Aktuarial		-	-	-	-	(1.585.620.648)	(1.585.620.648)	(1.585.620.648)	Actuarial gain (loss)
Dividen tunai	2.ae, 24.b 1	-	-	(135.086.077.479)	-	-	-	(135.086.077.479)	Cash dividends
Pembentukan cadangan	24.a 1	-	286.667.591.078	(179.067.591.078)	-	-	-	107.600.000.000	Appropriation for reserves
Penggunaan Dana Cadangan		-	(107.600.000.000)	-	-	-	-	(107.600.000.000)	Application of reserves
Laba bersih tahun berjalan	24.c	-	-	342.650.885.952	-	-	-	342.650.885.952	Profit for the year
SALDO PER 31 DESEMBER 2022	787.197.500.000	32.818.559.736	1.020.987.712.877	342.650.885.952	(45.926.051.603)	(4.080.127.322)	2.133.648.479.640		BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2022
Setoran Modal	21	99.009.000.000	(99.009.000.000)	-	-	-	-	-	Paid in capital
Tambahan modal disetor	22	-	80.830.683.000	-	-	-	-	80.830.683.000	Additional Paid in capital
Pengampunan Pajak	23	-	-	-	-	-	-	-	Tax Amnesty
Komprehensif Lainnya	25	-	-	-	-	-	-	-	Other Comprehensive
Efek-efek Tersedia Untuk Dijual		-	-	-	41.572.161.719	-	-	41.572.161.719	Available for sale securities
Laba (rugi) Aktuarial		-	-	-	-	1.318.420.056	-	1.318.420.056	Actuarial gain (loss)
Dividen tunai	2.ae, 24.b	-	-	(137.542.833.617)	-	-	-	(137.542.833.617)	Cash dividends
Pembentukan cadangan	24.a	-	180.108.052.335	(180.108.052.335)	-	-	-	-	Appropriation for reserves
Pembentukan/ (Penggunaan) Cadangan Khusus		-	25.000.000.000	(25.000.000.000)	-	-	-	-	Application of reserves
Laba bersih tahun berjalan	24.c	-	-	361.262.499.501	-	-	-	361.262.499.501	Profit for the year
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	886.206.500.000	14.640.242.736	1.226.095.765.212	361.262.499.501	(4.353.889.884)	(2.761.707.266)	2.481.089.410.299		BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2023

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes to Financial Statements which are an Integral part of these Financial Statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Pendapatan bunga, provisi dan komisi		1.155.688.040.119	1.157.543.950.731	Interest income, provision and commission
Beban bunga dan margin syariah		(395.649.068.490)	(279.316.502.529)	Interest expense and other expenses
Beban bagi hasil dana syirkah temporer		(157.288.470.762)	316.188.643.792	Share on return of temporary syirkah funds
Pendapatan operasional lainnya		102.577.529.110	49.589.137.236	Other operating revenues
Beban administrasi dan umum		(211.150.270.907)	(45.650.388.131)	General and administrative expenses
Beban kepegawaian		(239.835.284.825)	(244.091.583.227)	Employee's expenses
Pajak Penghasilan		8.411.196.367	(114.154.161.073)	Income tax
Arus kas sebelum perubahan dalam		262.753.670.612	840.109.096.799	Cash flows before changes in
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan/(kenaikan) aset operasi				Decrease/(increase) in operating assets:
Kredit yang diberikan		(104.096.368.596)	(220.080.910.402)	Loans
Kenaikan (penurunan) pada:				Increase (Decrease) in operating liabilities:
Simpanan		732.264.959.945	(893.773.021.731)	Deposits
Kas bersih diperoleh dari		890.922.261.961	(273.744.835.334)	Net cash from provided
Kegiatan operasi				operating activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI				INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap		(8.528.426.131)	(121.614.202.129)	Acquisition of fixed assets
Penurunan aset dalam proses		-	-	Decrease asset on progress
Perolehan aset takberwujud		154.000.000	(14.850.000)	Acquisition of Intangible Assets
Kenaikan (Penurunan) efek-efek		(332.379.402.593)	61.814.778.596	Increase (Decrease) Marketable Securities
Kas bersih digunakan untuk		(340.753.828.724)	(59.814.273.533)	Net cash used in provided from
dari Kegiatan investasi				investing activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Kenaikan setoran modal		80.830.683.000	48.608.985.000	Increase in share capital
Pembayaran dividen		(137.542.833.614)	(135.086.077.478)	Payment for dividend
Kenaikan efek-efek yang diterbitkan		-	(0)	Increase Marketable securities issue
Kenaikan (Penurunan) pinjaman yang diterima		(11.000.000.000)	(3.830.000.000)	Inrease (Decrease) in borrowings
Arus kas bersih digunakan untuk		(67.712.150.614)	(90.307.092.478)	Net cash used in
aktivitas pendanaan				financing activities

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes to Financial Statements which are an Integral part of these Financial Statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
STATEMENT OF CASH FLOWS (Continued)
FOR THE YEAR ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2023
(Expressed in Full Amount in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		482.456.282.623	(423.866.201.345)	NET INCREASE (DECREASE) OF CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		1.225.033.530.116	1.648.899.731.461	CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		1.707.489.812.739	1.225.033.530.116	CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR
Kas dan setara kas terdiri dari:				Components of cash and cash equivalent:
Kas	4	251.421.247.500	253.731.027.950	Cash
Giro pada Bank Indonesia	5	1.353.749.139.258	969.131.251.945	Current account with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	6	2.319.426.017	2.171.250.221	Current account with Other Banks
Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain	7	99.999.999.964	-	Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Jumlah		1.707.489.812.739	1.225.033.530.116	Total

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See the accompanying notes to Financial Statements which are an Integral part of these Financial Statements

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi ("Bank Jambi") berkedudukan di Jambi, didirikan pada tanggal 12 Pebruari 1959 berdasarkan Akta Notaris Adi Putra Parlindungan, S.H., No. 6 dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi No. 3 tanggal 8 Januari 1963 tentang Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Akta Notaris tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A/5/115/6 tanggal 6 November 1959 dan telah diumumkan dalam tambahan No.110 pada Berita Negara Republik Indonesia No.104 tanggal 29 September 1959, dan Perda tersebut telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Des/32/127-164.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank Jambi, ruang lingkup kegiatan Bank Jambi adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, Bank Jambi juga melaksanakan fungsi sebagai lembaga yang menunjang pembangunan di daerah yaitu penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah dan sebagai pemegang kas daerah dan/atau melaksanakan penyimpanan uang daerah. Bank Jambi mulai beroperasi pada tanggal 6 Oktober 1959.

Perda tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dengan Perda Provinsi Jambi No.5 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari PT Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA).

Anggaran Dasar Bank Jambi telah beberapa kali mengalami perubahan, sebagaimana tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 29 tanggal 5 Juni 2008 dibuat hadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di Jambi tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-49942.AH.0102 tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi ("Bank Jambi"), located in Jambi, was established on February 12, 1959 under Notarial Deed of Adi Putra Parlindungan, S.H., No.6 and the Regional Regulation (Perda) of Jambi Province No. 3 dated January 8, 1963 regarding the Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi. The Notarial Deed was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia under his Decree No.J.A/5/115/6 dated November 6, 1959 and was promulgated in the supplement No.110 to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 104 dated September 29, 1959, and the Regional Regulation was approved by the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia under his Decree No.Des/32/127-164.

In accordance with article 3 of Bank Jambi's Articles of Association, Bank Jambi's scope of activities is to engage in general banking services in compliance with prevailing laws and regulations. Bank Jambi also conducts the function of an entity that supports the regional development by motivating and encouraging the development of the region, and also serves as regional cash account holder, and/or maintains regional savings. Bank Jambi started its operation on October 6, 1959.

The above Regional Regulation has been amended several times, and in the latest amendment under Regional Regulation of Jambi No.5 dated November 10, 2022, it changed the legal entity from PT Bank Pembangunan Daerah Jambi to PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA).

Bank Jambi's Articles of Association have been amended several times, as stipulated in the Deed of Confirmation of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 29 dated June 5, 2008 of Muhammad Zen, S.H., Notary in Jambi concerning the Establishment of Limited Liability Company, which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No.AHU-49942.AH.0102 of 2009 dated October 15, 2009.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)**a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)**

Terakhir sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar Perseroan, termaktub dalam Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) No. 54 tanggal 21 November 2022, dibuat di hadapan Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, yang telah diberitahukan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Disebut "Bank Jambi" No.AHU-AH.01.03-0320663 tanggal 2 Desember 2022.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, Bank Jambi didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ruang lingkup Bank Jambi antara lain:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, cek atau sarana lainnya;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan di bidang jasa keuangan lainnya; dan
- Melaksanakan kegiatan perbankan syariah.

Selain itu Bank Jambi juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten Jambi dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten Jambi.

Bank Jambi memulai aktivitas unit usaha Syariah berdasarkan ijin dari Bank Indonesia melalui suratnya Nomor 13/2482/DpbS, tanggal 7 Desember 2011. Kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah efektif dilaksanakan tanggal 3 Januari 2012.

Kantor Pusat Bank Jambi terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 18, Telanai Pura, Jambi. Unit Usaha Syariah berlokasi di Jl. Kapt. Pattimura No.70-71, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Jambi 36139.

1. GENERAL (Continued)**a. Establishment and General Information (continued)**

The latest amendment to the Articles of Association of the Company is set forth in the Deed of Confirmation of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) No. 54 dated November 21, 2022, of Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., Notary in Jambi, which deed has been notified to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Receipt of Notification of Amendment to Articles of Association of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Referred to as Bank Jambi No.AHU-AH.01.03-0320663 dated December 2, 2022.

In accordance with article 3 of Bank Jambi's Articles of Association, Bank Jambi's objective is to engage in the Banking business. To achieve this objective, the scope of Bank Jambi's activities mainly covers the following:

- Collecting third-party funds in the form of current accounts, time deposits, certificates of deposits, savings, and/or other similar forms;*
- Granting loans;*
- Placing funds in, obtaining borrowings from, or providing financing to other banks, either by letter, telecommunication facilities, checks or other facilities;*
- Conducting investment activities through share participation in Bank or other financial institution companies; and*
- Conducting Sharia Banking activities.*

In addition, Bank Jambi also assists the Provincial Government, Jambi Municipal/Regency in developing Rural Banks (BPR) and other financial service institutions owned by the Provincial Government of Jambi Municipal/Regency.

Bank established Sharia Business Unit based on the Letter of Bank Indonesia Number 13/2482/DpbS, dated December 7, 2011. The sharia branch office operation was effectively held on January 3, 2012.

The Head Office of Bank Jambi is located at Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 18, Telanai Pura, Jambi. Sharia Business Unit is located at Jl. Kapt. Pattimura No.70-71, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Jambi 36139.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)**a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank mempunyai jaringan distribusi sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Kantor Cabang Konvensional	12	12	Conventional Branch Offices
Kantor Cabang Pembantu Konvensional	31	31	Conventional Sub Branches
Kantor Cabang Pembantu Syariah	2	2	Sharia Sub Branches
Kantor Fungsional	11	11	Functional Office
Kantor Cabang Syariah	1	1	Sharia Branch Office
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	133	131	Automatic Teller Machines (ATM)

b. Organisasi dan Struktur Manajemen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jambi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama	Dra. Emilia, M.E.	Dra. Emilia, M.E.	President Commissioner
Komisaris	Agus Pirngadi, S.Sos.	Agus Pirngadi, S.Sos.	Commissioner
Komisaris Independen	Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A.	Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A.	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Ansorullah, S.H., M.H.	Ansorullah, S.H., M.H.	Independent Commissioner
Dewan Direksi			Board of Directors
Direktur Utama	H. Khairul Suhairi, S.E., M.M. (Plt)	Dr. H. Yunsak El Halcon, S.H., M.Si	President Director
Direktur Kepatuhan	Hj. Riza Roziani, S.E.	Hj. Riza Roziani, S.E.	Compliance Director
Direktur Operasional	Drs. H. Pauzi Hoesman Matsari	Drs. H. Pauzi Hoesman Matsari	Operational Director
Direktur Pemasaran dan Syariah	--	H. Khairul Suhairi, S.E., M.M.	Marketing and Sharia Director

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 6 Juni 2023 dan 24 April 2022, yang risalah rapatnya didokumentasikan dalam Akta Berita Acara No.6 dan No.82, dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., di Jambi.

b. Organizational and Management Structure

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bank Jambi as of December 31, 2023 and 2022 is as follows:

The Board of Commissioners as of December 31, 2023 and 2022 was appointed based on the minutes of Extraordinary General Meetings of Shareholders held on June 6, 2023 and April 24, 2022, which were documented under Notarial Deed No. 6 and No.82, of Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., Notary in Jambi.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**1. UMUM (Lanjutan)****b. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)**

Susunan Dewan Direksi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 6 Juni 2023 dan tanggal 24 April 2022, 10 Februari 2021, 17 Desember 2020, 5 Maret 2020 yang risalah rapatnya di dokumentasikan dalam Akta Berita Acara No.06 dan No.82, No.19, No.24, No.06 dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., Notaris di Jambi.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023
Komite Audit	
Ketua	Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A.
Anggota	Firmansyah Putra, S.H., M.H.
Anggota	Gushendarto, S.E.
	31 Desember / December 31, 2023
Komite Pemantau Risiko	
Ketua	Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A.
Anggota	Dra. Susfa Yeti, M.Si., Ak.
Anggota	Dr. Rama Dhonal, SE., M.Ak., CTT.
	31 Desember / December 31, 2023
Komite Remunerasi dan Nominasi	
Ketua	Ansorullah, S.H., M.H.
Anggota	Agus Pirngadi, S.Sos.
Anggota	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia

Susunan Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No 76 tahun 2023 tanggal 27 September 2023, No 53A tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023 dan No.73 tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022, No.097 tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Masa pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko untuk masa jabatan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan.

1. GENERAL (Continued)**b. Organizational and Management Structure (continued)**

The Board of Directors as of December 31, 2023 and 2022 was appointed based on the minutes of Extraordinary General Meetings of Shareholders held on June 6, 2023 and April 24, 2022; February 10, 2021; December 17, 2020; March 5, 2020, which were documented under Notarial Deeds No.06 and No.82, No.19, No.24, No.6 of Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., Notary in Jambi.

The composition of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2023, and 2022 is as follows:

	31 Desember / December 31, 2022	
		Audit Committee
	Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A.	Chairman
	Firmansyah Putra, S.H., M.H.	Member
	Gushendarto, S.E.	Member
	31 Desember / December 31, 2022	Risk Monitoring Committee
	Rahayu, S.E., M.Sc., Ak., C.A.	Chairman
	Dra. Susfa Yeti, M.Si., Ak.	Member
	Yor Patrick Nazda, S.E., M.Si.	Member
	31 Desember / December 31, 2022	Remuneration and Nomination Committee
	Ansorullah, S.H., M.H.	Chairman
	Agus Pirngadi, S.Sos.	Member
	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia	Member

The composition of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee as of December 31, 2023 and 2022 is in accordance with the Director Decision Letters No.76 of 2023 dated September 27, 2023; No.53A dated May 31, 2023 and No.73 of 2022 dated June 2, 2022; No.097 of 2022 dated August 23, 2022.

The appointment for members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee is for a period of 1 (one) year from the date of appointment.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)**b. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)**

Pembentukan komite audit Bank Jambi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum Pasal 34.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah sesuai dengan SK Direksi No.050A tanggal 25 April 2022.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank Jambi adalah sebagai berikut:

**31 Desember /
December 31,
2023**

Dewan Pengawas Syariah

Ketua
Anggota

Dr. Lucky Enggraini Fitri, S.E., M.Si
Ahmad Syahrizal

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 21 November 2022 yang risalah rapatnya di dokumentasikan dalam Akta Berita Acara No.54 dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, di Jambi.

Pemimpin Divisi Satuan Kerja Audit Internal Bank Jambi adalah Hendri, S.E., sesuai dengan Keputusan Direksi Bank Jambi Nomor 57 tahun 2017 tanggal 12 April 2017.

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Zulfikar, S.E., dan H. Achmad Jais, S.E., M.E.Sy., sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022.

1. GENERAL (Continued)**b. Organizational and Management Structure (continued)**

The establishment of Bank Jambi's Audit Committee is in compliance with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Work of the Audit Committee and Financial Services Authority Regulation (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks Article 34.

The composition of the Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2023 and 2022 is in accordance with Director Decision Letters No.050A dated April 25, 2022.

The composition of Bank Jambi's Sharia Supervisory Board is as follows:

**31 Desember /
December 31,
2022**

Sharia Supervisory Board

Dr. Lucky Enggraini Fitri, S.E., M.Si
Ahmad Syahrizal

Chairman
Member

The Sharia Supervisory Board as of December 31, 2023 and 2022 was appointed based on Extraordinary General Meetings of Shareholders dated November 21, 2022, which was documented under Notarial Deed No.54 of Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, Notary in Jambi.

Bank Jambi's Head of Internal Control Division is Hendri, S.E., based on Bank Jambi's Director Decision letter number 57 of 2017 dated April 12, 2017.

The Bank's Corporate Secretary as of December 31, 2023 and December 31, 2022 is Zulfikar, S.E., and H. Achmad Jais, S.E., M.E.Sy., based on the Bank's Director Decision letter number 23 of 2022 dated February 11, 2022.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**1. UMUM (Lanjutan)****1. GENERAL (Continued)****b. Organisasi dan Struktur Manajemen (lanjutan)****b. Organizational and Management Structure (continued)**

Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Dewan Pengawas Syariah dan Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

The total salaries and allowances paid to the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Sharia Supervisory Board and Corporate Secretary are as follows:

31 Desember 2023 / December 31, 2023					
	Jumlah anggota/ Members	Gaji/ Salaries	Bonus/ Bonus	Jumlah/ Total	
Dewan Komisaris	4	1.329.669.000	5.030.209.498	6.359.878.498	Board of Commissioners
Dewan Direksi	4	2.449.705.500	16.629.790.502	19.079.496.002	Board of Directors
Komite Audit	2	153.140.400	25.523.400	178.663.800	Audit Committee
Komite Pemantau Risiko	2	153.140.400	22.332.975	175.473.375	Risk Monitoring Committee
Dewan Pengawas Syariah	2	149.949.975	24.247.232	174.197.207	Sharia Supervisory Board
Sekretaris Perusahaan	8	952.010.384	1.328.673.795	2.280.684.179	Corporate Secretary
Jumlah	22	5.187.615.659	23.060.777.402	28.248.393.061	Total

31 Desember 2022 / December 31, 2022					
	Jumlah anggota/ Members	Gaji/ Salaries	Bonus/ Bonus	Jumlah/ Total	
Dewan Komisaris	4	1.006.236.000	3.271.740.851	4.277.976.851	Board of Commissioners
Dewan Direksi	4	2.659.338.000	17.291.363.639	19.950.701.639	Board of Directors
Komite Audit	2	139.964.359	22.282.332	162.246.691	Audit Committee
Komite Pemantau Risiko	2	150.101.900	24.308.000	174.409.900	Risk Monitoring Committee
Dewan Pengawas Syariah	2	113.534.880	18.083.500	131.618.380	Sharia Supervisory Board
Sekretaris Perusahaan	8	652.210.482	880.856.424	1.533.066.906	Corporate Secretary
Jumlah	22	4.721.385.621	21.508.634.746	26.230.020.367	Total

c. Susunan Karyawan**c. The Composition of Employees**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah karyawan Bank Jambi adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the number of employees of Bank Jambi is as follows:

Tahun/ Year	Tetap/ Permanent	Honorer/ Temporary	Outsourcing/ Outsourcing	Jumlah Total
31 Desember /December 31, 2023	572	143	373	1.088
31 Desember /December 31, 2022	546	187	376	1.109

d. Persetujuan dan pengesahan untuk penerbitan laporan keuangan**d. Approval and authorization for the issuance of financial statements**

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 30 Januari 2024.

The management of Bank is responsible for the preparation and presentation of the financial statements that were approved for issuance on January 30, 2024.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Ikhtisar kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan**Pernyataan kepatuhan**

Laporan keuangan Bank Jambi disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang telah diterapkan secara konsisten kecuali sebagaimana yang dijelaskan oleh Bank dalam penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis dan disusun dengan dasar akrual (kecuali laporan arus kas, pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*), terkecuali untuk yang berikut ini:

1. Instrumen keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar;
2. Instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur pada nilai wajar;
3. Aset keuangan tersedia untuk dijual yang diukur pada nilai wajar;
4. Aset keuangan dan liabilitas yang diakui ditunjuk sebagai lindung nilai dalam kualifikasi hubungan lindung nilai wajar disesuaikan untuk perubahan nilai wajar diatribusikan pada risiko lindung nilai;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The material accounting policies applied in the preparation and presentation of the financial statements is as follows:

a. Basis of preparation of the financial statements**Statement of compliance**

Bank Jambi's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("SFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI).

Financial statements were prepared in accordance with SFAS 1, "Presentation of Financial Statements".

The significant accounting policies have been consistently applied by the Bank, except as explained below, in the presentation of the financial statements for the years ended December 31, 2023 and 2022.

*The financial statements have been prepared on historical cost basis and accrual basis of accounting (except for statement of cash flows, revenue from *istishna* and profit sharing for *mudharabah* and *musyarakah* financing), except for the following:*

1. *Derivative financial instruments are measured at fair value;*
2. *Financial instruments at fair value through profit or loss are measured at fair value;*
3. *Available-for-sale financial assets are measured at fair value;*
4. *Recognized financial assets and financial liabilities designated as hedged items in qualifying fair value hedge relationship are adjusted for changes in fair value attributable to the risk being hedged;*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,

kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,

unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)****Pernyataan kepatuhan (lanjutan)**

5. Liabilitas untuk imbalan pasti diakui sebesar nilai kini imbalan pasti dikurang total dari perencanaan, ditambah keuntungan aktuarial yang diakui, dikurangi biaya jasa di masa lalu yang belum diakui dan kerugian aktuarial yang belum diakui.

Unit Usaha Syariah, yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102 "Akuntansi Murabahah", PSAK 105 "Akuntansi Mudharabah", PSAK 106 "Akuntansi Musyarakah", PSAK 107 "Akuntansi Ijarah", PSAK 110 "Akuntansi Sukuk", dan PSAK 111 "Akuntansi Wa'd", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan standar akuntansi keuangan lain yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

1. Jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan;
2. Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)**a. Basis of preparation of the financial statements (continued)****Statement of compliance (continued)**

5. The liability for defined benefit obligations is recognized at the present value of the defined benefit obligation less the net total of the plan assets, plus recognized actuarial gains, less unrecognized past service cost and unrecognized actuarial losses.

The Sharia Business Unit, which is engaged in sharia banking presents financial statements in conformity with sharia accounting principles in accordance with SFAS 101, "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS 102 "Accounting for Murabahah", SFAS 105 "Accounting for Mudharabah", SFAS 106 "Accounting for Musyarakah", SFAS 107 "Accounting for Ijarah", SFAS 110 "Accounting for Sukuk", and SFAS 111 "Accounting for Wa'd", Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI) and other Statements of Financial Accounting Standards established by the Institute of Indonesia Chartered Accountants and also accounting and reporting guidelines prescribed by the Indonesian banking regulatory authority.

The statements of cash flows are prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing, and financing activities. For the purpose of statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, and Deposit Facility in Bank Indonesia, that mature within three months from the date of acquisition, as long as they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted in use.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Statements of Financial Accounting Standards requires the use of judgments, estimates and assumptions that affect:

1. The reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements;
2. The reported amounts of income and expenses during the reporting period.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**Pernyataan kepatuhan (lanjutan)**

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas taksiran akuntansi diakui pada periode dimana taksiran tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi taksiran tersebut.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berikut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang akan dimulai 1 Januari 2023 yang berdampak terhadap laporan keuangan Bank:

- Amandemen PSAK No.1 "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amandemen PSAK No.1 "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amandemen PSAK No.16 "Aset Tetap tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan";

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)**Statement of compliance (continued)**

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an on going basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future period affected.

The reporting currency used for the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are in full amount of Rupiah.

b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of the Statements of Financial Accounting Standards

Below is the Indonesian Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretation of the Statement of Financial Accounting Standards ("IFAS") that are mandatory to apply starting January 1, 2023 which affect the Bank's financial statements:

- *Amendment to SFAS No.1 "Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies";*
- *Amendment to SFAS No.1 "Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as Current or Non Current";*
- *Amendment to SFAS No.16 "Property, Plant and Equipment Regarding Proceeds before Intended Use";*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

- Amandemen PSAK No.25 "Kebijakan Akuntansi Perubahan Estimasi Akuntansi";
- Amandemen PSAK No.46 "Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal"; dan
- Amandemen PSAK No.107 "Akuntansi Ijarah";

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau periode sebelumnya.

Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2024.

- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dan kovenan.
- Amandemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.
- Revisi PSAK 101: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK No.74 "Kontrak Asuransi"; dan
- Amandemen PSAK No.74 "Kontrak Asuransi Penerapan Awal PSAK No.74 dan PSAK No.71 - " Informasi Komparatif".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of the Statements of Financial Accounting Standards (continued)

- Amendment to SFAS No.25 "Accounting Policies Changes in Accounting Estimates";
- Amendments SFAS No.46 "Income Tax Regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction"; and
- Amendment to SFAS No.107 "Accounting for Ijarah";

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current or prior financial periods.

New Accounting Standard and Interpretation of Standard which Has Been Issued but Not Yet Effective

The Financial Accounting Standard Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but they are not yet effective for the period beginning on January 1, 2024.

- Amendments to SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" insurance contract regarding long-term liabilities with the covenant
- Amendments to SFAS 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions.
- Revised to SFAS 101: "Presentation of Shariah Financial Statement"

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, where early adoption is permitted, are as follows:

- SFAS No.74 "Insurance Contract"; and
- Amendment to SFAS No.74 and SFAS No.71 -"Comparative Information".

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)****c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (1.a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

c. Transactions with Related Parties

The Bank considers the following as their related parties:

1. A person or a close member of such person's family is related to the reporting entity if that person:
 - a. Has control or joint control over the reporting entity;
 - b. Has significant influence over the reporting entity; or
 - c. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member);
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers entity are also related to the reporting entity;
 - f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - g. The person identified in (1.a) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or the parent of the entity).

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)**c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)**

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 35.

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain, aset keuangan dimiliki untuk diperdagangkan, kredit, dan investasi surat berharga.

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari simpanan dari bank-bank, simpanan dari nasabah, pinjaman yang diberikan dan surat berharga yang diterbitkan.

1. Klasifikasi

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)**c. Transactions with Related Parties (continued)**

This transaction is made under the terms agreed by both parties, where such terms may not be the same as other transactions made with non-related parties.

All material transactions and balances with the related parties are disclosed in the relevant notes to financial statements and the details are presented in Note 35.

d. Financial Assets and Financial Liabilities

The Bank's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, financial assets held for trading, loans, and investment securities.

The Bank's financial liabilities mainly consist of deposits from banks, deposits from customers, borrowing and debt securities issued.

1. Classification

The Bank classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
- *Financial assets measured at amortized cost.*

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- *Financial assets are managed in a business model that aims at having financial assets in order to obtain contractual cash flow; and*
- *The contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)**d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)****1. Klasifikasi (lanjutan)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Bank dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Bank;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)**d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)****1. Classification (continued)**

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- *Financial assets are managed in a business model that aims at obtaining contractual cash flow and selling financial assets; and*
- *The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.*

At initial recognition, the Bank may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Valuation of business models

The business model is determined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- *How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Bank's key management personnel;*
- *What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and*
- *How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).*

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals are based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**1. Klasifikasi (lanjutan)****Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga**

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)**1. Classification (continued)*****Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest***

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Bank considers:

- *Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;*
- *Leverage feature;*
- *Terms of advance payment and contractual extension;*
- *Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and*
- *Features that can change the time value of the money element.*

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)****2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)****d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)****d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)**

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest

1. Klasifikasi (lanjutan)**1. Classification (continued)**

- Liabilitas keuangan lain.
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

- Other financial liabilities.*
Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ <i>Category as defined by SFAS 71</i>		Golongan (ditentukan oleh Bank)/ <i>Class (as determined by the Bank)</i>	Subgolongan/ <i>Subclasses</i>
Aset Keuangan / <i>Financial assets</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial assets at fair value through profit and loss</i>	Efek-efek/ <i>Marketable securities</i>	
		Obligasi Pemerintah/ <i>Government Bonds</i>	
		Penyertaan saham/ <i>Equity investments</i>	
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ <i>Financial assets at amortized cost</i>	Kas/ <i>Cash</i>	Kas pada vendor / <i>Cash in vendor</i>
		Giro pada Bank Indonesia/ <i>Current accounts with Bank Indonesia</i>	
		Giro pada bank lain / <i>Current accounts with other banks</i>	
		Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia / <i>Placements with other banks and Bank Indonesia</i>	
		Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ <i>Securities purchased under agreements to resell</i>	
		Wesel ekspor dan tagihan lainnya/ <i>Bills and other receivables</i>	
		Tagihan akseptasi/ <i>Acceptance receivables</i>	
		Pinjaman yang diberikan/ <i>Loans</i>	
		Aset lain-lain/ <i>Other assets</i>	Piutang lain-lain / <i>Other receivables</i>
			Piutang bunga / <i>Interest receivables</i>
			Lain-lain / <i>Others</i>
			Piutang terkait transaksi ATM / <i>Receivables related to ATM transactions</i>
			Piutang Premi Asuransi / <i>Insurance premium receivables</i>
		Efek-efek / <i>Marketable securities</i>	
		Obligasi Pemerintah/ <i>Government Bonds</i>	
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Financial assets at fair value through other comprehensive income</i>	Efek-efek/ <i>Marketable securities</i>	
		Obligasi Pemerintah/ <i>Government bonds</i>	
		Penyertaan Saham/ <i>Equity investment</i>	

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)****2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)****d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)****d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)****1. Klasifikasi (lanjutan)****1. Classification (continued)**

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ <i>Category as defined by SFAS 71</i>		Golongan (ditentukan oleh Bank)/ <i>Class (as determined by the Bank)</i>	Subgolongan/ <i>Subclasses</i>
Liabilitas Keuangan / <i>Financial liabilities</i>	Derivatif lindung nilai / <i>Hedging derivatives</i>	Tagihan derivatif - terkait lindung nilai atas arus kas / <i>Derivative receivables - hedging instruments in cash flow hedges related</i>	
	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ <i>Financial liabilities at fair value through profit or loss</i>	Liabilitas derivatif - tidak terkait lindung nilai / <i>Derivative payables - non hedging related</i>	
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities at amortized cost</i>	Liabilitas segera / <i>Obligation due immediately</i>	
		Simpanan nasabah / <i>Deposits from customers</i>	
		Simpanan dari bank lain / <i>Deposits from other banks</i>	
		Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali / <i>Securities sold under agreements to repurchase</i>	
		Liabilitas akseptasi / <i>Acceptance payables</i>	
		Beban yang masih harus dibayar / <i>Accrued expenses</i>	
		Liabilitas lain-lain / <i>Other liabilities</i>	Setoran jaminan / <i>Security deposit</i>
			Utang bunga / <i>Interest payable</i>
			Utang nasabah / <i>Payable to customers</i>
			Utang ke pemegang polis / <i>Obligation to policy holders</i>
			Utang reasuransi dan komisi / <i>Reinsurance payable and commission</i>
			Lain-lain / <i>Others</i>
		Efek-efek yang diterbitkan / <i>Marketable securities issued</i>	
		Pinjaman yang diterima / <i>Borrowings</i>	
	Derivatif lindung nilai / <i>Hedging derivatives</i>	Liabilitas derivatif - Terkait lindung nilai atas arus kas / <i>Derivative payables - Hedging instruments in cash flow hedges related</i>	
Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan/ <i>Loan commitment and financial guarantee contract</i>	Fasilitas kredit yang belum digunakan / <i>Unused loan facilities (committed)</i>		

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**2. Pengakuan Awal**

Bank pada pengakuan awal mengakui kredit yang diberikan, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, deposito dan surat utang yang diterbitkan pada tanggal awal mula. Pada pembelian dan penjualan yang lazim, aset keuangan diakui pada tanggal perdagangan di mana Bank berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya (termasuk aset dan liabilitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan di mana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah (untuk item yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

3. Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)**2. Initial Recognition**

The Bank initially recognizes loans receivable, placements with Bank Indonesia and other banks, deposits and debt securities issued on the date of origination. At regular purchases and sales, financial assets are recognized on transaction date at which the Bank commits to purchase or sell the asset.

All other financial assets and liabilities (including assets and liabilities designated at fair value through profit and loss) are initially recognized on the transaction date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Financial assets or financial liabilities are measured at fair value plus (for items not subsequently measured at fair value through profit and loss) transaction costs directly attributable to its acquisition or issue. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification. Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of a financial liability and they are incremental cost that would not have been incurred if the instruments have not been acquired or issued.

3. Subsequent measurement

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**3. Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)**

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

4. Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- Bank mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*); dan
- Apakah (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.
- Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*), dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset dan masih memiliki pengendalian atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.
- Bank menghapusbukukan kredit atau aset produktif lainnya ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet penyisihan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)**3. Subsequent measurement (continued)**

Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

4. Derecognitions

Financial assets are derecognized when:

- *The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired;*
- *The Bank has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass-through arrangement; and*
- *Either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*
- *When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.*
- *The Bank writes-off loans or other earning assets when there is no realistic prospect of collection in the near future or the Bank's normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment losses.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**4. Penghentian Pengakuan (lanjutan)**

Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)

- Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.
- Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi demikian diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

5. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)**4. Derecognitions (continued)**

Financial assets are derecognized when: (continued)

- *Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are released or cancelled or have expired.*
- *Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.*

5. Income and expense recognition

Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost amount of the financial asset.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**5. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)**

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

6. Reklasifikasi aset keuangan

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)**5. Income and expense recognition (continued)**

Gains and losses arising from changes in the fair value of available-for-sale financial assets recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchange rate for debt instrument.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

Interest income and expense on available-for-sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost are recognized in the profit or loss using the effective interest rate method.

Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities classified as fair value through profit or loss are included in the profit or loss.

6. Reclassification of financial asset

The Bank reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**6. Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)**

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

7. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)**6. Reclassification of financial assets (continued)**

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and adjusted against the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value classification through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

7. Offsetting

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)****d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)****8. Pengukuran biaya di amortisasi**

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

9. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari Interdealer Market Association (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Bank menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)**d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)****8. Amortized cost measurement**

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

9. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

When available, the Bank measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Bank establishes fair value using a valuation technique.

The Bank uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,

kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,

unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Bank menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter*, *unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Bank. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti model risk, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*. Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, manajemen berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan didalam prosedur pengukuran pada umumnya telah direview dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)**9. Fair value measurement (continued)**

For more complex instruments, the Bank uses internally developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-the-counter market, unlisted debt securities (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become illiquid.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

The output of a valuation technique is an estimation or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully reflect all factors relevant to the positions that the Bank holds. Valuations are therefore adjusted, with additional factors such as model risk, liquidity risk and counterparty credit risk. Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, management believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

- Bank mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas;
- Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Bank menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)**9. Fair value measurement (continued)**

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following level:

- *Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).*
- *Level 3: input for asset or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.*

10. Allowance for impairment losses on financial assets

- *The Bank recognizes the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss;.*
- *There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments;*
- *The Bank measures the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses:*
- *Debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and*
- *Other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The Bank considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,

kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,

unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)**d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)****10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)**d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)****10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Bank in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Bank);
- Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;
- For undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitment is withdrawn and the cash flow is expected to be received by the Bank;
- For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)****Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi**

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)**10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)****Restructured Financial Assets**

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

- If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.
- If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.

Credit-Impaired Financial Assets

At each reporting date, the Bank assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit-impaired (deteriorating). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)****d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)****10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)****Aset Keuangan Yang Memburuk (lanjutan)**

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)**d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)****10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)****Credit-Impaired Financial Assets (continued)**

Evidence that financial assets become credit impaired includes observable data regarding the following events:

- *Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;*
- *Breach of contract, such as a default or arrears;*
- *The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;*
- *It is probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- *Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.*
- *Purchase or issuance of financial asset at significant discount which reflects the credit loss that occurs.*

Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets (POCI)

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)**d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)****10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)****Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan**

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)**d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)****10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)****Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position**

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

- Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;
- Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

Individual impairment calculation

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

- Loans which individually have significant value; or
- Restructured loans which individually have significant value.

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

- Loans which individually have insignificant value; or

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)****Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)**

- Pinjaman yang diberikan yang di restrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan di kreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No.40/POJK.03/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)**10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)****Collective impairment calculation (continued)**

- Restructured loans which individually have insignificant value.

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

In compliance with Financial Services Authority (OJK), the Bank implements OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 regarding "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality".

At each statement of financial position date, the Bank assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,

kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,

unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)**d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)****10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)****Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan (lanjutan)**

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk
 - Memburuknya status pembayaran pihak debitur dalam kelompok tersebut; dan
 - Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, dan untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)**d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)****10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)****Recoveries of written-off financial assets (continued)**

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

- Significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
- The lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
- It becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
- The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or
- Observed data indicates that there is a measured impairment on the estimated future cash flow of financial assets since the initial measurement of the assets, although the impairment cannot be identified to individual financial assets in that group, including:
 - Deterioration of the payment status of the debtor in that group; and
 - The estimated period between the occurrence of events and identification of a loss are determined by management for every identified portfolio. Generally, the period varies between 3 (three) to 12 (twelve) months, and for certain cases it may involve a longer period.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)****Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan (lanjutan)**

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif - produk perbankan Syariah

Unit Usaha Syariah membentuk penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas aset produktif dan aset non-produktif tersebut pada tiap akhir tahun, evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan dan kemampuan membayar setiap debitur. Serta mempertimbangkan juga hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank (*BI checking*) dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)**10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)****Recoveries of written-off financial assets (continued)**

The Bank first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the Bank shall include the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assess them for impairment.

Allowance for possible losses of earning assets and non-earning assets - Sharia banking products

*The Sharia Business Unit has provided the allowance for possible losses on earning assets and non-earning assets based on management's review of the quality of these earning assets and non-earning assets at the end of each year, and management evaluation of every debtor's business prospect, financial performance, and repayment ability. Moreover, the provision of allowance also takes into account other things such as classification based on Bank Indonesia audit results, classification determined by other commercial banks on earning assets provided by more than one bank (*BI checking*) and availability of debtor's audited financial statements.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)**

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai kolektif atas piutang dan pembiayaan yang diberikan sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013, PSAK 102 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-159/PB.13/2014 tertanggal 3 Desember 2014, perihal tanggapan atas usulan ASBISINDO, untuk penerapan pertama kali PSAK 102 dan PAPSII 2013, Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sesuai dengan PSAK 102 dan Surat OJK tersebut, ketentuan transisi penurunan nilai atas aset keuangan secara kolektif berlaku mulai 1 Januari 2015.

Dalam evaluasi penurunan nilai terhadap piutang *murabahah* dilakukan secara periodik pada setiap tanggal laporan keuangan, untuk memastikan metodologi dan asumsi yang digunakan dapat diandalkan, serta meminimalkan perbedaan antara estimasi jumlah kerugian dengan jumlah kerugian aktual.

Dalam menentukan penyisihan kerugian (selain piutang *murabahah*) dan peringkat kualitas aset, Unit Usaha Syariah menerapkan PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No. 9/9/2007 tanggal 18 Juni 2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 serta PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)**10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

For the purpose of evaluating the collective impairment on receivables and financing, as required by Bank Indonesia based on Circular Letter of Bank Indonesia No. 15/26/DPbS dated July 10, 2013, SFAS 102 and Financial Services Authority letter No. S-159/PB.13/2014 dated December 3, 2014, concerning the response to Indonesian Islamic Banking Association's proposal, in adopting SFAS 102 and Indonesian Sharia Banking Accounting Guidelines 2013, the Bank applies the transition rule for collective impairment with the calculation based on the applicable Bank Indonesia's regulation on the Quality Rating of Assets of Commercial Bank which conducts Business Based on Sharia Principles.

In accordance with SFAS 102 and the aforementioned Financial Services Authority's Letter, the transition regulation for collective impairment calculation is effective as of January 1, 2015.

The evaluation of impairment of *murabahah* receivables is carried out periodically on every financial statement date to ensure methodology and assumptions are reliable, and to reduce difference between the amount of losses estimates and the actual losses.

In determining the allowance for losses (except for *murabahah* receivables) and asset quality rating, the Sharia Business Unit applies Regulation of Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 wherein certain articles have been amended under Regulations of Bank Indonesia No.9/9/2007 dated June 18, 2007 and No.10/24/PBI/2008 dated October 16, 2008 and No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles in determining impairment losses.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)****2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)****d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)****d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)****10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)****10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

Dalam menentukan penyisihan kerugian (selain piutang *murabahah*) dan peringkat kualitas aset, Unit Usaha Syariah menerapkan PBI No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 yang mana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No. 9/9/2007 tanggal 18 Juni 2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 serta PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

In determining the allowance for losses (except for murabahah receivables) and asset quality rating, the Sharia Business Unit applies Regulation of Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 wherein certain articles have been amended under Regulations of Bank Indonesia No.9/9/2007 dated June 18, 2007 and No.10/24/PBI/2008 dated October 16, 2008 and No.13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks Conducting Business Based on Sharia Principles in determining impairment losses.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan OJK baru No.19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 2/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Financial Services Authority (OJK) published a new OJK Regulation No. 19/POJK.03/2018 dated September 20, 2018 concerning Asset Quality Rating for Sharia Banks and Sharia Business Unit and OJK Regulation No. 2/POJK.03/2022 dated January 31, 2022 concerning Asset Quality Rating for Sharia Banks and Sharia Business Unit.

**Persentase minimum penyisihan
kerugian/ Percentage of
minimum
allowance for impairment**

Lancar *)
Dalam perhatian khusus
Kurang lancar
Diragukan
Macet

Minimum 1%
Minimum 5%
Minimum 15%
Minimum 50%
100%

Current *)
Special mention
Sub-standard
Doubtful
Loss

*) Diluar Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif dengan agunan tunai.

*) *Excluding Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities, Bank Indonesia Sharia Certificate and sharia marketable securities and earning assets secured with cash collateral.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,

kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,

unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)****d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)****d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)****10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)****10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)**

Penyisihan khusus terhadap kredit bermasalah dihitung berdasarkan kemampuan debitur dalam membayar hutang. Penyisihan khusus dibentuk ketika timbul keraguan akan kemampuan debitur dalam membayar dan menurut pertimbangan manajemen, estimasi jumlah yang akan diperoleh kembali dari debitur berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar.

Special allowance for non-performing loans is calculated based on the debtor's debt servicing capacity. Special allowance is made as soon as the debtor's debt servicing capacity becomes questionable and management considers that the estimated recovery from the debtor is likely to fall short from the outstanding amount of principal and interest.

Penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi**Impairment of commitments and contingencies**

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia (BI) No.13/658/DPNP/DPnP (SE-BI) tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan penghapusan atas aset non produktif dan transaksi rekening administrasi (komitmen dan kontinjensi), namun Bank tetap harus menghitung penyisihan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

In accordance with Bank Indonesia Letter No.13/658/DPNP/DPnP (SE-BI) dated December 23, 2011, Bank is not required to provide an allowance for impairment losses on non-earning assets and administrative account transactions (commitments and contingencies), however, the Bank should still calculate the allowance for impairment losses in accordance with the applicable accounting standards.

PSAK 48 (revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", mensyaratkan manajemen Bank untuk menelaah nilai aset untuk setiap penurunan dan penghapusan ke nilai wajar jika keadaan menunjukkan bahwa nilai tercatat tidak bisa diperoleh kembali. Di lain pihak, pemulihan kerugian penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. Penurunan (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban (pendapatan) pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

In compliance with SFAS 48 (revised 2014), "Impairment in Asset Value", asset values are reviewed for any impairment and possible write-off to their fair values whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying value may not be fully recovered. On the other hand, a reversal of an impairment loss is recognized whenever there is indication that the asset is no longer impaired. The amount of impairment loss (reversal of impairment loss) is recognized in the current period's statements of profit or loss and other comprehensive income as expenses (revenues).

Nilai tercatat aset ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Setiap rugi penurunan atau pemulihan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan.

The carrying values of assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable. Any impairment loss or reversal of impairment loss is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the current period.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)****Penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi (lanjutan)**

Taksiran kerugian atas transaksi rekening administratif disajikan sebagai estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi pada laporan posisi keuangan.

Penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai dari taksiran kerugian atas transaksi rekening administratif dicatat dalam periode dimana penyesuaian tersebut diketahui atau dapat ditaksir secara wajar. Penyesuaian ini termasuk penambahan penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif dan penambahan taksiran kerugian atas transaksi rekening administratif, maupun pemulihan aset yang telah dihapusbukukan sebelumnya.

Transaksi komitmen dan kontinjensi dihapusbukukan dari penyisihan kerugian pada saat manajemen berpendapat bahwa transaksi komitmen dan kontinjensi tersebut tidak dapat tertagih lagi.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

f. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Financial Assets and Financial Liabilities (continued)**10. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)****Impairment of commitments and contingencies (continued)**

Estimated losses from administrative accounts transactions are presented as estimated losses on commitments and contingencies on the statements of financial position.

Adjustments to the allowance for impairment losses from the estimated losses from administrative accounts transaction are reported in the period such adjustments become known or can be reasonably estimated. These adjustments include additional allowance for impairment losses from earning assets and additional estimated losses from administrative accounts transactions, as well as recoveries of previously written-off assets.

The commitment and contingent transactions written-off are charged to the allowance for impairment losses when management believes that they are definitely uncollectible.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents presented in the statement of cash flows consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Certificates maturing within 3 (three) months since the acquisition date, provided that they are not used as collateral for borrowing and not restricted in use.

f. Current Accounts with Bank Indonesia and Other Banks

The current accounts with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Current accounts with other banks and Bank Indonesia are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

f. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain (lanjutan)

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dalam kegiatan usaha dengan prinsip syariah dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *deposit facility* dan *deposit facility* syariah, sedangkan penempatan pada bank lain berupa deposito berjangka, tabungan, dan *call money*.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

h. Efek-efek

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia, unit penyertaan reksa dana, obligasi, obligasi subordinasi dan instrumen utang lainnya yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

Pada saat pengakuan awal, efek-efek dan Obligasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya, yaitu aset keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Current Accounts with Bank Indonesia and Other Banks (continued)

Current accounts with Bank Indonesia and other banks in sharia banking activities are stated at outstanding balance less allowance for impairment losses.

g. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements of funds in Bank Indonesia in the form of deposit facility and sharia deposit facility, whereas placement with other banks is in the form of time deposit, savings, and call money.

Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Placements with other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

h. Marketable Securities

Marketable securities consist of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificates Deposits of Bank Indonesia, mutual fund units, bonds, subordinated bonds and other debt instruments traded in the money market and stock exchanges.

At initial recognition, the marketable securities and Government Bonds are recorded according to their category, i.e., amortized cost, fair value through other comprehensive income or at fair value through profit or loss.

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following sharia principles.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)**h. Efek-efek (lanjutan)**

Bank menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Kenaikan atau penurunan efek-efek akibat perubahan nilai wajar yang belum direalisasikan, disajikan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.
- Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Kenaikan atau penurunan efek-efek akibat perubahan nilai wajar yang belum direalisasikan, disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada surat berharga.

i. Surat Berharga yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali

Surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan penyisihan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar dimuka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak surat berharga tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)**h. Marketable Securities (continued)**

The Bank defined the classification of investment in marketable securities, specifically sukuk, based on business model in accordance with SFAS No. 110 on "Accounting for Sukuk" as follows:

- *At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.*
- *At fair value securities are stated at fair values through profit or loss. The increase or decrease on marketable securities due to net changes unrealized fair values are presented in current period profit or loss.*
- *At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. The increase or decrease on marketable securities due to net changes unrealized fair values are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity.*

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

i. Securities purchased/sold under agreements to resell/repurchase

Securities purchased under agreements to resell are presented as assets in the statement of financial position at the resale price net of unamortized interest and allowance for impairment losses.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price net of unamortized prepaid interest and allowance for impairment losses. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid expenses and recognized as expense over the period starting from when those securities are repurchased using effective interest method.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)**i. Surat Berharga yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali (lanjutan)**

Surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

j. Tagihan Lainnya

Tagihan lainnya terdiri dari tagihan transfer dan ATM antar bank. Akun ini diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

k. Kredit yang Diberikan dan Piutang Syariah

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang dan bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari fasilitas *trade finance* yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Kredit yang diberikan termasuk piutang syariah, pendanaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta piutang *qardh*.

Piutang syariah merupakan hasil dari transaksi jual beli berdasarkan perjanjian *murabahah*.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)**i. Securities purchased/sold under agreements to resell/repurchase (continued)**

Securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Interest income is amortized using the effective interest method.

j. Other Receivables

Other receivables consist of transfer receivables and inter-banks ATM. This account is classified as loans and receivables.

k. Loans and Sharia Receivables

Loans represent funds provided or receivables that can be considered as equivalents thereof, based on agreements or financing contracts with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period, and matured trade finance facilities which have not been settled within 15 days.

Loans are classified as amortized cost.

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition loans are measured at amortized cost based on the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borne by the Bank.

Loans may include sharia receivables, mudharabah and musyarakah financing and qardh receivable.

Sharia receivables are resulted from sale and purchase transactions under murabahah agreements.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)**k. Kredit yang Diberikan dan Piutang Syariah (lanjutan)**

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Bank sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur). Piutang *murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan "margin yang ditangguhkan" yang belum direalisasikan dan penyisihan kerugian.

Mudharabah adalah kontrak kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan manajer pendanaan (*mudharib*) berdasarkan rasio pendapatan atau keuntungan dan kerugian yang ditentukan sebelumnya.

Efektif 1 Januari 2015, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan pendapatan dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok kredit secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)**k. Loans and Sharia Receivables (continued)**

Murabahah is an agreement to buy and sell certain products at acquisition cost plus a certain margin mutually-agreed by the buyer and seller and the Bank as the seller is required to disclose the acquisition cost to the buyer. *Murabahah* receivables are stated at the amount of receivables less unrealized deferred margin and allowance for losses.

Mudharabah is a business cooperation contract between the owner of the funds (*shahibul maal*) and fund managers (*mudharib*) based on the predetermined ratio of income or gains and losses.

Effective January 1, 2015, transaction costs that are directly attributable and an income, and additional costs to acquire the financial asset is amortized using the effective margin method less any allowance for impairment losses.

Musarakah is an agreement between the investors (*musarakah partners*) to enter into a joint-venture in the form of a partnership with revenue or profit and loss sharing based on an agreement or capital contribution proportion.

Qardh is a loan/borrowing funds without any agreed consideration wherein the borrower has the obligation to return the principal of the loan at lump sum or on installment over a certain period.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value of the loan at the time of restructuring or net present value of the total future cash receipts after restructuring. Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Thereafter, all cash receipt under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest income, in accordance with the restructuring scheme.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

k. Kredit yang Diberikan dan Piutang Syariah (lanjutan)

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai.

Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan, jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

l. Aset Tetap

Bank menerapkan PSAK No. 16, "Aset Tetap" dan ISAK No.25, "Hak atas Tanah".

ISAK No. 25 menetapkan bahwa biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui sebagai beban ditangguhkan pada laporan posisi keuangan dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomi tanah.

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya tersebut sudah termasuk harga pembelian dan biaya apapun yang langsung dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar mampu beroperasi dalam cara yang dimaksudkan oleh manajemen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Loans and Sharia Receivables (continued)

Loans are written-off when there are no realistic prospects of future recovery and all collateral have been realized or have been foreclosed. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses.

Subsequent recoveries of loans written-off are credited to the allowance for impairment losses in the statements of financial position if recovered in the current year, and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other operating income if recovered after the statement of financial position date.

l. Fixed Assets

The Bank applies SFAS No. 16 "Fixed Assets" and IFAS No.25, "Land Rights".

IFAS No.25 prescribes that the legal cost of land rights in the form of Right on Land for Commercial Use (Hak Guna Usaha/HGU), Right on Land for Building (Hak Guna Bangunan/HGB) and Right to Use (Hak Pakai/HP) when the land was acquired initially is recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and is not amortized. Meanwhile the cost of extension or renewal of such rights is recognized as deferred costs in the statements of financial position and is amortized over the shorter period of right's legal life and land's economic life.

Fixed assets are initially recognized at cost. Cost includes its purchase price and any cost directly attributable to bringing asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

I. Aset Tetap (lanjutan)

Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan menggunakan model biaya, yaitu dilakukan dengan mengurangi biaya dengan akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai. Biaya penggantian bagian aset tetap diakui pada jumlah yang tercatat, jika kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkandung di dalam bagian yang akan mengalir ke Bank dan biaya dapat diukur secara handal.

Nilai tercatat atas bagian yang diganti adalah dihentikan pengakuannya. Biaya pemeliharaan sehari-hari aset tetap diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.

Aset tetap disusutkan berdasarkan Surat Edaran Direksi No. SE.10.05/KP.DIR/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang penyusutan aktiva tetap dan inventaris yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan diukur dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, kecuali penyusutan atas bangunan yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laba rugi untuk tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

I. Fixed Assets (continued)

After initial measurement, fixed assets are measured using cost model, carried at its cost less any accumulated depreciation and any impairment losses. The cost of replacing a part of an item of fixed assets is recognized in the carrying amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Bank and its cost can be measured reliably.

The carrying amount of the replaced part is derecognized. The cost of the day-to-day maintenance of fixed assets are recognized in profit or loss as incurred.

Fixed assets are depreciated based on the Circular Letter of the Bank's Board of Directors No. SE.10.05/KP.DIR/2016 dated May 13, 2016 regarding accumulated depreciation of fixed assets and inventory which complies with Law No. 36 of 2008 dated December 23, 2008, and the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 96/PMK.03/2009 dated May 15, 2009 regarding the types of tangible assets included as tangible assets other than building for depreciation purpose.

Depreciation of an asset starts when it is available for its intended use and measured using the double declining balance method, except for depreciation of building which is calculated using the straight line method.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset is directly included in the profit or loss when the item is derecognized.

The asset residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at the end of each year and adjusted prospectively if necessary.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)**I. Aset Tetap (lanjutan)**

Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

	Masa manfaat/ tahun <i>Useful life / year</i>
Bangunan	10 - 20
Inventaris kantor	4 - 8
Kendaraan bermotor	4 - 8
Perlengkapan/peralatan kantor	4

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Hak atas tanah tidak disusutkan. Aset yang tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang terkait, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terkait.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya.

Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

Aset dalam penyelesaian

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar harga perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap pada saat pekerjaan selesai dan aset tersebut siap untuk digunakan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)**I. Fixed Assets (continued)**

The estimated useful lives of the assets are as follows:

	Persentase/ Percentage	
	5,00% - 10,00%	Building
	12,50% - 25,00%	Office inventory
	12,50%- 25,00%	Vehicles
	25,00%	Office equipment

When assets are retired or disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are written-off from the accounts. Any resulting gain or loss is recognized in the statement of comprehensive income.

The rights of the land is not depreciated. Assets that are retired or disposed of shall be removed from relevant fixed assets group, and any resulting gain or loss is recognized in the statement of profit or loss of the relevant year.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal, and restoration, and the benefits from the site dismantlement, removal, and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs.

In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

Construction in progress

Construction in progress is stated at cost. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready for its intended use.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)**l. Aset Tetap (lanjutan)****Aset dalam penyelesaian (lanjutan)**

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

m. Aset Takberwujud

Bank menerapkan PSAK No. 19, "Aset Takberwujud".

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset takberwujud merupakan perangkat lunak yang terdiri atas program komputer dan lisensi yang dibeli untuk penunjang kegiatan bisnis Perusahaan.

Aset Takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset Takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus. Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:

**Masa Manfaat/
Estimated Useful Lives**

Jenis Aset Takberwujud:

Lisensi	15-20
Perangkat Lunak	5

n. Agunan yang Diambil Alih (AYDA)

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain".

l. Fixed Assets (continued)**Construction in progress (continued)**

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalized as assets under construction. These costs are reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready to use. Depreciation is charged from this date.

m. Intangible Assets

The Bank applies SFAS No. 19 "Intangible Assets".

Intangible asset is measured initially at cost. Subsequently, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss.

Intangible assets represent software which consist of computer program and licenses purchased to support the Company's business operation.

Intangible assets with finite useful life

Intangible assets with finite useful life are amortized over the economic useful life by using a straight-line method. Amortization is calculated so as to write off the cost of the assets, less its estimated residual value, over its useful economic life as follows:

Types of Intangible Asset:

License
Software Application

n. Foreclosed Collaterals

Foreclosed collaterals are included in the "Other Assets" account.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

n. Agunan yang Diambil Alih (AYDA) (lanjutan)

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai *outstanding* kredit yang diberikan, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Keuntungan atau kerugian dari penjualan agunan yang diambil alih dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual AYDA tersebut.

o. Aset lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari biaya dibayar dimuka, kliring dalam penyelesaian, uang muka dan lain-lain.

Aset lain-lain disajikan sebesar nilai tercatat setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

p. Sewa

Bank telah menerapkan PSAK No. 73 "Sewa" sejak tanggal 1 Januari 2020.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

n. Foreclosed Collaterals (continued)

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value or stated at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed collaterals less the estimated costs to sell the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged to allowance for impairment losses. The difference between the recorded amount of the foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as a gain or loss at the time of sale.

Maintenance and repair costs related to foreclosed collaterals are charged as an expense in profit or loss when incurred.

Gains or losses from sales of foreclosed collaterals are credited or charged to profit and loss for the year.

In case of permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognize such permanent decline in value. Such write-down is recognized in profit or loss.

Net realizable value is the fair value of foreclosed collaterals less estimated costs to sell foreclosed collaterals.

o. Other assets

Other assets include prepaid expenses, clearing in progress, advances and others.

Other assets are stated at the carrying amount less allowance for impairment losses.

p. Lease

The Bank has applied SFAS No. 73 "Lease" since January 1, 2020.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

PSAK No. 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

Berbeda dengan akuntansi *lessee*, persyaratan untuk akuntansi *lessor* sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK No. 73 pada laporan keuangan dijelaskan di bawah ini.

Tanggal penerapan awal PSAK No.73 untuk Bank adalah 1 Januari 2020. Bank telah menerapkan PSAK No.73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK No.73.

a. Dampak definisi baru dari sewa

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK No. 73 menentukan apakah kontrak mengandung sewa atas dasar jika terdapat aset identifikasian dan *lessee* memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK No. 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

b. Dampak pada akuntansi *lessee*

Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Lease (continued)

SFAS No. 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease, and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for:

- Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;
- Leases of low value assets.

In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. The impact of the adoption of SFAS No. 73 on the financial statements is described below.

The date of initial application of SFAS No. 73 for the Bank is January 1, 2020. The Bank has applied SFAS No. 73 using the modified retrospective approach by recognizing the cumulative impact of the initial application of SFAS No. 73.

a. Impact of the new definition of a lease

The major change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. SFAS No. 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether identified asset and lessee has the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in SFAS No.30.

b. Impact on lessee accounting

The Bank applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and low-value asset leases. The Bank recognized a lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets that represent the right to use the underlying asset.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,

kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,

unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)**p. Sewa (lanjutan)****b. Dampak pada akuntansi lessee (lanjutan)**

Bank mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK No.48 Penurunan Nilai Aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dibayarkan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)**p. Lease (continued)****b. Impact on lessee accounting (continued)**

The Bank recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which as discounted using the incremental borrowing rate. While, the right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

If the ownership of lease asset is transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with SFAS No. 48.

On the initial of lease date, the Bank recognized lease liabilities which are measured at the present value of future lease payments that will be paid over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments), less lease incentive receivables, variable lease payments that depends on index or interest rate, and the expected amount to be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Bank and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank exercising the lease termination option. Variable lease payments that are not depending on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)**b. Dampak pada akuntansi lessee (lanjutan)**

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK No. 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK No. 30. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Penerapan pencatatan PSAK No. 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

- a. Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- b. Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Lease (continued)**b. Impact on lessee accounting (continued)**

In calculating the present value of lease payments, the Bank uses the lessee incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the interest increase and less lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated in SFAS No. 73 will be treated the same as operating leases in SFAS No. 30. The Bank will recognize these lease payments on a straight-line basis during the lease period on the statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

The recording implementation of SFAS No. 73 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

- a. Presenting right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities are presented as part of other liabilities in the statement of financial position which are measured at the present value of the future lease payments;*
- b. Recording depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

p. Sewa (lanjutan)

- b. Dampak pada akuntansi lessee (lanjutan)
- c. Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

q. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah pemindahbukuan, baik dari nasabah maupun dari bank lain. Liabilitas segera disajikan sebesar jumlah kewajiban Bank.

Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

r. Simpanan Nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam pos ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui counter dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan dengan cara pemindah-bukuan. Penarikan tabungan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban kepada pemilik tabungan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Lease (continued)

- b. Impact on lessee accounting (continued)
- c. Separating the total amount of cash paid into a principal portion (presented in financing activities) and interest (presented in operating activities) in the statement of cash flows.

q. Liabilities Due Immediately

Liabilities due immediately are Bank liabilities to other parties that are required to be paid immediately in accordance with the order mandated under predetermined agreement.

Liabilities due immediately are recorded when the liabilities incur or upon receipt of transfer orders from customer or other banks. Liabilities due immediately are stated at the Bank's liabilities amount.

This account is classified as other financial liabilities and is measured at amortized cost.

r. Deposits from costumers

Deposits from customers are the funds placed by customers (excluding banks) with the Bank based on a fund deposit agreements. Included in this account are demand deposits, savings deposits, time deposits and other similar items.

Demand deposits are deposits from customers that can be used as an instrument of payment and can be withdraw at any time using checks, or other orders of payment or transfers.

Savings are customers deposits which may only be withdrawn over the counter and via Automatic Teller Machine (ATM) and also by means of transfer. The withdrawal of savings cannot be carried out by using checks or other equivalent instruments. Savings are stated at the amount due to the saving account holders.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

r. Simpanan Nasabah (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal. Bank memberikan fasilitas bagi deposan yang dapat menarik dananya setiap saat walaupun belum jatuh tempo yang akan dikenakan *break* deposito, dan bunganya tidak dihitung dari hari bunga deposito. Simpanan nasabah dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah.

Sertifikat deposito merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi. Diskon atau perbedaan nilai yang diterima sekarang dan nilai nominal dicatat sebagai bunga dibayar dimuka dan diamortisasi selama periode sertifikat deposito.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

s. Simpanan Nasabah Syariah dan Dana Syirkah

Simpanan nasabah syariah merupakan simpanan nasabah pada unit usaha syariah. Pengakuan simpanan diakui pada saat dana/uang diterima dari nasabah dan diukur sebesar nilai nominal.

Simpanan nasabah syariah terdiri dari giro dan tabungan *wadiah*. Giro *wadiah* dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro. Giro *wadiah* serta tabungan *wadiah* mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan Bank. Simpanan nasabah dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

r. Deposits from costumers (continued)

Time deposits represent deposits of customers which can only be withdrawn at a given time in accordance with the agreements between the customer and the Bank.

Time deposits are stated at nominal value. The Bank provides facility for the depositors to enable them to withdraw their funds at any time prior to the due date, which will be charged with a deposit break; in addition to that, the interest shall not be calculated referring to the days of deposit interest. Deposits from customers are stated at the payable amount to customers.

Certificates of deposits are time deposits with evidence of savings which can be traded. Certificates of deposit are stated at nominal value net of unamortized interest. Discount or the difference in present value received and the nominal value are recorded as prepaid interest and amortized over the period of certificates of deposit.

Deposits from customers are classified as financial liabilities which are measured at amortized cost using the effective interest method. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from customers are deducted from the amount of deposits.

s. Sharia Deposits from Costumers and Temporary Syirkah Fund

Sharia deposits from customers represent customer deposits in sharia business unit. The deposits are recognized when the fund/money is received from customers and are measured at their nominal value.

Sharia customer deposits consist of wadiah demand deposits and savings deposits. Demand deposits can be used as an instrument of payment and may be withdrawn at any time through checks and transfer forms. Demand deposits and saving deposits receive bonuses at the discretion of the Bank. Deposits from customers in the form of wadiah demand deposits and saving deposits are stated at the Bank's liabilities.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

s. Simpanan Nasabah Syariah dan Dana Syirkah (lanjutan)

Giro dan tabungan *wadiah* merupakan giro dan tabungan *wadiah yad-adhamanah* yakni titipan dana dalam bentuk giro dan tabungan pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan pendapatan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro Bank Jambi Syariah (BJS).

Simpanan dari nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh BJS.

BJS mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan BJS atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dana *syirkah* temporer dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang dana *syirkah* temporer bank.

Hubungan antara BJS dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* atau *musyarakah*.

Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.

Mudharabah musyarakah adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana juga menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi BJS.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

s. Sharia Deposits from Costumers and Temporary Syirkah Fund (continued)

Wadiah demand deposits and savings deposits represent wadiah yad-adhamanah fund deposits in the form of demand deposits and savings deposits on which the customer may receive bonus income at the discretion of the Bank. Wadiah demand deposits are stated at the amount due to the account holders of Bank Jambi Syariah (BJS) deposits.

Deposits from customers are classified as financial liabilities which are measured at amortized cost. Temporary syirkah funds represent investment received by BJS.

The BJS has the right to manage and invest funds in accordance with either the BJS's policy or restriction policy by the depositors with the agreed profit sharing. Temporary syirkah funds are stated at the nominal amount as agreed by the temporary syirkah funds holder.

Relationship between the BJS and the owner of temporary syirkah funds are partnership based on mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah or musyarakah agreement.

Examples of temporary syirkah funds are investment funds received from mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah musyarakah and other similar accounts.

Mudharabah musyarakah represents mudharabah where the fund manager also invests its capital or fund in the investment.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability because the Bank has no obligation to return the fund to the owner when loss is incurred, unless there is negligence or default by the BJS.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

s. Simpanan Nasabah Syariah dan Dana Syirkah (lanjutan)

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

t. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain merupakan liabilitas kepada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito dan *interbank call money*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar jumlah liabilitas kepada bank lain tersebut, kecuali sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *mudharabah* dan deposito berjangka *mudharabah*.

Simpanan dari bank lain dinyatakan sesuai jumlah liabilitas terhadap nasabah.

u. Efek-efek yang diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan adalah Medium-Term Notes (MTN)

Efek-efek yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

s. Sharia Deposits from Costumers and Temporary Syirkah Fund (continued)

Temporary syirkah funds cannot be classified as equity since they have maturity and the owner of the funds does not have ownership rights as common shareholders, such as voting rights and right over the profit derived from current assets and non-investment assets.

The owner of temporary syirkah funds shall receive profit sharing in accordance with the agreement and receive loss sharing based on proportion to the total funds. The profit sharing of temporary syirkah funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

t. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks in demand deposits, savings deposits, time deposits, certificates of deposit and interbank call money. Deposits from other banks are stated at the amount of liabilities to other banks, except for certificates of deposit which are stated at nominal value net of unamortized interest.

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah demand deposits, mudharabah savings and time deposits.

Deposits from other banks are stated at Bank's liability to the customer.

u. Marketable securities issued

Marketable securities issued are Medium-Term Notes (MTN)

The marketable securities issued are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated with the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

v. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia, Pemerintah dan Lembaga Pembiayaan lain dimana liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

w. Pendapatan Bunga, Beban Bunga dan Bagi Hasil**Konvensional**

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

v. Borrowings

Borrowings are funds received from other banks, Bank Indonesia, the Government and other financing institutions with payment obligation based on borrowing agreements.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated with the initial recognition of borrowings, and transaction costs are an integral part of the effective interest rate.

w. Interest Income, Interest Expenses and Profit Sharing**Conventional**

Interest income and expenses are recognized in the statements of comprehensive income using the effective interest method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial assets or financial liabilities (or, where appropriate, a shorter period) to get the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but not considering future credit losses.

This calculation includes all commissions, provision fees, and other forms received by the parties in the contract which are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

w. Pendapatan Bunga, Beban Bunga dan Bagi Hasil**Konvensional (lanjutan)**

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (*impairment*) dan pendapatan bunga yang sudah diakui, tetapi belum ditagih akan dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Syariah

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari *murabahah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan lainnya.

Beban syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*.

Pendapatan dari transaksi ijarah diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan dari transaksi *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai. Beban berdasarkan prinsip syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif).

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

w. Interest Income, Interest Expenses and Profit Sharing**Conventional (continued)**

If financial asset or group of similar financial assets has been diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the effective interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

Loans for which the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to its timely collection are generally classified as impaired loans. Interest accrued but not yet collected is reversed when a loan is classified as impaired loan.

Sharia

The main operating income consists of income from murabahah transactions, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing and others.

Sharia expenses consist of mudharabah profit sharing expenses and wadiah bonus expenses.

Income from ijarah transactions is recognized using the accrual method. Income from istishna transactions and profit sharing from mudharabah and musyarakah financing are recognized when the cash installments are received. Expenses based on Sharia principles consist of mudharabah profit sharing expense and wadiah bonus expense.

Income from murabahah receivables uses the effective rate of return method (effective margin).

This calculation includes all commissions, provision fees, and other forms received by the parties to the contract which are an integral part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

w. Pendapatan Bunga, Beban Bunga dan Bagi Hasil (lanjutan)**Syariah (lanjutan)**

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati.

Bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basis*). Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

Beban syariah merupakan bagi hasil untuk dana pihak ketiga dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah*.

Margin dan bagi hasil diakui secara akrual, kecuali pendapatan margin dan bagi hasil atas kredit yang diberikan dan aset produktif lainnya yang diklasifikasi sebagai *non-performing*, yang diakui pada saat pendapatan tersebut diterima.

Pendapatan margin dan bagi hasil yang telah diakui tetapi belum tertagih dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan *non-performing*, dan selanjutnya dilaporkan sebagai tagihan kontinjensi dalam rekening administratif dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima tunai.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

w. Interest Income, Interest Expenses and Profit Sharing (continued)**Sharia (continued)**

Mudharabah and musyarakah profit sharing income are recognized when cash is received or in a period where the right of profit sharing is due based on agreed portion (nisbah).

Profit sharing from mudharabah and musyarakah financing is recognized upon collection (cash basis). Other main operating income consists of income derived from Bank Indonesia Wadiah Certificates, placements with other Sharia banks, and revenue sharing from Sharia securities. Other main operating income is recognized upon collection.

Sharia expense represents revenue sharing for third party fund using the revenue sharing principle based on pre-determined nisbah in accordance with mudharabah mutlaqah principles.

Margin and profit sharing are recognized on an accrual basis, except for margin and profit sharing income on loans and other earning assets classified as non performing, which is recognized only when such interest is received in cash.

Margin and profit sharing income recognized or recorded but not yet received, is reversed when the loans are classified as non performing, and the interest amounts are recorded as contingent receivables in the administrative accounts and such interest is recognized as income on a cash basis.

Provision fees and commissions directly related to lending activities, or provision fee and commission which relates to a specific period, are amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit and loss and other comprehensive income.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

x. Pendapatan Provisi dan Komisi

Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat kredit dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga. Untuk pembiayaan syariah, provisi dan komisi diakui selama jangka waktu akad dengan metode garis lurus.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

y. Imbalan Kerja

Bank menerapkan PSAK 24 (revisi 2013), "Imbalan Kerja", efektif sejak 1 Januari 2015, menggantikan PSAK 24 (revisi 2010): "Imbalan Kerja". Dengan diterapkan PSAK 24 (revisi 2013), maka Bank menghentikan penggunaan pendekatan koridor dalam perhitungan keuntungan dan kerugian aktuarial di periode pelaporan pada penghasilan komprehensif lain.

Program imbalan pasti

Bank mengakui penyisihan imbalan masa kerja berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Penyisihan untuk imbalan masa kerja diukur berdasarkan laporan aktuarial. Bank menggunakan metode penilaian aktuarial *projected unit credit* untuk menentukan nilai kini dari imbalan, biaya jasa kini dan biaya jasa lalu.

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui untuk setiap program pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (sebelum dikurangi aset program) pada tanggal tersebut atau 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

x. Provision Fee and Commission Income

Unamortized provision fee and commission income relating to loans settled prior to maturity is recognized at the settlement date. Other provision fee and commission income is recognized at the transaction date.

Provision fee and commission income related to lending activities is recognized as part of interest income. For sharia financing, provision fees and commissions are recognized over the term of the contract with the straight-line method.

Provision fee and commission income not related to lending activities or a period of time and/or associated with the service provided is recognized as revenue or expenses at the time of the transaction and recorded under other operating income.

y. Employee Benefits

The Bank implements SFAS 24 (revised 2013), "Employee Benefits", effective on January 1, 2015, replacing SFAS 24 (revised 2010): "Employee Benefits". By implementing SFAS 24 (revised 2013), the Bank eliminates corridor approach in calculating actuarial gain and loss in reporting period in other comprehensive income.

Defined benefits plan

The Bank recognizes provision for employee service entitlements in accordance with Labor Law No.13/2003 dated March 25, 2003. The provision for employee service entitlements is estimated on the basis of actuarial reports. The Bank uses the projected unit credit method to determine the present value of benefits, current service cost and past service cost.

Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses at the end of the previous reporting year exceed the greater of 10% of the present value of the defined benefits obligation (before deducting plan assets) or 10% of the fair value of plan assets at that date.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)****2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)****y. Imbalan Kerja (lanjutan)****y. Employee Benefits (continued)****Program imbalan pasti (lanjutan)****Defined benefits plan (continued)**

Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban berdasarkan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Such actuarial gains or losses are recognized as income or expense on a straight-line basis over the expected average remaining working lives of the employees.

Biaya jasa lalu yang terjadi ketika pengenalan program imbalan pasti atau perubahan imbalan terutang pada program yang ada diamortisasi selama periode sampai dengan imbalan tersebut menjadi hak pekerja atau *vested*.

Past-service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Imbalan kerja jangka pendek**Short-term employee benefits**

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Program pensiun manfaat pasti**Defined benefit pension plan**

Sehubungan dengan manfaat pensiun, Bank memiliki program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun manfaat pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Bank Jambi yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala.

In relation to pension benefits, the Bank has a defined benefit pension plan covering all of its permanent employees. The defined benefit pension plan is funded through a payment to the Dana Pensiun Bank Jambi determined by a periodic actuary calculation.

Pendirian Dana Pensiun Bank Jambi telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP.348/KM.17/1994 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Jambi tanggal 16 Desember 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-161/KM.10/2007 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi tanggal 10 Agustus 2007.

The establishment of Dana Pensiun Bank Jambi has been approved by the Minister of Finance under the Decree of the Minister of Finance No. KEP.348/KM.17/1994 on Ratification of Pension Fund Regulation of Dana Pensiun Bank Jambi dated December 16, 1994 as lastly amended with Decree of the Minister of Finance No.: KEP-161/KM.10/2007 on Ratification of Pension Fund Regulation of Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi dated August 10, 2007.

Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement which usually depends on one or more factors, such as age, years of service and total compensation.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

y. Imbalan Kerja (lanjutan)**Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)**

Kontribusi pegawai sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank sebesar 20%.

Beban liabilitas masa lampau diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode *vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara metode garis lurus sepanjang periode *vesting*.

Program imbalan pasca kerja lainnya dan jangka panjang lainnya.

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya, meliputi uang duka bagi pegawai yang meninggal dunia dan penghargaan masa kerja.

Liabilitas dan pendanaan penghargaan masa kerja dan uang duka dihitung aktuaris independen dengan metode *projected unit credit*.

Jasa produksi

Bank juga memberikan jasa produksi tahunan kepada para Komisaris, Direksi dan karyawan dan untuk setiap tahun buku dicadangkan dan diakui sebagai beban pada tahun berjalan yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan jumlah jasa produksi yang disetujui dalam RUPS tahun-tahun sebelumnya dan kemudian diusulkan untuk disetujui/disahkan dalam RUPS yang akan datang. Jika terdapat selisih antara jumlah jasa produksi yang dicadangkan dengan jumlah yang disahkan oleh RUPS, maka selisih tersebut dibebankan/dikreditkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai penambah atau pengurang cadangan jasa produksi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

y. Employee Benefits (continued)**Defined benefit pension plan (continued)**

Employee contribution is 5% of the employee's basic income, and the remaining amount to be paid to the Pension Fund represents the Bank's contribution amounting to 20%.

Past service costs are recognized immediately in the statement of comprehensive income, unless the payments of the benefits are conditional on whether the employees remain working for a specified period of time (vesting period). In this case, the past service costs are amortized on a straight-line method over the vesting period.

Other post employment benefits program and long-term employee benefits program.

The Bank also provides post benefits program and long term benefit plan that includes Bereavement Payment to employees who pass away, and gratuity.

Employees gratuity liabilities and funding and Bereavement Payment are calculated by an independent actuary using the projected unit credit method.

Annual Bonuses

The Bank also provides annual bonuses to the Commissioners, Directors and employees. These costs are recognized as current year's expenses and the amount is determined based on the bonuses authorized during Shareholders' General Meetings (RUPS) in the prior year. Such bonuses are subsequently proposed for approval by the Shareholders in the following Shareholders' General Meeting (RUPS). Any difference between the amount accrued and the amount approved by the RUPS is charged/credited to statement of profit or loss and other comprehensive income as an addition to or deduction of the provision for bonuses.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

y. Imbalan Kerja (lanjutan)**Beban penghargaan akhir masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi**

Bank memberikan penghargaan akhir masa jabatan untuk Komisaris dan Direksi yang jumlahnya dihitung secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya.

z. Perpajakan

Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK No. 46 "Pajak Penghasilan". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui menggunakan metode posisi keuangan untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/ (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

y. Employee Benefits (continued)**Reward expense for the Board of Commissioners and Board of Directors**

The Bank provides end of service reward program for Commissioners and Directors, which amount is calculated proportionally during the period of service.

z. Taxation

Effective on January 1, 2015, the Bank adopted SFAS No. 46 "Income Taxes". The adoption of the SFAS has no significant effect on the financial reporting and disclosures in the financial statements.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized, using the statement of financial position method, for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement financial position date.

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Deferred Income Tax Benefit (Expense)" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

z. Perpajakan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal neraca dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

aa. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

ab. Modal Saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

Bank mengklasifikasikan instrumen modal sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi ketentuan kontrak dari instrumen. Saham Bank diklasifikasikan sebagai ekuitas ketika tidak ada liabilitas kontrak untuk mentransfer kas atau aset keuangan lainnya.

ac. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Bank diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan Bank pada tahun ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Bank.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

z. Taxation (continued)

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Adjustments to tax liabilities are recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

aa. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share are computed by dividing income for the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

ab. Share Capital

Share capital is measured at par value for all shares issued.

The Bank classifies capital instruments as financial liabilities or equity instruments in accordance with the substance of the contractual terms of the instruments. The Bank's shares are classified as equity when there is no contractual obligation to transfer cash or other financial assets.

ac. Dividends

Dividend distribution to the Bank's Shareholders is recognized as a liability in the Bank financial statements in the year in which the dividends are approved by the Bank's shareholders.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ad. Saldo Laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

ae. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

af. Liabilitas dan aset kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadinya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

ag. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif dan komitmen dan kontinjensi

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 13/658/DPNP/DPnP tanggal 23 Desember 2011 dan POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ad. Retained Earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

ae. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and reliable estimate can be made of the amount of obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

af. Contingent liabilities and assets

Contingent liabilities are not recognized in the financial statement but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

ag. Allowance for impairment losses on non-earning assets and commitments and contingencies

In accordance with Bank Indonesia Circular Letter (SE-BI) No. 13/658/DPNP/DPnP dated December 23, 2011 and Regulation of the Financial Services Authority No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014, the Bank is not required to provide an allowance for impairment losses on non-earning assets and administrative account transactions (commitments and contingencies), but the Bank should still calculate the allowance for impairment losses in accordance with the applicable accounting standards.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ag. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif dan komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

Atas aset non produktif, manajemen Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.

Atas komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit, manajemen Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan selisih antara nilai tercatat dan nilai kini atas pembayaran kewajiban yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan tersebut menjadi *probable*).

ah. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Setiap peristiwa setelah akhir tahun yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank (*adjusting event*) akan disesuaikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir tahun yang bukan merupakan *adjusting events*, jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

ai. Informasi segmen

Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasi segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

1. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ag. Allowance for impairment losses on non-earning assets and commitments and contingencies (continued)

For non-earning assets, the Bank's management determines the allowance for impairment losses at the lower of the carrying value and fair value after deducting cost of disposal.

For commitments and contingencies with credit risk, the Bank's management determines the allowance for impairment losses based on the difference between the carrying amount and the present value of the payment obligations that are expected to occur (when payment under the guarantee has become probable).

ah. Subsequent Events

Any post-year-end event that provides additional information regarding the Bank's financial position (adjusting event) is reflected in the financial statements. Post-year-end events that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the financial statements.

ai. Business segment information

The Bank determines and presents operating segments based on the information that is internally provided by accounting department to the operating decision maker.

The Bank defines an operating segment as a component of an entity:

1. *That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*
2. *Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
3. *For which discrete financial information is available.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (Lanjutan)

ai. Informasi segmen (lanjutan)

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (Continued)

ai. Business segment information (continued)

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of conventional and sharia banking.

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES

The preparation of the financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's abilities to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank's abilities to continue as a going concern. Therefore, the financial statement continues to be prepared on the going concern basis.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No.71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Surat berharga dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo membutuhkan judgment yang signifikan. Dalam membuat judgment ini, Bank mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo. Jika Bank gagal untuk memiliki investasi ini hingga jatuh tempo selain dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai contoh, menjual dalam jumlah yang insignifikan saat mendekati jatuh tempo, Bank harus mereklasifikasi seluruh portofolio tersebut menjadi surat berharga yang tersedia untuk dijual. Surat berharga yang tersedia untuk dijual tersebut akan diukur pada nilai wajar dan bukan menggunakan biaya yang diamortisasi.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi pada apakah aset keuangan yang dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length*.

Kontinjensi

Ketika Bank sedang terlibat dalam proses hukum, perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial.

Penilaian Mata Uang Fungsional

PSAK No. 10 mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling mewakili dampak ekonomi dari suatu transaksi, kejadian dan kondisi-kondisi yang relevan terhadap entitas. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Bank dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mata uang yang mempengaruhi harga jual atas instrumen keuangan dan jasa-jasa lainnya (biasanya dari mata uang atas harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa yang telah diselesaikan);

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (Continued)

Held-to-maturity securities

The classification under held-to-maturity securities requires significant judgment. In making this judgment, the Bank evaluates their intention and ability to hold such investments to maturity. If the Bank fails to keep these investments to maturity other than in certain specific circumstances for example, selling an insignificant amount close to maturity, it will be required to reclassify the entire portfolio as available-for-sale securities. The available-for-sale securities will be measured at fair value and not at amortized cost.

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies

When the Bank is involved in legal proceedings, the estimates of the probable costs for the resolution of claims have been developed in consultation with the aid of the legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results.

Assessment of Functional Currency

SFAS No. 10 requires management to use its judgment to determine the entity's functional currency such that it most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. In making this judgment, the Bank considers the following:

- a. *The currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)****Penilaian Mata Uang Fungsional (lanjutan)**

- b. Mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
- c. Mata uang atas yang biasa diterima dari aktivitas operasi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi dan estimasi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan / piutang syariah

Bank menelaah portofolio kredit dan piutang setiap tahun untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui provisi yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas kredit.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi komprehensif, Bank membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio kredit sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (Continued)**Assessment of Functional Currency (continued)**

- b. The currency in which funds from financing activities are generated; and
- c. The currency in which receipts from operating activities are usually retained.

Estimates and Assumptions

The key estimates and assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables

The Bank reviews its loan portfolio and receivables to assess impairment on an annual basis with updating provisions made during the intervals as necessary based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by credit officers.

In determining whether an impairment loss should be recorded in the statements of comprehensive income, the Bank makes judgments as to whether there is any observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of loans before the decrease can be identified with an individual loan in that portfolio.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan / piutang syariah (lanjutan)

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok debitur, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. Bank menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat penyisihan yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah penyisihan di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Umur ekonomis dari aset tetap

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban operasional yang diakui.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (Continued)

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables (continued)

This evidence may include observable data indicating that there has been an adverse change in the payment status of borrowers in a group, or national or local economic conditions that correlate with defaults on assets in the group. The Bank uses estimates in the amount and timing of future cash flows when determining the level of allowance required. Such estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting to future changes in the allowance.

Impairment of marketable securities

The Bank determines that securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

Useful lives of premises and equipment

The Bank estimates the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use. The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets. In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period would be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment would increase the recorded operating expenses.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)**Penurunan nilai aset non keuangan**

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

Bank menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (Continued)**Impairment of non-financial assets**

The Bank assesses impairment of assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that which could trigger an impairment review include the following:

- Significant under-performance relative to expected historical or projected future operating results;*
- Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and*
- Significant negative industry or economic trends.*

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and credits to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized. Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

The Bank reviews its deferred tax assets at each statement of financial position date and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**3. PENILAIAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)****Nilai kini atas kewajiban pensiun**

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Meskipun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material estimasi liabilitas pensiun dan manfaat karyawan dan beban bersih imbalan kerja karyawan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES (Continued)**Present value of retirement obligation**

The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

While the Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Bank's actual results or significant changes in the Bank's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefit expense.

4. KAS

	31 Desember / December 31, 2023
Kas besar	131.747.847.500
Kas ATM	119.673.400.000
Jumlah	251.421.247.500

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, di dalam kas terdapat kas yang didasarkan pada Prinsip Perbankan Syariah, masing-masing sebesar Rp2.711.324.000 dan Rp4.835.968.600.

Pada tahun 2023 dan 2022 tidak terdapat kas yang dibatasi penggunaannya.

4. CASH

31 Desember / December 31, 2022
178.602.327.950
75.128.700.000
253.731.027.950

Teller
Cash in ATM

Total

As of December 31, 2023 and 2022, cash includes cash based on the principles of Sharia, amounting to Rp2,711,324,000 and Rp4,835,968,600, respectively.

In 2023 and 2022 there is no restricted cash.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

	31 Desember / December 31, 2023
Giro Bank Indonesia	1.353.749.139.258
Jumlah	1.353.749.139.258

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

31 Desember / December 31, 2022
969.131.251.945
969.131.251.945

Current accounts with Bank
Indonesia

Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**5. GIRO PADA BANK INDONESIA
(Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, di dalam giro pada Bank Indonesia terdapat giro yang didasarkan pada Prinsip Perbankan Syariah, masing-masing sebesar Rp128.464.437.510 dan Rp73.987.351.132.

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan syariah, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga (DPK) adalah sebesar 94,38% dan 95,08% dan KPMM Bank adalah sebesar 38,68% dan 31,24%.

Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dan/atau Surat Berharga Negara (SBN). Giro RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika RIM Bank dibawah minimum RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum RIM target Bank Indonesia (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif Bank Indonesia sebesar 14%.

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
(Continued)**

As of December 31, 2023 and 2022, current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on the principles of Sharia, amounting to Rp128,464,437,510 and Rp73,987,351,132, respectively.

The Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserves in Rupiah in its activities as a commercial and sharia bank, and minimum statutory Reserves in foreign currencies in its activities in foreign currency transactions. These statutory reserves are deposited in the form of current accounts with Bank Indonesia.

As of December 31, 2023 and 2022, the ratio of loans to total third-party deposits (DPK) amounted to 94.38% and 95.08% and the Capital Adequacy Ratio (CAR) amounted to 38.68% and 31.24%.

Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Macroprudential Liquidity Buffer are the minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprised of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificates Deposit of Bank Indonesia (SDBI), Sukuk of Bank Indonesia (SukBI), and/or Government Securities (SBN). RIM Current Account is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's RIM is below the minimum of RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank's RIM is above the maximum of RIM targeted by Bank Indonesia (94%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below Bank Indonesia requirement of 14%.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

**5. GIRO PADA BANK INDONESIA
(Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan PBI No.22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020; PBI No.22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020; PBI No.23/16/PBI/2021 tanggal 21 Desember 2021; dan terakhir kali melalui PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 1 Maret 2022 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No.21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019; PADG No.21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019; PADG No.22/2/PADG/2020 tanggal 10 Maret 2020; PADG No.22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020; PADG No.22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020; PADG No.23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021; PADG No.24/3/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022; PADG No.24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022; PADG No.2 tahun 2023 tanggal April 2023 dan yang terakhir kali melalui PADG No.12 tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang masing-masing sebesar:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
GWM Rupiah			Statutory Reserves in Rupiah
Konvensional			Conventional
Rata-rata	9,00%	9,00%	Average
PLM	6,00%	6,00%	PLM
Syariah			Sharia
Rata-rata	7,50%	7,50%	Average

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
(Continued)**

As of December 31, 2023 and 2022 The Banks Statutory Reserves (GWM) have complied with Bank Indonesia Regulation (PBI) No.No.20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018 concerning Statutory Reserves for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Exchange for Banks Conventional General as amended through PBI No.22/3/PBI/2020 dated March 24, 2020; PBI No.22/10/PBI/2020 dated July 28, 2020; PBI No.23/16/PBI/2021 dated December 21, 2021; latest amendment through PBI No.24/4/PBI/2022 dated March 1, 2022 which explained by Regulation of the Members of the Board of Governors (PADG) No.20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018 concerning Statutory Reserves for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units as amended through PADG No.21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019; PADG No.21/27/PADG/2019 dated December 26, 2019; PADG No.22/2/PADG/2020 dated March 10, 2020; PADG No. 22/10/PADG/2020 dated April 29, 2020; PADG No.22/19/PADG/2020 dated July 29, 2020; PADG No.23/27/PADG/2021 dated December 21, 2021; PADG No.14/3/PADG/2022 dated March 1, 2022; PADG No.24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022; PADG No.2 of 2023 dated April 1, 2023; and latest amendment PADG No.12 of October 2, 2023 through which are as follows:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

**5. GIRO PADA BANK INDONESIA
(Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Bank juga harus memenuhi PBI No.20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah dibuat dengan PBI No.21/12/PBI/2019 tanggal 26 November 2019; PBI No.22/17/PBI/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan terakhir kali melalui PBI No.23/17/PBI/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 yang telah diubah dengan PADG No.22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan terakhir kali melalui PADG No.24/14/PADG/2022. tanggal 31 Oktober 2022.

Realisasi Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Konvensional dan Syariah (tidak diaudit) masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023
GWM Rupiah Konvensional	
Rata-rata	10,25%
PLM	19,71%
Syariah	
Rata-rata	11,34%

Manajemen berpendapat bahwa jumlah giro wajib minimum pada Bank Indonesia tersebut telah memadai dan memenuhi syarat.

Bank Jambi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
(Continued)**

As of December 31, 2023 and 2022 the Bank must also comply with PBI No.20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018 Concerning Macroprudential Intermediation Ratios And Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Conventional Units, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units as amended through PBI No.21/12/PBI/2019 dated November 26, 2019; PBI No.22/17/PBI/2020 dated October 01, 2020; and latest amendment through PBI No.23/17/PBI/2021 dated December 22, 2021 which explained by the Regulation of Members of the Board of Governors No.21/22/PADG/2019 dated November 28, 2019 which has been amended through PADG No.22/30/PADG/2020 dated October 05, 2020 and latest amendment through PADG No.24/14/PADG/2022 dated October 31, 2022.

The realization of Minimum Statutory Reserves (GWM) of Conventional and Sharia Bank (unaudited) as of December 31, 2023 and 2022, respectively, is as follows:

	31 Desember / December 31, 2022
Statutory Reserves in Rupiah Conventional	
Average	9,65%
PLM	20,41%
Sharia	
Average	9,88%

Management believes that the amount of minimum statutory reserves in Bank Indonesia is adequate and in compliance with the requirements.

Bank Jambi has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum statutory reserves as of December 31, 2023 and 2022.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**6. GIRO PADA BANK LAIN**

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Bank Pemerintah			<i>Government Bank</i>
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	890.814.044	976.949.198	<i>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk</i>
PT Bank Jawa Barat dan Banten	25.966.064	35.205.367	<i>PT Bank Jawa Barat and Banten</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	14.622.775	14.874.775	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	5.343.546	5.943.546	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk</i>
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.	1.047.256	1.118.937	<i>PT Bank Syariah Indonesia, Tbk</i>
PT Bank DKI	526.666	526.666	<i>PT Bank DKI</i>
Sub Jumlah	<u>938.320.351</u>	<u>1.034.618.489</u>	<i>Sub Total</i>
Bank Korporasi			<i>Corporate Bank</i>
Bank Maybank Indocorp	1.375.432.443	1.130.958.510	<i>Bank Maybank Indocorp</i>
PT Bank Muallamat Indonesia Tbk	5.673.223	5.673.222	<i>PT Bank Muallamat Indonesia, Tbk</i>
Sub Jumlah	<u>1.381.105.666</u>	<u>1.136.631.732</u>	<i>Sub Total</i>
Jumlah	2.319.426.017	2.171.250.221	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--	<i>Allowances for impairment losses</i>
Jumlah - Bersih	<u>2.319.426.017</u>	<u>2.171.250.221</u>	<i>Total - Net</i>

Giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, digolongkan sebagai lancar. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan.

Current accounts with other banks as of December 31, 2023 and 2022 are classified as current. No current account was blocked or pledged as collateral.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 termasuk dalam giro pada bank lain adalah giro yang didasarkan pada prinsip perbankan Syariah masing-masing sebesar Rp12.015.424 dan Rp11.588.061.

As of December 31, 2023 and 2022 current accounts with other banks include amount under Sharia Banking Principles amounting to Rp12,015,424 dan Rp11,588,061, respectively.

Tingkat suku bunga giro pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 0,25% - 1,25% dan 0,50%.

The interest rates of current accounts with other banks for the years ended December 31, 2023 and 2022 are 0.25% - 1.25% and 0.50% per annum, respectively.

Cadangan Penurunan Nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah dihitung sesuai dengan PSAK 71. Manajemen berpendapat bahwa cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan dikarenakan giro pada bank lain tidak mengalami penurunan nilai.

Allowance for impairment losses as of December 31, 2023 and 2022 has been calculated in accordance with SFAS 71. Management believes that the allowance for impairment losses is unnecessary considering that there is no impairment on current accounts with other banks.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN**

a. Berdasarkan Jenis:

	31 Desember / December 31, 2023
Fasilitas Bank Indonesia (FASBI)	
<i>Interbank call money</i>	
BPD Sultra	100.000.000.000
Jumlah	100.000.000.000
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(36)
Jumlah - Bersih	99.999.999.964

b. Berdasarkan Jatuh Tempo:

	31 Desember / December 31, 2023
Kurang dari 1 bulan	100.000.000.000
Lebih dari 1 - 3 bulan	--
Lebih dari 3 - 12 bulan	--
	100.000.000.000
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(36)
Jumlah - Bersih	99.999.999.964

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan Syariah masing-masing sebesar Nihil.

Tingkat suku bunga penempatan pada bank lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 6,15% sedangkan untuk 31 Desember 2022 sebesar Nihil.

Semua penempatan pada bank lain digolongkan lancar. Tidak terdapat saldo penempatan pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan.

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. By type:

	31 Desember / December 31, 2022
	--
	--
	--
	--
	--
	--

*Bank Indonesia Deposit Facility
(FASBI)
Interbank Call Money
BPD Sultra
Total
Allowances for impairment
losses
Total - Net*

b. By Maturity:

	31 Desember / December 31, 2022
	--
	--
	--
	--
	--
	--

*Less than 1 month
More than 1 - 3 months
More than 3 - 12 months*

*Allowances for impairment
losses
Total - Net*

As of December 31, 2023 and 2022 placements with Bank Indonesia and other banks include placements under Sharia Banking Principles, amounting to Nil, respectively.

The interest rates of placements with other banks for the years ended December 31, 2023 and 2022 are 6.15% and nil per annum, respectively.

All placements with other banks are classified as current. No placement was blocked or pledged as collateral.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**8. EFEK-EFEK**

a. Transaksi dengan Pihak Tertentu:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022
Pihak Ketiga	2.646.380.434.186	2.314.001.027.968
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(7.807)	(4.183)
Jumlah	2.646.380.426.379	2.314.001.023.785

*Third parties
Allowance for Impairment
Losses
Total*

b. Berdasarkan Jenis:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022
Biaya perolehan yang diamortisasi	423.950.214.516	138.801.073.671
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	2.222.430.219.670	2.158.772.954.297
Nilai wajar melalui laba rugi	--	16.427.000.000
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(7.807)	(4.183)
Jumlah	2.646.380.426.379	2.314.001.023.785

*Acquisition at amortized cost
Fair value through other
comprehensive income
Fair value through profit loss
Allowance for Impairment
Losses
Total*

c. Berdasarkan Penerbit:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022
Korporasi		
Reksadana		
Sucorinvest Money Market	200.240.100.374	--
Syailendra Dana Kas	100.000.000.000	--
Trimegah Kas Syariah	100.000.000.000	--
Insight Money	99.999.940.326	--
Pasar Uang PNM Dana Maxim	99.998.144.971	--
RDT PNM Terproteksi Investa 41	50.000.000.000	50.000.000.000
Kisi Money Market Fund	10.004.789.799	50.841.089.611
BMI Indo Pasar Uang	10.000.000.000	25.459.984.060
Shihnan Sharia Money Market Fund	--	12.500.000.000
Sub Jumlah	670.242.975.470	138.801.073.671
Obligasi		
Sarana Multigriya Finansial Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019 Seri B	20.226.000.000	20.776.000.000
Sub Jumlah	20.226.000.000	20.776.000.000

**Corporate
Mutual Fund**
*Sucorinvest Money Market
Syailendra Dana Kas
Trimegah Kas Syariah
Insight Money
Pasar Uang PNM Dana Maxim
RDT PNM Terproteksi
Investa 41
Kisi Money Market Fund
BMI Indo Pasar Uang
Shihnan Sharia Money
Market Fund
Sub total*

Bonds
*Sarana Multigriya
Finansial Berkelanjutan V
Tahap II Tahun 2019
Seri B
Sub total*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**8. EFEK-EFEK (Lanjutan)****8. MARKETABLE SECURITIES (Continued)**

c. Berdasarkan Penerbit: (lanjutan)

c. By Issuer: (continued)

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Jumlah pindahan	690.468.975.470	159.577.073.671	<i>Total forward</i>
Pemerintah Republik Indonesia			Indonesia Government's
Obligasi			Bonds
Obligasi Negara RR SUN	1.075.191.346.090	1.323.452.998.899	<i>Obligasi Negara RR SUN</i>
PBS005	179.881.648.717	167.591.977.175	<i>PBS005</i>
PBS004	194.068.565.801	177.495.850.905	<i>PBS004</i>
PBS029	273.369.300.260	263.323.514.768	<i>PBS029</i>
PBS017	60.388.169.998	21.210.359.100	<i>PBS017</i>
PBS028	31.378.511.400	31.729.218.990	<i>PBS028</i>
PBS033	76.425.966.450	72.668.555.763	<i>PBS033</i>
Jumlah	1.890.703.508.716	2.057.472.475.600	<i>Total</i>
Bank			Bank
Obligasi			Bonds
Bank BRI Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri C	30.257.100.000	31.140.952.231	<i>Bank BRI Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri C</i>
Bank Sulselbar Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2021 Seri A	19.808.800.000	19.926.000.000	<i>Bank Sulselbar Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2021 Seri A</i>
Bank Mandiri Taspen Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri B	15.142.050.000	15.157.500.000	<i>Bank Mandiri Taspen Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2021 Seri B</i>
Bank BTN Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	--	20.540.026.466	<i>Bank BTN Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013</i>
Sub Jumlah	65.207.950.000	86.764.478.697	<i>Sub total</i>
Medium Term Notes			Medium Term Notes
Bank Mandiri	--	10.187.000.000	<i>Bank Mandiri</i>
Sub Jumlah	--	10.187.000.000	<i>Sub total</i>
Jumlah	2.646.380.434.186	2.314.001.027.968	<i>Total</i>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(7.807)	(4.183)	<i>Allowance for Impairment Losses</i>
Jumlah	2.646.380.426.379	2.314.001.023.785	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**8. EFEK-EFEK (Lanjutan)****8. MARKETABLE SECURITIES (Continued)**

d. Berdasarkan jatuh tempo:

d. By maturity:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
1 - 3 bulan	620.242.975.470	109.341.100.137	1 to 3 months
Lebih dari 3 - 12 bulan	--	10.187.000.000	More than 3 to 12 months
Lebih dari 12 - 60 bulan	241.498.470.000	204.488.811.332	More than 12 to 60 months
Lebih dari 60 bulan	1.784.638.988.716	1.989.984.116.499	More than 60 months
Cadangan Kerugian			Allowance for Impairment
Penurunan Nilai	(7.807)	(4.183)	Losses
Jumlah	2.646.380.426.379	2.314.001.023.785	Total

e. Berdasarkan segmen:

e. By segment:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Konvensional	2.117.323.218.766	1.569.352.011.468	Conventional
Syariah	529.057.215.420	744.649.016.500	Sharia
Cadangan Kerugian			Allowance for impairment
Penurunan Nilai	(7.807)	(4.183)	losses
Jumlah	2.646.380.426.379	2.314.001.023.785	Total

f. Berdasarkan Peringkat dan Pengukuran:

f. By Rating and Measurement:

31 Desember 2023 / December 31, 2023					
Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Tarif/ Rate %	Jatuh Tempo/ Maturity date	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai Tercatat/ Carrying amount
Biaya perolehan yang diamortisasi/ Acquisition at amortized cost					
Reksadana/ Mutual fund					
RDT PNM Terproteksi Investa 41	--	--	15-05-2027	50.000.000.000	50.000.000.000
Jumlah/ Total				50.000.000.000	50.000.000.000
Obligasi/ Bonds					
PBS 004	--	6,10%	15-02-2037	201.000.000.000	194.068.565.799
PBS 005	--	6,75%	15-02-2043	180.040.000.000	179.881.648.717
Sub jumlah/ Sub total	--	6,12%	15-10-2025	381.040.000.000	373.950.214.516
Jumlah/ Total				431.040.000.000	423.950.214.516
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain / Fair value through other comprehensive income					
Obligasi/ Bonds					
Obligasi Negara RI	--	6,77%	15-06-2042	1.062.319.000.000	1.075.191.346.090
PBS 029	--	6,37%	15-03-2034	281.981.000.000	273.369.300.260
PBS 033	--	6,75%	15-06-2047	77.355.000.000	76.425.966.450
PBS 017	--	6,12%	15-10-2025	61.000.000.000	60.388.170.000
PBS 028	--	7,75%	15-10-2046	28.822.000.000	31.378.511.400
Bank BRI Berkelanjutan II					
Tahap III					
Tahun 2017 Seri C	Pefindo	AAA	8,25%	30.000.000.000	30.257.100.000
Sarana Multigriya Finansial					
Berkelanjutan V					
Tahap II Tahun 2019 Seri B	Pefindo	AAA	8,10%	20.000.000.000	20.226.000.000
Bank Sulselbar Berkelanjutan III					
Tahap I					
Tahun 2021 Seri A	Pefindo	A+	6,45%	20.000.000.000	19.808.800.000
Bank Mandiri Taspen Berkelanjutan I					
Tahap					
II Tahun 2021 Seri A	Pefindo	AAA	7,25%	15.000.000.000	15.142.050.000
Sub jumlah/ Sub total				1.596.477.000.000	1.602.187.244.200

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (Lanjutan)**8. MARKETABLE SECURITIES (Continued)**

f. Berdasarkan Peringkat dan Pengukuran:
(lanjutan)

f. By Rating and Measurement: (continued)

31 Desember 2023 / December 31, 2023						
Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Tarif/ Rate %	Jatuh Tempo/ Maturity date	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai Tercatat/ Carrying amount	
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain / Fair value through other comprehensive income						
Reksadana/ Mutual fund						
Sucorinvest Money Market	--	--	27-01-2024	200.000.000.000	200.240.100.374	
Syailendra Dana Kas	--	--	29-01-2024	100.000.000.000	100.000.000.000	
Trimegah Kas Syariah	--	--	29-01-2024	100.000.000.000	100.000.000.000	
Pasar Uang PNM Dana Maxim	--	--	27-01-2024	100.000.000.000	99.998.144.971	
Insight Money	--	--	29-01-2024	100.000.000.000	99.999.940.326	
BMI Indo Pasar Uang	--	--	29-01-2024	10.000.000.000	10.000.000.000	
Kisi Money Market Fund	--	--	28-01-2024	10.000.000.000	10.004.789.799	
Sub Jumlah /Sub total				620.000.000.000	620.242.975.470	
Jumlah/ Total				2.216.477.000.000	2.222.430.219.670	
Medium Term Notes						
Bank Mandiri	--	--	--	--	--	
Sub Jumlah /Sub total				--	--	
Jumlah/ Total						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment losses	--	--	--	--	(7.807)	
Jumlah /Total				2.647.517.000.000	2.646.380.426.379	

31 Desember 2022 / December 31, 2022						
Pemeringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Tarif/ Rate %	Jatuh Tempo/ Maturity date	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai Tercatat/ Carrying amount	
Biaya perolehan yang diamortisasi/ Acquisition at amortized cost						
Reksadana/ Mutual fund						
RDT PNM Terproteksi Investa 41	--	--	15 - 05 - 2027	50.000.000.000	50.000.000.000	
BMI Indo Pasar Uang	--	--	21 - 01 - 2023	25.000.000.000	25.459.984.060	
Kisi Money Market Fund	--	--	28 - 01 - 2023	50.000.000.000	50.841.089.611	
Shihnan Sharia Money Market Fund	--	--	13 - 01 - 2023	12.500.000.000	12.500.000.000	
Jumlah/ Total				137.500.000.000	138.801.073.671	
Nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain / Fair value through other comprehensive income						
Obligasi/ Bonds						
Obligasi Negara RI	--	--	7,375%	1.307.124.000.000	1.307.025.998.899	
PBS 005	--	--	6,75%	15 - 04 - 2043	180.040.000.000	167.591.977.175
PBS 004	--	--	6,10%	15 - 02 - 2037	201.000.000.000	177.495.850.905
PBS 029	--	--	6,375%	15 - 03 - 2034	281.981.000.000	263.323.514.768
PBS 017	--	--	6,125%	15 - 10 - 2025	10.000.000.000	21.210.359.100
PBS 028	--	--	7,75%	15 - 10 - 2046	28.822.000.000	31.729.218.990
PBS 033	--	--	6,75%	15 - 06 - 2047	77.355.000.000	72.668.555.763
Sarana Multigriya Finansial Berkelanjutan V	Fitch Rating	AAA(idn)	8,10%	20.000.000.000	20.776.000.000	
Tahap II Tahun 2019 Seri B	Indonesia					
Bank BTN Berkelanjutan I	Fitch Rating	AA+(idn)	7,90%	20.000.000.000	20.540.026.466	
Tahap II Tahun 2013	Indonesia					
Bank BRI Berkelanjutan II	Pefindo	idAAA	8,25%	30.000.000.000	31.140.952.231	
Tahap III Tahun 2017 Seri C						
Bank Sulselbar Berkelanjutan III	Pefindo	idA+	6,45%	20.000.000.000	19.926.000.000	
Tahap I Tahun 2021 Seri A						
Bank Mandiri Taspen Berkelanjutan I	Fitch Rating	AA(idn)	7,25%	15.000.000.000	15.157.500.000	
Tahap II	Indonesia			2.191.322.000.000	2.148.585.954.297	
Tahun 2021 Seri A						
Sub Jumlah /Sub total						
Medium Term Notes						
Bank Mandiri	Pefindo	idAA	8,85%	10.000.000.000	10.187.000.000	
Sub Jumlah /Sub total				10.000.000.000	10.187.000.000	

Nilai wajar melalui laba rugi/ Fair value through profit loss						
Obligasi/ Bonds						
Obligasi RI Seri FR0065	--	--	6,63%	15-05-2033	2.000.000.000	1.952.000.000
Obligasi RI Seri FR0091	--	--	6,38%	15-04-2032	15.000.000.000	14.475.000.000
Jumlah/ Total					17.000.000.000	16.427.000.000
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment losses					2.355.822.000.000	2.314.001.027.968
Jumlah /Total					2.355.822.000.000	2.314.001.023.785

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**8. EFEK-EFEK (Lanjutan)**

g. Cadangan kerugian penurunan nilai:

	31 Desember / December 31, 2023
Saldo Awal	(4.183)
Penyisihan tahun berjalan	(3.624)
Jumlah	(7.807)

h. Nilai pasar untuk efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 96,94% sampai dengan 108,87% dan 92,00% sampai dengan 104,50%, dari nilai nominal obligasi yang dimiliki oleh Bank.

i. Bank mengakui kenaikan atau penurunan efek-efek yang tersedia untuk dijual akibat perubahan nilai wajar yang belum direalisasikan. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Bank mengakui penurunan nilai wajar atas efek-efek yang tersedia untuk dijual masing-masing sebesar Rp4.353.889.884 dan Rp45.926.051.603 yang disajikan dalam ekuitas (lihat catatan 25).

j. Bank mengakui kerugian bersih atas penjualan efek-efek masing-masing sebesar Rp11.113.635.181 dan Rp17.310.032.573 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam akun "Kenaikan (penurunan) dari penjualan efek-efek - neto" (lihat catatan 27).

k. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, semua efek-efek pada 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan lancar.

l. Tingkat suku bunga kontraktual rata-rata per tahun 6,1% - 8,25% dan 6,1% - 8,5% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

m. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 penyisihan kerugian penurunan nilai dihitung sesuai dengan PSAK 71, Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutupi kerugian yang timbul atas surat berharga.

8. MARKETABLE SECURITIES (Continued)

g. Allowance for impairment losses:

	31 Desember / December 31, 2022	
	(3.687)	Beginning balance
	(496)	Provision during the year
Jumlah	(4.183)	Total

h. Market value for securities held to maturity as of December 31, 2023 and 2022 is 96.94% up to 108.87% and 92.00% up to 104.50%, respectively, of obligation nominal value owned by the Bank.

i. Bank recognizes an increase or decrease on available-for-sale securities due to net changes unrealized fair values. As of December 31, 2023 and 2022 Bank recognizes the loss on impairment on fair value of available-for-sale securities amounting to Rp4,353,889,884 and Rp45,926,051,603, respectively, which is presented in equity (see note 25).

j. Bank recognizes the net loss from the sales of marketable securities amounting to Rp11,113,635,181 and Rp17,310,032,573 as of December 31, 2023 and 2022, respectively, which is presented in "Increase (decrease) from marketable securities selling - net" (see note 27).

k. Based on the prevailing provisions, all marketable securities as of December 31, 2023 and 2022 are classified as current.

l. The average annual contractual interest rate is 6.1% - 8.25% and 6.1% - 8.5% for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

m. Allowance for Impairment Losses as of December 31, 2023 and 2022 has been calculated in compliance with SFAS 71, and Management believes that allowance for impairment losses is adequate to cover losses on marketable securities is unnecessary.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**9. KREDIT YANG DIBERIKAN**

a. Berdasarkan Segmen:

	31 Desember / December 31, 2023
Konvensional	8.433.618.002.618
Syariah	866.511.942.279
Jumlah	9.300.129.944.897
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(214.673.627.494)
Jumlah - Bersih	9.085.456.317.403

b. Transaksi dengan pihak tertentu:

	31 Desember / December 31, 2023
Pihak Ketiga	
Konsumsi	7.857.655.457.766
Investasi	756.686.654.690
Sindikasi	447.851.942.887
Modal Kerja	166.674.826.487
Karyawan	61.293.804.175
Sub Jumlah	9.290.162.686.005
Pihak Berelasi (Catatan 35)	
Konsumsi	3.772.520.961
Investasi	2.446.304.703
Karyawan	3.400.960.650
Modal Kerja	347.472.578
Sub Jumlah	9.967.258.892
Jumlah	9.300.129.944.897
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(214.673.627.494)
Jumlah	9.085.456.317.403

Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak berelasi yang terdiri dari karyawan kunci dan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.192.179.861 dan Rp8.775.079.031 dan pada tanggal 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.338.318.237 dan Rp5.333.210.006.

9. LOANS

a. By Segment:

	31 Desember / December 31, 2022
Konvensional	8.361.902.931.037
Syariah	834.163.780.534
Jumlah	9.196.066.711.571
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(208.505.756.787)
Jumlah - Bersih	8.987.560.954.784

b. Transaction with certain parties:

	31 Desember / December 31, 2022
Pihak Ketiga	
Konsumsi	7.777.163.942.166
Investasi	607.127.565.157
Sindikasi	566.159.825.631
Modal Kerja	169.710.065.891
Karyawan	64.233.784.483
Sub Jumlah	9.184.395.183.328
Pihak Berelasi (Catatan 35)	
Konsumsi	6.574.008.855
Investasi	3.885.803.912
Karyawan	1.211.715.476
Modal Kerja	--
Sub Jumlah	11.671.528.243
Jumlah	9.196.066.711.571
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(208.505.756.787)
Jumlah	8.987.560.954.784

Total loans to related parties consisting of key employees and stockholders as of December 31, 2023 is amounting to Rp1,192,179,861 and Rp8,775,079,031, respectively, and as of December 31, 2022 is amounting to Rp6,338,318,237 and Rp5,333,210,006, respectively.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**9. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)****9. LOANS (Continued)**

c. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas (dalam ribuan Rupiah):

c. By type and collectibility (in thousands of Rupiah):

31 Desember 2023 / December 31, 2023							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Konsumsi	7.573.988.616	161.063.045	10.569.769	15.362.072	100.444.476	7.861.427.978	Consumption
Investasi	708.041.819	28.753.809	1.235.119	947.618	20.154.594	759.132.959	Investments
Sindikasi	447.851.942	--	--	--	--	447.851.942	Syndicated
Modal kerja	141.266.853	5.859.221	239.831	409.824	19.246.570	167.022.299	Working capital
Karyawan	63.599.623	498.025	--	--	597.115	64.694.764	Employee
Jumlah	8.934.748.853	196.174.100	12.044.719	16.719.514	140.442.755	9.300.129.944	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(72.869.294)	(31.797.334)	(5.201.276)	(9.525.067)	(95.280.654)	(214.673.627)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	8.861.879.559	164.376.766	6.843.442	7.194.447	45.162.101	9.085.456.317	Total - Net

31 Desember 2022 / December 31, 2022							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Konsumsi	7.583.741.560	104.672.082	7.985.505	9.412.134	77.926.670	7.783.737.951	Consumption
Investasi	579.148.188	10.079.517	299.831	326.287	21.159.546	611.013.369	Investments
Sindikasi	564.474.062	1.685.763	--	--	--	566.159.825	Syndicated
Modal kerja	141.560.610	7.483.708	248.107	348.876	20.068.765	169.710.066	Working capital
Karyawan	64.875.124	25.950	171.792	--	372.634	65.445.500	Employee
Jumlah	8.933.799.544	123.947.020	8.705.235	10.087.297	119.527.615	9.196.066.711	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(73.950.685)	(21.729.009)	(5.800.931)	(8.355.965)	(98.669.167)	(208.505.757)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	8.859.848.859	102.218.011	2.904.304	1.731.332	20.858.448	8.987.560.954	Total - Net

d. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas (dalam ribuan Rupiah):

d. By economic sector and collectibility (in thousands of Rupiah):

31 Desember 2023 / December 31, 2023							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rumah Tangga	7.635.549.160	161.561.070	10.483.709	15.312.852	100.842.144	7.923.748.935	Household
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	408.183	--	--	--	--	408.183	Individual and household services
Pertanian, perburuan dan kehutanan	510.750.303	8.590.837	616.260	609.572	6.268.679	526.835.651	Agriculture, hunting and forestry
Perdagangan besar dan eceran	257.463.235	15.837.602	556.056	350.537	5.141.062	279.348.492	Wholesale and groceries
Konstruksi	391.121.029	1.120.123	--	--	7.086.068	399.327.220	Construction
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	181.616	--	--	--	--	181.616	Social, culture, entertainment, and other personal services
Penyediaan akomodasi dan makan minum	28.671.342	8.614.438	--	355.926	19.897.356	57.539.062	Hotel, food and beverages
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	23.669.895	--	--	14.817	121.024	23.805.736	Transportation, warehousing and communication
Industri Pengolahan	56.980.281	181.218	302.635	26.592	591.364	58.082.090	Utilities industry
Jasa kesehatan dan sosial	10.013.853	--	--	--	--	10.013.853	Health and social service
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	14.614.353	210.978	--	--	184.149	15.009.480	Real estate, rent, and service company
Jasa pendidikan	246.222	--	--	--	41.086	287.308	Education Service
Pertambangan dan penggalian	633.419	--	--	--	--	633.419	Mining and excavation
Listrik, Gas, dan Air	135.791	--	--	--	--	135.791	Water, Gas and Electricity
Lainnya	4.310.171	57.834	86.059	49.218	269.823	4.773.105	Others
Jumlah	8.934.748.853	196.174.100	12.044.719	16.719.514	140.442.755	9.300.129.944	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(72.869.294)	(31.797.334)	(5.201.276)	(9.525.067)	(95.280.654)	(214.673.627)	Allowances for impairment losses
Jumlah - Bersih	8.861.879.559	164.376.766	6.843.442	7.194.447	45.162.101	9.085.456.317	Total - Net

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**9. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)****9. LOANS (Continued)**d. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas
(dalam ribuan Rupiah):d. By economic sector and collectibility (in
thousands of Rupiah):

	31 Desember 2022 / December 31, 2022						
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rumah Tangga	7.771.370.368	106.101.812	8.063.218	9.412.133	78.099.855	7.973.047.386	Household
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	134.054	--	--	--	--	134.054	Individual and household services
Pertanian, perburuan dan kehutanan	379.788.827	5.596.087	326.191	47.362	6.453.097	392.211.564	Agriculture, hunting and forestry
Perdagangan besar dan eceran	231.816.523	5.605.609	140.665	627.802	5.283.141	243.473.740	Wholesale and groceries
Konstruksi	363.404.394	478.078	--	--	7.279.808	371.162.280	Construction
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	2.346.980	563.994	--	--	161.212	3.072.186	Social, culture, entertainment, and other personal services
Penyediaan akomodasi dan makan minum	28.536.756	1.355.511	--	--	20.267.356	50.159.623	Hotel, food and beverages
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	28.130.546	--	--	--	130.525	28.261.071	Transportation, warehousing and communication
Industri Pengolahan	85.048.440	310.845	--	--	953.267	86.312.552	Utilities industry
Jasa kesehatan dan sosial	10.565.193	--	--	--	--	10.565.193	Health and social service
Perikanan dan Perindustrian	13.306.474	472.346	81.081	--	350.197	14.210.098	Fishery and Manufacturing
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	16.246.376	3.178.683	--	--	305.566	19.730.625	Real estate, rent, and service company
Jasa pendidikan	496.913	--	--	--	44.142	541.055	Education Service
Pertambangan dan penggalian	250.829	--	--	--	--	250.829	Mining and excavation
Listrik, Gas, dan Air	1.091.221	2.072	--	--	--	1.093.293	Water, Gas and Electricity
Lainnya	1.265.650	281.983	94.080	--	199.448	1.841.161	Others
Jumlah	8.933.799.544	123.947.020	8.705.235	10.087.297	119.527.614	9.196.066.711	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(73.950.684)	(21.729.009)	(5.800.931)	(8.355.965)	(98.669.167)	(208.505.757)	Allowances for impairment losses
Jumlah - Bersih	8.859.848.860	102.218.011	2.904.304	1.731.332	20.858.447	8.987.560.954	Total - Net

e. Jangka Waktu (sesuai dengan perjanjian kredit)

e. Terms (based on loan agreements)

Jangka waktu kredit diklasifikasikan berdasarkan periode kredit dan waktu yang tersisa sampai dengan jatuh temponya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

Maturity period is classified based on credit period and the remaining period to maturity as stated in the loan agreements as follows:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Jangka Waktu			Maturity Period
Kurang dari 1 tahun	2.697.165.047	14.495.366.265	Less than 1 year
Lebih dari 1 - 2 tahun	77.824.003.502	64.658.111.577	More than 1 to 2 years
Lebih dari 2 - 5 tahun	454.203.120.030	814.246.412.958	More than 2 to 5 years
Lebih dari 5 tahun	8.765.405.656.318	8.302.666.820.771	More than 5 years
Jumlah	9.300.129.944.897	9.196.066.711.571	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(214.673.627.494)	(208.505.756.787)	Allowances for impairment losses
Jumlah - Bersih	9.085.456.317.403	8.987.560.954.784	Total - Net

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**9. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)****9. LOANS (Continued)**

f. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

f. By remaining Period to Maturity:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Jangka Waktu			Maturity Period
Kurang dari 1 tahun	68.389.444.315	86.475.677.530	Less than 1 year
Lebih dari 1 - 2 tahun	175.822.944.600	137.898.355.989	More than 1 to 2 years
Lebih dari 2 - 5 tahun	1.268.820.488.353	1.112.566.013.404	More than 2 to 5 years
Lebih dari 5 tahun	7.787.097.067.629	7.859.126.664.648	More than 5 years
Jumlah	9.300.129.944.897	9.196.066.711.571	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(214.673.627.494)	(208.505.756.787)	Allowances for impairment losses
Jumlah - Bersih	9.085.456.317.403	8.987.560.954.784	Total - Net

g. Berdasarkan kolektibilitas:

g. By collectibility:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023			
	Pokok/ Principal	Penyisihan/ Allowance	Bersih/ Net	
Lancar	8.934.748.853.636	(72.869.294.341)	8.861.879.559.295	Current
Dalam perhatian khusus	196.174.100.894	(31.797.334.298)	164.376.766.596	Special mention
Kurang lancar	12.044.719.715	(5.201.276.891)	6.843.442.824	Substandard
Diragukan	16.719.514.905	(9.525.067.796)	7.194.447.109	Doubtful
Macet	140.442.755.747	(95.280.654.168)	45.162.101.579	Loss
Jumlah	9.300.129.944.897	(214.673.627.494)	9.085.456.317.403	Total
	31 Desember 2022/ December 31, 2022			
	Pokok/ Principal	Penyisihan/ Allowance	Bersih/ Net	
Lancar	8.933.799.544.377	(73.950.684.705)	8.859.848.859.672	Current
Dalam perhatian khusus	123.947.020.245	(21.729.009.305)	102.218.010.940	Special mention
Kurang lancar	8.705.235.488	(5.800.930.876)	2.904.304.612	Substandard
Diragukan	10.087.297.369	(8.355.965.055)	1.731.332.314	Doubtful
Macet	119.527.614.092	(98.669.166.846)	20.858.447.246	Loss
Jumlah	9.196.066.711.571	(208.505.756.787)	8.987.560.954.784	Total

h. Cadangan kerugian penurunan nilai:

h. Allowance for impairment losses:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Saldo awal tahun	(208.505.756.787)	(132.443.490.930)	Balance at beginning of the year
Pembalikan (penyisihan) selama tahun berjalan (catatan 31)	(6.167.870.707)	(76.062.265.857)	Reversal (allowance) during the year (note 31)
Saldo akhir tahun	(214.673.627.494)	(208.505.756.787)	Ending balance

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**9. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)****9. LOANS (Continued)**

h. Cadangan kerugian penurunan nilai: (lanjutan)

h. Allowance for impairment losses: (continued)

31 Desember 2023 / December 31, 2023			
	Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total
Saldo awal	(64.274.908.514)	(144.230.848.273)	(208.505.756.787)
Pembalikan (penyisihan) selama tahun berjalan (catatan 31)	(1.811.986.796)	(4.355.883.911)	(6.167.870.707)
Saldo akhir	(66.086.895.310)	(148.586.732.184)	(214.673.627.494)

*Beginning balance
Reversal (allowance)
during the year
(note 31)
Ending Balance*

31 Desember 2022 / December 31, 2022			
	Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total
Saldo awal	(8.355.996.426)	(124.087.494.504)	(132.443.490.930)
Pembalikan (penyisihan) selama tahun berjalan (catatan 31)	(55.918.912.088)	(20.143.353.769)	(76.062.265.857)
Saldo akhir	(64.274.908.514)	(144.230.848.273)	(208.505.756.787)

*Beginning balance
Reversal (allowance)
during the year
(note 31)
Ending Balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya kredit.

Management believes that allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that might arise from uncollectible loans.

Kredit yang diberikan dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotik, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka dan jaminan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 jumlah kredit yang diberikan yang dijamin dengan jaminan tunai berupa deposito berjangka yang diblokir adalah masing-masing sebesar nihil dan giro yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp613.539.400 dan Rp729.519.400 (catatan 15).

Loans are secured with collaterals bound by mortgage, deferred rights or power of attorney to sell, time deposits and other guarantees. As of December 31, 2023 and 2022 the amount of loans secured with cash collateral in the form of withheld time deposits are nil, respectively, and blocked current accounts as of December 31, 2023 and 2022 are amounting to Rp613,539,400 and Rp729,519,400, respectively (note 15).

Kredit yang dihapusbukukan**Loans written-off**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo Kredit yang dihapus buku oleh Bank sebesar Rp9.483.289.498 dan Rp9.482.653.585. Mutasi untuk kredit yang dihapus buku pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022 amount of loans written off by the Bank is amounting to Rp9,483,289,498 and Rp9,482,653,585, respectively. Changes in written-off loans as of December 31, 2023 and 2022 are as follows :

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Saldo awal	9.482.653.585	9.556.077.570	<i>Beginning balance</i>
Penghapusbukuan/ (penerimaan)	635.913	(73.423.985)	<i>Written off/ (recoveries)</i>
Saldo akhir	9.483.289.498	9.482.653.585	<i>Ending Balance</i>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**9. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**

i. Kredit yang bermasalah:

	31 Desember / December 31, 2023
Kurang lancar	12.044.719.715
Diragukan	16.719.514.905
Macet	140.442.755.744
Jumlah	169.206.990.364
Cadangan kerugian penurunan nilai	(110.006.998.855)
Saldo akhir tahun	59.199.991.509

	31 Desember / December 31, 2023
Rasio kredit bermasalah - kotor	1,82%
Rasio kredit bermasalah - bersih	0,64%

j. Tingkat suku bunga:

	31 Desember / December 31, 2023
Kredit modal kerja	5,50% - 17,00%
Kredit investasi	6,00% - 13,00%
Kredit konsumtif	5,00% - 12,50%
Kredit pegawai	11,00% - 12,25%
Kredit kepada DPRD	11,00% - 18,00%

k. Kredit yang Direstrukturasasi:

	31 Desember / December 31, 2023
Perpanjangan waktu kredit	
Lancar	338.450.802.687
Dalam perhatian khusus	15.718.562.788
Macet	546.575.453
Jumlah	354.715.940.928
Cadangan kerugian penurunan nilai	(52.381.248.874)
Saldo akhir tahun	302.334.692.054

9. LOANS (Continued)

i. Non-performing loans:

	31 Desember / December 31, 2022
Kurang lancar	8.705.235.488
Diragukan	10.087.297.369
Macet	119.527.614.092
Jumlah	138.320.146.949
Cadangan kerugian penurunan nilai	(112.826.062.777)
Saldo akhir tahun	25.494.084.172

	31 Desember / December 31, 2022
Rasio kredit bermasalah - kotor	1,50%
Rasio kredit bermasalah - bersih	0,28%

j. Interest rates:

	31 Desember / December 31, 2022
Kredit modal kerja	5,50% - 17,00%
Kredit investasi	6,00% - 21,80%
Kredit konsumtif	5,00% - 12,50%
Kredit pegawai	11,00% - 12,25%
Kredit kepada DPRD	11,00% - 18,00%

k. Restructured Loans:

	31 Desember / December 31, 2022
Perpanjangan waktu kredit	
Lancar	351.502.041.633
Dalam perhatian khusus	565.519.213
Macet	--
Jumlah	352.067.560.846
Cadangan kerugian penurunan nilai	(50.173.451.198)
Saldo akhir tahun	301.894.109.648

Substandard
Doubtful
LossTotal
Allowances for impairment
losses**Ending balance**The ratio of non-performing loans-
grossThe ratio of non-performing loans-
netWorking capital loan
Investment loan
Consumption loan
Employee loan
State representative loanExtension of loan period
Current
Special mention
LossTotal
Allowances for impairment
losses**Ending balance**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**9. LOANS (Continued)****k. Kredit yang Direstrukturasikan: (lanjutan)****k. Restructured Loans: (continued)**

Jumlah kredit yang telah direstrukturasikan dan dalam kategori kredit bermasalah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp546.575.453 and nihil.

Restructured loans and those categorized as non-performing loan amounted to Rp546,575,453 and nil as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020, "Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019" tertanggal 13 Maret 2020.

Bank has restructured loans for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No.11/POJK.03/2020, "National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease of 2019" dated March 13, 2020.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum" yang kemudian diubah dengan Peraturan OJK No.48/POJK.03/2020 tentang "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019" tanggal 3 Desember 2020.

In compliance with Financial Services Authority (OJK), the Bank implements OJK Regulation No.40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 regarding "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality" which was amended subsequently with OJK Regulation No.48/POJK.03/2020 regarding "Amendment to Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.03/2020 regarding National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease of 2019" dated December 3, 2020.

l. Kredit Usaha Kecil**l. Micro Financing**

	31 Desember/ December 31, 2023
Kredit usaha mikro dan kecil	515.545.829.649
Jumlah	515.545.829.649

	31 Desember / December 31, 2022
	729.525.820.334
Total	729.525.820.334

Micro financing

Total

Rasio Kredit Usaha Kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar 5,54% dan 7,93%.

Micro financing ratio to total loans as of December 31, 2023 and 2022 is 5.54% and 7.93%, respectively.

m. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**m. Bank's Legal Lending Limit**

Sesuai dengan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik pihak ketiga maupun pihak yang berelasi.

In accordance with the Bank's Legal Lending Limit (BMPK) report to Bank Indonesia as of December 31, 2023 and 2022 the Bank is in compliance with legal lending limit for third parties and related parties.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**9. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)****9. LOANS (Continued)**

n. Informasi Syariah:

n. Sharia Information:

Berdasarkan jenis akad:

By type of agreements:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
<i>Murabahah</i>	528.805.908.885	512.791.103.497	<i>Murabahah</i>
<i>Musyarakah</i>	337.359.882.513	320.948.780.526	<i>Musyarakah</i>
<i>Ijarah</i>	346.150.881	423.896.511	<i>Ijarah</i>
Jumlah	866.511.942.279	834.163.780.534	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(10.701.715.840)	(9.574.540.260)	Allowances for impairment losses
Jumlah - Bersih	855.810.226.439	824.589.240.274	Total - Net

Berdasarkan Kolektibilitas:

By collectibility :

	Pokok/ Principal	Penyisihan/ Allowance	Bersih/ Net	
Lancar	832.975.120.675	(8.327.642.503)	824.647.478.172	Current
Dalam perhatian khusus	30.658.349.499	(1.532.917.473)	29.125.432.026	Special mention
Kurang lancar	2.050.019.178	(294.593.862)	1.755.425.316	Substandard
Diragukan	514.561.585	(232.670.660)	281.890.925	Doubtful
Macet	313.891.342	(313.891.342)	--	Loss
Jumlah	866.511.942.279	(10.701.715.840)	855.810.226.439	Total

31 Desember 2022 / December 31, 2022

	Pokok/ Principal	Penyisihan/ Allowance	Bersih/ Net	
Lancar	812.607.815.111	(8.125.599.810)	804.482.215.301	Current
Dalam perhatian khusus	20.622.786.589	(1.017.040.163)	19.605.746.426	Special mention
Kurang lancar	573.137.167	(71.858.622)	501.278.545	Substandard
Diragukan	--	--	--	Doubtful
Macet	360.041.667	(360.041.667)	--	Loss
Jumlah	834.163.780.534	(9.574.540.262)	824.589.240.272	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

n. Informasi Syariah: (lanjutan)

Kisaran tingkat margin rata-rata per tahun:

	31 Desember / December 31, 2023
<i>Murabahah</i> Modal Kerja	3,0% - 5,6% Flat
<i>Murabahah</i> Investasi	5,9% Flat
<i>Murabahah</i> Konsumsi	5,5% - 8,63% Flat
<i>Murabahah</i> KPR iB	7,6% Flat
<i>Musarakah</i> Modal Kerja	11,90% Flat
<i>Musarakah</i> Investasi	9,75% Efektif

o. Aset Yang Diperoleh Untuk Ijarah

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa dengan hibah.

	31 Desember / December 31, 2023
Harga Perolehan	573.500.000
Akumulasi Penyusutan	(227.349.119)
Jumlah - Bersih	346.150.881

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014, kewajiban membentuk cadangan umum penyisihan aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif dalam bentuk pembiayaan *ijarah* atau pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pembentukan cadangan khusus *ijarah*.

p. Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit pembiayaan bersama yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Persentase penyertaan Bank sebagai anggota dalam kredit sindikasi, dimana Bank lain bertindak sebagai pimpinan sindikasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023
% Partisipasi	0,69 - 60%

9. LOANS (Continued)

n. Sharia Information: (continued)

Range of average profit margin rates per annum:

	31 Desember / December 31, 2022	
3,0% - 9,5% Flat		<i>Working Capital Murabahah</i>
4,25 - 10% Flat		<i>Investment Murabahah</i>
3% - 10,5% Flat		<i>Consumption Murabahah</i>
5% Flat		<i>KPR iB Murabahah</i>
11,50% Time		<i>Working Capital Musarakah</i>
10,50% Efektif		<i>Investment Musarakah</i>

o. Assets Acquired For Ijarah

This account represents lease objects of an *ijarah muntahiyah bittamlik* transaction which includes an option to transfer the title of ownership over the assets through a grant.

	31 Desember / December 31, 2022	
683.341.111		<i>Acquisition Cost</i>
(259.444.599)		<i>Accumulated Depreciation</i>
423.896.512		Total - Net

Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014, the obligation to provide allowance for impairment losses on earning assets do not apply to earning assets under *ijarah* or *ijarah muntahiyah bittamlik* financing.

p. Syndicated Loan

Syndicated loan represents loan provided to borrowers under syndication agreements with other Banks.

Bank's percentage of share in syndicated loans, where another financial institution is the lead arranger, is as follows:

	31 Desember / December 31, 2022	
0,69 - 12,85%		<i>% of Participation</i>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

9. KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan)**p. Kredit Sindikasi (lanjutan)**

Keikutsertaan Bank dalam pinjaman sindikasi dengan bank lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp447.851.942.887 dan Rp566.159.825.631.

9. LOANS (Continued)**p. Syndicated Loan (continued)**

Bank's participation in syndicated loans with other banks for the years ended December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp447,851,942,887 dan Rp566,159,825,631, respectively.

10. PERPAJAKAN**a. Utang pajak**

	31 Desember/ December 31, 2023
PPh pasal 4 ayat 2	2.196.321.087
PPh pasal 21	5.757.881.033
PPh pasal 23	33.658.368
PPh pasal 29	105.888.880
Jumlah	8.093.749.368

10. TAXES**a. Tax payables**

	31 Desember / December 31, 2022	
	1.969.677.369	Income tax article 4 par. (2)
	9.768.933.470	Income tax article 21
	22.768.946	Income tax article 23
	317.781.480	Income tax article 29
Total	12.079.161.265	

b. Pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

b. Corporate income tax

The reconciliation between income before tax, as shown in the statements of income, and taxable income is as follows:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Laba sebelum pajak menurut laporan	469.807.587.810	451.939.244.411	Profit before estimated tax
Beda waktu			Temporary differences
Imbalan kerja	2.210.430.187	7.410.073.775	Employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai	12.994.055.387	10.336.474.691	Allowance for impairment losses
Imbalan Jasa Produksi	(597.096.613)	(2.875.695.652)	Bonus
	14.607.388.961	14.870.852.814	
Beda Tetap			Permanent differences
Iklan dan Promosi	3.105.429.476	4.338.225.671	Advertisement and Promotion
Pajak	36.115.256	286.164.403	Tax
Penjamuan tamu	2.489.702.054	2.485.495.702	Entertainment
Sumbangan	2.793.069.013	2.054.611.610	Bank donations
Utlah dan Perayaan	1.120.258.920	2.539.990.654	Anniversaries and celebrations
Olahraga dan rekreasi	431.861.440	357.043.206	Sports and recreation
Aset hak guna	2.829.066.508	1.100.039.348	Right of use assets
Koran dan majalah	137.791.200	134.618.739	Magazines and newspaper
Lainnya	11.482.708.565	11.160.698.553	Others
Pendapatan bunga reksadana			Mutual interest income of
Kontrak Investasi Kolektif	(846.824.987)	(1.365.450.419)	Collective Investment
	23.579.177.445	23.091.437.467	Contract

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**10. PERPAJAKAN (Lanjutan)****10. TAXES (Continued)****b. Pajak penghasilan badan (lanjutan)****b. Corporate income tax (continued)**

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Taksiran penghasilan kena pajak	507.994.154.000	489.901.534.000	<i>Estimated taxable income</i>
Taksiran pajak penghasilan badan	111.758.713.880	107.778.337.480	<i>Estimated corporate income tax</i>
Pajak dibayar dimuka: PPh pasal 25	111.652.825.000	107.460.556.000	<i>Prepaid Tax: Estimated tax art. 25</i>
Kurang (Lebih) Pajak - bersih	105.888.880	317.781.480	<i>Prepaid tax expenses - net</i>

c. Aset (Liabilitas) Pajak tangguhan**c. Deferred tax Assets (Liabilities)**

	1 Jan 2023 / Jan 1, 2023	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dibebankan ke Pendapatan Komprehensif/ Charged to Statement of Comprehensive Income	31 Desember / December 31, 2023	
Liabilitas Imbalan Kerja	5.432.316.268	486.294.641	(371.862.067)	5.546.748.842	<i>Employee Benefits Liability</i>
Cadangan Penyisihan Penurunan Nilai	2.945.721.120	2.858.692.185	(671.696.688)	5.132.716.617	<i>Allowance for Impairment Losses on Receivable</i>
Jasa Produksi	145.798.712	(131.361.255)	--	14.437.472	<i>Bonus</i>
Kenaikan (Penurunan) yang belum direalisasikan atas efek tersedia dijual	15.794.695.332	--	(14.566.675.108)	1.228.020.224	<i>Unrealized increase (decrease) on available-for-sale marketable securities</i>
Penyesuaian atas PSAK 71	9.799.489.464	--	--	9.799.489.464	<i>Adjustment in compliance with SFAS 71</i>
Jumlah	34.118.020.896	3.213.625.571	(15.610.233.863)	21.721.412.619	<i>Total</i>

	1 Jan 2022 / Jan 1, 2022	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dibebankan ke Pendapatan Komprehensif/ Charged to Statement of Comprehensive Income	31 Desember 2022 / December 31, 2022	
Liabilitas Imbalan Kerja	2.595.556.503	803.912.780	2.032.846.985	5.432.316.268	<i>Employee Benefits Liability</i>
Cadangan Penyisihan Penurunan Nilai	3.344.380.547	(398.659.427)	--	2.945.721.120	<i>Allowance for Impairment Losses on Receivable</i>
Jasa Produksi	778.451.769	(632.653.057)	--	145.798.712	<i>Bonus</i>
Kenaikan (Penurunan) yang belum direalisasikan atas efek tersedia dijual	2.854.717.760	1.737.420.683	11.202.556.889	15.794.695.332	<i>Unrealized increase (decrease) on available-for-sale marketable securities</i>
Penyesuaian atas PSAK 71	9.799.489.464	--	--	9.799.489.464	<i>Adjustment in compliance with SFAS 71</i>
Jumlah	19.372.596.043	1.510.020.979	13.235.403.874	34.118.020.896	<i>Total</i>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**10. PERPAJAKAN (Lanjutan)****d. Surat Ketetapan Pajak**Bank akan menyampaikan surat pemberitahuan
(SPT) untuk tahun 2023.Perhitungan pajak penghasilan badan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 telah sesuai dengan SPT yang dilaporkan
ke kantor pajak.**10. TAXES (Continued)****d. Tax Assessment Letters**The Bank will submit tax notification letter
(SPT) for the year ended 2023.The calculation of corporate income tax for the
year ended December 31, 2022 is in
accordance with the Annual Corporate Tax
Return reported to the tax office.**11. ASET TETAP****11. FIXED ASSET**

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Pemilikan langsung	240.461.254.521	231.932.828.390	Direct ownership
Akumulasi penyusutan	(90.182.522.527)	(73.858.578.532)	Accumulated depreciation
Jumlah	150.278.731.994	158.074.249.858	Total

31 Desember 2023/ December 31, 2023						
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Cost
Tanah	27.322.996.800	3.617.683.000	--	--	30.940.679.800	Lands
Bangunan	113.668.543.606	239.447.251	--	--	113.907.990.857	Buildings
Peralatan dan perabot kantor	79.540.594.613	4.475.705.880	--	--	84.016.300.493	Office equipments and furniture
Kendaraan bermotor	1.937.655.000	195.590.000	--	--	2.133.245.000	Vehicles
Sewa guna usaha	9.463.038.371	--	--	--	9.463.038.371	Finance lease
	<u>231.932.828.390</u>	<u>8.528.426.131</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>240.461.254.521</u>	
Bangunan dalam proses	--	--	--	--	--	Construction in progress
	<u>231.932.828.390</u>	<u>8.528.426.131</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>240.461.254.521</u>	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	17.456.489.177	5.643.327.630	--	--	23.099.816.807	Buildings
Peralatan dan perabot kantor	51.883.669.949	10.123.046.411	--	--	62.006.716.360	Office equipment and Furniture
Kendaraan bermotor	1.863.366.547	84.418.036	--	--	1.947.784.583	Vehicles
Sewa guna usaha	2.655.052.859	473.151.918	--	--	3.128.204.777	Finance Lease
	<u>73.858.578.532</u>	<u>16.323.943.995</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>90.182.522.527</u>	
Nilai Buku	158.074.249.858				150.278.731.994	Book Value

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**11. ASET TETAP (Lanjutan)****11. FIXED ASSET (Continued)**

31 Desember 2022/ December 31, 2022

	<u>Saldo awal/ Beginning Balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deduction</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>	
Biaya Perolehan						Cost
Tanah	23.373.596.800	3.949.400.000	--	--	27.322.996.800	Lands
Bangunan	25.333.211.519	88.335.332.087	--	--	113.668.543.606	Buildings
Peralatan dan perabot kantor	50.211.124.571	29.329.470.042	--	--	79.540.594.613	Office equipments and furniture
Kendaraan bermotor	1.937.655.000	--	--	--	1.937.655.000	Vehicles
Sewa guna usaha	9.463.038.371	--	--	--	9.463.038.371	Finance lease
	<u>110.318.626.261</u>	<u>121.614.202.129</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>231.932.828.390</u>	
Bangunan dalam proses	57.385.000.000	--	--	(57.385.000.000)	--	Construction in progress
	<u>167.703.626.261</u>	<u>121.614.202.129</u>	<u>--</u>	<u>(57.385.000.000)</u>	<u>231.932.828.390</u>	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Bangunan	12.219.622.650	5.236.866.527	--	--	17.456.489.177	Buildings
Peralatan dan perabot kantor	42.245.603.092	9.638.066.857	--	--	51.883.669.949	Office equipment and furniture
Kendaraan bermotor	1.771.987.946	91.378.601	--	--	1.863.366.547	Vehicles
Sewa guna usaha	2.181.900.940	473.151.919	--	--	2.655.052.859	Finance Lease
	<u>58.419.114.628</u>	<u>15.439.463.904</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>73.858.578.532</u>	
Nilai Buku	109.284.511.633				158.074.249.858	Book Value

Biaya penyusutan aset tetap yang telah dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.323.943.995 dan Rp15.439.463.904 (lihat Catatan 30).

Depreciation expenses of fixed assets charged to statement of comprehensive income for the years ended December 31, 2023 and 2022 are Rp16,323,943,995 and Rp15,439,463,904, respectively (see Note 30).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 termasuk aset tetap yang didasarkan pada prinsip perbankan Syariah masing-masing sebesar Rp1.220.823.238 dan Rp1.187.129.392.

Figures as of December 31, 2023 and 2022 include fixed assets under Sharia Banking Principles, amounting to Rp1,220,823,238 and Rp1,187,129,392, respectively.

Selama tahun 2023 belum dilakukan penghapusbukuan dan lelang atas aset tetap Bank.

During 2023 no write-off was made and no auction was carried out to the Bank's fixed assets.

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian dan bencana alam kepada PT Asuransi Bangun Askrida dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp115.080.869.112 dan Rp115.079.869.122 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungkan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan.

Bank has insured their property (not including land rights) to cover possible losses against fire, theft, and natural disasters to PT Asuransi Bangun Askrida with full insurance coverage as of December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp115,080,869,112 and Rp115,079,869,122, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the insured property. As of December 31, 2023 and 2022, there are no fixed assets pledged as collateral.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak ada komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap dan aset yang mengalami penurunan nilai. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat aset yang tidak dipakai untuk sementara.

As of December 31, 2023 and 2022 there is no contractual commitment in the acquisition of fixed assets and assets that have been impaired. Furthermore, on December 31, 2023 and 2022, there are no assets under construction and no assets are temporarily unused or idle.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud dalam PSAK 48 (revisi 2014) selama tahun berjalan, karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

11. FIXED ASSET (Continued)

Management believes that there is no impairment in the value of fixed assets owned by the Bank during the year as described in SFAS 48 (revised 2014), because management believes that the carrying amounts of fixed assets do not exceed the estimated recoverable amount.

12. ASET HAK GUNA**12. RIGHT-OF-USE ASSET**

31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Cost
Bangunan	2.752.192.930	1.198.525.555	--	3.950.718.485	Buildings
Mesin ATM	6.676.217.853	--	(1.761.077.550)	4.915.140.303	Automatic Teller Machines
Kendaraan bermotor	23.526.436.663	8.622.577.047	--	32.149.013.710	Vehicles
	<u>32.954.847.446</u>	<u>9.821.102.602</u>	<u>(1.761.077.550)</u>	<u>41.014.872.498</u>	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	1.519.418.632	--	(48.228.546)	1.471.190.086	Buildings
Mesin ATM	4.419.763.563	--	(1.041.952.275)	3.377.811.288	Automatic Teller Machines
Kendaraan bermotor	10.791.324.822	6.662.541.330	--	17.453.866.152	Vehicles
	<u>16.730.507.017</u>	<u>6.662.541.330</u>	<u>(1.090.180.821)</u>	<u>22.302.867.526</u>	
Nilai Buku	<u>16.224.340.429</u>			<u>18.712.004.972</u>	Book Value

31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Disposals	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Cost
Bangunan	2.695.815.256	56.377.674	--	2.752.192.930	Buildings
Mesin ATM	9.696.095.404	--	(3.019.877.551)	6.676.217.853	Automatic Teller Machines
Kendaraan bermotor	11.269.291.241	12.257.145.422	--	23.526.436.663	Vehicles
	<u>23.661.201.901</u>	<u>12.313.523.096</u>	<u>(3.019.877.551)</u>	<u>32.954.847.446</u>	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	1.324.582.360	194.836.272	--	1.519.418.632	Buildings
Mesin ATM	5.929.855.559	1.509.785.555	(3.019.877.551)	4.419.763.563	Automatic Teller Machines
Kendaraan bermotor	8.186.716.831	2.604.607.991	--	10.791.324.822	Vehicles
	<u>15.441.154.750</u>	<u>4.309.229.818</u>	<u>(3.019.877.551)</u>	<u>16.730.507.017</u>	
Nilai Buku	<u>8.220.047.151</u>			<u>16.224.340.429</u>	Book Value

Biaya penyusutan aset hak guna yang telah dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.662.541.330 dan Rp4.309.229.818 (lihat Catatan 30).

Depreciation expenses of right-of-use assets charged to statement of comprehensive income for the years ended December 31, 2023 and 2022 are Rp6,662,541,330 and Rp4,309,229,818, respectively (see Note 30).

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**13. ASET TAKBERWUJUD****13. INTANGIBLE ASSETS**

31 Desember 2023/ December 31, 2023					
	Saldo awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan				Cost	
Piranti Lunak	3.838.629.109	--	(154.000.000)	3.684.629.109	Software
Pengembangan piranti lunak	1.337.259.007	--	--	1.337.259.007	Software development
Hak Paten	170.500.000	--	--	170.500.000	License
	5.346.388.116	--	(154.000.000)	5.192.388.116	
Akumulasi Amortisasi				Accumulated Amortization	
Piranti Lunak	3.477.116.478	129.502.500	(154.000.000)	3.452.618.978	Software
Pengembangan piranti lunak	1.337.259.971	--	--	1.337.259.971	Software development
Hak Paten	170.500.000	--	--	170.500.000	License
	4.984.876.449	129.502.500	(154.000.000)	4.960.378.949	
Nilai Buku	361.511.667			232.009.167	Book Value

31 Desember 2022/ December 31, 2022					
	Saldo awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pelepasan/ <i>Disposals</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan				Cost	
Piranti Lunak	3.823.779.109	14.850.000	--	3.838.629.109	Software
Pengembangan piranti lunak	1.337.259.007	--	--	1.337.259.007	Software development
Hak Paten	170.500.000	--	--	170.500.000	License
	5.331.538.116	14.850.000	--	5.346.388.116	
Akumulasi Amortisasi				Accumulated Amortization	
Piranti Lunak	3.333.520.594	143.595.884	--	3.477.116.478	Software
Pengembangan piranti lunak	1.337.259.971	--	--	1.337.259.971	Software development
Hak Paten	170.500.000	--	--	170.500.000	License
	4.841.280.565	143.595.884	--	4.984.876.449	
Nilai Buku	490.257.551			361.511.667	Book Value

13. ASET TAKBERWUJUD**13. INTANGIBLE ASSETS**

Biaya amortisasi aset takberwujud yang telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp129.502.500 dan Rp143.595.884 (catatan 30).

Amortization expenses of intangible assets charged to statements of profit and loss and other comprehensive income for the years ended December 31, 2023 and 2022 are Rp129,502,500 and Rp143,595,884, respectively (note 30).

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**14. ASET LAIN-LAIN****14. OTHER ASSETS**

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Pendapatan yang masih akan diterima			<i>Accrued income</i>
Kredit	40.965.678.965	41.198.908.518	<i>Credit</i>
Efek-efek	23.704.790.929	18.241.574.978	<i>Marketable Securities</i>
Bagi hasil syariah	9.409.385.416	13.760.272.348	<i>Sharia Profit sharing</i>
Penempatan	68.333.333	--	<i>Placement</i>
Provisi	--	14.483.323	<i>Provisions</i>
	<u>74.148.188.643</u>	<u>73.215.239.167</u>	
Aset terbengkalai	632.051.282	743.589.743	<i>Abandoned property</i>
Aset yang diambil alih	3.053.166.763	3.053.166.763	<i>Foreclosed Collaterals</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(3.053.166.763)</u>	<u>(3.053.166.763)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>632.051.282</u>	<u>743.589.743</u>	
Beban ditangguhkan	1.399.400.300	2.988.767.750	<i>Deferred expenses</i>
Beban dibayar dimuka	17.659.761.146	2.026.284.026	<i>Prepaid expense</i>
Materai, perangko dan barang cetakan	4.763.333.063	2.976.665.762	<i>Stamp duties, stamps and printings</i>
Tagihan <i>Settlement</i>	4.811.301.295	6.415.726.683	<i>Settlement bill</i>
Aset pengampunan pajak	<u>109.526.467</u>	<u>131.353.667</u>	<i>Tax amnesty</i>
Jumlah	<u>103.523.562.196</u>	<u>88.497.626.798</u>	Total

Beban dibayar dimuka merupakan sewa gedung kantor kas yang terdapat di masing-masing Kantor Cabang Bank Jambi, sewa mesin ATM dan penempatan lokasi ATM, dan sewa mobil untuk keperluan kantor, persekot operasional, asuransi, dan fee kredit.

Prepaid expenses represent rent for cash office buildings located at each Jambi Bank Branch office, rent for ATM machines and placement of ATM locations, and car rental for office needs, operational details, insurance, and credit fees.

Beban yang ditangguhkan merupakan beban atas biaya jaringan telekomunikasi terkait *Core Banking System*. Beban ditangguhkan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus.

Deferred expenses represent telecommunication networks expenses related to Core Banking System. Deferred expenses are amortized using the straight-line method.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset lain-lain karena manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset lain-lain tidak melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Management believes that there is no impairment in the value of other assets since management believes that the carrying amounts of other assets do not exceed the estimated recoverable amount.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**15. SIMPANAN DARI NASABAH****15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS**

a. Berdasarkan segmen:

a. By Segment:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Konvensional			<i>Conventional</i>
Giro	2.165.087.568.368	3.317.329.986.230	<i>Current accounts</i>
Tabungan	1.969.591.098.489	2.069.981.762.565	<i>Savings</i>
Deposito	4.795.209.882.793	3.323.453.064.862	<i>Time deposits</i>
Sub jumlah	8.929.888.549.650	8.710.764.813.657	<i>Sub total</i>
Syariah			<i>Sharia</i>
Giro	126.679.250.660	105.484.140.515	<i>Current accounts</i>
Tabungan	40.590.996.194	41.871.029.802	<i>Savings</i>
Deposito	--	--	<i>Time deposits</i>
Sub jumlah	167.270.246.854	147.355.170.317	<i>Sub total</i>
Jumlah	9.097.158.796.504	8.858.119.983.974	Total

b. Transaksi dengan pihak tertentu:

b. Transactions with certain parties:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023			
	Pihak Ketiga/ Third parties	Pihak berelasi/ Related parties	Jumlah/ Total	
Giro				<i>Current accounts</i>
Pemerintah	952.544.242.384	794.708.449.013	1.747.252.691.397	<i>Government</i>
Perusahaan	478.943.336.348	26.615.728.158	505.559.064.506	<i>Corporate</i>
Koperasi/Yayasan	34.668.828.752	611.279.865	35.280.108.617	<i>Cooperative /Foundation</i>
Perseorangan	3.611.466.357	63.488.151	3.674.954.508	<i>Individual</i>
	1.469.767.873.841	821.998.945.187	2.291.766.819.028	
Tabungan				<i>Savings accounts</i>
Siginjai	1.499.186.074.239	23.366.534.226	1.522.552.608.465	<i>Siginjai</i>
Simpeda	370.653.133.274	2.131.814.375	372.784.947.649	<i>Simpeda</i>
TabunganKu	66.949.972.178	437.945.263	67.387.917.441	<i>TabunganKu</i>
Simpel	33.407.116.755	52.504.373	33.459.621.128	<i>Simpel</i>
Silah	13.992.000.000	5.000.000	13.997.000.000	<i>Silah</i>
	1.984.188.296.446	25.993.798.237	2.010.182.094.683	
Deposito				<i>Time deposits</i>
Perusahaan	2.335.374.387.789	1.980.028.000.000	4.315.402.387.789	<i>Corporate</i>
Perseorangan	419.827.545.499	3.850.961.937	423.678.507.436	<i>Individual</i>
Koperasi/Yayasan	20.222.056.985	--	20.222.056.985	<i>Cooperative /Foundation</i>
Pemerintah	4.006.930.583	31.900.000.000	35.906.930.583	<i>Government</i>
	2.779.430.920.856	2.015.778.961.937	4.795.209.882.793	
Jumlah	6.233.387.091.143	2.863.771.705.361	9.097.158.796.504	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**15. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan)****15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)**

b. Transaksi dengan pihak tertentu: (lanjutan)

b. Transactions with certain parties: (continued)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022			
	Pihak Ketiga/ Third parties	Pihak berelasi/ Related parties	Jumlah/ Total	
Giro				Current accounts
Perusahaan	548.132.087.933	14.695.486.738	562.827.574.671	Corporate
Pemerintah	942.152.040.798	1.858.856.656.445	2.801.008.697.243	Government
Koperasi/Yayasan	53.246.499.616	1.133.698.099	54.380.197.715	Cooperative /Foundation
Perseorangan	4.390.675.626	206.981.490	4.597.657.116	Individual
	1.547.921.303.973	1.874.892.822.772	3.422.814.126.745	
Tabungan				Savings accounts
Siginjai	1.604.263.944.533	24.742.314.904	1.629.006.259.437	Siginjai
Simpeda	375.430.229.747	3.205.916.222	378.636.145.969	Simpeda
TabunganKu	60.284.162.154	271.625.771	60.555.787.925	TabunganKu
Silah	31.903.627.363	--	31.903.627.363	Silah
Simpel	11.688.000.000	62.971.673	11.750.971.673	Simpel
	2.083.569.963.797	28.282.828.570	2.111.852.792.367	
Deposito				Time deposits
Perusahaan	1.512.943.915.917	1.317.000.000.000	2.829.943.915.917	Corporate
Perseorangan	382.403.161.377	12.088.000.000	394.491.161.377	Individual
Koperasi/Yayasan	33.837.056.985	61.174.000.000	95.011.056.985	Cooperative /Foundation
Pemerintah	4.006.930.583	--	4.006.930.583	Government
	1.933.191.064.862	1.390.262.000.000	3.323.453.064.862	
Jumlah	5.564.682.332.632	3.293.437.651.342	8.858.119.983.974	Total

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan
jangka waktu adalah sebagai berikut:Time deposits classification by term of period
is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
1 bulan	2.742.183.307.668	2.926.455.104.737	1 month
3 bulan	477.960.015.420	310.353.515.420	3 months
6 bulan	33.671.344.190	38.909.229.190	6 months
12 bulan	1.541.395.215.515	47.735.215.515	12 months
Jumlah	4.795.209.882.793	3.323.453.064.862	Total

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jatuh
tempo adalah sebagai berikut:Time deposits classification by maturity is as
follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Kurang dari 1 bulan	1.451.021.223.546	2.925.519.423.478	Less than 1 month
Lebih dari 1 - 3 bulan	1.409.896.685.805	311.399.196.680	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	406.162.259.457	38.804.229.190	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 - 12 bulan	1.528.129.713.985	47.730.215.514	More than 6 - 12 months
Jumlah	4.795.209.882.793	3.323.453.064.862	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**15. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan)****15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)****b. Transaksi dengan pihak tertentu: (lanjutan)****b. Transactions with certain parties: (continued)**

Tingkat bunga:

The interest rates:

Jumlah deposito yang diblokir yang dijadikan sebagai agunan kredit yang diberikan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar nihil.

The amount of blocked time deposits pledged as collateral to loans granted as of December 31, 2023 and 2022 is nil, respectively.

Giro yang diblokir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp613.539.400 dan Rp729.519.400.

Blocked current accounts as of December 31, 2023 and 2022 are amounting to Rp613,539,400 and Rp729,519,400, respectively.

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Giro			Current accounts
			Regional Treasury and Government
Kasda dan Pemerintah Swasta	0,50% - 2,25% 0,00% - 2,25%	0,25% - 2,10% 0,00% - 2,00%	Private
Tabungan			Savings
Simpeda	0,00% - 0,85%	0,00% - 1,85%	Simpeda
Siginjai	0,00% - 1,75%	0,00% - 1,85%	Siginjai
TabunganKu	0,00% - 1,75%	0,00% - 1,00%	TabunganKu
Simpel	--	--	Simpel
Deposito			Time Deposits
1 bulan	3,50% - 10,75%	3,50% - 3,50%	1 month
3 bulan	3,50% - 8,00%	3,50% - 3,50%	3 months
6 bulan	3,50% - 6,50%	3,50% - 3,50%	6 months
12 bulan	3,50% - 7,50%	3,50% - 3,50%	12 months

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 Desember 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Desember 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Under Law No. 24 dated December 22, 2004, effective as of December 22, 2005, as amended with Government Regulation in lieu of Law No. 3 dated October 13, 2008, the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the specified criteria.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

As of December 31, 2023 and 2022, Bank is a participant of such guarantee program.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**15. SIMPANAN DARI NASABAH (Lanjutan)****15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (Continued)**

c. Dana syirkah temporer:

a. Temporary syirkah funds:

Berdasarkan dengan pihak tertentu:

Transactions with certain parties:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023			
	Pihak Ketiga/ Third parties	Pihak berelasi/ Related parties	Jumlah/ Total	
Giro	27.353.831.369	1.532.161	27.355.363.530	Current accounts
Tabungan	85.264.623.786	2.758.191.567	88.022.815.353	Savings accounts
Deposito	634.000.301.630	8.544.786.825	642.545.088.455	Time deposits
SIMA	200.000.000.000	--	200.000.000.000	SIMA
Jumlah	946.618.756.785	11.304.510.553	957.923.267.338	Total

	31 Desember 2022/ December 31, 2022			
	Pihak Ketiga/ Third parties	Pihak berelasi/ Related parties	Jumlah/ Total	
Giro	36.901.389.577	33.089.298	36.934.478.875	Current accounts
Tabungan	99.846.204.007	2.279.639.616	102.125.843.623	Savings accounts
Deposito	652.188.415.603	23.963.000.000	676.151.415.603	Time deposits
SIMA	300.000.000.000	--	300.000.000.000	SIMA
Jumlah	1.088.936.009.187	26.275.728.914	1.115.211.738.101	Total

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan
jangka waktu adalah sebagai berikut:Time deposits classification by term of period
is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
1 bulan	600.390.420.653	617.204.155.603	1 month
3 bulan	6.080.000.000	19.802.500.000	3 months
6 bulan	2.420.000.000	1.500.000.000	6 months
12 bulan	33.654.667.802	37.644.760.000	12 months
Jumlah	642.545.088.455	676.151.415.603	Total

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan jatuh
tempo adalah sebagai berikut:Time deposits classification by maturity is as
follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Kurang dari 1 bulan	605.095.420.654	617.204.155.603	Less than 1 month
Lebih dari 1 - 3 bulan	9.599.500.000	19.802.500.000	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 6 bulan	6.521.000.000	1.500.000.000	More than 3 - 6 months
Lebih dari 6 - 12 bulan	21.329.167.801	37.644.760.000	More than 6 - 12 months
Jumlah	642.545.088.455	676.151.415.603	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**16. SIMPANAN DARI BANK LAIN**

a. Berdasarkan segmen:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Konvensional			Conventional
Call money	840.000.000.000	342.000.000.000	Call money
Giro	13.133.691.784	17.033.666.979	Current accounts
Deposito	1.750.000.000	1.500.000.000	Time deposits
Tabungan	1.552.794.738	2.676.672.128	Saving accounts
Jumlah	856.436.486.522	363.210.339.107	Total

b. Berdasarkan jenis

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Giro			Current accounts
Bank pengkreditan rakyat	13.108.173.230	16.883.778.242	Private bank
Bank pemerintah	13.114.509	140.205.352	Private bank
Bank swasta	12.404.045	9.683.385	Private bank
Sub Jumlah	13.133.691.784	17.033.666.979	Sub Total
Tabungan			Saving accounts
Bank swasta	1.552.794.738	2.676.672.128	Private bank
Sub jumlah	1.552.794.738	2.676.672.128	Sub Total
Interbank call money			Interbank call money
Bank pemerintah	760.000.000.000	242.000.000.000	Government bank
Bank swasta	80.000.000.000	100.000.000.000	Private bank
Sub jumlah	840.000.000.000	342.000.000.000	Sub Total
Deposito Berjangka			Time Deposits
Bank swasta	1.750.000.000	1.500.000.000	Private bank
Sub jumlah	1.750.000.000	1.500.000.000	Sub Total
Jumlah - Bersih	856.436.486.522	363.210.339.107	Total - Net

Tingkat bunga:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Giro	0,00% - 2,00%	0,00% - 2,00%	Current accounts
Tabungan	0,00% - 1,85%	0,00% - 1,85%	Saving accounts
Interbank call money	5,90% - 6,28%	4,95% - 5,85%	Interbank call money
Deposito berjangka	3,50% - 3,50%	3,50% - 3,50%	Time deposits

Tidak ada saldo simpanan dari bank lain yang diblokir
atau dijadikan jaminan per 31 Desember 2023 dan
2022.No deposits from other banks is blocked or pledged
as collateral as of December 31, 2023 and 2022.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**17. LIABILITAS SEGERA**

	31 Desember / December 31, 2023
Rekening Titipan	191.738.136.058
ATM Bersama	40.976.698.580
Bunga	24.461.015.869
Setoran jaminan	5.232.510.086
Kiriman uang	1.772.900
Liabilitas kepada Kas Negara	609.609.238
Jumlah	263.019.742.731

Rincian bunga yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023
Deposito	23.644.895.826
Pinjaman yang diterima	814.410.225
Tabungan	1.709.818
Jumlah	24.461.015.869

Rekening titipan merupakan hasil dari uang titipan yang diterima Bank atas transaksi pembayaran dari nasabah yang akan disetorkan pihak bank ke rekening tujuan.

Liabilitas kepada Kantor Bendahara dan Kas Negara merupakan hasil penerimaan pajak dari para wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan yang diterima Bank sebagai bank persepsi.

Kiriman uang digunakan untuk membukukan setoran transfer sebelum mengkredit atau mendebet rekening nasabah.

17. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

	31 Desember / December 31, 2022
	197.675.831.167
	35.515.755.732
	22.842.365.209
	5.810.074.392
	1.770.000
	361.729.768
Total	262.207.526.268

*Accounts not yet settled
ATM Bersama
Interest
Matured security deposits
Money transfers
Liabilities to the State Treasury*

Details of accrued interest income as of December 31, 2023 and 2022 are as follows :

	31 Desember / December 31, 2022
	22.694.594.492
	145.946.756
	1.823.961
Total	22.842.365.209

*Time deposits
Borrowings
Saving accounts*

Accounts not yet settled are payment transactions received from customers by the Bank and subsidiaries as collecting bank before deposited to destination accounts.

Liabilities to Treasury and State Treasury Office is the result of receipt from both individuals and corporate taxpayers received by the Bank as a perception bank.

Money transfers are used to record deposit transfers before credited to or debited from destination accounts.

18. PINJAMAN YANG DITERIMA

	31 Desember / December 31, 2023
PT Sarana Multigriya Finansial	--
Jumlah	--

18. BORROWINGS

	31 Desember / December 31, 2022
	11.000.000.000
Total	11.000.000.000

*PT Sarana Multigriya
Finansial
Total*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**18. PINJAMAN YANG DITERIMA (Lanjutan)****a. PT Sarana Multigriya Finansial**

Merupakan dana yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial, dimana liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman No.139/PP/SMF-BPD.JAMBI/VII/2021 dan salinan akta No.74 tanggal 29 September 2021 tentang Pemberian Kredit *Non Revolving*.

Pada 29 Juli 2022 dilakukan addendum atas perjanjian pemberian fasilitas pinjaman dengan nomor perjanjian 185/ADD/PP/SMF-BPD.JAMBI/VII/2022. Pinjaman yang diterima diakui sebesar fasilitas pembiayaan sejumlah Rp11.000.000.000 dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung dari tanggal pelaksanaan pencairan fasilitas pembiayaan. Bunga yang disepakati sebesar 4,50% untuk pinjaman. Sampai dengan tanggal 29 Juli 2023.

Fasilitas Pembiayaan digunakan sebagai sumber pendanaan atas KPR yang telah disalurkan oleh Bank Jambi. Bank telah melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 28 Juli 2023.

18. BORROWINGS (Continued)**a. PT Sarana Multigriya Finansial**

Represents funds received from PT Sarana Multigriya Finansial, where the repayment obligation is in accordance with the Loan Facility Provision Agreement No.139/PP/SMF-BPD.JAMBI/VII/2021 and a copy of deed No.74 dated September 29, 2021 concerning Non Revolving Loans .

On July 29, 2022, an addendum to the loan facility agreement was made with the agreement number 185/ADD/PP/SMF-BPD.JAMBI/VII/2022. The borrowing is recognized at the amount of the financing facility amounting to Rp11,000,000,000 with a term of 24 (twenty four) months, starting from the date of disbursement of the financing facility. The agreed interest is 4.50% for the loan. As of July 29, 2023.

The Financing Facility is used as a source of funding for mortgages that have been distributed by Bank Jambi. The Bank has repaid the loan on July 28, 2023.

19. IMBALAN KERJA KARYAWAN**19. EMPLOYEE BENEFIT**

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Jasa produksi	65.624.875	662.721.488	
Imbalan kerja	25.212.494.736	24.692.346.673	Bonus Employee benefit
Jumlah	25.278.119.611	25.355.068.161	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**19. IMBALAN KERJA KARYAWAN (Lanjutan)****19. EMPLOYEE BENEFIT (Continued)****a. Jasa Produksi****a. Bonus**

Perubahan jasa produksi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Changes in bonus as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Saldo awal	662.721.488	3.538.417.140	<i>Beginning balance</i>
Pembentukan dari laba bersih tahun berjalan (catatan 29)	90.315.624.875	85.662.721.488	<i>Addition during the year (note 29)</i>
Realisasi tahun berjalan	<u>(90.912.721.488)</u>	<u>(88.538.417.140)</u>	<i>Realization for the year</i>
Saldo akhir	<u>65.624.875</u>	<u>662.721.488</u>	<i>Ending balance</i>

Jasa Produksi untuk tahun buku 2023 telah dicadangkan dan dibayarkan keseluruhan pada bulan Desember 2023. Kekurangan dan kelebihan atas pembayaran jasa produksi akan disesuaikan dengan laba bersih setelah diaudit.

Bonuses for the 2023 financial year have been reserved and paid out in full in December 2023. Any excess of bonus payments will be adjusted to net income after being audited.

b. Imbalan kerja**b. Employee benefit**

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada karyawannya yang memenuhi syarat yaitu program pensiun manfaat pasti.

The Bank provides long-term benefits and post-employment benefits to all eligible employees under defined benefit plan.

Penilaian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja dihitung oleh aktuarial independen (KKA Agus Susanto) dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Perhitungan aktuarial untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing diperoleh dari laporan aktuarial masing-masing pada tanggal 8 Januari 2024 dan 30 Desember 2022.

The actuarial calculation of the long-term benefits and post-employment benefits was performed by an independent actuary (Agus Susanto, FSAI) using the projected unit credit method. The actuarial computation for the years ended December 31, 2023 and 2022 is presented in the actuarial reports dated January 8, 2024 and December 30, 2022, respectively.

Program Pensiun**Defined Benefit Pension Plan**

Program pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi. Iuran pensiun ditetapkan 25% dari gaji karyawan. Kontribusi pegawai adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut dikontribusi oleh Bank sebesar 20%.

The Bank's defined benefit pension plan is managed by Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi. The contribution is 25% of the employee's salary. The employee contribution is 5% of the employee's pension basic salary and the remaining amount required to fund the plan is contributed by the Bank at 20%.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**19. IMBALAN KERJA KARYAWAN (Lanjutan)****19. EMPLOYEE BENEFIT (Continued)****b. Imbalan kerja (lanjutan)****b. Employee benefit (continued)****Program Pensiun (lanjutan)****Defined Benefit Pension Plan (continued)**

Program dana pensiun iuran pasti yang terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.16 tanggal 27 Pebruari 2007 tentang peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Pembangunan Daerah Jambi yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-161/KM.10/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pengesahan atas peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Pembangunan Daerah Jambi.

The latest defined benefit pension plan regulation as stipulated in Director Decision Letter No. 16 dated February 27, 2007 has been approved by the Minister of Finance under Decree No.Kep-161/KM.10/2007 dated August 10, 2007, regarding the ratification of the regulation of the Pension Fund from Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Program pengabdian dan pesangon**Service and Severance Payment Program**

Liabilitas atas imbalan kerja jangka panjang lainnya meliputi uang jasa, uang pindah dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No.13/2003 dan kompensasi lainnya.

The liability for other long-term employee benefits consist of service payments, severance and termination benefits based on Labor Law No. 13/2003 and other compensations.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian, perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial dan perubahan dalam program diakui seluruhnya dalam laba komprehensif lain.

Actuarial gains and losses arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja:

Remeasurement of net employee benefit liabilities:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Nilai Kini Kewajiban awal tahun	4.080.127.322	2.494.506.674	Value of Funded Obligations at beginning of year
(Keuntungan) Kerugian aktuarial	(1.318.420.056)	1.585.620.648	Actuarial (gain) loss
(Keuntungan) Kerugian Bersih Aktuarial yang Diakui	2.761.707.266	4.080.127.322	Recognized Actuarial (Gain) Loss
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:			Expenses recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Biaya Jasa Kini	9.581.596.452	9.035.045.119	Current service cost
Biaya Bunga	1.429.194.013	1.421.951.816	Interest cost
Jumlah	11.010.790.465	10.456.996.935	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**19. IMBALAN KERJA KARYAWAN (Lanjutan)****19. EMPLOYEE BENEFIT (Continued)****b. Imbalan kerja (lanjutan)****b. Employee benefit (continued)****Program pengabdian dan pesangon (lanjutan)****Service and Severance Payment Program (continued)**

Mutasi atas nilai kini kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Changes in present value of estimated liabilities for employee benefits are as follows:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Nilai Kini Kewajiban awal tahun	24.692.346.673	20.407.803.987	Value of Funded Obligations at beginning of year
Biaya Jasa Kini	9.581.596.452	9.035.045.119	Current Service Cost
Biaya Bunga	1.429.194.913	1.421.951.816	Interest Expenses
Iuran Pemberi Kerja	(7.414.904.726)	(7.125.228.186)	Employer Contributions
Pembayaran Manfaat	(1.385.456.452)	(1.080.073.048)	Benefits Payments
Kerugian (Keuntungan) Bersih Aktuarial yang Diakui	(1.690.282.124)	2.032.846.985	Recognized Actuarial Loss (Gain)
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Bersih Aktuarial yang Diakui	25.212.494.736	24.692.346.673	Total Recognized Actuarial Gain (Loss)

Liabilitas imbalan kerja ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan asumsi sebagai berikut:The employee benefit liabilities are determined using the *Projected Unit Credit* method with the following assumptions:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Tingkat suku bunga Aset	6,90% per tahun/ per year	7,30% per tahun/ per year	Annual interest rate Assets
Liabilitas	6,90% per tahun/ per year	7,30% per tahun/ per year	Liability
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	5,00% per tahun/ per year	5,00% per tahun/ per year	Annual salary growth rate
Tingkat mortalitas	GAM - 1971 0,025% per tahun/ per year	GAM - 1971 0,025% per tahun/ per year	Mortality rate
Tingkat cacat			Disability rate
Tingkat pengunduran diri per tahun	0,10% per tahun/ per year	0,10% per tahun/ per year	Resignation rate
Usia 18 - 44 tahun	0,10% per tahun/ per year	0,10% per tahun/ per year	18 - 44 years old
Usia 45 - 55 tahun	1,00% per tahun/ per year	1,00% per tahun/ per year	45 - 55 years old
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun	Normal retirement age

Rincian nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja sebagai berikut:

Details of present value of post-employment benefit liabilities are as follows:

	2023	2022	2021	2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan	25.212.494.736	24.692.346.673	20.407.803.987	44.411.065.829	27.903.647.839	Present value of benefit liabilities

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**20. LIABILITAS LAIN-LAIN**

	31 Desember / December 31, 2023
Sewa Guna Usaha	22.000.777.798
Cadangan Dana CSR	13.583.144.954
Pendapatan ditangguhkan	4.447.793.284
Setoran jaminan	1.524.211.934
Beban yang masih harus dibayar	1.069.968.113
Biaya kantor lainnya	920.199.797
Lain-lain	1.248.609.216
Jumlah	44.794.705.096

Sewa guna usaha merupakan sewa yang dilakukan oleh Bank yang terdiri dari sewa mesin ATM, kendaraan dan sewa gedung kantor.

Pendapatan ditangguhkan merupakan provisi kredit yang belum bisa diidentifikasi.

Beban yang masih harus dibayar merupakan antisipasi, premi penjaminan LPS, dan biaya kantor lainnya.

20. OTHER LIABILITIES

31 Desember / December 31, 2022
21.790.209.256
13.464.903.191
3.977.853.118
1.902.189.348
603.374.239
251.549.018
1.048.883.648
43.038.961.818

*Finance lease
CSR fund reserves
Deferred income
Guarantee deposit
Accrued expenses
Other office expenses
Others*

Total

Leasing is a lease made by the Bank, which consists of renting ATM machines, vehicles and leasing office buildings.

Deferred income is a credit provision that cannot be identified.

Accrued expenses represent anticipated expenses, LPS insurance premiums, and other office expenses.

21. MODAL SAHAM

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

21. SHARE CAPITAL

As of December 31, 2023 and 2022, the composition of the Bank's shareholders is as follows:

Pemegang Saham	31 Desember 2023/ December 31, 2023			Shareholders
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Jumlah dalam Rupiah/ Amount in Rupiah	
Saham Seri A				<i>A Series Shares</i>
Pemerintah Provinsi Jambi	198.364	22.38%	198.364.000.000	<i>Provincial Government Jambi</i>
Pemerintah Kota	198.364	22.38%	198.364.000.000	<i>Municipal Government</i>
Sungai Penuh	67.500	7.62%	67.500.000.000	<i>Sungai Penuh</i>
Jambi	65.000	7.33%	65.000.000.000	<i>Jambi</i>
Pemerintah Kabupaten	132.500	14.95%	132.500.000.000	<i>Regency Government</i>
Batanghari	69.892	7.89%	69.892.000.000	<i>Batanghari</i>
Tanjung Jabung Barat	64.121	7.24%	64.121.000.000	<i>Tanjung Jabung Barat</i>
Muara Bungo	63.774	7.20%	63.774.000.000	<i>Muara Bungo</i>
Muara Tebo	61.389	6.93%	61.389.000.000	<i>Muara Tebo</i>
Sarolangun	58.617	6.61%	58.617.000.000	<i>Sarolangun</i>
Kerinci	56.000	6.32%	56.000.000.000	<i>Kerinci</i>
Tanjung Jabung Timur	56.000	6.32%	56.000.000.000	<i>Tanjung Jabung Timur</i>
Merangin	43.500	4.91%	43.500.000.000	<i>Merangin</i>
Muara Jambi	43.164	4.87%	43.164.000.000	<i>Muara Bungo</i>
	516.457	58.29%	516.457.000.000	
Saham Seri B				<i>B Series Shares</i>
Yayasan Kesejahteraan Pegawai	64.000	3.61%	32.000.000.000	<i>Yayasan Kesejahteraan Pegawai</i>
Koperasi Karyawan Bank Jambi	13.771	0.78%	6.885.500.000	<i>Cooperatives of Employees of Bank Jambi</i>
	77.771	4.39%	38.885.500.000	
Jumlah	925.092	100%	886.206.500.000	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**21. MODAL SAHAM (Lanjutan)****21. SHARE CAPITAL (Continued)**

Pemegang Saham	31 Desember 2022/ December 31, 2022			Shareholders
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Jumlah dalam Rupiah/ Amount in Rupiah	
Saham Seri A				A Series Shares
Pemerintah Provinsi Jambi	173.364	22.02%	173.364.000.000	Provincial Government Jambi
	173.364	22.02%	173.364.000.000	
Pemerintah Kota				Municipal Government
Sungai Penuh	67.500	8.57%	67.500.000.000	Sungai Penuh
Jambi	60.000	7.62%	60.000.000.000	Jambi
	127.500	16.18%	127.500.000.000	
Pemerintah Kabupaten				Regency Government
Batanghari	64.055	8.14%	64.055.000.000	Batanghari
Tanjung Jabung Barat	64.121	8.15%	64.121.000.000	Tanjung Jabung Barat
Kerinci	56.000	7.11%	56.000.000.000	Kerinci
Sarolangun	50.000	6.35%	50.000.000.000	Sarolangun
Muara Tebo	59.999	7.62%	59.999.000.000	Muara Tebo
Tanjung Jabung Timur	50.000	6.35%	50.000.000.000	Tanjung Jabung Timur
Muaro Jambi	38.164	4.85%	38.164.000.000	Muaro Jambi
Merangin	41.000	5.21%	41.000.000.000	Merangin
Muara Bungo	58.774	7.47%	58.774.000.000	Muara Bungo
	482.113	61.26%	482.113.000.000	
Saham Seri B				B Series Shares
Koperasi Karyawan Bank				Cooperatives of Employees of
Jambi	8.441	0.54%	4.220.500.000	Bank Jambi
	8.441	0.54%	4.220.500.000	
Jumlah	791.418	100,00%	787.197.500.000	Total

Penambahan modal saham Seri A dan B dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pengesahan Setoran modal sebesar Rp66.892.000.000 dari 5 (lima) pemegang saham yang dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No.23 tanggal 29 Januari 2023.
- Pengesahan Setoran modal sebesar Rp11.000.000.000 dari 2 (dua) pemegang saham yang dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No.06 tanggal 06 Juni 2023.
- Pengesahan Setoran modal sebesar Rp16.117.000.000 dari 3 (tiga) pemegang saham yang dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No.43 tanggal 21 September 2023.
- Pengesahan Setoran modal sebesar Rp5.000.000.000 dari 1 (satu) pemegang saham yang dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No.07 tanggal 03 November 2023.

The increase of A Series and B Series share capital in 2023 is as follow:

- Approval of Share capital injection amounting to Rp66,892,000,000 from 5 (five) shareholders as stipulated in Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 23 dated January 29, 2023.
- Approval of Share capital injection amounting to Rp11,000,000,000 from 2 (two) shareholders as stipulated in Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 06 dated June 06, 2023.
- Approval of Share capital injection amounting to Rp16,117,000,000 from 3 (three) shareholders as stipulated in Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 43 dated September 21, 2023.
- Approval of Share capital injection amounting to Rp5,000,000,000 from 1 (one) shareholder as stipulated in Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 07 dated November 03, 2023

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**21. MODAL SAHAM (Lanjutan)**

Penambahan modal saham Seri A dan B dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Penambahan modal saham tersebut telah dicatat perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Surat No.AHU-AH.01.03-0140405 dengan daftar perseroan No.AHU-00226911.AH.01.11 Tahun 2023 Tanggal 10 November 2023 sehingga pada tanggal 31 Desember 2023 modal disetor Bank Jambi menjadi Rp886.206.500.000.

Penambahan modal saham Seri A dan Seri B dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Pengesahan Setoran modal sebesar Rp4.121.000.000 dari 1 (satu) pemegang saham yang dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No.82 tanggal 24 April 2022.
- Pengesahan Setoran modal sebesar Rp12.260.000.000 dari 2 (dua) pemegang saham yang dituangkan dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 54 tanggal 21 November 2022.
- Penambahan modal saham tersebut telah dicatat perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Surat No.AHU-AH.01.03-0235408 dengan daftar perseroan No.AHU-0087496.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 10 Mei 2022 dan No.AHU-AH.01.03-0320663 dengan daftar perseroan No.AHU-0242853.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 2 Desember 2022 sehingga pada tanggal 31 Desember 2022 modal disetor Bank Jambi menjadi Rp787.197.500.000.

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 31 Desember 2023 tambahan modal disetor sebesar Rp14.640.242.736 yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten Muaro Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan lainnya.

21. SHARE CAPITAL (Continued)

The increase of Series A and B share capital in 2023 is as follow: (continued)

- *The increase of share capital has been recorded as amendment by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia under letters No.AHU-AH.01.03-0140405 with company register No. AHU-00226911.AH.01.11 of 2023 dated November 10, 2023, therefore, as of December 31, 2023 Bank Jambi's paid-up capital is amounting to Rp886,206,500,000.*

The increase of A Series and B Series share capital in 2022 is as follows:

- *Approval of Share capital injection amounting to Rp4,121,000,000 from 1 (one) shareholder as stipulated in Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 82 dated April 24, 2022.*
- *Approval of Share capital injection amounting to Rp12,260,000,000 from 2 (two) shareholders as stipulated in Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders, of the Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, No. 54 dated November 21, 2022.*
- *The increase of share capital has been recorded by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia under letters No.AHU-AH.01.03-0235408 with company register No. AHU-0087496.AH.01.11 Tahun 2022 dated May 10, 2022, and No.AHU-AH.01.03-0320663 with company register No.AHU-0242853.AH.01.11 Tahun 2022 dated December 2, 2022; therefore, as of December 31, 2022 Bank Jambi's paid-up capital is amounting to Rp787,197,500,000.*

22. OTHER PAID-IN CAPITAL

On December 31, 2023, other paid-in capital was made in the amount of Rp14,640,242,736 consisting of the Provincial Government, the District Government of Muaro Bungo, Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Sarolangun, etc.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Saldo tambahan modal disetor periode 31 Desember 2023, jika ditambah dengan modal setor yang telah disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dicatat dalam akta Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H, M.Kn, No.07 tanggal 03 November 2023 adalah sebesar Rp900.846.742.736.

Pada tanggal 31 Desember 2022 tambahan modal disetor sebesar Rp32.818.559.736 yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Tebo dan lainnya.

22. OTHER PAID-IN CAPITAL

The balance of other paid-in capital for the period December 31, 2023, if added to the paid-in capital which has been ratified at the Extraordinary General Meeting of Shareholders, as stipulated in the deed of Notary Firdaus Abu Bakar, S.H, M.Kn, No.07 dated November 03, 2023 is Rp900,846,742,736.

On December 31, 2022, other paid-in capital was made in the amount of Rp32,818,559,736 consisting of the District Government of Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, etc.

23. PENGAMPUNAN PAJAK

Bank Jambi telah memanfaatkan program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Bank Jambi telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak / Surat Pernyataan Harta (SPHPP) pada tanggal 21 Desember 2016 dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak/ Surat Keterangan (SKPP) dengan No.KET-199/PP/WPJ.27/2017 tertanggal 04 Januari 2017 sebesar Rp587.500.000.

Berdasarkan SPHPP dan SKPP, Bank Jambi mendeklasifikasi aset pengampunan pajak sebesar Rp718.772.000 dengan uang tebusan (jumlah yang dibayar sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak) sebesar Rp21.563.160.

23. TAX AMNESTY

Bank Jambi has been utilizing the Tax Amnesty program as stipulated in Law No. 11 of 2016 regarding Tax Amnesty.

Bank Jambi filed an Assets Declaration Letter for Tax Amnesty/Assets Declaration Letter (SPHPP) on December 21, 2016 and has obtained a Certificate of Tax Amnesty/(SKPP) Certificate of Tax Amnesty (SKPP) No.KET-199/PP/WPJ.27/2017 dated January 4, 2017 amounting to Rp587,500,000.

Based on the SPHPP and SKPP, Bank Jambi declared tax amnesty assets amounting to Rp718,772,000 with redemption value (the amount paid in accordance with the Law of Tax Amnesty) amounting to Rp21,563,160.

24. PENGGUNAAN LABA BERSIH**a. Cadangan**

	31 Desember / December 31, 2023
Cadangan umum	1.197.266.876.294
Cadangan bertujuan	28.828.888.918
Jumlah	1.226.095.765.212

24. APPROPRIATION OF NET INCOME**a. Reserves**

	31 Desember / December 31, 2022	
	1.017.158.823.959	General reserves
	3.828.888.918	Purposed reserves
Total	1.020.987.712.877	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PENGGUNAAN LABA BERSIH (lanjutan)**a. Cadangan (lanjutan)**

Perubahan cadangan umum pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023
Saldo awal	1.017.158.823.959
Pembentukan cadangan	180.108.052.335
Saldo akhir	1.197.266.876.294

Cadangan ini dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cadangan umum pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.197.266.876.294 dan Rp1.017.158.823.959. Cadangan terakhir dibentuk berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Akta Notaris No.23 tanggal 29 Januari 2023 dihadapan Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, di Jambi.

b. Dividen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No.23 tanggal 29 Januari 2023 dari Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, di Jambi, para pemegang saham menyetujui pembagian laba bersih tahun buku 2022 sebesar Rp342.650.885.952 dengan alokasi untuk dividen sebesar 43,30% setelah dikurangi untuk pencadangan pembangunan 3 (tiga) gedung kantor cabang sebesar Rp25.000.000.000 sehingga dividen yang dibagi sebesar Rp137.542.833.617.

c. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya

Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya merupakan akumulasi dari laba yang belum dibagikan (didistribusikan) dan menunggu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp361.262.499.501 dan Rp342.650.885.952.

24. APPROPRIATION OF NET INCOME (continued)**a. Reserves (continued)**

Changes in general reserves as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember / December 31, 2022	
	730.491.232.881	<i>Beginning balance</i>
	286.667.591.078	<i>Provision of reserves</i>
1.017.158.823.959		<i>Ending balance</i>

This reserve is arising from net profit after income tax which has been approved in the General Meeting of Shareholders in accordance with the prevailing regulations.

The balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp1,197,266,976,294 and Rp1,017,158,823,959, respectively. The latest reserve is formed under Notarial Deed of Minutes of General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No.23, dated January 29, 2023 of Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, notary in Jambi.

b. Dividend

Based on the General Meeting of Shareholders of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No.23 dated January 29, 2023 of Notary Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn, in Jambi, the shareholders approved the distribution of 2022 net profit of Rp342,650,885,952 with the allocation for dividends of 43.30% after deducting a allowance for the construction of 3 (three) branch office buildings amounting to Rp25,000,000,000, so as the dividend distributed is Rp137,542,833,617.

c. Retained earnings that have not been specified for use

Retained earnings that have not been specified for use represent the accumulation of profits that have not been distributed and waiting for the decision of the General Meeting of Shareholders. Retained earnings that have not been specified for use as of December 31, 2023 and 2022 are Rp361,262,499,501 and Rp342.650.885.952, respectively.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**25. PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA**

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Aset keuangan tersedia untuk dijual			Financial assets available for sale
Saldo awal	(45.926.051.603)	10.121.272.060	Beginning balance
Kenaikan (penurunan) periode berjalan	53.297.643.299	(71.855.543.158)	Increase (decrease) for the current period
Pajak-pajak terkait	(11.725.481.580)	15.808.219.495	Taxes
Jumlah	(4.353.889.884)	(45.926.051.603)	Total
Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja			Actuarial Gain (Loss) for Employee Benefits Plan
Saldo awal	(4.080.127.322)	(2.494.506.674)	Beginning balance
Keuntungan (kerugian) periode berjalan	1.690.282.124	(2.032.846.985)	Gain (Loss) for the current period
Pajak-pajak terkait	(371.862.068)	447.226.337	Taxes
Jumlah	(2.761.707.266)	(4.080.127.322)	Total

26. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Konvensional			Conventional
Kredit yang diberikan	945.339.427.507	923.459.078.996	Loans
Efek-efek	131.938.065.256	115.697.894.549	Marketable Securities
Penempatan pada Bank	12.061.525.286	11.180.508.424	Placement in Bank
	1.089.339.018.049	1.050.337.481.969	
Syariah			Sharia
Margin dan Bagi hasil	60.142.124.537	59.078.592.160	Margin and profit sharing
Efek-efek	5.824.831.940	47.116.638.516	Marketable Securities
Penempatan pada Bank	1.315.015.068	464.968.741	Placement in Bank
	67.281.971.545	106.660.199.417	
Jumlah	1.156.620.989.594	1.156.997.681.386	Total

a. Pendapatan bunga kredit

a. Loan interest incomes

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Kredit Konsumsi	823.457.359.964	834.367.101.885	Consumption loans
Kredit Investasi	94.776.318.791	74.477.741.602	Investment loans
Kredit Modal kerja	27.105.748.752	14.614.235.509	Working capital loans
Jumlah	945.339.427.507	923.459.078.996	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**26. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH
(Lanjutan)****26. INTEREST INCOME AND SHARIA (Continued)****b. Efek-efek Konvensional dan Syariah****b. Conventional and Sharia Marketable Securities**

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Surat Berharga	134.652.913.342	159.329.449.732	Marketable securities
Reksadana	2.618.613.992	--	Mutual Fund
Medium Term Notes	491.369.862	3.485.083.333	Medium Term Notes
Jumlah	137.762.897.196	162.814.533.065	Total

c. Penempatan pada Bank Konvensional dan Syariah**c. Placement in Conventional and Sharia Banks**

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Bank Indonesia	12.072.731.411	8.831.378.026	Banks Indonesia
Bank Lain	1.303.808.943	2.814.099.139	Other Bank
Jumlah	13.376.540.354	11.645.477.165	Total

d. Margin dan Bagi hasil**d. Margin and profit sharing**

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Murabahah Konsumsi	48.151.372.121	47.383.458.595	Consumption Murabahah
Musyarakah Modal Kerja	3.143.913.975	1.567.335.033	Working Capital Musyarakah
Murabahah Investasi	1.308.408.692	992.578.281	Investment Murabahah
Murabahah Modal Kerja	219.597.550	237.215.958	Working Capital Murabahah
Musyarakah MMQ	6.693.588.027	5.234.956.840	MMQ Musyarakah
Murabahah Karyawan	328.816.250	255.910.000	Official Murabahah
Murabahah BSB	498.601.943	3.154.840.537	BSB Murabahah
Murabahah KPR IB	99.365.000	141.775.000	KPR IB Murabahah
Murabahah Pensiun PMK	(424.160.000)	953.334	PMK Pension Murabahah
Ijarah	122.620.979	109.568.582	Ijarah
Jumlah	60.142.124.537	59.078.592.160	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**27. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA**

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022
Fee transaksi	24.658.857.992	24.130.355.744
Administrasi pinjaman	18.412.996.468	30.050.219.191
Administrasi simpanan	16.611.055.799	15.450.313.196
Keuntungan penjualan surat berharga	11.113.635.181	17.310.032.573
Administrasi lainnya	6.662.900.878	6.111.490.266
Administrasi syariah	5.293.276.364	10.099.670.159
Referensi bank	1.759.545.000	10.407.500
Administrasi bank garansi	422.621.299	892.975.774
Kiriman uang RTGS dan kliring	272.265.800	247.409.500
Lainnya	7.438.779.367	6.433.021.947
Jumlah	92.645.934.148	110.735.895.850

Transaction fee
Administration for loans
Administration for savings
Gain from sales of investment securities
Other administration
Sharia administration
Bank references
Bank guarantees administration
RTGS Transfer and clearing
Others
Total

28. BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022
Konvensional		
Simpanan nasabah	308.384.506.328	239.300.345.350
Simpanan dari bank lain	19.961.393.948	10.704.194.313
Jaminan Pihak ketiga	18.618.568.686	20.761.193.649
Pinjaman yang diterima	301.125.000	661.659.625
Lainnya	18.501.026.367	17.724.291.781
	365.766.620.329	289.151.684.718
Marjin dan Bagi hasil Syariah		
Deposito Berjangka	22.510.093.999	26.254.418.474
Tabungan	1.958.570.196	1.686.124.615
Giro	1.042.113.148	432.277.113
SIMA	807.987.500	2.694.444
Asuransi KPR	597.160.268	660.068.059
Aset Ijarah	98.015.181	77.257.533
	27.013.940.292	29.112.840.238
Jumlah	392.780.560.621	318.264.524.956

Conventional
Deposits from customers
Deposits from other banks
Underwriting of third-party funds
Borrowings
Others
Margin and Sharia profit sharing
Time Deposits
Saving accounts
Current Account
SIMA
Housing Loans Insurance
Ijarah assets
Total

a. Simpanan Nasabah

a. Deposit from costumers

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022
Deposito Berjangka	256.104.370.507	169.680.592.153
Giro	38.775.240.793	55.223.290.419
Tabungan	13.504.895.028	14.396.462.778
Jumlah	308.384.506.328	239.300.345.350

Time Deposits
Current accounts
Savings account
Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**28. BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH
(Lanjutan)**

b. Simpanan dari Bank lain

	31 Desember / December 31, 2023
<i>Interbank Call Money</i>	19.272.157.222
Giro	625.353.839
Tabungan	63.882.887
Jumlah	19.961.393.948

**28. INTEREST EXPENSE AND SHARIA EXPENSE
(Continued)**

b. Deposit from others Banks

	31 Desember / December 31, 2022	
<i>Interbank Call Money</i>	10.035.156.389	<i>Interbank Call Money</i>
	612.368.553	<i>Current accounts</i>
	56.669.371	<i>Saving account</i>
Jumlah	10.704.194.313	Total

29. BEBAN TENAGA KERJA

	31 Desember / December 31, 2023
Gaji dan tunjangan	84.946.099.227
Jasa produksi (lihat catatan 19)	90.315.624.875
Upah kerja lainnya	18.561.427.438
Asuransi pegawai	15.351.596.675
Pengabdian	12.894.758.550
Pengobatan	10.147.164.136
Pendidikan dan pelatihan	7.114.699.189
Beban pegawai lainnya	503.914.735
Jumlah	239.835.284.825

29. EMPLOYEES EXPENSES

	31 Desember / December 31, 2022	
Gaji dan tunjangan	87.809.284.789	<i>Employees salaries and allowance</i>
Jasa produksi (lihat catatan 19)	85.662.721.488	<i>Bonus (see note 19)</i>
Upah kerja lainnya	17.476.017.561	<i>Other employee benefits</i>
Asuransi pegawai	14.308.089.824	<i>Employee insurance</i>
Pengabdian	11.010.484.751	<i>Service Payment</i>
Pengobatan	19.146.616.977	<i>Medical</i>
Pendidikan dan pelatihan	7.957.514.022	<i>Education and training</i>
Beban pegawai lainnya	720.853.815	<i>Other employee expenses</i>
Jumlah	244.091.583.227	Total

Gaji dan tunjangan terdiri dari:

Salaries and allowance consist of:

	31 Desember / December 31, 2023
Gaji pegawai	29.768.226.287
Gaji dan tunjangan Direksi	2.449.705.500
Honorarium Dewan Komisaris, Komite, Dewan Pengawas Syariah	1.779.978.344
Tunjangan: Pegawai	26.389.491.022
Pajak penghasilan	9.804.797.859
Lainnya	14.753.900.215
Jumlah	84.946.099.227

	31 Desember / December 31, 2022	
Gaji pegawai	29.499.390.675	<i>Employees salaries</i>
Gaji dan tunjangan Direksi	2.659.338.000	<i>Salaries and allowance of Directors</i>
Honorarium Dewan Komisaris, Komite, Dewan Pengawas Syariah	1.409.837.139	<i>Honorarium of Commissioners, Committee and Sharia Supervisory Board</i>
Tunjangan: Pegawai	25.644.517.375	<i>Allowance: Employee</i>
Pajak penghasilan	14.007.228.746	<i>Employees Income tax</i>
Lainnya	14.588.972.854	<i>Others</i>
Jumlah	87.809.284.789	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	31 Desember / December 31, 2023
Listrik, air dan gas	29.299.205.073
Penyusutan Aset Tetap (catatan 11)	16.323.943.995
Perjalanan dinas dan penginapan	12.466.785.821
Sewa	7.928.490.059
Corporate social responsibility	7.225.249.990
Penyusutan Aset Hak Guna (catatan 12)	6.662.541.330
Pungutan otoritas jasa keuangan	6.180.207.425
Alat tulis dan cetakan	5.831.882.279
Penelitian dan pengembangan	5.744.912.967
Pemeliharaan dan perbaikan	5.280.078.998
Konsultan	2.808.475.022
Pertemuan dan rapat	3.176.249.767
Iklan dan promosi	3.105.429.476
Asuransi	2.853.520.627
Perlengkapan kantor	2.624.647.234
Pajak dan retribusi	332.917.055
Amortisasi (catatan 13)	129.502.500
Lainnya	21.709.851.679
Jumlah	139.683.891.297

30. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

	31 Desember / December 31, 2022	
	37.581.457.104	Electricity, water and gas
	15.439.463.904	Depreciation of Fixed Assets (note 11)
	12.663.930.955	Official travels and accommodation
	10.662.615.789	Rent
	6.853.017.719	Corporate social responsibility
	4.309.229.818	Depreciation of Right-of-Use Assets (note 12)
	6.661.933.049	Collected by Financial Services Authority
	9.598.789.920	Stationery and printings
	7.902.052.104	Research and development
	6.118.852.754	Maintenance and repairs
	6.301.821.217	Consultant
	4.420.550.460	Meeting
	4.338.225.671	Promotion and advertising
	2.869.079.830	Insurance
	3.678.739.130	Office Equipment
	407.849.052	Taxes and public facility
	143.595.884	Amortization (note 13)
	20.663.197.713	Others
Jumlah	160.614.402.073	Total

**31. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN
PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN**

	31 Desember / December 31, 2023
Pembentukan (pemulihan)	
Kredit yang diberikan	5.040.695.127
Pembiayaan syariah	1.127.175.580
Surat Berharga	3.625
Lainnya	111.538.497
Jumlah	6.279.412.829

**31. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES OF
FINANCIAL ASSETS**

	31 Desember / December 31, 2022	
	75.322.606.146	Allowance (Reversal)
	770.931.710	Loans
	494	Sharia financing
	--	Marketable Securities
	--	Others
Jumlah	76.093.538.350	Total

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**32. PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL**

	31 Desember / December 31, 2023
Pendapatan bukan operasional	
kredit hapus buku	(635.913)
Lainnya	10.769.052.011
Jumlah	10.768.416.098
Beban bukan operasional	
Lainnya	(8.084.919.140)
	(8.084.919.140)
Jumlah	2.683.496.958

Pendapatan lainnya merupakan penerimaan kembali kredit hapus buku, penggantian buku cek dan bilyet giro, dan keuntungan penjualan aset keuangan surat berharga.

32. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)

	31 Desember / December 31, 2022	
Non-operating Income		
write-off	73.423.985	
Others	3.451.252.444	
Total	3.524.676.429	
Non-operating expenses		
Others	(7.038.490.732)	
	(7.038.490.732)	
Total	(3.513.814.303)	

Other income is the recovery of write-off credits, replacement of check books and transfer form, and profit from sale of securities financial assets.

33. TAGIHAN DAN LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Bank Jambi yang dicatat pada *extra-comptable (off balance sheet)* adalah sebagai berikut:

33. RECEIVABLES AND LIABILITIES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Commitments and contingencies transaction in the normal course of Bank Jambi's activities recorded on *extra-comptable (off balance sheet)* are as follow:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Komitmen			Commitment:
Komitmen kredit yang belum ditarik	194.506.157.140	129.246.406.750	Unused loan facility granted
Lainnya	--	--	Others
Sub jumlah	194.506.157.140	129.246.406.750	Sub total
Kontinjensi			Contingencies
Bunga dalam penyelesaian	(30.537.138.019)	(23.748.678.828)	Interest on non performing loan
Garansi yang diterbitkan	4.962.511.049	4.234.418.516	Guarantee granted
Kredit yang dihapusbukukan	889.946.495	894.123.888	Write-off loans
Efek-efek	230.000.000.000	230.000.000.000	Marketable Securities
Sub jumlah	205.315.319.525	211.379.863.576	Sub total
Tagihan (liabilitas) kontinjensi bersih	399.821.476.665	340.626.270.326	Net contingencies receivable (liability)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**34. LABA PER SAHAM**

	31 Desember / December 31, 2023
Laba bersih	361.262.499.501
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa	854.035
Laba bersih per saham dasar	423.007

34. EARNING PER SHARE

	31 Desember / December 31, 2022	
	342.650.885.952	<i>Net income</i>
	776.897	<i>Total weighted average of common share</i>
	441.051	<i>Net income per share</i>

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank Jambi melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Saldo instrumen keuangan dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi antara lain:

35. RELATED PARTY TRANSACTIONS

In the normal course of business, Bank Jambi enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties are in compliance with the agreed terms and conditions.

Balances of financial instrument arising from transactions with related parties are, among others, as follows:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Aset			Assets
Kredit yang diberikan dan Pembiayaan Syariah	--	--	<i>Loans and Sharia Financing</i>
Pemegang Saham Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten	210.391.831	--	<i>Shareholders Provincial, Municipal and Regency Government</i>
Manajemen, Karyawan Kunci dan Pejabat Eksklusif	1.192.179.861	638.479.251	<i>Management, Key Employees and Exclusive Official</i>
Lainnya	8.564.687.200	5.699.838.986	<i>Others</i>
Jumlah	9.967.258.892	11.671.528.243	<i>Total</i>
Persentase dari jumlah aset	0,07%	0,09%	<i>Percentage to total assets</i>

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	35. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Continued)
Liabilitas			Liabilities
Giro			Current accounts
Pemerintah Kota dan Kabupaten	681.842.046.715	1.175.919.201.237	Municipal and Regency Government
Pemerintah Provinsi	112.866.402.298	682.937.455.208	Provincial Government
Entitas terkait lainnya	27.290.496.174	16.036.166.327	Other Related Entities
	821.998.945.187	1.874.892.822.772	
Tabungan			Saving accounts
Pemerintah Kota dan Kabupaten	--	--	Provincial, Municipal and Regency Government
Manajemen, Karyawan Kunci dan Pejabat Eksklusif	17.206.675.644	18.232.850.053	Management, Key Employees and Exclusive Official
Entitas terkait Lainnya	8.787.122.593	10.049.978.517	Other Related Entities
	25.993.798.237	28.282.828.570	
Deposito			Time Deposits
Pemerintah Kota dan Kabupaten	--	--	Municipal and Regency Government
Manajemen, Karyawan Kunci dan Pejabat Eksklusif	3.850.961.937	12.088.000.000	Management, Key Employees and Exclusive Official
Entitas terkait lainnya	2.011.928.000.000	1.378.174.000.000	Other Related Entities
	2.015.778.961.937	1.390.262.000.000	
Dana Syirkah Temporer	11.304.510.553	26.275.728.914	Temporary Syirkah Funds
Jumlah	2.875.076.215.914	3.319.713.380.256	Total
Persentase dari jumlah liabilitas	25,55%	31,05%	Percentage to total liabilities
Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of Relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction	
Pemerintah provinsi, kota dan kabupaten/ <i>Provincial, Municipal and Regency Government.</i>	Pemegang saham/ <i>Shareholders.</i>	Giro, Deposito / <i>Demand deposit, Time deposit.</i>	
Perseorangan/ <i>Individual</i>	Komisaris, Direksi, Karyawan, Pejabat Eksekutif/ <i>Commissioners, Directors, Employees, Executive Official.</i>	Kredit yang diberikan / <i>Loans</i>	
Entitas yang terkait dengan entitas pelapor / <i>related entity</i>	Yayasan Dana Pensiun Bank Jambi, Koperasi dan Kesejahteraan Karyawan Bank Jambi / <i>Yayasan Dana Pensiun Bank Jambi, Koperasi and Kesejahteraan Karyawan Bank Jambi.</i>	Giro, tabungan, Deposito/ <i>Demand deposit, savings, time deposit.</i>	

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**36. INFORMASI SEGMENT****36. SEGMENT INFORMATION**

Untuk tujuan manajemen, unit usaha Bank Jambi dikelompokkan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu Unit Usaha Konvensional dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

For managerial purposes, Bank Jambi's businesses are classified into 2 (two) units, namely the conventional business unit and the Sharia business unit:

31 Desember 2023 / December 31, 2023				
	Jumlah/ Total	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	
Aset				Assets
Kas	251.421.247.500	248.709.923.500	2.711.324.000	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.353.749.139.258	1.225.284.701.748	128.464.437.510	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	2.319.426.017	2.307.410.593	12.015.424	Current Accounts with other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	99.999.999.964	99.999.999.964	--	Placement with Bank Indonesia and other Banks
Efek-efek	2.646.380.426.379	2.117.323.210.959	529.057.215.420	Marketable securities
Kredit yang diberikan	9.085.456.317.403	8.229.646.090.964	855.810.226.439	Loans
Aset tetap	150.278.731.994	149.057.908.756	1.220.823.238	Fixed assets
Aset hak guna	18.712.004.972	18.107.468.045	604.536.927	Right-of-Use Assets
Aset takberwujud	232.009.167	232.009.167	--	Intangible assets
Aset Pajak tangguhan	21.721.412.619	21.721.412.619	--	Deferred Tax Assets
Aset lain-lain	103.523.562.196	92.352.737.719	11.170.824.477	Other assets
Jumlah Aset	13.733.794.277.469	12.204.742.874.034	1.529.051.403.435	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segera	263.019.742.731	246.904.905.284	16.114.837.447	Liabilities due immediately
Simpanan nasabah	9.097.158.796.504	8.929.888.549.650	167.270.246.854	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	856.436.486.522	856.436.486.522	--	Deposits from other Banks
Utang pajak	8.093.749.368	7.893.422.540	200.326.828	Taxes payable
Pinjaman yang diterima	--	--	--	Borrowings
Imbalan kerja karyawan	25.278.119.611	25.278.119.611	--	Employee benefits
Liabilitas lain-lain	44.794.705.096	38.897.821.761	5.896.883.335	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	10.294.781.599.832	10.105.299.305.368	189.482.294.464	Total liabilities
Dana syirkah temporer	957.923.267.338	--	957.923.267.338	Temporary syirkah funds
Jumlah Dana syirkah temporer	957.923.267.338	--	957.923.267.338	Total temporary syirkah funds
Pendapatan Segmen				Segment income
Pendapatan operasi	1.156.620.989.594	1.089.339.018.049	67.281.971.545	Operating income
Pendapatan operasi lainnya	92.645.934.148	86.860.186.716	5.785.747.432	Other operating income
Pendapatan non operasi	10.768.416.098	10.760.061.325	8.354.773	Non operating income
Jumlah pendapatan segmen	1.260.035.339.840	1.186.959.266.090	73.076.073.750	Total segment income
Beban Segmen				Segment expenses
Beban operasi	(392.780.560.621)	(365.238.717.719)	(27.541.842.902)	Operating expenses
Beban operasi lainnya	(389.362.272.269)	(377.824.443.135)	(11.537.829.134)	Other operating expenses
Beban non operasi	(8.084.919.139)	(7.919.016.351)	(165.902.788)	Non operating expenses
Jumlah beban segmen	(790.227.752.029)	(750.982.177.205)	(39.245.574.824)	Total segment expenses
Beban pajak - bersih	(108.545.088.309)	(102.704.954.309)	(5.840.134.000)	Tax expenses-net
Laba bersih	361.262.499.502	333.272.134.576	27.990.364.926	Net income

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**36. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)****36. SEGMENT INFORMATION (Continued)**

31 Desember 2022 / December 31, 2022			
	Jumlah/ Total	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia
Aset			
Kas	253.731.027.950	248.895.059.350	4.835.968.600
Giro pada Bank Indonesia	969.131.251.945	895.143.900.813	73.987.351.132
Giro pada Bank lain	2.171.250.221	2.159.662.160	11.588.061
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	--	--	--
Efek-efek	2.314.001.023.785	1.569.352.007.285	744.649.016.500
Kredit yang diberikan	8.987.560.954.784	8.162.971.714.512	824.589.240.272
Aset tetap	158.074.249.858	156.887.120.466	1.187.129.392
Aset hak guna	16.224.340.429	15.414.126.618	810.213.811
Aset takberwujud	361.511.667	361.511.667	--
Aset Pajak tangguhan	34.118.020.896	34.118.020.896	--
Aset lain-lain	88.497.626.798	73.450.992.687	15.046.634.111
Jumlah Aset	12.823.871.258.333	11.158.754.116.454	1.665.117.141.879
Liabilitas			
Liabilitas segera	262.207.526.268	240.281.473.999	21.926.052.269
Simpanan nasabah	8.858.119.983.974	8.710.764.813.657	147.355.170.317
Simpanan dari bank lain	363.210.339.107	363.210.339.107	--
Utang pajak	12.079.161.265	11.655.746.595	423.414.670
Pinjaman yang diterima	11.000.000.000	11.000.000.000	--
Imbalan kerja karyawan	25.355.068.161	25.355.068.161	--
Liabilitas lain-lain	43.038.961.818	38.206.185.443	4.832.776.375
Jumlah Liabilitas	9.575.011.040.593	9.400.473.626.962	174.537.413.631
Dana syirkah temporer	1.115.211.738.101	--	1.115.211.738.101
Jumlah Dana syirkah temporer	1.115.211.738.101	--	1.115.211.738.101
Pendapatan Segmen			
Pendapatan operasi	1.156.997.681.386	1.050.337.481.969	106.660.199.417
Pendapatan operasi lainnya	110.735.895.850	100.409.596.691	10.326.299.159
Pendapatan non operasi	3.524.676.429	3.501.131.367	23.545.062
Jumlah pendapatan segmen	1.271.258.253.665	1.154.248.210.027	117.010.043.638
Beban Segmen			
Beban operasi	(318.264.524.956)	(288.517.438.457)	(29.747.086.499)
Beban operasi lainnya	(494.015.992.566)	(481.764.740.949)	(12.251.251.617)
Beban non operasi	(7.038.490.732)	(6.431.588.952)	(606.901.780)
Jumlah beban segmen	(819.319.008.254)	(776.713.768.358)	(42.605.239.896)
Beban pajak - bersih	(109.288.358.459)	(99.051.447.459)	(10.236.911.000)
Laba bersih	342.650.886.952	278.482.994.210	64.167.892.742

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

**37. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP
LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM**

Berdasarkan Undang-undang No.24 tanggal 22 Desember 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Desember 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (Perppu No. 3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per Bank.

Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 3,37% dan 3,50% dalam mata uang Rupiah, masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Lembaga Penjaminan Simpanan telah ditetapkan menjadi Undang-undang sejak tanggal 13 Januari 2009.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank Jambi adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

**37. THE GOVERNMENT'S GUARANTEE FOR
PAYMENT OF COMMERCIAL BANK LIABILITIES**

Under Law No.24 dated December 22, 2004, which came into effect on December 22, 2005, and as subsequently amended with the Government Regulation in Lieu of Law No.3 (Perppu No. 3/2008) dated October 13, 2008, the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, where the amount of such guarantee can be changed if in compliance with specified criteria.

Under the Indonesian Government Regulation No.66 of 2008 dated October 13, 2008 concerning the Amount of Deposit Guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation (LPS), the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000,000,000 per customer per Bank.

Customer deposits are covered only if the rate of interest is equal to or below 3.37% and 3.50% in Rupiah currency as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Under the Law of the Republic of Indonesia No.7 of 2009, Government Regulation in Lieu of Law regarding Indonesian Deposit Insurance Corporation has been enacted as Law since January 13, 2009.

As of December 31, 2023 and 2022 Bank Jambi is a participant of the guarantee program.

38. MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko telah dilakukan dan diterapkan diseluruh kegiatan aktivitas bisnis bank baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Saat ini Bank Jambi dalam melakukan Penerapan manajemen risiko di Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

38. RISK MANAGEMENT

Risk Management has been applied to all of the Bank's business activities, both conventional and sharia activities.

The implementation of risk management in Bank Jambi complies with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Circular Letter of the Financial Services Authority (SEOJK) No.34/ SEOJK.03/2016 dated December 1, 2016 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Pengelolaan risiko yang dilakukan tidak hanya terbatas pada pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap risiko-risiko yang terjadi, namun juga mendeteksi dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi yang dapat mengganggu aktivitas bisnis Bank Jambi.

Bank Jambi telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan yang paling sedikit mencakup:

Penerapan Manajemen Risiko

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dalam rangka implementasi manajemen risiko, Bank Jambi memulai dengan menanamkan budaya sadar risiko kepada seluruh karyawan pada setiap tingkatan dan pada setiap unit bisnis. Upaya yang dilakukan dalam rangka menciptakan budaya risiko kepada seluruh pegawai antara lain melalui sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan baik *intern* maupun *extern* dan menerapkan *reward* dan *punishment*. Disamping itu Bank Jambi telah meluncurkan gerakan *Clear and Clean* (C&C) dalam rangka menolak gratifikasi dan menanamkan budaya perusahaan yang bersih pada stakeholder. Untuk menilai risiko secara menyeluruh Bank memiliki aplikasi laporan profil risiko cabang dimana dengan aplikasi tersebut selain dapat melakukan penilaian sendiri terhadap pencapaian target kinerja, kantor cabang juga dapat mengukur, memitigasi serta mengendalikan risiko yang dihadapi.

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris sangat penting dilakukan dalam penerapan manajemen risiko bank. Pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas manajemen risiko Bank Jambi melalui pembentukan komite-komite ditingkat Dewan Komisaris yang antara lain bertujuan untuk memastikan kebijakan dan strategi manajemen risiko diseluruh unit organisasi telah berjalan efektif.

38. RISK MANAGEMENT (Continued)

Risk management is not only limited to monitoring, reporting and evaluation of risks, but also detecting and anticipating possible risks that may disrupt Bank Jambi's business activities.

Bank Jambi is managing 8 (eight) types of risk, namely credit risks, liquidity risks, market risks, operational risks, legal risks, reputation risks, strategic risks and compliance risks, that shall include at least:

Application of Risk Management

1. *Active monitoring by the Boards of Commissioners and Directors.*
2. *Adequate policies and procedures of risk management and risk limits.*
3. *Adequate process of identification, measurement, monitoring, and control of risks and risk management information system.*
4. *Thorough internal control system.*

In implementing the risk management, Bank Jambi commences by raising risk awareness to all employees at every level and in every business unit. Efforts undertaken in order to create a risk-awareness culture for all employees are carried out, among others, through dissemination of both internal and external provisions and application of reward and punishment. In addition, Bank Jambi has launched the Clear and Clean (C&C) Movement in order to reject gratification and instill a clean corporate culture at stakeholder level. Furthermore, in order to make overall risk assessment the Bank installed risk profile report application at every branch office, by which the branch offices are able to not only conduct self assessment, but also measure, mitigate and control the risks encountered.

Active monitoring by the Board of Directors and Board of Commissioners

Active monitoring by the Board of Directors and Board of Commissioners is very important in the application of risk management of the Bank. Monitoring is carried out directly and indirectly to Bank Jambi's risk management activities through the formation of committees at the Board of Commissioners level, which is aimed at among others ensuring that the policies and strategies of risk management throughout the organization unit are running effectively.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)****Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (lanjutan)**

Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Divisi Manajemen Risiko serta beberapa komite seperti, Komite Manajemen Risiko dan Komite Aset dan Liabilitas.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi antara lain:

- Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank Jambi secara keseluruhan.
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait dengan Manajemen Risiko.
- Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
- Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - Keakuratan metodologi penilaian risiko.
 - Kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko.
 - Ketetapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam penerapan manajemen risiko bank tidak terlepas dari pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dimana Bank Jambi telah membentuk satuan manajemen risiko yang didukung oleh metodologi manajemen risiko serta kebijakan dan prosedur, serta bersama satuan kerja kepatuhan dan unit bisnis terkait melakukan kaji ulang secara berkala atas kebijakan dan prosedur disetiap produk dan aktivitas yang dikelola sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

38. RISK MANAGEMENT (Continued)**Active monitoring by the Board of Directors and Board of Commissioners (continued)**

This is implemented by establishing a Risk Management Division and several other committees such as Risk Management Committee and Assets and Liabilities Committee.

The authority and responsibilities of the Board of Directors include:

- Making written and comprehensive policies and strategies for risk management.*
- Taking responsibility for the implementation of risk management policy and risk exposures undertaken by Bank Jambi as a whole.*
- Evaluating and determining which transactions requiring the approval of the Board of Directors.*
- Developing a culture of risk management at all levels of the organization.*
- Ensuring capacity development of human resources associated with Risk Management.*
- Ensuring that the Risk Management function is operating independently.*
- Carrying out the review on a regular basis to ensure:*
 - The accuracy of risk assessment methodologies.*
 - The adequacy of Risk Management information system implementation.*
 - The determination of Risk Management policies and procedures as well as risk limits.*

The authority and responsibilities of the Board of Commissioners include:

- Approving and evaluating the Risk Management policy.*
- Evaluating the accountability of the Board of Directors on the implementation of Risk Management policy.*
- Evaluating and making decisions with regard to the requests of Directors in respect of transactions which require the approval of the Board of Commissioners.*

The application of bank risk management is inseparable from the active monitoring by the Board of Commissioners and Board of Directors, for which Bank Jambi has formed a risk management unit which is supported by risk management methodology, policies, and procedures, and together with compliance work unit and relevant business units conduct reviews on a regular basis on the policies and procedures of each product and activity managed in accordance with the applicable rules and regulations.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)****Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (lanjutan)**

Adapun kebijakan, prosedur dan pedoman yang telah direvisi selama tahun 2023, antara lain:

- SK 59 Tahun 2023 Tentang Pedoman Identifikasi Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- SK 60 Tahun 2023 Tentang User Manual Aplikasi Card Accses Management (CAM) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- SK 67 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Top Up E-Wallet;
- SK 71 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kebijakan Pengendalian Gratifikasi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- SK 73 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Juragan 9 PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- SK 74 Tahun 2023 Tentang Limit Konsentrasi Aset dan Kewajiban PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- SK 83 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- SK 84 Tahun 2023 Tentang Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Konsumen Bank Jambi;
- SK 85 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Gerai PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- SK 86 Tahun 2023 Tentang Tarif Biaya Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- SK 87 Tahun 2023 Tentang Pedoman Standarisasi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah/Bangunan /Ruangan Oleh Unit Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- SK 88 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Manajemen Teknologi Informasi dan SOP Teknologi Informasi;
- SK 89 Tahun 2023 Tentang Information Technology Strategic Plan Tahun 2023-2027;
- SK 90 Tahun 2023 Tentang SOP Open API Berbasis SNAP;
- SK 91 Tahun 2023 Tentang SOP Web Portal;
- SK 92 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penilaian Key Performance Indicators (KPI);

38. RISK MANAGEMENT (Continued)**Active monitoring by the Board of Directors and Board of Commissaries (continued)**

The polices, procedures and guidelines which have been revised in 2023, include among others:

- Directors Decree 59 of 2023 concerning Risk Identification Guidelines of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Regional Development;
- Directors Decree 60 of 2023 concerning User Manual for Card Access Management (CAM) Application of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- Directors Decree 67 of 2023 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Top Up E-Wallet;
- Directors Decree 71 of 2023 concerning Guidelines for Gratification Control Policy of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- Directors Decree 73 of 2023 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Juragan 9 of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- Directors Decree 74 of 2023 concerning Concentration Limit of Assets and Liabilities of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- Directors Decree 83 of 2023 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Automated Teller Machine (ATM) of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- Directors Decree 84 of 2023 concerning Revision of Bank Jambi Standard Operating Procedures (SOP) for Consumer Complaints;
- Directors Decree 85 of 2023 concerning Standard Operating Procedures for PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Outlets;
- Directors Decree 86 of 2023 concerning Bank Fee Rate of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- Directors Decree 87 of 2023 concerning Guidelines for Standardizing Land/Building/Room Lease Agreements by the Unit of PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- Directors Decree 88 of 2023 concerning the Information Technology Management Policies and SOP for Information Technology;
- Directors Decree 89 of 2023 concerning The Information Technology Strategic Plan for 2023-2027;
- Directors Decree 90 of 2023 concerning the SOP for SNAP-Based Open API;
- Directors Decree 91 of 2023 concerning the SOP for Web Portal;
- Directors Decree 92 of 2023 concerning the Guidelines for Assessment of Key Performance Indicators (KPI);

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris (lanjutan)**

Adapun kebijakan, prosedur dan pedoman yang telah direvisi selama tahun 2023, antara lain: (lanjutan)

- SK 95 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penertapan Program Anti Pencucian Uang (ACU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (PPSPM);
- SK 96 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Unit Kerja Khusus dan Penanggungjawab Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM);
- SK 97 Tahun 2023 Tentang Kredit Multiguna pada Karyawan Pemerintah dengan perjanjian kerja sama;
- SK 99 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan SOP dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (SIP);
- SK 101 Tahun 2023 Tentang User Aplikasi Taspen One Hour Online Service (TOOS) Untuk Mitra Bayar;
- SK 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK);
- SK 103 Tahun 2023 Tentang Standar Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah dengan PT BPD Jambi Tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);
- SK 114 Tahun 2023 Tentang SOP Aplikasi Pemantauan Pembuatan ATM dan Pengadaan (PPAP);
- SK 115 Tahun 2023 Tentang SOP Tabungan Siginjai Mahasiswa;

Kerangka manajemen risiko

Organisasi manajemen risiko Bank Jambi melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pengawas risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank Jambi.

38. RISK MANAGEMENT (Continued)**Active monitoring by the Board of Directors and Board of Commissaries (continued)**

The policies, procedures and guidelines which have been revised in 2023, include among others: (continued)

- Directors Decree 95 of 2023 concerning the Guidelines for Implementing Anti-Money Laundering Program, Prevention of Terrorism Financing and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction;
- Directors Decree 96 of 2023 concerning the Appointment of Special Work Units and Persons Responsible for Implementing Anti-Money Laundering Programs, Prevention of Terrorism Financing and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction;
- Directors Decree 97 of 2023 concerning the Multipurpose Credit for Government Employees with cooperation agreements;
- Directors Decree 99 of 2023 concerning the Implementation of SOP and Implementation of Tax Information System Application;
- Directors Decree 101 of 2023 concerning the Taspen One Hour Online Service (TOOS) Application Users for Pay Partners;
- Directors Decree 102 of 2023 concerning the Guidelines for Implementing Financial Information Service Systems;
- Directors Decree 103 of 2023 concerning the Standards for Cooperation Agreements between Regional Governments and PT BPD Jambi concerning Regional Government Credit Cards;
- Directors Decree 114 of 2023 concerning the SOP for Monitoring Applications for ATM Creation and Procurement;
- Directors Decree 115 of 2023 concerning SOP for Siginjai Student Savings;

Risk management framework

Bank Jambi's risk management organization involves oversight from the Board of Commissioner, the Board of Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority at the Board of Commissioner level. The Risk Monitoring Committee approves and monitors the implementation of risk management framework and policies of Bank Jambi.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**Kerangka manajemen risiko**

Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Direktur Utama dan Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank Jambi.

Kebijakan manajemen risiko Bank Jambi ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Bank Jambi, untuk menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Bank Jambi, melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, berusaha untuk mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Bank Jambi memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank Jambi. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank Jambi.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komite Pemantau Risiko akan melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko.

38. RISK MANAGEMENT (Continued)**Risk management framework**

Board of Commissioner delegates authority to the President Director and Board of Directors to implement the risk management strategy. The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Commissioner and is responsible for managing risk of Bank Jambi.

Bank Jambi's risk management policies are established to identify and analyze the risks encountered by Bank Jambi, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits determined. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. Bank Jambi, through its training and management standards and procedures, aims at developing a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

Bank Jambi's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with Bank Jambi's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by Bank Jambi. Bank Jambi's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit Task Force. Internal Audit Task Force undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to Bank Jambi's Audit Committee.

In conducting its oversight role, the Risk Monitoring Committee will also monitor and evaluate the performance of the Risk Management Committee.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)****38. RISK MANAGEMENT (Continued)****Penilaian Profil Risiko Bank****Bank's Risk Profile Ratings**

Penilaian profil risiko pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Bank's risk profile ratings as of December 31, 2023 and 2022 are presented in the following table:

Penilaian 2023 / Rating for 2023				
	Peringkat risiko yang melekat/ <i>Inherent risk ratings</i>	Peringkat kualitas penerapan/ <i>Quality of application ratings</i>	Peringkat tingkat risiko/ <i>Risk level ratings</i>	
Kredit	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Credit
Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Market
Likuiditas	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Liquidity
Operasional	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Operational
Hukum	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Legal
Strategik	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Strategic
Kepatuhan	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Compliance
Reputasi	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Reputation
Peringkat komposit	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Composite ranking

Penilaian 2022/ Rating for 2022				
	Peringkat risiko yang melekat/ <i>Inherent risk ratings</i>	Peringkat kualitas penerapan/ <i>Quality of application ratings</i>	Peringkat tingkat risiko/ <i>Risk level ratings</i>	
Kredit	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Credit
Pasar	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Market
Likuiditas	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Liquidity
Operasional	<i>Low to moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Low to moderate</i>	Operational
Hukum	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Legal
Strategik	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Strategic
Kepatuhan	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Compliance
Reputasi	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Reputation
Peringkat komposit	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to moderate</i>	Composite ranking

Berdasarkan hasil penilaian profil risiko tersebut diatas, tingkat risiko bank secara keseluruhan dinilai rendah, dimana risiko yang melekat pada seluruh aktivitas bank (*inherent risk*) dinilai rendah dan kualitas penerapan manajemen risiko dinilai memadai.

Based on the results of the risk profile ratings as stated above, the level of the bank's overall risk is rated as low, the inherent risks is rated as low, and the quality of risk management is rated as appropriate.

Manajemen risiko yang dilakukan Bank Jambi adalah sebagai berikut:

Risk management conducted by Bank Jambi is as follows:

1. Risiko Kredit**1. Credit Risk**

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban kepada Bank Jambi, termasuk Risiko kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Konsentrasi Kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*.

Credit risk is the risk that occurs when counterparties fail to comply with their obligation to Bank Jambi, including credit risk due to failure of the debtor, credit concentration risk, counterparty credit risk and settlement risk.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Penilaian Profil Risiko Bank (lanjutan)**1. Risiko Kredit (lanjutan)**

Sistem manajemen risiko kredit Bank Jambi dilaksanakan sebagai berikut:

Selain melakukan penyaluran kredit, pengelolaan risiko kredit juga mencakup aktivitas eksposur kredit lainnya seperti penempatan, pembelian surat-surat berharga dan penyertaan yang dikelola secara komprehensif baik pada tingkat portofolio maupun transaksi.

Dalam pengelolaan risiko kredit, Bank Jambi telah memiliki kebijakan prosedur dan pedoman perkreditan yang terus direvisi secara berkala dengan tetap berdasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan eksternal lainnya yang berlaku.

Selain berdasarkan konsep *four eyes principles*, Bank Jambi juga menerapkan prinsip 6C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition of Economy, Constrain*) dalam pemberian kredit. Berdasarkan prinsip tersebut diatas setiap keputusan kredit melibatkan *Business Unit* dan *Credit Risk Management Unit* secara independen untuk memperoleh keputusan yang objektif sesuai limit kewenangan dimana proses keputusan kredit dilaksanakan melalui rapat komite kredit.

Dalam masa pandemi *Covid-19* Bank mengelola risiko kredit pada debitur yang terdampak *Covid-19* dengan melakukan kebijakan relaksasi berupa restrukturisasi sesuai dengan ketentuan regulator yaitu melalui penambahan fasilitas pinjaman kepada debitur terdampak untuk menjaga stabilitas usahanya.

Pengelolaan risiko kredit yang lebih khusus dilakukan atas portofolio kredit yang bermasalah. Upaya yang dilakukan diantaranya adalah restrukturisasi fasilitas kredit yang bermasalah, pembentukan pencadangan untuk menutup potensi kerugian, hingga pelaksanaan hapus buku. Kebijakan pengelolaan kredit bermasalah telah dilaksanakan, termasuk pembentukan unit kerja khusus untuk mengelola kredit.

38. RISK MANAGEMENT (Continued)

Bank's Risk Profile Ratings (continued)**1. Credit Risk (continued)**

Bank Jambi's credit risk management system is implemented as follows:

In addition to the loan portfolio, credit risk management activities also include other credit exposures such as placement, purchase of marketable securities and investments managed comprehensively at both the portfolio and transactions levels.

In credit risk management, Bank Jambi has established policies and procedures for lending guidelines, which have been revised regularly to ensure compliance with the regulations of the Financial Services Authority and other prevailing external provisions.

In addition to implementing the concept of four eyes principle, Bank Jambi also applies the six C's principles (Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition of Economy, Constrain) in lending. Based on the said principles, every loan approval will involve Business Unit and the Credit Risk Management Unit independently to obtain objective decisions in accordance with the authority limit and the loan approval process is conducted through a credit committee meeting.

During the Covid-19 pandemic the Bank manages credit risk for debtors affected by Covid-19 by implementing a relaxation policy in the form of restructuring in accordance with regulatory provisions, namely through the addition of loan facilities to affected debtors to maintain business stability.

Specific credit risk management is performed on the non performing loans portfolio. Efforts undertaken include, among others, restructuring of non-performing loans, providing allowances to cover potential losses, and write-offs. Specific policy on non performing loans management process has been implemented, including establishing special working units to handle such loans.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**Penilaian Profil Risiko Bank (lanjutan)****1. Risiko Kredit (lanjutan)**

Kebijakan dan prosedur aktivitas Bank Jambi yang terkait risiko kredit disediakan untuk menjamin para pejabat Bank Jambi dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan. Ruang lingkup kebijakan dan prosedur mencakup seluruh aspek dan tahapan dalam proses perkreditan, mulai dari tahapan analisa persetujuan kredit, pengawasan kredit sampai dengan tahapan penyelesaian kredit. Selain itu aspek-aspek yang diatur dalam kebijakan dan prosedur kredit adalah dokumentasi dan administrasi kredit, legal, wewenang memutus kredit, agunan dan sebagainya.

Bank Jambi telah menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup profil risiko kredit secara terintegrasi dalam suatu proses manajemen risiko yang komprehensif.

Berikut ini adalah rasio atas *non-performing loans* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 and 2022:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022
Rasio kredit bermasalah-kotor	1,82%	1,50%
Rasio kredit bermasalah - bersih	0,64%	0,28%

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan sektor industri.

38. RISK MANAGEMENT (Continued)**Bank's Risk Profile Assessment (continued)****1. Credit Risk (continued)**

Policies and procedures of Bank Jambi's activities related to credit risk is provided to enable Bank Jambi's officials to carry out their duties according to established standards. The scope of the policies and procedures covers all aspects and stages of the loans process, from the stage of analysis of loans approval, loans monitoring up to the stage of completion of loans. In addition, the aspects set out in the policy and procedure include documentation and administration of loans, legal, authority to approve loans, collateral and so forth.

Bank Jambi carries out integrated identification, measurement, monitoring, and control of risks which include credit risk profiles in a comprehensive risk management process.

Below is the ratio of non-performing loans as of December 31, 2023 and 2022:

The ratio of non-performing loans - gross
The ratio of non-performing loans – net

Concentration of credit risk is classified by industry sector.

38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

38. RISK MANAGEMENT (Continued)

Penilaian Profil Risiko Bank (lanjutan)

Bank's Risk Profile Assessment (continued)

1. Risiko Kredit (lanjutan)

1. Credit Risk (continued)

Saldo berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank Jambi pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The following amount represents the details of Bank Jambi's credit risk exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other loans enhancements), categorized by industry sector as of December 31, 2023 and 2022:

Keterangan	Eksposur Maksimum / <i>Maximum Exposure</i>		Descriptions
	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Aset Keuangan			<i>Financial Assets</i>
Kas	251.421.247.500	253.731.027.950	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.353.749.139.258	969.131.251.945	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.319.426.017	2.171.250.221	Current account with others banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	99.999.999.964	--	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	2.646.380.426.379	2.314.001.023.785	Marketable Securities
Kredit yang diberikan	9.300.129.944.897	9.196.066.711.571	Loans
Jumlah	13.654.000.184.015	12.735.101.265.472	Total

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Estimated losses on commitments and contingencies

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rekening administratif mengalami peningkatan.

As of December 31, 2023 and 2022, administrative account have increased.

Agunan dan perlindungan kredit lainnya

Collateral and protection to other loans

Bank Jambi telah memiliki buku pedoman tentang cara menilai jenis jaminan yang bisa diterima sebagai mitigasi risiko kredit. Beberapa agunan utama yang diperoleh adalah tanah, bangunan dan kendaraan. Selain itu juga terdapat beberapa agunan tunai berupa deposito, giro atau tabungan. Bank Jambi juga memiliki beberapa fasilitas kredit yang mendapat penjaminan dari pihak ketiga.

Bank Jambi has a manual on how to assess the type of collateral which can be accepted as credit risk mitigation. Several major collaterals obtained include land, buildings and vehicles. In addition, there is also cash collateral in the form of time deposits, current accounts or savings accounts. Bank Jambi also has certain loan facilities guaranteed by third parties.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)****Penilaian Profil Risiko Bank (lanjutan)****1. Risiko Kredit (lanjutan)**Agunan dan perlindungan kredit lainnya (lanjutan)

Umumnya, agunan diperlukan untuk setiap pemberian kredit sebagai sumber sekunder pelunasan kredit ("secondary source of loan repayment") dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha debitur.

Kualitas aset keuangan

Bank Jambi menetapkan pemeringkatan kualitas setiap aset yang dimiliki melalui kombinasi antara analisis keuangan dan analisa pasar sesuai dengan kebijakan intern mengenai kualitas aktiva dan mengacu pada panduan peringkat kualitas aset yang ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kualitas Aktiva.

Evaluasi penurunan nilai

Bank Jambi menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing kredit yang diberikan yang signifikan.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas. Dengan diimplementasikan PSAK 71, salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah makro ekonomi dan Bank Jambi telah memperhitungkan makro ekonomi pada perhitungan penyisihan penurunan nilai sejak PSAK 71 diimplementasikan.

38. RISK MANAGEMENT (Continued)**Bank's Risk Profile Assessment (continued)****1. Credit Risk (continued)**Collateral and protection to other loans (continued)

Generally, collateral is required for all loans extended as a secondary source of loan repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of loan repayment is the funds generated from business operations of the borrowers.

Quality of financial assets

Bank Jambi has a policy which has been consistently applied for risk assessment of the financial asset portfolio. This rating system is supported by a variety of financial analyses, combined with market information that has been processed for the measurement of counterparty risk. All risk ratings are adjusted to the various categories and ranks as determined in accordance with the Assets Quality Assessment provisions of the Financial Services Authority.

Impairment assessment

Bank Jambi determines the allowances for impairment losses for each significant loan on an individual basis.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtor's business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty has arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realizability of collateral, and the timing of expected cash flows. With the implementation of SFAS 71, one of the factors to be taken into account in determining the allowance for impairment losses is the macro economy and Bank Jambi has calculated the macro economy in the calculation of allowance for impairment losses since SFAS 71 was implemented.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)****Penilaian Profil Risiko Bank (lanjutan)****1. Risiko Kredit (lanjutan)**Evaluasi Penurunan Nilai (lanjutan)

Impairment pada penerapan PSAK 55 mengakui kerugian kredit pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi, sedangkan pada PSAK 71 mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan. Bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit:

i. Berdasarkan sektor ekonomi:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022
Rumah Tangga	7.923.748.935.751	7.973.047.386.887
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	408.183.694	134.053.720
Pertanian, perburuan, kehutanan	526.835.650.689	392.211.564.032
Perdagangan besar dan eceran	279.348.491.642	243.473.739.472
Konstruksi	399.327.220.568	371.162.279.827
Jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan dan perorangan lainnya	181.616.473	3.072.185.917
Penyediaan akomodasi dan makan minum	57.539.062.106	50.159.623.947
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	23.805.736.691	28.261.069.679
Industri pengolahan	58.082.090.281	86.312.551.824
Jasa kesehatan dan sosial	10.013.852.826	10.565.192.884
Perikanan dan perindustrian	--	14.210.099.066
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan	15.009.480.288	19.730.625.044
Jasa pendidikan	287.308.302	541.054.414
Pertambangan dan penggalian	633.418.922	250.829.384
Listrik, Gas, dan Air	135.791.003	1.093.293.567
Lainnya	4.773.105.661	1.841.161.907
Jumlah	9.300.129.944.897	9.196.066.711.571

38. RISK MANAGEMENT (Continued)**Bank's Risk Profile Assessment (continued)****1. Credit Risk (continued)**Quality of financial assets (continued)

Impairment in the application of SFAS 55 recognizes credit losses when the credit loss occurs, whereas SFAS 71 requires the immediate recognition of the effect of changes in expected credit losses after the initial recognition of the financial asset. The portion of lifetime expected credit losses represents expected credit losses arising from a financial instrument default that may occur within 12 months after the reporting date.

Concentration of risk of financial assets with credit risk exposure:

i. By economic sector:

Household
Individual and household services
Agriculture, hunting, and forestry
Wholesale and groceries
Construction
Social, culture, entertainment, and ther personal services
Hotel, food, and beverages
Transportation, warehousing and communication
Utilities industry
Health and social service
Fishery and Manufacturing
Real estate, rent, and services company
Education Service
Mining and excavation
Water, Gas, and Electricity
Other
Total

38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

38. RISK MANAGEMENT (Continued)

Penilaian Profil Risiko Bank (lanjutan)

Bank's Risk Profile Assessment (continued)

1. Risiko Kredit (lanjutan)

1. Credit Risk (continued)

Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Impairment assessment (continued)

ii. Berdasarkan jenis:

ii. By type:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Konsumsi	7.861.427.978.727	7.783.737.951.020	Consumption
Investasi	759.132.959.393	611.013.369.070	Investment
Sindikasi	447.851.942.887	566.159.825.631	Syndicated
Modal kerja	167.022.299.065	169.710.065.891	Working Capital
Karyawan	64.694.764.825	65.445.499.959	Employee
Jumlah	9.300.129.944.897	9.196.066.711.571	Total

Mutasi penyisihan (CKPN) berdasarkan jenis kredit yang diberikan:

Changes in allowance (CKPN) by type of loans:

31 Desember 2023/ December 31, 2023			
	Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total
Saldo awal	(64.274.908.514)	(144.230.848.273)	(208.505.756.787)
Pembalikan (penyisihan) selama tahun berjalan	(1.811.786.796)	(4.355.883.911)	(6.167.670.707)
Saldo akhir	(66.086.695.310)	(148.586.732.184)	(214.673.427.494)
			Beginning balance
			Reversal (impairment loss) during the year
			Ending Balance
31 Desember 2022/ December 31, 2022			
	Individual	Kolektif/ Collective	Jumlah/ Total
Saldo awal	(8.355.996.426)	(124.087.494.504)	(132.443.490.930)
Pembalikan (penyisihan) selama tahun berjalan	(55.918.912.088)	(20.143.353.769)	(76.062.265.857)
Saldo akhir	(64.274.908.514)	(144.230.848.273)	(208.505.756.787)
			Beginning balance
			Reversal (allowance) during the year
			Ending Balance

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**2. Risiko Pasar**

Manajemen risiko pasar berhubungan dengan risiko kerugian yang dihadapi Bank Jambi akibat dari pergerakan variabel pasar (perubahan suku bunga dan nilai tukar) yang mempengaruhi portofolio Bank Jambi.

Risiko Pasar secara komposit dinilai rendah baik inherent risk maupun kualitas manajemen risiko. Dalam melakukan penempatan dana pada bank *counterparty*, Bank Jambi telah memperhatikan batasan maksimum yang diperbolehkan sesuai ketentuan intern maupun ekstern (*regulator*).

Pengelolaan risiko pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank Jambi yang berkaitan dengan produk dan jasa serta aktivitas treasury dan risiko yang melekat pada bisnis.

Risiko suku bunga timbul akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis posisi *banking book*, karena perubahan suku bunga.

Dalam mengelola risiko suku bunga dilakukan pada eksposur *banking book*, dengan memperhatikan posisi gap aset dan liabilitas Bank Jambi yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga yang mempengaruhi stabilitas tingkat profitabilitas Bank Jambi.

Tabel di bawah ini merupakan rata-rata tingkat suku bunga kontraktual per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Aset			Assets
Giro pada Bank Indonesia	1,50%	1,50%	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	0,67%	0,50%	Current account with other banks
Penempatan pada Bank			Placements with Bank Indonesia and
Indonesia dan Bank lain	6,15%	0%	other banks
Surat-surat berharga	6,91%	6,43%	Marketable securities
Kredit yang diberikan	11,48%	11,02%	Loans
Liabilitas			Liabilities
Simpanan nasabah	4,07%	0,89%	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	4,39%	2,21%	Deposits from other banks

38. RISK MANAGEMENT (Continued)**2. Market Risk**

Market risk management is associated with the risk of loss of Bank Jambi resulting from changes in interest rates and exchange rates that affect Bank Jambi's portfolio.

Market risk is compositely undervalued for both inherent risk and quality of risk management. In making fund placement with counterparty bank, Bank Jambi takes into account the maximum limit allowed by regulator.

Management of market risk is performed in accordance with Bank Jambi's policies and procedures related with the products and services and also treasury activities and the inherent risk of the business.

Interest rate risk represents risk resulting from changes in the financial instrument prices from the trading book position or from changes of the economic value position of the banking book due to changes in the interest rate.

The interest rate risk management is carried out on the banking book exposure by taking into considerations the gap position of Bank Jambi's assets and liabilities, which is sensitive to changes in interest rate, which influences the stability of Bank Jambi's profitability level.

The table below summarizes the average contractual interest rates per annum for significant financial assets and liabilities as of December 31, 2023 and 2022:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank Jambi untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank Jambi.

Dalam melakukan penilaian terhadap kebutuhan pendanaan, Bank Jambi telah melakukan analisa terhadap laporan *maturity profile*, proyeksi arus kas dan melakukan stress test yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Bank Jambi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pada saat terjadi krisis, sehingga dapat segera dilakukan antisipasi.

Untuk meminimalisasi risiko likuiditas, Bank Jambi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan dana sesuai dengan kebutuhan operasional kas pemerintah daerah, pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dan kebutuhan penarikan nasabah masyarakat;
2. Mengoptimalkan fungsi ALCO dan treasury;
3. Mengelola penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang seimbang dengan pertumbuhan penyaluran kredit;
4. Menjaga hubungan baik dengan sumber pendanaan dan pemegang dana dominan;
5. Meningkatkan dana ritel dengan mengembangkan layanan berbasis digital yang memberikan kemudahan nasabah bertransaksi.

38. RISK MANAGEMENT (Continued)

3. Liquidity Risk

Liquidity risk represents the risk due to the inability of Bank Jambi to meet its maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the activities and financial condition of Bank Jambi.

In assessing the funding needs, Bank Jambi has analyzed the maturity profile report, cash flow projection and stress test aimed at knowing to what extent Bank Jambi is able to meet the funding needs in the event of crisis, so that it can be immediately anticipated.

To minimize liquidity risk, Bank Jambi has taken the following measures:

1. *Maintaining the availability of funds in accordance with the operational needs of local government, Minimum Statutory Reserves and withdrawal of community customers' needs;*
2. *Optimizing ALCO dan treasury function;*
3. *Managing the balance of Third Party fund raising to lending growth;*
4. *Maintaining good relationships with funding sources party and the dominant fund holders;*
5. *Increasing retail funds by developing digital-based services that make transactions easier for customers.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)****38. RISK MANAGEMENT (Continued)****3. Risiko Likuiditas (lanjutan)****3. Liquidity Risk (continued)**

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam jutaan Rupiah):

The following maturity table provides information regarding the expected maturities of financial assets and liabilities as of December 31, 2023 and 2022 (in million of Rupiah):

31 Desember 2023 / December 31, 2023							
	Saldo/ Amount	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 Month	1 - 3 bulan/ 1 - 3 months	3 - 6 bulan/ 3 - 6 months	6 - 12 bulan/ 6 - 12 months	> 12 bulan/ > 12 months	
Aset							Assets
Kas	251.421	251.421	--	--	--	--	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.353.749	1.353.749	--	--	--	--	Current account with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	2.319	2.319	--	--	--	--	Current account with others Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	99.999	99.999	--	--	--	--	Placement with Bank Indonesia and other Banks
Efek -efek	2.646.379	150.099	470.143	--	70.292	1.955.845	Marketable securities
Kredit yang diberikan	9.085.456	17.119	8.299	16.179	99.319	8.944.540	Loans
Beban dibayar dimuka, Aset lain-lain	103.523	80.194	--	--	--	23.329	Prepaid Expenses, and Others asset
Jumlah Aset	13.542.850	1.954.900	478.442	16.179	169.611	10.923.714	Total Assets
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segera	263.019	263.019	--	--	--	--	Liabilities due immediately
Simpanan nasabah	9.097.158	5.752.971	1.409.896	406.162	1.528.129	--	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	856.436	856.436	--	--	--	--	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	--	--	--	--	--	--	Borrowings
Liabilitas lain-lain	44.797	3.242	--	--	--	41.555	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	10.261.410	6.875.668	1.409.896	406.162	1.528.129	41.555	Total Liabilities
Dana syirkah temporer	957.923	920.474	9.599	6.521	21.329	--	Temporary syirkah funds
Selisih Aset dan Liabilitas	2.323.513	(5.841.242)	(941.053)	(396.504)	(1.379.847)	10.882.159	Difference in Assets and Liabilities
31 Desember 2022 / December 31, 2022							
	Saldo/ Amount	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 Month	1 - 3 bulan/ 1 - 3 months	3 - 6 bulan/ 3 - 6 months	6 - 12 bulan/ 6 - 12 months	> 12 bulan/ > 12 months	
Aset							Assets
Kas	253.731	253.731	--	--	--	--	Cash
Giro pada Bank Indonesia	969.131	969.131	--	--	--	--	Current account with Bank Indonesia
Giro pada Bank Lain	2.171	2.171	--	--	--	--	Current account with others Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	--	--	--	--	--	--	Placement with Bank Indonesia and other Banks
Efek -efek	2.314.001	16.427	20.212	--	10.187	2.267.175	Marketable securities
Kredit yang diberikan	8.987.561	17.802	16.833	23.988	69.120	8.859.818	Loans
Beban dibayar dimuka, Aset lain-lain	88.497	78.568	--	--	--	9.929	Prepaid Expenses, and Others asset
Jumlah Aset	12.615.092	1.337.830	37.045	23.988	79.307	11.136.922	Total Assets
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segera	262.208	262.208	--	--	--	--	Liabilities due immediately
Simpanan nasabah	8.858.119	8.460.186	311.399	38.804	47.730	--	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	363.210	363.210	--	--	--	--	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	11.000	--	--	--	11.000	--	Borrowings
Liabilitas lain-lain	43.041	1.904	--	--	--	41.137	Other liabilities
Jumlah Liabilitas	9.537.578	9.087.508	311.399	38.804	58.730	41.137	Total Liabilities
Dana syirkah temporer	1.115.211	1.056.265	19.802	1.500	37.644	--	Temporary syirkah funds
Selisih Aset dan Liabilitas	1.962.303	(10.143.773)	(331.201)	(40.304)	(96.374)	(41.137)	Difference in Assets and Liabilities

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

3. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Untuk memastikan kemampuan Bank Jambi dalam memenuhi segera kewajibannya kepada nasabah atau counterparty, Bank Jambi menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas melalui alokasi penempatan pada cadangan primer (*Primary Reserve*) yang mana prioritas utama penempatan dana tersebut untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. *Primary Reserve* juga bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penarikan oleh nasabah, baik penarikan dana simpanan masyarakat maupun penarikan kredit, cadangan sekunder (*Secondary Reserve*) dimana cadangan tersebut dapat digunakan antara lain:

- Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek;
- Memenuhi kebutuhan likuiditas yang harus segera dipenuhi yang sebelumnya tidak diperkirakan;
- Sebagai tambahan apabila cadangan primer tidak mencukupi.

Dalam hal pengendalian risiko likuiditas Bank Jambi telah memiliki kebijakan *Contingency Funding Plan* yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bank Jambi dalam mengantisipasi dan menghadapi kondisi kesulitan likuiditas dimana dalam pengelolaan likuiditas harian dilakukan oleh Divisi Treasury dan Dana dan terhadap terjadi perubahan eksternal Bank Jambi telah memiliki komite ALCO (*Asset and Liabilities Committee*).

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya suatu proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank Jambi.

Didalam pengelolaan risiko operasional Bank Jambi telah membuat kebijakan secara menyeluruh disetiap unit kerja dan aktivitas operasional Bank Jambi. Adapun beberapa kebijakan dalam pengendalian risiko operasional antara lain:

38. RISK MANAGEMENT (Continued)

3. Liquidity Risk (continued)

To ensure Bank Jambi's ability to immediately fulfill its liabilities to the customers or counterparties, Bank Jambi implements a policy of managing liquidity through placements in the allocation of Primary Reserve, which is mainly to comply with the provisions stipulated by Bank Indonesia. Primary Reserve also aims at anticipating the possibility of a withdrawal by customers, either withdrawal of public deposits or drawdown of loans, secondary reserve, in which such reserves can be used to, among others:

- Meet short-term liquidity needs;
- Meet the immediate liquidity needs which had not been expected;
- Serve as addition, in the event of inadequate primary reserve.

In effort to manage liquidity risk, Bank Jambi has a Contingency Funding Plan policy in place which contains the measures to be taken by Bank Jambi in anticipating and addressing liquidity difficulties in which the daily liquidity management is carried out by the Treasury and Fund Division, and with regard to external changes Bank Jambi has formed ALCO (*Asset and Liabilities Committee*).

4. Operational Risk

Operational risk represents the risk due to the inadequacy and/or malfunction of some internal processes, human error, system failure, and/or the presence of external events affecting the operations of Bank Jambi.

In operational risk management Bank Jambi has made an extensive policy for all of its work units and the operational activities. The policy for operational risks management includes, among others:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**4. Risiko Operasional (lanjutan)**

- Melakukan pengkajian terhadap kebijakan, pedoman dan prosedur pengendalian intern sesuai dengan kondisi perkembangan dunia perbankan, kebijakan pemerintah dan limitasi operasional yang ditetapkan.

Di dalam pengelolaan risiko operasional Bank Jambi telah membuat kebijakan secara menyeluruh disetiap unit kerja dan aktivitas operasional Bank Jambi. Adapun beberapa kebijakan dalam pengendalian risiko operasional antara lain: (lanjutan)

- Melakukan tindakan pemantauan, koreksi dan penyelesaian terhadap hasil temuan baik dari pihak intern dan pihak ekstern.
- Menetapkan kebijakan intern terkait sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran, rotasi karyawan, kebijakan anti fraud, dan lain-lain.
- Menyediakan sarana yang mudah diakses oleh karyawan yang berisi ketentuan-ketentuan intern sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi di unit kerja masing-masing.
- Risiko operasional secara komposit dinilai cukup tinggi. Penilaian risiko operasional yang dinilai cukup tinggi dapat dilihat dari beberapa hal antara lain:
- Manajemen sumber daya manusia belum efektif, pemenuhan sumber daya manusia dalam struktur organisasi yang berlaku saat ini belum memadai, pada beberapa bagian masih perlu dilakukan penambahan personil untuk mengoptimalkan fungsi pengendalian
- Lemahnya pengendalian mengakibatkan sering terjadi kegagalan karena faktor human error yang ditandai masih ditemukan kesalahan sebagaimana temuan resident audit cabang dan audit eksternal.
- Belum maksimalnya peningkatan kompetensi, kualitas dan pengetahuan sumber daya manusia secara berkesinambungan di bagian yang memerlukan keahlian/kompetensi khusus untuk menghindari terjadi kegagalan karena faktor manusia, ditandai dengan belum optimalnya penggunaan anggaran pendidikan sampai akhir tahun.

38. RISK MANAGEMENT (Continued)**4. Operational Risk (continued)**

- Conducting a review of the policies, guidelines and procedures for internal control in accordance with the conditions of the development of the banking sector, government policy and specified operational limitations.

In operational risk management Bank Jambi has made an extensive policy for all of its work units and the operational activities. The policy for operational risks management includes, among others: (continued)

- Monitoring, correcting and completing the findings from both internal and external parties.
- Establishing internal policies related to sanctions for employees who commit violations, employee rotation, anti-fraud policies, and others.
- Providing an easily accessible facility for employees that contains internal provisions as a guide in carrying out functions in each work unit.
- Operational risks are compositely rated as fairly high. Operational risk assessment is rated as fairly high viewed from several aspects, among others:
- Human resource management is ineffective. The placement of human resources in the current organizational structure is inadequate, some division require additional personnel to optimize the control function.
- The weak control results in frequent failures due to human error, which is indicated by errors as indicated by the findings of the resident audit branch and external audits.
- The improvement of competence, quality and knowledge of human resources in areas that require special expertise/competence is not maximized, while it is actually important in order to avoid failure due to human factors, which is indicated by the inadequate use of the education budget by the end of the year.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**5. Risiko Hukum**

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Aspek yuridis secara komposit dinilai rendah, baik dari risiko inheren maupun dari kualitas penerapan manajemen risiko, antara lain:

- Tidak terdapat proses litigasi yang terjadi pada Bank Jambi;
- Standar perjanjian yang biasa digunakan oleh Bank Jambi menggunakan *best practice* yang didasarkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Seluruh aktivitas transaksi dan aktivitas bisnis yang dijalankan terkait produk/jasa yang dimiliki Bank Jambi telah mengacu kepada perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- Kompleksitas kegiatan usaha Bank Jambi masih relatif sederhana, sehingga potensi risiko hukum yang mungkin terjadi masih relatif kecil;
- Setiap terdapat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap *draft* perjanjian tersebut untuk meminimalisir risiko hukum yang timbul dikemudian hari;

Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional yang melekat pada perkreditan, *treasury*, operasional, sistem informasi teknologi dan pengelolaan sumber daya manusia.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank Jambi.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dari pemberitaan negatif yang muncul dari masyarakat/nasabah dan keluhan nasabah.

38. RISK MANAGEMENT (Continued)**5. Legal Risk**

Legal risk represents the risk due to legal claims and/or weaknesses in juridical aspects, which among others are caused by the absence of supporting regulations, or weaknesses in agreements such as that the criteria for valid contracts is not fulfilled, and inappropriate collateral arrangements.

Juridical aspects are compositely rated as low, both for inherent risk as well as for the quality of risk management, as follows:

- *There are no litigation processes that occur in Bank Jambi;*
- *Standard agreements commonly used by Bank Jambi are using best practices based on prevailing laws and regulations;*
- *All transaction activities and business activities carried out related to products/services owned by Bank Jambi are subjected to the applicable laws and regulations;*
- *The complexity of the business of Bank Jambi is relatively modest, so the potential legal risks that may occur is relatively small;*
- *Prior to entering into each cooperation agreement with a third party, the Bank performs an assessment of the draft agreement to minimize the legal risks which may arise in the future;*

Legal risks are identified for all functional activities that are inherent to loan, treasury, operational and information technology systems and human resources management.

6. Reputation Risk

Reputation risk represents the risk due to a decrease in the stakeholders' trust that results from a negative perception of Bank Jambi.

Reputation risk identification is performed periodically based on the knowledge of historical losses due to reputation risk. Reputation risk valuation is performed qualitatively among others from the public/customers and customer's complaints.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)****6. Risiko Reputasi (lanjutan)**

Secara komposit dinilai rendah, baik dari risiko inheren maupun dari kualitas penerapan manajemen risiko dan dalam pengelolaan risiko reputasi Bank Jambi telah melakukan langkah-langkah antara lain:

- Direksi telah menetapkan Divisi Sekretaris Perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada nasabah dan pemangku kepentingan Bank terkait dengan aktivitas bisnis Bank dalam rangka mengendalikan Risiko Reputasi;
- Unit pengelola risiko reputasi telah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas yang tertuang dalam *job description* sekretaris perusahaan, salah satunya menjalankan fungsi kehumasan dan menindaklanjuti pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang mempengaruhi reputasi Bank dan dapat menyebabkan kerugian Bank;
- Bank telah memiliki kebijakan terkait aktivitas bisnis Bank yang berpotensi merugikan reputasi Bank, seperti standar operasional prosedur pengaduan konsumen;
- Bank Jambi telah memiliki *website* yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat umum sebagai salah satu sarana penyampaian aspirasi saran dan keluhan terhadap Bank Jambi yang dikelola oleh bidang hubungan eksternal pada divisi sekretaris perusahaan yang mengacu pada standar operasional prosedur pengaduan konsumen dengan mengacu pada standar operasional prosedur pengaduan konsumen sebagai upaya penyelesaian terhadap pengaduan/keluhan nasabah tersebut;

7. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

38. RISK MANAGEMENT (Continued)**6. Reputation Risk (continued)**

Reputation risk is compositely rated as low, both for inherent risk and the quality of risk management, and in the management of reputation risk Bank Jambi has taken the following measures:

- *The Board of Directors has established a Corporate Secretary Division which has the authority and responsibility to provide information to customers and stakeholders of the Bank related to the Bank's business activities in order to control Reputation Risk;*
- *The reputation risk management unit has clear authority and responsibility as stated in the job description of the corporate secretary, one of which is to carry out the public relations function and follow up on negative news or other events that affect the reputation of the Bank and may cause losses to the Bank;*
- *The Bank has policies related to the Bank's business activities that have the potential to harm the Bank's reputation, such as standard operating procedures for customer complaint;*
- *Bank Jambi has a website that can be accessed by the public as one means of delivering aspirations, suggestions and complaints against Bank Jambi managed by the external relation division under the Corporate Secretary Division with reference to standard operating procedures for customer complaint as an effort to settle customer complaints/ grievance;*

7. Strategic Risk

Strategic risk represents the risk due to inaccuracies in the decision and/or implementation of a strategic decision as well as the failure to anticipate changes in the business environment.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)**7. Risiko Strategik (lanjutan)**

Evaluasi pencapaian target dilakukan secara berkala sebagai salah satu bentuk pengendalian serta untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam pencapaian rencana target Bank Jambi serta mencari solusi jika terjadi kendala dalam pelaksanaannya, hal tersebut sebagai bentuk proses pengukuran dan pengendalian risiko yang dilakukan oleh Bank Jambi.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank Jambi tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan.

Risiko kepatuhan timbul akibat Bank Jambi tidak mematuhi dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi kinerja Bank Jambi.

Secara komposit dinilai rendah, berdasarkan hasil penilaian risiko kepatuhan yang melekat pada seluruh aktifitas bahwa potensi risiko rendah dan terhadap penilaian kualitas penerapan manajemen risiko cukup memadai.

Selain itu dalam pengelolaan risiko kepatuhan Bank Jambi telah membentuk Satuan Kepatuhan dibawah naungan Direktur Kepatuhan yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membuat langkah-langkah dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan di seluruh unit kerja;
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan yang mengacu kepada ketentuan regulator dan perundang-undangan yang berlaku;
- Menilai, mereviu, merekomendasikan dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan aktivitas Bank Jambi telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

38. RISK MANAGEMENT (Continued)**7. Strategic Risk (continued)**

Evaluation of target achievement is conducted periodically as a form of control and aimed at finding out the extent of success in achieving the target plan of Bank Jambi and finding a solution in case of obstacles in its implementation. It is as process of risk measurement and control performed by Bank Jambi.

8. Compliance Risk

Compliance risk represents risk incurred due to the fact that Bank Jambi has not complied with and/or has not implemented appropriate internal policies and regulations.

Compliance risk arises from the non-compliance by Bank Jambi and/or internal processes failure, human error, system failure, and/or the presence of external events that affect Bank Jambi's performance.

Compositely rated as low, based on the results of the assessment of compliance risk inherent in all the activities the potential risk is low and the quality of risk management assessment is fair.

In addition, in managing compliance risk Bank Jambi has formed a Compliance Unit under the auspices of the Compliance Director, who has duties and responsibilities as follows:

- *Formulating measures to support the creation of a compliance culture throughout the work units;*
- *Identifying, measuring, monitoring and controlling compliance risks, in compliance with the prevailing laws and regulations;*
- *Assessing, reviewing, recommending and evaluating the effectiveness, adequacy and suitability of policies, regulations, systems and procedures that are owned in compliance with the prevailing laws and regulations;*
- *Undertaking measures to ensure that policies, regulations, systems and procedures as well as the activities of Bank Jambi are implemented in compliance with the prevailing laws and regulations;*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

38. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi 31 Desember 2023 yang berada pada Peringkat 2 (PK 2) dengan predikat "sehat" atau stabil dibandingkan dengan posisi Desember 2022, dengan penilaian sebagai berikut:

1. **Profil Risiko**
Hasil penilaian Profil Risiko Bank periode 31 Desember 2023 masih stabil di Peringkat 2 (*Low to Moderate*) dengan tren meningkat. Terjadi penurunan risiko dibandingkan tahun 2022, dimana risiko operasional secara komposit pada tahun 2022 dinilai cukup tinggi, sehingga tahun 2023 menjadi risiko rendah.
2. **Rentabilitas**
Laba pada 31 Desember 2023 dinilai baik dan mampu berkontribusi dalam meningkatkan permodalan bank, pencapaian laba melebihi proyeksi sebesar 100,23%.
3. **Permodalan**
Tingkat permodalan Bank Jambi tidak terganggu walaupun terjadi perlambatan ekonomi akibat pandemi. Rasio KPMM dan modal Bank meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, serta profil risiko Bank tetap terjaga pada peringkat 2 hingga Desember 2023. Modal Bank dinilai masih cukup baik dalam menyerap risiko serta melakukan ekspansi usaha Bank kedepannya. Penurunan tren risiko pada parameter permodalan ditandai dengan peningkatan komponen modal Bank, salah satunya dengan laba yang bertumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4. **Tata Kelola**
Tata kelola Bank posisi Desember 2023 dibandingkan dengan posisi Desember 2022 relatif stabil.

38. RISK MANAGEMENT (Continued)

The assessment of the Bank's Soundness Level as of December 31, 2023 which is at Rank 2 (PK 2) with the predicate "healthy" or stable compared to the Bank's position as of December 2022, with the following assessment:

1. **Risk Profile**
The results of the Bank Risk Profile assessment for the period December 31, 2023 are still stable at Rank 2 (Low to Moderate) with increasing trend. There is a decrease in risk compared to 2022, where composite operational risk in 2022 is considered quite high, so that in 2023 it will be a low risk.
2. **Rentability**
Profits as of December 31, 2023 were considered good and able to contribute to increasing bank capital, achieving profits that exceeded the projection of 100.23%.
3. **Capital**
Bank' Jambi's capital level was not disturbed despite the economic slowdown due to the pandemic. The CAR ratio to the Bank's capital increased compared to last year, and the Bank's risk profile was maintained at rank 2 until December 2023. Bank's capital is considered quite good at absorbing risk and expanding the Bank's business going forward. The decrease in risk trend in the capital parameter was marked by an increase in Bank's capital components, one of which was profit growth compared to the previous year.
4. **Governance**
Bank's governance in December 2023 is relatively stable compared to the position in December 2022.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended
(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

39. MANAJEMEN MODAL

Tujuan utama dari kebijakan Bank Jambi atas kebijakan pengelolaan modal adalah untuk memastikan bahwa Bank Jambi memiliki modal yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha Bank Jambi saat ini dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang serta untuk memenuhi ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Bank Jambi telah efisien.

Bank Jambi menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank Jambi senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Bank Jambi.

Kebutuhan permodalan Bank Jambi juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan data-data analisis.

Rencana Permodalan disusun oleh Dewan Direksi sebagai bagian dan Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan dan mengawasi kebutuhan modal Bank. Bank diwajibkan untuk mentaati peraturan yang berlaku dalam hal ini modal yang diwajibkan regulator. Pendekatan Bank terhadap pengelolaan modal ditentukan oleh strategi dan persyaratan organisasi bank, dengan memperhitungkan peraturan, serta keadaan ekonomi dan komersial.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

39. CAPITAL MANAGEMENT

The primary objectives of Bank Jambi's capital management policy are to ensure that Bank Jambi has a strong capital to support Bank Jambi's current business expansion strategy to sustain future development of the business, to meet regulator capital adequacy requirements, and to ensure the efficiency of Bank Jambi's capital structure.

Bank Jambi undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. Bank Jambi will continue to link financial and capital adequacy goals to risk which can be tolerated through the capital planning process method as well as assess the businesses based on Bank Jambi's capital and liquidity requirements.

The capital requirements of Bank Jambi are also discussed and planned on a routine basis supported by data analysis.

Capital Planning is prepared by the Board of Directors as part of Bank's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and strong mix of the different components of capital are maintained to support business growth in the future.

Financial Services Authority (OJK) sets and monitors capital requirements for the Bank. The Bank is required to comply with prevailing regulation in respect of regulatory capital. The Bank's approach to capital management is driven by the Bank's strategic and organizational requirements, by taking into account regulatory, economic and commercial environment.

Bank has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

39. MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)

Perhitungan kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum", serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Adequacy Maintained Assets* (CEMA).

Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk profil risiko peringkat 1 (satu), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 8% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 2 (dua), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 9% sampai dengan kurang dari 10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 3 (tiga), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 10% sampai dengan kurang dari 11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko;
- Untuk profil risiko peringkat 4 (empat) atau 5 (lima), modal minimum terendah yang wajib dimiliki adalah 11% sampai dengan kurang dari 14% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko.

Posisi modal yang diwajibkan *regulator* Bank sesuai peraturan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Aset Tertimbang Menurut Risiko			Weighted risk assets
Dengan memperhitungkan risiko kredit	5.793.070	5.502.268	Against Loan risk
Dengan memperhitungkan risiko operasional	569.424	1.319.380	Against operational risk
Dengan memperhitungkan risiko pasar	--	--	Against market risk
Modal			Capital
Modal Inti	2.393.322	2.061.799	Primary Capital
Modal Pelengkap	<u>72.652</u>	<u>69.065</u>	Secondary capital
Jumlah modal inti dan pelengkap	2.465.974	2.130.864	Total Primary and Secondary Capital

39. CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

Calculation of capital requirement under the Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.03/2016, dated January 29, 2016, which was amended with the Financial Services Authority Regulation No.34/POJK.03/2016 dated December 22, 2016 on "Minimum Capital Requirement for Commercial Banks", and Circular Letter of the Financial Services Authority No.26/SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016 regarding Minimum Capital Adequacy Ratio According to Risk Profile and Capital Adequacy Maintained Assets (CEMA) Compliance.

Minimum capital requirements are as follows:

- For banks with risk profile rating 1 (one), the minimum capital requirement is 8% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 2 (two), the minimum capital requirement is 9% to less than 10% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 3 (three), the minimum capital requirement is 10% to less than 11% of Risk Weighted Asset;
- For banks with risk profile rating 4 (four) or 5 (five), the minimum capital requirement is 11% to less than 14% of Risk Weighted Asset.

The Bank's regulatory capital position under prevailing Bank Indonesia regulation as of December 31, 2023 and 2022 is as follows:

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**39. MANAJEMEN MODAL (Lanjutan)**

	31 Desember / December 31, 2023
Rasio kewajiban penyediaan	
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional	38,76%
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar	38,76%
Dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar	38,76%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan Bank Indonesia sesuai profil risiko	9% - < 10%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum dalam hal OJK menilai suatu bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Berdasarkan *self-assessment* Bank Jambi, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 profil risiko Bank Jambi dinilai berada pada peringkat 2. Oleh karena itu, Bank Jambi berkewajiban untuk memenuhi modal minimum sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

39. CAPITAL MANAGEMENT (Continued)

31 Desember / December 31, 2022

Adequacy ratio
Against loans and
operational
risk

Against loans and market
risk

Against loans, operational and
market risk

Capital Adequacy Ratio
required
by Bank Indonesia

Financial Services Authority (OJK) is authorised to stipulate minimum capital greater than minimum capital in terms of OJK assesses a bank as facing potential losses which requires a larger capital.

Based on its self-assessment, as of December 31, 2023 and 2022 Bank Jambi's risk profile is assessed at rating 2. Therefore, Bank Jambi is required to provide a minimum capital of 9% to less than 10%.

40. PERIKATAN-PERIKATAN SIGNIFIKAN**a. Perjanjian Kerjasama dengan PT Kajang Lako****1. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan**

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan dengan PT Kajang Lako pada tanggal 4 Januari 2023 dan 09 April 2018 dengan nomor perjanjian 04/SPK/KL/01/2023 dan 066/SPK/KL/04/2018. PT Kajang Lako menyediakan kendaraan roda empat baru milik PT Kajang Lako yang akan digunakan oleh Bank Jambi dengan status sewa pakai. Perjanjian ini akan berakhir masing-masing pada tanggal 4 Januari 2026 dan 09 April 2022.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS**a. Cooperation Agreement with PT Kajang Lako****1. Vehicles Rental Agreement**

Bank Jambi agreed to enter into a vehicle rental agreement with PT Kajang Lako on January 4, 2023 under agreement number 04/SPK/KL/01/2023 and April 9, 2018 under agreement number 066/SPK/KL/04/2018. PT Kajang Lako provides a new four-wheel vehicle owned by PT Kajang Lako which will be used by Bank Jambi with rental status. These agreements will expire on January 4, 2026 and April 9, 2022, respectively.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**40. PERIKATAN-PERIKATAN SIGNIFIKAN
(Lanjutan)****a. Perjanjian Kerjasama dengan PT Kajang Lako**

2. Perjanjian tentang Penyediaan Karyawan Alih Daya (*Outsourcing*) Untuk Tenaga Sopir dengan nomor perjanjian 044.11/KP.Umum. Sebagaimana telah diperbarui dengan perjanjian 046/ADD.PKS.Sopir/BPDJ-KL/04/2020 tanggal 6 April 2020. Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal 28 November 2014 dan akan diperpanjang secara otomatis.

3. Penyediaan Tenaga Kerja *Outsourcing* untuk Petugas *Cleaning Service*

Pada tanggal 28 November 2014 Bank Jambi telah sepakat melakukan kerja sama dengan PT Kajang Lako untuk penyediaan tenaga kerja *cleaning service* dengan nomor perjanjian 043.11/KP.Umum. Sebagaimana telah diperbarui dengan perjanjian 030/ADD.PKS.CS/BPDJ-KL/04/2020 tanggal 06 April 2020. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 27 November 2015 dan diperpanjang secara otomatis.

4. Penyediaan Tenaga Kerja *Outsourcing* Untuk Sekretaris Dewan Komisaris

Pada tanggal 28 November 2014 Bank Jambi telah sepakat melakukan kerja sama dengan PT Kajang Lako untuk penyediaan tenaga kerja sekretaris dewan komisaris dengan nomor perjanjian 045.11/KP.Umum. Sebagaimana telah diperbarui dengan perjanjian 051/ADD.PKS.SEK.DEKOM/PT.BPD-KL/04/2020 tanggal 06 April 2020.

b. Perjanjian Kerja Sama Tentang Perpanjangan Pengadaan Aplikasi Core Banking System (Konvensional & Syariah)

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian kerja sama perpanjangan pengadaan aplikasi *core banking system* (konvensional & syariah) dengan PT Fortress Data Service pada tanggal 25 Maret 2019 dengan nomor perjanjian 021.03/PKS/PT.BPDJ/2019 dan 009/JAMBI/03/2019. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 24 Maret 2024.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)**a. Cooperation Agreement with PT Kajang Lako**

2. *Agreement on Provision of Outsourcing for Drivers under with agreement number 044.11/KP.Umum, which was renewed with the agreement No.046/ADD.PKS.Sopir/BPDJ-KL/04/2020 dated April 6, 2020. This agreement is valid from November 28, 2014 and will be extended automatically.*

3. *Provision of Outsourced Manpower for Cleaning Service Workers*

On November 28, 2014 Bank Jambi agreed to enter into an agreement with PT Kajang Lako to provide cleaning service workers under agreement number 043.11/KP.Umum. Which was renewed with agreement No.030/ADD.PKS.CS/BPDJ-KL/04/2020 dated April 06, 2020. This agreement expired on November 27, 2015 and was extended automatically.

4. *Provision of Outsourced Workers for the Secretary of the Board of Commissioner*

On November 28, 2014 Bank Jambi agreed to enter into an agreement with PT Kajang Lako for the supply of manpower for the secretary of the board of commissioners under agreement number 045.11/KP.Umum, which was renewed with agreement No.051/ADD.PKS.SEK.DEKOM/PT.BPD-KL/04/2020 dated April 06, 2020.

b. Cooperation Agreement Regarding Extension of Core Banking System Application (Conventional & Sharia)

Bank Jambi agreed to enter into a cooperation agreement to extend the core banking application system (conventional & sharia) with PT Fortress Data Service on March 25, 2019 under agreement numbers 021.03/PKS/PT.BPDJ/2019 and 009/JAMBI/03/2019. This agreement will expire on March 24, 2024.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)

**40. PERIKATAN-PERIKATAN SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

c. Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian, kerja sama sewa menyewa kendaraan dengan PT Estetika Yasakelola pada tanggal 15 Mei 2023 dengan nomor perjanjian 030A/PKS/EYK/05/2023. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2026.

d. Perjanjian Pengelolaan Gedung

Bank Jambi telah sepakat melakukan perjanjian, kerja sama pengelolaan gedung dengan PT Gedung Menara Sembilan pada tanggal 2 Februari 2022 dengan nomor perjanjian 084.02/BPDJ/2022. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 3 Februari 2027.

40. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

c. Vehicle Rental Agreement

Bank Jambi agreed to enter into a vehicle rental cooperation agreement with PT Estetika Yasakelola on May 15, 2023 under the agreement number 030A/PKS/EYK/05/2023. This agreement will expire on May 30, 2026.

d. Building Management Agreement

Bank Jambi agreed to enter into a building management agreement with PT Gedung Menara Sembilan on February 2, 2022 under the agreement number 084.02/BPDJ/2022. This agreement will expire on February 3, 2027.

41. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No.02/OPINI-DPS/03.2023 tanggal 17 Maret 2023, No.04/OPINI-DPS/08.2023 tanggal 3 Agustus 2023 dan No.25.01/KP.UUS tanggal 26 Januari 2022, masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Jambi menyatakan bahwa pelaksanaan operasional serta produk dan jasa Unit Usaha Syariah Bank telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta opini syariah dari DPS, namun beberapa hal yang bukan prinsipil masih memerlukan penyempurnaan.

41. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on letters No.02/OPINI-DPS/03.2023 dated March 17, 2023; No.04/OPINI-DPS/08.2023 dated August 3, 2023 and No.25.01/KP.UUS dated January 26, 2022, respectively for the periods ended December 31, 2023 and 2022, the Sharia Supervisory Board of Bank Jambi expresses an opinion that the operation and product and services of the Bank's Sharia Unit are in compliance with fatwa and sharia regulations issued by the National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and sharia opinion of DPS, however, several non-principal matters still require improvement.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**42. ANALISIS KUALITAS KREDIT****Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan**

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

- *Probability of default (PD)* atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
- *Probability of default (PD)* atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran dimuka).

Bank menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:

- Pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *probability of default (PD)*;
- Indikator kualitatif;
- Tertunggak lebih dari 30 hari.

Credit Risk Grades

Bank mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk grades* berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. *Credit risk grades* ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

Credit risk grades ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan rating risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara *credit risk rating grades* 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara *credit risk rating grades* 2 dan 3.

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data berikut: laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, estimasi kondisi ekonomi.

42. CREDIT QUALITY ANALYSIS**Significant Increase in Credit Risk**

When determining whether the risk of default on financial instruments has increased significantly since initial recognition, the Bank considers reasonable and supported relevant information that is available without excessive costs or efforts. This includes quantitative and qualitative information and analysis, based on historical experience and credit expert assessments and including forward-looking estimates.

The purpose of this assessment is to identify whether a significant increase in credit risk of exposure has occurred by comparing:

- *Probability of default (PD) to the remaining age at the reporting date; with*
- *Probability of default (PD) to the estimated remaining age at initial recognition of the exposure (if relevant, adjusted for change in expectations of prepayment).*

Bank uses these criteria for determining whether there has been a significant increase in credit risk:

- *Quantitative test based on movement in probability of default;*
- *Qualitative indicators;*
- *A backstop of 30 days past due.*

Credit Risk Grades

The Bank allocated each exposure to credit risk grades based on a variety of data that is determined to predict the risk of default and applied credit experience judgement. Credit risk grades are determined using qualitative and quantitative factors that can indicate the risk of default. These factors vary depending on the nature of the exposure and the type of borrower.

Credit risk grades are determined and calibrated in such a way that the risk of default is increasing exponentially as credit risk rating decreases, for example, the difference between credit risk rating grades 1 and 2 is smaller than the difference between credit risk rating grades 2 and 3.

Each exposure is allocated to credit risk grades at initial recognition based on available information about the borrower. This exposure is monitored on an ongoing basis, and can result in the exposure being transferred to different credit risk grades. Monitoring usually uses the following data: financial statements, use of credit facilities, estimates of economic conditions.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (Lanjutan)****Penentuan Struktur *Probability of Default***

Credit risk grades adalah input utama dalam penentuan struktur *probability of default term structure* atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *Probability of Default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (misalkan restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: pertumbuhan PDB, suku bunga acuan, dan tingkat pengangguran. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Bank mempergunakan sejumlah kriteria untuk menentukan telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan.

Kriteria tersebut ditetapkan menggunakan faktor kuantitatif dan kualitatif termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan yang dapat mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap saat awal diberikan

Bank dimungkinkan menggunakan penilaian dari analisis kredit dan pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa eksposur mungkin saja telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasikan hal tersebut dimana pengaruhnya mungkin belum sepenuhnya tercermin pada saat dilakukan analisis kuantitatif.

42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (Continued)***Determination of the Probability of Default Structure***

Credit risk grades are the main input in determining the PD term structure of the exposure. The Bank collects performance and default information about credit risk exposures, which are analyzed by jurisdiction or region and by product and borrower type as well as credit risk assessment. For some portfolios, information purchased from external credit assessors is also used.

The Bank uses a statistical model to analyze the collected data and produce an estimate of the probability of default (PD) for the remaining life and how this is expected to change as a result of the passage of time.

This analysis includes the identification and calibration of the relationship between changes in default rates and changes in key macroeconomic factors as well as an in-depth analysis of the impact of other certain factors (e.g. restructuring) on the risk of default. For most exposures, the main macroeconomic indicators include: GDP growth, benchmark interest rates, and the unemployment rate. For exposures in certain industries and/or regions, the analysis can include commodity prices and/or relevant property prices.

Determination of Significant Increase in Credit Risk

Bank uses several criteria for determining whether credit risk has increased significantly.

The criteria are determined using qualitative and quantitative factors including determination based on arrear day status that can indicate significant increase in credit risk since initial recognition.

The Bank can also use the judgment of credit analysts and, if possible, relevant historical experience, in determining that the exposure may have experienced a significant increase in credit risk based on certain qualitative indicators that are considered to indicate this and their effects may not be fully reflected in quantitative analysis in a comprehensive manner on a timely manner.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (Lanjutan)****Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan (lanjutan)**

Bank menentukan bahwa peningkatan resiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

Bank memantau efektifitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara reviu berkala.

Modifikasi Aset Keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat. Pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:

- sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

Definisi Gagal Bayar (Default)

Bank menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* /gagal bayar ketika:

- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya kepada secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari Bank; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kredit material apa pun kepada Bank.

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default*/ gagal bayar, Bank mempertimbangkan indikator berikut:

- Kualitatif seperti pelanggaran persyaratan penjanjian (*covenants*);
- Kuantitatif seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal

42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (Continued)**Determination of Significant Increase in Credit Risk (continued)**

The Bank determines that a significant increase in credit risk has not occurred if it is still less than 30 days in arrears. Arrear days are determined by counting the number of days from the initial due date where full payment has not been received. The due date is determined without considering the grace period that might be available to the borrower.

The Bank monitors the effectiveness of the criteria used in identifying significant increases in credit risk by periodic review.

Modification of Financial Assets

Loan contractual terms can be modified for a number of reasons, including changes in market conditions, customer retention and other factors not related to the current credit decline. Loans with modified contractual terms can cause the initial loan to be derecognized and the modified loan can be recognized as a new loan at fair value.

When the contractual terms of the loan are modified and do not result in de-recognition, determining the occurrence of a significant increase in credit risk is carried out by comparing:

- *PD remainder life at reporting date based on modified provision; with*
- *PD remainder estimated life based on data at initial recognition and initial contractual provisions.*

Definition of Default

The Bank considers financial assets as default when:

- *The debtor is unlikely to pay its loans obligation in full, without assistance (recourse) from the Bank; or*
- *The debtor has past due more than 90 days for any material loans obligation to the Bank.*

In assessing whether a debtor is in default, the Bank considers the following indicators:

- *Qualitative such as violations of the terms of the agreement (covenants);*
- *Quantitative such as arrears status; and*
- *Based on data developed internally and obtained from external sources*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (Lanjutan)****Definisi Gagal Bayar (Default) (lanjutan)**

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai.

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (*output*) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti, badan pemerintah dan analisis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar (*base case*) mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

Skenario ekonomi yang dirumuskan menggunakan kisaran indikator utama berikut:

	2023	2022
Tingkat pengangguran / <i>Unemployment rate</i>	dasar 8% / <i>base 8%</i> kisaran antara 8% hingga 9% / <i>ranging between 8% and 9%</i>	dasar 8% / <i>base 8%</i> kisaran antara 8% hingga 9% / <i>ranging between 8% and 9%</i>
Suku bunga / <i>Interest rate</i>	dasar 1% / <i>base 1%</i> kisaran antara 0,5% hingga 2% / <i>ranging between 0.5% and 2%</i>	dasar 1% / <i>base 1%</i> kisaran antara 0,5% hingga 2% / <i>ranging between 0.5% and 2%</i>
Pertumbuhan PDB / <i>GDP growth</i>	dasar 0,8% / <i>base 0.8%</i> kisaran antara 0,05% hingga 2% / <i>ranging between 0.05% and 2%</i>	dasar 0,8% / <i>base 0.8%</i> kisaran antara 0,05% hingga 2% / <i>ranging between 0.05% and 2%</i>

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut:

- *Probability of default (PD)*
- *Loss of given default (LGD)*
- *Exposure at default (EAD)*

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (Continued)**Definition of Default (continued)**

Inputs, Assumptions, and Techniques used in estimating impairment.

The Bank uses forward-looking information in assessing whether there has been a significant increase in credit risk and measurement of expected credit losses. Based on advice from the Risk Management Committee, economists and consideration of various actual information and external forecast, the Bank formulated a base case for the movement of relevant economic variables in future as well as forecasts of other possible scenarios. This process involves developing two or more additional economic scenarios and considering the relative probabilities of the possible outputs. External information includes economic data and estimates published by, such as, government agencies and selected private sector analysts and academics.

The base case reflects the output with the highest probability and is used in strategic planning and budgeting. Other scenarios reflect more optimistic outputs and more pessimistic outputs.

The economic scenario is formulated using the following range of key indicators:

Measurement of Expected Credit Loss

The main inputs in measuring expected credit loss are the following variables:

- *Probability of default (PD)*
- *Loss of given default (LGD)*
- *Exposure at default (EAD)*

These parameters generally come from statistical models that are developed internally and other historical data. This parameter is adjusted to reflect forward-looking information.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (Lanjutan)****Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)**

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan rating yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. Model LGD mempertimbangkan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur, dan biaya pemulihan setiap jaminan yang merupakan bagian integral dari aset keuangan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:

- jenis instrumen;
- peringkat risiko kredit;
- jenis agunan;
- tanggal pengakuan awal;
- sisa waktu jatuh tempo;
- industri; dan
- lokasi geografis debitur.

42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (Continued)**Measurement of Expected Credit Loss (continued)**

These parameters generally come from statistical models that are developed internally and other historical data. This parameter is adjusted to reflect forward-looking information.

PD estimates is an estimate on a certain date, which is calculated based on a statistical ranking model, and is assessed using a rating that is adjusted to various categories of debtors and exposures. This statistical model is based on data compiled internally consisting of quantitative and qualitative factors.

LGD is the amount of loss if there is a default. LGD parameters are historically estimated based on the level of recovery of claims against debtors who default. The LGD model considers the structure, collateral, claim seniority, the debtor industry, and the cost of recovering any collateral that is an integral part of a financial asset.

EAD represents the estimated exposure in case of default. EAD of a financial asset is the gross carrying amount. For loan commitments and financial guarantees, EAD includes the amount that has been withdrawn, as well as potential future amounts to be withdrawn, which are estimated based on historical observations and forward-looking estimates.

When parameter modeling is done collectively, financial instruments are grouped according to the similarity of risk characteristics which include:

- *type of instrument;*
- *credit risk rating;*
- *type of collateral;*
- *date of initial recognition;*
- *remaining due date;*
- *industry; and*
- *debtor's geographical location.*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)****42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)****Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian
(lanjutan)****Measurement of Expected Credit Loss
(continued)**a. Analisis risiko kredit berdasarkan *internal rating
grades*

a. Credit risk analysis based on internal rating grades

31 Desember 2023 / December 31, 2023

	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / 12 month ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / Not Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / Credit Loss of Purchased or Originated Credit- Impaired Financial Assets
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi / Loans at amortized cost				
Rating internal / Internal Grade 1-2	72.869.294.341	72.869.294.341	--	--
Rating internal / Internal Grade 3-4	31.797.334.298	31.797.334.298	--	--
Rating internal / Internal Grade 5-6	5.201.276.891	--	5.201.276.891	--
Rating internal / Internal Grade 7-8	9.252.067.796	--	9.252.067.796	--
Rating internal / Internal Grade 9-10	95.280.654.168	--	95.280.654.168	--
Rating internal / Internal Grade 11-12	--	--	--	--
Rating internal / Internal Grade 13-14	--	--	--	--
Rating internal / Internal Grade 15-16	--	--	--	--
Rating internal / Internal Grade 17-18	--	--	--	--
Rating internal / Internal Grade 19-20	--	--	--	--
Rating internal / Internal Grade 21-22	--	--	--	--
Cadangan Kerugian Kredit / Loss Allowance	214.400.627.494	104.666.628.639	109.733.998.855	--
Nilai Tercatat / Carrying Amount	--	--	--	--

31 Desember 2022 / December 31, 2022

	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / 12 month ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / Not Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / Credit Loss of Purchased or Originated Credit- Impaired Financial Assets
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi / Loans at amortized cost				
Rating internal / Internal Grade 1-2	65.825.089.080	65.825.089.080	--	--
Rating internal / Internal Grade 3-4	20.711.969.142	20.711.969.142	--	--
Rating internal / Internal Grade 5-6	5.729.072.254	--	5.729.072.254	--
Rating internal / Internal Grade 7-8	8.355.965.055	--	8.355.965.055	--
Rating internal / Internal Grade 9-10	107.883.661.256	--	107.883.661.256	--
Rating internal / Internal Grade 11-12	--	--	--	--
Rating internal / Internal Grade 13-14	--	--	--	--
Rating internal / Internal Grade 15-16	--	--	--	--
Rating internal / Internal Grade 17-18	--	--	--	--
Rating internal / Internal Grade 19-20	--	--	--	--
Rating internal / Internal Grade 21-22	--	--	--	--
Cadangan Kerugian Kredit / Loss Allowance	208.505.756.787	86.537.058.222	121.968.698.565	--
Nilai Tercatat / Carrying Amount	--	--	--	--

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)****42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)****Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)****Measurement of Expected Credit Loss (continued)**b. Analisis risiko kredit berdasarkan *Days Past Due*b. Credit risk analysis based on *Days Past Due*

31 Desember 2023 / December 31, 2023

	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / 12 month ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / Not Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / Credit Loss of Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi / Loans at amortized cost				
< 30 Hari / Days	104.666.628.639	--	104.666.628.639	--
> 31-60 Hari / Days	5.201.276.891	--	5.201.276.891	--
> 61 - 90 Hari / Days	9.525.067.796	--	9.525.067.796	--
> 91 Hari / Days	95.280.654.168	--	95.280.654.168	--
Cadangan Kerugian Kredit / Loss Allowance	214.673.627.494	--	214.673.627.494	--
Nilai Tercatat / Carrying Amount	--	--	--	--

31 Desember 2022 / December 31, 2022

	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / 12 month ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / Not Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / Credit Loss of Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi / Loans at amortized cost				
< 30 Hari / Days	86.537.058.222	--	86.537.058.222	--
> 31-60 Hari / Days	5.729.072.254	--	5.729.072.254	--
> 61 - 90 Hari / Days	8.355.965.055	--	8.355.965.055	--
> 91 Hari / Days	107.883.661.256	--	107.883.661.256	--
Cadangan Kerugian Kredit / Loss Allowance	208.505.756.787	--	208.505.756.787	--
Nilai Tercatat / Carrying Amount	--	--	--	--

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)****Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)**c. Analisis risiko kredit berdasarkan *External Rating Grades***42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)****Measurement of Expected Credit Loss (continued)**

c. Credit risk analysis based on External Rating Grades

31 Desember 2023 / December 31, 2023

	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / 12 month ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / Not Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / Credit Loss of Purchased or Originated Credit- Impaired Financial Assets	Jumlah / Total
Penempatan Pada Bank Lain dan Bank Indonesia yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi / Placements with other banks and Bank Indonesia at amortized cost					
AAA	--	--	--	--	--
AA+	--	--	--	--	--
AA	36	--	--	--	36
AA-	--	--	--	--	--
A+	--	--	--	--	--
A	--	--	--	--	--
A-	--	--	--	--	--
BBB+	--	--	--	--	--
BBB	--	--	--	--	--
BBB-	--	--	--	--	--
BB+	--	--	--	--	--
BB	--	--	--	--	--
BB-	--	--	--	--	--
B+	--	--	--	--	--
B	--	--	--	--	--
Cadangan Kerugian Kredit / Loss Allowance	36	--	--	--	36
Nilai Tercatat / Carrying Amount	--	--	--	--	--

31 Desember 2023 / December 31, 2023

	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / 12 month ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / Not Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / Credit Loss of Purchased or Originated Credit- Impaired Financial Assets	Jumlah / Total
Efek-efek/ Marketable Securities					
AAA	--	--	--	--	--
AA+	--	--	--	--	--
AA	4.183	--	--	--	4.183
AA-	3.624	--	--	--	3.624
A+	--	--	--	--	--
A	--	--	--	--	--
A-	--	--	--	--	--
BBB+	--	--	--	--	--
BBB	--	--	--	--	--
BBB-	--	--	--	--	--
BB+	--	--	--	--	--
BB	--	--	--	--	--
BB-	--	--	--	--	--
B+	--	--	--	--	--
B	--	--	--	--	--
Cadangan Kerugian Kredit / Loss Allowance	7.807	--	--	--	7.807
Nilai Tercatat / Carrying Amount	--	--	--	--	--

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)****Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)**c. Analisis risiko kredit berdasarkan *External Rating Grades* (lanjutan)**42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)****Measurement of Expected Credit Loss (continued)**c. Credit risk analysis based on *External Rating Grades* (continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022

	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / 12 month ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / Not Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / Credit Loss of Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets	Jumlah / Total
Penempatan Pada Bank Lain dan Bank Indonesia yang Diukur Pada Biaya Perolehan Diamotisasi / Placements with other banks and Bank Indonesia at amortized cost					
AAA	--	--	--	--	--
AA+	--	--	--	--	--
AA	--	--	--	--	--
AA-	--	--	--	--	--
A+	--	--	--	--	--
A	--	--	--	--	--
A-	--	--	--	--	--
BBB+	--	--	--	--	--
BBB	--	--	--	--	--
BBB-	--	--	--	--	--
BB+	--	--	--	--	--
BB	--	--	--	--	--
BB-	--	--	--	--	--
B+	--	--	--	--	--
B	--	--	--	--	--
Cadangan Kerugian Kredit / Loss Allowance	--	--	--	--	--
Nilai Tercatat / Carrying Amount	--	--	--	--	--

31 Desember 2022 / December 31, 2022

	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan / 12 month ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Tidak Mengalami Penurunan / Not Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Mengalami Penurunan / Credit - Impaired Lifetime ECL	Kerugian Kredit Atas Aset Keuangan Yang dibeli Atau Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk / Credit Loss of Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets	Jumlah / Total
Efek-efek / Marketable Securities					
AAA	--	--	--	--	--
AA+	--	--	--	--	--
AA	4.183	--	--	--	4.183
AA-	--	--	--	--	--
A+	--	--	--	--	--
A	--	--	--	--	--
A-	--	--	--	--	--
BBB+	--	--	--	--	--
BBB	--	--	--	--	--
BBB-	--	--	--	--	--
BB+	--	--	--	--	--
BB	--	--	--	--	--
BB-	--	--	--	--	--
B+	--	--	--	--	--
B	--	--	--	--	--
Cadangan Kerugian Kredit / Loss Allowance	4.183	--	--	--	4.183
Nilai Tercatat / Carrying Amount	--	--	--	--	--

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**42. ANALISIS KUALITAS KREDIT (lanjutan)****42. CREDIT QUALITY ANALYSIS (continued)****Analisa Sensitivitas Kerugian Kredit
Ekspektasian terhadap Kondisi Ekonomi
Masa Depan****Sensitivity Analysis of Expected Credit Loss for
Future Economic Conditions**

Asumsi ekonomi yang disajikan berikut ini disusun secara internal untuk keperluan perhitungan kerugian kredit ekspektasian.

The economic assumptions presented below are prepared internally for the purpose of calculating expected credit losses.

**Skenario Moderat / Moderate
Scenario**

	2022	2023	2024	2025
Tingkat pengangguran / <i>Unemployment rate</i>	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%
Suku bunga / <i>Interest rate</i>	4,74%	4,74%	4,74%	--
Pertumbuhan PDB / <i>GDP growth</i>	3,74%	6,75%	7,37%	7,50%

**Skenario Optimis / Optimistic
Scenario**

Tingkat pengangguran / <i>Unemployment rate</i>	5,12%	4,61%	4,61%	4,61%
Suku bunga / <i>Interest rate</i>	2,77%	2,19%	1,73%	--
Pertumbuhan PDB / <i>GDP growth</i>	3,74%	7,43%	8,11%	8,25%

**Skenario Pesimis / Pessimistic
Scenario**

Tingkat pengangguran / <i>Unemployment rate</i>	5,12%	5,63%	5,63%	5,63%
Suku bunga / <i>Interest rate</i>	6,71%	7,28%	7,75%	--
Pertumbuhan PDB / <i>GDP growth</i>	3,74%	6,08%	6,63%	6,75%

**Rasio kerugian kredit ekspektasian
terhadap aset keuangan pada 31
Desember 2022 / ECL Ratio to Financial
Assets as of December 31, 2022**

Kerugian Kredit Ekspektasian yang dilaporkan / <i>Reported ECL</i>	214.673.627.494	--	214.673.627.494
Nilai Tercatat Bruto / <i>Gross Carrying Amount</i>	9.300.129.944.897	--	9.300.129.944.897

**Rasio kerugian kredit ekspektasian yang
dilaporkan terhadap nilai tercatat
bruto / ECL ratio to gross carrying
amount**

	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi / <i>Financial Assets measured at amortized cost</i>	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ <i>Financial Assets measured at fair value through other comprehensive income</i>	Jumlah / <i>Total</i>
	2.31%	--	2.31%

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah penuh,
kecuali dinyatakan lain)**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI****NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

As of December 31, 2023

And For The Year Then Ended

(Expressed in full amount in Rupiah,
unless otherwise stated)**43. REKLASIFIKASI AKUN**

Untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2023, terdapat reklasifikasi akun untuk laporan keuangan per 31 Desember 2022 sebagai berikut (dalam ribuan Rupiah):

	Catatan/ Note	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
Simpanan nasabah				<i>Deposits from customers</i>
Pihak ketiga	15	6.317.512.512	5.564.682.332	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	35	3.354.602.823	3.293.437.651	<i>Related parties</i>
Simpanan dari bank lain	16	512.664.426	363.210.339	<i>Deposits from other banks</i>
Dana syirkah temporer				<i>Temporary syirkah funds</i>
Pihak ketiga	15.c	--	1.088.936.009	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	15.c	--	26.275.728	<i>Related parties</i>

44. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank Jambi memiliki rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* bruto terhadap total aset produktif masing-masing sebesar 1,42% dan 1,09%.
- b. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank Jambi memiliki kredit yang diberikan yang *non-performing* bruto terhadap total kredit yang diberikan masing-masing sebesar 1,82% dan 1,50%.
- c. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi telah menerima setoran modal yang belum disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa sebesar Rp14.640.242.736 (empat belas miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) yang masing-masing terdiri dari:
1. Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
 2. Pemerintah Kabupaten Muaro Bungo sebesar Rp4.048.000.000 (empat miliar empat puluh delapan juta rupiah);
 3. Lainnya sebesar Rp592.242.735 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

43. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

In connection with the presentation of financial statement as of December 31, 2023, there is account reclassification of financial statement as of December 31, 2022 as follows (in thousands of Rupiah):

44. ADDITIONAL INFORMATION

- a. As of December 31, 2023 and 2022, Bank Jambi's non-performing earning assets (gross) to total earning assets ratios are 1.42% and 1.09%, respectively.
- b. As of December 31, 2023 and 2022, Bank Jambi's non-performing loans (gross) to total loans ratios are 1.82% and 1.50%, respectively.
- c. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi has received additional capital injection that has not been ratified by General Meeting of Shareholders amounting to Rp14,640,242,736 (fourteen billion six hundred forty million two hundred forty-two thousand seven hundred thirty-six rupiah) each consisting of:
1. Provincial Government of Jambi amounting to Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah);
 2. Municipal Government of Muaro Bungo amounting to Rp4,048,000,000 (four billion forty eight billion rupiah);
 3. Other amounting to Rp592,242,735 (five hundred ninety-two million two hundred forty-two thousand seven hundred thirty-five).



**PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BERSERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

Halaman

Bural Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 – 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3 – 4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6 – 7
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8 – 88

Informasi Keuangan Tambahan:

Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	i – II
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk	III – IV
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	V
Laporan Arus Kas Entitas Induk	VI – VII



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA DAN ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama	Nomos Haryono
Alamat Kantor	Askrida Tower Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120
Nomor Telepon	(021) 819-1212
Jabatan	Direktur Utama
2. Nama	Wawan Mulyawan
Alamat Kantor	Askrida Tower Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120
Nomor Telepon	(021) 819-1212
Jabatan	Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Bangun Askrida ("Perseroan") dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak telah dinilai secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak mengabaikan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Maret 2024
PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA

Direktur Utama  (Nomos Haryono)		Direktur  (Wawan Mulyawan)

KANTOR PUSAT :

ASKRIDA TOWER, Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120
Telp. (021) 8191212 (Hunting) Fax. (021) 29827215, 29827216, 29827217 E-mail : info@askrida.co.id
Anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia No. R. 0018.2002



LAPORAN AUDIT FOR INDEPENDEN

Laporan No. 00061-F3.0260-AU.11-08-1660-2-1/11-2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Asuransi Bangun Askrida dan Entitas Anak

Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Asuransi Bangun Askrida dan Entitas Anak ("Grup") yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian atas liabilitas kontrak asuransi

Cadangan teknis asuransi yaitu cadangan klaim (termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (TBNR)) dan cadangan premi. Pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan teknis asuransi signifikan terhadap jumlah liabilitas Grup. Jumlah liabilitas asuransi dan aset reasuransi adalah sebesar Rp3.115.325.541.220 dan Rp789.732.468.148, seperti yang dijelaskan dalam catatan 12 pada laporan keuangan konsolidasian, pemenuhan cadangan melibatkan pertimbangan yang signifikan atas hasil di masa depan yang tidak pasti terkait dengan pembayaran kerugian dan perubahan eksposur risiko bisnis, termasuk penyelesaian persek atas kewajiban perancang polis jangka panjang.

Asuransi-acumasi yang digunakan dalam perhitungan cadangan teknis asuransi ditentukan berdasarkan asuransi-acumasi aktuaria yang ditetapkan oleh Grup termasuk hasil investasi, tingkat diskonto, biaya-biaya dan inflasi. Asuransi-acumasi ini ditentukan berdasarkan pengaliran aktual dan studi pengalaman Grup.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan 1)

Karena ketidakpastian estimasi yang signifikan terkait dengan penentuan cadangan teknis asuransi, risiko hal ini kami anggap sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami memahami dan telah mengevaluasi penilaian atas liabilitas kontrak asuransi, dimana kami telah melibatkan pakar aktuaria independen dan melakukan pengujian substantif. Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons Hal Audit Utama ini:

- Karena ada area yang membutuhkan pertimbangan manajemen dengan estimasi dan kriteria perhitungan cadangan teknisnya, maka kami menganggap liabilitas asuransi dan aset reasuransi sebagai hal audit utama.
- Kami telah melaksanakan prosedur memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi pengendalian internal Grup yang relevan berhubungan dengan liabilitas asuransi dan aset reasuransi.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi ekuitas serta pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Kami memeriksa dan menguji metodologi dan asumsi atas liabilitas kontrak asuransi termasuk konsistensi penerapan asumsi dalam perhitungan, seperti: tingkat dafontio, inflasi, tingkat lapse dan alokasi biaya.
- Secara sampel, kami melakukan perhitungan matematis ulang secara independen atas *Gross Premium Reserve (GPR)* dan aset reasuransi pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan PSAK 62, "Kontrak Asuransi" (PSAK 62).
- Kami melakukan pemeriksaan atas perhitungan matematis, berdasarkan sampel, atas nilai cadangan kotor dan bersih terhadap klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (*IBNR*) dan metodologi yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan PSAK 62.
- Kami melakukan perhitungan matematis ulang secara independen atas Pengujian Kecukupan Liabilitas *(Liability Adequacy Testing)* sesuai dengan PSAK dan melakukan pemeriksaan terhadap kecukupan cadangan teknis pada tanggal 31 Desember 2023.
- Kami melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan akurasi data yang digunakan untuk menghitung cadangan teknis dengan melakukan rekonsiliasi antara laporan aktuaria dengan angka dalam dokumen pendukung pada tanggal 31 Desember 2023.

Pewekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada catatan 19 atas akun Utang Klaim pada laporan keuangan terlampir, bahwa Grup memiliki perjanjian penyalangan tuduhan klaim kepada pihak tertanggung yang terpisah dari prosedur penanganan klaim pada umumnya. Kami tidak dalam memastikan besaran risiko atas tidak terhitungnya penanganan klaim tersebut didalam perhitungan cadangan teknis yang dilakukan.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kamu setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melakukannya, memperumbungkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan masalah tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan 2)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai ketepatan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intent untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan (dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut).

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang cukup dan tepat untuk menyelesaikan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, penyalahgunaan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyalahkan opini atau efektivitas pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kelengkapan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang memadai penyajian wajar.



S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

SIKAP NOMOR : KSP-PRKMI 2017
SIKAP TANGGAL : KSP-PRKMI 2017

MEMBER OF **INTEGRA INTERNATIONAL**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan 3)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola (termasuk, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanannya terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode 6 bul dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami mengomunikasikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan dikecukulkan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Kantor Akuntan Publik
S. Mannan, Ardiansyah & Rekan



Nur Eka Saputra, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1660

28 Maret 2024

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Diseajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	Catatan	2023	2022
Kas dan bank	3.(8), 7	371.846.351.919	389.358.067.780
Piutang premi	3.(23), 8	257.342.528.144	165.126.766.504
Piutang hasil investasi	3.(9), 9	12.272.380.000	11.364.166.582
Piutang reasuransi	3.(13), 10, 35	405.729.519.418	143.348.578.524
Deposito berjangka	3.(4), 3.(5), 11a, 11b	2.024.218.123.845	1.681.050.239.895
Efek ekuitas yang diperdagangkan	3.(4), 3.(5), 11c	9.125.175.000	5.148.875.000
Unit penyertaan risiko dana	3.(4), 3.(5), 11d	2.811.567.552	2.619.896.555
Efek utang dan hak hingga jatuh tempo	3.(4), 3.(5), 3.(22), 11e	155.059.172.201	98.169.536.745
Efektif yang tersedia untuk dijual	3.(4), 3.(5), 3.(22), 11f	635.871.773.519	512.283.083.999
Aset reasuransi	3.(12), 3.(19), 3.(21), 12	709.732.488.148	753.651.027.285
Penyisihan urut bebat di muka	12d	-	96.219.236.563
Investasi pada properti, setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 19.702.545.376 dan Rp 17.848.900.980 tahun 2023 dan 2022.	3.(7), 11h	51.777.491.786	53.631.136.202
Biaya dibayar di muka	3.(10), 13	27.939.090.480	97.294.929.538
Penyertaan langsung	11g	2.444.657.126	2.444.657.128
Piutang lain-lain	14	47.420.371.557	53.454.747.401
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 119.219.680.959 dan Rp 108.346.545.248 tahun 2023 dan 2022	3.(11), 15	122.847.409.902	119.147.668.140
Aset tak guna	16	9.061.415.374	2.894.984.983
Aset tak berwujud	3.(18), 17	3.236.834.273	2.204.805.612
Aset pajak tangguhan	3.(14), 21d	35.890.852.425	31.466.060.205
Aset lain-lain	18	10.850.053.328	14.071.958.471
JUMLAH ASET		<u>4.891.483.535.787</u>	<u>4.238.338.307.876</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT ASURAHSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dicatatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	Catatan	2023	2022
LIABILITAS			
Utang klaim	19	48.680.551.170	147.966.077.840
Utang reasuransi	3.(12), 3.(13), 20	12.059.592.797	76.207.347.416
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	3.(16), 23	92.539.159.548	70.530.545.458
Premi yang belum merupakan pendapatan	3.(12), 3.(13), 12b	74.404.207.675	55.746.367.587
Utang komisi		62.932.917.160	56.151.891.780
Utang pajak dan zakat	3.(14), 21a	19.089.339.808	15.095.592.282
Biaya yang masih harus dibayar	22, 36	23.635.985.663	12.081.898.693
Liabilitas sewa	16	8.320.684.362	1.626.175.086
Estimasi liabilitas klaim	3.(12), 3.(13), 12a	334.548.518.027	217.184.271.462
Liabilitas kontrak asuransi jangka panjang	3.(12), 3.(13), 12e	2.706.371.815.518	2.208.239.852.093
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	3.(16), 23	49.478.329.996	49.727.812.042
Utang lain-lain	24, 36	153.264.515.466	161.134.243.492
JUMLAH LIABILITAS		3.585.308.827.170	3.071.892.045.021
EKUITAS DAN PESERTA			
Dana 'tabung'		210.655.082.534	144.476.827.169
EKUITAS			
Modal saham,	25a	318.950.000.000	312.530.000.000
Modal dasar = 40.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 per lembar. Pada tahun 2023 dan 2022 telah ditempatkan dan disetor penuh masing-masing sebesar 31.896 dan 31.253 lembar saham.			
Tambahan modal disetor (saham)	25b	5.770.000.000	6.420.000.000
Aksi saham		-	-
Cadangan khusus	27a	110.000.000	110.000.000
Tambahan modal disetor (Tax Amnesty)	21a	18.285.806.904	18.285.806.904
Penghasilan komprehensif lain		21.876.753.319	4.080.868.910
Saldo laba	27b		
Sudah ditentukan penggunaannya		803.703.898.125	588.356.000.449
Belum ditentukan penggunaannya		112.281.304.978	93.020.251.770
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk		1.080.976.661.326	1.002.803.019.042
Kepentingan lain pengendali	28	18.544.984.787	18.386.808.846
JUMLAH EKUITAS		1.099.521.626.093	1.018.169.825.669
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		4.684.829.325.797	4.238.338.397.878

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT ASURANSI BANGUN ABKRIDA
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN UNDERWRITING			
Pendapatan premi			
Premi bruto	28, 37	6.721.639.296.511	6.142.184.560.535
Premi reasuransi	29, 37	(712.352.654.046)	(840.140.779.183)
Mutasi atas premi yang belum merupakan pendapatan	3,(12), 3,(13), 37	(650.549.820.074)	(250.130.552.260)
Jumlah pendapatan underwriting		5.358.727.012.391	5.051.913.229.092
BEBAN UNDERWRITING			
Beban klaim			
Klaim bruto	30, 37	(3.947.351.231.838)	(3.622.456.692.775)
Klaim reasuransi	31, 37	(505.645.556.399)	(500.900.250.290)
Mutasi estimasi liabilitas klaim	3,(12), 3,(13), 37	(82.406.514.018)	(44.384.502.358)
Jumlah beban klaim		(4.434.112.189.456)	(3.165.942.944.841)
Beban komisi bersih	32, 37	(1.106.553.191.312)	(1.205.978.613.850)
Beban underwriting lainnya	37	(68.315.001.226)	(51.587.292.383)
Jumlah beban underwriting		(4.606.980.381.998)	(4.433.508.841.074)
HASIL UNDERWRITING	37	751.746.630.395	618.404.388.018
Hasil investasi	34(9), 33, 38	103.748.964.929	74.615.043.319
Bagi hasil		(106.059.189.147)	(21.532.295.452)
Beban usaha	3,(15), 34	(586.052.808.708)	(541.838.758.185)
Penyisihan ujiro		(31.536.911.725)	(4.967.551.452)
LABA USAHA		152.884.575.748	124.884.828.248
Pendapatan (beban) lain-lain	35	(8.469.516.981)	(3.196.999.567)
Pengaruh pajak final dari hasil investasi	33	(15.924.980.516)	(11.595.809.770)
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK		128.551.078.247	110.082.018.911
Zakat		(2.132.579.211)	(1.557.455.561)
LABA SEBELUM PAJAK		126.418.499.036	108.534.553.350
Pajak penghasilan :	3,(14), 21		
Pajak kini		(14.827.175.200)	(11.981.089.780)
Pajak tangguhan		4.356.777.838	(767.093.146)
LABA PERIODE BERJALAN		116.148.101.674	96.786.370.424

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT ASURANSI BANGUN ASKUDA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2023	2022
LABA PERIODE BERJALAN		115.148.101.674	95.786.370.424
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang dapat diklasifikasi ke laporan laba rugi :			
Investasi tersedia untuk dijual		18.076.662.810	(382.099.074)
Pos yang tidak dapat diklasifikasi ke laporan laba rugi:			
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja		(327.069.765)	2.527.639.704
Pengaruh pajak penghasilan		71.955.349	(507.967.698)
LABA KOMPREHENSIF		133.868.650.688	97.423.943.356
LABA PERIODE BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		112.281.304.978	93.020.251.779
Kepentingan non pengendali	26	3.886.796.696	2.766.118.645
Jumlah		116.148.101.674	95.786.370.424
LABA KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		130.076.199.387	94.736.244.180
Kepentingan non pengendali	26	3.893.451.681	2.687.699.176
Jumlah		133.969.650.688	97.423.943.356

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT ASURANSI RAJAWATI ASKORIDA
LAPORAN PERUBAHAN BUKLAH MONSOL BIASAH
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Saham	Tambahan Modal Disabar	Talipan Modal	Cadangan Khusus	Penghasilan Normatif Lain	Suatu Dikurangi Penghasilan	Suatu Laba	Jumlah Ekuitas yang diungkapkan ke Pemilik Ekuitas Biasa	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2021		317.410.000.000	18.315.996.004	18.078.000.000	118.000.000	7.356.887.889	548.921.753.283	72.368.939.304	151.581.087.128	1.571.088.624	153.152.246.740
Tambahan modal disbar											
Talipan modal disbar		15.020.000.000		(15.020.000.000)							
Tambahan modal disbar non pengendali				6.430.000.000							
Aksi saham non pengendali											
Dividen	27										
Cadangan umum	27										
Yayasan Kesejahteraan Pegawai Askorid	27										
Laba (Rugi) keuangan lain						(325.274.449)					
Penghasilan kembali pembelian perusahaan	22					4.556.325.492					
Pajak penghasilan komprehensif lain						(314.058.552)					
Laba bersih tahun berjalan								83.020.251.779	93.020.251.779	2.766.518.845	
Saldo per 31 Desember 2022		312.820.000.000	18.284.946.004	6.428.000.000	118.000.000	4.080.854.810	568.384.000.449	93.020.251.779	1.012.861.819.042	18.369.596.840	1.031.221.415.882
Tambahan modal disbar	25			(6.428.000.000)							
Talipan modal disbar	25	8.420.000.000		5.770.000.000							
Tambahan modal disbar non pengendali											
Aksi saham non pengendali											
Dividen	27										
Cadangan umum	27										
Yayasan Kesejahteraan Pegawai Askorid	27										
Laba (Rugi) keuangan lain						18.050.821.080					
Penghasilan kembali pembelian perusahaan	22					(528.182.364)					
Pajak penghasilan komprehensif lain						72.184.712					
Laba bersih tahun berjalan								112.281.304.978	112.281.304.978	3.808.296.046	
Saldo per 31 Desember 2023		310.856.000.000	18.281.906.504	5.770.000.000	118.000.000	21.875.762.319	648.701.404.125	112.281.304.978	1.860.076.647.528	18.564.862.767	1.878.331.430.295

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus kas masuk		
Penerimaan premi langsung	5.632.347.626,383	8.264.907.064,265
Penerimaan premi tidak langsung	10.997.608,873	17.308.894,000
Penerimaan klaim recovery	412.264.573,005	453.313.456,017
Penerimaan lain	51.400.979,518	224.982.916,354
Jumlah arus kas masuk	7.107.510.847,779	6.980.512.330,636
Arus kas keluar		
Pembayaran premi reasuransi	(650.212,755,071)	(680.306,351,342)
Pembayaran komisi	(1.264.620,253,216)	(1.231.695,703,828)
Pembayaran klaim	(3.981.977,712,789)	(3.405,014,319,638)
Pembayaran beban usaha	(507,718,588,329)	(478,953,372,793)
Pembayaran pajak	(58,658,165,480)	(54,634,748,420)
Pembayaran lain	(143,468,837,045)	(57,056,164,435)
Jumlah arus kas keluar	(6.608,658,289,910)	(5.907,660,860,484)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	500.354,557,869	1.082,851,670,182
Arus Kas dan Aktivitas Investasi		
Arus kas masuk		
Pencairan / penjualan investasi	1.101,252,918,311	1,927,781,738,702
Hasil investasi deposito	58,606,774,242	40,891,979,657
Hasil investasi obligasi	26,833,730,614	13,779,944,085
Hasil penjualan aset keuangan	-	4,799,172,364
Hasil investasi properti	1,654,342,119	1,045,203,563
Hasil penjualan aset tetap	71,110,808	579,800
Jumlah arus kas masuk	1.188,428,875,884	1.988,398,017,971
Arus kas keluar		
Penempatan investasi	(1,807,160,362,251)	(2,794,636,524,789)
Pembelian aset tetap	(16,865,113,960)	(8,185,881,086)
Pembelian aset lain	(2,042,821,248)	(773,275,981)
Penambahan penyertaan langsung	-	(1,400,000,000)
Jumlah arus kas keluar	(1,626,071,297,459)	(2,604,997,681,856)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	(438,642,421,575)	(616,599,663,885)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT ASURANSI BANGUN ASKORIDA
LAPORAN ARUS KAS - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus kas masuk		
Tambahan modal disetor	5.770.000.000	17.820.000.000
Agió saham	-	2.500.000.000
Jumlah arus kas masuk	<u>5.770.000.000</u>	<u>20.320.000.000</u>
Arus kas keluar		
Pembayaran dividen	(85.987.990.830)	(72.235.121.571)
Pendanaan kesejahteraan pegawai	(1.005.861.325)	(708.901.498)
Jumlah arus kas keluar	<u>(86.993.852.155)</u>	<u>(72.944.023.067)</u>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>(81.223.852.155)</u>	<u>(52.624.023.067)</u>
Kendikan (penurunan) bersih kas dan bank	(17.511.716.551)	213.627.983.230
Saldó kas dan bank awal periode	389.358.067.780	175.738.084.550
Saldó Kas dan Bank akhir periode	<u>371.840.351.419</u>	<u>389.358.067.780</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Asuransi Bangun Askrida (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan berdasarkan Akta No.9 tanggal 2 Desember 1989 oleh Notaris Raharti Sudjardjo, SH. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2.11682.HT.01.01 tanggal 30 Desember 1989 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.19 tanggal 6 Maret 1990.

Perseroan memperoleh izin usaha dalam bidang Asuransi Kerugian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.192/KM.13/1990 tanggal 14 Maret 1990.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Kartono, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-67624.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 19 November 2008.

Selanjutnya berdasarkan Akta No. 500 tanggal 30 Mei 2016, oleh Kartono S.H. Notaris di Jakarta tentang pembaharuan unit syariah dari PT Asuransi Bangun Askrida kepada PT Asuransi Askrida Syariah dan Perseroan akan menutup dan menghentikan operasional unit usaha syariah Perseroan, sehingga, merubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan maksud dan tujuan Perseroan menjadi menjalankan usaha asuransi kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 31 tanggal 27 September 2023, oleh Ashoya Ratem, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta, yang menambah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0124323 tanggal 29 September 2023.

Perseroan berkantor pusat di Askrida Tower, Jalan Pramyka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan memiliki 27 kantor cabang dan 12 kantor pemasaran. Perseroan terdaftar pada KPP Madya Jakarta Pusat dengan NPWP Nomor : 01.385.482.4-073.000 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Usaha - Asuransi Non Jasa Konvensional. Jumlah karyawan yang masih aktif, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing berjumlah 637 dan 588 orang (tidak diaudit).

b. Organisasi dan Struktur Manajemen

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 20 Maret 2023 dan Akta No. 25 tanggal 14 November 2022 yang telah dicatat dan diterima di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.09-0077860 tanggal 14 November 2022, keduanya oleh Ashoya Ratem, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta dan masing-masing ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asuransi Bangun Askrida, maka susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

PT ASURANSI BANGUN ABKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM - Lanjutan

b. Organisasi dan Struktur Manajemen - Lanjutan

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Komisaris Utama	: Eka Yonkedi	Eka Yonkedi
Komisaris	: Herry Yandson	—
Komisaris Independen	: Didik Supriyanto	Didik Supriyanto
Komisaris Independen	: Prakoso Budh Wibowo	Hadri Susanto
Komisaris Independen	: Hadi Susanto	Muchlis Hasyim Yahya

Susunan Komite audit, Komite pemantau risiko dan Komite remunerasi dan nominasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Komite Audit		
Ketua	: Hadi Susanto	Hadri Susanto
Anggota	: Didik Supriyanto	Didik
Anggota	: Umar Suteges Yulianto	Umar Suteges Yulianto
Komite Pemantau Risiko		
Ketua	: Hadi Susanto	Muchlis Hasyim Yahya
Anggota	: Didik Supriyanto	Wardhana
Anggota	: Wardhana	—
Komite Remunerasi dan Nominasi		
Ketua	: Didik Supriyanto	Didik
Anggota	: Hadi Susanto	Zaehal Aripin
Anggota	: Kadiv. SDM (ex officio)	—

Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.540.738.118 dan Rp3.517.919.401.

Berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 5 Oktober 2020, oleh Ashuya Rafam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah ditanda-tangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0396093 tanggal 8 Oktober 2020, maka susunan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Nondal Haryoto
Direktur Pemasaran	: Bunyamin
Direktur Teknik	: Abdul Mukli
Direktur Operasional	: Wawan Mulyawan
Direktur Kepatuhan	: Hendro Friendiyanto

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1 INFORMASI UMUM - Lanjutan

b Organisasi dan Struktur Manajemen - Lanjutan

Remunerasi Dewan Direksi Perseroan untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.372.061.575 dan Rp13.793.203.261.

c Entitas Anak

Perseroan memiliki kepemilikan langsung pada entitas anak, yaitu:

PT Asuransi Askrida Syariah (AAS)

PT Asuransi Askrida Syariah didirikan berdasarkan Akta No. 580 tanggal 26 September 2017 oleh Notaris Kartono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-004696.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017.

PT Asuransi Askrida Syariah adalah asuransi umum dengan prinsip syariah yang merupakan hasil pemekaran usaha (*spin-off*) Perseroan dengan Unit Usaha Syariah Perseroan. Proses pendiriannya telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 27 April 2017 sesuai Akta No. 46 Notaris Ashya Ratani, S.H., M.Kn.

Untuk memenuhi klasifikasi Bank Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017, Anggaran Dasar entitas anak telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dilakukan dalam Akta No. 127 tanggal 18 Februari 2020, oleh Kartono, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-0022733.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020. Setelah dilakukan perubahan maka Pasal 3 Anggaran Dasar Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perusahaan adalah Asuransi Non Jiwa dengan prinsip syariah.

PT Asuransi Askrida Syariah ber Kantor di Ruko Megat Gmair Cempaka Mas Blok W1 No. 35, Jl. Latend Suprpto RT/RW 019008 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat. PT Asuransi Askrida Syariah terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Kemayoran dengan NPWP Nomor: 63.139.210.6-027.000.

Jumlah karyawan PT Asuransi Askrida Syariah pada 31 Desember 2023 dan 2023 berjumlah 244 orang dan 233 orang (Tidak laudil).

Nama Entitas Anak	Persentase Kepemilikan	2023	Persentase Kepemilikan	2022
		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi
PT Asuransi Askrida Syariah	94,50%	1.380.246.079.131	94,50%	1.025.085.235.276

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dibacaikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM - Lanjutan

c. Entitas Anak - Lanjutan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi Askrida Syariah No. 76 tanggal 31 Mei 2023 oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan akta No. 85 tanggal 14 Juli 2021, oleh Kartono, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum No. AHU-AH.01.09-0124235 tanggal 02 Juni 2023 dan No. AHU-AH.01.03-0428576 tanggal 15 Juli 2021. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka susunan Dewan Komisaris entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Komisaris Utama	: Abdul Mulki	Abdul Mulki
Komisaris	: —	Andi Mantawijaya
Komisaris Independen	: Zairani	M. Yuyun Istikhori
Komisaris Independen	: Basuki	Sumardi

Susunan komite audit entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ketua	: Basuki	Sumardi
Anggota	: Zairani	Andi Mantawijaya
Anggota	: —	M. Yuyun Istikhori

Remunerasi Dewan Komisaris entitas anak untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.126.832.887 dan Rp4.408.116.148.

Selanjutnya berdasarkan Akta No. 76 tanggal 31 Mei 2023, oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0124235 tanggal 2 Juni 2023 dan Akta No. 01 tanggal 1 April 2022, oleh Ashoya Ratam, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0001509 tanggal 5 April 2022, maka susunan Direksi entitas anak per 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Direktur Utama	: Henry Ananda Siregar	Harli Wilhawa
Direktur Bisnis		
dan Operasional	: Mohammad Sjafril Lawada	Henry Ananda Siregar
Direktur Keuangan, SDM dan Umum	: Suryadi Apriyanto	Mohammad Sjafril Lawada

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM - Lanjutan

c. Entitas Anak - Lanjutan

Remunerasi Dewan Direksi entitas anak untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.144.112.226 dan Rp5.894.341.844.

Sebagai rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUJ) dengan surat nomor U-183/DSN-MUJ/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 dan berdasarkan Akta No. 586 tanggal 28 September 2017 oleh Notaris Kartono, S.H., Notaris di Jakarta, maka susunan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

Ketua	: Utang Ratuwijaya
Anggota	: Daud Rasyid
Anggota	: Muhammad Abdul Hamid

2. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI

Standar Akuntansi Keuangan (SAK), perubahan dari Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi";
- Amendemen PSAK 16: "Aset tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang dintenalkan";
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan tentang definisi estimasi akuntansi";
- Amendemen PSAK 46: "Pajak penghasilan tentang reformasi pajak Internasional ketentuan model pilar dua"; dan
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" - Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa Salik.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK), perubahan dari Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" - Klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" - Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" - Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa Salik.
- PSAK 74: Kontrak Asuransi

PSAK 74 mengatur revisasi beberapa ketentuan antara lain berupa penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penetapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi. PSAK 74 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan yang berasal dari kegiatan investasi.

Tanggal efektif penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi di Indonesia akan berlaku pada 1 Januari 2026 dengan penerapan dini diperkenankan.

PT ASURANSI BANGUN ASKREDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. PERUBAHAN PADA PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI - Lanjutan

■ **PSAK 74: Kontrak Asuransi - Lanjutan**

Status pers Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 20 Oktober 2023, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) menegaskan bahwa PSAK 74 tidak diterapkan dan tidak berlaku pada kontrak asuransi syariah. PSAK 74 tidak menggantikan dan/atau sebagai referensi kontrak asuransi syariah sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. PSAK 106 diterapkan pada kontrak asuransi dalam rangka penyusunan laporan keuangan bertujuan umum yang berbasis Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. PSAK dan ISAK Syariah merupakan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan Indonesia seperti yang diatur dalam Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia.

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi penting yang diadopsi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini diuraikan dibawah ini. Kebijakan ini telah diterapkan pada semua periode yang disajikan secara konsisten, kecuali dinyatakan lain.

3.1 Pernyataan Keputusan

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup yang diselesaikan pada tanggal 28 Maret 2024.

3.2 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (bersama-sama disebut "Grup") adalah bertujuan umum yang disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya historis, yang dimodifikasi oleh revaluasi tanah dan bangunan, properti investasi, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Entitas Anak PT Asuransi Askreda Syariah yang beroperasi dalam bidang asuransi umum dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan dengan prinsip akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian laporan keuangan konsolidasian Syariah", PSAK 102 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK 105 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK 106 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Musyarakah", PSAK 107 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Ijarah", PSAK 110 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Sukuk", dan standar akuntansi keuangan lain di Indonesia.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung, dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas tidak mencakup investasi likuid jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.2 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian - Lanjutan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan penggunaan esensi akuntansi penting. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkap di catatan 4.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Rupiah bersih (IDR), kecuali dinyatakan lain (lihat catatan 3.4.a mata uang fungsional dan pelaporan).

3.3 Prinsip Konsolidasian

Perseoran dan entitas anak menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian", yang diadopsi dan IFRS 10 menggantikan paragraf PSAK No.4 (Revisi 2009) reangineran pengakuan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian. menerapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain.

Dalam hal pengendalian terhadap Entitas Anak dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha Entitas Anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebesar hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Kepengendalian non-pengendalian adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk.

Entitas Anak adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atas entitas anak, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain. Grup juga menilai keberadaan pengendalian ketika Grup tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional secara de-facto. Pengendalian de-facto dapat timbul ketika jumlah hak suara yang dimiliki secara relatif terhadap jumlah dan penyebaran kepemilikan hak suara pemegang saham lain memberikan Grup kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasi, serta kebijakan lainnya.

Seluruh transaksi dan saldo akun antar perusahaan yang signifikan (termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi) telah dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasian. Perseoran dan Entitas Anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Jika anggota Perusahaan dan Entitas Anaknya menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk transaksi dan peristiwa dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.3 Prinsip Konsolidasian - Lanjutan

Kepentingan non pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non pengendali atas laba tahun berjalan dari ekuitas. Entitas Anak tersebut sesuai dengan presentase kepemilikan pemegang saham non pengendali pada Entitas Anak tersebut.

3.4 Penjabaran Mata Uang Asing

a. Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Item-item yang tercatat dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi tempat Grup beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pelaporan Grup.

a. Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Untung dan rugi selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada akhir tahun diakui di dalam laporan laba rugi, kecuali jika ditangguhkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai atas kas dan lindung nilai investasi beruip yang memenuhi syarat. Untung dan rugi selisih kurs yang berhubungan dengan pinjaman kas dan setara kas disajikan dalam laporan laba rugi pada "pendapatan atau biaya keuangan". Selain itu, semua keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam laporan laba rugi pada "pendapatan atau biaya non operasional lainnya".

Perubahan dalam nilai wajar surat berharga yang berdominasi mata uang asing yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui antara perbedaan penjabaran yang dihasilkan dari perubahan harga perolehan surat berharga yang diamortisasi dan perubahan lain dalam nilai tercatat surat berharga. Perbedaan penjabaran yang berhubungan dengan perubahan harga perolehan yang diamortisasi diakui dalam laporan laba rugi, perubahan lain dalam nilai tercatat diakui di ekuitas.

3.5 Aset Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangan kedalam kategori sebagai berikut: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan piutang, serta tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini bergantung pada tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBLIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.5 Aset Keuangan - Lanjutan

3.5.1 Klasifikasi

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori ini jika perolehannya terutama untuk dijual dalam jangka pendek. Aset pada kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan, jika tidak, maka diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset keuangan dikategorikan pada nilai wajar melalui laba rugi pada saat perolehan yaitu :

Memiliki dana internal untuk menyingkirkan kewajiban kontrak investasi dan asuransi yang bertubuhan dengan perubahan nilai wajar aset tersebut. Pengkategorian aset tersebut menjadi nilai wajar pada laba rugi mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonstanan pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch"), dengan cara lain akan timbul dari pengukuran aset dan liabilitas atau pengakuan laba dan rugi atas dasar yang berbeda.

Pengelolaan dan kinerjanya dievaluasi atas dasar nilai wajar. Informasi tentang aset keuangan ini untuk personel manajemen kunci tersedia di internal atas dasar nilai wajar. Strategi investasi perseoran adalah menginvestasikan pada surat berharga ekuitas dan utang dan mengevaluasinya dengan referensi nilai wajar.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diukur pada nilai wajarnya padasari pengukuran awal biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugikonsolidasian. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan ini diakui di dalam laporan laba rugikonsolidasiandari dicatat sebagai keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar efek-efek pada pendapatan investasi.

b. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset kasatgang non derivatif dengan pembayaran tetap atau ditentukan dan tidak mempunyai luasan harga di pasar aktif. Kategori ini dimasukkan sebagai aset lancar, kecuali jika jatuh tempohnya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, maka dimasukkan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan dan piutang Perseoran terdiri dari "piutang asuransi", piutang non asuransi dari pihak tidak beresasi maupun beresasi pada laporan posisi keuangan.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - lanjutan

3.5 Aset Keuangan - Lanjutan

3.5.1 Klasifikasi - Lanjutan

c. Dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau ditentukan dan tanggal jatuh tempo, serta manajemen mempunyai niat positif dan mampu untuk memiliki hingga jatuh tempo, selain dari:

- Investasi yang pada pengakuan awalnya dimaksudkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Investasi yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual; dan
- Investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

d. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah instrumen non derivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Aset keuangan ini dimasukkan sebagai aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud melupuskannya dalam periode 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui sebagai penghasilan komprehensif lain kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya.

3.5.2 Pengakuan dan Pengukuran

Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pada awalnya investasi diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi untuk seluruh aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Biaya transaksi didistribusikan secara langsung ke harga perolehan. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laba rugi.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak manajama arus kas dari investasi telah habis atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikannya. Aset keuangan tersedia dijual dan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selanjutnya dicatat sebesar nilai wajar. Pinjaman yang diberikan, piutang dan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan menggunakan suku bunga efektif.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.5 Aset Keuangan - Lanjutan

3.5.2 Pengakuan dan Pengukuran - Lanjutan

Labu bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar kategori "aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi" disajikan pada laporan laba rugi dalam "pendapatan dana" dalam periode terjadinya. Sementara itu, rugi bersih yang timbul dari perubahan nilai wajar kategori "aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi" disajikan pada laporan laba rugi sebagai bagian dari "beban dana" dalam periode terjadinya. Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi sebagai "penghasilan lain-lain" ketika hak Grup untuk menerima pembayaran sudah ditetapkan. Pendapatan bunga aset keuangan tersebut dicatat peris "pendapatan keuangan".

Perubahan nilai wajar efek moneter dan non-moneter yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui pada pendapatan komprehensif lainnya.

Ketika efek diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tetapi dijual, akumulasi penyesuaian nilai yang diakui pada ekuitas dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai "penghasilan keuangan" atau "beban keuangan".

Ketika efek diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, maka akumulasi penyesuaian nilai wajar yang diakui pada ekuitas dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari "beban keuangan".

Bunga atas efek yang tersedia untuk dijual dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "penghasilan keuangan". Dividen dari instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi sebagai bagian dari "penghasilan lain-lain" ketika hak Grup untuk menerima pembayaran sudah ditetapkan.

3.5.3 Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dieliminasi (*offset*) dan jumlah bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan liabilitasnya secara simultan.

3.6 Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan rugi penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset (peristiwa kerugian) dan peristiwa kerugian tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
[Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain]

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.6 Penurunan Nilai Aset Keuangan - Lanjutan

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, penurunan nilai wajar efek yang signifikan dan berkepanjangan di bawah harga perolehan dapat dianggap sebagai indikator bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai:

a. Aset dicatat sebesar harga perolehan diamortisasi

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah rugi diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang destinasi (tidak termasuk rugi kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah rugi diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan memiliki tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur rugi penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif saat ini yang ditentukan dalam kontrak. Untuk alasan praktis, Perseroan dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika pada periode selanjutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitur), pemulihan atas jumlah penurunannya diakui pada laporan laba rugi.

b. Aset diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual

Jika terdapat bukti objektif atas penurunan nilai aset keuangan tersedia untuk dijual, kerugian kumulatif diakui sebagai selisih antara harga perolehan akuisisi dan nilai wajar kini dikurangi kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang sebelumnya diakui pada laporan laba rugi, dipindahkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai instrumen ekuitas yang diakui pada laporan laba rugi tidak dapat dipulihkan melalui laporan laba rugi.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatannya dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa setelah penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi, kerugian penurunan nilai dipulihkan melalui laporan laba rugi.

3.7 Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah dan bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai untuk menghasilkan sewa atau untuk menjual nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrasi, atau dijual dalam kegiatan sehari-hari.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAP KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.7 Properti Investasi - Lanjutan

Properti Investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi atau pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung seperti biaya jasa hukum, pajak penghasilan properti dan biaya transaksi lain. Sedangkan biaya yang tidak termasuk dalam harga perolehan antara lain, biaya pembukaan fasilitas baru, kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat hunian yang direncanakan atau jumlah yang tidak normal dari biaya bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasi sebagai properti investasi dicatat sebagai sewa pembiayaan, maka aset diakui sebesar jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini pembayaran sewa minimum. Jumlah yang antara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan standar akuntansi sewa yang berlaku.

Setelah bangunan awal, Grup memilih model biaya untuk mengukur seluruh investasinya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16: Aset Tetap, kecuali jika properti investasi tersebut memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual (atau termasuk kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual) sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan Operasi yang Dihentikan. Properti Investasi yang memenuhi kriteria sebagai dimiliki untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok aset lepasan yang dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual) diukur sesuai dengan PSAK 58.

Properti Investasi dihentikan pengakuannya (dieliminasi dari laporan posisi keuangan) pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual atau disewakan secara sewa pembiayaan. Untuk menentukan tanggal pelepasan properti investasi, Grup menggunakan kriteria yang diatur dalam PSAK 23: Pendapatan, Keuntungan atau Kerugian dan Penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan. Jika ada kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan berhubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau penyalahgunaan properti investasi diakui dalam laba rugi ketika kompensasi tersebut menjadi piutang.

3.8 Kas dan Bank

Untuk tujuan laporan atas kas, kas dan bank terdiri dari uang kas dan uang yang ada di Bank.

3.9 Hasil Investasi

Hasil investasi dari bunga deposito berjangka dan obligasi diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga yang berlaku. Penghasilan dividen diakui pada saat surat pembentahan pembagian dividen diterima.

3.10 Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat menggunakan biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.11 Aset Tetap

Awalnya suatu aset tetap diukur sebesar biaya perolehan, yang terdiri dari harga perolehannya dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen, serta setiap awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dari lokasi ke lokasi aset. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan pembelian atau cara lain.

Biaya-biaya setelah perolehan awal seperti penggantian komponen dan inspeksi yang signifikan, ditambahkan ke dalam jumlah tercatat aset tetap jika besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara handal. Jumlah tercatat biaya komponen yang diganti atau nilai buku dari biaya inspeksi terdahulu dihentikan pengakuannya. Biaya perawatan sehari-hari aset tetap diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*), berdasarkan taksiat masa manfaat ekonomi aset tetap. Tanah dicatat pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Beban-beban tertentu berhubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan dimortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang tahun yang lebih pendek antara hak atas tanah atau umur ekonomis tanah. Beban ditangguhkan ini disajikan dalam akun "Aset Lain-lain" pada laporan posisi keuangan.

Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut :

Kelompok / Jenis	Masa Manfaat	Tarif Per Tahun
Bangunan	20 Tahun	5%
Kendaraan bermotor	5 Tahun	20%
Mesin kantor	5 Tahun	20%
Komputer	5 Tahun	20%
Perabot kantor	5 Tahun	20%
Perabot rumah dinas	5 Tahun	20%
Renovasi ruang sewa	5 Tahun	20%

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun buku untuk memastikan nilai residu, umur manfaat dan metode depresiasi diterapkan secara konsisten setiap dengan ekspektasi pola manfaat ekonomis dari aset tersebut.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.11 Aset Tetap - Lanjutan

Kelapa suatu aset dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang ditetapkan dan penggunaan atau baupasannya, biaya perolehan dan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai (jika ada) dikeluarkan dan akur tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap akan dimasukkan dalam laporan laba rugi.

Grup memilih untuk menerapkan model biaya, sehingga aset tetap Grup dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset (jika ada).

3.12 Kontrak Asuransi dan Investasi - Klasifikasi

Sesuai dengan PSAK 62, ada tiga jenis kontrak yang dapat harus dibedakan, yaitu kontrak asuransi, kontrak investasi dengan fitur partisipasi mengikat dan kontrak investasi tanpa fitur partisipasi mengikat. Dalam kontrak asuransi terdapat risiko asuransi yang signifikan, sedangkan dalam kontrak investasi terdapat risiko keuangan yang signifikan tetapi risiko asuransinya tidak ada atau tidak material. Perseroan hanya menarbitkan kontrak yang mentransfer risiko asuransi. Sebagai baaturan umum, Perseroan mektefiksikan risiko asuransi yang signifikan adalah kemungkinan harus membayar manfaat atas terjadinya peristiwa yang dipertanggungkan.

Kontrak investasi adalah kontrak yang mentransfer risiko keuangan tanpa risiko asuransi yang signifikan.

Selanjut kontrak asuransi dan investasi berisi fitur partisipasi mengikat. Fitur ini memberi pemegang kontrak untuk menerima, sebagai tambahan untuk manfaat yang dijamin, manfaat tambahan atau bonus :

- menjadi bagian yang signifikan dari total manfaat kontraktual,
- yang jumlah atau waktu adalah secara kontraktual ada pada kebijakan Grup; dan
- yang secara kontraktual berdasarkan pada:
 - Kinerja kumpulan kontrak yang ditentukan atau jenis kontrak tertentu,
 - Realisasi dan atau belum realisasi hasil investasi atas pool aset tertentu yang dimiliki oleh Grup; atau
 - Laba atau rugi Grup yang menerbitkan kontrak.

3.13 Kontrak Asuransi

(a) Pengakuan dan Pengukuran

Kontrak asuransi dikelompokkan dalam dua kategori utama, tergantung pada jangka waktu risiko dan apakah ada atau tidak syarat dan kondisi yang ditetapkan.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.13 Kontrak Asuransi - Lanjutan

(a) Pengakuan dan Pengukuran - Lanjutan

i) Kontrak Asuransi Jangka Pendek

Kontrak ini adalah kontrak asuransi kecelakaan dan properti (*casualty and property insurance*):

Kontrak asuransi kecelakaan menutupi kewajiban individu atau organisasi yang disebabkan oleh tindakan lalai dan kelalaiannya, sehingga menyebabkan cedera badan dan atau harta pihak ketiga. Kontrak ini melindungi nasabah Grup terhadap risiko yang menyebabkan bahaya kepada pihak ketiga karena tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum. Jenis proteksi yang ditawarkan didesain untuk pengusaha yang berkewajiban secara hukum untuk membayar kompensasi kepada pegawai yang mendapatkan kecelakaan (kewajiban pengusaha) dan untuk nasabah individu dan bisnis yang berkewajiban untuk membayar kompensasi atas cedera badan atau kerusakan properti kepada pihak ketiga.

Kontrak asuransi properti terutama mengkompensasi nasabah Grup atas kerusakan propertinya atau untuk nilai properti yang hilang. Nasabah yang melakukan kegiatan komersial dapat juga menerima kompensasi untuk kehilangan penghasilan yang disebabkan oleh ketidakmampuan menggunakan properti yang dipertanggungkan dalam kegiatan bisnisnya.

Kedua kelompok utama tersebut tidak dapat diterapkan lebih fleksibel dalam variasi, jenis dan kombinasi pertanggungan.

Untuk semua kontrak-kontrak tersebut, premi diakui sebagai pendapatan secara proporsional selama periode penutupan asuransi. Bagian premi yang diterima atas kontrak yang masih berjalan berhubungan dengan risiko yang masih berjalan pada tanggal laporan posisi keuangan dilaporkan sebagai liabilitas premi yang belum merupakan pendapatan. Premi yang belum merupakan pendapatan atas kontrak asuransi jangka pendek ditentukan secara agregat tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah premi untuk setiap jenis pertanggungan / asuransi. Premi disajikan sebelum dikurangi komisi.

Biaya klaim dan penyesuaian klaim dibebankan ke laba rugi pada saat terjadi berdasarkan estimasi liabilitas untuk mengganti kerugian kepada persegang kontrak atau kerusakan pihak ketiga yang disebabkan oleh pemegang kontrak. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya langsung dan biaya penyelesaian tidak langsung yang timbul dari peristiwa yang terjadi setiap dengan akhir periode pelaporan bahkan meskipun klaim tersebut belum dilaporkan ke Grup. Grup tidak mendiskontokan liabilitas klaim yang belum dibayar. Liabilitas klaim belum dibayar diestimasi dengan menggunakan penilaian klaim individual yang dilaporkan ke Grup dan analisa statistik untuk klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan, serta untuk mengestimasi biaya total dan klaim yang lebih kompleks yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal (seperti keputusan pengadilan).

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.13 Kontrak Asuransi - Lanjutan

(a) Pengakuan dan Pengukuran - Lanjutan

ii) Kontrak Asuransi Jangka Panjang

Kelompok kontrak asuransi diatas, jika kontrak asuransinya dilakukan lebih dari satu tahun maka dikategorikan sebagai kontrak jangka panjang. Premi diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang kontrak. Bila kontrak asuransi merupakan premi tunggal atau sejumlah tertentu dan premi yang jatuh tempo lebih pendek dari periode risiko yang diberikan, maka kelebihan premi tertanggung selama valuasi premi ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan sejalan dengan penurunan risiko asuransi yang belum hangus dan kontrak asuransi yang masih aktif.

Bila kontrak asuransi berupa premi tunggal atau sejumlah pembayaran premi yang jatuh tempo lebih pendek dari pada periode manfaat yang diberikan, maka kelebihan premi tertanggung selama valuasi premi ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan selama penurunan risiko asuransi yang belum jatuh tempo dari kontrak yang masih aktif, atau untuk anuitas yang masih aktif, selama penurunan jumlah manfaat dimasa depan yang akan dibayar.

Liabilitas premi tunggal untuk asuransi jangka panjang diperlakukan sebagai kontrak yang dapat diperbarui secara tahunan (*yearly renewable contract*). Liabilitas dihitung ulang pada setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan asumsi yang dibuat pada saat penerbitan kontrak.

(b) Biaya Akuisisi Polis Ditangguhkan (BAT)

Kontrak dan biaya akuisisi lain yang bervariasi dan berhubungan untuk memperoleh kontrak baru dan memperpanjang kontrak, dibebankan pada periode awal kontrak diterbitkan tanpa manfaat jangka waktu risiko asuransinya. Pendapatan kumulatif asuransi diakui pada saat yang sama dengan pengakuan liabilitas dan biaya reasuransi.

(c) Tes Kecukupan Liabilitas

Pada setiap akhir periode pelaporan, tes kecukupan liabilitas diakui untuk menyakinkan kecukupan liabilitas kontrak setelah dikurangi dengan aset BAT. Dalam melakukan tes ini, estimasi terbaik adalah dengan arus kas kontraktual dimasa depan dan biaya penyelesaian klaim serta biaya administrasi, demikian juga hasil investasi dari aset pendukung liabilitas dapat dipermitungkan. Setiap defisiensi langsung dibebankan ke laba rugi pada awalnya dengan menghapus BAT dan selanjutnya membentuk provisi kerugian yang timbul dari tes kecukupan liabilitas (bagian risiko yang belum habis).

Seperti diuraikan diatas, kontrak asuransi jangka panjang dengan jangka waktu tetap diakui berdasarkan asumsi yang dibuat pada awal kontrak. Bila tes kecukupan liabilitas memerlukan adanya asumsi estimasi terbaik baru, suatu asumsi (tanpa margin penyimpangan yang buruk) digunakan untuk pengukuran berikutnya liabilitas ini. Setiap BAT dihapus karena hasil tes ini selanjutnya tidak dapat disajikan kembali.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.13 Kontrak Asuransi - Lanjutan

(d) Kontrak Reasuransi yang Dimiliki

Kontrak-kontrak yang dilakukan oleh entitas Grup dengan reasurador, dimana entitas Grup diberi penggantian atas kerugian satu atau lebih dari kontrak yang dilibatkan oleh Grup dan memenuhi persyaratan klasifikasi untuk kontrak asuransi, diklasifikasikan sebagai kontrak reasuransi yang dimiliki. Kontrak-kontrak yang tidak memenuhi ketentuan klasifikasi ini dikelompokkan sebagai aset keuangan.

Grup menilai penurunan aset reasuransi atas dasar tahunan. Jika ada bukti objektif bahwa aset reasuransi turun nilai Grup mengurangi nilai tercatat aset reasuransi sampai jumlah yang dapat diperoleh dan mengakui rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi. Grup mengumpulkan bukti objektif bahwa aset reasuransi mengalami penurunan nilai dengan menggunakan proses yang sama untuk aset keuangan pada biaya amortisasi. Rugi penurunan nilai dihitung mengikuti metode yang sama untuk aset keuangan.

(e) Piutang Dan Utang Yang Berhubungan Dengan Kontrak Asuransi

Piutang dan utang diakui pada saat jatuh tempo, termasuk jumlah kewajiban kepada dan dari agen, Pialang serta pemegang kontrak asuransi.

Jika ada bukti objektif bahwa piutang asuransi turun nilainya, Grup mengurangi nilai tercatat dari piutang asuransi karena itu mengakui rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi. Grup mengumpulkan bukti objektif bahwa piutang asuransi mengalami penurunan nilai dengan menggunakan proses yang sama untuk pinjaman yang diberikan dan piutang. Rugi penurunan nilai dihitung dengan metoda yang sama untuk aset keuangan ini.

3.14 Perpajakan

Grup menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2021) "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan.

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.14 Perpajakan - Lanjutan

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban serta disajikan di neraca. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang benar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan dibentuk dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial diberlakukan pada periode dimana aset tersebut direalisasi atau liabilitas tersebut diselesaikan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

3.15 Beban Usaha / Operasional

Beban usaha dan beban lain-lain diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*).

3.16 Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Rendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan Pensiun dan Imbalan Pascakerja Lainnya

Grup memiliki program pensiun imbalan pasti. Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Asanda.

Grup diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11 Tahun 2020, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11 Tahun 2020 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posel keuangan sebesar nilai kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

PT ASURANSI BANGWA ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEWAJIBAN AKUISITASI PENTING - Lanjutan

3.16 Imbalan Kerja - Lanjutan

Imbalan Pensiun dan Imbalan Pra-karyawan Lainnya - Lanjutan

Nilai kini kewajiban imbalan pensiun ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang didisimisi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Kontribusi dan kerugian aktuaria yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtalimen atau penyelesaian program manfaat pensiun diakui di laba rugi ketika kurtalimen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Grup juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai batas pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi maksimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pensiun.

Imbalan Jangka Panjang Lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang. Imbalan cacat permanen dan penghargaan jubilee dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuaria yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laporan laba rugi.

3.17 Pihak Berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi No.7, yang dimaksud dengan pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyajikan laporan keuangannya.

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi, baik yang dilaksanakan dengan ataupun tidak dilaksanakan dengan syarat serta kondisi normal yang sama untuk pihak yang tidak berelasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR HEBLUKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.18 Aset Tak Berwujud

Perangkat lunak yang dibeli oleh Perseroan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Pengeluaran pengembangan perangkat lunak secara internal diakui sebagai aset ketika Grup dapat menunjukkan maksud dan kemampuannya untuk menyelesaikan pengembangan dan memakai perangkat lunak tersebut dalam menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang, dan dapat secara rasional mengukur biaya untuk menyelesaikan pengembangan. Biaya yang dikapitalisasi dan pengembangan perangkat lunak secara internal meliputi semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke biaya kapitalisasi dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai.

Pengeluaran selanjutnya untuk perangkat lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomi aset yang bersangkutan di masa mendatang. Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat dari perangkat lunak tersebut, dari tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

3.19 Kontribusi Peserta

Kontribusi bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk pensi risiko dan ujrah, Kontribusi dan peserta diakui sebagai bagian dari dana tabanur, dalam dana peserta pada saat risiko telah berjalan atau tanggal yang mana lebih dulu. Selain dari kontribusi peserta, tambahan dana tabanur juga berasal dari investasi yang dilakukan oleh entitas anak, antara lain sebagai wakil peserta (wakalah) atau pengelola dana (mudharabah atau mudharabah musyarakah).

1. Bagian Kontribusi untuk Investasi

Bagian pembayaran kontribusi dan peserta untuk investasi diakui sebagai:

- a. Dana syirkah tamponer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musyarakah; dan atau
- b. Kewajiban jika menggunakan akad wakalah.

Pada saat entitas anak menyalurkan dana investasi yang menggunakan akad wakalah atau ujrah, Entitas anak mengurangi kewajiban dana melaporkan penyaluran tersebut dalam laporan perubahan dana investasi terkait. Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah, atau mudharabah musyarakah mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan terkait dan yang relevan.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.10 Kontribusi Peserta - Lanjutan

2. Bagian Kontribusi untuk Ujrah / Fee

Bagian kontribusi untuk ujr^h / fee diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi d^{iperasional} dan menjadi beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabaru^h.

Pengelola selaku wakil menerima kontribusi bruto yang dibayarkan oleh peserta dengan alokasi 55% sebagai dana tolong menolong (dana tabaru^h) dan 45% sebagai wakalah fee (ujrah).

Dari investasi peserta berasal dari kontribusi peserta atas produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola entitas anak sesuai dengan akad yang telah disepakati.

3.20 Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabaru^h

Dana peserta merupakan seluruh dana yang meliputi dana investasi dan dana tabaru^h. entitas anak menerapkan PSAK No. 108, "Akuntansi Asuransi Syariah" dalam pengakuan dana tabaru^h dan dana investasi.

Dana tabaru^h merupakan dana yang dibayarkan dari kontribusi, hasil investasi dan akumulasi cadangan surplus defisit underwriting dana tabaru^h yang didistribusikan kembali ke dana tabaru^h.

Bagian pembayaran peserta untuk investasi diakui sebagai dana syirkah temporer jika menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musyarakah. Hasil investasi dialokasikan kepada entitas anak dan peserta sesuai dengan akad yang disepakati.

Dana syirkah temporer dan dana tabaru^h disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari labilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Cadangan dana tabaru^h disajikan pada laporan posisi keuangan.

Dana tabaru^h merupakan kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabaru^h yang disepakati.

Surplus pengelolaan dana tabaru^h (surplus underwriting dana tabaru^h) d^{iperlakukan} sebagai berikut:

- a). Seluruh surplus sebagai cadangan dana tabaru^h;
- b). Sebagian sebagai cadangan dana tabaru^h dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta; atau
- c). Sebagian sebagai cadangan dana tabaru^h. sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya didistribusikan kepada entitas anak (pengelola).

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. IKHTISAR KEWAJIBAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.20 Surplus dan Defisit Underwriting Dana Tabarru' - Lanjutan

Bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta dan bagian surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada mitra asuransi syariah diakui sebagai pengurang surplus dalam laporan perubahan dana tabarru'. Surplus underwriting dana tabarru' yang diterima entitas anak diakui sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi, dan surplus underwriting dana tabarru' yang didistribusikan kepada peserta diakui sebagai kewajiban kepada peserta dalam neraca entitas anak.

Pada akhir periode kepesertaan apabila terdapat surplus underwriting / operasional dari dana tabarru' maka sebesar 40% dari nya akan disamping sebagai cadangan tabarru'. Dan 60% sisanya, pengelola akan memperoleh 50% sebagai insentif sedangkan 50% lagi akan didistribusikan secara proporsional sebagai bagian dari kontribusi periode perpanjangan dan tiap peserta sesuai dengan ketertarikan yang berlaku.

Sedangkan jika terjadi defisit underwriting dana tabarru', maka entitas anak wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman (qardh). Pengembalian qardh tersebut kepada entitas anak berasal dari surplus dana tabarru' yang akan datang.

3.21 Kewajiban Dsiam Bentuk Penyisihan Teknis

Penyisihan teknis diakui pada saat akhir periode pelaporan sebagai beban dalam laporan surplus defisit underwriting dana tabarru'.

1) Penyisihan Kontribusi Yang Belum Menjadi Hak

Penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan atau hak adalah jumlah untuk memenuhi klaim yang terkait dengan kontribusi yang timbul pada periode berjalan atau periode mendatang.

Pembentukan penyisihan kontribusi untuk produk-produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat dinegosiasikan kembali pada setiap ulang tahun polis dihitung berdasarkan Kontribusi Neto sesuai dengan proporsi jumlah hari sampai dengan polis berakhir (proporsional harian). Sedangkan untuk polis kumpulan yang tidak dapat diketahui rincian pertanggungjangan untuk setiap anggota kumpulan, maka dihitung berdasarkan Kontribusi Neto sesuai dengan proporsi jumlah bulan sampai dengan polis berakhir (proporsional bulanan).

Pembentukan penyisihan kontribusi untuk produk-produk yang berjangka waktu lebih dari satu tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat dinegosiasikan kembali pada setiap ulang tahun polis, dilakukan dengan memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral ditambah dengan margin risiko.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KHTTEAR KEHJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.21 Kewajiban Dalam Bentuk Penyalihan Teknis - Lanjutan

2) Penyalihan Klaim Yang Masih Dalam Proses Penyelesaian (*Outstanding Claims*)

Klaim yang masih dalam proses penyelesaian yaitu jumlah penyalihan atas ekspektasi klaim yang akan dibayar pada periode mendatang yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyalihan tersebut termasuk beban penangunan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi.

Klaim yang masih dalam proses dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, bentuk biaya jasa penial kerugian asuransi dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian reasuransi.

3) Klaim Yang Sudah Terjadi Tetapi Belum Dilaporkan (*Incurred But Not Reported (IBNR)*)

Klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan adalah jumlah penyalihan atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyalihan tersebut termasuk beban penangunan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban reasuransi. Biasanya penyalihan ini dihitung berdasarkan asumsi yang wajar dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (*triangle method*), berikut biaya jasa penial kerugian asuransi dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian reasuransi.

3.22 Akuntansi Sukuk

Entitas anak mengakui investasi pada sukuk Ijarah dan sukuk mudharabah sebesar biaya perolehan, dimana termasuk biaya transaksi pada klasifikasi biaya perolehan dan tidak termasuk biaya transaksi pada klasifikasi nilai wajar.

Sebelum pengakuan awal, entitas anak menentukan klasifikasi investasi pada sukuk Ijarah dan sukuk mudharabah sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada nilai wajar.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk. Entitas anak tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali terjadi perubahan tujuan modal usaha.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laporan laba rugi untuk dana entitas anak, laporan surplus defisit underwriting dana tabaru' untuk dana tabaru', dana syirkah temporer mudharabah untuk dana investasi peserta dengan akad mudharabah, dan laporan perubahan dana investasi terikat untuk peserta dengan akad wakafah bil ujroh.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas anak mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat, maka entitas anak mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa menghitung nilai kini.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

3.23 Piutang Kontribusi / Kontribusi

Piutang kontribusi meliputi tagihan kontribusi kepada tertanggung/agen sebagai akibat transaksi asuransi. Dalam hal unitas anak memberikan potongan kontribusi kepada tertanggung, maka potongan tersebut langsung dikurangkan dari piutang kontribusinya.

Entitas anak menilai penurunan nilai atas piutangnya secara reguler. Jika terdapat bukti objektif bahwa piutang tersebut mengalami penurunan nilai, entitas anak akan mengurangi nilai tercatat dari piutang tersebut ke nilai yang terpulihkan dari mengakui kerugian atas penurunan nilai dalam laba rugi dan laporan surplus defekt underwriting pada labanya. Entitas anak mengumpulkan bukti objektif di mana piutang mengalami penurunan nilai dengan menggunakan metode yang sama untuk aset keuangan yang dimiliki dengan biaya perolehan diamortisasi.

3.24 Piutang Ujrah

Piutang ujrah disajikan dalam jumlah bruto, yang diambil dari produksi premi peserta sesuai dengan duration perjanjian atau agaknya.

3.25 Piutang Qardh

Qardh adalah pinjaman dana dari entitas anak kepada Dana Tabaru' dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana Tabaru' untuk membayar santunan atau klaim kepada Peserta.

4. ESTIMASI DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Grup membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan. Estimasi dan kebijakan secara terus menerus dievaluasi dan didasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain, meliputi harapan peristiwa masa lalu yang diyakini menjadi masuk akal sesuai keadaan.

- (a) Liabilitas akhir yang timbul dari klaim sehubungan dengan kontrak asuransi

Estimasi dan liabilitas akhir yang timbul dari klaim sehubungan dengan kontrak asuransi adalah estimasi akuntansi yang sangat kritis. Ada beberapa sumber ketidakpastian yang perlu dipertimbangkan dalam mengestimasi liabilitas yang Grup akhirnya akan bayar untuk suatu klaim.

- (b) Estimasi pembayaran manfaat masa depan dan premi yang timbul dari kontrak asuransi jangka panjang dan biaya akuisisi ditanggungkan dan aset tidak berwujud lainnya.

Pembentukan liabilitas atas kontrak asuransi jangka panjang tergantung pada estimasi yang dibuat oleh Grup. Estimasi dibuat sebagai harapan sejumlah kematian untuk setiap tahun dimana Grup terdapat risiko. Grup mendasarkan asumsi ini pada standar industri dan tabel mortalitas yang mencerminkan pengalaman mortalitas tahun-tahun saat ini. Bila memadai disesuaikan untuk mencerminkan pengalaman Grup sendiri. Estimasi jumlah kematian menentukan nilai pembayaran manfaat dan nilai nilai premi.

PT ASURANSI BANGUN ABKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. ESTIMASI DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING - Lanjutan

- (b) Estimasi pembayaran manfaat masa depan dan premi yang timbul dari kontrak asuransi jangka panjang dan biaya akuisisi ditangguhkan dan aset tidak berwujud lainnya - Lanjutan

Untuk kontrak asuransi jangka panjang dengan jangka tetap dan dijamin kebebasan memilih (Fitur Partisipasi Memilih (FPM)), estimasi dibuat dalam dua tahap. Estimasi kematian masa depan, pengakhiran sukarela, hasil investasi dan biaya administrasi yang dibuat pada saat penerbitan kontrak dan membuat asumsi yang digunakan untuk menghitung liabilitas selain umur kontrak. Margin untuk risiko dan ketidakpastian ditambahkan ke asumsi ini. Asumsi ini "dikunci" selama jangka waktu kontrak. Estimasi baru dibuat setiap tahun-tahun berikutnya dengan maksud untuk menemukan apakah liabilitas sebelumnya telah mencukupi dalam katannya dengan estimasi saat ini. Jika liabilitas dipandang telah mencukupi, maka asumsi tidak diubah sedangkan jika liabilitas tidak mencukupi, maka asumsi diubah untuk mendapatkan asumsi dengan estimasi terbaik.

Fitur kunci dan tes kecukupan kontrak ini adalah pengaruh perubahan dalam asumsi atas pengukuran liabilitas dan aset terkait, tidak sinistris. Setiap peningkatan estimasi tidak mempunyai pengaruh pada nilai liabilitas dan aset terkait sampai dengan liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya, sementara itu penurunan yang cukup signifikan dalam estimasi diakui segera mungkin untuk membuat liabilitas yang mencukupi.

5. MANAJEMEN RISIKO ASURANSI DAN KEUANGAN

Grup menerbitkan kontrak-kontrak yang mentransfer risiko asuransi atau risiko keuangan atau keduanya. Bagian ini merupakan ikhtisar risiko dan cara mengelola risiko tersebut.

5.1 Risiko Asuransi

Risiko dalam kontrak asuransi adalah probabilitas terjadinya peristiwa yang dipertanggungjawabkan dan ketidakpastian jumlah klaim yang harus dibayar. Menurut sifat dari kontrak asuransi, risiko bersifat random dan karena itu tidak dapat diprediksi dengan pasti.

Untuk portofolio kontrak asuransi, teori probabilitas diterapkan untuk menentukan premi dan provisi, risiko utama yang dihadapi dalam kontrak asuransi umum adalah jumlah realisasi pembayaran klaim melebihi jumlah kewajiban asuransi yang dicatat. Hal ini terjadi karena frekuensi dan severitas klaim lebih besar dari yang diantisipasi. Peristiwa dalam asuransi bersifat acak (random), jumlah dan besarnya klaim aktual akan bervariasi sepanjang tahun dari tingkat yang telah ditetapkan dengan menggunakan teknik statistik.

Pengalaman menunjukkan bahwa lebih besar portofolio sejenis dari kontrak asuransi, maka penyimpangannya juga relatif lebih kecil dari hasil yang diharapkan. Sebagai tambahan, lebih terdiversifikasi portofolio maka lebih kecil kemungkinan terpengaruh oleh perubahan sebagian portofolio. Grup terus mengembangkan strategi underwriting asuransinya untuk mendiversifikasi jenis risiko asuransi yang diakui dan dalam setiap kategori ini harus mencapai populasi risiko yang cukup besar untuk mengurangi penyimpangan hasil yang diharapkan.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. MANAJEMEN RISIKO ASURANSI DAN KEUANGAN - Lanjutan

5.1 Risiko Asuransi - Lanjutan

Faktor-faktor kumpulan risiko asuransi meliputi ketunaihan diversifikasi risiko dalam jenis dan jumlah risiko, lokasi geografis dan jenis industri yang dipanggung.

5.1.1 Risiko Asuransi Kecelakaan (Casualty)

(a) Frekuensi dan Severitas Klaim

Frekuensi dan severitas klaim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang sangat signifikan adalah peningkatan tingkat kesadaran atas kerusakan yang diderita sebagai hasil paparan risiko asbestos (meskipun di Indonesia belum terjadi) dan peningkatan jumlah kasus di pengadilan atas kasus yang tidak aktif atau tidak diproses untuk jangka waktu lama. Estimasi inflasi juga merupakan faktor yang signifikan karena pada umumnya memerlukan waktu yang lama dalam proses penyelesaian klaim.

Grup mengelola risiko ini melalui strategi *underwriting*, perjanjian reasuransi yang memadai dan penanganan klaim yang proaktif. Strategi *underwriting* berusaha untuk memastikan bahwa risiko yang di-*underwrite* terdiversifikasi secara baik, baik dalam bentuk, dan jenis besamya risiko. Industri dan geografis.

Limit *underwriting* diterapkan untuk mendorong kriteria seleksi risiko yang memadai. Sebagai contoh, Grup mempunyai hak untuk tidak memperpanjang kembali pola individu, hal ini dapat menahan deductible dan mempunyai hak untuk menolak pembayaran klaim yang kurang. Kontrak asuransi juga memberikan hak kepada Grup untuk meminta ganti rugi pada pihak ketiga untuk melakukan pembayaran sebagian atau semua biaya (sebagai contoh, subrogasi). Lebih lanjut, strategi Grup membatasi total paparan risiko pada satu tertoris sampai 40% dari total paparan risiko Grup, dan paparan risiko terhadap satu industri sampai 25% dari total paparan risiko Grup.

Perjanjian reasuransi meliputi penutupan *excess of loss*, *stop of loss* dan *catastrophe*. Pengaruh dari suatu perjanjian reasuransi adalah Grup seharusnya tidak menderita total kerugian asuransi bersih lebih dari 40% dari total klaim dalam setiap tahunnya. Sebagai tambahan untuk keseluruhan program reasuransi Grup, unit bisnis individu diperbolehkan untuk membeli tambahan proteksi reasuransi.

Konsentrasi risiko asuransi sebelum dan setelah reasuransi berdasarkan tertoris dalam rebusannya dengan jenis risiko asuransi umum yang diterima, diungkap dan ditampilkan pada **halaman 38**, dengan referensi jumlah tertoris kewajiban asuransi (bruto dan netto (setelah komisi dan reasuransi)) yang timbul dari kontrak asuransi umum.

PT ASURANSI BANGUN ABRIKIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tertutup	Pranala 2023	Kebijakan	Konsolidasi	Kendaraan Baru	Rakayasa	Pengangkutan	Penjaminan J Surety Bond	Anaka	Total 2023
Jawa	Bruto	76.313.158.089	2.114.617.178	29.468.593.322	14.222.701.687	16.710.632.069	13.438.588.062	3.529.547.288.583	3.681.915.781.870
	Neto	30.365.268.710	610.307.622	19.974.654.445	5.397.604.300	7.616.373.209	5.927.224.941	2.512.250.880.432	2.582.142.613.659
Sumatera	Bruto	24.255.174.293	316.284.508	5.556.559.610	18.036.767	8.535.693.668	256.552.603	1.295.924.128.406	1.334.863.430.855
	Neto	9.942.329.216	47.348.877	3.460.414.752	92.962.403	6.521.343.471	93.680.128	791.916.121.721	812.084.400.588
Kalimantan	Bruto	13.788.161.473	168.589.356	4.125.494.954	1.152.108.082	9.188.304.852	232.851.918	350.903.543.612	379.558.054.248
	Neto	8.523.397.402	30.187.138	2.473.963.687	259.755.465	8.454.279.383	86.587.701	247.802.406.524	255.430.577.300
Sulawesi	Bruto	6.650.872.634	838.316.868	1.868.447.125	189.709.810	4.215.670.787	814.085.819	688.308.747.354	682.893.850.205
	Neto	3.653.116.021	110.558.952	1.344.614.820	75.256.125	2.886.147.048	265.651.781	432.537.374.889	440.882.720.616
Papua	Bruto	3.223.647.517	277.373.762	343.761.756	30.963.942	4.859.655.279	200.825	246.406.191.447	254.941.793.328
	Neto	2.102.306.181	48.540.288	283.830.327	10.140.892	2.877.290.610	62.304	173.988.263.515	179.090.238.755
Bali, NTT, NTB, Mekong & Ternate	Bruto	6.759.477.897	262.848.972	1.426.163.169	11.313.963	2.365.211.342	1.277.116	376.939.876.552	387.766.306.007
	Neto	4.223.593.702	48.983.222	1.031.626.144	3.784.216	1.628.078.728	430.874	257.280.908.058	264.214.679.942
Jawa	Bruto	58.104.736.640	9.889.318.289	27.463.386.079	4.981.749.784	17.059.574.826	12.348.528.545	3.204.171.287.301	3.335.018.561.458
	Neto	33.888.220.356	1.753.682.763	19.034.610.611	2.473.182.245	8.193.624.447	4.689.851.427	2.055.383.753.541	2.155.387.235.389
Sumatera	Bruto	21.094.798.543	349.735.778	5.844.561.028	329.659.255	8.591.984.532	208.228.471	1.141.781.366.881	1.178.188.310.191
	Neto	11.843.503.078	48.641.362	4.391.154.357	170.164.247	6.573.192.381	77.307.003	658.825.684.515	680.069.826.943
Kalimantan	Bruto	9.783.431.945	210.820.338	3.094.113.240	875.222.411	8.348.290.855	126.198.298	444.826.483.617	487.284.640.804
	Neto	6.620.713.762	36.893.580	2.058.572.474	251.189.413	6.944.326.814	49.883.401	281.247.684.424	298.208.877.648
Sulawesi	Bruto	5.056.209.819	409.970.497	2.108.810.651	6.796.094	3.505.962.263	464.837.867	599.519.057.143	611.159.763.324
	Neto	3.361.889.228	87.494.838	1.695.916.844	16.347.542	2.720.520.637	192.983.628	369.784.822.261	377.709.284.762
Papua	Bruto	6.164.610.600	257.511.217	335.404.106	7.500.000	4.580.551.855	-	191.275.580.248	192.631.168.124
	Neto	4.390.389.386	45.064.465	260.378.218	2.456.250	2.804.712.138	-	118.197.274.098	125.500.272.133
Bali, NTT, NTB, Mekong & Ternate	Bruto	4.583.687.624	275.582.767	535.474.378	77.076.520	2.285.520.681	1.064.391	350.173.861.292	357.912.216.634
	Neto	3.225.182.493	48.218.235	342.383.510	28.982.497	1.425.313.410	406.058	204.555.071.187	209.636.587.390

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rubrik, kecuali dinyatakan lain)

5. MANAJEMEN RISIKO ASURANSI DAN KEUANGAN - Lanjutan

5.1 Risiko Asuransi - Lanjutan

5.1.1 Risiko Asuransi Kecelakaan (Casualty) - Lanjutan

(b) Sumber ketidakpastian dalam estimasi pembayaran klaim masa depan

Klaim atas kontrak kecelakaan timbul atas dasar kejadian klaim. Grup berkewajiban untuk semua peristiwa yang dipertanggungjawabkan terjadi selama periode kontrak, bahkan seandainya kerugian ditemukan setelah akhir periode kontrak. Sebagai akibatnya, liabilitas klaim diselesaikan selama periode waktu yang panjang, dan banyak elemen cadangan klaim yang berhubungan dengan klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (*IBNR*).

Ada banyak variabel yang mempengaruhi jumlah dan waktu arus kas dari kontrak ini. Terutama berhubungan dengan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pemegang kontrak individu dan prosedur manajemen risiko yang diadopsi. Pembayaran kompensasi atas kontrak ini adalah jaminan keuangan untuk cedera badan yang diderita oleh pegawai (untuk tanggung jawab hukum pengusaha) atau anggota dari masyarakat umum (untuk tanggung jawab hukum masyarakat). Santunan adalah pembayaran *lumpsum* yang dihitung sebesar nilai kini dan kehilangan penghasilan dan biaya rehabilitasi fisik yang timbul akibat kecelakaan.

Estimasi biaya klaim meliputi biaya langsung yang harus dibayar pada saat klaim disetujui, dikurangi nilai cadangan yang diharapkan dan penggantian lainnya. Grup melakukan semua usaha yang masuk akal untuk menyakinkan bahwa Grup mempunyai informasi yang memadai mengenai paparan risiko klaimnya. Namun demikian adanya ketidakpastian dalam cadangan klaim yang dibentuk, memungkinkan hasil akhir akan menunjukkan perbedaan dari liabilitas asli yang dibentuk. Liabilitas dari kontrak ini meliputi cadangan untuk *IBNR*, cadangan klaim yang dilaporkan tetapi belum diselesaikan dan cadangan atas risiko yang belum habis pada akhir periode pelaporan. Jumlah klaim kecelakaan sangat sensitif dengan tingkat putusan pengadilan dan terhadap perkembangan prosedur legal atas masalah kontrak dan kesalahan. Kontrak kecelakaan juga tergantung pada emergence jenis baru dari klaim lama, tetapi tidak ada cadangan yang diperhitungkan pada akhir periode laporan.

Dalam menghitung estimasi biaya klaim yang belum dibayar (baik dilaporkan maupun belum), teknik estimasi Grup adalah kombinasi estimasi berdasarkan rasio (bila rasio klaim didefinisikan sebagai rasio antara total biaya klaim asuransi uan berdasarkan premi yang diperoleh dalam periode kalender dalam hubungannya dengan suatu klaim) dan berdasarkan estimasi atas pengalaman klaim aktual dengan menggunakan formula klaim yang diturunkan lebih dulu dimana bobot lebih besar yang tetap terhadap pengalaman klaim masa lalu.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rubrik, kecuali dinyatakan lain)

5. MANAJEMEN RISIKO ASURANSI KEUANGAN - Lanjutan

5.1 Risiko Asuransi - Lanjutan

5.1.1 Risiko Asuransi Kecelakaan (*Casualty*) - Lanjutan

(b) Sumber ketidakpastian dalam estimasi pembayaran klaim masa depan - Lanjutan

Estimasi rasio klaim sendiri adalah asumsi penting dalam teknik estimasi dan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, disesuaikan untuk faktor-faktor seperti perubahan tarif premi, penyelesaian pasar yang diantisipasi dan inflasi historis klaim. Estimasi awal dari rasio klaim digunakan untuk tahun berjalan (sebelum reasuransi) dianalisa per teritori, jenis risiko dan industri dimana terlanggung beroperasi untuk urami yang diperoleh pada periode berjalan dan periode lalu.

Pada umumnya esamasi IBNR tergantung pada tingkat ketidakpastian yang lebih besar dari pada estimasi biaya penyelesaian klaim yang sudah dibantahukan kepada Penasabah, dimana informasi tentang peristiwa klaim tersedia. Klaim IBNR tidak dapat diketahui siapa bertanggungjawab sampai beberapa tahun setelah peristiwa tersebut muncul sebagai klaim. Untuk kontrak kecelakaan, poraf IBNR dari total liabilitas lebih tinggi dan pada umumnya akan menyakikan penyimpangan yang lebih besar antara estimasi awal dan hasil akhir ketara tingkat kesulitan estimasi liabilitas ini lebih besar.

Dalam mengestimasi liabilitas biaya klaim yang dilaporkan tetapi belum disetujui, Grup mempertimbangkan informasi yang tersedia dari kas adjuster dan informasi atas biaya penyelesaian klaim yang mempunyai karakteristik sama periode sebelumnya. Klaim besar dinilai berdasarkan kasus per kasus atau proyeksi terpisah dengan maksud untuk memungkikan pengaruh distorsi yang mungkin pada pengembangan klaimnya dan besarnya sisa portofolio.

Bila mungkin, Grup mengadopsi teknik multiple untuk mengestimasi tingkat cadangan yang dipersyaratkan. Teknik ini membenkan pemahaman lebih baik pada trend yang melekar pada pengalaman yang diperoyekalkan. Terdapat bermacam-macam metodologi proyeksi yang juga membenku mengestimasi rentang hasil yang mungkin. Teknik estimasi yang sangat memadai dipilih dengan memasukkan karakteristik kelompok bisnis dan luasnya perkembangan setiap tahun terjadinya.

Selain untuk tes kesukupan liabilitas dari risiko yang masih berjalan pada akhir periode laporan, tidak ada kebutuhan untuk mengestimasi tingkat probabilitas risiko total kas atau tingkat kerusakan partial loss untuk masa depan karena kontrak ini jangka pendek. Tabel standar penggantian dan reasurador-reasuratur dan pengalaman Grup bisa digunakan untuk melakukan estimasi. Pengaruh kondisi ekonomi pada tingkat penggantian aktual untuk kontrak individu adalah kunci sumber ketidakpastian estimasi ini.

(c) Proses yang digunakan untuk memundikan asumsi

Estimasi biaya klaim untuk setiap tahunnya dan setiap kasus adalah hasil dari proyeksi sejumlah klaim, besaran klaim rata-rata dan faktor inflasi. Kemudian angka ini dijumlahkan selama beberapa tahun tergantung jenis kasusnya. Untuk setiap estimasi klaim dibandingkan dengan kewajiban klaim makelmu di bawah syarat polis dan dikurangi jumlah tertentu jika lebih rendah dari estimasi klaim.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. MANAJEMEN RISIKO ASURANSI DAN KEUANGAN - Lanjutan

5.1 Risiko Asuransi - Lanjutan

5.1.1 Risiko Asuransi Kecelakaan (Casualty) - Lanjutan

(c) Proses yang digunakan untuk memutuskan asumsi - Lanjutan

Untuk semua risiko kecelakaan, Grup menggunakan metode statistik untuk memasukkan beberapa asumsi yang dibuat dengan tujuan untuk mengestimasi biaya klaim total. Dua metode yang umum digunakan adalah metode Chain-Ladder dan Bornhuetter-Ferguson.

(d) Perubahan asumsi

Grup tidak membah asumsi yang digunakan untuk kontrak asuransi yang diuraikan di catatan ini.

5.1.2 Kontrak Asuransi Jangka Panjang

(a) Frekuensi dan Severitas Klaim

Untuk kontrak-kontrak yang dipertanggungkan adalah risiko kematian, faktor yang sangat penting yang dapat meningkatkan frekuensi klaim secara keseluruhan seperti perubahan yang mahal dalam gaya hidup seperti makan, kebiasaan merokok dan olahraga, menyebabkan lebih awal atau lebih banyak klaim daripada yang diharapkan.

Grup mengelola risiko ini dengan strategi underwriting dan perjanjian reasuransi. Strategi underwriting ditujukan untuk menyakinkan bahwa risiko yang ditanggung sudah terdiversifikasi secara baik dalam jenis risiko dan tingkat manfaat pertanggungan.

(b) Sumber ketidakpastian dalam estimasi pembayaran klaim dan penerimaan premi

Ketidakpastian dalam estimasi pembayaran klaim dimasa depan dan penerimaan premi kontrak asuransi jangka panjang menimbulkan beban jangka panjang yang tidak dapat diprediksi dalam semua tingkat kematian karena kecelakaan dan variasi perilaku penasegah polis.

(c) Proses yang digunakan untuk memutuskan asumsi

Kontrak asuransi jangka panjang dengan jangka waktu tetap dan dijamin, asumsi di buat dalam dua tahap. Saat mulai kontrak, Grup menentukan asumsi-asumsi yang bertubuhan dengan kematian di masa depan, pengakhiran sukarela, pengembalian investasi dan beban administrasi. Asumsi-asumsi ini digunakan untuk menghitung kewajiban selama umur kontrak. Margin risiko dan ketidakpastian ditambah ke asumsi ini. Asumsi-asumsi ini "terkunci" selama periode kontrak.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. MANAJEMEN RISIKO ASURANSI DAN KEUANGAN - Lanjutan

5.1 Risiko Asuransi - Lanjutan

5.1.2 Kontrak Asuransi Jangka Panjang - Lanjutan

(c) Prinsip yang digunakan untuk memutuskan asumsi - Lanjutan

Selanjutnya, estimasi baru dibuat pada setiap tanggal laporan untuk menentukan apakah liabilitas mencukupi berkaitan dengan estimasi berjalan terbaru. Asumsi awal tidak dirubah jika liabilitas dipertimbangkan mencukupi. Jika liabilitas tidak mencukupi, asumsi-asumsi dirubah (dibuka) untuk mencerminkan estimasi berjalan dengan yang paling baru, tidak ada margin yang ditambahkan ke asumsi-asumsi dalam periode ini.

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk kontrak asuransi diungkapkan dalam catatan di bawah ini :

Mortalitas

Dasar tabel mortalitas standar yang memadai dipilih tergantung pada jenis kontrak. Untuk kontrak pertanggungan hidup, provisi dibuat untuk peningkatan mortalitas masa depan berdasarkan trend data teridentifikasi dan investigasi mortalitas lanjutan yang dilakukan oleh independen aktuaris.

Morbidity

Tingkat penggantian dari cacat yang diurungkan berdasarkan studi pengalaman industri yang disesuaikan dengan pengalaman dari Grup sendiri.

Persistensi

Tingkat persistensi bervariasi per jenis produk dan jangka waktu polis. Cadangan kemudian dibuat untuk suatu trend data hingga mencapai estimasi terbaik atas tingkat persistensi kedepan dengan mempertimbangkan perilaku pemegang kontrak yang masih aktif.

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi mempengaruhi asumsi tingkat manfaat masa depan karena pemegang kontrak dan pemilihan tingkat diskonto yang memadai. Asumsi utama Grup pada imbal hasil investasi berhubungan dengan komponen :

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dibagikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. MANAJEMEN RISIKO ASURANSI DAN KEUANGAN - Lanjutan

5.1 Risiko Asuransi - Lanjutan

5.1.2 Kontrak Asuransi Jangka Panjang - Lanjutan

(c) Proses yang digunakan untuk membuskan asumsi - Lanjutan

(i) Tingkat Bunga Bebas Risiko

Tingkat bunga bebas risiko adalah imbal hasil kotor untuk penarikan surat berharga Pemerintah. Untuk valuasi berjalan adalah sebagai berikut:

<u>Jangka waktu</u>	<u>IDR</u>
1 - 5 tahun	4,50%
5 - 10 tahun	5,00%
> 10 tahun	6,50%

(ii) Margin Kredit

Untuk mendapatkan tingkat bunga selain dari bebas risiko, Grup menambahkan tingkat bunga dan tabel di atas ditambah margin kredit.

(d) Perubahan asumsi

Grup tidak mengubah asumsinya untuk kontrak asuransi yang diuraikan di catatan ini.

5.2 Risiko Keuangan

Grup dihadapkan pada risiko keuangan pada seluruh aset keuangannya, liabilitas keuangan (kontrak investasi dan pinjaman), aset reasuransi dan liabilitas asuransi. Khususnya, risiko keuangan utama adalah hasil investasi jangka panjang tidak mencukupi untuk mendanai kewajiban yang timbul dari kontrak asuransi dan investasi. Komponen yang sangat penting dari risiko keuangan ini adalah risiko tingkat bunga, risiko biaya modal, risiko mata uang asing dan risiko kredit.

Risiko ini muncul dari posisi terbuka atas tingkat bunga, produk mata uang asing dan produk ekuitas, semuanya adalah paparan atas pergerakan pasar umum dan kredit. Risiko utama yang dihadapi Perseroan karena sifat investasi dan liabilitasnya adalah risiko tingkat bunga dan risiko biaya modal.

5.2.1 Risiko Kredit

Grup menghadapi paparan risiko kredit yaitu risiko bahwa pihak yang berkecukupan akan tidak mampu membayar lunas pada saat jatuh tempo. Area utama, di mana Grup dihadapkan pada risiko kredit adalah:

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. MANAJEMEN RISIKO ASURANSI DAN KEUANGAN - Lanjutan

5.2 Risiko Keuangan - Lanjutan

5.2.1 Risiko Kredit - Lanjutan

Bagian reasurador atas liabilitas asuransi:

- Jumlah piutang kepada reasurador dalam hal klaim yang sudah dipeyot;
- Jumlah piutang kepada pemegang polis;
- Jumlah piutang kepada perantara;
- Jumlah yang jatuh tempo dari pinjaman dan piutang;
- Jumlah yang jatuh tempo dari surat berharga utang; dan
- Reasuransi yang digunakan untuk mengelola risiko asuransi. Namun demikian, hal ini tidak menghilangkan kewajiban Grup sebagai asurador utama. Jika reasurador gagal membayar klaim untuk suatu alasan, Grup tetap berkewajiban membayar kepada pemegang polis. Kreditabilitas reasurador dikaji secara tahunan dengan memv. likuiditas keuangan sebelum finalisasi suatu kontrak.

5.2.2 Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko Grup tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo seperti pembayaran manfaat polis, pembayaran tunj. atau janji pada kontrak, atau arus keluar kas lainnya, seperti jatuh tempo utang. Suatu pengeluaran kas akan mengutangi dana kas yang tersedia untuk kegiatan operasional, trading dan investasi. Kondisi yang ekstrem, kekurangan likuiditas akan menyebabkan pengurangan aset dan penjualan aset, atau potensi ketidakmampuan membayar janji kepada pemegang polis. Risiko Grup menjadi tidak mampu membayar adalah melekat pada semua operasional asuransi, yang dapat dipengaruhi oleh lembaga khusus dan termasuk beberapa luas peristiwa yang mempengaruhi pasar, tetapi tidak terbatas pada: transaksi kredit, merger dan akuisisi kejadian sistemik dan bencana alam.

Proses manajemen likuiditas Grup dilaksanakan oleh Grup dan dimonitor oleh tim tersendiri dan bagian keuangan. termasuk pendanaan harian dikelola dengan memonitor arus kas masa depan untuk memastikan bahwa kebutuhan kas terpenuhi, menjaga portofolio aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi likuid sebagai proteksi atas pengaruh yang tak terduga terhadap arus kas dan memonitor risiko likuiditas secara dengan persyaratan internal dan regulator.

Memonitor dan melaporkan pengambilan pinjaman dan proyeksi arus kas secara harian, mingguan dan bulanan, semua hal ini merupakan kunci untuk pengelolaan likuiditas. Titik awal proyeksi ini adalah analisis jatuh tempo kontrak liabilitas keuangan dan tanggal penarikan aset keuangan yang diharapkan.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENGELOLAAN MODAL

Tujuan Grup saat mengelola modal adalah:

- Sesuai dengan persyaratan modal asuransi yang ditetapkan regulasi industri asuransi di wilayah operasional
- Menjaga kemampuan Grup untuk terus berkelanjutan (*going concern*), sehingga dapat terus memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan menyalurkan kepada pihak yang berkepentingan lainnya; dan
- Untuk menyediakan imbal hasil yang cukup kepada pemegang polis dengan harga investasi asuransi dan investasi secara rapedan dengan tingkat risikonya.

7. KAS DAN BANK

	2023	2022
Kas	283.433.966	262.020.143
Bank	371.562.917.963	369.096.047.537
Jumlah Kas dan Bank	371.846.351.919	369.358.067.680
BANK		
BANK PEMBANGUNAN DASRAH (BPD)		
PT Bank DKI	64.784.667.708	28.405.799.285
PT BPD Riau Kepri	42.203.949.985	22.724.015.858
PT BPD Papua	28.682.195.075	17.947.160.769
PT BPD Sumatera Selatan & Bangka Belitung	22.937.800.813	10.886.230.776
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	17.600.339.415	43.329.326.477
PT BPD Sulawesi Selatan Barat	12.095.750.220	6.922.365.394
PT BPD Jawa Timur Tbk	10.077.484.271	12.573.357.573
PT BPD Jambi	9.370.329.241	2.888.101.808
PT Bank Aceh Syariah	8.438.144.162	6.404.709.627
PT Bank Nagari	7.882.081.897	9.585.599.224
PT BPD Jawa Tengah	7.658.526.406	4.262.823.827
PT BPD Sumatera Utara	7.125.203.635	529.697.550
PT BPD Kalimantan Tengah	6.922.941.940	2.580.750.089
PT BPD Bali	5.603.658.436	9.880.651.626
PT BPD Maluku	4.793.045.289	1.990.158.930
PT BPD Nusa Tenggara Barat	4.677.693.215	4.899.090.106
PT BPD Kalimantan Barat	4.278.898.803	32.198.455.841
PT BPD Sulawesi Tenggara	3.027.744.400	4.475.037.954
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1.940.879.889	400.092.850
PT BPD D.I. Yogyakarta	1.848.179.351	3.054.812.013
PT BPD Lampung	1.638.869.772	2.325.408.357
Saldo yang dipindahkan	272.698.379.202	227.920.044.938

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. KAS DAN BANK - Lanjutan

BANK - Lanjutan

	2023	2022
Saldo pendahan	272.698.379.202	227.929.044.938
BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD)		
PT BPD Sulawesi Utara & Gorontalo	1.158.987.743	1.781.672.317
PT BPD Sulawesi Tengah	1.110.402.397	1.533.451.449
PT BPD Nusa Tenggara Timur	1.019.293.858	1.041.998.687
PT BPD Kalimantan Selatan	990.795.945	1.652.533.913
PT BPD Bengkulu	853.714.817	719.871.729
PT BPD Banten	25.352.083	93.526.647
Jumlah Saldo Bank di Bank Pembangunan Daerah	277.897.925.896	234.743.067.690
BANK BUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH :		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	48.294.934.394	63.510.038.581
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17.930.202.737	19.913.885.352
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	9.753.720.829	15.692.070.414
PT Bank-bank Perkreditan Rakyat	6.589.548.707	5.985.423.511
PT Bank Mandiri Taspen	5.456.242.102	42.894.912.278
PT Bank-Barik Perkreditan Rakyat Syariah	2.364.426.622	2.273.867.800
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.431.714.330	3.400.827.716
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	1.311.742.388	254.078.674
PT Bank Danamon Syariah	156.416.948	164.945.639
PT Bank Syariah Bukopin	121.806.374	54.419.084
PT Bank Tabungan Negara Syariah	103.969.428	130.413.856
PT Bank Central Asia Syariah	66.101.852	10.916.528
PT Bank Syariah Mega Indonesia	44.900.886	43.273.250
PT Bank Seabank Indonesia	39.891.141	117.548.321
PT Bank Aries Indonesia	10.401.322	16.200.928
PT Bank CIMB Niaga Syariah	4.588.408	4.984.899
PT Bank Bukopin Tbk	2.405.434	2.820.434
PT Bank Mayapada Internasional	1.977.000	8.058.477
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	19.437.791
PT Bank BTPN Syariah	-	984.668
PT Bank MNC Internasional Tbk	-	52.899
Jumlah Saldo Bank di Bank Bukan BPD	93.684.892.107	154.352.958.957
Jumlah Saldo Bank	371.582.917.963	389.096.047.637

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

B. PIUTANG PREMI

Rincian untuk piutang premi yang dimiliki Grup, berdasarkan jenis asuransi, sesudah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Jenis Asuransi	2023		Jumlah	2022
	1 - 60 hari	> 60 hari		
Aslika	159.334.308.065	37.875.860.282	197.210.288.347	101.412.947.419
Kebakaran	8.065.822.716	23.725.391.112	29.791.013.828	30.789.163.802
Kendaraan bermotor	1.899.040.588	6.491.313.817	8.380.354.415	8.035.549.371
Rekayasa	3.673.468.738	3.669.046.670	7.332.505.309	3.970.432.293
Pengangkutan	3.758.283.735	3.371.327.851	7.129.591.586	8.039.566.569
Sertifikat penjaminan / Surety bond	317.770.870	6.532.200.602	8.649.971.272	5.866.708.080
Konsorsium	212.541.084	436.262.303	648.803.387	6.254.408.870
Jumlah Piutang Premi	175.251.005.897	82.091.522.537	257.342.528.144	185.129.768.894
			2023	2022
Piutang premi			282.542.818.485	188.059.449.898
Cadangan kerugian penurunan nilai			(5.200.388.321)	(3.929.683.494)
Jumlah Piutang Premi			257.342.528.144	185.129.768.504

Manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dan tidak tertagihnya piutang premi.

C. PIUTANG HASIL INVESTASI

Menyajikan pendapatan yang masih harus diterima atas hasil investasi yang belum jatuh tempo, sebagai berikut:

	2023	2022
Surat Utang Negara (SUN)	6.201.411.875	6.006.859.372
Kupon obligasi	3.916.886.407	3.201.102.910
Bunga deposito wajib dan berjangka	+ 511.115.127	1.447.744.282
Pendapatan sewa	642.986.581	734.458.888
Jumlah Piutang Hasil Investasi	12.272.389.990	11.389.165.552

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PIUTANG REASURANSI

Rincian umur piutang reasuransi yang dimiliki Grup, berdasarkan reasurador terkait premi dan klaim reasuransi, sesudah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, adalah sebagai berikut:

	2023		Jumlah	2022
	1 - 60 hari	> 60 hari		Jumlah
PT Hanfer Indonesia	172.399.073.914	66.845.407.910	239.044.481.824	23.190.510.588
PT Asuransi Jiwantiya (Peraero)	-	66.451.049.915	66.451.049.915	55.786.923.104
PT Garuda Reinsurance Brokers	25.308.622.232	27.110.402.426	52.419.024.658	221.010.317
PT Asuransi Jasa Indonesia (Peraero)	2.040.987.061	19.288.145.431	21.329.132.492	12.447.575.045
PT Asuransi Jasa Mega Life	-	13.307.573.237	13.307.573.237	13.139.184.807
PT Asuransi Jasa Syarif Al Amin	-	12.033.930.767	12.033.930.767	14.660.324.894
PT Reasuransi Nasional Indonesia Divisi Syariah	3.308.885.480	6.796.311.824	10.105.197.304	1.195.257.821
PT Insurance Broker Service	-	3.529.152.873	3.529.152.873	5.725.174.878
PT Reasuransi Syariah Indonesia	1.801.504.866	180.630.193	1.982.135.062	929.527.420
PT Asuransi Jasa Raharja Putra	239.327.543	519.777.207	759.104.750	262.396.021
PT Energi Mandiri Internasional Reinsurance Brokers	-	752.406.511	752.406.511	65.768.736
Konsorsium Suretyship dan Asuransi Kredit Indonesia	-	710.520.552	710.520.552	432.258.324
PT Asia Reinsurance Brokers	-	572.749.130	572.749.130	630.512.276
PT Reasuransi Indonesia Utama (Peraero)	-	571.854.294	571.854.294	2.408.390.388
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)	451.455.313	17.354.844.404	17.806.279.717	30.082.276.000
Jumlah Piutang Reasuransi	290.649.837.402	224.826.456.674	430.374.294.076	159.189.850.823
			2023	2022
Piutang reasuransi			430.374.294.076	159.189.050.923
Cadangan kerugian penurunan nilai			(24.644.774.858)	(15.840.474.399)
Jumlah Piutang Reasuransi			405.729.519.218	143.348.576.524

Manajemen Grup berpendapat bahwa penyisiran kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak terpagalnya piutang reasuransi.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN – Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. INVESTASI

a. Deposito Wajib

	2023	2022
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.000.000.000	10.000.000.000
PT BPD Sulawesi Tenggara	5.800.000.000	5.800.000.000
PT BPD Sulawesi Selatan & Barat	3.200.000.000	3.200.000.000
PT BPD Kalimantan Barat	2.500.000.000	2.500.000.000
PT BPD Sumatera Selatan & Bangka Belitung	2.500.000.000	2.500.000.000
PT BPD Jawa Tengah	2.000.000.000	2.000.000.000
PT BPD Sumatera Utara	1.500.000.000	1.500.000.000
PT BPD Jambi	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPD Papua	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPD Lampung	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPD Bali	500.000.000	500.000.000
PT BPD Sulawesi Tengah	500.000.000	500.000.000
PT Bank Neo Commerce Tbk	250.000.000	250.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.000.000	200.000.000
Jumlah Deposito Wajib	38.850.000.000	31.850.000.000

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/PQJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tanggal 5 April 2023, Deposito wajib merupakan dana jaminan dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum yang bukan afiliasi, yang dilaksanakan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai bank kustodian Grup yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Deposito Berjangka

	2023	2022
BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) :		
PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk	177.910.000.000	82.685.000.000
PT Bank DKI	120.925.000.000	149.925.000.000
PT BPD Sumatera Utara	112.540.000.000	51.879.000.000
PT Bank Aceh Syariah	81.011.000.000	98.736.000.000
PT BPD Sumatera Selatan & Bangka Belitung	78.136.000.000	81.850.000.000
PT BPD Sulawesi Tenggara	77.619.000.000	93.009.000.000
PT BPD Papua	70.622.000.000	51.688.000.000
PT BPD Jawa Timur Tbk	70.370.000.000	45.230.000.000
PT BPD Riau Kepri	65.740.000.000	69.040.000.000
PT BPD Nusa Tenggara Barat	62.600.000.000	63.600.000.000
PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	62.060.000.000	71.560.000.000
PT BPD Jambi	53.590.000.000	54.867.000.000
PT BPD Sulawesi Selatan Barat	52.395.000.000	65.210.000.000
PT BPD Kalimantan Barat	49.138.000.000	49.958.000.000
PT BPD Sulawesi Tengah	30.570.000.000	32.197.000.000
Saldo yang dipindahkan	1.165.454.800.000	1.055.264.000.000

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. INVESTASI - Lanjutan

0. Deposito Berjangka - Lanjutan

	2023	2022
Saldo pindahan	1.185.454.800.000	1.055.264.000.000
BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) :		
PT BPD Bengkulu	30.516.000.000	34.047.000.000
PT BPD Lampung	21.100.000.000	24.480.000.000
PT BPD D.I. Yogyakarta	19.100.000.000	18.975.000.000
PT Bank Jabar Banten Syariah	15.000.000.000	15.000.000.000
PT Bank Negeri	14.335.000.000	8.530.000.000
PT BPD Kalimantan Tengah	12.265.000.000	7.715.000.000
PT BPD Bali	10.000.000.000	2.000.000.000
PT BPD Jawa Tengah	7.910.000.000	17.510.000.000
PT BPD Maluku	6.195.100.000	6.195.100.000
PT BPD Kalimantan Selatan	5.405.000.000	4.305.000.000
PT BPD Nusa Tenggara Timur	2.100.000.000	3.000.000.000
PT BPD Sulawesi Utara	1.000.000.000	19.775.000.000
Jumlah Deposito di Bank Pembangunan Daerah	1.310.380.900.000	1.217.798.100.000
BANK BUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH :		
PT Bank Negara Indonesia 48 (Persero) Tbk	344.510.431.645	274.810.431.645
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	163.650.000.000	85.150.000.000
PT Bank Mandiri Taspen	73.750.000.000	22.750.000.000
PT Bank Tabungan Negara Syariah	22.300.000.000	16.750.000.000
PT Bank-bank Perkreditan Rakyat	17.954.000.000	18.590.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	14.800.000.000	200.000.000
PT Bank Bukopin Syariah	6.200.000.000	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.495.000.000	8.895.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.577.792.000	4.008.708.050
PT Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah	2.350.000.000	1.850.000.000
PT Bank Mega Syariah	2.000.000.000	-
PT Bank Arta Indonesia	1.500.000.000	1.300.000.000
PT Bank Mayapada Internasional	-	100.000.000
Jumlah Deposito di Bank Bukan Bank Pembangunan Daerah	676.887.223.646	481.304.138.695
Jumlah Deposito Berjangka	2.024.218.123.646	1.681.058.238.695

Tingkat suku bunga deposito berjangka yang dimiliki Grup untuk tahun 2022 dan 2021, adalah:

	2023	2022
Rupiah	2,25% — 6,75%	1,00% — 6,25%
Dolar Amerika Serikat	0,60% — 0,70%	0,25% — 1,75%

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dicatatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. INVESTASI - Lanjutan

b. Deposito Berjangka - Lanjutan

Jangka waktu penempatan deposito oleh Grup adalah 1 sampai dengan 12 bulan dan dapat diperpanjang otomatis (Automatic Roll Over/ARO)

c. Efek Ekuitas yang Diperdagangkan

Nama Saham	Harga Perolehan	Nilai Wajar	
		2023	2022
PT Asuransi Bintang Tbk	6.803.472.400	7.504.000.000	3.622.060.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	492.545.000	898.450.000	703.950.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	220.875.000	376.250.000	322.875.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	215.250.000	383.000.000	297.750.000
PT Bank Central Asia Tbk	74.750.000	70.500.000	65.500.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	78.400.000	79.000.000	75.000.000
PT Unilever Indonesia Tbk	33.150.000	26.475.000	35.250.000
PT Bumi Pembangunan Daerah Banten Tbk	10.950.000	7.500.000	7.500.000
Jumlah Efek Ekuitas yang Diperdagangkan	6.127.392.400	9.125.175.000	5.149.875.000

d. Unit Penyertaan Reksa Dana

Reksa Dana / Custodian	Harga Perolehan	Nilai Wajar	
		2023	2022
Aristo Sukuk Income Fund / PT Bank Permata Tbk	1.700.000.000	1.798.587.552	1.798.746.555
Reksa Dana Terproteksi Aristo Sukuk Berkah S / PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.000.000.000	1.012.980.000	1.023.160.000
Jumlah Reksa Dana	2.700.000.000	2.811.567.552	2.819.896.555

Selaku Reksa Dana tersebut merupakan nilai aset bersih (nilai wajar) per 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan laporan bank kustodian.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dibaca/dikenal dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. INVESTASI - Lanjutan

e. Efek Utang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Rincian efek utang dimiliki hingga jatuh tempo yang dimiliki oleh Grup per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut

Nama Sukuk/Obligasi/Syarat	Nilai Perolehan	2023	
		Nilai Wajar	Labai(Rugi) Belum Direalisasi
Sukuk Retail Negara Seri SR 016	4.960.000.000	4.955.655.556	5.655.556
Surat Berharga Syariah Negara PBS 05	9.947.500.000	9.951.875.000	4.375.000
Surat Berharga Syariah Negara PBS 07	10.517.000.000	10.399.748.250	(117.251.750)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 12	2.318.000.000	2.308.020.408	(12.979.592)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 15	7.738.000.000	7.721.830.431	(17.069.569)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 21	24.543.000.000	24.324.937.098	(218.062.902)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 22	11.606.962.500	11.389.384.833	(217.577.667)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 23	18.235.100.000	18.134.573.588	(100.526.412)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 25	8.985.000.000	8.935.488.453	(49.511.547)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 28	14.147.500.000	14.233.376.547	85.876.547
Surat Berharga Syariah Negara PBS 33	22.688.500.000	22.739.035.145	50.535.145
Surat Berharga Syariah Negara PBS 34	3.780.000.000	3.797.512.438	17.512.438
Surat Berharga Syariah Negara PBS 37	12.878.000.000	12.885.675.684	7.675.684
Sukuk Negara Retail Seri SR 014	3.004.500.000	3.000.629.417	(3.870.583)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan (It-PLN Tahap I Tahun 2018 Seri E	2.287.000.000	2.280.650.556	(6.349.444)
Jumlah Efek Utang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	155.927.982.500	155.045.172.201	(571.890.299)

Nama Sukuk/Obligasi/Syarat	Nilai Perolehan	2022	
		Nilai Wajar	Labai(Rugi) Belum Direalisasi
Surat Berharga Syariah Negara PBS 05	9.947.500.000	9.949.375.000	1.875.000
Surat Berharga Syariah Negara PBS 07	10.517.000.000	10.483.733.146	(33.266.854)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 11	6.158.000.000	6.139.000.000	(20.000.000)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 15	3.273.000.000	3.270.242.424	(2.757.576)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 19	3.059.400.000	3.059.400.000	-
Surat Berharga Syariah Negara PBS 21	5.424.500.000	5.396.835.000	(27.665.000)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 22	11.606.962.500	11.519.714.864	(83.247.636)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 23	5.338.500.000	5.325.811.133	(12.688.867)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 25	2.180.000.000	2.163.750.000	(16.250.000)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 29	9.342.500.000	9.358.970.862	16.470.862
Surat Berharga Syariah Negara PBS 33	22.888.500.000	22.705.538.425	(18.036.425)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 34	3.780.000.000	3.784.379.109	4.379.109
Sukuk Negara Retail Seri SR 013	2.025.000.000	2.018.181.818	(6.818.182)
Sukuk Negara Retail Seri SR 014	3.004.500.000	3.003.705.884	(798.116)
Jumlah Efek Utang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	98.328.362.500	98.183.236.748	(142.825.752)

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11 INVESTASI - Lanjutan

L Efek Utang Tersedia untuk Dijual

Rincian efek utang tersedia untuk dijual yang dimiliki oleh Grup per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

Nama Sukuk/Obligasi Syariah	Nilai Perolehan	2023	
		Nilai Wajar	Labai(Rugi) Bekas Dimensi
Surat Berharga Syariah Negara PBS 04	2.000.000.000	1.895.400.000	(104.600.000)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 05	9.982.500.000	9.922.000.000	(60.500.000)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 07	1.215.000.000	1.218.899.999	2.899.999
Surat Berharga Syariah Negara PBS 12	30.649.000.000	31.698.000.000	1.047.000.000
Surat Berharga Syariah Negara PBS 15	9.024.500.000	10.078.200.000	1.053.700.000
Surat Berharga Syariah Negara PBS 21	5.424.000.000	5.254.000.000	(170.000.000)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 22	15.959.000.000	16.136.400.000	177.400.000
Surat Berharga Syariah Negara PBS 25	15.727.000.000	15.807.200.000	(19.800.000)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 28	12.166.000.000	12.186.900.000	21.900.000
Surat Berharga Syariah Negara PBS 34	7.035.000.000	6.864.800.000	(170.100.000)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 37	8.021.000.000	9.135.000.000	114.000.000
Surat Berharga Syariah Negara PBS 38	5.007.500.000	4.864.000.000	(23.500.000)
Obligasi Negara RI Seri FR0068	2.000.000.000	2.263.944.580	263.944.580
Obligasi Negara RI Seri FR0074	88.800.000.000	72.760.041.200	4.160.041.200
Obligasi Negara RI Seri FR0075	24.000.000.000	25.716.679.920	1.716.679.920
Obligasi Negara RI Seri FR0076	95.000.000.000	100.262.240.000	5.262.240.000
Obligasi Negara RI Seri FR0080	32.000.000.000	34.201.780.160	2.201.780.160
Obligasi Negara RI Seri FR0082	88.000.000.000	90.267.157.760	2.267.157.760
Obligasi Negara RI Seri FR0083	29.000.000.000	31.074.818.049	2.074.818.049
Obligasi Negara RI Seri FR0088	5.000.000.000	4.883.082.600	(116.917.400)
Obligasi Negara RI Seri FR0091	20.000.000.000	19.823.175.000	(176.825.000)
Obligasi Negara RI Seri FR0092	97.000.000.000	100.831.500.000	3.831.500.000
Obligasi Negara Tahun 2006 Seri FR 0040	2.000.000.000	2.145.870.640	145.870.640
Surat Berharga Syariah Negara IFR 008	1.000.000.000	1.176.658.560	176.658.560
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	5.000.000.000	4.885.195.150	(114.804.850)
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	5.000.000.000	5.000.000.000	-
Sukuk Berkelanjutan III PLN Tahap III Th 2018 Seri D	4.776.790.000	5.067.250.000	310.000.000
Sukuk Berkelanjutan III PLN Tahap II Th 2018 Seri D	2.295.500.000	2.401.000.000	105.500.000
Sukuk Berkelanjutan III PLN Tahap IV Th 2018 Seri B	2.136.000.000	2.068.800.000	(67.200.000)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aruna Gas Industri Tahap V Tahun 2022 Seri C	6.025.000.000	5.000.800.000	(26.500.000)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elmusi Tahap I Tahun 2020	1.050.500.000	1.022.400.001	(28.099.899)
Jumlah Efek Utang Tersedia untuk Dijual	612.094.250.000	635.871.773.519	23.777.523.519

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dibaca dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. INVESTASI - Lanjutan

1. Efek Utang Tersedia untuk Dijual - Lanjutan

Nama Sukuk/Obligasi Syariah	Nilai Perolehan	2022	
		Nilai Wajar	Labai/(Rugi) Belum Direalisasi
Obligasi Negara RI Seri FR0065	10.000.000.000	9.741.300.000	(258.700.000)
Obligasi Negara RI Seri FR0068	2.000.000.000	2.200.222.260	200.222.260
Obligasi Negara RI Seri FR0074	68.800.000.000	71.024.053.030	2.424.053.030
Obligasi Negara RI Seri FR0075	24.000.000.000	24.590.517.880	590.517.880
Obligasi Negara RI Seri FR0076	70.000.000.000	70.573.099.700	573.099.700
Obligasi Negara RI Seri FR0080	32.000.000.000	33.058.850.980	1.058.850.980
Obligasi Negara RI Seri FR0082	88.000.000.000	88.880.000.000	880.000.000
Obligasi Negara RI Seri FR0083	4.000.000.000	4.126.630.000	126.630.000
Obligasi Negara RI Seri FR0088	5.000.000.000	4.573.775.000	(326.225.000)
Obligasi Negara RI Seri FR0091	40.000.000.000	38.538.181.800	(1.461.818.200)
Obligasi Negara RI Seri FR0092	59.000.000.000	68.187.350.871	187.350.871
Obligasi Negara Tahun 2006 Seri RA 0040	2.000.000.000	2.238.453.520	238.453.520
Surat Berharga Syariah Negara IFR 008	1.000.000.000	1.198.868.780	198.868.780
Surat Berharga Syariah Negara PBS 04	2.000.000.000	1.809.400.000	(190.600.000)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 05	5.022.500.000	4.703.500.000	(319.000.000)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 12	30.548.000.000	31.371.200.000	722.200.000
Surat Berharga Syariah Negara PBS 15	9.024.500.000	9.902.700.000	878.200.000
Surat Berharga Syariah Negara PBS 21	2.185.500.000	2.162.800.000	(22.700.000)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 22	15.958.000.000	15.802.599.998	(155.400.002)
Surat Berharga Syariah Negara PBS 25	2.281.000.000	2.185.400.000	(95.600.000)
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	9.000.000.000	4.598.048.450	(301.951.550)
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	5.000.000.000	4.994.022.250	(5.977.750)
Sukuk Berkelanjutan II PLN Tahap III Th 2018 Seri D	4.776.750.000	4.833.000.000	57.150.000
Sukuk Berkelanjutan III PLN Tahap II Th 2018 Seri D	2.295.500.000	2.286.800.000	(8.700.000)
Sukuk Berkelanjutan III PLN Tahap IV Th 2018 Seri B	2.136.000.000	2.161.800.000	25.800.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 Seri C	5.025.000.000	6.872.000.000	1.847.000.000
Jumlah Efek Utang Tersedia Untuk Dijual	508.954.750.000	512.263.063.999	3.308.313.999

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) seri PBS012 merupakan dana jaminan dengan nilai nominal Rp20.000.000.000 dengan tanggal jatuh tempo 15 November 2031 yang dititipkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dan telah diadministrasikan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Direktorat IKNB Syariah dengan Surat persetujuan Dana Jaminan Nomor : S-279/MB.223/2018 tanggal 27 Februari 2018, hal ini untuk memenuhi Pasal 38 Peraturan OJK Nomor 72/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah mengenai ketentuan jumlah minimum Dana Jaminan

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. INVESTASI - Lanjutan

f. Efek Utang Tersedia untuk Dijual - Lanjutan

Grup menambah dana jaminan yang dibuat usahakan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan nilai nominal masing-masing Surat Berharga Syariah Negara PBS 22 sebesar Rp17.000.000.000 dengan tanggal jatuh tempo 15 April 2024 dan Surat Berharga Syariah Negara PBS 15 sebesar Rp3.000.000.000 dengan tanggal jatuh tempo 15 Juli 2047. Berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-65/NB.213/2023 tanggal 11 Januari 2023, dana jaminan tersebut telah diadministrasikan di Direktorat IKNB Syariah OJK. Selanjutnya, berdasarkan surat Direksi Grup No. 0063/DIR/1-2023 tanggal 10 Januari 2023 kepada Direktur IKNB Syariah OJK tentang permohonan pencairan dana jaminan, Grup mengajukan pencairan dana jaminan sebesar Rp20.000.000.000 yang dibuat usahakan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan telah disetujui oleh DUK berdasarkan Surat Persetujuan Pencairan Dana Jaminan No. S-132/NB.213/2023 tanggal 30 Januari 2023.

Nama Sukuk / Obligasi Syariah	Peringkat Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga
Surat Berharga Syariah Negara PBS 11	—	15 Agustus 2023	8,750%
Sukuk Negara Retail Seri SR 013	—	10 September 2023	6,050%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 19	—	15 September 2023	8,250%
Sukuk Negara Retail Seri SR 014	—	10 Maret 2024	5,470%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 16	—	15 Juni 2024	9,000%
Sukuk Negara Retail Seri SR 015	—	10 September 2024	5,100%
Sukuk Syariah Berkelanjutan I Ekuitas Tahap I Tahun 2020	idAAA	11 Agustus 2025	9,000%
Obligasi Negara Tahun 2006 Seri FR 0040	—	15 September 2025	11,000%
Sukuk Berkelanjutan III PLN Tahap IV Th 2019 Seri B	idAAA(ry)	01 Agustus 2026	6,500%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 21	—	15 November 2026	8,500%
Sukuk Syariah Berkelanjutan II Ameka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 Seri C	A(ion)	05 April 2028	9,750%
Surat Berharga Syariah Negara IFR 006	—	15 Maret 2030	10,250%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 23	—	15 Mei 2030	8,125%
Obligasi Negara RI Seri FR0082	—	15 September 2030	7,000%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 12	—	15 November 2031	8,875%
Obligasi Negara RI Seri FR0091	—	15 April 2032	6,375%
Obligasi Negara RI Seri FR0074	—	15 Agustus 2032	7,500%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 26	—	15 April 2033	8,375%
Obligasi Negara RI Seri FR0065	—	15 Mei 2033	6,625%
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS029	—	15 Maret 2034	6,375%
Obligasi Negara RI Seri FR0088	—	15 Maret 2034	8,375%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 28	—	15 Maret 2034	6,375%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 22	—	15 April 2034	8,625%
Obligasi Negara RI Seri FR0080	—	15 Juni 2035	7,500%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 37	—	15 Maret 2036	6,875%
Obligasi Negara RI Seri FR0088	—	15 Juni 2036	8,250%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 04	—	15 Februari 2037	8,100%
Sukuk Berkelanjutan II PLN Tahap III Th 2018 Seri D	idAAA	22 Februari 2039	8,750%

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. INVESTASI - Lanjutan

f. Efek Utang Tersedia untuk Dijual - Lanjutan

Nama Sukuk / Obligasi Syariah	Peringkat Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga
Obligasi Negara RI Seri FR0075	—	15 Juni 2038	7.500%
Sukuk Berkelanjutan III PLN Tahap II Th 2018 Seri D	idAAA	10 Oktober 2038	8,650%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 34	—	15 Juni 2039	6,500%
Obligasi Negara RI Seri FR0083	—	15 April 2040	7,500%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 1/7	—	15 September 2040	8,000%
Obligasi Negara RI Seri FR0092	—	15 Juni 2042	7,125%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 05	—	15 April 2043	8,750%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 33	—	15 Juni 2047	6,750%
Obligasi Negara RI Seri FR0076	—	15 Mei 2048	7,375%
Surat Berharga Syariah Negara PBS 35	—	15 Desember 2049	8,750%

g. Penyertaan Langsung

	2023	2022
PT Reasuransi Maipark Indonesia	2.444.657.126	2.444.657.126
Jumlah Penyertaan Langsung	2.444.657.126	2.444.657.126

Total penyertaan langsung di PT Reasuransi Maipark Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 3.250 lembar saham @ Rp100,00 harga saham saat pendirian atau 0,70% dari modal dasar yang telah dibayarkan dan disetor penuh. Nilai penyertaan tersebut dinilai dengan harga perolehan karena tidak ada kuotasi harga pasar aktif dan belum ada metode penilaian yang cukup modal.

h. Investasi pada Properti

	2023	2022
Negara Perolehan - Tahun dan hangunan :		
Askrida Tower	36.091.639.339	36.091.639.339
Rumah di Artha Vista Residence, Medan, Sumatera Utara	9.472.880.000	9.472.880.000
Ruko di Jalan Tamblong, Bandung, Jawa Barat	7.746.000.000	7.746.000.000
Ruko 3 unit di Jl. Pemuda C1, C2 & C3 Bukitdugli, Sumatera Barat	4.725.125.000	4.725.125.000
Ruko 2 unit di Jl. Imam Bonjol No.120 Asik Tampang Padang Sidempuan, Sumatera Utara	4.265.652.823	4.265.652.823
Nukun Sanyava Trade Center, Kalimantan Timur	3.848.113.000	3.848.113.000
Apartemen Ambassade, Kuningan, DKI Jakarta	2.990.627.000	2.990.627.000
Ruko di Sidoarjo, Jawa Timur	1.350.000.000	1.350.000.000
Ruko di Banyuwangi, Jawa Timur	990.000.000	990.000.000
Jumlah Negara Perolehan	71.480.037.162	71.480.037.162
Akumulasi Penyusutan	(19.702.545.376)	(17.846.900.960)
Jumlah Investasi pada Properti	51.777.491.786	53.633.136.202

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. INVESTASI - Lanjutan

h. Investasi pada Properti - Lanjutan

Harga perolehan Gedung Perkantoran Askrida Tower di Jalan Pramuka Raya No. 151 RT 008/05, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebesar Rp79.409.547.500 dan dari nilai tersebut sebesar 45,45% atau Rp36.091.639.339 digunakan Grup sebagai investasi pada properti. (Lihat juga catatan 15 aset tetap).

12. LIABILITAS ASURANSI DAN ASET REASURANSI

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SE.OJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknik Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, serta PSAK Nomor 62 tentang Kontrak Asuransi dan PSAK Nomor 28 (revisi 2012) tentang Akuntansi Kontrak Asuransi, Grup mengasyskan Liabilitas Kontrak Asuransi yang telah dibentuk Grup yaitu dilakukan Tes Kecukupan Liabilitas (*Liability Adequate Test / LAT*).

a. ESTIMASI LIABILITAS KLAIM

	2023	2022
Aneka	304.605.537.639	205.573.539.643
Ketakarutan	17.685.390.428	7.759.185.254
Kendaraan bermotor	1.492.984.894	1.532.507.307
Konsorsium	-	-
Pengangkutan	156.896.431	58.848.608
Rakayasa	8.197.354.415	144.650.408
Sertifikat penjaminan / Surety bond	2.411.375.220	2.115.740.234
Jumlah Estimasi Liabilitas Klaim	334.549.518.027	217.184.271.452

b. PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN

	2023	2022
Aneka	40.708.584.693	24.735.324.365
Kabupaten	18.240.050.315	18.768.667.231
Kendaraan bermotor	10.104.940.888	10.135.912.273
Konsorsium	939.486.773	868.971.536
Pengangkutan	2.763.360	29.193.800
Rakayasa	3.743.880.591	354.820.641
Sertifikat penjaminan / Surety bond	656.491.125	733.471.940
Jumlah Premi yang Belum Merupakan Pendapatan	74.484.307.675	65.746.387.887

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 [Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain]

12. LIABILITAS ASURANSI DAN ASET REASURANSI - Lanjutan

c. LIABILITAS KONTRAK ASUPANSI JANGKA PANJANG

	2023	2022
Anak	2.538.423.432.405	2.157.986.375.443
Kebakaran	61.728.422.886	44.139.782.228
Kendaraan bermotor	5.047.279.331	4.808.453.208
Konsolidasi	260.181.973	197.106.298
Rekayasa	448.853.658	409.050.683
Sertifikat penjaminan / Surety bond	458.845.267	597.884.235
Jumlah Liabilitas Kontrak Asuransi Jangka Panjang	2.708.371.315.516	2.208.239.652.093

d. PENYISIHAN UJIAN BEBAN DI MUKA

	2023	2022
Anak	-	92.412.718.219
Kebakaran	-	2.877.233.008
Kendaraan bermotor	-	762.929.139
Rekayasa	-	135.000.182
Pengangkutan	-	11.386.037
Jumlah Penyisihan Ujian Beban Di Muka	-	96.219.236.593

RECOVERY DARI REASURADUR (ASET REASURANSI)

	2023	2022
Estimasi liabilitas klaim asuransi	70.804.834.985	63.744.848.703
PYBMP dan cadangan premi reasuransi dan subrogasi	838.927.833.163	690.106.178.682
Jumlah Bagian Reasuradur atas Liabilitas Asuransi	709.732.468.148	753.851.027.285

NETTO

	2023	2022
Estimasi liabilitas klaim	263.744.883.042	153.439.422.749
Premi yang belum merupakan pendapatan	2.141.848.390.030	1.573.879.841.098
Jumlah Liabilitas Asuransi - Netto	2.405.593.073.072	1.727.319.263.847

Besarnya cadangan premi gross induk untuk tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung oleh internal aktuaris induk Penny Simasutti, FSAI dengan nomor register NB-4537/FSAI/01/2023 dan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Nomor:175/DIR/III-2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Nomor:068/DIR/I-2023 tanggal 30 Januari 2023 serta berdasarkan Rencana Strategis Perusahaan (roadmap) Tahun 2022-2026 tanggal 12 Desember 2022 dengan asumsi dalam penghitungan cadangan teknis menggunakan asumsi estimasi sentral/estimates terbaik (best estimate). Selanjutnya, Nilai liabilitas cadangan teknis entitas anak per 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung oleh aktuaris perusahaan dan aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial dan Amran Nangasen dengan laporan tanggal 26 Januari 2023 dan No. 020VAS/KKA-TBA/I-2023 tanggal 20 Januari 2023.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
DAFTAR ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. LIABILITAS ASURANSI DAN ASET REASURANSI - Lanjutan

Cadangan Premi

- a. Cadangan teknis dalam bentuk cadangan premi merupakan cadangan premi yang berasal dari produk selain PAYDI yang terdiri dari:
- Produk yang perjangka waktu lebih dari satu tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis.
 - Produk yang berjangka waktu lebih dari satu tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) dan membenarkan manfaat lain setelah periode tertentu.
- b. Pembentukan cadangan teknis dalam bentuk cadangan premi, wajib mempertimbangkan penentuan dan pengeluaran yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) berfikir ditambah dengan margin risiko untuk pemburuan (*margin for adverse deviation*) dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) $\geq$ 75% pada level Grup.
- c. Penentuan meliputi penentuan:
- Pendapatan premi
 - Pendapatan premi atas manfaat tunjangan kematian
 - Pendapatan premi atas manfaat fitur partisipasi tidak mangkat.
- d. Pengeluaran, meliputi pengeluaran:
- Manfaat asuransi utama.
 - Biaya pemasaran.
- e. Penentuan dan pengeluaran, pada butir (b) tidak termasuk:
- Penentuan hasil investasi.
 - Penentuan dan pengeluaran dari dan ke pertanggungan ulang.
 - Penentuan dan pengeluaran dari dan ke cadangan klaim.
- f. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan cadangan teknis menggunakan asumsi asumsi sentral / estimasi terbaik (*best estimate*) terkini dengan ketentuan sebagai berikut:
- Asumsi tingkat diskonto yang digunakan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia selama satu tahun terakhir, dengan penambahan paling tinggi 0,5% apabila diperlukan.
 - Untuk polis berdenominasi Rupiah, tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga mengacu pada kurva imbal hasil (*yield curve*) yang dipublikasikan oleh Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA) untuk surat berharga yang diterbitkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah surat berharga yang memiliki sisa masa jatuh tempo yang sesuai atau mendekati atau kas yang diperhitungkan atau mendekati sisa masa kontrak asuransi dan polis Persewaan yang masih aktif (*inforce*).

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dianalisis dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. LIABILITAS ASURANSI DAN ASET REASURANSI - Lanjutan

Gadangan Premi - Lanjutan

- Asumsi tingkat diskonto yang digunakan memenuhi ketentuan, sebagai berikut - Lanjutan
 - Dalam kondisi tertentu, Kepala Eksekutif Pegawai Perusahaan, Dana Pihak Ketiga, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dapat menetapkan asumsi tingkat diskonto yang berbeda dan
 - Penetapan asumsi tingkat diskonto yang berbeda sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya dimulai dan berakhir melalui surat pemberitahuan Kepala Eksekutif Pegawai Perusahaan, Dana Pihak Ketiga, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya kepada Perusahaan.
 - Asumsi biaya, menggunakan pengalaman/data berikut Perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang dikaitkan pada jumlah polis atau peserta aktif (*in force*), penagihan premi, pengajuan klaim, besarnya premi dan uang pertanggungan polis atau peserta aktif.
 - Asumsi tingkat klaim (*mortality*, *morbidity*, atau *sickness rate*), menggunakan tabel pengalaman terkini Perusahaan atau industri Asuransi di Indonesia.
 - Anuitas mutasi polis atau peserta (*lapse*, *surrender*, *reinstatement*, atau *withdrawal*) menggunakan pengalaman terkini Perusahaan.
- g. Dalam hal Perusahaan menggunakan asumsi biaya, asumsi tingkat klaim, asumsi mutasi polis atau peserta, selain sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b) sampai dengan huruf d), Aktaris Perusahaan harus menjelaskan bahwa asumsi yang digunakan sudah mencerminkan kondisi Perusahaan secara wajar.
- h. Nilai total cadangan premi untuk polis dalam kelompok produk atau lini usaha yang sama tidak boleh kurang dari 0 (nol).
- i. Dalam hal keseluruhan cadangan premi yang dibentuk masih kecil dari keseluruhan nilai tunai atau pengembalian premi yang dijanjikan ketika polis dibatalkan/dibebus, Perusahaan harus menambah nilai cadangan premi menjadi paling sedikit sebesar nilai tunai atau pengembalian premi.

Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pembayaran (CAPYBMP)

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Pembentukan CAPYBMP untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun atau berjangka waktu lebih dari satu tahun yang syarat dan kondisi polisinya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis adalah jumlah terbesar antara hasil perhitungan CAPYBMP dengan hasil perhitungan Cadangan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (CARYBD).
- b. CAPYBMP dihitung berdasarkan proporsi premi bruto secara harian untuk masa asuransi yang belum dijalani.
- c. Premi bruto yang dimaksud adalah premi bruto setelah dikurangi komisi langsung.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. LIABILITAS ASURANSI DAN ASET REASURANSI - Lanjutan

Cadangan Klaim

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Cadangan teknis dalam bentuk cadangan klaim paling sedikit dihitung sebagai penjumlahan:
- Cadangan klaim dalam proses penyelesaian
 - Cadangan klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR), dan
 - Cadangan klaim atas klaim yang telah disetujui dan pembayaran manfaatnya tidak sekaligus
- b. Nilai cadangan IBNR merupakan nilai estimasi klaim yang dihitung berdasarkan estimasi awal atau estimasi terbaik (best estimate) terkini atas klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan dengan metode estimasi situasi yang diterima secara umum dan memperimbangkan pengalangan keterlambatan pelaporan klaim paling singkat tiga tahun terakhir, berikut estimasi biaya jasa penilai kerugian asuransi dan biaya lain terkait penyelesaian klaim tersebut.

Cadangan atas Risiko Bencana

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Risiko bencana adalah risiko kerugian yang timbul akibat terjadinya fenomena alam atau risiko umum kecelakaan yang menyebabkan kerugian cukup besar bagi Perusahaan.
- b. Cadangan atas risiko bencana dihitung berdasarkan manfaat asuransi risiko sendiri dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko bencana.
- c. Pertanggungan cadangan atas risiko bencana hanya dilakukan apabila:
- Perusahaan tidak melakukan pertanggungan ulang atas risiko bencana; dan/atau
 - pertanggungan ulang atas risiko bencana yang dilakukan Perusahaan tidak mencukupi untuk menutup risiko bencana yang dihadapi.
- d. Dalam hal pertanggungan ulang atas risiko bencana yang dilakukan Perusahaan tidak mencukupi untuk menutup risiko bencana yang dihadapi, cadangan risiko bencana dihitung dari selisih nilai yang tidak mencukupi untuk menutup risiko bencana tersebut.

13. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	2023	2022
Uang muka klaim	25.884.552.224	95.758.538.092
Gewa dibayar di muka	1.493.331.343	813.475.431
Asuransi dibayar di muka	539.739.413	315.916.013
Penambahan sistem klaim (CARE)	21.387.500	-
Pengadaan kalender dan agenda	-	397.000.000
Jumlah Biaya Dibayar Di Muka	27.939.099.480	97.284.929.536

Uang muka klaim merupakan pembayaran kepada tertanggung yang menjadi nasabah bank, pada masing-masing Kantor Cabang, sehubungan dengan produk asuransi Credit Insurance (Asuransi Kredit). Uang muka klaim akan di-offset dengan utang dalam setelah pelaporan produk klaim yang dibuat oleh Bagian Klaim.

PT ASURANSI BANGUN ASKREDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PIUTANG LAIN-LAIN

	2023	2022
Piutang kepada pihak ketiga	46.873.138.500	49.720.882.709
Piutang Administrative Services Only (ASO)	544.423.468	244.249.219
Piutang salvage & excess hasil	2.809.865	2.086.087.189
Piutang karyawan	-	1.403.548.284
Jumlah Piutang Lain-lain	47.420.371.837	53.454.747.401

Piutang kepada pihak ketiga merupakan piutang subrogasi atas klaim ex-gratia kredit modal kerja konstruksi

15. ASET TETAP

	2023				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Retradisi/Geset	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Tanah	49.648.635.930	-	-	-	49.648.635.930
Bangunan	87.456.664.963	-	-	88.200.000	87.543.864.963
Kendaraan bermotor	7.253.972.882	4.495.885.000	112.000.000	-	11.637.857.882
Mesin kantor	8.089.763.744	2.758.428.025	234.785.340	-	10.613.406.429
Komputer	29.837.035.467	5.934.188.250	866.859.284	-	34.904.364.433
Perabot kantor	33.047.860.870	2.021.592.263	887.615.803	-	34.171.836.530
Perabot rumah dinas	86.197.319	-	14.546.060	-	71.651.259
Renovasi ruang ruang	9.564.243.042	680.082.319	168.048.000	851.786.139	10.040.042.500
Aset dalam renovasi	2.430.637.985	964.958.103	-	(939.985.139)	2.455.610.929
Jumlah	227.494.211.388	16.869.113.960	2.292.254.487	-	242.067.070.861
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	32.275.032.875	4.183.654.858	-	-	43.458.687.731
Kendaraan bermotor	5.402.238.345	1.557.198.001	112.000.000	-	6.947.437.346
Mesin kantor	7.419.295.888	823.585.838	234.785.340	-	7.908.096.397
Komputer	21.075.742.128	3.264.169.834	866.859.284	-	24.373.052.678
Perabot kantor	28.220.340.141	2.000.178.774	887.615.803	-	29.332.903.112
Perabot rumah dinas	70.234.186	8.889.000	14.946.000	-	62.177.186
Renovasi ruang ruang	5.960.061.015	1.529.712.884	168.048.000	-	7.344.325.559
Jumlah	108.385.545.248	13.165.370.198	2.292.254.487	-	119.249.660.959
Nilai Buku	119.147.666.140				122.847.409.902

PT ASURANSI BANGUN ABKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dibaca dalam Rapih, kecuali dinyatakan lain)

15. ASET TETAP - Lanjutan

	2023				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Retrasn/Retrasn	Saldo Akhir
Biaya Perolehan					
Tanah	48.848.835.930	-	-	-	48.848.835.930
Bangunan	87.380.314.983	43.120.000	-	32.230.000	87.455.884.983
Kendaraan bermotor	7.038.277.888	215.895.000	-	-	7.253.972.888
Mesin kantor	8.147.655.074	722.208.670	-	-	8.869.763.744
Komputer	25.755.171.373	4.071.884.094	-	-	29.827.055.467
Perabot kantor	31.487.937.358	1.397.431.432	(1.200.000)	163.891.230	33.047.868.070
Perabot rumah dinas	85.197.319	-	-	-	85.197.319
Renovasi mang ruwa	8.073.325.186	1.564.202.947	-	26.714.910	9.564.243.042
Aset dalam renovasi	2.106.253.162	612.827.803	-	(288.443.000)	2.430.637.965
Jumlah	219.933.880.262	3.627.349.966	1.200.000	(65.806.680)	227.494.211.388
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	35.020.730.178	4.254.302.705	-	-	39.275.032.875
Kendaraan bermotor	4.296.019.243	1.104.249.102	-	-	5.402.238.345
Mesin kantor	6.822.270.488	797.026.410	-	-	7.619.295.898
Komputer	18.999.746.552	2.375.995.616	-	-	21.975.742.128
Perabot kantor	26.025.935.759	2.198.604.382	(1.200.000)	-	28.223.340.141
Perabot rumah dinas	53.345.186	6.889.000	-	-	70.234.186
Renovasi mang ruwa	4.056.253.321	1.394.408.353	-	-	5.980.661.675
Jumlah	85.828.380.879	12.721.444.568	1.200.000	-	108.346.545.248
Nilai Buku	123.307.867.583				119.147.866.140

16. ASET HAK GUNA

Pada pelaksanaan awal PSAK 73 untuk sewa operasi, hak untuk menggunakan aset sewa umumnya diukur pada jumlah kelebihan sewa dan tanpa bunga. Pada tanggal persetujuan, penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.

Berdasarkan data tersebut diatas maka implementasi PSAK 73 : sewa dapat dicatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Rekonstruksi dan komitmen sewa operasi dan liabilitas sewa, adalah sebagai berikut.

	2023	2022
A S E T		
Aset hak guna, bersih	9.061.496.374	2.694.984.963
LIABILITAS		
Liabilitas Sewa	6.320.894.262	1.626.175.086

Unsur Beban Amortisasi Sewa Gedung dan Beban pembiayaan Sewa Kendaraan telah dicatat dan dibebankan oleh Grup pada tahun buku 2023 dan 2022.

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. ASET TAK BERWUJUD

	2023	2022
Perangkat lunak (software)	12.541.818.409	10.491.782.161
Amortisasi perangkat lunak	(9.304.884.136)	(8.288.976.549)
Jumlah Aset Tak Berwujud	3.236.934.273	2.204.805.612

18. ASET LAIN-LAIN

	2023	2022
Dana pengelolaan perdagangan saham	3.518.937.364	3.054.119.018
Penyerahan dana klaim	2.000.000.000	2.000.000.000
Uang jaminan	1.358.780.381	670.896.897
Persediaan barang cetakan	1.512.834.109	1.444.552.320
Uang muka pembelian barang	1.004.047.380	104.185.000
Aset lainnya	888.100.121	1.114.572.670
Persediaan materi	369.353.993	473.829.586
Jumlah Aset Lain-lain	16.860.053.328	14.871.959.471

19. UTANG KLAIM

	2023		2022	
	1 - 60 hari	> 60 hari	Jumlah	Jumlah
Anaka	46.793.005.352	-	46.793.005.352	147.616.064.392
Kebakaran	1.670.860.833	-	1.670.860.833	17.400.888
Kendaraan bermotor	195.164.885	-	195.164.885	288.454.273
Rekayasa	16.250.000	-	16.250.000	22.300.125
Sertifikat penjaminan / Sundry bond	1.837.837.484	-	1.837.837.484	8.840.000
Kunepsalum	-	-	-	18.044.951
Jumlah Utang Klaim	56.513.106.324	-	56.513.106.324	147.965.077.646

Utang klaim merupakan kewajiban Perusahaan atas pemohonan klaim dari tertanggung yang sudah memenuhi syarat perjanjian. Proses pengajuan klaim dicatat dalam Laporan Klaim Sementara kemudian dilakukan verifikasi oleh bagian terkait, sehingga setelah lengkap akan menjadi Laporan Klaim Pasti dan masuk kedalam pemenuhan.

Grup juga melakukan pembayaran klaim kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan perjanjian penyelesaian klaim No.JRB.OSG.BAC.1740/2021 dan No.013/PERJ/ABAI/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang pembayarannya dilakukan di luar mekanisme (schedule) pengajuan dan pembayaran klaim pada umumnya tanpa menghilangkan hak subrogasi bagi Grup yang timbul atas klaim yang sudah dibayar selain klaim kematian (natural death).

20. UTANG REASURANSI

Akun ini merupakan kewajiban kepada reasuransi sehubungan dengan premi dan klaim reasuransi.

	2023		2022	
	1 - 60 hari	> 60 hari	Jumlah	Jumlah
FL Reinsurance	-	1.354.136.335	1.354.136.335	1,354,136,335
PT Simas Reinsurance Brokers	-	608.922.740	608.922.740	762,772,628
PT Reasuransi Nusantara Makmur	281.279.950	347,341,044	548,811,894	115,842,687
PT Asda Reinsurance Brokers Indonesia	2,241,430	435,258,718	437,500,148	508,294,051
PT Asuransi Binagriya Upakara	350,816,488	-	350,816,488	191,067,617
PT Reasuransi Maspak Indonesia	287,377,859	-	287,377,859	96,827,002
Lain-lain	7,556,799,909	802,227,214	8,462,027,123	73,158,437,086
Jumlah Utang Reasuransi	8,411,606,746	3,549,086,081	12,959,892,787	76,207,347,416

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lampiran
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak dan Zakat

	2023	2022
Pajak penghasilan pasal 21	10.342.035.892	7.353.698.951
Pajak penghasilan pasal 23	812.986.974	587.927.230
Pajak penghasilan pasal 26	912.440.076	961.087.353
Pajak penghasilan pasal 29	5.044.797.869	3.732.273.187
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	24.499.787	6.300.000
Pajak pertambahan nilai	-	48.830.000
Jumlah Utang Pajak	16.936.760.597	12.681.126.721
Utang Zakat	2.132.579.211	2.414.465.561
Jumlah Utang Pajak dan Zakat	19.069.339.808	15.095.592.282

b. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba rugi menurut pajak yang dihitung oleh Grup, adalah sebagai berikut :

	2023	2022
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian	126.418.489.036	108.534.553.350
Laba sebelum pajak Entitas Anak	(83.170.588.243)	(50.741.155.898)
Laba sebelum pajak Entitas Induk	43.247.900.793	47.793.398.452
Koreksi fiskal terdiri atas :		
Beda tetap :		
Olahraga dan rekreasi	172.836.504	2.801.871.848
Entertain tanpa nominasi	4.296.002.587	5.169.759.421
Sumbangan	951.335.328	4.320.282.983
Hasil reksa dana dan saham	(1.754.952.349)	(1.264.475.482)
Bunga obligasi dan surat utang negara	(24.563.010.219)	(16.423.775.883)
Jasa giro	(3.584.813.837)	(3.728.867.175)
Sewa	(695.758.719)	(453.000.000)
Bunga deposito	(29.883.883.647)	(24.762.437.880)
Jumlah Beda Tetap	(55.042.443.454)	(37.338.431.458)

PT ASURANSI BANGUN ASKREDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN - Lanjutan

b. Pajak Penghasilan Badan - Lanjutan

	2023	2022
Beda sementara :		
Liabilitas imbalan pascakerja	12.271.839.306	11.670.471.867
Cedangan premi yang belum merupakan pendapatan	4.880.984.167	(19.147.865.082)
Perbedaan penyusutan aset tetap antara komersial dan fiskal	481.489.173	1.052.140.899
Jumlah Beda Sementara	17.413.691.646	(6.425.252.516)
Takutan laba fiskal tahun berjalan	5.619.157.985	4.029.712.478
Pembulatan	5.619.158.000	4.029.712.000
Tarif PPh Pasal 17 sebagai berikut :		
22% x Rp 5.619.158.000	1.236.214.760	-
22% x Rp 4.029.712.000	-	886.536.840
Pajak Penghasilan Kiri		
Entitas Induk	1.236.214.760	886.536.840
Entitas Anak	13.390.960.440	11.094.553.140
Jumlah Pajak Penghasilan Kiri	14.627.175.200	11.981.089.780
Jumlah Pajak Penghasilan Kiri	14.627.175.200	11.981.089.780
Dikurangi kredit pajak:		
Entitas Induk		
Pajak penghasilan pasal 25	-	(880.350.437)
Subjumlah	-	(880.350.437)
Entitas Anak		
Pajak penghasilan pasal 25	(9.582.377.331)	(7.568.466.156)
Subjumlah	(9.582.377.331)	(7.568.466.156)
Pajak Penghasilan Badan (Lebih) Kurang Bayar		
Entitas Induk	1.236.214.760	206.186.203
Entitas Anak	3.808.583.109	3.526.086.984
Pajak Penghasilan Badan (Lebih) Kurang Bayar	5.044.797.869	3.732.273.187

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN - Lanjutan

b. Pajak Penghasilan Badan - Lanjutan

Kebijakan Tarif Pajak

Pada 30 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan PerPu No.1 Tahun 2020 sebagai kebijakan untuk melakukan stabilisasi keuangan negara dan kesehatan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari 25% pada 2019 menjadi 22% untuk 2020-2021 dan 20% untuk 2022. Namun, pada Oktober 2021, pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengubah tarif pajak penghasilan badan dari 20% kembali menjadi 22% untuk selanjutnya.

c. Penghasilan (Beban) Pajak Konsolidasi

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian	328.418.499.036	108.534.553.350
Laba sebelum pajak Entitas Anak	(83.170.589.243)	(80.741.156.898)
Pada tarif yang berlaku	<u>9.514.540.154</u>	<u>10.514.547.219</u>
Pengaruh pajak atas beban pajak yang tidak diperkenankan (penghasilan tidak kena pajak) :		
Entertaimen tanpa nominasi	38.024.031	616.411.829
Olahraga dan rekreasi	945.120.589	1.141.747.073
Sumbangan	209.293.992	950.462.258
Sewa	(386.089.517)	(278.164.806)
Hasil reksa dana dan saham	(5.403.852.248)	(4.273.230.608)
Jasa giro	(784.281.068)	(819.884.579)
Bunga obligasi dan surat utang negara	1153.068.918	(99.600.000)
Bunga deposito	(6.574.476.402)	(5.452.136.290)
Beban Pajak Entitas Induk	<u>(2.694.797.405)</u>	<u>2.300.092.298</u>
Laba (rugi) fiskal tahun berjalan Entitas anak	60.868.002.000	50.429.787.000
Pada tarif yang berlaku	13.390.960.440	11.094.553.140
Koreksi fiskal beda waktu	(2.389.843.970)	(2.938.466.006)
Pada tarif yang berlaku	(525.765.573)	(646.482.513)
Penghasilan Pajak Entitas Anak	<u>12.886.194.767</u>	<u>10.449.090.627</u>
Jumlah Beban Pajak	<u>10.270.397.362</u>	<u>12.748.182.925</u>
Beban pajak penghasilan kini		
Entitas Induk	(1.238.214.760)	(886.536.640)
Entitas Anak	(13.390.960.440)	(11.094.553.140)
Subjumlah	<u>(14.827.175.200)</u>	<u>(11.981.089.780)</u>

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN - Lanjutan

c. Penghasilan (Beban) Pajak Konsolidasi - Lanjutan

	2023	2022
Penghasilan pajak langgutan		
Entitas Induk	3.831.012.165	(1.413.656.658)
Entitas Anak	525.765.873	546.462.513
Subjumlah	4.356.777.838	(767.093.145)
Beban Pajak Periode Berjalan	(10.270.397.362)	(12.748.182.825)

d. Pajak Tangguhan

	2023		
	Saldo Awal, 1 Januari 2023	Dikurangkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir 31 Desember 2023
Entitas Induk			
Liabilitas imbalan pascakerja	6.864.887.462	2.699.800.247	72.184.729
Cadangan premi yang belum merupakan pendapatan	16.821.088.752	1.029.684.520	-
Penyesuaian aset tetap	4.648.032.933	101.627.398	-
Subjumlah	20.224.119.147	3.831.012.165	72.184.729
Entitas Anak			
Liabilitas imbalan pascakerja	991.526.871	382.576.202	14.170.437
Penyesuaian aset tetap	240.414.187	143.189.471	-
Subjumlah	1.231.941.058	525.765.873	(4.170.437)
Aset Pajak Tangguhan	21.456.060.205	4.356.777.838	88.014.288

	2022		
	Saldo awal, 1 Januari 2022	Dikurangkan (dibebankan) ke Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir 31 Desember 2022
Entitas Induk			
Liabilitas imbalan pascakerja	6.811.652.247	2.587.503.767	(514.058.662)
Cadangan premi yang belum merupakan pendapatan	21.033.619.080	(4.212.630.328)	-
Penyesuaian aset tetap	4.316.581.835	231.470.968	-
Subjumlah	22.161.733.262	(1.413.366.663)	(514.058.662)

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. PERPAJAKAN - Lanjutan

d. Pajak Tangguhan - Lanjutan

	2022			
	Saldo awal, 1 Januari 2022	Dikurangkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi	Dibebankan ke Ekuitas	Saldo Akhir 31 Desember 2022
Ekuitas Aneh				
Liabilitas akrual				
pascakorupsi	607.651.917	273.122.163	110.742.791	691.526.671
Penyusutan aset tetap	(132.826.163)	373.340.950	-	240.414.187
Subtotal	474.735.754	646.462.813	110.742.791	1.231.941.058
Aset Pajak Tangguhan	32.838.969.016	(767.093.050)	(463.318.761)	31.468.869.205

e. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Grup telah mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor : KET-11/PPWPJ/06/2016 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2016. Grup mendeklarasikan harta bersih yang berada di dalam negeri berupa Piutang Reasuransi sebesar Rp16.285.806.904 yang belum dilaporkan dalam SPT PPh tahun 2015, dengan uang lebaran (tax 2%) sebesar Rp365.718.138.

22. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2023	2022
Biaya jasa profesional	4.890.673.403	1.119.850.000
Penghargaan honor operasional	4.000.000.000	1.000.000.000
Biaya dalam <i>Administrative Service Only (ASO)</i>	3.567.588.309	1.608.887.389
Seragam	1.883.385.470	458.376.500
Asuransi	1.610.983.000	1.006.000.000
Biaya pemasaran	1.166.756.624	1.840.823.870
Biaya ongkos naik haji dan umroh	1.145.196.210	1.286.851.122
Sewa kendaraan	920.385.000	455.229.646
R rekreasi	750.000.000	-
Rapat kerja	671.920.949	-
Honorarium dan remunerasi tenaga teknis	413.334.899	25.588.783
Biaya pendidikan	310.693.896	5.070.000
Peningkatan mail server	244.096.906	-
Perangkat lunak	187.978.500	-
Askes, Aspek, YKP dan DPLK	147.959.285	147.959.285
Listrik dan service charge	96.082.560	289.479.788
Biaya lain-lain	1.818.852.643	2.838.012.332
Jumlah Biaya yang Masih Harus Dibayar	23.838.969.653	12.081.868.893

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rubrik, kecuali dinyatakan lain)

23. IMBALAN KERJA

Imbalan Karyawan Jangka Pendek

Liabilitas imbalan karyawan jangka pendek meliputi gaji, jasa produksi, insentif dan bonus yang masih harus dibayar untuk karyawan yang pada periode turung dari satu tahun.

	2023	2022
Biaya tentam dan jasa produksi (termasuk PPh pasal 21)	56.808.905.844	45.760.345.138
Biaya gaji, insentif dan bonus	35.929.253.804	24.770.200.322
Jumlah	92.538.159.648	70.530.545.460

Kewajiban Imbalan Pensiun dan Pascakerja Lainnya

Dana Pensiun Askrida (DPPK) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Bangun Askrida No. SK 02/DIR/1993 tanggal 10 April 1993 telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep-254/KM.17/1994 tanggal 12 September 1994 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 28 Oktober 1994. Peraturan Dana Pensiun tersebut telah diubah dengan peraturan baru yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Bangun Askrida No. SK 150/DIR/2007 tanggal 19 Desember 2007. Peraturan pengganti ini telah disahkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor Kep-206/KM.10/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Askrida. Dana Pensiun dikelola oleh pengurus yang terpisah, dimana bagi seluruh karyawan yang telah memenuhi persyaratan masa kerja tertentu berhak memperoleh imbalan pasti pada saat pensiun, cacat atau meninggal dunia.

Grup memberikan penghargaan kepada karyawan tetapnya yang telah mencapai usia pensiun normal sesuai dengan kebijakan Perseroan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11 Tahun 2020. Grup telah membuat estimasi imbalan kerja jangka pendek dan pendanaan program imbalan kerja jangka panjang, serta penghitungan masa kerja melalui Dana Pensiun Pembiay Kerja Askrida.

Rincian kewajiban imbalan kerja di laporan posisi keuangan, adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Imbalan pensiun	8.582.012.562	20.969.252.967
Imbalan pascakerja lainnya	40.886.317.444	28.768.659.075
Jumlah	49.478.329.996	49.727.912.042

Rincian beban imbalan karyawan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Imbalan pensiun	15.201.137.180	25.502.251.843
Imbalan pascakerja lainnya	14.010.601.754	12.811.936.084
Jumlah	29.211.738.934	38.314.187.927

PT ASURANSI BANGUN ASKORIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. IMBALAN KERJA - Lanjutan

Kewajiban Imbalan Pensiun dan Pascakerja Lainnya - Lanjutan

Rincian pengukuran kembali atas kewajiban imbalan karyawan adalah sebagai berikut

	2023	2022
Imbalan pascakerja lainnya	(328.112.373)	2.555.325.402
Jumlah	(328.112.373)	2.358.325.402

Imbalan Pensiun

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan atributur sebagai berikut

	2023	2022
Nilai kini kewajiban yang didanai	175.636.925.225	161.536.555.620
Nilai wajar dari aset program	(167.244.912.673)	(140.967.392.653)
Bersih	8.592.012.552	20.569.252.967

Mulasi kewajiban imbalan pensiun selama tahun berjalan adalah:

	Nilai Kini Kewajiban	Nilai Wajar Aset Program	Jumlah	Surplus Pendanaan Pada Aset Program Yang Tidak Didanai	Jumlah
Saldo Awal					
1 Januari 2022	161.536.555.620	(140.967.392.653)	20.569.252.967	-	20.569.252.967
Bayu jasa kini	13.181.628.540	-	13.181.628.540	-	13.181.628.540
Beban (pendapatan) bunga	10.705.293.105	(8.895.782.465)	2.019.510.640	-	2.019.510.640
	23.886.848.646	(8.895.782.465)	16.291.137.180	-	16.291.137.180
Pengukuran kembali					
- Perubahan asumsi keuangan	16.172.062.744	650.580.894	17.001.603.724	-	17.001.603.724
- Perubahan program	8.390.118.678	-	8.390.118.678	-	8.390.118.678
- Perubahan lainnya	(2.858.568.136)	-	(2.858.568.136)	-	(2.858.568.136)
	21.903.622.687	650.580.894	22.763.213.061	-	22.763.213.061
Kumulatif					
- Pembayaran kerja	(25.150.274.186)	(26.267.094.838)	(49.407.300.028)	-	(49.407.300.028)
- Investasi	-	(893.238.348)	(893.238.348)	-	(893.238.348)
Pembayaran dan aset program					
- Pembayaran manfaat	(6.738.897.938)	0.698.855.653	(41.042.285)	-	(41.042.285)
	(71.890.172.127)	(18.451.438.535)	(50.341.590.882)	-	(50.341.590.882)
Saldo Akhir					
31 Desember 2022	175.636.925.225	(167.244.912.673)	8.592.012.552	-	8.592.012.552

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23 IMBALAN KERJA - Lanjutan

Kewajiban Imbalan Pensiun dan Pascakerja Lainnya - Lanjutan

Imbalan Pensiun - Lanjutan

Mulai kewajiban imbalan pensiun selama tahun berjalan adalah: - Lanjutan

	<u>Nilai Kini Kewajiban</u>	<u>Nilai Tinggi Aset Program</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Surplus Pensiunan Pada Aset Program Yang Tidak Ditakut</u>	<u>Jumlah</u>
Saldo Awal					
1 Januari 2022	156.886.229.477	(147.484.482.287)	38.860.825.394	-	38.860.825.394
Ditakut oleh kami	9.367.426.295	-	9.367.426.295	-	9.367.426.295
Setoran/pendapatan bunga	23.250.867.884	(7.118.142.540)	16.134.825.344	-	16.134.825.344
	<u>32.618.394.182</u>	<u>(7.118.142.540)</u>	<u>25.502.251.643</u>	<u>-</u>	<u>25.502.251.643</u>
Pengukuran kembali:					
- (Galeri rugi dan perubahan sementara keuangan)	(7.787.628.427)	4.016.834.000	(3.770.992.427)	-	(3.770.992.427)
- Perubahan program	-	2.983.091.249	2.983.091.249	-	2.983.091.249
	<u>(7.787.628.427)</u>	<u>7.000.925.249</u>	<u>(777.901.178)</u>	<u>-</u>	<u>(777.901.178)</u>
Kembali					
- Perbaikan kerja	(834.555.036)	(28.644.305.613)	(29.478.860.649)	-	(29.478.860.649)
- Positif	-	1990.136.122	1990.136.122	-	(990.336.122)
Pembayaran dan hasil program:					
- Pembayaran manfaat	(18.644.877.777)	6.763.448.850	(11.876.428.117)	-	(11.876.428.117)
	<u>(18.479.432.813)</u>	<u>(22.866.183.075)</u>	<u>(42.345.825.888)</u>	<u>-</u>	<u>(42.345.825.888)</u>
Saldo Akhir					
31 Desember 2022	<u>161.924.858.828</u>	<u>(148.887.302.653)</u>	<u>28.969.252.967</u>	<u>-</u>	<u>28.969.252.967</u>

Jumlah modal pensiun yang disinkronkan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban Umum - Pensiun	16.201.137.180	25.502.251.643

Nilai aktual aset program pada tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp8.230.071.846 dan Rp5.070.061.11

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. IMBALAN KERJA - Lanjutan

Kewajiban Imbalan Pensiun dan Pansokerja Lainnya - Lanjutan

Imbalan Pensiun - Lanjutan

Aset program terdiri dari:

	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	Nilai Wajar	%	Nilai Wajar	%
Instrumen utang	98.898.910.873	59,01	57.952.897.830	41,11
Instrumen ekuitas	25.425.855.951	15,20	38.941.937.667	27,82
Properti	12.719.398.772	7,61	12.719.386.772	9,02
Reksa Dana	6.253.039.514	3,74	6.223.270.813	4,41
Lain-lain	24.147.809.763	14,44	25.128.796.571	17,83
Jumlah	167.244.812.873	100,00	140.967.302.653	100,00

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset program Grup untuk program imbalan pensiun diinvestasikan di saham dan obligasi Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia trading-masing sebesar Rp98.912.083.173 dan Rp58.177.537.830.

Aset program Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp105.185.122.887 dan Rp64.400.817.643 merupakan investasi yang ditempatkan pada saham, obligasi negara, obligasi perusahaan dan reksa dana yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Gedung dan aset program per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp21.006.783.451 dan Rp38.217.291.697 merupakan investasi yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, seperti tabungan dan deposito berjangka.

Asumsi-asumsi untuk Dana Pensiun Askrida pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang digunakan dalam perhitungan aktuaria oleh aktuaris Independen Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Ringini & Zulfahmi dalam laporannya No.217/PAZ-DPA/II/2024 tanggal 10 Maret 2024 dan No. 243/PAZ-DPA/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, untuk menentukan kewajiban imbalan pensiun karyawan per 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Tingkat bunga / diskonto	7,5% per tahun	6% per tahun
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	6% per tahun	6% per tahun
Tingkat kematian	Tabel Mortalita GAA-1971	Tabel Mortalita GAA-1971
Usia pensiun normal	58 tahun untuk pegawai	58 tahun untuk pegawai
Tingkat cacatan	10% dari GAA-1971	10% dari GAA-1971
Tingkat pengunduran diri	1% per tahun dari usia 48 tahun s/d usia 55 tahun pada usia 48 tahun	5% per tahun usia 20 tahun dan menurun proporsional sd 1% pada usia 48 tahun
Tingkat pensiun dipercepat	1% per tahun usia 46 s/d 55 tahun	1% per tahun usia 46 s/d 55 tahun
Biaya operasional	30% dari lunas nominal	30% dari lunas nominal

Dampak perubahan 1% tingkat diskonto terhadap Beban Imbalan pensiun adalah sebagai berikut

Asumsi dasar nilai kini kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp19.468.193.153 dan Rp11.410.046.400

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Ditajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. IMBALAN KERJA - Lanjutan

Kewajiban Imbalan Pendek dan Pascakerja Lainnya - Lanjutan

Imbalan Pekerja - Lanjutan

		Perubahan	Dampak Terhadap
		Asumsi	Secara Keseluruhan
	31 Desember 2023		
Tingkat diskonto		+1%	25.468.207.000
		-1%	29.468.843.834
Tingkat kenaikan gaji		+1%	29.468.843.834
		-1%	25.441.825.109
	31 Desember 2022		Dampak Terhadap
		Asumsi	Secara Keseluruhan
Tingkat diskonto		+1%	18.197.361.681
		-1%	20.913.879.717
Tingkat kenaikan gaji		+1%	20.931.184.408
		-1%	18.160.684.503

Imbalan Pascakerja Lainnya

Kewajiban pensiun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja" oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaris Tubagus Syahrial & Arman Nengasan, seperti yang disajikan pada laporan jasa aktuaris Nomor 154/PPKKA-TBAI-2024 tanggal 5 Januari 2024 dan Nomor 124/PPKKA-TBAI-2023 tanggal 03 Januari 2023.

a. Pengukuran kembali Liabilitas (Aset) dalam Penghasilan Komprehensif Utan

Penghasilan Komprehensif Lain	2023	2022
Saldo Awal, 1 Januari	623.240.301	(1.413.026.549)
Kerugian / (keuntungan) aktuarial	(328.112.373)	2.555.325.402
Pengaruh pajak penghasilan	72.184.722	(514.059.682)
Saldo Akhir, 31 Desember	367.312.650	828.239.171

b. Beban (pendapatan) imbalan pascakerja lainnya yang diakui di laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Imbalan Pascakerja sesuai PKB Perusahaan		
Biaya jasa kini PKWT	6.855.816.169	10.105.011.076
Biaya jasa kini PKWT	167.103.286	-
Bunga neto atas liabilitas (aset)	1.539.967.017	1.455.416.344
Biaya jasa lain	155.417.360	(882.988.761)
Jumlah	10.712.135.631	10.677.438.659
(Keuntungan) kerugian aktuarial (OCI)	(328.112.373)	2.555.325.402

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. IMBALAN KERJA - Lanjutan

Kewajiban Imbalan Pensiun dan Pasca Kerja Lainnya - Lanjutan

b. Seban (pendapatan) imbalan pasca kerja lainnya yang diakui di laporan laba rugi adalah sebagai berikut: - Lanjutan

	2023	2022
Penghargaan Masa Kerja		
Biaya jasa kini	1.226.395.434	939.288.454
Biaya bunga	665.335.598	450.267.905
Amortisasi (keuntungan) kerugian aktuarial	1.506.914.691	848.841.166
Jumlah	3.298.645.723	2.238.497.425
Uang kompensasi	848.288.320	284.615.109

c. Kewajiban / (kekayaan) imbalan pasca kerja lainnya di neraca adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Imbalan Pascakerja sesuai PKB Perusahaan		
Nilai kewajiban kini pada awal periode	20.592.736.352	13.881.777.136
Biaya jasa kini	156.417.360	(882.988.761)
Biaya bunga	1.539.967.017	1.453.418.344
Biaya jasa kini	8.656.616.189	10.105.011.075
Biaya jasa kini PKWT	161.165.285	-
Pembayaran manfaat	(2.346.539.189)	(1.712.530.352)
(Keuntungan) / kerugian aktuarial pada kewajiban	309.155.840	(2.051.949.081)

Kewajiban Pada Akhir Periode	29.287.508.824	20.592.736.352

	2023	2022
Penghargaan Masa Kerja		
Nilai kewajiban kini pada awal periode	7.881.307.614	6.938.208.135
Biaya jasa kini	-	-
Biaya bunga	565.335.598	450.267.905
Biaya jasa kini	1.226.395.434	939.288.454
Pembayaran manfaat	(409.431.237)	(1.293.398.548)
Pengukuran kembali liability (aset)	189.845.689	1.240.653.697
(Keuntungan) / kerugian aktuarial pada kewajiban	1.336.989.322	(191.922.511)

Kewajiban Pada Akhir Periode	10.770.522.300	7.881.307.614

Uang kompensasi	848.288.320	284.615.109

d. Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja lainnya di neraca adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo Awal, 1 Januari		
URUK 13/2003 - DFPK	29.267.508.824	20.592.736.352
Penghargaan masa kerja	10.770.522.300	7.881.307.614
Uang Kompensasi	848.288.320	284.615.109
Saldo Akhir, 31 Desember	40.886.317.444	28.758.659.075

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Ditajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. UTANG LAIN-LAIN

	2023	2022
Premi diterima di muka (liplan premi)	83.112.239.500	139.613.701.451
Utang bagi hasil dan alokasi surplus	68.789.726.840	20.048.742.102
Utang adjuster	2.842.887.694	2.870.974.853
Utang premi reasuransi diterima	5.288.834.950	1.689.124.081
Pendapatan sewa di muka	782.332.600	-
Utang dalam perjalanan	424.888.203	363.647.758
Debtors Administrative Services Only (ASO)	322.082.063	289.177.868
Dividen tunai	248.545.990	248.585.980
Titipan dari kebijakan	432.170.688	127.309.450
Piutang ketiga	5.000.000	5.000.000
Jumlah Utang Lain-lain	153.264.515.466	181.134.243.582

Premi diterima di muka (liplan premi) merupakan premi yang terdapat dalam rekening koran bank sebagai akibat pendebitan langsung oleh bank atas kewajiban penutupan etasurasi oleh nasabah sebagai salah satu penyerahan dalam lizend yang diberikan bank tersebut. Perseroan membuat laporan produksi premi/polis dan melakukan rekonsiliasi dengan premi diterima dimuka setelah menerima dollar sebagai pertutupan asuransi dan bank yang bersangkutan pada bulan berikutnya.

25. MODAL SAHAM DAN TITIPAH MODAL DISETOR (SAHAM)

a. Modal Saham

Berdasarkan Akta No. 47 tanggal 27 April 2017 oleh Ashya Ratem, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011442-AH.01.02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Asuransi Bangun Askrida yang menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal yaitu peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp300.000.000.000 yang terbagi atas 30.000 lembar saham masing-masing bernilai Rp10.000.000 menjadi Rp400.000.000.000 yang terbagi atas 40.000 lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp10.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, modal Grup yang telah disetor dan ditempatkan penuh masing-masing sebesar Rp318.950.000.000 dan Rp212.530.000.000.

Komposisi pemegang saham per 31 Desember 2023 dan 2022, berdasarkan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 31 tanggal 27 September 2023, oleh Ashya Ratem, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0124323 tanggal 29 September 2023 dan Akta Notaris Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 64 tanggal 25 April 2022, oleh Ashya Ratem, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	2023		
	Jumlah Saham Lembar	Nilai Nominal Rp	Persentase %
BPD, Dana Pensiun dan YKP	19.585	196.850.000.000	61,405
Pemerintah Provinsi	12.310	123.100.000.000	38,595
Jumlah Modal Saham	31.896	318.950.000.000	100,00

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. MODAL SAHAM DAN TITIPAN MODAL DISETOR (SAHAM) - Lanjutan

a. Modal Saham - Lanjutan

Pemegang Saham	2022		
	Jumlah Saham Lembar	Nilai Nominal Rp	Persentase %
BPD, Dana Pensiun dan YKP Pemerintah Provinsi	18.943 12.310	189.430.000.000 123.100.000.000	80,812 59,388
Jumlah Modal Saham	31.253	312.530.000.000	100,00

Susunan pemegang saham dan jumlah modal saham per 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

BPD, DANA PENSIUN DAN YKP

No.	Pemegang Saham	2023		2022	
		Jumlah Saham Lembar	Persentase %	Nilai Nominal Rp	Nilai Nominal Rp
1	Dana Pensiun PT BPD Jawa Barat Banten	4.070	12,781	40.700.000.000	40.700.000.000
2	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	3.014	9,450	30.140.000.000	30.140.000.000
3	Dana Pensiun PT BPD Sumatera Barat	2.477	7,765	24.770.000.000	24.770.000.000
4	PT Bank DKI	1.723	5,402	17.230.000.000	17.230.000.000
5	Dana Pensiun PT BPD Kalimantan Barat	1.407	4,411	14.070.000.000	10.550.000.000
6	Dana Pensiun Pegawai PT BPD Nusa Tenggara Timur	903	2,831	9.030.000.000	9.030.000.000
7	Dana Pensiun Pegawai PT BPD Sumatera Utara	829	2,589	8.290.000.000	8.290.000.000
8	Dana Pensiun BPD Bali	660	2,069	6.600.000.000	6.600.000.000
9	Dana Pensiun PT BPD Riau	603	1,891	6.030.000.000	6.030.000.000
10	Dana Pensiun PT BPD Jawa Tengah	462	1,417	4.520.000.000	4.520.000.000
11	Dana Pensiun Bank Sulawesi Soleten dan Sulawesi Barat	608	1,891	6.030.000.000	4.520.000.000
12	Dana Pensiun PT BPD Maluku	452	1,417	4.520.000.000	4.520.000.000
13	Dana Pensiun PT BPD Sulawesi Tenggara	301	0,944	3.010.000.000	3.010.000.000
14	Dana Pensiun Bank BPD Sulawesi Utara Gorontalo	307	0,944	3.010.000.000	3.010.000.000
15	PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	246	0,771	2.460.000.000	2.460.000.000
16	Dana Pensiun PT BPD Kalimantan Selatan	980	1,529	3.600.000.000	2.700.000.000
17	Dana Pensiun PT BPD Jambi	256	0,809	2.580.000.000	2.580.000.000
18	Dana Pensiun PT BPD Nusa Tenggara Barat	193	0,605	1.930.000.000	1.930.000.000
	Selao yang dipendatkan	18.852	59	188.520.000.000	182.590.000.000

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Dijajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. MODAL SAHAM DAN TITIPAN MODAL DISEFOR (SAHAM) - Lanjutan

a. Modal Saham - Lanjutan

Susunan pemegang saham dan jumlah modal saham per 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut: - Lanjutan

BPD, DANA PEMERINTAH DAH YKP - Lanjutan

No.	Pemegang Saham	2023		2022	
		Jumlah Saham Lembar	Persentase %	Nilai Nominal Rp	Nilai Nominal Rp
	Saldo pendataan	19.862	89,107	169.520.000.000	182.590.000.000
19.	Dana Pensiun Pegawai PT BPD Jawa Timur	177	0,555	1.770.000.000	1.770.000.000
20.	Dana Pensiun PT BPD Lampung	172	0,539	1.720.000.000	1.200.000.000
21.	Yayasan Pegawai PT BPD Jawa Timur	100	0,323	1.030.000.000	1.030.000.000
22.	Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	51	0,160	510.000.000	510.000.000
23.	Dana Pensiun PT BPD Kalimantan Tengah	47	0,147	470.000.000	470.000.000
24.	Dana Pensiun PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	50	0,163	520.000.000	520.000.000
25.	Dana Pensiun PT BPD Bengkulu	44	0,138	440.000.000	440.000.000
26.	PT Bank Aceh Syariah	33	0,104	330.000.000	330.000.000
27.	Yayasan Kesejahteraan dan Pensiunan PT BPD Papua	30	0,094	300.000.000	300.000.000
28.	Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT BPD Sulawesi Tengah	24	0,075	240.000.000	140.000.000
	Subjumlah	19.585	81,406	195.850.000.000	189.430.000.000

PEMERINTAH PROVINSI

No.	Pemegang Saham	2023		2022	
		Jumlah Saham Lembar	Persentase %	Nilai Nominal Rp	Nilai Nominal Rp
1.	Bumihara Barat	4.882	15,306	48.820.000.000	48.820.000.000
2.	Jawa Tengah	1.896	6,258	19.080.000.000	19.080.000.000
3.	Kalimantan Timur	1.481	4,581	14.610.000.000	14.610.000.000
4.	DKI Jakarta	1.306	4,101	13.080.000.000	13.080.000.000
5.	Jawa Timur	942	2,983	9.420.000.000	9.420.000.000
6.	Kalimantan Barat	258	0,809	2.580.000.000	2.580.000.000
7.	Sulawesi Selatan	193	0,605	1.930.000.000	1.930.000.000
8.	Nusa Tenggara Timur	160	0,502	1.600.000.000	1.600.000.000
9.	Jawa Barat	131	0,411	1.310.000.000	1.310.000.000
10.	Sulawesi Tengah	126	0,385	1.260.000.000	1.260.000.000
	Saldo yang dipandatkan	11.457	36	114.570.000.000	114.570.000.000

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. MODAL SAHAM DAN TITIPAN MODAL DISETOR (SAHAM) - Lanjutan

a. Modal Saham - Lanjutan

Susunan pemegang saham dan jumlah modal saham per 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut - Lanjut:

No.	Pemegang Saham	2023		2022	
		Jumlah Saham Lembar	Persentase %	Nilai Nominal Rp	Nilai Nominal Rp
	Saldo pada tahun	11,457	35,921	114.570.000.000	114.570.000.000
11.	Riau	125	0,392	1.250.000.000	1.250.000.000
12.	Jambi	119	0,373	1.190.000.000	1.190.000.000
13.	DI Yogyakarta	119	0,373	1.190.000.000	1.190.000.000
14.	Bali	115	0,381	1.150.000.000	1.150.000.000
15.	Kalimantan Selatan	93	0,292	930.000.000	930.000.000
16.	Sumatera Selatan	93	0,198	630.000.000	630.000.000
17.	Sulawesi Utara	67	0,179	570.000.000	570.000.000
18.	Lampung	60	0,157	500.000.000	500.000.000
19.	Sumatera Utara	45	0,141	450.000.000	450.000.000
20.	Bengkulu	33	0,109	330.000.000	330.000.000
21.	Musa Tenggara Barat	20	0,083	200.000.000	200.000.000
22.	Sulawesi Tenggara	12	0,038	120.000.000	120.000.000
23.	Papua	2	0,008	20.000.000	20.000.000
	Subjumlah	12,310	39	123.100.000.000	123.100.000.000
	Jumlah Modal Saham	31,895	100,00	318.950.000.000	312.530.000.000

b. Titipan Modal Disetor (Saham)

Pada tahun 2023 dan 2022 Grup mendapat penambahan modal disetor sebanyak 577 dan 642 lembar dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp5.770.000.000 dan Rp6.420.000.000 dari pemegang saham Pemerintah Provinsi, Dana Pensiun dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai. Namun penambahan modal disetor tersebut belum dilakukan oleh Nasabah, sehingga penambahan modal tersebut dicatat sebagai titipan modal disetor. Susunan penambahan modal disetor per 31 Desember 2023 dan 2022 yang dicatat sebagai titipan modal disetor, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	2023		2022	
	Jumlah Saham Lembar	Nilai Nominal Rp	Jumlah Saham Lembar	Nilai Nominal Rp
Dana Pensiun dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai Pemerintah Provinsi	570	5.700.000.000	642	6.420.000.000
	7	70.000.000	—	—
Jumlah Titipan Modal Disetor	577	5.770.000.000	642	6.420.000.000

PT ASURANSI BANGUH ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disejajarkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. MODAL SAHAM DAN TITIPAN MODAL DISETOR (SAHAM) - Lanjutan

b. Titipan Modal Disetor (Saham) - Lanjutan

Rincian tambahan modal disetor dari berbagai saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

DANA PENSUN DAN YAYASAN KESEJAHTERAAN PECAHAWA

Pemegang Saham	2023		2022	
	Titipan/ Tambahan Modal Disetor	Nilai Nominal Tambahan Modal Saham	Titipan/ Tambahan Modal Disetor	Nilai Nominal Tambahan Modal Saham
	Lembar	Rp	Lembar	Rp
Dana Pensiun PT BPD				
Jawa Tengah	181	1.510.000.000	—	—
Dapen PT BPD Maluku	159	1.510.000.000	—	—
Dana Pensiun BPD				
Sulawesi Utara Gorontalo	100	1.000.000.000	—	—
Dapen BPD Jambi	86	860.000.000	—	—
Dana Pensiun PT BPD				
Sulawesi Tenggara	50	500.000.000	—	—
Dapen PT BPD Daerah				
Istimewa Yogyakarta	17	170.000.000	—	—
Dapen PT BPD Bengkulu	15	150.000.000	—	—
Dana Pensiun				
PT BPD Kalimantan Barat	—	—	352	3.520.000.000
Dana Pensiun				
PT BPD Sulawesi Selatan	—	—	151	1.510.000.000
dan Sulawesi Barat				
Dana Pensiun PT BPD	—	—		—
Kalimantan Selatan	—	—	90	900.000.000
Dana Pensiun				
PT BPD Lampung	—	—	43	430.000.000
Yayasan Pegawai				
PT BPD Sulawesi Tengah	—	—	9	90.000.000
Jumlah Titipan Modal Saham	570	5.700.000.000	642	6.420.000.000

PEMERINTAH PROVINSI

Pemegang Saham	2023		2022	
	Titipan/ Tambahan Modal Disetor	Nilai Nominal Tambahan Modal Saham	Titipan/ Tambahan Modal Disetor	Nilai Nominal Tambahan Modal Saham
	Lembar	Rp	Lembar	Rp
Nusa Tenggara Barat	7	70.000.000	—	—
Jumlah Titipan Modal Saham	7	70.000.000	—	—
Jumlah Titipan Modal Disetor	577	5.770.000.000	642	6.420.000.000

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

Akuan ini merupakan bagian kepentingan non pengendali atas aset neto entitas anak yang di konsolidasi, yaitu:

	2023	2022
Saldo Awal, 1 Januari	16.366.506.646	1.374.669.629
Labo tahun berjalan	3.069.706.698	2.768.116.645
Penghasilan komprehensif lain	28.654.985	(148.416.167)
Tambahan modal disetor	-	10.000.000.000
Agio saham	-	2.500.000.000
Yayasan Kesejahteraan Pegawai	(55.322.373)	-
Dividen	(1.856.671.187)	(125.865.461)
Saldo Akhir, 31 Desember	18.544.984.767	18.300.500.646

27. CADANGAN KHUSUS DAN SALDO LABA

a. Cadangan Khusus

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 Mei 2011 yang dinyatakan dalam akta notaris nomor 58 tanggal 16 Mei 2011, oleh Karyono, SH notaris di Jakarta, telah diputuskan bahwa saham milik Pemerintah Provinsi Timor Timur dan saham milik Dana Pembiayaan Bank Pembangunan Daerah Timor Timur, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang terdiri dari:

	Jumlah Saham	2023	2022
	Lembar	Nominal	Nominal
Dana Pembiayaan BPB Timor Timur	9	90.000.000	90.000.000
Pemerintah Provinsi Timor Timur	2	20.000.000	20.000.000
Jumlah Cadangan Khusus	11	110.000.000	110.000.000

b. Saldo Laba

Cadangan umum dan wajib dibentuk Grup dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 11/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007 pasal 101), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

• Sudah Ditentukan Penggunaannya

Cadangan Umum	2023	2022
Saldo awal	568.356.000.449	545.921.753.203
Penambahan dan laba tahun berjalan	35.347.695.676	22.434.247.246
Saldo Akhir, 31 Desember	603.703.696.125	568.356.000.449

PY ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. CADANGAN KHUSUS DAN SALDO LABA - Lanjutan)

b. Saldo Laba - Lanjutan

*** Belum Ditentukan Penggunaannya**

	2023	2022
Saldo Awal, 1 Januari	93.020.251.779	72.368.538.504
Dividen tunai	(55.872.151.087)	(48.488.921.468)
Pembentukan cadangan umum	(35.347.695.876)	(22.434.247.248)
Yayasan Kesejahteraan Pegawai Askrida	(1.880.405.036)	(1.447.370.790)
Labanya bersih	112.281.304.878	93.020.251.779
Saldo Akhir, 31 Desember	112.281.304.878	93.020.251.779

28. PREMI BRUTO

	2023	2022
Aneka	8.467.147.667.283	5.821.670.479.030
Kebakaran	130.991.892.909	105.787.583.169
Pengangkutan barang	45.873.358.876	44.381.915.193
Kendaraan bermotor	42.788.028.938	39.378.739.478
Sertifikat penjaminan / Surety bond	15.823.676.589	13.223.072.730
Konsorsium	3.777.827.671	11.482.688.874
Rekayasa	15.833.634.233	8.276.002.061
Jumlah Premi Bruto	8.721.839.296.811	6.142.184.569.835

29. PREMI REASURANSI

	2023	2022
Aneka	635.687.882.420	785.572.837.898
Kebakaran	44.381.826.954	23.284.821.188
Konsorsium	2.308.392.589	11.509.714.802
Pengangkutan barang	11.175.181.137	9.842.739.471
Sertifikat penjaminan / Surety bond	7.138.374.522	5.708.705.941
Rekayasa	8.554.888.588	2.298.700.333
Kendaraan bermotor	2.804.757.126	1.842.259.741
Jumlah Premi Reasuransi	712.362.864.646	848.140.779.183

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. BEBAN KLAIM BRUTO

	2023	2022
Aneka	3.921.970.824.391	3.595.037.028.000
Kebakaran	14.118.981.852	18.302.529.344
Kendaraan bermotor	7.928.268.911	5.808.658.897
Sertifikat pengaminan / <i>Surety bond</i>	730.108.571	3.885.168.814
Rakayasa	2.121.341.785	982.752.075
Pengangkutan barang	241.467.135	256.818.767
Konsorsium	240.357.394	185.536.178
Jumlah Beban Klaim Bruto	3.947.351.231.839	3.622.458.692.773

31. BEBAN KLAIM REASURANSI

	2023	2022
Aneka	593.945.378.057	492.603.487.026
Kebakaran	9.913.255.179	5.406.957.293
Sertifikat pengaminan / <i>Surety bond</i>	381.124.947	2.482.580.234
Kendaraan bermotor	389.741.716	275.243.406
Pengangkutan barang	118.878.495	71.414.934
Rakayasa	897.177.005	42.542.436
Konsorsium	-	18.014.961
Jumlah Beban Klaim Reasuransi	605.645.568.399	580.900.260.299

32. PENDAPATAN (BEBAN) KOMISI - BERSIH

		2023	
Jenis Bisnis	Beban Komisi	Pendapatan Komisi	Beban (Pendapatan) Komisi, Bersih
Aneka	1.241.488.404.902	158.477.747.172	1.083.010.657.730
Kebakaran	18.918.189.841	12.750.967.617	6.165.222.024
Kendaraan bermotor	9.218.327.814	522.328.871	8.696.000.943
Pengangkutan barang	9.250.717.911	2.801.844.232	6.448.873.679
Sertifikat pengaminan / <i>Surety bond</i>	3.899.561.337	2.469.808.211	1.399.753.125
Rakayasa	3.012.726.561	2.455.770.777	556.955.784
Konsorsium	828.841.177	653.113.151	275.528.025
Jumlah Beban Komisi, Bersih	1.285.714.569.143	180.181.377.831	1.106.593.191.312

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PENDAPATAN (BEBAN) KOMISI - BERSIH - Lanjutan

Jenis Bisnis	Beban Komisi	2022	
		Pendapatan Komisi	Beban (Pendapatan) Komisi, Bersih
Aneka	1.276.325.857.018	96.878.279.322	1.179.647.577.694
Kendaraan bermotor	8.574.984.076	340.231.942	8.234.752.134
Pengangkutan barang	9.115.831.748	2.419.508.155	6.702.123.591
Kebakaran	15.128.185.848	5.389.052.244	9.759.103.702
Sertifikat penjaminan / Surety bond	4.612.519.611	1.896.594.903	2.515.924.708
Rakayasa	1.519.894.943	355.621.973	1.184.272.970
Konsorsium	828.035.910	2.875.158.859	(2.047.120.949)
Jumlah Beban Komisi, Bersih	1.316.005.069.248	110.028.455.398	1.205.976.613.850

33. HASIL INVESTASI

	2023	2022
Bunga deposito dan hasil hasil	46.443.240.343	32.981.079.456
Bunga obligasi dan surat utang negara	37.758.352.275	28.818.049.866
Kenaikan (penurunan) nilai aset bersih reksadana	94.445.565	229.709.556
Hasil sewa bersih (Askrida Tower dan Rukan STC)	1.068.181.614	1.338.829.515
Laba (rugi) penilaian / pelepasan aset keuangan	2.466.710.990	(378.129.017)
Hasil investasi lain-lain	30.052.624	31.703.153
Jumlah	87.881.884.411	63.019.233.849
Pengaruh Pajak Penghasilan dari Hasil Investasi	15,924,980,518	11,595,809,770
Jumlah Hasil Investasi	103.786,864,929	74.615.043.319

34. BEBAN USAHA

	2023	2022
Beban pegawai	336.687.689.016	313.022.662.531
Beban tantiem dan jasa produksi	56.889.905.844	45.760.345.138
Beban pemasaran	47.414.232.107	64.517.665.274
Beban administrasi perkantoran	24.805.958.389	25.961.799.722
Beban transportasi dan kendaraan	21.317.224.899	19.866.869.989
Beban penyusutan	15.019.014.202	14.575.088.983
Beban konsultan	12.989.671.469	7.359.851.215
Beban perjalanan dinas	12.003.019.882	11.138.728.176
Beban umum lainnya	8.386.960.996	10.414.989,518
Saldo yang dipindahkan	535.234.677.893	511.418.030,542

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. BEBAN USAHA - Lanjutan

	2023	2022
Saldo pindahan	535.234.677.893	511.418.000,542
Beban komunikasi	7.840.724.482	7.672.025.982
Beban pendidikan dan latihan	7.230.052.482	5.528.788.157
Beban iuran keanggotaan	3.015.031.137	2.367.681.864
Beban rabat umum pemegang saham	2.820.392.984	2.288.415.277
Beban rapat kerja	2.495.808.252	1.157.511.860
Beban komputer	1.776.584.388	1.023.330.804
Beban amortisasi perangkat lunak (software)	1.017.907.587	1.179.473.451
Sumbangan sosial	547.768.025	1.611.342.400
Retribusi kebersihan dan keamanan	143.796.237	126.828.900
Beban penanggulangan Covid-19	-	3.524.777.277
Beban umum lain-lain	3.841.135.261	3.728.579.571
Jumlah Beban Usaha	566.052.858.708	541.536.756.185

35. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	2023	2022
Rengganghan biaya polis	4.992.744.710	5.241.108.987
Jasa giro	4.294.377.110	4.496.625.224
Penggantian biaya material	1.045.532.984	1.050.892.953
Labai (rugit) pelepasan aset tetap	124.815.036	449.999
Beban administrasi bank	(1.388.127.167)	(1.066.360.264)
Labai (rugit) selisih kurs non investasi dan selisih pembayaran	(7.401.854.588)	(1.939.006.136)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	(10.075.005.086)	(10.980.711.330)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain	(6.408.518.981)	(3.196.999.567)

36. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Di dalam menjalankan operasional per 31 Desember 2023 dan 2022, dalam menjalankan bisnisnya secara reguler, telah melakukan transaksi dengan pihak berelasi seperti yang dijelaskan di bawah ini.

a. Sifat Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat dari Transaksi
PT Asuransi Askrida Syariah	Entitas anak Pemegang saham pengendali	Pendapatan sewa, Utang lain-lain Piutang reasuransi Piutang hasil investasi

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BEREKASI - Lanjutan

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

b. Pendapatan Sewa

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Tanah dan bangunan kantor	502.830.000	502.830.000

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan mendapatkan pendapatan hasil investasi atas sewa tanah dan bangunan dari entitas anak untuk periode satu tahun.

c. Utang Lain-lain

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Utang penyelesaian liability	15.048.380.256	52.329.294.460

Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 mempunyai kewajiban pada entitas anak atas penyelesaian klaim Perseroan.

d. Biaya yang Masih Harus Dibayar

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Utang administrative service only (ASO)	759.463.469	5.870.312.811

Merupakan kewajiban Perseroan kepada entitas anak atas tagihan administrative service only (ASO) per 31 Desember 2023 dan 2022.

e. Piutang Reasuransi

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Piutang reasuransi	753.748.558	-

Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 mempunyai tagihan reasuransi pada entitas anak.

37. KONTRAK REASURANSI

Dalam rangka manajemen risiko atas pertanggungan asuransi yang bernilai besar dan mempunyai risiko khusus, Perusahaan mengadakan kontrak reasuransi baik yang bersifat proporsional maupun non proporsional dengan beberapa perusahaan asuransi dan reasuransi dalam negeri dan luar negeri. Program reasuransi untuk tahun 2023, adalah sebagai berikut:

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. KONTRAK REASURANSI - Lanjutan

1. Program Reinsurance Treaty Proporsional

a. Konvensional

Program treaty untuk setiap kerugian dan setiap risiko				
Jenis Pertanggungan	Retensi Sendiri	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah
<u>SURPLUS</u>				
Kebakaran	-	280.000.000.000	-	280.000.000.000
Rangka Kapal	-	10.000.000.000	-	10.000.000.000
General Accident				
- Section I	-	40.000.000.000	-	40.000.000.000
- Section II	-	230.000.000.000	-	230.000.000.000
Sertifikat penjaminan / Surety bond	-	20.000.000.000	-	20.000.000.000
Pembiayaan modal kerja	-	42.000.000.000	-	42.000.000.000

Program treaty untuk setiap kerugian dan setiap risiko				
Jenis Pertanggungan	Retensi Sendiri	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah
<u>QUOTA SHARE</u>				
Kebakaran	18.000.000.000	2.000.000.000	-	20.000.000.000
Rekayasa	15.000.000.000	35.000.000.000	-	50.000.000.000
General Accident				
- Section I	18.300.000.000	1.700.000.000	-	20.000.000.000
- Section II	18.300.000.000	1.700.000.000	-	20.000.000.000
Rangka Kapal	4.500.000.000	5.500.000.000	-	10.000.000.000
Pengangkutan	11.250.000.000	13.750.000.000	-	25.000.000.000
Sertifikat penjaminan / Surety bond	8.000.000.000	14.000.000.000	-	20.000.000.000
Pembiayaan modal kerja	4.000.000.000	4.000.000.000	-	8.000.000.000
Credit Productive & Investment	3.000.000.000	7.000.000.000	-	10.000.000.000
Kredit Konsumtif	2.700.000.000	300.000.000	-	3.000.000.000

PT ASURANSI SANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. KONTRAK REASURANSI - Lanjutan

1. Program Reasuransi Treaty Proportional - Lanjutan

h. Syariah

Program treaty untuk setiap kerugian dan setiap risiko				
Jenis Pertanggungan	Retensi Sendiri	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah
<u>SURPLUS</u>				
Kebakaran	2.000.000.000	120.000.000.000	-	122.000.000.000
Pengangkutan	1.000.000.000	50.000.000.000	-	51.000.000.000
Rangka Kapal	1.000.000.000	50.000.000.000	-	51.000.000.000
General Accident				
- Section 1 (Other GA)	1.000.000.000	10.000.000.000	-	11.000.000.000
- Section 11 (CIS/CIT)	2.000.000.000	120.000.000.000	-	122.000.000.000
Rekayasa	1.000.000.000	30.000.000.000	-	31.000.000.000
Motor Vehicle (including HE)	1.000.000.000	3.000.000.000	-	4.000.000.000
Proteksi Pembiayaan	1.000.000.000	4.000.000.000	-	5.000.000.000
Program treaty untuk setiap kerugian dan setiap risiko				
Jenis Pertanggungan	Retensi Sendiri	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah
<u>QUOTA SHARE</u>				
Proteksi Pembiayaan	900.000.000	1.000.000.000	-	1.900.000.000
Kesehatan	275.000.000	500.000.000	-	775.000.000
Travel	750.000.000	1.500.000.000	-	2.250.000.000

2. Program Reasuransi Treaty Non Proportional Whole Account

a. Konvensional

Program treaty untuk setiap kerugian dan setiap risiko				
Jenis Pertanggungan	Retensi Sendiri	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah
<u>1st Layer (Working and Car XL)</u>				
Kebakaran	11.250.000.000	7.850.000.000	-	19.100.000.000
Rekayasa	11.250.000.000	7.850.000.000	-	19.100.000.000
General Accident	11.250.000.000	7.850.000.000	-	19.100.000.000

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37 KONTRAK REASURANSI - Lanjutan

2. Program Reasuransi Treaty Non Proportional Whole Account - Lanjutan

a. Konvensional - Lanjutan

Program treaty untuk setiap kerugian dan setiap risiko				
Jenis Pertanggungan	Retensi Sendiri	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah
2nd Layer (Catastrophe)				
Kebakaran	19.100.000.000	21.700.000.000	-	40.800.000.000
Rekayasa	19.100.000.000	21.700.000.000	-	40.800.000.000
3rd Layer (Catastrophe)				
Kebakaran	40.800.000.000	60.000.000.000	-	100.800.000.000
4th Layer (Catastrophe)				
Kebakaran	100.800.000.000	25.000.000.000	-	125.800.000.000

b. Syariah

Program treaty untuk setiap kerugian dan setiap risiko				
Jenis Pertanggungan	Retensi Sendiri	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah
1st Layer	250.000.000	750.000.000	-	1.000.000.000
2nd Layer	1.000.000.000	1.000.000.000	-	2.000.000.000
3rd Layer	2.000.000.000	4.000.000.000	-	6.000.000.000
4th Layer	6.000.000.000	14.000.000.000	-	20.000.000.000
5th Layer	20.000.000.000	30.000.000.000	-	50.000.000.000
6th Layer	50.000.000.000	50.000.000.000	-	100.000.000.000

3. Program Reasuransi Treaty Non Proportional Motor Vehicle & Heavy Equipment

a. Konvensional

Program treaty untuk setiap kerugian dan setiap risiko				
Jenis Pertanggungan	Retensi Sendiri	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah
1st Layer (Working & Cat)	500.000.000	500.000.000	-	1.000.000.000
2nd Layer (Working & Cat)	1.000.000.000	1.000.000.000	-	2.000.000.000
3rd Layer (Catastrophe)	2.000.000.000	3.000.000.000	-	5.000.000.000
4th Layer (Catastrophe)	5.000.000.000	10.000.000.000	-	15.000.000.000

PT ASURANSI BANOUN ASKRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

37. KONTRAK REASURANSI - Lanjutan

3. Program Reasuransi Treaty Non Proporsional Motor Vehicle & Heavy Equipment - Lanjutan

a. Syarat

Program treaty untuk setiap kerugian dan setiap risiko				
Jenis Pertanggungan	Retensi Sendiri	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah
1st Layer	100.000.000	900.000.000	-	1.000.000.000
2nd Layer	1.000.000.000	4.000.000.000	-	5.000.000.000

4. Program Reasuransi Treaty Non Proporsional Sublayer

a. Konvensional

Program treaty untuk setiap kerugian dan setiap risiko				
Jenis Pertanggungan	Retensi Sendiri	Dalam Negeri	Luar Negeri	Jumlah
1st Layer (Working and Car XL)				
Kebakaran	2.500.000.000	2.500.000.000	-	5.000.000.000
Rekayasa	2.500.000.000	2.500.000.000	-	5.000.000.000
General Accident	2.500.000.000	2.500.000.000	-	5.000.000.000
Rangka Kapal	2.500.000.000	2.500.000.000	-	5.000.000.000
2nd Layer (Catastrophe)				
Kebakaran	5.000.000.000	8.250.000.000	-	13.250.000.000
Rekayasa	5.000.000.000	8.250.000.000	-	13.250.000.000
General Accident	5.000.000.000	8.250.000.000	-	13.250.000.000
Rangka Kapal	5.000.000.000	8.250.000.000	-	13.250.000.000

PT ABURAHM BANGUN ASHIRIDA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Lanjutan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

30. MAJLIS UNDERSKRIFTING KONSOLIDASIAN

PERJAJATAN UNDERSKRIFTING

Keterangan	Cat.	Kelembagaan	Kontribusi	Mendukung Bumihayu	Revisi/Revisi	Pengembangan	Jumlah Pengembangan (Surplus/Buruk)	Aset	Jumlah 2023	Jumlah 2022
Pembelian Peralat										
Peralat Komputer		124.374.323,041	2.259.357.854	41.531.847.265	13.050.401.254	45.231.475.035	10.345.212.061	5.403.488.856,064	5.701.525.377,067	6.125.502.356,895
Peralat Tulis Lainnya		0.417.588.555	1.258.225.720	1.307.580.373	1.540.372.849	381.863.785	5.278.463.988	3.678.838.231	30.172.010,454	18.892.184,839
Jumlah Peralat	28	124.791.911,596	3.517.583,574	42.839.427,638	14.590.774,103	45.613.338,820	15.623.676,049	9.082.327,295	5.731.697,527,521	6.144.394,491,734
Peralat Restorasi	29	144.301.028,851	(2.858.362,598)	12.800.757.251	18.304.693,088	117.175,161.371	17.138.376,022	18.360.562,420	171.362.864,048	184.140.775,183
Jumlah Peralat Tambahan Sederhana		268.092.940,442	1.459.920,972	55.640.184,889	36.609,183,176	34.488,162,752	32.276,602,047	36.721,124,840	182.725,228,096	2.307.643,781,342
Pemenuhan (Konsolidasi) Ganti/Baru Peralat dan Ganti/Baru Peralat		(10.371.720,374)	(10.751,830)	(1.212,338,889)	(1.549,130,928)	4.108,382	93.385,858	(5.141,407,072,357)	(850.540,820,074)	(250.130,552,280)
Jumlah Pemenuhan Ganti/Baru Peralat		70.021,219,068	1.449,169,142	54.427,846,000	35.059,052,250	38,600,265,121	12,771,607,863	31,173,632,488	182,121,047,973	2,056,913,239,062

REVISI UNDERSKRIFTING

Keterangan	Cat.	Kelembagaan	Kontribusi	Mendukung Bumihayu	Revisi/Revisi	Pengembangan	Jumlah Pengembangan (Surplus/Buruk)	Aset	Jumlah 2023	Jumlah 2022
Pembelian Peralat										
Peralat Komputer		124.374.323,041	2.259.357.854	41.531.847.265	13.050.401.254	45.231.475.035	10.345.212.061	5.403.488.856,064	5.701.525.377,067	6.125.502.356,895
Peralat Tulis Lainnya		0.417.588.555	1.258.225.720	1.307.580.373	1.540.372.849	381.863.785	5.278.463.988	3.678.838.231	30.172.010,454	18.892.184,839
Jumlah Peralat	28	124.791.911,596	3.517.583,574	42.839.427,638	14.590.774,103	45.613.338,820	15.623.676,049	9.082.327,295	5.731.697,527,521	6.144.394,491,734
Peralat Restorasi	29	144.301.028,851	(2.858.362,598)	12.800.757.251	18.304.693,088	117.175,161.371	17.138.376,022	18.360.562,420	171.362.864,048	184.140.775,183
Jumlah Peralat Tambahan Sederhana		268.092.940,442	1.459.920,972	55.640.184,889	36.609,183,176	34.488,162,752	32.276,602,047	36.721,124,840	182.725,228,096	2.307.643,781,342
Pemenuhan (Konsolidasi) Ganti/Baru Peralat dan Ganti/Baru Peralat		(10.371.720,374)	(10.751,830)	(1.212,338,889)	(1.549,130,928)	4.108,382	93.385,858	(5.141,407,072,357)	(850.540,820,074)	(250.130,552,280)
Jumlah Pemenuhan Ganti/Baru Peralat		70.021,219,068	1.449,169,142	54.427,846,000	35.059,052,250	38,600,265,121	12,771,607,863	31,173,632,488	182,121,047,973	2,056,913,239,062
Keterangan	Cat.	Kelembagaan	Kontribusi	Mendukung Bumihayu	Revisi/Revisi	Pengembangan	Jumlah Pengembangan (Surplus/Buruk)	Aset	Jumlah 2023	Jumlah 2022
Pembelian Peralat										
Peralat Komputer		124.374.323,041	2.259.357.854	41.531.847.265	13.050.401.254	45.231.475.035	10.345.212.061	5.403.488.856,064	5.701.525.377,067	6.125.502.356,895
Peralat Tulis Lainnya		0.417.588.555	1.258.225.720	1.307.580.373	1.540.372.849	381.863.785	5.278.463.988	3.678.838.231	30.172.010,454	18.892.184,839
Jumlah Peralat	28	124.791.911,596	3.517.583,574	42.839.427,638	14.590.774,103	45.613.338,820	15.623.676,049	9.082.327,295	5.731.697,527,521	6.144.394,491,734
Peralat Restorasi	29	144.301.028,851	(2.858.362,598)	12.800.757.251	18.304.693,088	117.175,161.371	17.138.376,022	18.360.562,420	171.362.864,048	184.140.775,183
Jumlah Peralat Tambahan Sederhana		268.092.940,442	1.459.920,972	55.640.184,889	36.609,183,176	34.488,162,752	32.276,602,047	36.721,124,840	182.725,228,096	2.307.643,781,342
Pemenuhan (Konsolidasi) Ganti/Baru Peralat dan Ganti/Baru Peralat		(10.371.720,374)	(10.751,830)	(1.212,338,889)	(1.549,130,928)	4.108,382	93.385,858	(5.141,407,072,357)	(850.540,820,074)	(250.130,552,280)
Jumlah Pemenuhan Ganti/Baru Peralat		70.021,219,068	1.449,169,142	54.427,846,000	35.059,052,250	38,600,265,121	12,771,607,863	31,173,632,488	182,121,047,973	2,056,913,239,062

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A S E T	2023	2022
Kas dan bank	238.094.722.788	294.840.471.690
Piutang premi - bersih	228.643.554.123	134.444.278.248
Piutang hasil investasi	7.892.998.415	8.377.914.311
Piutang reasuransi - bersih	388.820.977.785	128.273.931.337
Deposito berjangka	1.281.497.123.845	1.200.349.239.895
Efek ekuitas yang diperdagangkan	9.125.175.000	5.149.875.000
Efek utang tersedia untuk dijual	495.283.123.518	428.921.364.001
Aset reasuransi	605.039.107.299	707.710.729.842
Investasi pada properti, setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 19.702.545.378 dan Rp 17.848.980.960	51.777.491.786	53.631.138.202
Biaya dibayar di muka	28.298.825.154	94.844.940.262
Penyerahan langsung	321.060.889.948	283.650.998.585
Piutang lain-lain	46.873.138.503	49.720.882.709
Aset tidak guna	740.721.012	1.258.809.897
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 109.631.240.407 dan Rp 100.946.275.006	117.172.872.126	113.891.216.279
Aset tak berwujud	821.746.877	213.390.082
Aset lain-lain	9.253.197.692	12.838.854.035
Aset pajak tangguhan	34.137.316.131	30.234.119.147
JUMLAH ASET	3.882.435.061.781	3.650.161.941.182

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN POSISI KEUANGAN - Lanjutan
ENTITAS INDUK
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LIABILITAS DAN EKUITAS	2023	2022
LIABILITAS		
Utang klaim	42.229.143.991	140.698.293.807
Utang reasuransi	9.972.036.226	71.858.697.546
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	58.030.310.814	47.053.865.353
Premi yang belum merupakan pendapatan	56.438.957.232	49.897.395.670
Utang komisi	47.087.756.951	39.881.300.815
Utang pajak dan zakat	12.116.989.517	6.155.895.033
Biaya yang masih harus dibayar	17.802.070.538	15.034.188.804
Estimasi stabilitas klaim	178.123.333.781	185.501.091.400
Liabilitas kontrak asuransi jangka panjang	2.222.623.428.924	1.805.264.580.344
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	43.810.913.924	46.873.199.711
Utang lain-lain	94.245.446.475	156.540.442.407
JUMLAH LIABILITAS	2.781.458.480.455	2.547.358.922.099
EKUITAS		
Modal saham,	318.950.000.000	312.530.000.000
Modal dasar - 40.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 per lembar. Pada tahun 2023 dan 2022 telah ditempatkan dan disetor penuh masing-masing sebesar 31.895 dan 31.253 lembar saham.		
Tillipen modal disetor (saham)	5.770.000.000	6.420.000.000
Cadangan Khusus	110.000.000	110.000.000
Tambahan modal disetor (Tax Amnesty)	18.285.906.804	18.285.906.804
Penghasilan komprehensif lain	21.875.753.319	4.089.859.910
Saldo laba		
Sudah ditentukan penggunaannya	603.703.896.125	568.366.000.449
Belum ditentukan penggunaannya	112.281.304.978	93.020.251.779
JUMLAH EKUITAS	1.080.876.861.326	1.002.893.019.042
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.862.335.341.781	3.550.181.941.132

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN LABA RUGI
ENTITAS INDUK
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2 0 2 3	2 0 2 2
PENDAPATAN UNDERWRITING		
Pendapatan premi		
Premi bruto	5.512.190.530.264	5.219.577.857.385
Premi reasuransi	(635.207.913.562)	(749.876.658.173)
Akses atas premi yang belum merupakan pendapatan	(501.080.474.244)	(181.877.284.689)
Jumlah pendapatan underwriting	4.375.892.142.458	4.287.823.924.523
BEBAN UNDERWRITING		
Beban klaim		
Klaim bruto	(3.548.085.386.085)	(3.295.891.565.184)
Klaim reasuransi	525.893.268.824	446.099.690.304
Mutasi estimasi liabilitas klaim	(37.111.800.431)	(8.059.862.480)
Jumlah beban klaim	(3.059.293.917.692)	(2.855.851.727.260)
Beban komisi bersih	(842.900.874.602)	(965.685.392.946)
Beban underwriting rupa-rupa	(50.873.130.183)	(56.027.916.746)
Jumlah beban underwriting	(3.953.057.924.477)	(3.877.555.038.952)
NASIL UNDERWRITING	412.844.217.981	410.258.887.571
Hasil investasi	134.441.827.503	102.839.671.682
Beban usaha	(417.250.538.818)	(405.241.279.168)
LABA USAHA	130.035.506.668	107.857.280.085
Pendapatan (beban) lain-lain	(10.148.781.825)	(4.183.129.291)
Pengaruh pajak final dari hasil investasi	(10.200.219.270)	(8.353.806.696)
LABA SEBELUM PAJAK	109.686.507.573	95.320.344.098
Pajak penghasilan :		
Pajak kini	(1.238.214.760)	(886.536.640)
Pajak tangguhan	3.831.012.166	(1.413.555.658)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	112.281.304.979	93.020.251.779

PT ASURANSI BANGUN ASKREDA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
ENTITAS INDUK

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN	<u>112.281.304.878</u>	<u>93.020.231.778</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang dapat direklasifikasi ke laporan laba rugi		
Investasi tersedia untuk dijual	10.050.821.060	(325.274.440)
Pos yang tidak dapat direklasifikasi ke laporan laba rugi :		
Pengukuran kembali imbalan pascakerja	(326.112.374)	2.555.325.402
Pengaruh pajak penghasilan	72.184.723	(514.058.552)
LABA KOMPREHENSIF	<u>130.076.188.387</u>	<u>84.736.244.188</u>

PT ASURANSI BANGUN ASRI PDA
LABORAN PERUBAHAN EMUTAS
ENTITAS INDUK

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Tipe Modal	Cadangan Umum	Penghasilan Komprehensif Lain	Beban Dikurusi Penjualan	Beban Dikurusi Penjualan
Saldo per 31 Desember 2021	287.539.400.000	18.285.806.804	15.020.000.000	110.000.000	9.368.657.308	545.971.753.203	72.364.529.566
Tambahan modal disetor	15.020.000.000	-	-	-	-	-	-
Tipe modal disetor	-	-	(15.000.000.000)	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-	(40.436.921.428)	-
Cadangan umum	-	-	-	-	-	22.434.347.240	(22.434.347.240)
Yayasan Kesejahteraan Pegawai Asri Pda	-	-	-	-	-	11.447.370.790	-
Labas (rup) belum direalisasi atau investasi	-	-	-	-	-	-	(1.447.370.790)
Labas untuk dijual	-	-	-	-	(325.274.449)	-	(325.274.449)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	2.555.325.402	-	2.555.325.402
Pajak penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	(514.098.552)	-	(514.098.552)
Labas bersih tahun 2021	-	-	-	-	-	93.030.251.779	93.030.251.779
Saldo per 31 Desember 2022	312.559.400.000	18.285.806.804	0.000.000.000	110.000.000	4.098.657.810	545.971.753.203	1.062.803.018.042
Tambahan modal disetor	0.420.000.000	-	-	-	-	-	-
Tipe modal disetor	-	-	(0.420.000.000)	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-	(55.812.151.067)	-
Cadangan umum	-	-	-	-	-	35.347.598.676	(35.347.598.676)
Yayasan Kesejahteraan Pegawai Asri Pda	-	-	-	-	-	11.660.405.036	-
Labas (rup) belum direalisasi atau investasi	-	-	-	-	-	-	(1.660.405.036)
Labas untuk dijual	-	-	-	-	(18.090.821.080)	-	(18.090.821.080)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	(328.112.324)	-	(328.112.324)
Pajak penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	72.184.723	-	72.184.723
Labas bersih tahun 2022	-	-	-	-	-	112.281.304.978	112.281.304.978
Saldo per 31 Desember 2023	312.979.400.000	18.285.806.804	0.000.000.000	110.000.000	21.475.753.319	603.703.058.123	1.060.870.661.826

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Diuraikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus kas masuk		
Penerimaan premi langsung	5.324.230.439.987	5.394.968.655.994
Penerimaan premi tidak langsung	10.997.668.873	17.306.894.000
Penerimaan klaim recovery	373.789.057.386	408.512.896.111
Penerimaan lain	49.137.118.238	224.113.246.348
Jumlah arus kas masuk	5.755.154.282.493	6.044.981.682.453
Arus kas keluar		
Pembayaran premi asuransi	(601.412.895.941)	(595.361.490.518)
Pembayaran komisi	(856.878.308.720)	(1.022.489.746.593)
Pembayaran klaim	(3.568.788.098.162)	(3.180.822.614.467)
Pembayaran beban usaha	(371.598.852.765)	(368.386.657.727)
Pembayaran pajak	(58.658.165.489)	(54.834.748.420)
Pembayaran lain	(130.929.882.084)	(47.054.922.240)
Jumlah arus kas keluar	(8.679.263.771.142)	(6.269.779.179.963)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	76.880.511.341	776.122.612.490
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus kas masuk		
Pencairan / penjualan investasi	762,018,918,311	1,645,883,738,702
Hasil investasi deposito	29,928,962,148	24,621,171,396
Hasil investasi obligasi	26,833,730,614	13,779,944,085
Hasil penjualan aset keuangan	-	4,789,172,384
Hasil investasi properti	1,684,342,119	1,045,203,563
Hasil penjualan aset tetap	71,110,608	579,600
Jumlah arus kas masuk	620,518,063,800	1,690,039,809,710
Arus kas keluar		
Penempatan investasi	(891,225,762,261)	(2,209,413,162,289)
Pembelian aset tetap	(14,258,975,737)	(4,841,492,008)
Pembelian aset lain	-	(1,400,000,000)
Pembelian aset lain	(717,435,000)	(126,893,000)
Jumlah arus kas keluar	(908,202,172.998)	(2,215,881.347.289)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	(65.684,109,198)	(525,841,537,688)

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN ARUS KAS - Lanjutan
ENTITAS INDUK
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dari 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus kas masuk		
Tambahan modal disetor	5.770.000.000	6.420.000.000
Jumlah arus kas masuk	<u>5.770.000.000</u>	<u>6.420.000.000</u>
Arus kas keluar		
Pembayaran dividen	(55.812.151.087)	(48.488.921.468)
Jumlah arus kas keluar	<u>(55.812.151.087)</u>	<u>(48.488.921.468)</u>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>(50.042.151.087)</u>	<u>(42.068.921.468)</u>
Kemalkan (penurunan) bersih kas dan bank	(56.835.748.924)	208.214.053.437
Saldo kas dan bank awal periode	284.840.471.680	86.828.418.253
Saldo Kas dan Bank Akhir Periode	<u>238.064.722.766</u>	<u>284.840.471.680</u>



**PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
DAN ENTITAS ANAK**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	i – ii
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3 – 4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	5
Laporan Arus Kas Konsolidasian	6 – 7
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8 – 88

Informasi Keuangan Tambahan:

Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	i – ii
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk	iii – iv
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	v
Laporan Arus Kas Entitas Induk	vi – vii



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA DAN ENTITAS ANAK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama	: Nonot Haryoto
Alamat Kantor	: Askrida Tower Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120
Nomor Telepon	: (021) 819-1212
Jabatan	: Direktur Utama
2. Nama	: Wawan Mulyawan
Alamat Kantor	: Askrida Tower Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120
Nomor Telepon	: (021) 819-1212
Jabatan	: Direktur

menyatakan bahwa

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pengajuan laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Bangun Askrida ("Perseroan") dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak telah dibuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan dan Entitas Anak

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, 28 Maret 2024

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA

Direktur Utama

Direktur

(Nonot Haryoto)

(Wawan Mulyawan)

KANTOR PESAT :

ASKRIDA TOWER, Jl. Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur 13120
Telp (021) 8191212 (Heming) Fax (021) 29827215, 29827216, 29827217 Email : info@askrida.co.id
Anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia No. B. 0018.2002

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

License No.: 06K063-3-0260/A11-108-1660-2-1/11/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direktur PT Asuransi Bangun Asuransi dan Fasilitas Asuransi

Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian**Delayed**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Asuransi Buhari Askrada dan Entitas Anak ("Terp"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basic Utensils

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Andil & team

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam memformulasikan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

1) di antara warna yang teridentifikasi dalam album kami diberikan sebagai berikut

Penjualan atas pembelian kontrak asuransi

Padangan teknis asuransi yaitu cadangan klaim (termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (BNK)) dan cadangan premi. Pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan teknis asuransi signifikan terhadap jumlah liabilitas Grup. Jumlah liabilitas asuransi dan aset reasuransi adalah sebesar Rp3.115.355.641.220 dan Rp1709.732.468.148, seperti yang dijelaskan dalam catatan 12 pada laporan keuangan konsolidasian, penentuan cadangan melibatkan pertimbangan yang signifikan atas hasil di masa depan yang tidak pasti terkait dengan pembayaran kerugian dan perubahan ekspansi risiko bisnis, termasuk pertimbangan penuh atas kewajiban pemegang polis jangka panjang.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan cadangan teknis asuransi **dibuatkan berdasarkan** asumsi-asumsi aktuarial yang ditetapkan oleh Grup termasuk hasil investasi, tingkat **kebakaran**, **kecelakaan** **dan** inflasi. Asumsi-asumsi ini ditentukan berdasarkan pengalaman aktual dan studi **prospektif**.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan 1)

Karena ketidakpastian estimasi yang signifikan terkait dengan penentuan cadangan teknis asuransi, maka hal ini kami anggap sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama

Kami memahami dan telah mengevaluasi penilaian atas liabilitas kontrak asuransi, dimana kami telah melibatkan pakar aktuaris independen dan melakukan pengujian substantif. Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespons Hal Audit Utama ini:

- Karena ada area yang membutuhkan pertimbangan manajemen dengan estimasi dan Enteria perhitungan cadangan teknisnya, maka kami menganggap liabilitas asuransi dan aset reasuransi sebagai hal audit utama.
- Kami telah melaksanakan prosedur memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi pengendalian internal Grup yang relevan berhubungan dengan liabilitas asuransi dan aset reasuransi.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi aktuaris serta pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Kami memeriksa dan menguji metodologi dan asumsi atas liabilitas kontrak asuransi termasuk konsistensi penerapan asumsi dalam perhitungan, seperti: tingkat diskonto, inflasi, tingkat lapse dan alokasi biaya.
- Secara sampel, kami melakukan perhitungan matematis ulang secara independen atas *Unreal Premium Reserve (UPR)* dan aset reasuransi pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan PSAK 62, "Kontrak Asuransi" (PSAK 62).
- Kami melakukan pemeriksaan atas perhitungan matematis, berdasarkan sampel, atas nilai cadangan kotor dan bersih terhadap klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (*IBNR*) dan metodologi yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan PSAK 62.
- Kami melakukan perhitungan matematis ulang secara independen atas Pengujian Kecukupan Liabilitas (*Liability Adequacy Testing*) sesuai dengan PSAK dan melakukan pemeriksaan terhadap kecukupan cadangan teknis pada tanggal 31 Desember 2023.
- Kami melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan akurasi data yang digunakan untuk menghitung cadangan teknis dengan melakukan rekonsiliasi antara laporan aktuaris dengan angka dalam dokumen pendukung pada tanggal 31 Desember 2023.

Perkiraan Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada catatan 19 atas akun Utang Klaim pada laporan keuangan terlampir, bahwa Grup memiliki perjanjian pembayaran tuntutan klaim kepada pihak-tertanggung yang terpisah dari prosedur penangghian klaim pada umumnya. Kami tidak dapat memastikan besaran risiko atas tidak terlutungya penanganan klaim tersebut didalam perhitungan cadangan teknis yang dilakukan.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak mencakup laporan keuangan konsolidasian dan laporan audit. Kami, Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, ~~dalam melakukannya,~~ mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkesistensian ~~material dengan~~ laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung ~~kelebihan pengujian material~~.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kelebihan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan masalah tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Insitut Akuntan Publik Indonesia.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (lanjutan 2)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan mengestimasi basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intent untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak ada alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan audit yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merencanakan dan melaksanakan prosedur audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, penemuan, penghindaran secara sengaja, penyajian salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan kerugian signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencukupi penyajian wajar.



S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

SUKAPASUMBER KIP-45-KM/2012
SEKAMPAJANG KIP-45-KM/2013

Member of
INTSIRA INTERNATIONAL®

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (rangkai 1)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanannya terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode lima dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami mengarahkan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali perubahan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan dieksploitasi secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Kantor Akuntan Publik
S. Mannan, Ardiansyah & Rekan



Nur Eko Saputra, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP. 1060

21 Maret 2024

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Per 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A S E T	Catatan	2023	2022
Kas dan bank	3.(8), 7	371.846.351.919	389.358.067.780
Pinjaman	3.(23), 8	257.342.528.144	165.129.768.504
Pinjaman hasil investasi	3.(9), 9	12.272.380.000	11.384.185.562
Pinjaman reasuransi	3.(13), 10, 36	405.729.519.418	143.348.578.524
Deposito berjangka	3.(4), 3.(5), 11a, 11b	2.024.218.123.645	1.681.050.238.635
Efek ekuitas yang diperdagangkan	3.(4), 3.(5), 11c	9.125.175.000	5.149.875.000
Unit penyertaan reksa dana	3.(4), 3.(5), 11d	2.851.567.552	2.819.898.555
Efek utang dimiliki hingga jatuh tempo	3.(4), 3.(5), 3.(22), 11e	155.055.172.201	98.153.535.745
Efek utang tersedia untuk dijual	3.(4), 3.(8), 3.(22), 11f	635.871.773.519	512.263.063.099
Aset reasuransi	3.(12), 3.(13), 3.(21), 12	709.732.468.148	753.851.027.285
Penyisihan nilai beban di muka	12a	-	96.219.235.553
Investasi pada properti, setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 19.702.540.376 dan Rp 17.848.900.360 tahun 2023 dan 2022.	3.(7), 11h	51.777.481.788	53.831.138.202
Biaya dibayar di muka	3.(10), 13	21.939.090.480	97.284.929.536
Penyerahan langsung	11g	2.444.657.126	2.444.657.126
Pinjaman lain-lain	14	47.420.371.567	53.454.747.401
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 1.921.960.959 dan Rp 108.546.545.248 tahun 2023 dan 2022.	3.(11), 15	122.847.408.902	119.147.668.140
Aset hak gada	16	0.061.415.374	2.894.984.983
Aset tak berwujud	3.(16), 17	3.238.934.273	2.204.806.812
Aset pajak tangguhan	3.(14), 21d	35.880.852.425	31.465.060.205
Aset lain-lain	18	10.860.053.328	14.071.858.471
JUMLAH ASET		<u>4.693.493.338.787</u>	<u>4.235.338.107.878</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan